Annual Report
2024
Laporan Tahunan

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Navigating Trade Growth Through Innovative Port Services

Menavigasi Pertumbuhan Perdagangan Melalui
Layanan Jasa Kepelabuhanan yang Inovatif



PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan tema "Navigating Trade through Innovative Port Service atau Menavigasi Pertumbuhan Perdagangan Melalui Layanan Jasa Kepelabuhanan yang Inovatif". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk serta masa depan keberlanjutan bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Jasa Armada Indonesia Tbk serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi PT Jasa Armada Indonesia Tbk yaitu www.ipcmarine.co.id.

Welcome to the Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, themed "Navigating Trade through Innovative Port Service." This theme was selected based on thorough analysis and evaluation of the facts and business developments of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as well as the future sustainability of PT Jasa Armada Indonesia Tbk's business.

This annual report contains statements regarding the financial condition, operational results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which are categorized as forward-looking statements under applicable laws and regulations, except for matters that are historical in nature. These forward-looking statements carry inherent risks and uncertainties, and actual developments may differ materially from those reported.

The forward-looking statements in this Annual Report are made based on various assumptions concerning the current and future conditions of PT Jasa Armada Indonesia Tbk and the business environment in which the Company operates. These statements are not guarantees of future performance, as actual future results may differ due to factors beyond the control of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

This Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk is presented in two languages, namely Indonesian and English, using readable fonts and printed with high-quality standards. The Annual Report can be accessed and downloaded from the official website of PT Jasa Armada Indonesia Tbk at www.ipcmarine.co.id.

Penjelasan Tema

Theme Explanation



Navigating Trade Growth Through Innovative Port Services

Menavigasi Pertumbuhan Perdagangan Melalui Layanan Jasa Kepelabuhanan yang Inovatif

PT Jasa Armada Indonesia Tbk berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas layanan maritim melalui strategi yang tepat dan terarah. Sebagai pemimpin dalam industri jasa maritim, IPCM berfokus pada navigasi strategis yang tidak hanya memastikan kelancaran operasional tetapi juga menghadirkan solusi unggul serta layanan jasa kepelabuhanan yang inovatif bagi pelanggan, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diwujudkan melalui komitmen IPCM dalam penerapan strategi Perusahaan yang berbentuk optimalisasi pelayanan, kesiapan armada dan crew, perawatan kapal serta peningkatan kerja sama dengan mitra, pembaharuan alat produksi dalam bentuk pembangunan kapal serta efektivitas pola kerja yang mengutamakan unsur keselamatan dalam pelayanan pemanduan penundaan kapal.

Sejalan dengan kinerja positif yang juga dicatatkan IPCM di 2024, IPCM optimis untuk dapat melampaui kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta tetap mempertahankan fundamental Perusahaan yang baik. Meskipun tantangan eksternal tetap ada, IPCM memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan berinovasi, didukung oleh strategi yang adaptif dan fokus pada keberlanjutan operasional. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2024 juga mencerminkan visi IPCM untuk mencapai pertumbuhan yang strategis guna memperluas dampak positif yang dapat diberikan, sehingga memperkokoh posisinya sebagai penyedia layanan maritim unggulan di Indonesia.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk is fully committed to continuously enhancing the quality of its maritime services through well-targeted and effective strategies. As a leader in the maritime service industry, IPCM focuses on strategic navigation that not only ensures smooth operations but also delivers superior solutions and innovative port services to its customers, partners, and all stakeholders. This is realized through IPCM's commitment to implementing corporate strategies that include service optimization, fleet and crew readiness, vessel maintenance, and strengthened partnerships, renewal of production tools through vessel construction and the adoption of effective work patterns that prioritize safety in pilotage and tugging services.

Aligned with the positive performance recorded by IPCM in 2024, the Company remains optimistic about surpassing previous achievements while maintaining strong business fundamentals. Despite ongoing external challenges, IPCM holds the potential to continue growing and innovating, supported by adaptive strategies and a strong focus on operational sustainability. Furthermore, the efforts made throughout 2024 reflect IPCM's vision of achieving strategic growth to expand its positive impact, thereby reinforcing its position as a leading maritime service provider in Indonesia.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2023

"Accelerating Trade Through Marine Collaboration"

Pada tahun 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengedepankan strategi bisnisnya pada kolaborasi di tengah persaingan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang semakin ketat saat ini. Selain itu, sebagai bagian dari ekosistem pelabuhan (Pelindo), IPCM juga memiliki peran dalam *accelerating trade* dengan dengan memfokuskan diri pada peningkatan nilai dari perluasan usaha yang dijalankan. Strategi ini diyakini akan semakin memantapkan posisi Perusahaan dalam merealisasikan visinya "menjadi penyedia jasa marine terdepan dalam ekosistem maritim indonesia serta global."

Tema "Accelerating Trade Through Marine Collaboration" menjadi refleksi dari IPCM yang terus memfokuskan diri pada kolaborasi dengan berbagai perusahaan lain yang memiliki izin sebagai badan usaha pelabuhan untuk memperlancar arus keluar masuk perdagangan yang dapat memberikan nilai tambah serta ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah proaktif ini, semakin mengokohkan kehadiran dan peran IPCM bagi kemajuan bangsa dan negara indonesia tercinta.

In 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk prioritized its business strategy on collaboration amid the increasingly intense competition among Port Business Entities (BUPs). Moreover, as part of the port ecosystem (Pelindo), IPCM also plays a vital role in accelerating trade by focusing on enhancing value through business expansion. This strategy is believed to further strengthen the Company's position in realizing its vision of "becoming the leading marine service provider within Indonesia's and the global maritime ecosystem."

The theme "Accelerating Trade Through Marine Collaboration" reflects IPCM's continued focus on collaboration with various companies licensed as port business entities, aiming to facilitate the flow of trade and create added value and a sustainable business ecosystem. Through these proactive steps, IPCM continues to solidify its presence and role in advancing Indonesia, our beloved nation.



2022

"Resilience and Optimistic in Facing Future Challenges"

Tema laporan tahunan ini adalah Tangguh dan Optimis Dalam Menghadapi Tantangan di Masa Depan, yang menggambarkan optimisme dan perjuangan Perusahaan dalam melewati masa-masa krisis sepanjang tahun 2022.

Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan bagi semua elemen masyarakat termasuk para pelaku usaha, tidak terkecuali bagi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Bagi IPCM, tahun-tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran bagi pengelolaan perusahaan untuk bertahan dan

The theme of this annual report is Resilience and Optimistic in Facing Future Challenges, which describes the optimism and struggles of the Company in getting through times of crisis throughout 2022.

The year 2022 is a year of revival for all elements of society including business people, with no exception for PT Jasa Armada Indonesia Tbk. For IPCM, the challenging years due to the COVID-19 pandemic provided valuable lessons for the management of the Company to survive and formulate the best strategy to get out of the crisis. The success of IPCM

merumuskan strategi yang tepat keluar dari krisis. Keberhasilan IPCM melewati masa-masa krisis tergambar dari pencapaian kinerja positif yang menggembirakan dan memiliki tren meningkat.

Keberhasilan tersebut berkat kerja sama yang baik seluruh jajaran manajemen dan pekerja IPCM dan didukung oleh kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap layanan bisnis yang dilakukan oleh IPCM. IPCM berkomitmen terus melangkah cepat menuju masa depan dengan melakukan berbagai rumusan strategis, inovasi pengembangan layanan yang kompetitif dan unggul, serta transformasi dan penguatan implementasi *Good Corporate Governance*. Hal ini bertujuan untuk semakin mengokohkan kehadiran dan peran IPCM bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

through times of crisis is reflected in the achievement of positive performance that is encouraging and has an increasing trend.

This success is due to the good cooperation of all levels of management and employees of IPCM and is supported by the trust of stakeholders in the business services carried out by IPCM. IPCM is committed to continuing to move forward towards the future by carrying out various strategic formulations and innovations in developing competitive and superior services, as well as transforming and strengthening the implementation of good corporate governance. This aims to further strengthen the presence and role of IPCM for the progress of our beloved nation and country of Indonesia.



2021

"Delivering Excellence For Environment, Social, and Governance"

Di tengah pemulihan ekonomi, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) berhasil menjaga pertumbuhan kinerja secara sehat, kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan Perusahaan mencatatkan kinerja yang sangat baik ini adalah hasil dari strategi transformasi yang telah disiapkan sejak pandemi COVID-19 melanda dan juga sebagai bukti bahwa fundamental bisnis Perusahaan sangat stabil.

Seperti halnya pada tahun 2020, di tahun 2021 ini seluruh pelaku usaha masih dilanda ketidakpastian akibat dari pandemi COVID-19. Dengan berbagai strategi yang dijalankan manajemen, Perusahaan tetap mampu bertumbuh dan bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Strategi dan adaptasi yang dijalankan Perusahaan dalam hal efektifitas dan efisiensi kinerja yang kesemuanya didorong dengan seluruh daya, upaya dan inovasi bersama, berhasil menjaga dan bahkan meningkatkan hasil usaha Perseroan.

In the midst of economic recovery, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) managed to maintain healthy, strong, and sustainable performance growth. The Company's success in recording this excellent performance is the result of the transformation strategy that has been prepared since the Covid-19 pandemic hit and also as proof that the Company's business fundamentals are very stable.

As in 2020, in 2021, all business players were hit by uncertainty from Covid-19 pandemic. With various strategies implemented by the management, the Company was able to grow and be even better than the previous year.

The strategies and adaptations implemented by the Company in terms of performance effectiveness and efficiency, all of which are driven by all the power, effort, and innovation together, have succeeded in maintaining and even improving the Company's business results.

Daftar Isi

Table of Content

2 **Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab**
Disclaimer

3 **Penjelasan Tema**
Theme Explanation

4 **Kesinambungan Tema**
Theme Continuity

6 **Daftar Isi**
Table of Content

8 **Sekilas Tentang IPCM**
IPCM's at a Glance

9 **Produk atau Jasa Utama dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan IPCM**
Main Product or Service and The Contribution Towards IPCM's Revenues

10 **Pencapaian Terbaik IPCM**
IPCM's Best Achievement

1 Kilas Kinerja 2024
2024 Performance

12 **Kinerja ESG IPCM**
IPCM's ESG Performance

16 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Important Financial Highlights

19 **Informasi Saham**
Stock Information

21 **Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar**
Information on Outstanding Bonds, Sharia Bonds (Sukuk), or Conversion Bond

21 **Informasi Sumber Pendanaan Lainnya**
Information on Other Source of Fundings

22 **Peristiwa Penting**
Significant Events

2 Laporan Manajemen
Management Report

41 **Laporan Dewan Komisaris**
Report of the Board of Commissioners

49 **Laporan Direksi**
Directors' Report

62 **Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Jasa Armada Indonesia Tbk**
Statement Letter of the Board of Commissioners Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk

63 **Surat Pernyataan Anggota Direktur tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Jasa Armada Indonesia Tbk**
Statement Letter of the Board of Directors Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk

3 Profil Perusahaan
Company Profile

66 **Informasi Umum dan Identitas Perusahaan**
General Information and Company Identity

69 **Riwayat Singkat Perusahaan**
Brief History of the Company

74 **Jejak Langkah**
Milestones

76 **Bidang Usaha**
Business Fields

80 **Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi**
Business Network and Operational Areas

82 **Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan**
Corporate Vision, Mission, and Culture

89 **Makna Logo Perusahaan**
Meaning of Company Logo

90 **Keanggotaan dalam Asosiasi**
Membership in Association

92 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

94 **Profil Dewan Komisaris**
Profile of the Board of Commissioners

100 **Dewan Komisaris**
The Board of Commissioners

101 **Profil Direksi**
Profile of the Board of Directors

106 **Direksi**
The Board of Directors

107 **Profil Pejabat Eksekutif**
Profile of Executive Officers

117 **Demografi Karyawan**
Employee Demographics

120 **Komposisi Pemegang Saham**
Shareholders Composition

123 **Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi**
Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors

125 **Informasi Pembelian/Penjualan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi**
Purchase/Sales Information of Company Shares by the Board of Commissioners and Directors

126 **Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan**
Information Regarding Main/Controlling Shareholders

127 **Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama**
List of Subsidiaries, Associate Entities, and Joint Ventures

128 **Struktur Grup**
Group Structure

129 **Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham**
Chronology of Share Listing Issuance and/or Listing

130 **Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya**
Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

131 **Lembaga dan/atau Profesi Penunjang**
Institutions and/or Supporting Professions

133 **Penghargaan dan Sertifikasi**
Awards and Certifications

4 Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

140 **Tinjauan Perekonomian**
Economic Review

146 **Tinjauan Operasional**
Operational Review

149 **Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha**
Performance Review by Business Segment

161 **Tinjauan Kinerja Keuangan**
Financial Performance Review

5 Fungsi Penunjangan Bisnis
Company Profile

202 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources

214 **Teknologi Informasi**
Information Technology

220 **Sistem Manajemen Mutu**
Quality Management System

6 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

226 **Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**
Corporate Governance Policy

232 **Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan**
Development of the Implementation of Good Corporate Governance within the Company

243 **Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik**
Good Corporate Governance Structure

286 **Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi**
Transparency Regarding Board of Commissioners and Directors

316 **Organ Pendukung Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Supporting Organ

347 **Organ Pendukung Direksi**
Supporting Organs of the Board of Directors

357 **Auditor Eksternal**
External Auditor

361 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System

364 **Manajemen Risiko**
Risk Management

372 **Perkara Hukum**
Legal Issues

372 **Sanksi Administrasi**
Administrative Sanctions

373 **Akses Informasi dan Data Perusahaan**
Information Access and Company Data

374 **Kode Etik**
Code of Conduct

379 **Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi**
Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies

384 **Kebijakan Pencegahan Insider Trading**
Insider Trading Prevention Policy

385 **Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa**
Goods and Services Procurement Policy

386 **Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Violation Reporting System

390 **Transparansi Praktik Bad Governance**
Transparency of Bad Governance Practices

391 **Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka**
Implementation of the Public Company Corporate Governance Guidelines

396 **Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan**
Implementation of Corporate Governance Guidelines

436 **Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecards**
Implementation of ASEAN Corporate Governance Scorecarda

7 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibilities

458 **Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**
Governance of Social and Environmental Responsibility

8 Laporan Keuangan
Financial Report

556 **Referensi Silang SEOJK No. 16 SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**
Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik



Sekilas Tentang IPCM

IPCM's at a Glance

Pemegang Saham
Vessel Service

- **PT Pelindo Jasa Maritim** 76,89%
- **PT Multi Terminal Indonesia** 0,11%
- **Masyarakat** | Public 23.00%

Produk dan Jasa
Products and Services

- **Jasa Pelayanan Kapal**
  Ship Services
- **Jasa Pengelolaan Kapal**
  Fleet Management Services
- **Jasa Pengangkutan dan Lainnya**
  Freight and Other Services



Bidang Usaha
Business Line

Penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
Providing and operating vessels services, passengers, goods, and port-related activities.

Wilayah Operasi
Operating Areas

11 Pelabuhan Umum Pelindo Regional 2, 7 Pelabuhan/TUKS/Tersus/Perairan, 3 Join Operation, 3 KSO.
11 Pelindo Regional 2 Public Ports, 7 Ports/ TUKS/Tersus/Waters, 3 Join Operation, 3 KSO.

"disajikan selengkapnya pada bab Profil Perusahaan dibagian Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi dalam Laporan Tahunan ini .
"presented in full in the Company Profile in the Business Network and Operational Area of this Annual Report.

Produk atau Jasa Utama dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan IPCM

Main Product or Service and The Contribution Towards IPCM's Revenues

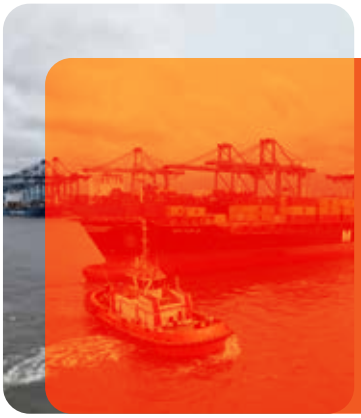

Jasa Pelayanan Kapal
Vessel Services

Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar Pelabuhan, dalam hal ini Produk atau Jasa Utama Perusahaan dalam Pelayanan Jasa Kapal adalah meliputi :

1. Jasa Tunda
2. Jasa Pandu
3. Jasa Pengelolaan Kapal
4. Jasa Pengangkutan dan Lainnya

Vessel Service is an operational support for vessels from port entry to departure and in this regard, the Company's main products or services in Marine Services include:

1. Tug Services
2. Pilotage Services
3. Vessel Management Services
4. Transportation and Other Services



Jasa Pengelolaan Kapal
Fleet Management Service

Merupakan kegiatan usaha Perusahaan bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

Fleet Management Service is the Company's business activity in collaboration with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the management and maintenance of the pilotage boat used for the crew mobilization in carrying out vessel pilotage services throughout the water area of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

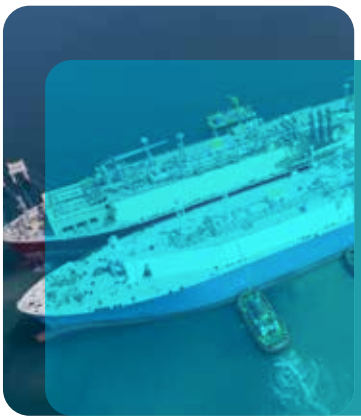

Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Freight and Other Service

Merupakan kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah Pelabuhan, serta menjadi salah satu segmen Produk atau Jasa Utama Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mengelola layanan penyewaan kapal sebagai bagian dari diversifikasi portofolio jasanya.

A Company's business in transporting materials or goods and production outputs between port areas, and it serves as one of the Company's main product or service segments. In addition, the Company also manages vessel chartering services as part of its service portfolio diversification.

Pencapaian Terbaik IPCM

IPCM's Best Achievement

Kinerja Keuangan

Financial Performaznce

Pendapatan
Revenues

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2024 tercatat sebesar:
Revenues in 2024 amounted to:

Rp1.345,03

Miliar
Billion

Jumlah Aset
Total Assets

Per 31 Desember 204, jumlah aset tercatat sebesar:
As of December 31, 2024, total assets amounted to:

Rp1.649,98

Miliar
Billion

Total Ekuitas
Total Equity

Total Ekuitas di tahun 2024 tercatat sebesar:
Total Equity in 2024 amounted to:

Rp1.289,11

Miliar
Billion

Total Laba
Total Income

Di tahun 2024, Total Laba berhasil dibukukan sebesar:
In 2024, Total Income amounted to:

Rp166,84

Miliar
Billion

Kinerja Per Segmen Usaha

Performance by Business Segment

Jasa Pelayanan Kapal
Vessel Service

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2024 tercatat sebesar:

Revenues in 2024 amounted to:

Rp1,30
Triliun
Trillion



Jasa Pengelolaan Kapal
Fleet Management Services

Pendapatan dari segmen Pengelolaan Kapal pada tahun 2024 tercatat nihil, seiring dengan adanya perubahan skema kontrak. Penyesuaian ini menyebabkan pendapatan segmen tersebut terintegrasi ke dalam peningkatan porsi pendapatan dari layanan pelayanan kapal, sehingga tetap berkontribusi positif terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Revenue from the Vessel Management segment in 2024 was none due to a change in the contract scheme. This adjustment made the segment's revenue integrated, thus increasing portion of revenue from vessel management, thereby continuing to contribute positively to the Company's overall performance.



Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Freight and Other Services

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2024 tercatat sebesar:

Revenues in 2024 amounted to:

Rp43,8
Miliar
Billion



Assessment GCG

GCG Assessment

POJK 21/POJK.04/2015
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Public Companies Governance Guideline

Telah Memenuhi Seluruh Rekomendasi (5 Aspek, 8 Prinsip, 25 Rekomendasi)

Has Met All Recommendations (5 Aspects, 8 Principles, 25 Recommendations)

ASIAN Corporate Governance Scorecard

Skor
Score
118,39

Predikat
Predicate
"Leadership in Corporate Governance"

Kinerja ESG IPCM

IPCM's ESG Performance

Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance

Penggunaan Energi
Energy Usage

Konsumsi Energi Listrik
Electricity Consumption

925.602.416	640.688,32	2.306,48
Rupiah	KWh	Gj

Pengurangan Emisi
Emission Reduction

Emisi Cakupan 1 (BBM) Emission Scope 1 (Fuel)	Emisi Cakupan 2 (Listrik) Emission Scope 2 (Electricity)	Emisi Cakupan 3 (Dinas via Pesawat) Emission Scope 3 (Office Travel via Airplane)
51.056.668,80 kgCO2 eq	598.402,89 kgCO2 eq	91.761 kgCO2 eq

Kinerja Sosial

Social Performance

Ketenagakerjaan
Employment

Jumlah pekerja Total employees	Rata-rata Jam Pelatihan Training Hour Average	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Costs
123	16,88	Rp983
Orang People	Jam/Orang Hour/Person	Juta Million

Konsumen
Customer

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

Sangat Baik
Very Good

Masyarakat
People

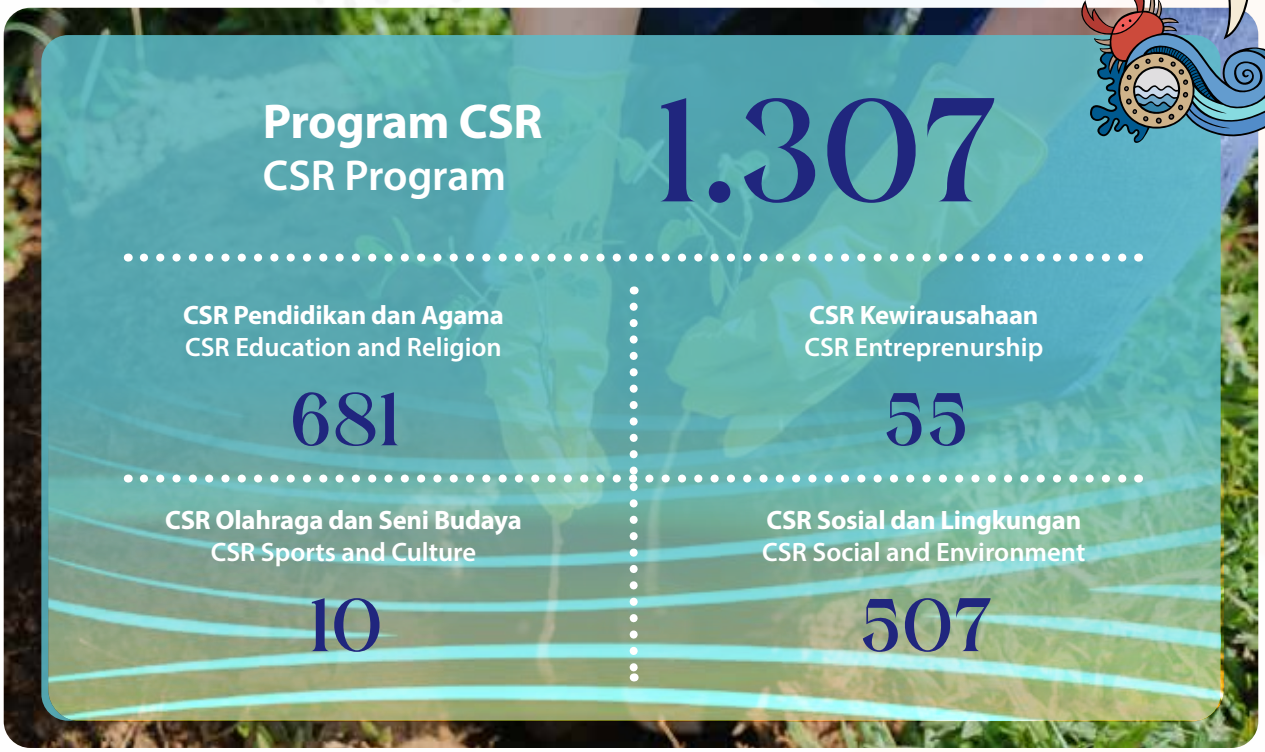

Program CSR
CSR Program

1.307

CSR Pendidikan dan Agama
CSR Education and Religion

681

CSR Kewirausahaan
CSR Entreprenurship

55

CSR Olahraga dan Seni Budaya
CSR Sports and Culture

10

CSR Sosial dan Lingkungan
CSR Social and Environment

507

Kinerja Tata Kelola
Governance Performance

Key Performance Indikator PT Jasa Armada Indonesia 2024
Total KPI kolegial di tahun 2024 110% atau kriteria Sangat Baik.

Key Performance Indikator PT Jasa Armada Indonesia
Total collegial KPI in 2024 was 100%, categorized as Very Good.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Kilas Kinerja 2024

2024 Performance

01

Melalui karakter yang tangguh dan strategi yang tepat, IPCM terus melaju meningkatkan kinerja Perusahaan dengan memperkuat fondasi bisnis serta senantiasa mendorong dan mendukung keberlanjutan pengembangan usaha untuk mencapai keunggulan kompetitif.

A strong character and right strategy allows IPCM to improve the Company's performance by strengthening its business foundation and continously encouraging and supporting the sustainability of its business development to achieve competitive advantage.



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Highlights

In millions of rupiah, unless otherwise stated

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian Description	2024	2023*	2022*	2021	2020
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income					
Pendapatan - Neto Revenues - Net	1.345.030	1.138.537	980.168	820.161	696.561
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(926.893)	(777.612)	(677.622)	(572.345)	(470.487)
Laba Bruto Gross Profit	418.137	360.925	302.547	247.816	226.074
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Neto Other Revenues (Expenses) - Net	(207.403)	(186.618)	(128.532)	(88.818)	(136.904)
Laba Usaha Income from Operations	207.403	183.759	174.014	158.997	89.170
Pendapatan Keuangan Finance Income	17.933	14.958	14.142	14.977	27.137
Beban Keuangan Finance Expenses	(11.148)	(2.773)	(2.117)	(3.008)	(4.618)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	214.188	195.944	186.039	170.966	111.689
Beban Pajak Penghasilan Corporate Income Tax Expenses	(47.345)	(38.282)	(35.384)	(34.383)	(31.455)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	166.843	157.662	150.655	136.583	80.234
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Distributed to Owners of Parent Entity	166.843	157.662	150.655	136.583	80.234
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	166.843	157.662	150.655	136.583	80.234
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Distributed to Owners of Parent Entity	166.843	157.662	150.655	136.583	80.234
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Earnings per Share (Full Amount)	31,62	29,88	28,55	25,88	15,19
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	1.649.981	1.522.135	1.488.208	1.427.875	1.408.290
Total Liabilitas Total Liabilities	360.871	281.615	291.689	271.462	316.643
Total Ekuitas Total Equity	1.289.110	1.240.520	1.196.519	1.156.413	1.091.647
Arus Kas Cash Flows					
Arus kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	309.406	(16.243)	126.483	303.448	225.575

In millions of rupiah, unless otherwise stated

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian Description	2024	2023*	2022*	2021	2020
Arus kas untuk Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(26.148)	(14.522)	(3.426)	(106.541)	(1.784)
Arus kas untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flows for Financing Activities	(218.990)	(132.146)	(206.967)	(117.474)	(113.752)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	64.268	(162.911)	(83.910)	79.433	110.040
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	408.816	571.727	665.637	576.204	466.164
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	473.084	408.816	571.727	655.637	576.204
Rasio Keuangan Financial Ratio					
Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	134	149	196	245	196
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	265	324	315	319	281
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Debt to Assets Ratio (DAR) (%)	22	19	20	19	22
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	28	23	24	23	29
Rasio Kolektabilitas Piutang Receivables Collectability					
Rasio Perputaran Piutang (kali) Receivable Turnover (times)	7	11	9	8	4
Rasio Perputaran Piutang Harian (hari) Average Collection Period (days)	52	29	38	46	70
Rasio Keuangan Lainnya Other Financial Ratios					
Marjin Laba (%) Profit Margin (%)	13	14	15	17	12
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (ROE (%))	13	13	13	12	7
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Aset (%) Return on Assets (ROA) (%)	10	10	10	10	6

*Disajikan kembali karena reklasifikasi akun tertentu.
*Restated due to reclasifications of certain accounts.

GRAFIK IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
FINANCIAL HIGHLIGHTS CHART

Pendapatan - Neto
Revenue - Net

(Rp-Juta)
(Rp-Million)

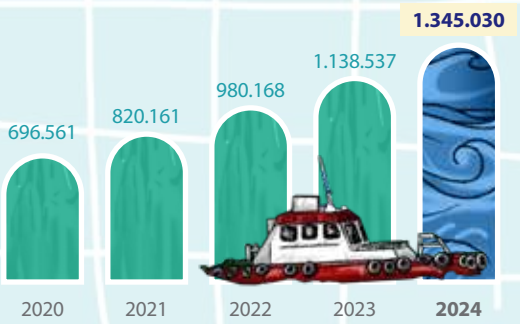

Laba Usaha
Operating Income

(Rp-Juta)
(Rp-Million)

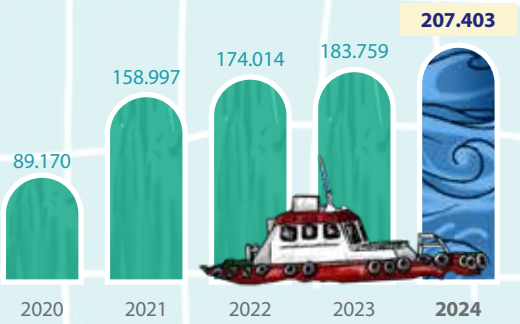

Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

(Rp-Juta)
(Rp-Million)

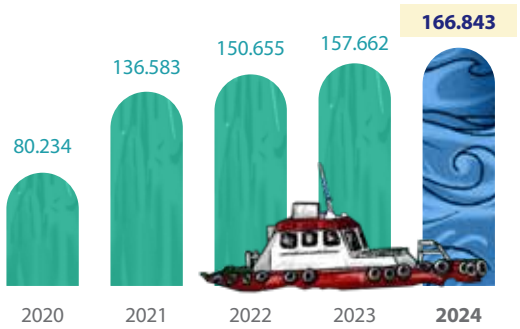

Total Aset
Total Assets

(Rp-Juta)
(Rp-Million)

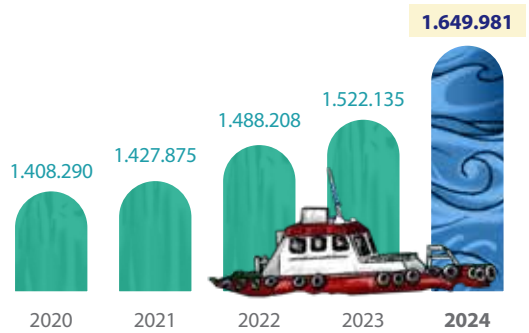

Total Liabilitas
Total Liabilities

(Rp-Juta)
(Rp-Million)

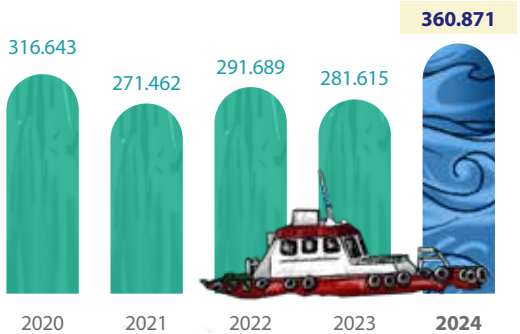

Total Ekuitas
Total Equity

(Rp-Juta)
(Rp-Million)

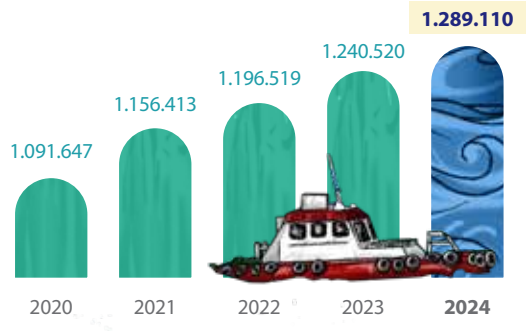

Informasi Saham

Stock Information

Kode Saham
Stock Exchange IPCM

Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia (BEI)
Stock Exchange: Indonesia Stock Exchange (IDX)

Periode Period	Harga per Saham Price per Share				Jumlah Saham Beredar (lembar) Number of Outstanding Shares (shares)	Volume Transaksi (lembar) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp triliun) Capitalization (Rp trilion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
2024							
Triwulan I Quarter I	280	288	272	274	5.284.811.100	38.507.100	1.448.038.241.400
Triwulan II Quarter II	274	280	260	266	5.284.811.100	42.694.600	1.405.759.752.600
Triwulan III Quarter III	266	274	260	270	5.284.811.100	43.704.500	1.426.898.997.000
Triwulan IV Quarter IV	270	274	256	266	5.284.811.100	41.543.700	1.405.759.752.600
2023							
Triwulan I Quarter I	268	280	250	250	5.284.811.100	57.885.800	1.426.898.997.000
Triwulan II Quarter II	272	306	256	256	5.284.811.100	72.160.900	1.553.734.463.400
Triwulan III Quarter III	296	302	278	278	5.284.811.100	95.163.200	1.511.455.974.600
Triwulan IV Quarter IV	286	292	270	280	5.284.811.100	71.510.700	1.479.747.108.000

Grafik Pergerakan Harga Saham Tahun 2023-2024
Share Movement 2023-2024

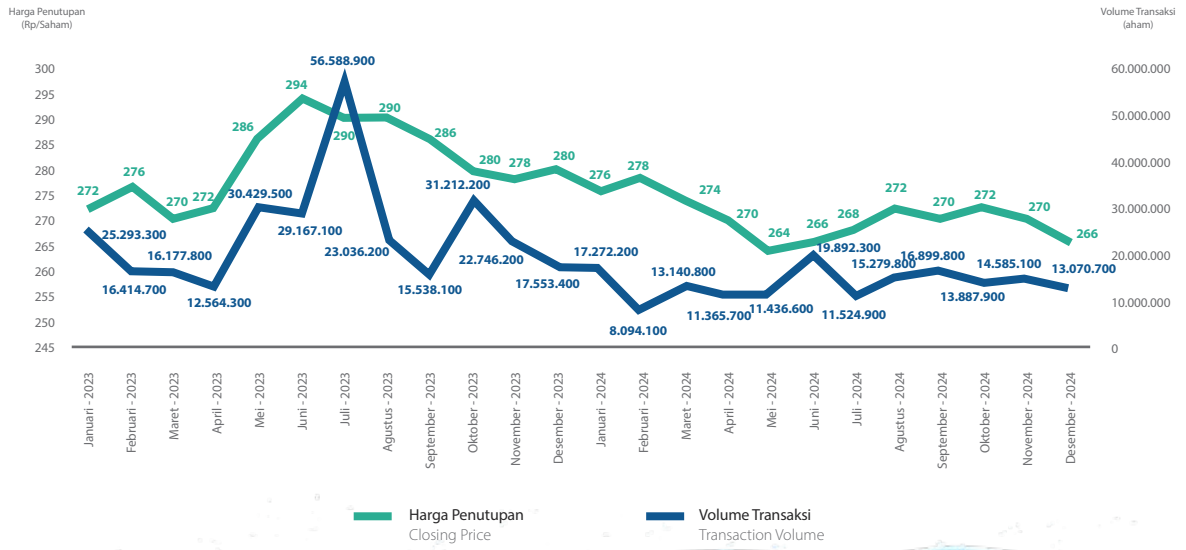



AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kegiatan aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan. Dengan demikian, tidak tersedia informasi mengenai pelaksanaan aksi korporasi, termasuk rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), pembagian dividen saham, penerbitan saham bonus, penurunan nilai nominal saham, maupun jumlah saham yang beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, serta perubahan harga saham yang menyertainya.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Sepanjang tahun buku 2024, perdagangan saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia tetap berjalan tanpa pernah mengalami penghentian sementara (*suspension*) maupun pembatalan pencatatan saham (*delisting*). Adapun saham Perusahaan pun terus diperdagangkan hingga akhir periode tersebut.

CORPORATE ACTION

Throughout 2024, there were no corporate action activities carried out by the Company. Thus, there is no information available regarding the implementation of corporate actions, including the ratio of stock splits, reverse stock, distribution of stock dividends, issuance of bonus shares, decrease in the nominal value of shares, or the number of shares outstanding before and after corporate actions, as well as changes in share prices that accompany them.

SUSPENSION AND/OR DELISTING OF SHARES

Throughout the 2024 fiscal year, the Company's shares continued to be traded on the Indonesia Stock Exchange without any temporary suspension or delisting. The Company's shares remained actively traded until the end of the period.

Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar

Information on Outstanding Bonds, Sharia Bonds (Sukuk), or Conversion Bond

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan penerbitan obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk pada Laporan Tahunan ini.

As of the end of 2024, the Company did not issue any bonds, sukuk, or convertible bonds. Therefore, this Annual Report does not contain information regarding the outstanding amount, interest/profit rate, maturity date, or rating of any bonds or sukuk.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Source of Fundings

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan belum memiliki pencatatan atas sumber pendanaan lainnya.

As of December 31, 2024, the Company did not have any recorded alternative sources of funding.



Peristiwa Penting

Significant Events

1 Januari 2024
January 2024



Go Live Implementasi Single ERP
Go Live of Single ERP Implementation

Implementasi Sistem ERP yang merupakan sistem perangkat lunak terintegrasiuntuk mengelola dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi.
Implementation of an integrated ERP system to manage and automate various business processes in an organization.

16 Februari 2024
February 2024



Women's talk IDX Channel

Program TV yang disiarkan di IDX Channel, saluran televisi resmi pasar modal Indonesia. Program ini membahas topik-topik menarik seputar peran dan inspirasi wanita.
A TV program broadcast on IDX Channel, the official television channel of the Indonesian capital market. This program discusses interesting topics about the roles and inspirations of women.

25 Januari 2024
January 2024



Management Walkthrough Sinergi dan Kolaborasi Bulan K3 Pelindo Group di Lingkungan Regional 2 Tanjung Priok
Management Walkthrough Synergy and Collaboration of Pelindo Group's OHS Month in Tanjung Priok Regional 2 Environment

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelindo Group di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memperingati Bulan K3 Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan kerja di lingkungan pelabuhan.
Activities carried out by Pelindo Group at Tanjung Priok Port to commemorate the National OHS Month, aimed at raising awareness and promoting a culture of workplace safety within the port environment.

22 **Februari 2024**
February 2024



Kunjungan Industri Mahasiswa BINUS University di Area I Tanjung Priok PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Industrial Visit by BINUS University Students to Area I Tanjung Priok of PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Program TV yang disiarkan di IDX Channel, saluran televisi resmi pasar modal Indonesia. Program ini membahas topik-topik menarik seputar peran dan inspirasi wanita.
Students from BINUS University Bekasi conducted an industrial visit to PT Jasa Armada Indonesia Tbk. This visit, attended by 48 students, was opened by the Corporate Secretary of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

1 **Maret 2024**
March 2024



Rapat Kerja Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Group "Percepatan Ekspansi Pasar & Portofolio Bisnis MEPS"
Working Meeting of Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Subholding Group: "Accelerating Market Expansion & Business Portfolio of MEPS"

Rapat yang diselenggarakan oleh SPJM, Induk Perusahaan Jasa Armada Indonesia, untuk membahas strategi dan rencana pengembangan bisnis di bidang Marine, Equipment, dan Port Services (MEPS).
The meeting was organized by SPJM, the parent company of Jasa Armada Indonesia, to discuss strategies and business development plans in the Marine, Equipment, and Port Services (MEPS) sectors.

8 **Maret 2024**
March 2024



Rapat Kerja PT Jasa Armada Indonesia Tbk & IPCM Awards Tahun 2024 "Elevating the Integrated Core Capabilities"
Working Meeting of PT Jasa Armada Indonesia Tbk & IPCM Awards 2024: "Elevating the Integrated Core Capabilities"

Pelaksanaan Raker ini menjadi perjalanan penting PT Jasa Armada Indonesia Tbk dalam menentukan rencana strategi korporasi untuk memperkuat kemampuan inti perusahaan yang terintegrasi.
This working meeting marked an important milestone for PT Jasa Armada Indonesia Tbk in formulating corporate strategic plans to strengthen the company's integrated core capabilities.

1 **April 2024**
April 2024



Bincang - Bincang Investor "Wonderful Iftar in the Sparkling Ramadan" kolaborasi IPCM, IPCC dan PT PII
Investor Talk Show: "Wonderful Iftar in the Sparkling Ramadan" – a collaboration between IPCM, IPCC, and PT PII

Perusahaan turut berpartisipasi dalam acara bincang-bincang buka bersama para investor. Bertempat di Restoran Batik Kuring SCBD, acara ini diselenggarakan bekerja sama dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) dan PT PII.
The Company participated in an iftar talk show with investors. Held at Batik Kuring Restaurant in SCBD, the event was organized in collaboration with PT Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) and PT PII.

1 April 2024
April 2024



Perjanjian Kerjasama Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang
Cooperation Agreement for Pilotage and Towage Services at PT Cemindo Gemilang's Special Terminal

JAI menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Cemindo Gemilang Tbk untuk penyediaan jasa pemanduan, penundaan kapal, serta sarana bantu berupa kapal tunda di Terminal Khusus Industri Semen Bayah, Banten. Dokumen ini bernomor KS.02/1/4/4/KOM/DUT/JAI-24 dan 014/CG-JAI/III/2024.

JAI signed a cooperation agreement with PT Cemindo Gemilang Tbk for the provision of pilotage and towage services, as well as auxiliary equipment in the form of tugboats, at the Bayah Cement Industry Special Terminal in Banten. The document is registered under the numbers KS.02/1/4/4/KOM/DUT/JAI-24 and 014/CG-JAI/III/2024.

1 April 2024
April 2024



Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda di Perairan Ship To Ship (STS) Muara Sungai Musi, Palembang
Cooperation Agreement for the Provision of Tugboats in the Ship-to-Ship (STS) Waters of the Musi River Estuary, Palembang

IPCM menjalin kerjasama dengan PT Maritim Barito Perkasa untuk penyediaan kapal tunda sistem on call di Muara Sungai Musi, Palembang. Nomor perjanjiannya adalah KS.02/1/4/2/KOD/DUT/JAI-24 dan 0713/MBP/IV/2024.

JAI entered into a cooperation agreement with PT Maritim Barito Perkasa for the provision of on-call tugboat services in the Ship-to-Ship (STS) area of the Musi River Estuary, Palembang. The agreement is registered under the numbers KS.02/1/4/2/KOD/DUT/JAI-24 and 0713/MBP/IV/2024.

2 April 2024
April 2024



Penandatanganan Kerjasama dengan PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group)
Signing of Cooperation Agreement with PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group)

Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group) tentang Kerja Sama Penyediaan Kapal Tunda beserta Awak Kapal untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal dengan sistem on call di Perairan Ship to Ship Muara Sungai Musi.

The Company signed an agreement with PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group) for the cooperation in providing tugboats and crew for on-call tugboat services in the Ship-to-Ship (STS) waters of the Musi River Estuary.

4 April 2024
April 2024



TJSL Mudik bersama Pelindo Group Tahun 2024 "Mudik Asyik bersama BUMN"
TJSL Eid Homecoming with Pelindo Group 2024 "Fun Homecoming with SOEs"

Pelindo Group, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), mengorganisir mudik gratis sebagai bentuk dukungan terhadap program "Mudik Asyik bersama BUMN" yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin mudik namun terkendala biaya.

Through its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, Pelindo Group organized a free Eid homecoming trip as part of the "Fun Homecoming with SOEs" initiative, aimed at supporting communities who wish to return to their hometowns but are constrained by financial limitations.

5 April 2024
April 2024



Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas

Third Amendment to the Cooperation Agreement for Vessel Services at the PT Nusantara Regas Special Terminal

IPCM melakukan amandemen ketiga perjanjian kerjasama dengan PT Nusantara Regas untuk pelayanan jasa kapal di Terminal Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Perjanjian ini tercatat dengan nomor KS.02/5/4/KOS/DUT/JAI-24 dan 003/NR/A000/P/2024.

JAI made the third amendment to the cooperation agreement with PT Nusantara Regas for vessel services at the Thousand Islands Terminal, DKI Jakarta. The agreement is recorded under the number KS.02/5/4/KOS/DUT/JAI-24 and 003/NR/A000/P/2024.

8 Mei 2024
May 2024



Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) & Customer Awards Ship to Ship (STS) Ambang Luar Sungai Musi Palembang.

Customer Satisfaction Survey (SKP) & Customer Awards for Ship to Ship (STS) Services at the Outer Channel of Musi River, Palembang.

Perusahaan mengadakan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) & Customer Awards Pengguna Jasa di Lokasi Ship to Ship (STS) Ambang Luar Sungai Musi Palembang.

The Company conducted a Customer Satisfaction Survey (CSS) & Customer Awards for service users at the Ship to Ship (STS) location at the Outer Channel of Musi River, Palembang.

7 Mei 2024
May 2024



Bincang - Bincang & Site Visit to Emiten IPCC & IPCM Investor Palembang

Talk & Site Visit to IPCC & IPCM Issuer Investors in Palembang

PT Pelabuhan Indonesia Investama atau Pelindo Investama menggelar kegiatan Bincang – Bincang & Site Visit to Emiten IPCC & IPCM untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan literasi kepada para investor tentang manajemen terminal serta bisnis pemanduan.

PT Pelabuhan Indonesia Investama, or Pelindo Investama, organized a Talk & Site Visit to IPCC & IPCM Issuers to provide understanding, knowledge, and literacy to investors about terminal management and pilotage business.

14 Mei 2024
May 2024



Bincang - Bincang Emiten IPCM & IPCC "Exploring and Understanding Port Logistic Car Terminal & Marine Services" bersama alumni IPMI International Business School.

Talk Session with IPCM & IPCC Issuers "Exploring and Understanding Port Logistic Car Terminal & Marine Services" with alumni of IPMI International Business School.

Kegiatan ini dilakukan di dua tempat di mana para partisipan diajak untuk mengetahui kondisi langsung Perusahaan Terbuka yang dimiliki Pelindo Grup, yaitu IPCC dan IPCM. Tidak hanya memberikan gambaran Perusahaan secara verbal, namun para partisipan juga diajak untuk melihat langsung berbagai aktivitas lapangan dari kedua Perusahaan.

This event was held at two locations where participants were invited to directly observe the conditions of the publicly listed companies owned by the Pelindo Group, namely IPCC and IPCM. Not only did it provide a verbal overview of the companies, but participants were also invited to witness various field activities from both companies firsthand.

22 Mei 2024
May 2024



Pemberian Pelimpahan oleh Kementerian Perhubungan RI ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atas Pelayanan di Perairan Pulau Obimayor - Pelabuhan Laiwui Provisi Maluku Utara

Delegation by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia to Port Business Entity (BUP) for Services in the Waters of Obimayor Island - Laiwui Port, North Maluku Province

Kementerian Perhubungan RI telah melimpahkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di perairan Pulau Obimayor dan Pelabuhan Laiwui, Maluku Utara, kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Jasa Armada Indonesia (JAI).

The Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia has delegated the pilotage and towage services in the waters of Obimayor Island and Laiwui Port, North Maluku, to the Port Business Entity (BUP) PT Jasa Armada Indonesia (JAI).

28 Mei 2024
May 2024



Management Walkthrough Kolaboratif Pelindo Group Regional 2 - Tinjauan proses pelayanan kapal berjenis LCT

Collaborative Management Walkthrough of Pelindo Group Regional 2 – Review of LCT Vessel Service Process

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok berkolaborasi dengan Anak Perusahaan, PT Jasa Armada Indonesia bersama-sama melakukan tinjauan proses pelayanan kapal berjenis LCT.

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, in collaboration with its subsidiary PT Jasa Armada Indonesia, jointly conducted a review of the service process for LCT-type vessels.

7 Juni 2024
June 2024



Perjanjian Kerjasama Layanan Operasi Pemanduan di Wilayah PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Cooperation Agreement on Pilotage Operation Services in the Area of PT Trimegah Bangun Persada Tbk

JAI bekerja sama dengan SPJM dalam layanan operasi pemanduan di wilayah PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Perjanjian ini memiliki nomor HK.301/7/6/2/PBKS/STKM/PLJM-24 dan PU.01.01/7/6/6/TGB/DUT/JAI-24.

JAI collaborated with SPJM in providing pilotage operation services in the area of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. This agreement is registered under the numbers HK.301/7/6/2/PBKS/STKM/PLJM-24 and PU.01.01/7/6/6/TGB/DUT/JAI-24.

12 Juni 2024
June 2024



Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Cooperation Agreement on Pilotage and Towage Services at the Special Terminal of PT Trimegah Bangun Persada Tbk

JAI kembali bekerja sama dengan PT Trimegah Bangun Persada Tbk untuk jasa pemanduan dan penundaan kapal. Perjanjian ini tercatat dengan nomor 058/P/LGL/TBP/VI/2024 dan U.01.01/12/6/2/SPB/TPB/JAI-24.

JAI once again partnered with PT Trimegah Bangun Persada Tbk for the provision of pilotage and towage services. The agreement is registered under the numbers 058/P/LGL/TBP/VI/2024 and U.01.01/12/6/2/SPB/TPB/JAI-24.

12 Juni 2024
June 2024



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun Buku 2023
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk for Fiscal Year 2023

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in Jakarta on Wednesday.

15 Juni 2024
June 2024



Layanan perdana penyandaran kapal untuk MV Spar Libra di Tersus milik PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) Perairan Pulau Obimayor - Pantai Barat, Laiwui, Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
Inaugural Berthing Service for MV Spar Libra at the Special Terminal of PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel), Obimayor Island Waters – West Coast, Laiwui, South Halmahera, North Maluku Province

Untuk pertama kalinya MV Sapr Libra sandar di Terminal Khusus Milik PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) yang berlokasi di Perairan Pulau Obimayor - Pantai Barat, Laiwui, Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan Layanan Pandu dan Tunda dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk pada 15 Juni 2024.
For the first time, MV Spar Libra berthed at the Special Terminal owned by PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel), located in the waters of Obimayor Island – West Coast, Laiwui, South Halmahera, North Maluku Province, with pilotage and towage services provided by PT Jasa Armada Indonesia Tbk on June 15, 2024.

17 Juni 2024
June 2024



Pelayanan Kunjungan Perdana Kapal Pesiar Terbesar MV Resort World One MV Resort World One dengan panjang atau LOA 268.29 meter dan GT 75.338.
Inaugural Service for the Largest Cruise Ship Visit, MV Resort World One MV Resort World One, with a length overall (LOA) of 268.29 meters and a gross tonnage (GT) of 75,338.

Pelayanan kunjungan perdana kapal pesiar MV Resort World One di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mencakup persiapan garbarata untuk kenyamanan penumpang.
The inaugural visit of the cruise ship MV Resort World One at Tanjung Priok Port, Jakarta, included the preparation of an aerobridge to ensure passenger comfort.

20 Juni 2024
June 2024



TJSL Berbagi Kurban Tahun a1445H/2024 di seluruh wilayah operasional PT Jasa Armada Indonesia Tbk
TJSL Qurban Distribution for the Year 1445H/2024 Across All Operational Areas of PT JAI Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) kembali membagikan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah operasional seluruh Indonesia dalam rangka Idul Adha 1445 Hijriah. Sebanyak 14 sapi dan 1a9 kambing disalurkan bersinergi dengan lembaga sosial, masyarakat serta instansi setempat.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) once again distributed qurban animals to communities in need across its operational areas throughout Indonesia in celebration of Eid al-Adha 1445 Hijri. A total of 14 cows and 19 goats were distributed in collaboration with social institutions, local communities, and relevant authorities.

20 Juni 2024
June 2024



Perjanjian Sewa *On Call Harbour Tug* untuk Terminal Khusus PGN FSRU Lampung
On-Call Harbour Tug Charter Agreement for PGN FSRU Lampung Special Terminal

IPCM menandatangani perjanjian sewa kapal tunda dengan PGN LNG Indonesia (PLI) untuk mendukung operasi di Terminal Khusus FSRU Lampung. Dokumen ini bernomor 0062006.PER/UT-PLI/24 dan PU.01.01/20/6/2/SPB/TPB/JAI-24.a

JAI signed a harbour tug charter agreement with PGN LNG Indonesia (PLI) to support operations at the FSRU Lampung Special Terminal. The agreement is registered under document numbers 0062006.PER/UT-PLI/24 and PU.01.01/20/6/2/SPB/TPB/JAI-24.

24 Juni 2024
June 2024



Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2024
Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2024

Pada ajang ini Perusahaan memperoleh penghargaan kategori "Gold Champion" untuk program unggulan Penanaman Mangrove & Pengembangan UMK #TenunNyaman.

At this event, the company received the "Gold Champion" award in the category for its flagship programs, Mangrove Planting & UMK Development #TenunNyaman.

28 Juni 2024
June 2024



Management Walkthrough Kolaboratif Pelindo Group Regional 2 - Tinjauan Central Work Shop PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Collaborative Management Walkthrough of Pelindo Group Regional 2 - Review of PT JAI Tbk's Central Work Shop

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok berkolaborasi dengan Anak Perusahaan, PT Jasa Armada Indonesia bersama-sama melakukan tinjauan *Central Work Shop* PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok collaborated with its subsidiary, PT Jasa Armada Indonesia, to conduct a walkthrough of PT JAI Tbk's Central Work Shop.

1 Juli 2024
July 2024



Addendum Kerja Sama Penyediaan Kapal Tunda di Perairan Meulaboh
Addendum to the Tugboat Provision Agreement in Meulaboh Waters

Addendum Perjanjian Kerjasama antara IPCM dengan PT Langlang Laju Layang tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh, Provinsi Aceh dengan nomor perjanjian PU.01.01/1/7/3/SPB/TPB/JAI-24 dan 002/HO/ADD-I-LLL-VII/2024.

An addendum to the cooperation agreement between JAI and PT Langlang Laju Layang regarding the provision of pilotage support facilities in the form of tugboats for ship towage services in Meulaboh Waters, Aceh Province, with agreement numbers PU.01.01/1/7/3/SPB/TPB/JAI-24 and 002/HO/ADD-I-LLL-VII/2024.

1 **Juli 2024**
July 2024



Addendum Kerja Sama Penyediaan Kapal Tunda di Pelabuhan Weda
Addendum to the Tugboat Provision Agreement at Weda Port

Addendum Perjanjian Kerjasama antara IPCM dengan PT Langlang Laju Layang tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda), Provinsi Maluku Utara dengan nomor perjanjian PU.01.01/1/7/4/SPB/TPB/JAI-24 dan 003/HO/ADD-I-LLL-VII/2024
An addendum to the cooperation agreement between JAI and PT Langlang Laju Layang regarding the provision of pilotage support facilities in the form of tugboats for ship towage services in Weda Port Waters (Teluk Weda), North Maluku Province, with agreement numbers PU.01.01/1/7/4/SPB/TPB/JAI-24 and 003/HO/ADD-I-LLL-VII/2024.

2 **Juli 2024**
July 2024



Courtesy Visit PT Krakatau Bandar Samudera di Pelindo Tower
Courtesy Visit PT Krakatau Bandar Samudera at Pelindo Tower

Kunjungan yang dilakukan oleh PT Krakatau Bandar Samudera ke Pelindo Tower.
A visit by PT Krakatau Bandar Samudera to Pelindo Tower.

10 **Juli 2024**
June 2024



HUT IPCM ke 11 "Exce11ence"
IPCM 11th Anniversary "Exce11ence"

Acara Hari Ulang Tahun sebagai perayaan atas perjalanan Perusahaan selama 11 tahun yang bertepatan pada 10 Juli 2024.
The anniversary event celebrating the Company's journey over 11 years, coinciding with July 10, 2024.

11 **Juli 2024**
July 2024



Penandatanganan Perpanjangan Kerjasama dengan PT Langlang Laju Layang tentang pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Weda
Signing of the Extension of Cooperation Agreement with PT Langlang Laju Layang for ship piloting and towing services at Weda Port

Penandatanganan perpanjangan kerjasama dengan PT Langlang Laju Layang tentang pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Provinsi Maluku Utara.
The signing of the extension of the cooperation agreement with PT Langlang Laju Layang for piloting and towing services in the Mandatory Piloting Waters Class I of Weda Port (Weda Bay), North Maluku Province.

17 Juli 2024
July 2024



J-Well (JAI Wellness) Healthy at Work, Injury Prevention & Management bersama Windy Mayang (CEO WMCenter)
J-Well (JAI Wellness) Healthy at Work, Injury Prevention & Management with Windy Mayang (CEO WMCenter)

J-Well (JAI Wellness) merupakan bagian dari Jangkar (JAI Ngajak Bicara), sebagai salah satu program Perusahaan dalam hal media komunikasi internal perusahaan dan optimalisasi implementasi Employee Wellbeing Program 2024 di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
J-Well (JAI Wellness) is part of Jangkar (JAI Ngajak Bicara), one of the Company's programs for internal communication media and the optimization of the implementation of the Employee Wellbeing Program 2024 within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

22 Juli 2024
July 2024



Jangkar Knowledge: Membangun Kebiasaan Inovasi
Jangkar Knowledge: Building Innovation Habits

JAInovasi 2024 hadir sebagai salah satu media menumbuhkan budaya inovasi, mengimplementasikan beberapa produk inovatif pilihan, mengembangkan produk inovasi yang siap diimplementasikan dan menjadi problem solver bisnis di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
JAInovasi 2024 serves as one of the media to foster an innovation culture, implementing several selected innovative products, developing innovation products ready for implementation, and becoming business problem solvers within PT JAI Tbk.

23 Juli 2024
June 2024



Management Walkthrough Kolaboratif Pelindo Group Regional 2 - Tinjuan Gedung Terminal Operasi 3 Tanjung Priok tersebut diawali dengan Safety Induction dari IPC TPK
Collaborative Management Walkthrough of Pelindo Group Regional 2 – Review of Terminal Operations Building 3 Tanjung Priok, started with a Safety Induction from IPC TPK

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok berkolaborasi dengan Anak Perusahaan, PT Jasa Armada Indonesia bersama-sama melakukan tinjuan Gedung Terminal Operasi 3 Tanjung Priok.
Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, in collaboration with its subsidiary, PT Jasa Armada Indonesia, jointly conducted a review of the Terminal Operations Building 3 Tanjung Priok.

31 Juli 2024
July 2024



The 4th TJSL & CSR Awards 2024

Dalam Acara The 4th TJSL & CSR Tahun Award 2024, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) meraih penghargaan sebagai Strong Commitment Senior Officer on Social Program CSR.
At The 4th TJSL & CSR Year Award 2024, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) received the award for Strong Commitment Senior Officer on Social Program CSR.

31 **Juli 2024**
July 2024



Sharing Session Hukum "Optimalisasi Pemulihan Keuangan Negara" bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Sharing Session on Legal Matters "Optimizing State Financial Recovery" with the North Jakarta District Attorney's Office

Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Sharing Session Hukum dengan topik "Optimalisasi Pemulihan Keuangan Negara" yang diikuti oleh para pegawai di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk secara Hybrid.

The Company held a hybrid Sharing Session on Legal Matters: "Optimizing State Financial Recovery" attended by employees of PT JAI Tbk.

26 **Agustus 2024**
August 2024



Penandatanganan kerjasama dengan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk tentang Penyediaan Kapal Tunda Beserta Awak Kapal untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal dengan Sistem On-Call di Wilayah Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu

Signing of cooperation with PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk regarding the Provision of Tugboats for Ship Towing Services at Baai Port, Bengkulu

PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyediaan kapal tunda beserta awak kapal untuk pelayanan jasa penundaan kapal dengan sistem on-call di wilayah Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) and PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) signed a cooperation agreement regarding the provision of tugboats and crew for vessel towing services with an on-call system in the Pulau Baai Port area of Bengkulu.

6 **Agustus 2024**
August 2024



Sharing Session with Emiten IPCM & IPCC bersama PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Sharing Session with Issuers (IPCM & IPCC) with PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan guna menyapa para pemegang saham ritel IPCM serta sejumlah potensial investor di Jakarta.

This activity was held to greet IPCM retail shareholders and a number of potential investors in Jakarta.

26 **Agustus 2024**
August 2024



Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

Cooperation Agreement for the Provision of Tugboats at Pulau Baai Port, Bengkulu

IPCM menjalin kerjasama dengan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk untuk penyediaan kapal tunda sistem on call di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Perjanjian ini memiliki nomor PJ.01/26/8/2/KOD/DUT/JAI-24 dan 011/PKS.BSML-JAI/VIII/2024.

JAI has established cooperation with PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk for the provision of on-call tugboats at Pulau Baai Port, Bengkulu.

29 Agustus 2024
August 2024



Public Expose Live 2024 oleh Bursa Efek Indonesia
Public Expose Live 2024 by Indonesia Stock Exchange

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) berpartisipasi dalam acara Public Expose (Pubex) Live yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Paparan Publik Tahunan IPCM 2024 dilaksanakan secara virtual dari monitoring room IPCM di Pelindo Tower, Jakarta Utara.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) participated in the Public Expose (Pubex) Live event organized by the Indonesia Stock Exchange. IPCM's 2024 Annual Public Exposure was conducted virtually from IPCM's monitoring room at Pelindo Tower, North Jakarta.

4 September 2024
September 2024



J-Well (JAI Wellness) Body & Mind Alignment bersama MND HUB & Hening Space
J-Well (JAI Wellness) Body & Mind Alignment with MND HUB & Hening Space

Program yang berfokus pada Employee Wellbeing ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman menenangkan tubuh & pikiran melalui teknik bernafas yang benar agar dapat mengurangi stress, kecemasan dan gangguan mental lainnya dan yang tentunya dapat memberikan manfaat pada produktivitas kerja.
This Employee Wellbeing-focused program aims to provide knowledge and experiences to relax the body and mind through proper breathing techniques, helping to reduce stress, anxiety, and other mental health issues, ultimately benefiting work productivity.

10–12 September 2024
September 2024



Women in Maritime Association (WIMA) Asia Conference and Annual General Meeting (AGM) "Tides of Change: Women Leading to a Sustainable and Innovative Maritime Future" Busan, Korea Selatan.
The Women in Maritime Association (WIMA) Asia Conference and Annual General Meeting (AGM) "Tides of Change: Women Leading to a Sustainable and Innovative Maritime Future" in Busan, South Korea.

Kegiatan yang membahas tentang peran perempuan masa kini untuk memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja dan berkarir, membangun kapabilitas pribadi dan profesional, mempelajari hal-hal baru, serta beradaptasi dengan berbagai perubahan.
This event discussed the role of women today in having equal opportunities to work and build careers, develop personal and professional capabilities, learn new things, and adapt to various changes.

12 September 2024
September 2024



TJSL Pelindo Mengajar di SMA 2 Cirebon
TJSL Pelindo Teaches at SMA 2 Cirebon

Menjelang 'Pelindo Day' yang jatuh pada 1 Oktober 2024, berbagai kegiatan dan kemeriahan dilaksanakan oleh Pelindo Grup. Pada 12 September 2024, Perusahaan turut melaksanakan kegiatan TJSL Pelindo Mengajar 2024 di SMAN 2 Cirebon.
Ahead of 'Pelindo Day' on October 1, 2024, various activities and celebrations were carried out by the Pelindo Group. On September 12, 2024, the company also organized the TJSL Pelindo Teaches 2024 event at SMAN 2 Cirebon.

12 **September 2024**
September 2024



Investor Site Visit berkolaborasi dengan Panin Sekuritas dan PT Taspen (Persero)
Investor Site Visit in collaboration with Panin Sekuritas and PT Taspen (Persero)

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) melaksanakan kegiatan Investor Site Visit di Kantor Pusat, Jakarta. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Panin Sekuritas dan PT Taspen (Persero) yang juga merupakan salah satu pemegang saham institusi IPCM, bertujuan untuk memberikan update terkait kinerja Emiten IPCM terkini kepada para Investor serta menjalin hubungan (engagement) antara Emiten dan Investor.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) held an Investor Site Visit at its Headquarters in Jakarta. The event, in collaboration with Panin Sekuritas and PT Taspen (Persero), which is also one of IPCM's institutional shareholders, aimed to provide an update on IPCM's latest performance to investors and foster engagement between the issuer and investors.

19 **September 2024**
September 2024



Perubahan Nomor 1 Atas Perjanjian Sewa On Call Harbour Tug untuk Terminal Khusus PGN FSRU Lampung
Amendment No. 1 to the On Call Harbour Tug Charter Agreement for the PGN FSRU Lampung Special Terminal

IPCM dan PGN LNG Indonesia (PLI) melakukan perubahan perjanjian sewa kapal tunda sebelumnya. Dokumen amandemen ini bernomor 0011909.AMD/UT-PLI/24 dan KS.02/19/9/2/TPB/DUT/JAI-24.
JAI and PGN LNG Indonesia (PLI) made amendments to the previously established tugboat charter agreement. The amendment document is numbered 0011909.AMD/UT-PLI/24 and KS.02/19/9/2/TPB/DUT/JAI-24.

25 **September 2024**
September 2024



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) penunjukkan Komisaris Independen F. Budi Prayitno
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on the appointment of Independent Commissioner, F. Budi Prayitno

IPCM menyelenggarakan RUPSLB di Pelindo Tower untuk menunjuk F. Budi Prayitno sebagai Komisaris Independen yang baru. Penunjukan ini dilakukan sebagai langkah perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan struktur pengawasan.
JAI held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) at Pelindo Tower to appoint F. Budi Prayitno as the new Independent Commissioner. This appointment is part of the company's efforts to strengthen governance and its supervisory structure.

7 **Oktober 2024**
October 2024



Annual Report Award (ARA) 2023 - Juara 2 katagori perusahaan Go Publik Non Keuangan
Annual Report Award (ARA) 2023 – 2nd Winner for Non-Finance Go Public Company

IPCM berhasil meraih Juara 2 ARA 2023 untuk kategori perusahaan Go Publik Non Keuangan. Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan sejak Juni hingga Oktober 2024, yang bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi dan praktik tata kelola yang baik, termasuk aspek keberlanjutan.
JAI successfully achieved 2nd place in the 2023 ARA for the Publicly Listed Non-Financial Companies category. This award was granted after a thorough evaluation process conducted from June to October 2024, aimed at encouraging transparency and good governance practices, including sustainability aspects.

9 **Oktober 2024**
October 2024



Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) dan Customer Awards di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk, Bayah.

Customer Satisfaction Survey (CSS) and Customer Awards at the Special Terminal of PT Cemindo Gemilang Tbk, Bayah.

IPCM menggelar SKP dan Customer Awards di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk, Bayah, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali masukan langsung dari pelanggan, memperkuat kolaborasi dengan mitra pengguna jasa, serta menjadi sarana evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan, guna membangun kepercayaan dan perbaikan berkelanjutan ke depan.

JAI organized the CSS and Customer Awards at the Special Terminal of PT Cemindo Gemilang Tbk, Bayah, as part of the company's commitment to improving service quality. This event was held to gather direct feedback from customers, strengthen collaboration with service users, and serve as an evaluation tool for the services provided, in order to build trust and drive continuous improvement moving forward.

9 **Oktober 2024**
October 2024



J-Well (JAI Wellness) Sayangi Jantungmu, J-Well kali ini menghadirkan narasumber dr Rizka Novita Indriani dokter spesialis penyakit dalam RS Pelabuhan

J-Well (JAI Wellness) Love Your Heart, J-Well this time features speaker Dr. Rizka Novita Indriani, a specialist in internal medicine from RS Pelabuhan

IPCM menggelar program J-Well (JAI Wellness) bertema "Kenali Tubuhmu, Sayangi Jantungmu" secara hybrid sebagai bagian dari program Employee Wellbeing JANGKAR (JAI Ngajak Bicara). Kegiatan ini menghadirkan dr. Rizka Novita Indriani, dokter spesialis penyakit dalam dari RS Pelabuhan, yang memberikan edukasi seputar kesehatan jantung dan pencegahan penyakit jantung

JAI held the J-Well (JAI Wellness) program themed "Know Your Body, Love Your Heart" in a hybrid format as part of the Employee Wellbeing program JANGKAR (JAI Ngajak Bicara). This event featured Dr. Rizka Novita Indriani, an internal medicine specialist from RS Pelabuhan, who provided education on heart health and the prevention of heart disease.

16 **Oktober 2024**
October 2024



Management Walkthrough Kolaboratif Pelindo Group Regional 2 - Tinjuan area kerja PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Collaborative Management Walkthrough Pelindo Group Regional 2 - Work Area Review of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Manajemen walktrough yang dilakukan pada 16 Oktober 2024 dihadiri seluruh Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk bersama dengan manajemen entitas lingkungan Pelindo Group bertandang ke PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

The management walkthrough held on October 16, 2024, was attended by the entire Board of Directors of PT JAI Tbk, along with the management of entities within the Pelindo Group, who visited PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

31 **Oktober 2024**
October 2024



CSA Awards 2024 The Best Infrastructures Sector

IPCM berhasil meraih penghargaan CSA Awards 2024 untuk kategori The Best Infrastructures Sector. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja positif berkelanjutan yang ditunjukkan oleh IPCM. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen IPCM dalam menjaga kinerja dan tata kelola yang unggul di sektor infrastruktur.

JAI has won the CSA Awards 2024 in the category of The Best Infrastructures Sector. This award is a recognition of JAI's sustained positive performance. It serves as proof of JAI's commitment to maintaining excellent performance and governance in the infrastructure sector.

19 **November 2024**
November 2024



Management Walkthrough Kolaboratif Pelindo Group Regional 2 - Tinjuan di kerja Halal Logistik MTI

Collaborative Management Walkthrough of Pelindo Group Regional 2 - Performance Review of MTI Halal Logistic

Manajemen walktrough yang dilakukan pada 19 November 2024 dihadiri seluruh Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk bersama dengan manajemen entitas lingkungan Pelindo Group bertandang ke Halal Logistik PT MTI.

The management walkthrough held on November 19, 2024, was attended by the entire Board of Directors of PT JAI Tbk along with the management of Pelindo Group entities, visiting the Halal Logistics of PT MTI.

26 **November 2024**
November 2024



Management Walkthrough Kolaboratif Pelindo Group Regional 2 - Tinjuan area kerja PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

CEO Networking 2024 with the theme "Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business"

Manajemen walktrough yang dilakukan pada 16 Oktober 2024 dihadiri seluruh Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk bersama dengan manajemen entitas lingkungan Pelindo Group bertandang ke PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Manajemen walktrough yang dilakukan pada 16 Oktober 2024 dihadiri seluruh Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk bersama dengan manajemen entitas lingkungan Pelindo Group bertandang ke PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

21 **November 2024**
November 2024



SNI Award 2024 peringkat perunggu kategori Organisasi Skala Besar Jasa oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)

SNI Award 2024 Bronze Ranking in the Large-Scale Service Organization Category by the National Standardization Agency (BSN)

IPCM kembali meraih peringkat Perunggu kategori Organisasi Skala Besar Jasa dalam ajang SNI Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan ini diberikan kepada 69 organisasi, termasuk IPCM, atas pencapaian dalam penerapan standar dan komitmen terhadap keberlanjutan bisnis.

JAI has once again achieved the Bronze ranking in the Large-Scale Service Organization category at the SNI Award 2024, organized by the National Standardization Agency (BSN). This award was given to 69 organizations, including JAI, for their achievements in applying standards and commitment to business sustainability.

28 **November 2024**
November 2024



Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024 kategori "Innovation Excellence in Pilotage dan Towage Company"

Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024 in the category "Innovation Excellence in Pilotage dan Towage Company"

JAI berhasil meraih penghargaan Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024 untuk kategori "Innovation Excellence in Pilotage dan Towage Company". Penghargaan ini diberikan oleh Bisnis Indonesia Group kepada perusahaan yang dinilai berperan strategis dalam pengembangan sektor logistik nasional. Melalui ajang ini, IPCM semakin termotivasi untuk terus menghadirkan layanan unggul yang mendorong kemajuan industri kepelabuhanan dan perekonomian nasional secara berkelanjutan.

JAI successfully won the 2024 Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) in the category of "Innovation Excellence in Pilotage and Towage Company." This award was presented by Bisnis Indonesia Group to companies deemed to play a strategic role in the development of the national logistics sector. Through this recognition, IPCM is further motivated to continue providing excellent services that drive the advancement of the port industry and the national economy sustainably.

2 Desember 2024
December 2024



Market Insight "Market Update, Investment Strategy Opportunities in 2025"Kolaborasi IPCM, IPCC, PII dan PT Panin Sekuritas

Market Insight "Market Update, Investment Strategy Opportunities in 2025"

JAI bersama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), dan PT Panin Sekuritas menggelar Market Insight bertema "Market Update, Investment Strategy Opportunities in 2025". Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari OJK, BEI Jawa Barat, serta Panin Sekuritas, yang membahas peluang dan strategi investasi di tahun mendatang. Melalui kolaborasi ini, peserta diajak untuk memahami dinamika pasar, manajemen risiko, serta menggali potensi investasi di 2025, sekaligus membangun koneksi dan bertukar wawasan dengan para profesional di bidang keuangan dan pasar modal.

A collaboration between IPCM, IPCC, PII, and PT Panin Sekuritas JAI, in partnership with PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), and PT Panin Sekuritas, held a Market Insight event themed "Market Update, Investment Strategy Opportunities in 2025." This event featured speakers from OJK, BEI West Java, and Panin Sekuritas, discussing investment opportunities and strategies for the coming year. Through this collaboration, participants were invited to understand market dynamics, risk management, and explore potential investments in 2025, while also building connections and exchanging insights with professionals in the financial and capital markets.

2 Desember 2024
December 2024



Addendum I Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda untuk PT Karya Pacific Shipping di Muara Sungai Musi, Palembang

Addendum I Collaboration for Tugboat Provision for PT Karya Pacific Shipping at the Musi River Estuary, Palembang

IPCM menandatangani addendum dengan PT Karya Pacific Shipping untuk layanan kapal tunda di Muara Sungai Musi, Palembang. Perjanjian ini tercatat dengan nomor KS.02/2/12/2/KOD/DUT/JAI-24 dan ADD I/002/KPS-JAI/XII/2024.

JAI has signed an addendum with PT Karya Pacific Shipping for tugboat services at the Musi River Estuary, Palembang. This agreement is recorded under the number KS.02/2/12/2/KOD/DUT/JAI-24 and ADD I/002/KPS-JAI/XII/2024.

17 Desember 2024
December 2024



Employee Gathering PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan TJSL Penanaman 600 Bibit Pohon

Employee Gathering PT JAI Tbk and TJSL Planting 600 Tree Seedlings

IPCM melaksanakan Employee Gathering yang dirangkaikan dengan kegiatan TJSL berupa penanaman 600 bibit pohon. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif karyawan, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

JAI held an Employee Gathering, which was combined with a CSR activity involving the planting of 600 tree seedlings. This event engaged active participation from employees, with the aim of fostering a sense of ownership towards the company and contributing to the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions.

9 Desember 2024
December 2024



Sharing session dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan berkolaborasi bersama tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Sharing Session in Commemoration of International Anti-Corruption Day (HAKORDIA) in Collaboration with the Special Crime Team of the North Jakarta District Attorney's Office.

JAI menyelenggarakan sharing session dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA). Kegiatan ini berkolaborasi dengan tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan menghadirkan Bapak Dodi Wiraatmaja, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sebagai narasumber. Dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju", acara ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membangun budaya anti korupsi di lingkungan IPCM, baik dalam aksi korporasi maupun kegiatan operasional.

JAI organized a sharing session to commemorate International Anti-Corruption Day (HAKORDIA). This event was held in collaboration with the Special Crime Team of the North Jakarta District Attorney's Office, featuring Mr. Dodi Wiraatmaja, S.H., M.H., the Head of the Special Crime Section, as the speaker. With the theme "Strengthening the Commitment to Eradicate Corruption for a Progressive Indonesia," the event aimed to raise awareness and foster an anti-corruption culture within IPCM, both in corporate actions and operational activities.

23 Desember 2024
December 2024



Addendum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda di Perairan Tarakan, Kalimantan Utara
Addendum to the Cooperation Agreement for Tugboat Provision in the Waters of Tarakan, North Kalimantan

IPCM dan PT Langlang Laju Layang memperbarui kerjasama untuk wilayah Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara, dengan nomor PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24 dan 006/LLL-TRK/I-XII/2024.

JAI and PT Langlang Laju Layang have renewed their cooperation for the Tarakan Port area, North Kalimantan, under the agreement numbers PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24 and 006/LLL-TRK/I-XII/2024.

24 Desember 2024
December 2024



Perjanjian Tambahan Kedua Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Jawa Satu Power
Second Addendum to the Cooperation Agreement for Vessel Services at the PT Jawa Satu Power Special Terminal

IPCM dan PT Jawa Satu Power menyepakati perjanjian tambahan kedua untuk kerjasama pelayanan jasa kapal. Dokumen ini memiliki nomor P-010/JSP0000/2024 dan PJ.01/24/12/2/KOD/DUT/JAI-24.

JAI and PT Jawa Satu Power have agreed to the second addendum to the cooperation agreement for vessel services. This document is registered under the numbers P-010/JSP0000/2024 and PJ.01/24/12/2/KOD/DUT/JAI-24.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Laporan Manajemen

Management Report

02



Dalam rangka mewujudkan layanan yang unggul dan berdaya saing tinggi, IPCM menetapkan target kinerja yang terukur untuk dicapai sepanjang tahun 2024, dengan menjalankan aktivitas operasional secara terstruktur dan efisien yang terlihat dari capaian kinerja yang menunjukkan konsistensi dan efektivitas.

In order to have a superior and highly competitive service, IPCM has set achievable targets for 2024 through a structured and efficient operational activity as seen from its consistent and effective achievements.





Zuhri Iryansyah

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Report of the Board of Commissioners,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan Perusahaan menutup tahun 2024 dengan capaian kinerja yang membanggakan. Melalui Laporan Tahunan ini, izinkan kami mewakili Dewan Komisaris, untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan kami terhadap strategi dan kebijakan penting yang dijalankan oleh Direksi dalam mengelola Perusahaan sepanjang tahun 2024.

We offer our deepest gratitude to God Almighty for His blessings and grace, which have enabled the Company to close the year 2024 with remarkable achievements. Through this Annual Report, allow us, on behalf of the Board of Commissioners, to present our report on the execution of our supervisory duties over the strategies and key policies implemented by the Board of Directors in managing the Company throughout 2024.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Perekonomian global di tahun 2024 diwarnai dengan banyak tantangan, khususnya konflik Rusia-Ukraina yang belum reda. Berdasarkan laporan World Economic Outlook oleh International Monetary Fund (IMF) Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,2%, namun dibayangi oleh ketidakpastian tinggi akibat fragmentasi geopolitik, inflasi yang masih belum sepenuhnya terkendali, serta gangguan pada rantai pasok global. Di sisi lain, meskipun tekanan inflasi global mulai mereda, negara-negara *emerging markets* masih menghadapi tantangan likuiditas dan arus modal keluar yang sensitif terhadap arah kebijakan moneter negara maju seperti Amerika Serikat.

Meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan eksternal, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 mencapai 5,02% (yoy), sedikit lebih rendah dari 5,05% pada 2023. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa lapangan usaha, seperti Lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 11,36% (yoy); diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,08% (yoy); Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,92% (yoy); dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,45% (yoy). Kinerja ekspor dan konsumsi lembaga *non-profit* juga menunjukkan peran signifikan dalam menopang pertumbuhan.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTS

The global economy in 2024 was marked by numerous challenges, particularly the ongoing Russia-Ukraine conflict. According to the World Economic Outlook report published by the International Monetary Fund (IMF) in October 2024, global economic growth is projected to reach 3.2%. However, this is overshadowed by heightened uncertainty due to geopolitical fragmentation, persistent inflationary pressures, and disruptions to global supply chains. On the other hand, while global inflationary pressures have begun to ease, emerging markets continue to face liquidity challenges and capital outflows, which remain sensitive to monetary policy directions in advanced economies such as the United States.

Despite these external challenges, Indonesia's economy continued to demonstrate strong resilience. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth in 2024 reached 5.02% (yoy), slightly lower than 5.05% in 2023. This growth was supported by several sectors, such as Other Services at 11.36% (yoy), Business Services at 8.08% (yoy), Transportation and Warehousing at 7.92% (yoy), and Information and Communication at 7.45% (yoy). Export performance and consumption by non-profit institutions also played significant roles in supporting this growth.

Kondisi industri pelayaran dan jasa maritim nasional yang menjadi fokus Perusahaan turut terdampak dinamika global ini. Laporan Review of Maritime Transport 2024 oleh UNCTAD mencatat bahwa gangguan pada jalur laut utama mengakibatkan penyesuaian rute pelayaran global, meningkatnya waktu tempuh kapal, dan melonjaknya biaya logistik. Di Indonesia, sektor transportasi laut masih berperan penting dalam mendukung perdagangan luar negeri dan konektivitas antar wilayah. Peningkatan jumlah kapal yang singgah, serta tren digitalisasi pelabuhan dan layanan logistik menjadi peluang strategis bagi Perusahaan untuk memperkuat posisi di industri jasa kapal tunda dan pemanduan.

Dikutip dari data BPS, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh 8,69% (c-to-c) sepanjang tahun 2024, mencerminkan peningkatan kebutuhan layanan logistik laut dan darat. Dalam konteks ini, peran Perusahaan sebagai penyedia jasa pemanduan, penundaan, dan pelayanan kapal di pelabuhan sangat relevan untuk menopang kelancaran dan efisiensi aktivitas ekspor-impor maupun distribusi domestik. Dengan tantangan rantai pasok global yang semakin kompleks, Perusahaan berpeluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan standar layanan melalui modernisasi armada, integrasi teknologi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Mempertimbangkan tren global dan nasional tersebut, Perusahaan memiliki momentum untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat peran dalam ekosistem logistik nasional. Dukungan kebijakan nasional terhadap hilirisasi industri, digitalisasi, dan penguatan infrastruktur pelabuhan menjadi katalis utama dalam mendukung transformasi sektor maritim yang lebih efisien dan kompetitif.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan fungsi manajerial secara efektif dan profesional sepanjang tahun 2024. Hal ini tercermin dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi tahun 2024 sebesar 110 dengan Kriteria

The national shipping and maritime services industry, which is the Company's core focus, was also affected by these global dynamics. The Review of Maritime Transport 2024 report by UNCTAD noted that disruptions to key sea lanes have led to adjustments in global shipping routes, increased vessel transit times, and soaring logistics costs. In Indonesia, the maritime transport sector remains essential in supporting international trade and interregional connectivity. The rise in vessel traffic and the trend toward port and logistics service digitalization present strategic opportunities for the Company to strengthen its position in the tug and pilotage service industry.

According to BPS data, the Transportation and Warehousing sector grew by 8.69% (c-to-c) throughout 2024, reflecting the increasing demand for both sea and land logistics services. In this context, the Company's role as a provider of pilotage, tug assistance, and vessel services at ports is highly relevant in ensuring the seamless and efficient operation of export-import activities and domestic distribution. Given the increasing complexity of global supply chain challenges, the Company has the opportunity to expand its reach and improve service standards through fleet modernization, technology integration, and operational efficiency enhancements.

In light of these global and national trends, the Company is well-positioned not only to remain resilient but also to strengthen its role within the national logistics ecosystem. Supportive national policies on industrial downstreaming, digitalization, and port infrastructure development serve as key catalysts in driving a more efficient and competitive transformation of the maritime sector.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors demonstrated strong performance throughout 2024, showing the ability to execute their managerial roles with precision and agility. This is evidenced by the

Sangat Baik, di samping kinerja yang solid yang ditunjukan pada peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp1.345,03 miliar serta laba tahun berjalan yang meningkat 5,82% menjadi Rp166,84 miliar. Sementara itu struktur keuangan tetap sehat dengan total aset Rp1.649,99 miliar dan ekuitas Rp1.289,11 miliar, serta rasio lancar sebesar 265% yang menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Capaian ini menjadi faktor pendukung keberhasilan strategi pertumbuhan dan pengelolaan biaya yang diterapkan Direksi sepanjang tahun.

Struktur keuangan Perusahaan juga tetap terjaga kuat, tercermin dari total aset yang mencapai 1.649,99 miliar serta ekuitas sebesar 1.289,11 miliar, yang mendominasi struktur pendanaan. Rasio lancar (*current ratio*) yang menurun sebesar 265% menunjukkan likuiditas yang sangat sehat dan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Di sisi operasional, realisasi produksi jasa penundaan dan pemanduan kapal juga melampaui target, khususnya pada penundaan di pelabuhan Tersus dengan peningkatan hingga 149,68% dibanding tahun 2023 dan pencapaian hingga 152,97% terhadap RKAP untuk jam pelayanan. Hal tersebut menjadi indikator keberhasilan optimalisasi aset dan strategi ekspansi yang diterapkan.

Direksi juga dinilai berhasil mengimplementasikan transformasi digital dan inisiatif keberlanjutan, melalui penerapan sistem ERP dan digitalisasi layanan marine, serta pengembangan armada kapal dengan teknologi ramah lingkungan, yang sejalan dengan komitmen *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kepemimpinan Direksi dalam menjaga stabilitas kinerja Perusahaan di tengah tantangan industri dan dinamika global, serta mendorong Direksi untuk terus melanjutkan penguatan kapabilitas dan ekspansi bisnis berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) score for 2024 reaching 110 which categorized as excellent The professionalism of the Board of Directors was reflected in the Company's solid financial performance, with operating revenue recorded at Rp1,345.03 billion and a consistently healthy financial structure. Net profit for the year reached Rp166.84 billion, an increase of 5.82% from 2023, highlighting operational efficiency and effective cost control. These achievements supported the success of the growth strategy and cost management implemented by the Board of Directors throughout the year.

The Company's financial structure also remained strong, as reflected in total assets amounting to Rp1,649.99 billion and equity of Rp1,289.11 billion, which dominates the funding structure. The current ratio, which improved to 265%, indicates extremely sound liquidity and the Company's strong ability to meet its short-term obligations.

On the operational side, the actual production of tug and pilotage services also exceeded targets, particularly in tugging operations at Tersus, which saw an increase of up to 149.68% compared to 2023 and achievement of 152.97% of the 2024 RKAP in service hours. This indicates the success of asset optimization and the expansion strategies undertaken.

The Board of Directors was also deemed successful in implementing digital transformation and sustainability initiatives, including the adoption of an ERP system and the digitalization of marine services, as well as the development of an environmentally friendly vessel fleet. These efforts align with the Company's commitment to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Overall, the Board of Commissioners commends the leadership of the Board of Directors in maintaining the Company's performance stability amidst industrial challenges and global dynamics and encourages them to continue strengthening capabilities and expanding sustainable business initiatives to create added value for all stakeholders.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi telah disusun secara komprehensif dan responsif terhadap dinamika industri jasa maritim yang semakin kompleks. Langkah-langkah strategis yang diambil, termasuk penguatan efisiensi operasional, penerapan prinsip keberlanjutan melalui inisiatif ramah lingkungan, serta pemanfaatan peluang ekspansi di bawah koordinasi Subholding Pelindo Jasa Maritim, merupakan fondasi yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang Perusahaan. Terlebih, dengan latar belakang ketidakpastian global seperti tensi geopolitik dan perang dagang, Dewan Komisaris memiliki keyakinan terhadap ketangguhan Perusahaan yang didukung oleh tata kelola yang adaptif dan inovasi berkelanjutan dapat menjadi kekuatan utama untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kesiapan dan kesiagaan Direksi dalam merespons perubahan, serta optimis bahwa strategi yang dijalankan akan memperkuat posisi Perusahaan sebagai pelaku utama dalam industri jasa pelabuhan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG

Komitmen Direksi dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah dibuktikan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh aspek operasional Perusahaan. Upaya ini tercermin dari penguatan struktur tata kelola, pembaruan kebijakan internal sesuai Pedoman Umum GCG Indonesia (PUGKI) 2021 dan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), serta penanaman budaya kerja berbasis nilai-nilai AKHLAK. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah strategis tersebut telah memperkuat integritas Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners views the business prospects formulated by the Board of Directors as comprehensive and responsive to the increasingly complex dynamics of the maritime services industry. The strategic measures that include the strengthening of operational efficiency, the implementation of sustainability principles through environmentally friendly initiatives, and the pursuit of expansion opportunities under the coordination of Subholding Pelindo Jasa Maritim, form a solid foundation for driving the Company's long-term growth. Particularly in the context of ongoing global uncertainties, such as geopolitical tensions and trade wars, the Board of Commissioners is confident in the Company's resilience. This resilience is supported by adaptive governance and continuous innovation, which are considered key strengths in maintaining stability and enhancing competitiveness. Therefore, the Board of Commissioners extends its appreciation for the readiness and vigilance demonstrated by the Board of Directors in responding to change and expresses optimism that the strategies being implemented will strengthen the Company's position as a leading and sustainable player in the national port services industry.

VIEW ON GCG IMPLEMENTATION

The commitment of the Board of Directors implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) has been demonstrated across all aspects of the Company's operations in a consistent manner. This effort is reflected in the strengthening of the governance structure, the updating of internal policies in accordance with the Indonesia GCG General Guidelines (PUGKI) 2021 and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), as well as the cultivation of a work culture rooted in the AKHLAK core values. The Board of Commissioners believes that these strategic actions have reinforced the Company's integrity in conducting its business activities, thereby enhancing stakeholder trust.

Dewan Komisaris juga mencermati bahwa implementasi GCG tidak hanya bersifat struktural, namun juga kultural, sebagaimana ditunjukkan melalui sosialisasi Kode Etik secara berkelanjutan serta pengoperasian *Whistleblowing System* (WBS) yang menjamin perlindungan pelapor dan mendorong keterbukaan. Selain itu, upaya penguatan manajemen risiko yang mencakup evaluasi terhadap risiko teknologi informasi dinilai sangat relevan di tengah kompleksitas tantangan bisnis saat ini.

Atas seluruh inisiatif tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian Perusahaan dalam memperoleh skor ACGS sebesar 118,39 poin, yang mengindikasikan peningkatan signifikan dan menempatkan Perusahaan dalam kategori "*Leadership in Corporate Governance*". Pencapaian ini menjadi cerminan nyata dari tata kelola yang semakin tangguh dan menjadi landasan kokoh bagi Perusahaan dalam mewujudkan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris berperan aktif memastikan proses pengawasan terhadap jalannya pengelolaan perusahaan berlangsung secara optimal. Dalam rangka mendukung efektivitas peran ini, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketiga komite tersebut memiliki peran strategis dalam menelaah, mengkaji, dan memberikan masukan konstruktif kepada Direksi guna mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola Perusahaan. Kinerja masing-masing komite dievaluasi berdasarkan pelaksanaan program kerja, keselarasan dengan rencana yang telah ditetapkan, partisipasi dalam rapat, serta ketajaman dan relevansi rekomendasi yang disampaikan.

The Board of Commissioners also observes that GCG implementation goes beyond structure as it has become cultural. This is demonstrated by the continuous dissemination of the Code of Conduct and the operation of a Whistleblowing System (WBS) that ensures whistleblower protection and fosters transparency. In addition, the strengthening of risk management, especially in the area of information technology risk assessment, is considered highly relevant amid the complexities of the business environment nowadays.

In recognition of all these initiatives, the Board of Commissioners commends the Company for achieving an ACGS score of 118.39 points, a significant improvement that places the Company in the "Leadership in Corporate Governance" category. This achievement is a clear reflection of increasingly robust governance and provides a solid foundation for the Company to realize sustainable long-term growth while delivering added value to all stakeholders.

EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its function, the Board of Commissioners actively ensures that the supervisory process over the Company's management is conducted optimally. To support the effectiveness of this role, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees including the Audit Committee, the Risk Management Oversight Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. These committees play strategic roles in reviewing, assessing, and providing constructive input to the Board of Directors to foster continuous improvement in the Company's governance. The performance of each committee is evaluated based on the implementation of their work programs, alignment with the plans, participation in meetings, as well as the depth and relevance of the recommendations provided.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, terjadi perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris Perusahaan. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) 2024, Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Zuhri Iryansyah sebagai Komisaris Utama, R.R. Dewi Ariyani sebagai Komisaris, dan Bay Mokhamad Hasani sebagai Komisaris Independen. Kemudian, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 September 2024, dilakukan penambahan satu anggota Dewan Komisaris, yaitu F. Budi Prayitno sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian, per akhir 2024, Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 4 (empat) anggota, sebagaimana berikut ini:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2024, there were changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. Prior to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS), the Board of Commissioners consisted of 3 (three) members, namely Zuhri Iryansyah as President Commissioner, R.R. Dewi Ariyani as Commissioner, and Bay Mokhamad Hasani as Independent Commissioner. Subsequently, during the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on September 25, 2024, one additional member was appointed to the Board of Commissioners, namely F. Budi Prayitno as Independent Commissioner. Thus, as of the end of 2024, the Company's Board of Commissioners consists of 4 (four) members, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Oktober 2020 Resolution of the Annual GMS dated October 13, 2020	13 Oktober 2020 October 13, 2020
R.R Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 April 2022 Resolution of the Annual GMS dated April 14, 2022	14 April 2022 April 14, 2022
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juli 2020 Resolution of the Annual GMS dated July 15, 2020	15 Juli 2020 July 15, 2020
F. Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 25 September 2024 Resolution of Extraordinary GMS dated September 25, 2024	25 September 2024 September 25, 2024

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Direksi serta seluruh insan Perusahaan yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja luar biasa dalam mewujudkan pencapaian dan sasaran Perusahaan.

STAKEHOLDER APPRECIATION

On behalf of the Board of Commissioners, we extend our highest appreciation to the Shareholders for their continued trust and support. We also express our gratitude to the Board of Directors and all employees of the Company who have demonstrated outstanding dedication and performance in achieving the Company's goals and milestones.

Kami juga menghargai setiap mitra kerja dan mitra usaha yang telah menjadikan Perusahaan sebagai rekan tepercaya dalam perjalanan bisnisnya. Kami berharap ke depan, Perusahaan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja, menghadirkan nilai terbaik di setiap aspek, serta menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan penuh integritas dan inovasi.

We deeply value all business partners and associates who have entrusted the Company as a reliable partner in their business journey. Moving forward, we hope the Company will continue to enhance the quality of its services and performance, deliver optimal value in every aspect, and meet stakeholder expectations with integrity and innovation.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, kami, Dewan Komisaris, senantiasa hadir memberikan dorongan dan semangat kepada seluruh insan Perusahaan agar tetap sigap, adaptif, dan siap menghadapi tantangan perubahan. Dengan kolaborasi yang erat dan sinergi yang kuat bersama seluruh pihak, kami optimistis hubungan yang harmonis dan produktif dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus terjalin dan berkembang.

As part of our commitment to support sustainable growth, we, the Board of Commissioners, remain committed to encouraging and inspiring all personnel of the Company to stay agile, adaptive, and ready to face the challenges of change. With close collaboration and strong synergy among all parties, we are confident that a harmonious and productive relationship with all stakeholders will continue to thrive and grow.

Atas Nama Dewan Komisaris
Jakarta, 23 April 2025
Jakarta, April 23, 2025



Zuhri Iryansyah
Komisaris Utama
President Commissioner



Shanti Puruhita

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

President Director concurrently Commercial Director and Business Development

Laporan Direksi
Directors' Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat sampaikan Laporan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Tahun ini merupakan periode yang penuh tantangan sekaligus peluang, di mana Perusahaan terus menunjukkan resiliensi dan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika industri maritim serta perubahan global yang cepat. Melalui komitmen terhadap keunggulan operasional, inovasi layanan, dan penguatan tata kelola, Perusahaan berhasil menjaga kinerja positif dan terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Praise and gratitude to God Almighty, for by His grace and blessings, we are able to present the Board of Directors' Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk for the fiscal year ending December 31, 2024. This year has been a period full of both challenges and opportunities, during which the Company has continued to demonstrate resilience and adaptability in navigating the dynamic maritime industry and rapid global changes. Through our commitment to operational excellence, service innovation, and governance enhancement, the Company has managed to maintain positive performance and continue to deliver added value to all stakeholders.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Pada tahun 2024, perekonomian global menunjukkan ketahanan yang relatif baik meskipun diwarnai oleh ketidakpastian geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan tekanan inflasi yang berkelanjutan. International Monetary Fund (IMF) pada laporan World Economic Outlook mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tetap stabil di level 3,2% (yoy) pada tahun 2024, meskipun lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelum pandemi. Inflasi global juga menunjukkan tren penurunan dari 6,7% pada 2023, menjadi 5,8% pada 2024, dan diperkirakan mencapai 4,3% pada 2025. Seiring dengan penurunan inflasi, perekonomian global masih dihadapi dengan ketidakpastian yang dapat memengaruhi stabilitas. Contohnya, seperti risiko global yang meningkat seiring perlambatan pertumbuhan di Tiongkok, tensi geopolitik di Timur Tengah, serta meningkatnya kebijakan proteksionisme yang berpotensi memicu tensi perdagangan.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTS

In 2024, the global economy showed relative resilience despite being overshadowed by geopolitical uncertainty, supply chain disruptions, and sustained inflationary pressures. The International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook report, projected global economic growth to remain steady at 3.2% (yoy) in 2024, although this is still below pre-pandemic averages. Global inflation also showed a downward trend from 6.7% in 2023 to 5.8% in 2024 and is projected to decline further to 4.3% in 2025. Despite this decline in inflation, the global economy continues to face uncertainties that could impact stability. For example, slowing growth in China, rising geopolitical tensions in the Middle East, and increased protectionist policies that could trigger trade tensions.

Perkembangan ekonomi global tersebut turut memengaruhi arah pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terus bertahan di tengah tantangan eksternal. Berdasarkan Berita Resmi

These global economic trends have influenced the direction of Indonesia's economic growth, which has remained stable despite external challenges. According to the Official

Statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% (yoy), sedikit melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,05% (yoy). Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh Jasa Lainnya sebesar 11,36% (yoy), diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,08% (yoy), Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,92% (yoy), dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,45% (yoy), yang menunjukkan adanya pemulihan permintaan masyarakat dan aktivitas logistik yang lebih intensif. Sektor transportasi dan pergudangan secara khusus menjadi sorotan karena mencatat pertumbuhan signifikan dan konsisten, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekspor-impor yang turut menopang kinerja jasa maritim dan pelabuhan. Ekspor barang dan jasa tumbuh 6,51% (c-to-c), menunjukkan daya saing perdagangan luar negeri yang tetap kuat di tengah dinamika global. Kinerja ini menciptakan ruang pertumbuhan bagi Perusahaan, yang berperan penting dalam mendukung kelancaran arus barang melalui jasa pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan-pelabuhan strategis nasional.

Bagi Perusahaan, jasa kepelabuhanan dan pemanduan/penundaan kapal memegang peranan strategis dalam mendukung kinerja pelabuhan dan kelancaran logistik maritim di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan posisi yang berada pada jalur pelayaran global strategis, efisiensi dan keandalan layanan pendukung pelabuhan menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing logistik Indonesia.

Menurut *Review* of Maritime Transport 2024 oleh UNCTAD, konektivitas pelabuhan dan efisiensi *port call* sangat menentukan kelancaran arus barang. Di Indonesia, tantangan utama adalah meningkatkan produktivitas pelabuhan agar dapat mengimbangi volume perdagangan yang terus tumbuh. Peran Perusahaan sebagai penyedia jasa pemanduan dan penundaan di beberapa wilayah, seperti 11 Pelabuhan Umum milik BUP Pelindo, 7 Pelabuhan/Tersus/STS milik BUP JAI, 3 wilayah *joint operation*, dan 3 KSO sangat penting dalam menjaga waktu bongkar muat dan kedatangan kapal tetap efisien.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi nasional dan lokasi sejumlah pelabuhan utama IPCM seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak, memberikan kontribusi sebesar 57,02% terhadap PDB nasional, dengan pertumbuhan 4,92% (c-to-c). Dominasi ini menegaskan pentingnya efisiensi operasional pelabuhan di wilayah ini, yang sangat bergantung pada keandalan jasa pemanduan dan penundaan kapal untuk menjaga kelancaran logistik nasional.

Statistical Release published by Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew by 5.02% (yoy), slightly slower than the 5.05% (yoy) growth recorded the previous year. This growth was driven in part by the "Other Services" sector at 11.36% (yoy), followed by "Business Services" at 8.08% (yoy), "Transportation and Warehousing" at 7.92% (yoy), and "Information and Communication" at 7.45% (yoy), indicating a recovery in public demand and more intensive logistics activity. The transportation and warehousing sector, in particular, drew attention for its significant and consistent growth, aligned with rising export-import activities that support the performance of maritime and port services. Exports of goods and services grew by 6.51% (c-to-c), highlighting the continued strength of foreign trade amid global uncertainties. This performance has created growth opportunities for the Company, which plays a key role in ensuring the smooth flow of goods through pilotage and tugboat services at strategic national ports.

For the Company, port and vessel pilotage/towing services play a strategic role in supporting port operations and maritime logistics efficiency in Indonesia. As an archipelagic country with more than 17,000 islands and a position on key global shipping routes, efficient and reliable port support services are critical to national economic growth and Indonesia's logistics competitiveness.

According to the Review of Maritime Transport 2024 by UNCTAD, port connectivity and port call efficiency are major determinants of the smooth flow of goods. In Indonesia, the main challenge lies in improving port productivity to keep pace with increasing trade volumes. The Company's role as a provider of pilotage and towing services in various areas including 11 public ports operated by Pelindo's BUP, 7 ports/TUKS/STS under JAI's BUP, 3 joint operation areas, and 3 KSO major ports such as Tanjung Priok, Tanjung Perak, and Makassar is vital to ensuring efficient vessel turnaround and berthing times.

BPS data shows that Java Island, the nation's economic center and the location of several key IPCM ports such as Tanjung Priok and Tanjung Perak, contributes 57.02% to the national GDP, with a growth rate of 4.92% (c-to-c). This dominance underlines the importance of operational efficiency at ports in this region, which heavily rely on the reliability of pilotage and towing services to maintain the flow of national logistics.

Sektor maritim, termasuk industri pelabuhan dan logistik laut, menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, sektor ini juga dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan digital, tren dekarbonisasi, serta meningkatnya permintaan akan efisiensi dan transparansi layanan pelabuhan. Adapun untuk menghadapi hal tersebut, Perusahaan telah menerapkan layanan *green marine* dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan pada armada kapal tunda dan motor pandu.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas rantai pasok dan ekspektasi pasar terhadap efisiensi logistik, Perusahaan berada dalam posisi strategis untuk berkontribusi pada transformasi jasa pelabuhan di Indonesia. Dengan mengedepankan kemampuan berinovasi yang dimiliki, Perusahaan dapat memainkan peran lebih besar dalam memperkuat daya saing logistik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Tantangan industri maritim yang terus berkembang menuntut Perusahaan untuk senantiasa adaptif dan terarah dalam menentukan strategi. Menyikapi hal tersebut, Perusahaan menyusun strategi dan kebijakan strategis dengan mengacu pada hasil analisis mendalam atas kondisi internal dan eksternal, penyusunan strategi RJPP, serta perumusan inisiatif strategis dan *roadmap* Perusahaan. Analisis internal menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki kekuatan signifikan dalam penguasaan pasar jasa pelayanan, serta kapabilitas operasional yang mumpuni dalam penyediaan jasa tunda dan pengelolaan kapal. Dari sisi eksternal, pertumbuhan sektor logistik dan maritim nasional, termasuk peluang pasar baru di luar Pelindo dan dukungan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menjadi pendorong utama pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi RJPP JAI 2023–2027 dirancang secara holistik dengan pendekatan *multi-level*, dimulai dari visi dan misi yang diturunkan menjadi tujuan korporat, strategi bisnis, hingga strategi fungsional. Setiap lini bisnis dirumuskan strategi pengembangannya secara spesifik, baik melalui integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, maupun modernisasi armada. Strategi-strategi ini disusun untuk merespons kebutuhan sinergi dalam Pelindo Group serta meningkatkan daya saing di luar pasar internal.

The maritime sector, including port and sea logistics industries, is a crucial pillar supporting national economic growth. However, the sector is also being challenged to adapt to digital transformation, decarbonization trends, and increasing demands for efficiency and transparency in port services. To address these challenges, the Company has implemented green marine services by introducing environmentally friendly technologies in its tugboat and pilot vessel fleets.

As supply chains become increasingly complex and market expectations for logistics efficiency continue to rise, the Company is in a strategic position to contribute to the transformation of port services in Indonesia. By leveraging its innovation capabilities, the Company can play a greater role in strengthening national logistics competitiveness while supporting sustainable economic growth.

CORPORATE STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

The growing challenge in the maritime industry has forced the Company to remain adaptive and directed in determining strategy. Facing this situation, the Company devised strategies and strategic policies based on in-depth analysis on internal and external situation, RJPP strategy, and strategic initiative, and business roadmap. From the internal analysis, the Company has a deep understanding on understanding market situation with operational capability that is capable in providing excellent tug services and vessel management. From the external side, the growth in the national logistic and maritime sectors, including new market opportunity outside Pelindo and government policy on Special Economic Zone becomes the main driver of business development.

Based on the results of this analysis, JAI's 2023–2027 Long-Term Corporate Plan (RJPP) was designed holistically using a multi-level approach, starting from the vision and mission, which are translated into corporate goals, business strategies, and functional strategies. Each business line has its own specifically formulated development strategy, whether through horizontal integration, market penetration, product development, or fleet modernization. These strategies are designed to respond to the need for synergy within the Pelindo Group and to enhance competitiveness beyond the internal market.

Selanjutnya, inisiatif strategis dijabarkan dalam 5 (lima) pilar utama, yakni *horizontal integration, market penetration & development, product development, fleet modernization & optimization,* dan *operational capability enhancement*. Salah satunya, pengembangan produk baru seperti layanan *marine advisory, consultancy*, dan small LNG *shipping* sebagai upaya diversifikasi bisnis dan penambahan *revenue stream*. Selain itu, Perusahaan menginisiasi transformasi digital dan penguatan SDM melalui implementasi sistem ERP terintegrasi, digitalisasi layanan *marine*, serta sentralisasi *knowledge management,* yang semuanya ditujukan untuk mendukung operational *excellence* dan efektivitas organisasi.

Sebagai upaya mengawal pelaksanaan strategi ini, *roadmap* RJPP dibagi dalam 5 (lima) tema tahunan yang mencerminkan tahapan transformasi dan integrasi bisnis secara progresif, dimulai dari *Value Expansion* di 2023 hingga *Global Marine Services Provider* di 2027. Khususnya di tahun 2024, fokus diarahkan pada penguatan kapabilitas inti terintegrasi (*Elevating the Integrated Core Capabilities*).

Strategi yang dijalani di tahun 2024 menjadi landasan strategis untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan agar mampu mencapai 2,5 hingga 3,0 kali lipat dari posisi pada tahun 2019. Target tersebut diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan terhadap nilai aset dan kapitalisasi pasar, masing-masing hingga minimal Rp3,00 triliun pada tahun 2024. Dalam rangka mewujudkannya, Perusahaan menyusun strategi komprehensif yang mencakup 4 (empat) pilar utama.

Pertama, peningkatan daya saing akan menjadi fokus utama melalui pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan mutu produk dan layanan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, perbaikan citra dan reputasi Perusahaan, serta kolaborasi strategis dengan mitra bisnis.

Kedua, Perusahaan akan menjalankan ekspansi bisnis secara organik maupun inorganik. Hal ini dilakukan dengan memperluas pasar yang telah ada, menambah jumlah pelanggan dan variasi produk serta layanan, hingga menjajaki peluang usaha baru yang relevan melalui kerja sama strategis, akuisisi, atau *merger*.

The strategic initiatives are further elaborated into five main pillars: horizontal integration, market penetration & development, product development, fleet modernization & optimization, and operational capability enhancement. For example, the development of new products such as marine advisory services, consultancy, and small LNG shipping, as part of business diversification efforts and the addition of new revenue streams. In addition, the Company is initiating digital transformation and human capital development through the implementation of an integrated ERP system, digitization of marine services, and centralization of knowledge management—all aimed at supporting operational excellence and organizational effectiveness.

To guide the implementation of this strategy, the RJPP roadmap is divided into five annual themes that reflect the progressive stages of business transformation and integration, starting from Value Expansion in 2023 to Global Marine Services Provider by 2027. In particular, the focus for 2024 is directed at strengthening the integrated core capabilities (Elevating the Integrated Core Capabilities).

The strategy pursued in 2024 serves as a strategic foundation to drive the Company's growth to reach 2.5 to 3.0 times its 2019 position. This target is expected to bring significant improvements in asset value and market capitalization, each reaching at least Rp3.00 trillion by 2024. To achieve this, the Company has developed a comprehensive strategy encompassing four main pillars.

First, enhancing competitiveness will be the main focus through the development of human capital competencies and quality, improvement of product and service standards, strengthening of governance and risk management, enhancement of corporate image and reputation, and strategic collaboration with business partners.

Second, the Company will pursue both organic and inorganic business expansion. This includes expanding existing markets, increasing the number of customers and variety of products and services, and exploring new relevant business opportunities through strategic partnerships, acquisitions, or mergers.

Ketiga, optimalisasi kinerja operasional dan keuangan juga menjadi prioritas dengan memperkuat sumber pendanaan untuk modal kerja dan ekspansi, memaksimalkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan untuk efisiensi, serta mendorong digitalisasi guna mempercepat proses kerja dan pengembangan produk. Peran aktif Direksi dalam merumuskan strategi dan kebijakan menjadi elemen penting dalam mendorong efektivitas inisiatif ini.

Terakhir, fokus pada pelanggan diperkuat dengan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara berkala, tindak lanjut atas hasil survei untuk perbaikan berkelanjutan, serta pemberian *customer awards* di wilayah BUP JAI sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan kontribusi pelanggan terhadap pertumbuhan Perusahaan.

Direksi memiliki peran penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan visi jangka panjang serta mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang berkembang. Selain itu, Direksi turut menentukan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh guna memastikan pencapaian tujuan bisnis Perusahaan.

Penyusunan strategi ini dilakukan secara cermat melalui pelaksanaan rapat, analisis menyeluruh, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada data dan informasi yang relevan. Direksi secara konsisten berupaya mengembangkan strategi yang adaptif dalam menghadapi dinamika pasar dan meningkatkan daya saing Perusahaan. Di samping itu, Direksi juga menjamin bahwa setiap kebijakan strategis yang ditetapkan tetap sejalan dengan nilai-nilai, misi, dan tujuan jangka panjang Perusahaan.

Dimodali dengan penerapan strategi yang terarah dan adaptif, Direksi optimis bahwa Perusahaan dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di tengah dinamika industri jasa maritim. Seluruh inisiatif yang dijalankan juga mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memperkuat fondasi menuju transformasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan di masa depan.

Third, optimizing operational and financial performance will also be prioritized by strengthening funding sources for working capital and expansion, maximizing the use of financial products and services for efficiency, and promoting digitalization to accelerate workflows and product development. The active role of the Board of Directors in formulating strategies and policies is a key element in driving the effectiveness of these initiatives.

Lastly, customer focus is reinforced through regular customer satisfaction surveys, follow-up actions based on survey results for continuous improvement, and the provision of customer awards in JAI's Port Business Units (BUP) as a token of appreciation for customer loyalty and their contribution to the Company's growth.

The Board of Directors plays a vital role in formulating the direction of the Company's policies and strategies. In carrying out this function, the Board of Directors is responsible for setting the long-term vision and identifying emerging opportunities and challenges. Furthermore, the Board of Directors also defines the strategic steps to be taken to ensure the achievement of the Company's business objectives.

The development of these strategies is carried out meticulously through meetings, comprehensive analysis, and data- and information-driven decision-making. The Board of Directors consistently strives to develop adaptive strategies in response to market dynamics and to enhance the Company's competitiveness. In addition, the Board ensures that every strategic policy adopted remains aligned with the Company's values, mission, and long-term goals.

With the implementation of focused and adaptive strategies, the Board of Directors is optimistic that the Company can achieve sustainable growth and enhance its competitiveness amid the evolving maritime services industry. All initiatives undertaken also reflect the Company's commitment to creating added value for shareholders, service users, and other stakeholders, while also strengthening the foundation for a more robust and sustainable transformation in the future.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Sejalan dengan strategi yang telah dirumuskan, Direksi menaruh harapan besar agar seluruh rencana tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Sebagai upaya mewujudkannya, Direksi secara konsisten memastikan tindak lanjut atas strategi yang telah ditetapkan melalui pemantauan dan penilaian kinerja untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara berkala, antara lain melalui forum rapat Direksi yang diselenggarakan secara rutin. Atas langkah-langkah tersebut, Direksi berkomitmen untuk terus memantau progres serta pencapaian terhadap sasaran yang telah ditentukan.

PERBANDINGAN ANTARA PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI

Dalam rangka mewujudkan layanan yang unggul dan berdaya saing tinggi, Perusahaan menetapkan target kinerja yang terukur untuk dicapai sepanjang tahun 2024. Selama periode tersebut, Perusahaan menjalankan aktivitas operasional secara terstruktur dan efisien terlihat dari capaian kinerja yang menunjukkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan.

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan berhasil menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup solid meskipun menghadapi tantangan di sektor maritim nasional dan global. Perusahaan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.345,03 miliar, lebih tinggi 15,65% dari target sebesar Rp1.162,98 miliar. Capaian tersebut terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan dari jasa pelayanan kapal yang menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang tahun berjalan. Sejalan dengan kinerja pendapatan, laba usaha yang terealisasi mencapai Rp207,40 miliar, lebih tinggi 3,50% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp200,40 miliar.

Tidak hanya itu, laba sebelum pajak penghasilan badan tercatat sebesar Rp214,19 miliar, melampaui proyeksi sebesar Rp204,19 miliar atau naik sebesar 4,89%. Lebih lanjut, laba tahun berjalan berhasil mencapai Rp166,84 miliar, sedikit lebih tinggi dari target Rp165,92 miliar, mencerminkan peningkatan sebesar 0,56%.

Kemudian pada perspektif struktur permodalan, total aset Perusahaan pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.649,98 miliar, atau meningkat 7,24% dibandingkan dengan target

PROCESSES UNDERTAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

In line with the formulated strategies, the Board of Directors places great emphasis on ensuring the optimal implementation of all strategic plans. To achieve this, the Board of Directors consistently follows up on the execution of established strategies through continuous monitoring and performance assessment, ensuring that the strategies and policies remain relevant to the Company's evolving conditions and needs. These monitoring and evaluation efforts are carried out regularly, including through routine Board of Directors meetings. Through these steps, the Board is committed to consistently tracking progress and achievement of the targets.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

To deliver excellent and highly competitive services, the Company set measurable performance targets to be achieved throughout 2024. During this period, the Company conducted its operations in a structured and efficient manner, as reflected in its consistent performance and the effective implementation of strategies.

Throughout 2024, the Company achieved solid performance results despite facing challenges within the national and global maritime sectors. The Company recorded operating revenue of Rp1,345.03 billion, exceeding the target of Rp1,162.98 billion by 15.65%. This achievement was primarily driven by an increase in revenue from vessel services, which showed significant growth throughout the year. In line with revenue performance, operating profit reached Rp207.40 billion, surpassing the target of Rp200.40 billion by 3.50%.

Furthermore, profit before corporate income tax amounted to Rp214.19 billion, exceeding the projection of Rp204.19 billion, an increase of 4.89%. Net profit for the year reached Rp166.84 billion, slightly above the target of IDR 165.92 billion, reflecting an increase of 0.56%.

From a capital structure perspective, the Company's total assets at the end of 2024 stood at Rp1,649.98 billion, an increase of 7.24% compared to the target of Rp1,538.53

sebesar Rp1.538,53 miliar. Peningkatan ini utamanya didorong oleh kenaikan piutang usaha neto dari pihak berelasi. Di sisi lain, total liabilitas mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp360,87 miliar, atau 156,70% dari target sebesar Rp230,29 miliar. Sedangkan jumlah ekuitas tercatat sebesar Rp1.289,11 miliar, atau 98,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.308,24 miliar. Secara keseluruhan, total liabilitas dan ekuitas tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.649,98 miliar, atau mencapai 107,24% dari target sebesar Rp1.538,53 miliar.

KENDALA YANG DIHADAPI

Sepanjang perjalanan di tahun 2024, Perusahaan menghadapi berbagai kendala yang menantang, baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama datang dari kebutuhan untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama Perusahaan. Proses peningkatan kualitas SDM ini tidak hanya membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, dinamika pasar yang terus berkembang menuntut Perusahaan untuk selalu menyesuaikan layanan dan produk, yang memerlukan ketangkasan operasional dan inovasi berkelanjutan.

Penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih responsif juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menavigasi ketidakpastian eksternal serta perubahan regulasi yang cepat. Selain itu, upaya memperluas jangkauan operasional di luar wilayah Pelindo melalui status sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) juga tidak terlepas dari tantangan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta intensitas persaingan di wilayah-wilayah baru.

Kendala lain muncul dalam penguatan struktur pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung ekspansi dan operasional harian, di mana Perusahaan harus memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Sementara itu, percepatan digitalisasi dan otomasi proses kerja menghadapi tantangan teknis dan kesiapan sumber daya, serta membutuhkan sinergi lintas fungsi yang solid. Di tengah semua tantangan tersebut, menjaga kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan tetap menjadi prioritas, yang memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan konsisten di seluruh lini operasional Perusahaan.

Dalam rangka merespons tantangan yang dihadapi, Perusahaan melangkah dengan semangat transformasi sejalan dengan tema *Elevating the Integrated Core Capabilities*

billion. This growth was mainly driven by an increase in net trade receivables from related parties. On the other hand, total liabilities rose significantly to Rp360.87 billion, or 156.70% of the target of Rp230.29 billion. Meanwhile, total equity was recorded at Rp1,289.11 billion, representing 98.54% of the target of Rp1,308.24 billion. Overall, total liabilities and equity in 2024 amounted to Rp1,649.98 billion, achieving 107.24% of the target of Rp1,538.53 billion.

CHALLENGES FACED

Throughout 2024, the Company encountered a range of challenges, both internal and external. One of the primary issues was the need to strengthen the competence and professionalism of Human Resources, which serve as the Company's main driving force. Improving the quality of HR not only required substantial time and investment but also faced challenges in fostering a work culture that is adaptive to change. On the other hand, evolving market dynamics demanded that the Company continuously adjust its services and products, requiring operational agility and ongoing innovation.

Implementing more responsive governance and risk management also posed its own set of challenges, particularly in navigating external uncertainties and rapid regulatory changes. Additionally, efforts to expand operational reach beyond the Pelindo area through its status as a Port Business Entity (Badan Usaha Pelabuhan/BUP) were met with licensing hurdles, infrastructure readiness issues, and heightened competition in new regions.

Another challenge was reinforcing the funding structure required to support both expansion and daily operations, where the Company had to ensure sufficient liquidity amid rising financing needs. Meanwhile, the acceleration of digitalization and automation efforts faced technical and resource readiness barriers, requiring solid cross-functional collaboration. Amid these challenges, maintaining customer satisfaction and strengthening stakeholder relationships remained top priorities, requiring a sustainable and consistent approach across all operational lines.

In response to these challenges, the Company advanced with a spirit of transformation, aligned with the theme "Elevating the Integrated Core Capabilities" set out in the

dalam RJPP 2023–2027. Guna mewujudkan sasaran tersebut, Perusahaan menetapkan arah strategis yang menyeluruh dan terintegrasi. Fokus utama diarahkan pada penguatan kompetensi serta profesionalisme Sumber Daya Manusia sebagai fondasi penggerak utama Perusahaan. Di saat yang sama, upaya peningkatan kualitas layanan dan produk terus didorong untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Penerapan tata kelola Perusahaan dan manajemen risiko juga diperkuat agar lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan eksternal.

Selain itu, Perusahaan secara aktif membangun citra yang positif dan terpercaya di mata para pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis tersebut turut dilengkapi dengan pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan serta ekspansi usaha yang dilakukan baik melalui pertumbuhan dari dalam maupun melalui kolaborasi eksternal dan akuisisi yang sejalan dengan arah bisnis jangka panjang Perusahaan.

Seluruh upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat fondasi internal Perusahaan, tetapi juga membuka ruang bagi perluasan jangkauan operasional yang lebih luas dan strategis di masa mendatang. Perusahaan memiliki peluang memperluas layanan di luar wilayah Pelindo, dengan dukungan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memungkinkan ekspansi ke pelabuhan umum maupun terminal khusus, termasuk yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus. Di samping itu, Perusahaan juga terus mendorong pertumbuhan melalui penguatan pasar yang telah ada dengan menambah jumlah pelanggan serta memperluas ragam produk dan layanan yang ditawarkan. Kesempatan untuk menjajaki usaha baru yang sejalan atau mendukung pertumbuhan jangka panjang pun terbuka melalui skema kemitraan strategis, akuisisi, maupun *merger*.

Dari sisi operasional dan keuangan, Perusahaan berfokus pada penguatan struktur pendanaan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan ekspansi, memanfaatkan secara optimal layanan dari instansi keuangan guna mendorong produktivitas, serta mempercepat digitalisasi dan otomasi proses kerja sebagai bagian dari pengembangan layanan. Selain itu, orientasi pada pelanggan juga menjadi perhatian utama, yang diwujudkan melalui pelaksanaan survei kepuasan pelanggan, tindak lanjut atas hasil survei tersebut, serta penguatan hubungan dengan pelanggan melalui apresiasi dalam bentuk penghargaan di wilayah operasional BUP JAI. Seluruh arah kebijakan ini dirancang secara matang oleh jajaran Direksi sebagai bagian dari komitmen strategis dalam membawa Perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

2023–2027 Long-Term Corporate Plan (RJPP). To achieve this vision, the Company established a comprehensive and integrated strategic direction. The main focus was placed on strengthening the competence and professionalism of Human Resources as the core foundation of the Company. Simultaneously, efforts to enhance service and product quality were intensified to address the increasingly dynamic market needs. Corporate governance and risk management practices were also reinforced to be more responsive and adaptive to external challenges.

Furthermore, the Company actively built a trustworthy and positive image among stakeholders. These strategic measures were complemented by mutually beneficial partnerships and business expansion, both through organic growth and external collaborations or acquisitions that align with the Company's long-term business direction.

These efforts are aimed not only at strengthening the Company's internal foundation but also at creating room for broader and more strategic operational expansion in the future. The Company sees opportunities to expand services beyond the Pelindo areas, supported by its license as a Port Business Entity (BUP), allowing expansion into public ports and special terminals, including those within National Strategic Projects and Special Economic Zones. In addition, the Company continues to pursue growth by strengthening its existing market, increasing its customer base, and broadening the range of products and services offered. There is also room to explore new businesses that align with or support long-term growth through strategic partnerships, acquisitions, or mergers.

From both operational and financial perspectives, the Company focuses on strengthening its funding structure to support working capital and expansion needs, optimizing services from financial institutions to boost productivity, and accelerating digitalization and automation as part of service development. Customer orientation also remains a top priority, demonstrated through customer satisfaction surveys, follow-up actions based on survey results, and relationship-building initiatives such as awards for customers operating within the BUP JAI area. All of these strategic directions are carefully designed by the Board of Directors as part of the Company's commitment to achieving sustainable, high-value growth.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Setelah menutup tahun dengan pencapaian di berbagai aspek, Perusahaan meneruskan langkahnya dalam menghadapi iklim usaha yang penuh tantangan. Direksi yang didukung oleh saran dan rekomendasi Dewan Komisaris, juga seluruh karyawan Perusahaan telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menavigasi tahun-tahun berikutnya, seiring dengan meningkatnya kompleksitas dinamika global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina serta kebijakan tarif dagang yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Lonjakan harga, khususnya pada sektor energi, akibat situasi tersebut memberikan tekanan terhadap kinerja sektor pelayaran dan jasa kepelabuhanan yang menuntut pelaku industri untuk beradaptasi dengan cermat. Dalam situasi ini, Perusahaan tetap menunjukkan ketangguhan melalui landasan fundamental yang solid, didukung oleh kemampuan inovatif, fleksibilitas dalam tata kelola, serta optimalisasi operasional yang berkelanjutan.

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan mendukung agenda keberlanjutan, Perusahaan telah menggagas sejumlah langkah strategis, seperti pemanfaatan *shore connection* atau sambungan listrik darat untuk kapal tunda yang sedang tidak beroperasi di tiga pelabuhan utama, penggunaan *harbour generator* hemat energi, serta pengoperasian motor pandu ramah lingkungan berbasis tenaga surya. Langkah-langkah ini tidak hanya mendorong penghematan bahan bakar, tetapi juga memperkuat citra Perusahaan yang senantiasa menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara konkret.

Di bawah koordinasi Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), Perusahaan kini memiliki peluang lebih besar untuk memperluas cakupan layanannya ke pelabuhan di luar cakupan Pelindo. Dibekali dengan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Perusahaan memiliki akses strategis untuk masuk ke pelabuhan umum maupun terminal khusus (TUKS), termasuk wilayah-wilayah penting dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, meningkatnya ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti nikel dan LNG memberi peluang baru bagi Perusahaan untuk mengembangkan layanan di segmen pengangkutan dan layanan jasa kapal.

Didukung oleh proyeksi pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan aktivitas logistik serta perdagangan maritim, Perusahaan optimis dapat mempertahankan momentum untuk memperkuat posisi bisnisnya. Kekuatan internal seperti keunggulan dalam inovasi teknologi, tata kelola yang tangkas, serta komitmen terhadap efisiensi energi dan operasional,

BUSINESS OUTLOOK ANALYSIS

After closing the year with achievements across various aspects, the Company continues its journey amidst a challenging business climate. The Board of Directors, supported by the advice and recommendations of the Board of Commissioners, along with all Company employees, has formulated strategic steps to navigate the coming years in response to the growing complexity of global dynamics, particularly those influenced by geopolitical tensions such as the Russia–Ukraine conflict and trade tariff policies imposed by the United States government. The surge in prices, especially in the energy sector as a result of these conditions, has exerted pressure on the shipping and port services industries, compelling industry players to adapt with precision. In the face of these challenges, the Company continues to demonstrate resilience, grounded on solid fundamentals, supported by innovative capabilities, flexible governance, and ongoing operational optimization.

As part of its efforts to increase efficiency and support sustainability initiatives, the Company has launched several strategic initiatives, including the use of shore connection electricity for idle tugboats at three main ports, the deployment of energy-efficient harbour generators, and the operation of environmentally friendly pilot boat motors powered by solar energy. These initiatives not only contribute to fuel savings but also strengthen the Company's image as one that consistently implements Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in tangible ways.

Under the coordination of the Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Subholding, the Company now has greater opportunities to expand its service coverage to ports beyond the Pelindo network. With its license as a Port Business Entity (BUP), the Company holds strategic access to enter both public ports and special terminals (TUKS), including those located within National Strategic Projects (PSN) and Special Economic Zones (KEK). In addition, the growing export of Indonesia's key commodities such as nickel and LNG presents new opportunities for the Company to expand its services in the marine transport and vessel service segments.

Supported by projections of national economic recovery and the growth of logistics and maritime trade activities, the Company is optimistic about maintaining momentum and strengthening its business position. Internal strengths, such as advantages in technological innovation, agile governance, and a commitment to energy and operational

menjadi pendorong Perusahaan dalam melangkah ke depan untuk memperluas pangsa pasar dan menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.

PERKEMBANGAN PENERAPAN GCG

Sebagai upaya dalam menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, Perusahaan senantiasa menjaga komitmen terhadap praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi meyakini bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan Perusahaan, salah satunya melalui integritas tata kelola serta ketangguhan dalam mengelola risiko.

Pada setiap kegiatan operasional yang dijalani, Perusahaan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip utama GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan terpercaya) yang terintegrasi ke dalam seluruh lini operasional. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan struktur tata kelola yang jelas, penerapan *governance framework* yang komprehensif, dan pembaruan kebijakan internal sesuai dengan Pedoman Umum GCG Indonesia (PUGKI) 2021 serta ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Sepanjang tahun 2024, Direksi juga terus mendorong budaya kepatuhan melalui penerapan dan sosialisasi Kode Etik Perusahaan. Pedoman ini tidak hanya menjadi rujukan perilaku profesional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai AKHLAK sebagai budaya kerja. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh insan Perusahaan, demi menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja.

Sebagai bagian dari langkah dalam menjaga integritas dan transparansi, Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/ WBS) sebagai saluran komunikasi yang aman dan dapat diandalkan bagi seluruh insan Perusahaan. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima, yang mencerminkan kepatuhan Perusahaan terhadap nilai-nilai etika dan kebijakan internal yang telah disosialisasikan secara konsisten. Meski demikian, Perusahaan tetap menjaga kesiapsiagaan sistem, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memperkuat komitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk di masa mendatang secara objektif dan profesional.

efficiency, serve as key drivers for the Company to move forward, expanding market share and achieving sustainable growth amid increasingly competitive industry conditions.

GCG IMPLEMENTATION PROGRESS

As part of its efforts to uphold the trust of all stakeholders, the Company remains firmly committed to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices. The Board of Directors believes that many factors influence the Company's success, one of which is strong governance integrity and resilience in risk management.

In every aspect of its operations, the Company consistently applies the core principles of GCG (transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness) and all re integrated across all operational lines. This commitment is realized through the strengthening of a well-defined governance structure, the implementation of a comprehensive governance framework, and the ongoing revision of internal policies in line with the Indonesian GCG General Guidelines (PUGKI) 2021 and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Throughout 2024, the Board of Directors also continued to promote a culture of compliance through the implementation and socialization of the Company's Code of Ethics. This guideline not only serves as a reference for professional conduct but also embodies the AKHLAK core values as the Company's work culture. The Code of Conduct was thoroughly disseminated to all personnel to foster a work environment that upholds the Company's values and culture, thereby enhancing performance.

As part of its efforts to maintain integrity and transparency, the Company has implemented a Whistleblowing System (WBS), providing a secure and reliable communication channel for all employees. In 2024, there were no violation reports received, reflecting the Company's compliance with ethical values and internal policies that have been consistently communicated. Nonetheless, the Company continues to maintain the system's readiness, ensures the confidentiality of whistleblowers, and reinforces its commitment to objectively and professionally respond to any future reports.

Seiring dengan kerangka kerja *Governance House* yang diterapkan, Perusahaan terus memperkuat pilar tata kelola mulai dari penetapan prinsip dan struktur, hingga proses pengambilan keputusan dan pencapaian hasil yang akuntabel. Direksi menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan pembagian tugas yang jelas dan pedoman kerja yang telah disahkan, dengan pelaporan rutin kepada pemegang saham dan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

Sejalan dengan dinamika bisnis dan tantangan yang ada, Perusahaan juga memperkuat sistem manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dikelola secara hati-hati dan terukur. Direksi terus mengawasi kebijakan manajemen risiko, memperkuat mitigasi hingga mencakup risiko teknologi informasi, serta melakukan evaluasi berkala atas efektivitas sistem yang diterapkan. Perusahaan juga telah menyusun rencana strategis pengelolaan risiko tahun 2025 untuk menjawab tantangan ke depan secara lebih proaktif.

Upaya mempertegas *compliance* Perusahaan juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Perusahaan mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dan menetapkan program audit rutin serta *monitoring* atas tindak lanjut temuan audit. Hal ini mencerminkan keseriusan Perusahaan dalam menjamin kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku serta dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan. Rangkaian kebijakan dan praktik ini menunjukkan bahwa Perusahaan tidak hanya mematuhi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadikan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) sebagai landasan strategis untuk menciptakan nilai tambah dan memastikan keberlanjutan usaha di tengah tantangan industri maritim yang terus berkembang.

Komitmen Perusahaan dalam menjaga tata kelola membuahkan hasil positif, yang tercermin pada penilaian GCG oleh pihak ketiga. Berdasarkan hasil penilaian, Perusahaan meraih skor sebesar 118,39 poin dalam parameter ACGS, di mana nilai tersebut meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan diklasifikasikan dalam kategori *"Leadership in Corporate Governance"*.

Sebagai entitas publik, Perusahaan senantiasa menempatkan prinsip tata kelola yang baik sebagai fondasi utama untuk

In line with the implementation of the Governance House framework, the Company continues to strengthen its governance pillars, ranging from the establishment of principles and structures to decision-making processes and the achievement of accountable outcomes. The Board of Directors carries out its duties and responsibilities based on a clear division of roles and working guidelines, with regular reporting to shareholders and periodic self-assessments as a form of accountability.

In response to evolving business dynamics and emerging challenges, the Company also strengthened its risk management system to ensure that all business activities are carried out prudently and in a measured manner. The Board of Directors continues to oversee risk management policies, enhance mitigation measures, including those related to information technology risks and conduct periodic evaluations of the system's effectiveness. The Company has also developed a strategic risk management plan for 2025 to proactively address future challenges.

The Company's efforts to reinforce compliance also require a comprehensive and continuous approach. Therefore, the Company has integrated the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on SNI ISO 37001:2016 and established a program for regular audits and monitoring of audit follow-ups. This reflects the Company's strong commitment to ensuring compliance with all applicable regulations and to fostering a clean and transparent business environment. This series of policies and practices demonstrates that the Company not only fulfills regulatory obligations but also positions Governance, Risk, and Compliance (GRC) as a strategic foundation for creating added value and ensuring business sustainability amid the evolving challenges of the maritime industry.

The Company's commitment to good governance has yielded positive outcomes, as reflected in the third-party GCG assessment. Based on the evaluation results, the Company achieved a score of 118.39 points under the ACGS parameters, marking a significant improvement from the previous year and placing the Company in the "Leadership in Corporate Governance" category.

As a public company, the Company consistently places sound governance principles at the core of its long-term

pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas tata kelola, menjaga integritas, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan sistem yang ada mampu mendukung keberlanjutan usaha dan memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dibekali dengan landasan tata kelola yang kokoh, Perusahaan siap melangkah lebih jauh menuju masa depan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

growth. Accordingly, the Board of Directors is committed to continually enhancing governance quality, upholding integrity, and ensuring that all policies and systems in place support business sustainability and deliver added value to all stakeholders. Equipped with a solid governance foundation, the Company is well-prepared to move forward toward a more competitive and sustainable future.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, terjadi perubahan komposisi Direksi Perusahaan. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada 12 Juni 2024, Direksi terdiri dari 3 (tiga) anggota yang terdiri dari Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis; Direktur Armada dan Operasi; Direktur Keuangan, dan SDM. Berikut susunan Direksi Perusahaan setelah RUPS hingga 31 Desember 2024:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2024, there were changes in the composition of the Company's Board of Directors. Prior to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 12, 2024, the Board of Directors consisted of 3 (three) members consisting of President Director concurrently Commercial and Business Development Director; Fleet and Operations Director; Finance, and HR Director. The composition of the Board of Directors following the AGMS and up to December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Shanti Puruhita	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode kedua) June 12, 2024 (second period)
Muhammad Iqbal	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operations	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode kedua) June 12, 2024 (second period)
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direksi Keuangan, SDM, Manajemen Risiko Director of Finance & HR	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 - saat ini Annual GMS Resolution dated June 12, 2024 - present	12 Juni 2024 (periode pertama) June 12, 2024 (first period)

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perusahaan. Keberhasilan Perusahaan dalam mempertahankan kinerja positif dan menjaga stabilitas operasional tidak terlepas dari kontribusi aktif para pemangku kepentingan, sehingga dapat membangun sinergi yang konstruktif.

Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan, saran dan pengawasan yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan bisnis Perusahaan. Tidak lupa kami berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh insan Perusahaan yang telah bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, sehingga Perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.

Kami meyakini bahwa segala bentuk kerja keras dan capaian sepanjang tahun ini akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha di masa mendatang. Harapan kami, fondasi yang telah dibangun bersama ini dapat menjadi landasan kokoh dalam mewujudkan visi dan sasaran strategis Perusahaan ke depan.

STAKEHOLDER APPRECIATION

The Board of Directors extends its highest appreciation to all stakeholders for the support and trust that have been given to the Company. The Company's success in maintaining positive performance and operational stability is inseparable from the active contributions of stakeholders, enabling the development of constructive synergy.

The Board of Directors also expresses its gratitude to the Board of Commissioners for their guidance, advice, and oversight, all of which have had a significant impact on the sustainability of the Company's business. We would also like to express our utmost appreciation to all employees of the Company who have worked with great enthusiasm and dedication, allowing the Company to carry out its operations effectively.

We firmly believe that all the hard work and achievements throughout the year will have a positive impact on the sustainability of our business in the future. It is our hope that the strong foundation we have built together will serve as a solid platform for realizing the Company's vision and strategic goals going forward.

Atas Nama Direksi
Jakarta, 23 April 2025
Jakarta, April 23, 2025



Shanti Puruhita
Direktur Utama
merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director
concurrently serving as Director of Commercial and Business Development

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Statement Letter of the Board of Commissioners Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2024 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has been presented in its entirety, and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 23 April 2025
Jakarta, April 23, 2025

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS



ZUHRI IRYANSYAH
Komisaris Utama
President Commissioner



R.R. DEWI ARIYANI
Komisaris
Commissioner



BAY MOKHAMAD HASANI
Komisaris Independen
Independent Commissioner



F. BUDI PRAYITNO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direktur tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Statement Letter of the Board of Directors Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2024 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has been presented in its entirety, and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 23 April 2025
Jakarta, April 23, 2025

DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS

SHANTI PURUHITA
Direktur Utama
merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director
concurrently serving as Director of Commercial and Business Development

MUHAMMAD IQBAL
Direktur Armada dan Operasi
Director of Fleet Management and Operations

DESSY EMASTARI PRIHATININGTYAS
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, HR, and Risk Management

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Profil Perusahaan

Company Profile

03



IPCM sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, pengangkutan laut, penyewaan kapal, dan pengeoperasian kapal, terus adaptif dan tangguh dalam menentukan strategi di tengah tantangan industri maritim yang terus berkembang.

IPCM, as a company engaged in pilotage, towage, mooring, sea transportation, vessel chartering, and ship operations services, remains adaptive and resilient in formulating strategies amid the ever-evolving challenges of the maritime industry.



Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

General Information and Company Identity



Nama Perusahaan Company Name	PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Kode Saham Ticker Code	IPCM
Tanggal Pendirian Establishment Date	10 Juli 2013 July 10, 2013
Informasi Perubahan Nama Information on Name Changes	Sejak awal berdiri pada tanggal 10 Juli 2013 hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama dari "PT Jasa Armada Indonesia". Since its establishment on July 10, 2013, up to the issuance of this annual report, the Company has never changed its name from "PT Jasa Armada Indonesia".
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 10 Juli 2013, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-47228.AH.01.01. Tahun 2013, tanggal 9 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084678. AH.01.09. Tahun 2013, tanggal 9 September 2013. The Deed of Establishment No. 24 dated July 10, 2013, was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-47228.AH.01.01.Year 2013 dated September 9, 2013, and was registered in the Company Register No. AHU-0084678.AH.01.09.Year 2013 dated September 9, 2013.
Bidang Usaha Business Fields	Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, pengangkutan laut, penyewaan kapal, dan pengeoperasian kapal. The Company is engaged in the provision of pilotage, towage, mooring, sea transportation, ship chartering, and ship operation services.
Jaringan Usaha Business Network	11 Pelabuhan Umum Pelindo Regional 2 Public Ports under Pelindo Regional 2 7 Pelabuhan/TUKS/ Tersus/Perairan Ports/Private Port/Special Terminals/Waters 3 Join Operation Joint Operations 3 KSO KSO *disajikan selengkapnya pada bab Profil Perusahaan dibagian Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi dalam Laporan Tahunan ini. *details are presented in the Company Profile chapter under Business Network and Operational Areas in this Annual Report.
Kepemilikan Saham Share Ownership	• PT Pelindo Jasa Maritim 76,89% atau 4.063.504.600 lembar saham. • PT Multi Terminal Indonesia 0,11% atau 5.800.000 lembar saham. • Masyarakat 23% atau 1.215.506.500 lembar saham. • PT Pelindo Jasa Maritim 76.89% or 4,063,504,600 shares • PT Multi Terminal Indonesia 0.11% or 5,800,000 shares • Public 23,00% or 1,215,506,500 shares

Modal Dasar Authorized Capital	Rp1.500.000.000.000,- (Satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (Lima belas miliar) lembar saham dengan nilai masing-masing saham Rp100,- (Seratus Rupiah). Rp1,500,000,000,000 (One trillion five hundred billion Rupiah) divided into 15,000,000,000 (Fifteen billion) shares, each with a nominal value of Rp100 (One hundred Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid Up Capital	Rp528.481.110.000,- (Lima ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) terdiri atas 5.284.811.100 (Lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu seratus) lembar saham. Rp528,481,110,000 (Five hundred twenty-eight billion four hundred eighty-one million one hundred ten thousand Rupiah), consisting of 5,284,811,100 (Five billion two hundred eighty-four million eight hundred eleven thousand one hundred) shares.
Total Aset Total Assets	Rp1.649.981.015 per 31 Desember 2024 Rp1,649,981,015 as of December 31, 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Stock Listing Date	22 Desember 2017 December 22, 2017
Jumlah Pekerja Number of Employees	123 orang (2024) 123 employees (2024)

Akses Terhadap Perusahaan Termasuk Kantor Cabang Atau Perwakilan
Access to Company, including Branch and Representative Offices

Kantor Pusat dan Jaringan Kantor IPCM
Head Office and Office Networks of IPCM

Kantor Pusat Head Office	Gedung Pelindo Tower, Lantai 8 & 9 Pelindo Tower, Jl Yos Sudarso No. 9, Rawabadak Utara, Kec.Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 E-mail: corsec@ipcmarine.co.id
Situs Website Website	www.ipcmarine.co.id
Kontak Perusahaan Official Contact	**Corporate Secretary** Gedung Pelindo Toper, Lantai 8 & 9 Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawabadak Utara, Kec.Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 **Investor Relations** E-mail : investor.relation@ipcmarine.co.id ***Whistleblowing System*** Telp : +62 21 2782 2345 E-mail : pelindobersih@whistleblowing.link ***Customer Service*** E-mail : ipcm.care@ipcmarine.co.id **Media Sosial** FP Facebook : IPCMarine Instagram : @ipcmarine X : @ipcmarine_ Tiktok : @ipcmarine Youtube : PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk/ IPCM

Kantor Cabang Branch		
AREA I	**Tanjung Priok** Central Work Shop Jl. Raya Pelabuhan Pos 9. Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 E. jai_tanjungpriok@ipcmarine.co.id	
AREA II	**Banten** Jl. Raya Pelabuhan No.1, Ciwandan, Banten P. +62 254 7960010 E. jai_banten@ipcmarine.co.id	**Bayah** Jl. Bayah Tugu, RT 2 RW 9 Desa Bayah Barat Kec. Bayah P. +62 812 8027 8112 E. Jai.bayah@ipcmarine.co.id
	Pontianak Jl. Pakasih No. 11, Pontianak 78113 E. jai_pontianak@ipcmarine.co.id	
AREA III	**Bengkulu** Lt. 3 Gd. Kepanduan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Jl. Yos Sudarso No. 9 Pulau Baai Bengkulu P. +62 736 5512735 E. jai_bengkulu@ipcmarine.co.id	**Panjang** Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang Bandar Lampung P. +62 721 342431 E. jai_panjang@ipcmarine.co.id
AREA IV	**Teluk Bayur** Jl. Sutan Syahrir No.213 A Mata Air Padang Selatan Kota Padang P. +62 751 63690 E. jai_telukbayur@ipcmarine.co.id	**Pangkal Balam** Jl. Yos Sudarso No. 1, Pangkal Pinang 33144 P. +62 717 432678 E. jai_pangkalpinang@ipcmarine.co.id
	Palembang Jl. Belinyu No. 1, Boom Baru, Palembang 30115 P. +62 711 717102 E. jai_palembang@ipcmarine.co.id	**Tanjung Pandan** Jl. Pelabuhan No. 1, Tanjung Pandan Belitung 33411 P. +62 719 25486 E. jai_tanjungpandan@ipcmarine.co.id
	Jambi Jl. Mangkubumi No. 16, Kel. Budiman, Kec. Jambi Timur 36145 E. jai.petrochinajabung@ipcmarine.co.id E. jai_jambi@ipcmarine.co.id	
AREA V	**Cirebon** Jl. Belawan Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat Kelurahan Panjunan Kec. Lemahwungkuk E. jai_cirebon@ipcmarine.co.id	**Patimban** Dusun Cemara RT. 22 RW. 04, Desa Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang Jawa Barat P. +62 811 897 2000 E. jai_patimban@ipcmarine.co.id



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan"), disebut juga "JAI" atau "IPCM", secara resmi dibentuk pada tahun 2013 atas spin-off unit usaha Pemanduan dan Penundaan dari perusahaan induknya yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) - sebelumnya bernama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - beroperasi sebagai unit usaha dari induk Perusahaan Nasional Pelabuhan ("PN Pelabuhan") sejak tahun 1960.

Selama tahun 1964–1969, izin operasional pelabuhan di Indonesia hanya diberikan kepada Otoritas Pelabuhan, di mana PN Pelabuhan berfokus pada aspek komersial. Izin operasi diberikan kepada masing-masing pelabuhan pada tahun 1969–1983, akibatnya PN Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan dihapuskan.

Pada tahun 1985, seluruh operator pelabuhan di Indonesia digabung menjadi empat perusahaan, dengan empat perusahaan yang beroperasi menurut wilayahnya masing-masing. Salah satunya adalah Perum Pelabuhan II, dan perusahaan tersebut menjadi unit usaha Perum Pelabuhan II.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("the Company"), also referred to as "JAI" or "IPCM", was officially established in 2013 as a spin-off of the Pilotage and Towage business unit from its parent company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) - formerly known as PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - which had been operating as a business unit under the National Port Company ("PN Pelabuhan") since 1960.

During 1964-1969, port operational permits in Indonesia were only granted to the Port Authority, during which time PN Pelabuhan focused on commercial aspects. During 1969-1983, operational permits were granted to individual ports, resulting in the dissolution of both PN Pelabuhan and the Port Authority.

In 1985, all port operators in Indonesia were merged into four companies, each operating based on its designated region. One of these was Perum Pelabuhan II, which became a business unit of Perum Pelabuhan II.

Kemudian, di tahun 1992, badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Perum Pelabuhan II berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan layanan pemanduan serta penundaan masuk ke dalam usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Seiring dengan diluncurkannya identitas baru pada tahun 2012 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai IPC, diikuti dengan transformasi untuk lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan, pada tanggal 10 Juli 2013 telah dibentuk usaha layanan pemanduan dan penundaan yang akan didirikan PT Jasa Armada Indonesia atau dikenal dengan IPC Marine berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 24 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-47228. AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047245.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022, serta perubahan susunan pengurus perusahaan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0088180 tanggal 16 Desember 2022.

Setelah *spin-off*, perusahaan melakukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas armada dan menambah kapasitas personel sesuai dengan standar internasional. di bawah supervisi Thome Consulting, Singapore. Hasilnya, kualitas armada meningkat dari Grade 2.4 (48% dari skor tertinggi 100%) menjadi Grade 3.6 (72%). Perusahaan melakukan optimasi secara revolusioner di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan sistem pengadaan barang. Hal ini dilakukan melalui *strong corporate governance*, dan peningkatan integritas SDM guna memastikan kualitas layanan dengan standar tertinggi serta tingkat profitabilitas secara berkelanjutan. Perusahaan juga meningkatkan kualitas dan memasarkan Layanan VVIP dengan standar *Zero Waiting Time*. Hasilnya, pasar di luar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkembang, dan pendapatan Perusahaan meningkat 68% di tahun pertama operasi penuh setelah *spin-off*. Dengan pengalaman operasi selama 60 tahun, total armada 72 unit kapal, kinerja pemanduan & penundaan 52.000 kapal/ tahun,

Later, in 1992, the legal status of Perum was changed to a Limited Liability Company (PT) under Government Regulation No. 57/1991, with its shares held by the Government of the Republic of Indonesia, thus Perum Pelabuhan II was renamed PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), and pilotage and towage services became part of its operations.

With the launch of a new identity in 2012 by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), branded as IPC, followed by a transformation to serve customers more effectively and efficiently, on July 10, 2013, PT Jasa Armada Indonesia, known as IPC Marine, was established for pilotage and towage services based on the based on the Company Establishment Deed No. 24 dated July 10, 2013, drawn before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-47228.AH.01.01 Year 2013 dated September 9, 2013.

Several amendments have been made since, the most recent being Deed No. 44 of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 23, 2022, before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approved by Decree No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022, and the most recent changes to the Company's management structure were documented in Deed No. 16 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 6, 2022, before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and notified to the Ministry of Law and Human Rights via Notification Receipt No. AHU-AH.01.09-0088180 dated December 16, 2022.

After the spin-off, the Company made significant investments to upgrade its fleet and increase personnel capacity according to international standards, under the supervision of Thome Consulting, Singapore. As a result, the fleet quality improved from Grade 2.4 (48% of the maximum score of 100%) to Grade 3.6 (72%). The Company carried out a revolutionary optimization in maintenance, repair, and procurement systems. This was implemented through strong corporate governance and enhanced human resource integrity to ensure the highest service quality and sustainable profitability. The Company also enhanced and promoted its VVIP Services with a Zero Waiting Time standard. As a result, markets outside of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) grew, and Company revenue increased by 68% in its first full year of operation after the spin-off. With over 60 years of operational experience, a fleet of 72 vessels, pilotage and towage handling of 52,000 ships/year, and capabilities

serta kapabilitas dalam melayani klien-klien ternama nasional dan asing, IPCM adalah perusahaan yang paling berpengalaman, paling besar, dan paling dapat diandalkan di Indonesia.

to serve prominent national and international clients, IPCM is the largest, most experienced, and most reliable company in Indonesia in its field.

Sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengoperasian kegiatan pelayanan kapal, penumpang, kargo dan yang berhubungan dengan pelabuhan, termasuk penyediaan jasa penundaan dan mengusahakan pelayanan jasa pemanduan, serta penyediaan sarana bantu pemanduan dan prasarana pemanduan, Perusahaan mentransformasikan nilai-nilai perusahaan induk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Aksi Korporasi dalam bentuk *Operational Excellence*, *Customer Centricity*, dan *Quantum Leap* untuk mengoptimalkan pelanggan, pemasok, komunitas, lingkungan, pekerja, dan kepuasan pemegang saham.

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) engaged in the provision and operation of ship services, passenger, cargo services, and port-related activities, including tug services and pilotage, as well as the provision of pilotage support equipment and infrastructure, the Company has transformed the parent company's corporate values into Corporate Actions through Operational Excellence, Customer Centricity, and Quantum Leap, aimed at optimizing value for customers, suppliers, communities, the environment, employees, and shareholders.

Perusahaan melakukan penawaran umum pada tanggal 15–18 Desember 2017 sebesar 1.215.506.500 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus enam ribu lima ratus) saham baru atau sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017.

The Company conducted its Initial Public Offering (IPO) from December 15–18, 2017, offering 1,215,506,500 new shares, or 23% of the Company's issued and fully paid-up capital, and was officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017.

Perubahan status IPCM menjadi Perusahaan Tbk, Logo Perusahaan berubah berdasarkan Akta No.14 tanggal 11 Oktober 2017 menjadi IPC Marine. Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan Penandatanganan Perjanjian antara PT Citra Shipyard Batam tentang pengadaan empat unit kapal tunda minimal daya 2x2200 HP tipe azimuth stern drive (ASD) serta Penerimaan Pelimpahan pelaksanaan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal ship-to-ship (STS) pada wilayah perairan Muara Sungai Musi Palembang, Sumatera Selatan dan Muara Sabak Jambi dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Following the IPO, IPCM's status changed to a public company (Tbk), and its logo was changed under Deed No. 14 dated October 11, 2017, to IPC Marine. In 2018, the Company signed a procurement agreement with PT Citra Shipyard Batam for four tugboats with a minimum power of 2x2200 HP, azimuth stern drive (ASD) type and received delegated authority from the Ministry of Transportation's Directorate General of Sea Transportation to operate ship-to-ship (STS) pilotage and towage services in the waters of Muara Sungai Musi, Palembang, South Sumatra and Muara Sabak, Jambi.

Pada tahun 2020, PT Jasa Armada Indonesia Tbk menghadiri acara penandatanganan kerja sama pelayanan pemanduan dan penundaan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Pontianak dan Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan ("KUPP") Telok Melano dan KUPP Kendawangan di mana pelayanan penundaan akan dilakukan oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk selaku anak perusahaan IPC. Tahun 2020, PT Jasa Armada Indonesia Tbk melakukan Penandatanganan MoU Jawa 1 Power dan Penandatanganan Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas Wilayah Perairan Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

In 2020, PT Jasa Armada Indonesia Tbk attended the signing of a cooperation agreement for pilotage and towage services between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pontianak Branch and the Port Administration Units (KUPP) of Telok Melano and Kendawangan, where towage services would be carried out by PT Jasa Armada Indonesia Tbk. In 2022, the Company signed an MoU with Jawa 1 Power and a cooperation agreement for vessel services at the Special Port (Tersus) of PT Nusantara Regas in the Kepulauan Seribu waters, DKI Jakarta.

Tahun 2021, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) dan PT Jawa Satu Power (JSP) menambah kerja sama pelayanan kapal LNG di wilayah operasional Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu Power.

In 2021, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) and PT Jawa Satu Power (JSP) extended their cooperation for LNG vessel services in the Floating Storage Regasification Unit (FSRU) operating area of Jawa Satu Power.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPC Marine/IPCM), anak perusahaan Pelabuhan Indonesia II, menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan anak perusahaan Pelabuhan Indonesia III, yakni PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marines), mengenai penyiapan rencana kerja sama dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan kapal, di Kantor Pusat Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPC Marine/IPCM), a subsidiary of Pelabuhan Indonesia II, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marines), a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III, for a planned collaboration in vessel service operations, held at the Tanjung Perak Port headquarters in Surabaya.

Hal ini sekaligus mendukung rencana penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: S-756/MBU/10/2021.

This supports the merger plan of PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on October 1, 2021, under Government Regulation No. 101/2021 and the Ministry of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021.

Kemudian, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2021, didirikan PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) yang juga merupakan anak perusahaan Pelindo, yang kemudian akan menjadi induk IPCM melalui inbreng saham.

Subsequently, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was renamed PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo. Then, on November 29, 2021, PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) was established as a Pelindo subsidiary, which would become IPCM's new parent company through a share transfer (inbreng).

Pada tahun 2022 dan 2023, IPCM memperluas ekspansi pasar, memperkuat armada dengan 4 kapal baru, dan mendorong pembangunan 2 kapal dalam tender. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan berbagai peluang bisnis baru, menjalankan bisnis dengan mengutamakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta bersinergi dengan anak perusahaan Pelindo lainnya pasca-merger Pelindo.

In 2022 and 2023, IPCM expanded its market reach, strengthened its fleet with 4 new vessels, and initiated construction for 2 more through tender. The Company also pursued new business opportunities, embraced Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, and collaborated with other Pelindo subsidiaries following the Pelindo merger.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan aset perusahaan dan memperbesar kapitalisasi pasar, IPCM akan menjalankan beberapa strategi utama, yaitu standardisasi proses bisnis, ekspansi dan kerja sama bisnis, serta memperkuat kinerja keuangan dan strategi investasi.

To further enhance assets and market capitalization, IPCM is executing key strategies including business process standardization, business expansion and partnerships, and strengthening financial performance and investment strategies.

Di tahun 2022, terdapat beberapa highlight Perusahaan yang di antaranya Pengalihan (inbreng) 76,89% saham Perusahaan yang semula dimiliki oleh Pelindo beralih kepada PJM sehingga terdapat perubahan induk IPCM, Perubahan logo IPCM, Peletakan Lunas (Keel Laying) Pembangunan Kapal Tunda 2x2200 HP di Surabaya, Peletakan Lunas (Keel Laying) Pembangunan 3 Unit Kapal Pandu 2x300 HP di Semarang, Layanan Perdana ekspansi wilayah operasi di Meulaboh Aceh, serta Ekspansi wilayah operasi pada Indonesia Timur di Teluk Weda, Halmahera, Maluku Utara berkolaborasi dengan PT Langlang Laju Layang.

Key highlights in 2022 included the transfer (inbreng) of 76.89% of Company shares from Pelindo to PJM and thus changing IPCM's parent company, a New Corporate Logo, keel laying of a 2x2200 HP Tugboat in Surabaya, Keel Laying of 2 units of 2x300 HP pilot boats in Semarang, the First Service in the new operational area of Meulaboh, Aceh, and Expansion into eastern Indonesia in Teluk Weda, Halmahera, North Maluku, in collaboration with PT Langlang Laju Layang.

Di tahun 2023, IPCM berhasil melakukan Peluncuran 3 Unit Kapal Pandu dengan daya 2x300 HP di Semarang serta Kapal Tunda Abimanyu V dengan daya 2x2200 HP di Surabaya. Selain itu, IPCM juga melakukan penandatanganan kerjasama penyediaan sarana bantu dan prasarana pemanduan untuk pelayanan pemanduan dan penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Cirebon Electric Power serta Terminal Khusus (Tersus) PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci – Cirebon), serta penandatanganan Kontrak Sewa Kapal untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power antara KSO PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

In 2023, IPCM successfully launched 3 units of 2x300 HP Pilot Boats in Semarang and the Abimanyu V Tugboat (2x2200 HP) in Surabaya. IPCM also signed agreements for providing pilotage support and infrastructure services at Private Port of PT Cirebon Electric Power and the Special Port (Tersus) of PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci – Cirebon), and signed a Vessel Charter Contract for Jawa Satu Power operational area between KSO PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera and PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Sepanjang tahun 2024, IPCM terus memperkuat posisi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan ekspansi wilayah operasional, termasuk ke wilayah Pelabuhan Laiwui, Maluku Utara, yang merupakan bagian dari wilayah pandu luar biasa, melalui pemberian pelimpahan pelayanan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 22 Mei 2024. Perusahaan juga memperluas pasar secara organik dan anorganik, di antaranya dengan pembaruan kerja sama antara IPCM dan PT Langlang Laju Layang untuk pelayanan di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara, pada 23 Desember 2024. Komitmen IPCM terhadap tata kelola perusahaan yang baik tercermin dari pencapaian Juara II dalam Annual Report Award 2023 untuk kategori Perusahaan Go Publik Non-Keuangan yang diserahkan pada 7 Oktober 2024, serta keberhasilan memperoleh skor 118,39 dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada tahun buku 2024, yang menempatkan IPCM pada Level 5 dengan predikat "Leadership in Corporate Governance".

Throughout 2024, IPCM continued to strengthen its position as a Port Business Entity (BUP) by expanding its operational areas, including to the Laiwui Port area, North Maluku, which is part of the extraordinary pilotage area, through the granting of service delegation by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 22, 2024. The company is also expanding its market organically and inorganically, including with the renewal of cooperation between IPCM and PT Langlang Laju Layang for services at Tarakan Port, North Kalimantan, on December 23, 2024. IPCM's commitment to good corporate governance is reflected in the achievement of second place in the Annual Report Award 2023 for the category of Non-Financial Public Listed Company which was submitted on October 7, 2024, as well as the success of obtaining a score of 118.39 in the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) in the 2024, which places IPCM at Level 5 with the title "Leadership in Corporate Governance".

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

INFORMATION ON NAME CHANGES



Sejak awal berdiri pada 10 Juli 2013 hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama dari "PT Jasa Armada Indonesia". Adapun setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Desember 2017, IPCM resmi menjadi Perusahaan Terbuka.

Since its establishment on July 10, 2013, the Company has never changed its name from "PT Jasa Armada Indonesia." Following the listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017, IPCM officially became a publicly listed company.

Jejak Langkah

Milestones

1960

Divisi Pandu & Tunda Badan Pengusahaan Pelabuhan mulai beroperasi.
The Pilotage & Towage Division of the Port Management Authority began operations.

1984

Seluruh Pelabuhan di Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Perum Pelabuhan I, II, III, dan IV.
All ports in Indonesia were divided into 4 regions: Perum Pelabuhan I, II, III, and IV.

1992

4 Perum Pelabuhan bertransformasi menjadi BUMN. Pandu & Tunda menjadi Divisi dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
The 4 Perum Pelabuhan entities were transformed into SOEs. Pilotage & Towage became a division of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2008

- Pengalihan (inbreng) 76,89% saham Perseroan dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang semula dimiliki oleh Pelindo beralih kepada PJM sehingga terdapat perubahan induk IPCM.
  Transfer (inbreng) of 76.89% of the Company's shares, initially owned by Pelindo, to PJM, resulting in a change of IPCM's parent company.
- Perubahan logo IPCM.
  Change of IPCM's logo.
- Peletakan Lunas (*Keel Laying*) Pembangunan Kapal Tunda 2x2200 HP di Surabaya.
  Keel Laying for the construction of a 2x2200 HP Tugboat in Surabaya.
- Peletakan Lunas (Keel Laying) Pembangunan 3 Unit Kapal Pandu 2x300 HP di Semarang.
  Keel Laying for the construction of 3 units of 2x300 HP Pilot Boats in Semarang.

2021

- Layanan Perdana ekspansi wilayah operasi di Meulaboh Aceh.
  Initial service launch of operational expansion in Meulaboh, Aceh.
- Ekspansi wilayah operasi pada Indonesia Timur di Teluk Weda, Halmahera, Maluku Utara berkolaborasi dengan PT Langlang Laju Layang.
  Operational expansion in Eastern Indonesia, in Teluk Weda, Halmahera, North Maluku, in collaboration with PT Langlang Laju Layang.
- Selesainya pembangunan 4 unit Kapal Tunda IPCM Abimanyu I, II, III, IV yang menggunakan dana IPO.
  Completion of the construction of 4 IPCM tugboats: Abimanyu I, II, III, and IV, funded by IPO proceeds.
- Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dan kemudian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/ Pelindo.
  Merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). It then subsequently renamed to PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo.
- Didirikan PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) yang juga merupakan anak perusahaan Pelindo yang kemudian akan menjadi induk IPCM melalui inbreng saham.
  Establishment of PT Pelindo Jasa Maritim (PJM), also a subsidiary of Pelindo, which later became the parent company of IPCM through share inbreng.

2022

2023

- Peluncuran 3 Unit Kapal Pandu dengan daya 2x300 HP di Semarang.
  Launch of 3 Pilot Boats with 2x300 HP engines in Semarang.
- Peluncuran Kapal Tunda Abimanyu V dengan daya 2x2200 HP di Surabaya.
  Launch of Tugboat Abimanyu V with 2x2200 HP in Surabaya.
- Penandatanganan kerjasama penyediaan sarana bantu dan prasarana pemanduan untuk pelayanan pemanduan dan penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Cirebon Electric Power serta Terminal Khusus (Tersus) PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci – Cirebon).
  Signing of a cooperation agreement for the provision of pilotage aids and infrastructure for pilotage and towage services at the Private Terminal (Private Port) of PT Cirebon Electric Power and the Special Terminal (Tersus) of PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci – Cirebon).
- Penandatanganan Kontrak Sewa Kapal untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power antara KSO PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
  Signing of a Vessel Charter Contract for the operational area of Jawa Satu Power between the KSO of PT PLN Gas & Geothermal and PT Adhi Guna Putera with PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

2012

Berdasarkan UU Pelayaran No.17/2008, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah dirinya dari "bagian regulator" menjadi hanya Penyelenggara Pelabuhan Umum.
Based on the Shipping Law No. 17/2008, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) transitioned from being part of the "regulatory body" to solely functioning as a Public Port Operator.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah nama dagangnya menjadi Indonesia Port Corporation ("IPC"), dan mempertahankannya posisinya sebagai divisi pilotage & derek.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) rebranded its trade name to Indonesia Port Corporation ("IPC") and retained its pilotage and towage division.

2013

PT JAI merupakan *spin-off* dari IPC dan resmi menjadi usaha mandiri sebagai anak perusahaan dari Pelindo II pada tanggal 13 Juli 2013. PT JAI mulai beroperasi pada bulan September 2014.
PT JAI was a spin-off from IPC and officially became an independent business as a subsidiary of Pelindo II on July 13, 2013. PT JAI began operations in September 2014.

2017

Memiliki keuntungan yang terbesar dan yang paling menguntungkan selama 3 tahun berturut-turut. PT JAI targetkan IPO pada 1 Desember 22 Agustus 2017, di BEI untuk mencapainya pertumbuhan berkelanjutan.
It achieved the highest and most profitable performance for 3 consecutive years. PT JAI targeted its IPO on December 1, with the listing taking place on August 22, 2017, at the IDX to support sustainable growth.

2018

Peletakan Lunas (*Keel Laying*) Pembangunan 4 unit Kapal Tunda 2x2200 HP yang menggunakan dana IPO.
Keel Laying for the construction of 4 Tugboats with 2x2200 HP engines, funded through IPO proceeds.

- Penandatanganan Kerjasama Kapal Pelayanan di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Perairan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
  Signing of a cooperation agreement for vessel services at the Special Terminal of PT Nusantara Regas in the waters of the Seribu Islands, Jakarta Province.

2020

- Ekspansi wilayah operasi pada Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
  Expansion of operational areas to Patimban Port, Subang, West Java.
- Penandatangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) untuk Jawa Satu Power.
  Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) for Jawa Satu Power.

2024

- IPCM terus berkomitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik. Berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), IPCM memperoleh skor 118,39, masuk kategori Level 5/tertinggi dengan predikat "*Leadership in Corporate Governance*".
  IPCM remains committed to transparency and good governance. Based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), IPCM achieved a score of 118.39, placing it in Level 5/the highest category, with the distinction of "Leadership in Corporate Governance."
- IPCM meraih penghargaan Juara II Annual Report Award 2023 untuk kategori Perusahaan Go Publik Non-Keuangan, yang mencerminkan integritas, profesionalisme, serta komitmen keberlanjutan perusahaan.
  IPCM was awarded 2nd Place in the 2023 Annual Report Award for the Publicly Listed Non-Financial Company category, reflecting the Company's integrity, professionalism, and commitment to sustainability.
- IPCM terus mengoptimalkan layanan dan memperluas pasar serta mengembangkan layanan kapal yang lebih luas baik secara organik maupun anorganik, termasuk di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.
  IPCM continues to optimize its services, expand its market, and develop broader vessel services through both organic and inorganic growth, including in the Tarakan area of North Kalimantan.
- IPCM sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) melakukan penambahan wilayah operasi termasuk di wilayah Pelabuhan Laiwui, Maluku Utara, yang merupakan bagian dari wilayah pandu luar biasa.
  As a Port Business Entity (BUP), IPCM has also expanded its operational areas, including in Laiwui Port, North Maluku, which is part of the extraordinary pilotage zone.

Bidang Usaha

Business Fields

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3 yang terakhir mengalami perubahan dan disahkan melalui Akta No. 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penundaan dan pemanduan kapal yang merupakan kegiatan usaha yang telah digeluti Perseroan sejak awal berdirinya hingga menjadi entitas komersial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama perusahaan untuk menyediakan
   a. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
   b. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
   c. Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;
   d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
   e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
   f. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
   g. Pergudangan dan penyimpanan;
   h. Reparasi mesin untuk keperluan umum; dan
   i. Penanganan kargo (bongkar muat barang).

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagai berikut
   a. Industri kapal dan perahu; serta
   b. Reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung.

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, which was most recently amended and legalized through Deed No. 44 dated June 23, 2022, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of Jakarta, and ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022, the purpose and objective of the Company is to engage in the business of ship towage and pilotage, and those are the activities that the Company has pursued since its establishment until becoming a commercial entity.

To achieve these purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

1. Main business activities of the Company include:
   a. Marine port services activities;
   b. Domestic sea freight transportation for general cargo;
   c. River and lake transportation for general cargo and/or livestock;
   d. Domestic port waters sea freight transportation for cargo;
   e. Domestic sea freight transportation for special cargo;
   f. International sea freight transportation for general cargo;
   g. Warehousing and storage;
   h. General-purpose machinery repair; and
   i. Cargo handling (loading and unloading of goods).

2. Supporting business activities that complement the main business, including:
   a. Ship and boat manufacturing; and
   b. Repair of ships, boats, and floating structures.



KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN SAAT INI DAN JASA PERUSAHAAN

Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, penyewaan kapal, dan pengoperasian kapal. Adapun fokus utama Perusahaan saat ini adalah layanan penundaan dan pemanduan kapal yang merupakan kegiatan usaha yang telah digeluti Perusahaan sejak awal berdiri hingga menjadi entitas komersial.

PRODUK DAN JASA

Sampai dengan tahun 2024, Produk atau Jasa Utama Perusahaan terdiri dari:

1. **Jasa Pelayanan Kapal**
   Jasa Pelayanan Kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, Perusahaan memberikan produk dan jasa utama dalam pelayanan jasa kapal yang meliputi jasa penundaan dan jasa pemanduan. Pada segmen jasa penundaan mencakup kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Pada segmen jasa pemanduan, melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

CURRENT BUSINESS ACTIVITIES AND SERVICES

The Company is engaged in the provision of pilotage, towage, mooring, sea transportation, vessel chartering, and vessel operations services. The Company's current main focus is on ship towage and pilotage services, which have been its core business activities since its establishment and transition into a commercial entity.

PRODUCTS AND SERVICES

As of 2024, the Company's Main Products or Services consist of:

1. **Vessel Service**
   Vessel Service is an operational support for vessels from port entry to departure. As a partner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, the Company provides core products and services in this area, including towing and pilotage services. Towing services include pushing, pulling, towing, escorting, and assisting ships moving through shipping lanes, anchorage areas, or pools for mooring or leaving the dock. Pilotage services support ships entering and exiting the dock via port channels to ensure safe, orderly, and efficient navigation for both vessels and the environment.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan kegiatan pemanduan memiliki 3 jenis layanan kegiatan pemanduan, yaitu: (a) pandu laut; (b) pandu bandar; dan (c) pandu bandar utama. "Pandu laut" bertugas memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan sampai batas perairan wajib pandu atau sebaliknya; sedangkan "pandu bandar" memandu kapal-kapal di kolam pelabuhan. Terakhir, "pandu bandar utama" melayani pelabuhan utama dengan ukuran kapal yang lebih besar.

Based on the type, pilotage services are categorized into 3 types: (a) sea pilot; (b) port pilot (c) main port pilot. Sea pilot, responsible for guiding vessels between the port pool and mandatory pilotage waters or vice versa; port pilot, guiding vessels within the port pool. Lastly, main port pilot, serving larger vessels at major ports.

2. **Jasa Pengangkutan dan Lainnya**
Jasa Pengangkutan dan Lainnya merupakan kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah pelabuhan. Segmen bisnis ini, utamanya dalam melayani pengangkutan material dan hasil produksi dari BUMN. Kegiatan pelayanan jasa pengangkutan sejalan dengan pangsa pasar bisnis angkutan laut saat ini, di mana cargo owner terbesarnya merupakan Perseroan-perseroan BUMN seperti: PT Perseroan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perseroan Gas Negara (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Selain kegiatan pengangkutan, Perusahaan juga mengelola penyewaan kapal, baik untuk kebutuhan pengangkutan maupun operasional pelabuhan, sebagai bagian dari diversifikasi layanan di segmen ini.

2. **Freight and Other Services**
Transportation and Other Services is the Company's business activity in the field of material or goods transportation services and production products between port areas. This business segment, mainly in serving the transportation of materials and products from BUMN. Transportation service activities are in line with the current market share of the sea transportation business, where the largest cargo owners are state-owned companies such as: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), and PT Pupuk Indonesia (Persero). In addition to transportation activities, the Company also manages ship rentals, both for transportation and port operations, as part of its diversified services in this segment.

3. **Jasa Pengelolaan Kapal**
Jasa Pengelolaan Kapal merupakan kegiatan usaha Perusahaan dengan menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional 2 dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk memobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

3. **Fleet Management Services**
Fleet Management Services involve a partnership with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 to manage and maintain pilot boats used to transport pilot officers for ship pilotage activities across the waters managed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Perawatan yang dilakukan terdiri dari 2 macam yaitu: (1) perawatan berkala, dilakukan setiap tahun; (2) perawatan incidental, dilakukan sesuai kebutuhan terutama apabila terjadi kerusakan di tengah operasi. Pemeriksaan menyeluruh (termasuk baling-baling dan shaft yang dimiliki oleh kapal) dilakukan pada periode maintenance yang mengharuskan kapal masuk gelanggang yaitu setiap 2,5 tahun.

Maintenance services include 2 kinds: (1) periodic maintenance, conducted annually; (2) Incidental maintenance, carried out as needed, particularly in the event of damage during operations. A comprehensive inspection (including the ship's propeller and shaft) is performed every 2.5 years, requiring the vessel to enter a dry dock.

Pada tahun 2024, terdapat penyesuaian pola bisnis di lingkup Pelindo Grup yang semula terdapat jasa pengelolaan kapal kemudian dipadukan dalam jasa pelayanan kapal.

In 2024, there was an adjustment in the business model of the Pelindo Group, where vessel management services was integrated into vessel service operations.

Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal
Vessel Pilotage and Towage Services





Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Business Network and Operational Areas

Perusahaan melayani kegiatan pemanduan dan penundaan kapal di wilayah operasi Pelabuhan Umum milik Pelindo Regional 2 serta perluasan pasar di Pelabuhan/TUKS/Tersus/ Perairan seluruh wilayah Indonesia.

The Company provides pilotage and towage services in the operational areas of Public Ports owned by Pelindo Regional 2, as well as market expansion to Ports/Private Port/Tersus/ Waters throughout Indonesia.

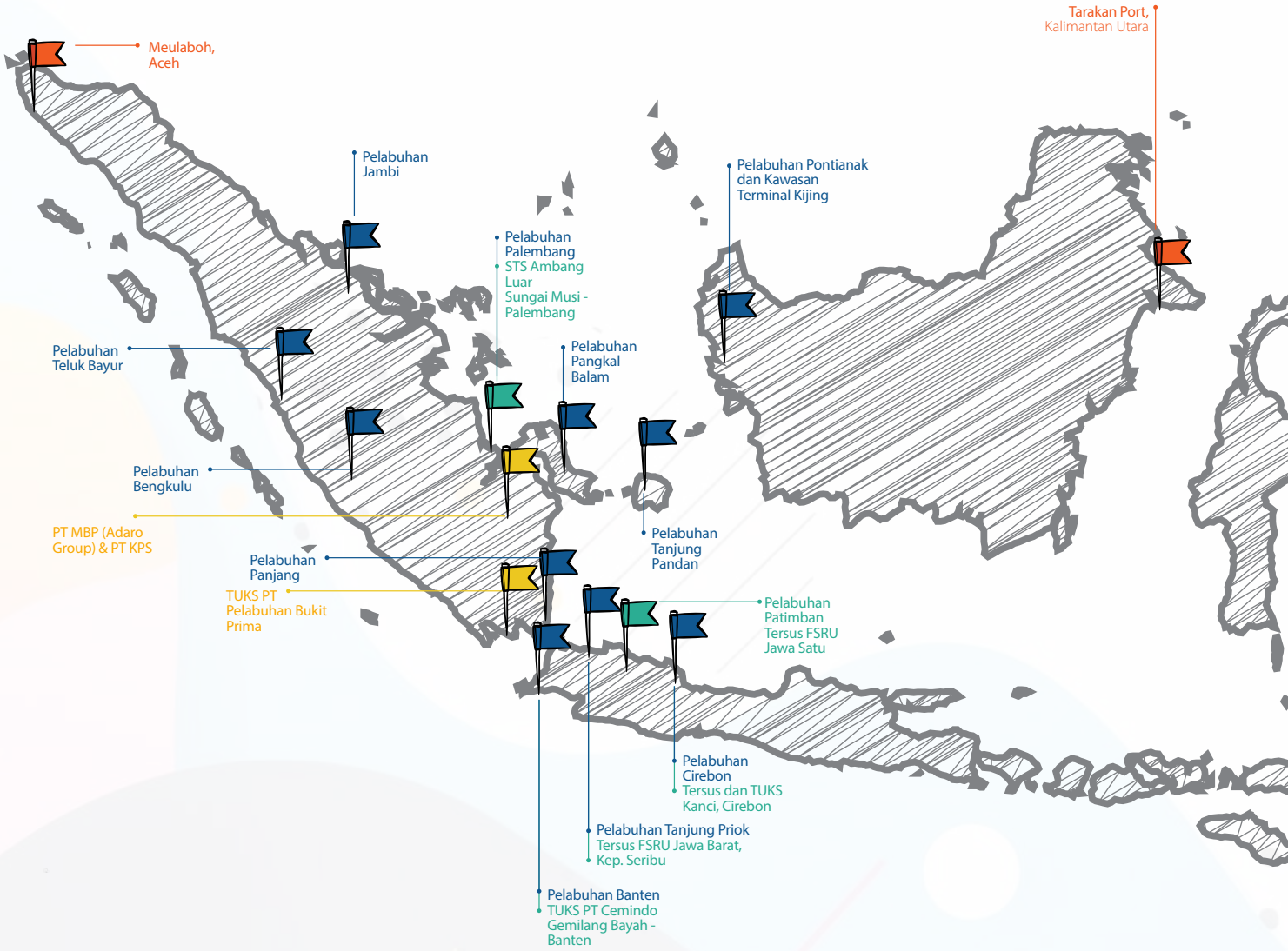


PT Pelindo Regional II
BUP PT JAI Tbk
Joint Operation
KSO
Pelabuhan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara
Tersus PT Trimegah Bangun Persada, Laiwui, Halmahera Selatan, Maluku Utara

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Corporate Vision, Mission, and Culture

Visi Vision



"Menjadi penyedia jasa marine terdepan dalam ekosistem maritim Indonesia serta global."

"The leading provider of marine services in the national maritime ecosystem of Indonesia and global landscape."

PENJELASAN VISI

Penyedia Jasa *Marine* Terdepan

1. **Salah satu perusahaan terbesar dalam industri marine di Indonesia**
   JAI akan menjadi salah satu jajaran perusahaan terbesar di seluruh Indonesia yang berfokus dalam penyediaan jasa marine dalam ekosistem kepelabuhanan Indonesia. Pengembangan bisnis akan difokuskan pada pelayanan kapal, pengangkutan, dan jasa-jasa marine lainnya.
2. **Mampu menyediakan layanan marine dengan kualitas yang baik kepada seluruh pelanggan**
   Dengan pengalaman menyediakan layanan marine kepada pelanggan baik yang melewati pelabuhan milik Pelindo maupun luar Pelindo selama lebih dari 10 tahun, JAI telah memberikan kualitas pelayanan dan manajemen pelanggan yang optimal dan terus ditingkatkan kepada seluruh pelanggan.
3. **Mampu menyediakan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi**
   Terintegrasinya layanan kepelabuhanan JAI memberikan implikasi bahwa layanan kepelabuhanan yang diberikan JAI akan terpadu dengan layanan kepelabuhanan lainnya. Bersama dengan Subholding/Anak Perusahaan lainnya ataupun pemegang BUP lainnya, keterpaduan layanan ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk menggunakan jasa Pelindo Group, khususnya JAI.

Dalam Ekosistem Maritim Indonesia serta Global

- **JAI sebagai penyedia layanan kepelabuhanan yang tidak hanya beroperasi di Indonesia, namun juga global**
  Adanya rencana aksi korporasi akan memperluas wilayah operasional jasa pelayanan kapal dalam Pelindo menjangkau seluruh Indonesia, baik di Regional 1, 2, 3, dan 4. Ditambah dengan rencana JAI untuk melakukan ekspansi pasar di luar Indonesia, yang menggambarkan tekad JAI untuk mengakselerasi pertumbuhan perusahaan tidak hanya secara nasional, namun juga global.

EXPLANATION OF VISION

Leading Marine Service Provider

1. **One of the largest companies in the marine industry in Indonesia**
   JAI will focus on providing marine services within the Indonesian port ecosystem. Business development will emphasize vessel services, transportation, and other marine services.
2. **Capable of providing marine services in the best quality to all customers**
   With an experience in providing marine services to customers within and outside Pelindo's ports for over 10 years, JAI has consistently delivered optimal service quality that will always be improved to all customers.
3. **Capable of providing an integrated port services**
   The integrated port services of JAI means that it will be seamlessly integrated with other port services. This integration, in collaboration with other Subholdings/ Subsidiaries or other BUP holders, adds value for customers utilizing Pelindo Group services, particularly those offered by JAI.

In the Indonesian and Global Maritime Ecosystem

- **JAI is not only a port service provider operating in Indonesia but also globally**
  The existence of a corporate action plan will expand Pelindo's ship services operational area to cover all of Indonesia, including Regions 1, 2, 3, and 4. Combined with JAI's plans to penetrate markets outside Indonesia, this illustrates JAI's commitment to accelerating company growth not only domestically but also internationally.

Misi
Mission

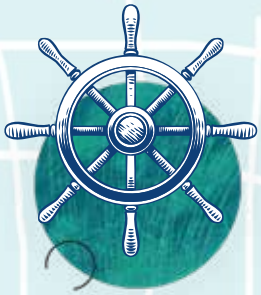

"Mewujudkan jasa marine yang andal, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan demi memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan".

"To provide reliable, safe, competitive, and sustainable marine services to maximize added value for all stakeholders"

PENJELASAN MISI

- JAI menyediakan layanan marine yang tersertifikasi serta sesuai dengan standar kemanan yang berlaku
- JAI menyediakan layanan W yang unggul dan terintegrasi sebagai sebuah solusi jasa kepelabuhanan
- JAI menyediakan layanan marine yang tersebar dengan jangkauan Indonesia dan global, baik di Pelabuhan milik Pelindo, maupun non-Pelindo
- JAI berkomitmen untuk melakukan upaya ramah lingkungan pada rantai nilai perusahaan
- JAI berkomitmen untuk memaksimalkan penciptaan nilai untuk pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola
- JAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi mutakhir serta memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk dan di sepanjang rantai nilai logistik untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra
- JAI berkomitmen dalam menjadi lingkungan kerja yang suportif dan konstruktif dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan seluruh pekerja
- JAI berkomitmen dalam memastikan arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dengan efisiensi biaya logistik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

EXPLANATION OF VISION

- JAI provides certified marine services that comply with applicable safety standards
- JAI offers superior and integrated marine services as a port service solution
- JAI provides marine services spread across Indonesia and globally, both at Pelindo-owned and non-Pelindo ports
- JAI is committed to making environmentally friendly efforts in the company's value chain
- JAI is committed to maximizing value creation for shareholders through improved financial performance and optimized governance management
- JAI is committed to continuously improving service quality by utilizing the latest technology and maximizing accessibility through product integration along the logistics value chain to meet customer and partner satisfaction
- JAI is committed to fostering a supportive and constructive work environment to enhance the competence and skills of all employees
- JAI is committed to ensuring efficient trade flows to support the Indonesian economy, reducing logistics costs to improve people's welfare



REVIEW VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN KUNCI

Visi dan Misi Perusahaan yang ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Visi dan Misi Perusahaan saat ini masih relevan dengan arah perkembangan bisnis Perusahaan, sebagaimana yang telah disetujui melalui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024.

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Sebagai langkah upaya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, JAI menerapkan beberapa langkah strategis sesuai dengan program kerja manajemen, antara lain:

1. ***Unlocking Business Growth & New Opportunities***
   a. Melakukan integrasi bisnis dengan perusahaan marine pada Pelindo Group dan non Pelindo Group;
   b. Menstandardisasi proses operasional jasa marine secara *end-to-end* pasca aksi korporasi;
   c. Memperluas jaringan kemitraan dengan pasar eksisting (Terminal Khusus pertambangan batu bara, LnG, dan nikel);
   d. Merintis perluasan jaringan kemitraan dengan pasar baru (Terminal Khusus industri pengolahan hasil pertambangan dan milik Kementerian/Lembaga);
   e. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pengelolaan kemitraan, baik komersial maupun operasional;
   f. Membangun produk yang terkait jasa marine lainnya, seperti: layanan *Marine Advisory & Consultancy* dan *Small LnG Shipping*;
   g. Membangun produk kemaritiman yang terintegrasi sebagai *onestop-solution* dalam klaster SPJM seperti: Layanan *Ship-to-Ship*;
   h. Mengimplementasi *Key Account Management* (KAM) yang terintegrasi.

2. ***Accelerating Operational Excellence***
   a. Melakukan investasi pada kapal tunda melalui produksi secara mandiri;
   b. Modernisasi kapal tunda,sarana prasarana, dan teknologi pendukung bisnis marine lainnya;
   c. Optimalisasi aset kapal tunda;
   d. Mengimplementasi Inventori Terintegrasi;
   e. Menerapkan aktivitas ramah lingkungan dalam upaya pengurangan emisi karbon;
   f. Mengimplementasi *digitalized marine system*;
   g. Meningkatkan kapabilitas SDM dalam ruang lingkup operasional pelayanan jasa.

REVIEW OF VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

The Company's Vision and Mission are reviewed periodically with the involvement of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and other levels of management to ensure their relevance to the Company's evolving business environment. The Board of Commissioners and the Board of Directors have declared that the current Vision and Mission remain aligned with the Company's business direction, as approved in the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP).

STRATEGY OF ACHIEVING CORPORATE VISION AND MISSION

Sebagai langkah upaya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, JAI menerapkan beberapa langkah strategis sesuai dengan program kerja manajemen, antara lain:

1. **Unlocking Business Growth & New Opportunities**
   a. Integrating business with marine companies within the Pelindo Group and non-Pelindo Group;
   b. Standardizing end-to-end marine service operational processes post-corporate actions;
   c. Expanding partnership networks with existing markets (Special Port coal mining, LNG, and nickel);
   d. Pioneering the expansion of partnership networks with new markets (Mining and processing industries Private Port and those owned by Ministries/Agencies);
   e. Enhancing the capabilities and capacities of partnership management, both commercial and operational;
   f. Developing other marine-related services, such as Marine Advisory & Consultancy and Small LNG Shipping services;
   g. Building an integrated maritime product as a one-stop solution in the SPJM cluster, such as Ship-to-Ship Services;
   h. Implementing integrated Key Account Management (KAM).

2. **Accelerating Operational Excellence**
   a. Investing in tugboats through in-house production;
   b. Modernizing tugboats, infrastructure, and other supporting marine technologies;
   c. Optimizing tugboat assets;
   d. Implementing Integrated Inventory;
   e. Implementing environmentally friendly activities to reduce carbon emissions;
   f. Implementing a digitalized marine system;
   g. Improving human resources capabilities in service operations.

3. ***Enterprise Support Enchancement***
   a. Melakukan penyesuaian fungsi bisnis marine pada struktur organisasi;
   b. Mengimplementasi KPI terintegrasi untuk mengukur kinerja;
   c. Mengimplementasi program L&D terintegrasi untuk standardisasi dan peningkatan kualitas SDM;
   d. Mengimplementasi sentralisasi *knowledge management* bisnis *marine*;
   e. Implementasi dan penguatan budaya JAI;
   f. Mengimplementasi Sistem *Single Enterprise Resource Planning* (ERP);
   g. Pembaruan Marine Digitalization Roadmap.

3. **Enterprise Support Enchancement**
   a. Adjusting the marine business function within the organizational structure;
   b. Implementing integrated KPIs to measure performance;
   c. Implementing integrated L&D programs for standardization and quality improvement of human resources;
   d. Implementing centralized knowledge management for the marine business;
   e. Implementing and strengthening JAI's culture;
   f. Implementing a Single Enterprise Resource Planning (ERP) System;
   g. Updating the Marine Digitalization Roadmap.

BUDAYA PERUSAHAAN

IPCM mengadopsi Budaya/Tata Nilai "AKHLAK" yang secara berurutan merupakan akronim dari (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagai Budaya/ Tata Nilai yang diberlakukan di lingkungan IPCM, dengan berpedoman pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/2/1/1/SDMA/UTMA/PLND-23 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia, yang diberlakukan juga pada IPCM selaku Perusahaan Terafiliasi dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nilai Perusahaan (*core values*) disusun berdasarkan aspirasi dan prinsip-prinsip dasar perusahaan yang diyakini sangat penting terhadap kinerja dan pertumbuhan usaha. Dengan adanya pemahaman yang sama di antara manajemen dan pegawai, diharapkan akan membentuk budaya kerja Perusahaan yang kondusif dan inovatif serta dapat mendongkrak kinerja Perusahaan.

CORPORATE CULTURE

IPCM adopts the Culture / Values "AKHLAK" which in sequence is an acronym for (Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative) as a Culture / Value System that is applied within IPCM, based on the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: HK.01 /2/1/1/SDMA/UTMA/PLND-23 dated January 2, 2023 concerning Guidelines for the Implementation of the Main Values of PT Pelabuhan Indonesia Human Resources, which are also applied to IPCM as an Affiliated Company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) which is one of the State-Owned Enterprises (BUMN). Corporate Values (core values) are compiled based on the aspirations and basic principles of the company which are believed to be very important to business performance and growth. With the same understanding among management and employees, it is hoped that it will form a conducive and innovative work culture and can boost the Company's performance.



A — Amanah
Trustworthy

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
We uphold the trust given

- Memenuhi janji dan komitmen
  Keep promises and commitments
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
  Responsible for the duties, decisions and actions carried out
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika
  Stick to moral and ethical values

K — Kompeten
Competent

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
We continue to learn and develop capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
  Improve self-competence to respond to ever-changing challenges
- Membantu orang lain belajar
  Help others learn
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
  Complete duties with the best quality

H — Harmonis
Harmonious

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
We care for each other and value differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
  Respect everyone regardless of their background
- Suka menolong orang lain
  Likes to help others
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
  Build a conducive work environment

L — Loyal
Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara
We are dedicated and put the interests of the Nation and the State first

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pempinan, BUMN, dan Negara
  Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
  Willing to sacrifice to achieve a greater goal
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
  Obey the leaders as long as it is not against the law and ethics

A — Adaptif
Adaptive

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
We continue to innovate and are enthusiastic about moving or facing changes

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
  Quickly adjust to being better
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
  Continuously making improvements to keep up with technological developments
- Bertindak proaktif
  Act proactively

K — Kolaboratif
Collaborative

Kami membangun kerja sama yang sinergis
We build synergistic cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  Provide opportunities for various parties to contribute
- Tebuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
  Proven in working together to generate added value
- Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
  Mobilize the use of various resources for common goals

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN

Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) budaya perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Dalam melakukan proses pengembangan untuk mewujudkan visi perusahaan "Menjadi fasilitator pertumbuhan perdagangan melalui pelayanan pemanduan dan penundaan berkelas dunia dalam ekosistem kepelabuhanan".

Nilai-nilai IPCM merupakan komitmen Perusahaan untuk mengimplementasikan visi dan misinya berdasarkan standar global dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nilai-nilai IPCM yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan nilai-nilai tersebut harus diketahui dan menjadi pedoman seluruh karyawan dalam beraktivitas. IPCM mendefinisikan lima nilai perusahaan yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan sebagai pedoman dalam aktivitas sehari-hari.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Sebagai langkah perjalanan pengembangan bisnis dalam mengelola nilai menjadi budaya perusahaan berkelanjutan yang melekat pada pelaksanaan proses bisnis Perusahaan, nilai IPCM telah disosialisasikan sejak tahun 2020.

Sebagai salah satu upaya *improvement* dalam implementasi budaya maka dibentuklah *Catalyst Team* yang terdiri dari:

1. *Change Leader*, dengan kriteria yaitu Direktur yang membawahi bidang SDM;
2. *Change Champion*, dengan kriteria:
   a. 1 (satu) tingkat di bawah *Change Leader*.
   b. Berjumlah 10% dari total VP atau minimal 1 orang.
3. *Change Agent*, dengan kriteria:
   a. Menduduki jabatan struktural maupun non-struktural.
   b. Berjumlah 10% dari total non VP atau minimal 2 orang.

Dimana secara umum, para *Change Champion* dan *Change Agent* harus memiliki karakter *Collaborator*, *Organized*, *Trustworthy*, *Life Long Learner*, *System Thinker* dan *Experienced*.

Hasil dari penerapan Nilai-Nilai Utama SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang diharapkan adalah perubahan perilaku yang didapat dari Tahapan Awal (*Initial*), Intervensi (*Intervention*), dan Penerimaan (*Acceptance*), yang mendorong terciptanya lingkungan kerja kondusif untuk

STATEMENT REGARDING CORPORATE CULTURE

In fulfilling its role as a State-Owned Enterprise (SOE), corporate culture plays a crucial role in the management of the company's human resources to achieve its vision, mission, and objectives. In the development process to realize the Company's vision of "To be a facilitator of trade growth through world-class guiding and delaying services in the port ecosystem".

IPCM's core values reflect the Company's commitment to implementing its vision and mission based on global standards and applying good corporate governance. IPCM's values, which include Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative, must be known and serve as a guide for all employees in carrying out their duties. IPCM defines five corporate values that employees can use as daily guidelines in their activities.

SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION OF CORPORATE CULTURE

As part of its business development journey in embedding values into a sustainable corporate culture that is ingrained in the Company's business processes, IPCM has been socializing its core values since 2020.

As one of the improvement efforts in cultural implementation, a Catalyst Team was formed, consisting of:

1. Change Leader, with the criteria being the Director overseeing HR;
2. Change Champion, with the criteria:
   a. 1 (one) level below the Change Leader;
   b. Representing 10% of total VPs or at least 1 person.
3. Change Agent, with the criteria:
   a. Holding either structural or non-structural positions;
   b. Representing 10% of total non-VP personnel or at least 2 persons.

In general, Change Champions and Change Agents must embody the characteristics of being Collaborative, Organized, Trustworthy, Lifelong Learners, System Thinkers, and Experienced.

The expected result of implementing the Core HR Values of PT Jasa Armada Indonesia Tbk is behavioral change achieved through the phases of Initial, Intervention, and Acceptance, which fosters a conducive work environment for high performance and consistent positive behavior. The

berkinerja tinggi dan selalu berperilaku positif. Dampak dari penerapan Nilai-Nilai Utama SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang diharapkan adalah perubahan budaya organisasi yang tercermin pada peningkatan kinerja Perusahaan. Untuk itu Perusahaan wajib melakukan pengukuran hasil dan dampak implementasi Nilai-Nilai Utama SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk terhadap budaya dan kinerja perusahaan dengan menggunakan penilaian kinerja/observasi dan/atau wawancara.

intended impact of implementing these Core HR Values is an organizational culture shift that is reflected in improved Company performance. Therefore, the Company is required to measure the results and impact of implementing the Core HR Values of PT Jasa Armada Indonesia Tbk on both culture and performance, using performance assessments, observations, and/or interviews.

Sebagai salah satu media pengukuran atas implementasi nilai perusahaan tersebut, Perusahaan telah melaksanakan Penilaian Kinerja Berbasis Perilaku AKHLAK Tahun 2024 dengan rata-rata skor 4,59 dari skala 1 - 6 yang digambarkan sebagai berikut:

As one of the measurement media for the implementation of these corporate values, the Company has carried out an AKHLAK Behavior-Based Performance Assessment in 2024 with an average score of 4.59 from a scale of 1 - 6 which is described as follows:

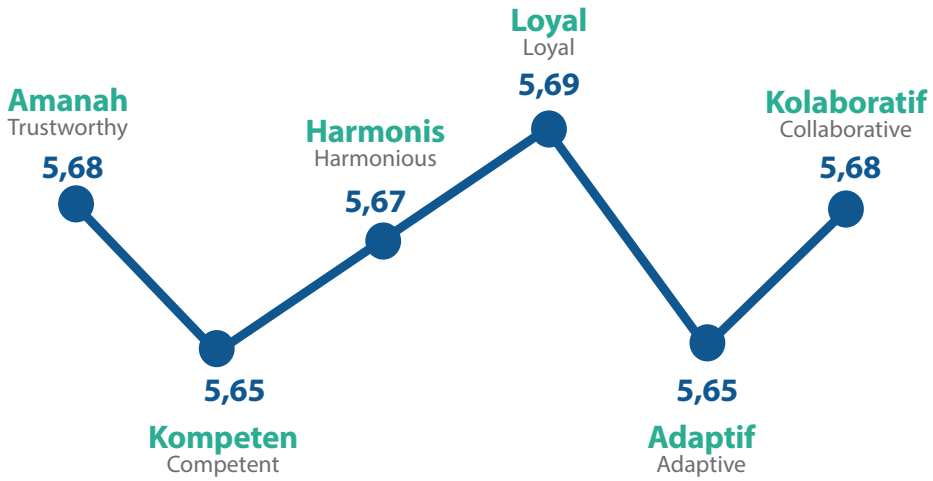

Dalam hal ini, berdasarkan Penilaian Kinerja Berbasis Perilaku AKHLAK yang merupakan penilaian 360 derajat dari penerapan nilai-nilai AKHLAK insan IPCM, secara keseluruhan insan IPCM telah dengan baik menunjukkan perilaku AKHLAK dalam melaksanakan pekerjaannya.

In this case, based on the AKHLAK Behavior-Based Performance Assessment which is a 360-degree assessment of the application of AKHLAK values of IPCM people, overall IPCM people have well demonstrated AKHLAK behavior in carrying out their work.

Makna Logo Perusahaan

Meaning of Company Logo





01 Logo menggambarkan bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang merepresentasikan kesiapan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dalam memberikan pelayanan terbaik pada bidang Jasa Pilotage and Towage guna mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

The logo portrays the shape of a busy, crowded, and confusing route or path, which represents the readiness of PT Jasa Armada Indonesia Tbk to provide the best service in the field of Pilotage and Towage Services to support the realization of the Indonesian sea toll.

02 Huruf P yang menjadi inisial Pelindo dan membentuk pola ikan menggambarkan PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari Pelindo Grup berkomitmen untuk terus menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.

The letter P, which becomes Pelindo's initial and forms a fish pattern, illustrates that PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as part of the Pelindo Group, is committed to continuing to protect Indonesia's natural wealth by continuously supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.

03 Warna BIRU menggambarkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian.
Warna MERAH menggambarkan aksi, antusias, kecepatan, keberanian dan semangat PT JAI Tbk dalam memberikan pelayanan stakeholders
The color BLUE represents stability, trust, integrity, professionalism and devotion.
The RED color represents the action, enthusiasm, speed, courage, and spirit of PT JAI Tbk in providing services to stakeholders.

04 Jasa Armada Indonesia menggambarkan nama dari perusahaan yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang bergerak pada industri kepelabuhanan yaitu bidang Jasa Pilotage and Towage.
Jasa Armada Indonesia describes the name of the Company, PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which is engaged in the port industry, namely the field of Pilotage and Towage Services.

05 Jasa Maritim dengan warna tulisan hijau toska mempresentasikan PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dibawah subholding Pelindo Jasa Maritim.
Jasa Maritim with tosca green writing color represents PT Jasa Armada Indonesia Tbk as a subsidiary under Pelindo Jasa Maritim sub- holding.

Warna Tosca adalah perpaduan warna biru dan hijau yang merupakan warna alam dan laut indonesia yang terkenal luas dan cantik. Warna ini juga melambangkan kreativitas dan kemajuan teknologi dalam menopang kebutuhan mode transportasi di laut Indonesia.

Tosca color is a combination of blue and green colors which is the color of nature and the famous Indonesian sea wide and beautiful. This color also symbolizes creativity and technological progress in supporting the needs of transportation modes in Indonesian seas.

TAGLINE PERUSAHAAN

COMPANY TAGLINE

"NAVIGATING MARINE EXCELLENCE"

Menggambarkan JAI sebagai perusahaan penyedia jasa marine yang menavigasi pertumbuhan ekosistem marine di Indonesia dan global.

Describes JAI as a marine services company that navigates the growth of the marine ecosystem in Indonesia and globally.

Keanggotaan dalam Asosiasi

Membership in Association

Untuk memperkuat bisnisnya, IPCM telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, di antaranya adalah:

To strengthen its business, IPCM has joined several organizations, including:

No.	Nama Asosiasi Association Name	Posisi Position
Nasional National		
1.	Indonesian National Shipowners' Association (INSA)	Anggota Member
2.	Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ASBUPI)	Anggota Member
3.	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota Member



Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur Organisasi Perseroan per 31 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk sebagaimana terlampir di bawah ini.

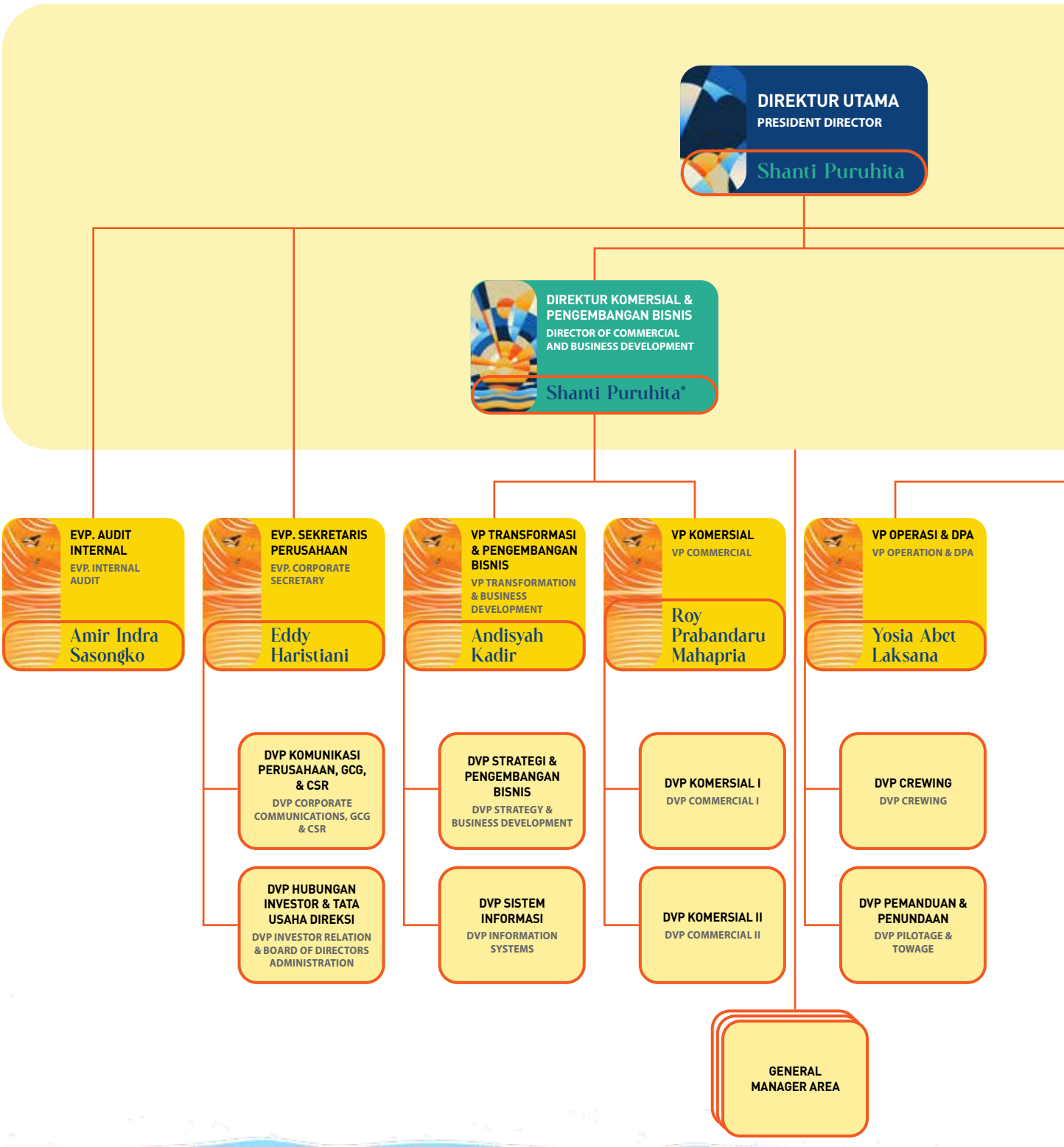

The Company's Organizational Structure as of December 31, 2024, was established through the Decree of the Board of Directors No. HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024, regarding the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as attached below.

Direksi
Board of Director

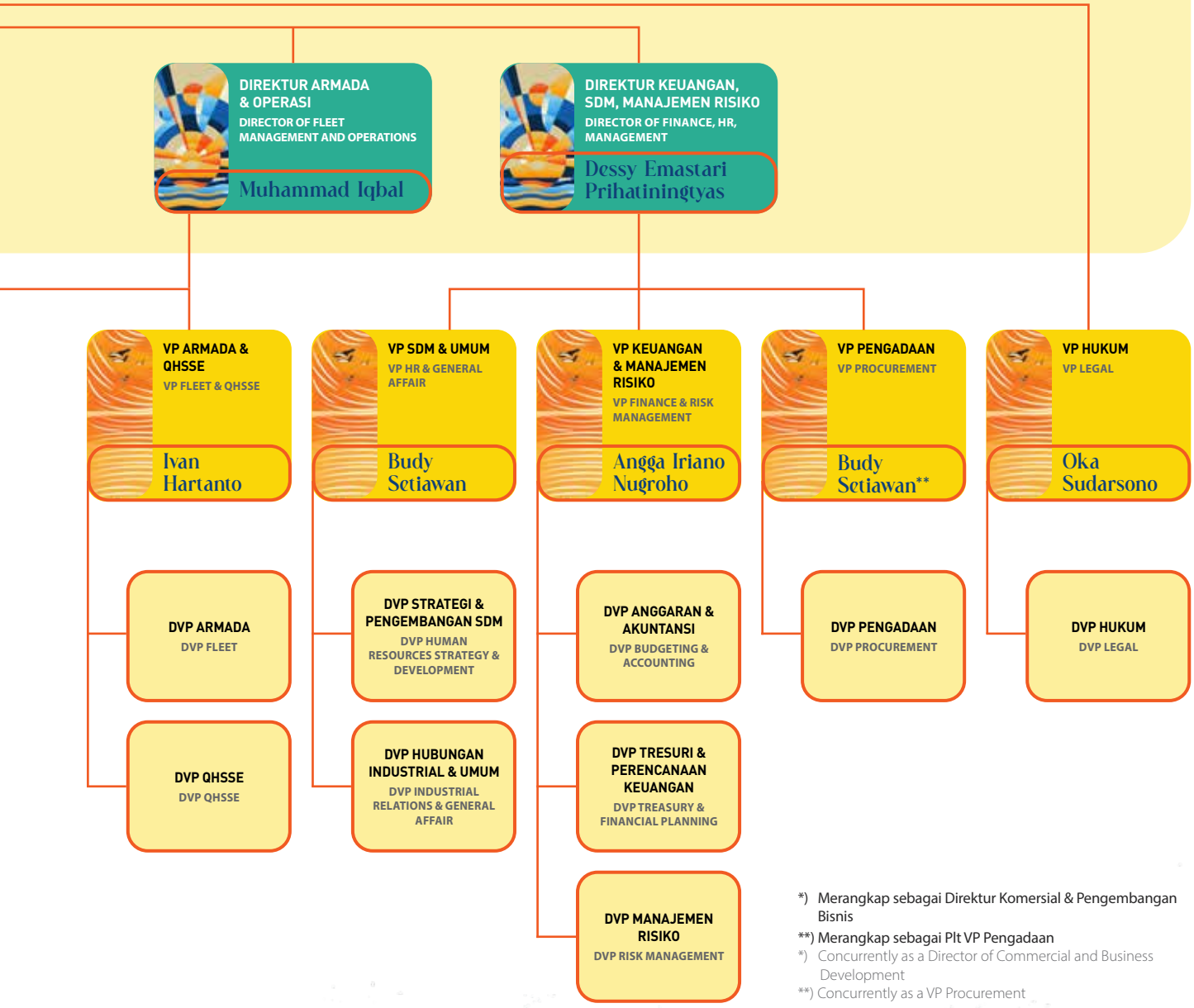

*) Merangkap sebagai Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis
**) Merangkap sebagai Plt VP Pengadaan
*) Concurrently as a Director of Commercial and Business Development
**) Concurrently as a VP Procurement

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS SEBELUM RUPS TAHUNAN 2024

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2024 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR CHANGES

Throughout 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners underwent changes in accordance with the Company's needs, as explained below.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PRIOR TO THE 2024 ANNUAL GMS

The composition of the Board of Commissioners prior to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders consisted of 3 (three) members, comprising 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) Independent Commissioner. The composition and the basis of appointment of the Board of Commissioners are presented in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2024
Composition and Basis of Appointment of the Board of Commissioners Prior to the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Oktober 2020 Annual GMS Resolution dated October 13, 2020	13 Oktober 2020 October 13, 2020
R.R Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 April 2022 Annual GMS Resolution dated April 14, 2022	14 April 2022 April 14, 2022
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juli 2020 Annual GMS Resolution dated July 15, 2020	15 Juli 2020 July 15, 2020

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS TAHUNAN 2024

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 September 2024. RUPSLB memutuskan untuk mengangkat F. Budi Prayitno sebagai Komisaris Independen Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE 2024 ANNUAL GMS

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on September 25, 2024. The EGMS resolved to appoint F. Budi Prayitnoas the Company's Independent Commissioner. The change in the composition of the Board of Commissioners was made based on the Company's needs.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2024
Composition and Basis of Appointment of the Board of Commissioners After the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Oktober 2020 Annual GMS Resolution dated October 13, 2020	13 Oktober 2020 October 13, 2020
R.R Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 April 2022 Annual GMS Resolution dated April 14, 2022	14 April 2022 April 14, 2022
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juli 2020 Annual GMS Resolution dated July 15, 2020	15 Juli 2020 July 15, 2020
F. Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 25 September 2024 Extraordinary GMS Resolution dated September 25, 2024	25 September 2024 September 25, 2024

Adapun profil Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat per 31 Desember 2024, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

The profiles of the members of the Company's Board of Commissioners serving as of December 31, 2024, up to the signing date of this Annual Report, are as attached in the following.

Komisaris Utama
President Commissioner

Zuhri Iryansyah

Masa Jabatan: 13 Oktober 2020–saat ini, Periode Pertama
Term of Office: October 13, 2020–present, First Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Medan, 15 Juli 1969
Indonesian citizen
Aged 55 years old as of Desember 31, 2024
Born in Medan, July 15, 1969

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 13, dated October 13, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT, Belanda (2011)
- S1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, Jakarta (1993)
- Master of Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT Netherlands (2011)
- Bachelor of Civil Engineering, Universitas Trisakti, Jakarta (1993)

Riwayat Pekerjaan | Employment History

- Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2023–2024)
- Direktur Kmersial dan Operasi di PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023)
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021)
- SVP Manajemen Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020)
- Koordinator Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019)
- Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017)
- Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017)
- Direktur Teknik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015)
- Director of Engineering of PT Pelindo Multi Terminal (2023–2024)
- Director of Commercial and Operation of PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023)
- Director of Engineering of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020–2021)
- SVP of Strategic Project Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020)
- Coordinator of Strategic Project of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019)
- Director of Commercial and Business Development of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017)
- Director of Construction of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017)
- Director of Engineering of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di luar IPCM, sementara saat ini beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di IPCM.
He has no concurrent positions outside IPCM, while he is currently listed as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee at IPCM.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
He has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Komisaris
Commissioner

R.R. Dewi Ariyani

Masa Jabatan: 14 April 2022–saat ini, Periode Pertama
Term of Office: April 14, 2022–present, First Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Surabaya, 13 Desember 1969
Indonesian citizen
Aged 55 years old as of Desember 31, 2024
Born in Surabaya, December 13, 1969

Domisili | Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 28 tanggal 14 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 28, dated April 14, 2022, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 Bidang Akuntansi di Universitas Indonesia (2004)
- S1 Akuntansi di Universitas Jendral Sudirman (1993)
- Master of Accounting from the University of Indonesia (2004)
- Bachelor of Accounting from General Sudirman University (1993)

Riwayat Pekerjaan | Employment History

- Analis Kinerja BUMN Kementerian BUMN (2021-Sekarang)
- Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama (2020–2021)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Rekayasa Industri (2018–2020)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016–2017)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017)
- Komisaris / Anggota Dewan Pengawas PT Indah Karya (Persero) (2007–2012)
- Sekretaris Dekom / Dewan Pengawas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007)
- Staf Dekom / Dewas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002)
- BUMN Performance Analyst at the Ministry of SOEs (2021-Present)
- Director of Finance & HR of PT Reasuransi Indonesia Utama (2020—2021)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT Rekayasa Industri (2018–2020)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016–2017)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017)
- Commissioner / Member of Supervisory Board of PT Indah Karya (Persero) (2007–2012)
- Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007)
- Staff of the Board of Commissioners / Supervisory Board of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap di luar IPCM, sementara saat ini beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko di IPCM.
She does not hold other position outside IPCM, while within IPCM, she is the Chairman of Risk Committee.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Analis Kinerja BUMN Kementerian BUMN (2021-Sekarang).
SOE Performance Analyst at the Ministry of SOEs (2021-Present).

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

387.600 lembar saham per 31 Desember 2024.
387,600 shares as of December 31, 2024.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Bay Mokhamad Hasani

Masa Jabatan: 15 Juli 2020–saat ini, Periode Pertama
Term of Office: July 15, 2020–present, First Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 67 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Rangkasbitung, 23 Oktober 1957
Indonesian citizen
Aged 67 years old as of Desember 31, 2024
Born in Rangkasbitung, October 23, 1957

Domisili | Domicile

Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 24 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 24, dated July 15, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta (2007)
- Strata B Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta (1984)
- Bachelor of Management, College of Economics, Jakarta (2007)
- Strata B Sea Transportation and Port Management, College of Maritime Science (STIP), Jakarta (1984)

Riwayat Pekerjaan | Employment History

- Komisaris Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018–2020)
- Plt Dirjen Perhubungan Laut (2017)
- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (2016–2017)
- Kepala Kantor Utama Syahbandar Tanjung Perak (2016)
- Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok (2015–2016)
- Independent Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (2018–2020)
- Acting Director General of Sea Transportation (2017)
- Director of Traffic and Sea Transportation of the Ministry of Transportation (2016–2017)
- Head of Tanjung Priok Main Harbormaster Office (2016)
- Head of Tanjung Priok Port Authority (2015–2016)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki jabatan rangkap di luar IPCM, sementara saat ini beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Audit di IPCM.
He does not hold other position outside IPCM, while within IPCM, he is the Chairman of Audit Committee.

Pernyataan Independensi | Statement of Independence

Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen. Adapun Komisaris Independen IPCM, tidak memiliki benturan kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen.
He has not served for more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner. The Independent Commissioner of IPCM has no conflicts of interest or personal relationships that could have a negative impact or pose a conflict of interest on the Company and has fulfilled the requirements to be appointed as an Independent Commissioner.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
He has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or direct or indirect controlling shareholders.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

F. Budi Prayitno

Masa Jabatan: 25 September 2024– saat ini, Periode Pertama
Term of Office: September 25, 2024–present, First Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Cilacap, 02 April 1968
Indonesian citizen
Aged 56 years old as of Desember 31, 2024
Born in Cilacap, April 2, 1968

Domisili | Domicile

Bekasi
Bekasi

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 49 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 49, dated October 24, 2024, drawn up by Notary Ashoya Ratam, SH, Mkn., domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Master Degree spesialisasi *Air Transport Management*, Ecole National de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse-France, Tahun 2003
- Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Diponegoro di Semarang, Tahun 1991.
- Master's Degree with a specialization in Air Transport Management from École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse, France, in 2003
- Bachelor's Degree in International Law from Diponegoro University in Semarang, in 1991

Riwayat Pekerjaan | Employment History

- Kepala Biro Hukum di Kementerian Perhubungan (2023 s.d sekarang)
- Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan (2021-2022)
- Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum (2020-2021)
- Plt. Kepala Bandara Juata Tarakan (2019)
- Kepala Bidang Kampen dan Yandar Bandara Juata Tarakan (2019)
- Wakil Tetap RI untuk Kantor Kepentingan Indonesia pada ICAO (2018)
- Atase Perhubungan RI untuk Kanada-KBRI Ottawa (2018)
- Atase Perhubungan RI untuk USA-KBRI Washington DC (2015-2018)
- Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2008-2015)
- Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Kementerian Perhubungan (2007)
- Head of Legal Bureau at the Ministry of Transportation (2023 to present)
- Director of Aviation Security, Ministry of Transportation (2021-2022)
- Head of International Cooperation, Public Relations and General Affairs (2020-2021)
- Act. Head of Juata Tarakan Airport (2019)
- Head of Kampen and Yandar Division of Juata Tarakan Airport (2019)
- Permanent Representative of Indonesia to the Office of Indonesian Interests at ICAO (2018)
- Indonesian Transportation Attaché to Canada-KBRI Ottawa (2018)
- Indonesian Transportation Attaché to USA-KBRI Washington DC (2015-2018)
- Head of Foreign Cooperation Section Secretary General of the Ministry of Transportation (2008-2015)
- Section Head of Aviation Traffic Services Ministry of Transportation (2007)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau memiliki jabatan rangkap di luar IPCM, Dimana beliau tercatat menjabat sebagai Kepala Biro Hukum di Kementerian Perhubungan
He holds a concurrent position outside of IPCM, where he is listed as the Head of the Legal Bureau at the Ministry of Transportation.

Pernyataan Independensi | Statement of Independence

Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen. Adapun Komisaris Independen IPCM, tidak memiliki benturan kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen.
He has not served for more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner. The Independent Commissioner of IPCM has no conflicts of interest or personal relationships that could have a negative impact or pose a conflict of interest on the Company and has fulfilled the requirements to be appointed as an Independent Commissioner.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
He has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or direct or indirect controlling shareholders.

Dewan Komisaris

The Board of Commissioners



Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, Komposisi anggota Direksi Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN 2024

Komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan 2024 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, 1 (satu) orang Direktur Armada dan Operasi, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, dan SDM. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR CHANGES

Throughout 2024, the composition of the Company's Board of Directors underwent changes in accordance with the Company's needs, as explained below.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS PRIOR TO THE 2024 ANNUAL GMS

The composition of the Board of Directors before the 2024 Annual GMS is 3 (three) persons consisting of 1 (one) President Director, concurrently Commercial and Business Development Director, 1 (one) Fleet and Operations Director, 1 (one) Finance and HR Director. The composition and basis of appointment of the Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2024
Composition and Basis of Appointment of the Board of Directors Prior to the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Shanti Puruhita*	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Desember 2022 Annual GMS Resolution dated December 6, 2022	6 Desember 2022 December 6, 2022
Muhammad Iqbal	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operations	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Juni 2021 Annual GMS Resolution dated June 17, 2021	13 Oktober 2020 October 13, 2020
Reini Delfianti	Direksi Keuangan & SDM Director of Finance & HR	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 April 2022 Annual GMS Resolution dated April 14, 2022	14 April 2022 April 14, 2022

*) Beliau juga menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
*) She is also the Director of Commerce and Business Development

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN 2024

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. RUPS Tahunan 2024 memutuskan mengangkat kembali Shanti Puruhita sebagai Direktur Utama dan Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi. Serta mengangkat Dessy Emastari Prihatiningtyas sebagai Direksi Keuangan, SDM & Manajemen Risiko menggantikan Reini Delfianti yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AFTER THE 2024 ANNUAL GMS

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Directors based on the Annual GMS dated June 12, 2024. The changes in the composition of the Board of Directors are made based on the needs of the Company. The 2024 Annual GMS decided to reappoint Shanti Puruhita as President Director and Muhammad Iqbal as Fleet and Operations Director. As well as appointing Dessy Emastari Prihatiningtyas as Director of Finance, HR & Risk Management replacing Reini Delfianti whose term of office ended at the close of the GMS.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan 2024
Composition and Basis of Appointment of the Board of Directors After the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Shanti Puruhita*	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode kedua) June 12, 2024 (second term)
Muhammad Iqbal	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operations	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode kedua) June 12, 2024 (second term)
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direksi Keuangan, SDM, Manajemen Risiko Director of Finance, HR, Risk Management	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode pertama) June 12, 2024 (first term)

*) Beliau juga menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
*) She is also the Director of Commerce and Business Development

Adapun profil Direksi Perseroan yang menjabat per 31 Desember 2024, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

The profiles of the Company's Board of Directors serving as of December 31, 2024, up to the signing of this Annual Report, are as attached below.

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development

Shanti Puruhita*

Masa Jabatan:
- **6 Desember 2022 - 12 Juni 2024, Periode Pertama**
- **12 Juni 2024 - saat ini, Periode Kedua**
- December 6 2022 - June 12, 2024, First Period
- June 12, 2024 - present, Second Period



*) Beliau juga menjabat sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
She is also the Act. Director of Commercial and Business Development.

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Surabaya, 12 Mai 1977
Indonesian citizen
Aged 47 years old as of Desember 31, 2024
Born in Surabaya, May 12, 1977

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 24 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 24, dated July 15, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Penunjukan Selanjutnya | Subsequent Appointment History

- Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Akta Notaris Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Akta Notaris Nomor 32 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk
- Notarial Deed Number 33, dated June 17, 2021, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders.
- Notarial Deed Number 16, dated December 6, 2022, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Notarial Deed Number 32 June 12, 2024 made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.kn, domiciled in the Administrative City of South Jakarta regarding the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 - Kuhne Logistic University, Hamburg Jerman - Jurusan Logistik (2014)
- S1 - Universitas Airlangga - Hukum, (1999)
- Master of Logistics from Kuhne Logistic University, Hamburg, German (2014)
- Bachelor of Law from Airlangga University (1999)

Riwayat Pekerjaan | Employment History

- Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang)
- Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022)
- EVP Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017–2020)
- VP Hubungan Lembaga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016–2017)
- Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2015–2016)
- Senior Manager Layanan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012–2015)
- President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Present)
- Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022)
- EVP Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2020)
- VP Institutional Relations of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016–2017)
- Director of Commercial of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2016)
- Senior Manager of HR and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2012–2015)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

- "Leader as a Coach" – oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – oleh PT Angkasa Pura Logistik, di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "Pelatihan Audit Berbasis Risiko" – oleh PT PMLI, di Surabaya (Nomor: 203517906200210)
- "Leader as a Coach" – by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in Jakarta (no certification number)
- "APLOG Logistics Forum Webinar (Diversification and Risk Management in Logistics Industry)" – by PT Angkasa Pura Logistik, in Jakarta (no certification number)
- "Risk-Based Audit Training" – by PT PMLI, in Surabaya (Certification Number: 203517906200210)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perusahaan, sementara saat ini beliau juga merangkap sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis di IPCM sejak tahun 2022.
She does not hold other position outside the Company, while within IPCM, she is the Act. Director of Commercial and Business Development since 2022.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
She has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

1.072.100 lembar saham per 31 Desember 2024.
1.072.100 shares as of December 31, 2024.

Direktur Armada dan Operasi

Director of Fleet Management and Operations

Muhammad Iqbal

Masa Jabatan:
- **17 Juni 2022 - 12 Juni 2024, Periode Pertama**
- **2 Juni 2024 - saat ini, Periode Kedua**
- June 17, 2022 - June 12, 2024, First Period
- June 12, 2024 - present, Second Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Jakarta, 14 Agustus 1968
Indonesian citizen
Aged 56 years old as of Desember 31, 2024
Born in Jakarta, August 14, 1968

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed Number 13, dated October 13, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Penunjukan Selanjutnya | Subsequent Appointment History

- Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Akta Notaris Nomor 32 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk
- Notarial Deed Number 33, dated June 17, 2021, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders.
- Notarial Deed Number 32 June 12, 2024 drawn up by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.kn, domiciled in the South Jakarta Administrative City regarding the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 - Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 2006
- S1 - Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 1995
- Master of Nautical Science from College of Maritime Science (2006)
  Bachelor of Nautical Science from College of Maritime Science (1995)

Riwayat Pekerjaan | Employment History

- Direktur Armada dan Operasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Sekarang)
- VP Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020)
- Plt. Direktur Armada dan Teknik PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)
- Director of Fleet Management and Operation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Present)
- VP Vessel Services of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020)
- Act. Director of Fleet Management and Engineering of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

"Qualified Chief Risk Officer (QRCO)" – oleh PT PMLI, di Bogor (Nomor: 214816812161014)
"Qualified Chief Risk Officer (QRCO)" – by PT PMLI, in Bogor (Nomor: 214816812161014)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam atau luar perusahaan.
He does not hold other position within and outside the Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
He has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

964.100 lembar saham per 31 Desember 2024.
964.100 shares as of December 31, 2024.

Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko

Director of Finance, HR, and Risk Management

Dessy Emastari Prihatiningtyas

Masa Jabatan: 12 Juni 2024 - saat ini, Periode Pertama
Term of Office: June 12, 2024–present, First Period



Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Surabaya, 27 Desember 1971
Indonesian citizen
Aged 52 years old as of Desember 31, 2024
Born in Surabaya, December 27, 1971

Domisili | Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 32 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Notarial Deed No. 32 dated June 12, 2024, drawn up by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.kn, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Master of Commerce dari University of Queensland, Australia (2006)
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga (1997)
- Master of Commerce from the University of Queensland, Australia (2006)
- Bachelor of Economic Accounting from Airlangga University (1997)

Riwayat Pekerjaan | Employment History

- Group Head Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1 Oktober 2021 s.d 11 Juni 2024.
- SVP Strategi SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 15 Juni 2021 s.d 30 September 2021
- Direktur Keuangan dan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020–2021)
- Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019–2019)
- Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015-2019)
- Senior Manager Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia II (2015-2015)
- Senior Manager Pemetaan SDM & Manajemen Karir PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- Group Head of HR Management PT Pelabuhan Indonesia (Persero) October 1, 2021 to June 11, 2024.
- SVP HR Strategy PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) June 15, 2021 to September 30, 2021
- Finance and HR Director of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020–2021)
- President Director of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019)
- President Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015–2019)
- Senior Human Resources Management Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (2015)
- Senior Manager for HR Mapping & Career Management pf PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

- Deep Transformational Coach Certification Program
- Pelatihan dan Sertifikasi BNSP untuk General Manager SDM
- ESG and SDG Impact for Accounting Professionals
- ESG Capacity Building
- Qualified Risk Management Professional (QRMP) Batch II
- Professional Development Program Batch II
- Deep Transformational Coach Certification Program
- Training Certification BNSP for HR General Manager SDM
- ESG and SDG Impact for Accounting Professionals
- ESG Capacity Building
- Qualified Risk Management Professional (QRMP) Batch II
- Professional Development Program Batch II

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam atau luar perusahaan.
She has no concurrent positions either inside or outside the company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
She has no affiliations with any members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
She does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Direksi

The Board of Directors



Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers



Amir Indra Sasongko

EVP. Audit Internal | EVP. Internal Audit

Menjabat sejak 2 April 2023 | Serving since April 2, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	54 tahun per 31 Desember 2024 54 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	Sarjana Sosial (S. Sos), Universtas Krisnadwipayana (1996) Bachelor of Social Science (S. Sos), Krisnadwipayana University (1996)
Pengalaman Kerja Employment History	Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pengerukan Indonesia, periode (2016-2023) Head of Internal Audit Unit, PT Pengerukan Indonesia (2016–2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Pelindo - Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/2/4/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 2 April 2023; • SPJM - Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 22 Juni 2023; • JAI - Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 tanggal 2 April 2023. • Decree of the Board of Directors of Pelindo No. KP.10.02/2/4/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated April 2, 2023; • Decree of the Board of Directors of SPJM No. KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated June 22, 2023; • Decree of the Board of Directors of JAI No. KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 dated April 2, 2023.



Eddy Haristiani

EVP. Sekretaris Perusahaan | EVP Corporate Secretary

Menjabat sejak 16 Juli 2019 | Serving since July 16, 2019

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	54 tahun per 31 Desember 2024 54 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	• Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003–2005) • Sarjana Komunikasi Massa, Universitas Gadjah Mada (1990–1995) • Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003–2005) • Bachelor of Mass Communication, Gadjah Mada University (1990–1995)
Pengalaman Kerja Employment History	• SVP / Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (2018–2019) • Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University) / One of PT Pelindo II's Subsidiaries (2014–2018) • Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) - (2012 –2014) • SVP / Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (2018–2019) • Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University) / One of PT Pelindo II's Subsidiaries (2014–2018) • Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) (2012—2014)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, tanggal 16 Juli 2019 • Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, dated July 16, 2019 • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023



Andisyah Kadir

VP Transformasi & Pengembangan Bisnis | VP Transformation & Business Development

Menjabat sejak 28 April 2021 | Serving since April 28, 2021

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2024 52 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma (1996) Bachelor of Informatics Management, Gunadarma University (1996)
Pengalaman Kerja Employment History	• VP Transformasi & Pengembangan Bisnis, Divisi Transformasi & Pengembangan Bisnis JAI (2021–2022) • SDVP Crewing (2018 - 2021) • Manager Crewing, Crewing, JAI (2014 - 2018) • Ass. Manager Administrasi Kepanduan & Pengawakan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Administrasi Kepanduan & Pengawakan, Pelabuhan Tanjung Priok (2012–2014) • Supervisor Administrasi Kepanduan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2009–2012) • Pj. Supervisor Administrasi Kepanduan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2008) • Pel. Pelayanan Pemanduan, PPSA, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2006) • Pel. Administrasi Kepanduan dan SIMOP Senior, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2003) • Pel. Administrasi Kepanduan dan SIMOP Junior, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2002) • Pel. Adm. Pelayanan Jasa Senior, Dit. Usaha, Pelindo II (2001) • Pel. Adm. Data & Informasi, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (1998–1999) • VP of Transformation & Business Development, Transformation & Business Development Division of JAI (2021-2022) • SDVP Crewing (2018—2021) • Manager Crewing, Crewing, JAI (2014—2018) • Assistant Manager of Pilotage & Manning Administration of Tanjung Priok Port Branch, Pilotage & Manning Administration of Tanjung Priok Port (2012–2014) • Supervisor of Pilotage Administration, Tanjung Priok Port Branch (2009-2012) • Acting Supervisor of Pilotage Administration, Tanjung Priok Port Branch (2008) • Pilotage Services Staff of One-Stop Service Center (PPSA) of Tanjung Priok Port Branch (2006) • Senior Staff of Pilotage Administration and Operational Management Information System (SIMOP) of Tanjung Priok Port Branch (2003) • Junior Staff of Pilotage Administration and Operational Management Information System (SIMOP) of Tanjung Priok Port Branch (2022) • Senior Staff of Service Administration, Directorate of Business of Pelindo II (2001) • Data & Information Administration Staff of Tanjung Priok Port Branch (1998—1999)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND- 23 tanggal 13 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023



Roy Prabandaru Mahapria

VP Komersial | VP Commercial

Menjabat sejak 1 Februari 2023 | Serving since February 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	50 tahun per 31 Desember 2024 50 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma (1996) Bachelor of Informatics Management, Gunadarma University (1996)
Pengalaman Kerja Employment History	• S2 – Kuhne Logistics University – Hamburg, Germany (2015) • S1 – STT Pelita Bangsa – Jakarta (2023) • STIE Yasmi – Cirebon (2014) • D3 BPLP – Semarang (1996) • Master's Degree from Kuhne Logistics University, Hamburg, Germany (2015) • Bachelor's Degree from STT Pelita Bangsa, Jakarta (2023) • Yasmi School of Economy, Cirebon (2014) • Diploma from BPLP, Semarang (1996)
Pengalaman Kerja Employment History	• Deputi Komersial Pontianak PT Pelindo 2 (2017 – 2023) • Asisten Manager Tj. Priok PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 – 2017) • Kepala Usaha Terminal Cirebon PT Pelindo 2 (2014 -2015) • Manager Operasi Tanjung Pandan PT Pelindo 2 (2013 – 2014) • Spv Perencanaan Kapal Pontianak PT Pelindo 2 (2010 – 2013) • Pandu Bandar Pontianak PT Pelindo 2 (2009 – 2010) • Pandu Laut Palembang PT Pelindo 2 (2007 – 2009) • Pandu Laut Pontianak PT Pelindo 2 (2002 – 2007) • Staf SDM Kantor Pusat PT Pelindo 2 (2001 – 2002) • Commercial Deputy of Pontianak Branch, PT Pelindo 2 (2017–2023) • Assistant Manager, Tanjung Priok, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015–2017) • Terminal Business Head, Cirebon, PT Pelindo 2 (2014–2015) • Operations Manager, Tanjung Pandan, PT Pelindo 2 (2013–2014) • Ship Planning Supervisor, Pontianak, PT Pelindo 2 (2010–2013) • Port Pilot, Pontianak, PT Pelindo 2 (2009–2010) • Marine Pilot, Palembang, PT Pelindo 2 (2007–2009) • Marine Pilot, Pontianak, PT Pelindo 2 (2002–2007) • HR Staff, Head Office, PT Pelindo 2 (2001–2002)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 • Surat Keputusan Direksi No. KP-413/1/2/1/MS-23 tanggal 1 Februari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 • Decree of the Board of Directors Number: KP-413/1/2/1/MS-23 dated February 1, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023



Yosia Abet Laksana

VP Operasi & Designated Person Ashore (DPA) | VP Operation & Designated Person Ashore (DPA)

Menjabat sejak 1 November 2021 | Serving since November 1, 2021

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	50 tahun per 31 Desember 2024 50 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	• Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (2008) • Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (2002) • Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (1997) • College of Maritime Science (2008) • College of Maritime Science (2002) • Shipping Education and Training (1997)
Pengalaman Kerja Employment History	• Manager Operasi & Komersial Area V PT. Jasa Armada Indonesia (2020 – 2021) • Assistant DGM Perencanaan Pemanduan Cabang Pelabuhan Palembang (2019 –2020) • Assistant DGM Perencanaan, Pengendalian & Kepanduan Cabang Pelabuhan Jambi (2017 – 2018) • Manager Operasi Jambi Cabang Pelabuhan Jambi (2014 – 2015) • Staf Kapal & Pemanduan Sr. Kantor Pusat (2013 –2013) • Pandu Bandar Cirebon Cabang Pelabuhan Cirebon (2012 -2012) • Pandu laut pada Cab Pelabuhan Palembang (2009 – 2010) • Pandu Laut pada Cab. Pelabuhan Pontianak (2006) • Pel. Pengembangan SDM Junior (2005 –2005) • Operations & Commercial Manager Area V, PT Jasa Armada Indonesia (2020–2021) • Assistant DGM of Pilotage Planning, Port of Palembang Branch (2019–2020) • Assistant DGM of Planning, Control & Pilotage, Port of Jambi Branch (2017–2018) • Operations Manager, Port of Jambi Branch (2014–2015) • Shipping & Pilotage Staff, Head Office (2013) • Harbor Pilot, Port of Cirebon Branch (2012) • Sea Pilot, Port of Palembang Branch (2009–2010) • Sea Pilot, Port of Pontianak Branch (2006) • Junior HR Development Staff (2005)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 21 Desember 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated December 21, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023



Ivan Hartanto

VP Armada & QHSSE | VP Fleet & QHSSE

Menjabat sejak 6 April 2021 | Serving since April 6, 2021

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2024 53 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	Universitas Pancasila (1997) Pancasila University (1997)
Pengalaman Kerja Employment History	• VP Teknik/DPA PT Jasa Armada Indonesia (April 2021 – Oktober 2021) • DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Banten (2020 –2021) • Senior Manager Teknik IPC Terminal Petikemas (2019 –2020) • DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Panjang (2017) • DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Panjang (2017) • DVP Alat Apung Kantor Pusat (2016) • ASM. Alat Apung Kantor Pusat (2011 – 2016) • ASM. Teknik Mesin, Listrik & Telekomunikasi Kantor Pusat (2011) • Asisten Manager Teknik Mesin dan Listrik (2005 – 2009) • Staf Alat Apung Senior (1999 – 2004) • VP of Engineering/DPA at PT Jasa Armada Indonesia (April 2021 – October 2021) • DGM of Engineering & Information Systems, Banten Port Branch (2020 – 2021) • Senior Manager of Engineering, IPC Container Terminal (2019 – 2020) • DGM of Engineering & Information Systems, Panjang Port Branch (2017) • DGM of Engineering & Information Systems, Panjang Port Branch (2017) • DVP of Floating Equipment, Head Office (2016) • ASM of Floating Equipment, Head Office (2011 – 2016) • ASM of Mechanical, Electrical & Telecommunication Engineering, Head Office (2011) • Assistant Manager of Mechanical and Electrical Engineering (2005 – 2009) • Senior Staff of Floating Equipment (1999 – 2004)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/31/12/1/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 22 Desember 2022 • Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/31/12/1/RKTK/SDMA/PLND-22 dated December 22, 2022 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023



Budy Setiawan*

VP SDM & Umum merangkap VP Pengadaan | VP HR & General concurrently serving as VP Procurement

Menjabat sejak 14 Agustus 2020 | Serving since August 14, 2020

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2024 53 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	• Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung - FISIP (Adm Niaga) S1 tahun (2006– 2008) • Diploma, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) (1998–2001) • Tulang Bawang University, Bandar Lampung – Faculty of Social and Political Sciences (Business Administration), Bachelor's Degree (2006–2008) • Diploma, College of Port Administration and Management Sciences (STIAMAK) (1998–2001)
Pengalaman Kerja Employment History	• DVP Umum dan Rumah Tangga Kantor Pusat (2019–2020); • DVP Budaya Perusahaan Kantor Pusat (2018–2019); • Junior Deputy GM Umum dan Logistik Cabang Pelabuhan Panjang (2017–2018); • Asisten Manager Quality Assurance PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Divisi Audit (2015–2017); • Advisor Jaminan Mutu dan Manajemen Risiko Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2014–2017); • PJ.Advisor Jaminan Mutu dan Pengendalian Kinerja Cabang Pelabuhan Panjang (2010–2013); • Supervisor Umum dan Rumah Tangga Cabang Pelabuhan Panjang (2007–2009); • Sekretaris GM Pelabuhan Panjang (2005–2007) • DVP of General Affairs and Household, Head Office (2019–2020) • DVP of Corporate Culture, Head Office (2018–2019) • Junior Deputy GM of General Affairs and Logistics, Panjang Port Branch (2017–2018) • Assistant Manager of Quality Assurance, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), Audit Division (2015–2017) • Quality Assurance and Risk Management Advisor, Tanjung Priok Port Branch (2014–2017) • Acting Advisor of Quality Assurance and Performance Control, Panjang Port Branch (2010–2013) • General Affairs and Household Supervisor, Panjang Port Branch (2007–2009) • Secretary to the GM of Panjang Port (2005–2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023; • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023; • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM23 tanggal 2 Januari 2023; • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023. • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023; • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023; • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM23 dated January 2, 2023; • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023.

*) Budy Setiawan juga merangkap sebagai VP Pengadaan yang mulai efektif menjabat pada 3 Juli 2024
*) Budy Setiawan also concurrently serving as VP Procurement effective since July 3, 2024



Angga Iriano Nugroho

VP Keuangan & Manajemen Risiko | VP Finance & Risk Management

Menjabat sejak 14 Agustus 2020 | Serving since August 14, 2020

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	40 tahun per 31 Desember 2024 40 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	• Msc of International Transport and Logistics/Transport & Logistics, World Maritime University (2013); • Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman (2004). • MSc of International Transport and Logistics/Transport & Logistics, World Maritime University (2013) • Bachelor of Economics in Accounting, Jenderal Soedirman University (2004)
Pengalaman Kerja Employment History	• SDVP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan & CSR PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017- 2020); • Manager Akuntansi & Anggaran, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2017); • ASM Pendapatan & Piutang PT. Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016); • Manager Perbendaharaan & KBL, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014). • SDVP of Partnership and Community Development Program & CSR, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2020) • Accounting & Budget Manager, Tanjung Priok Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016–2017) • Assistant Manager of Revenue & Receivables, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014–2016) • Treasury & Partnership Program Manager, Tanjung Priok Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023



Rikky Afrianto*

VP Pengadaan | VP Procurement

Menjabat sejak 14 Agustus 2020 | Serving since August 14, 2020

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2024 47 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	• Post Graduate, Netherland Maritime University, Netherland, Major in: International Shipping and Transport (2014–2016); • Magister Teknik Kelautan, Institut Teknologi Bandung, Bandung (2008–2010); • Magister Strategic Management, Universitas Indonesia, Jakarta (2009–2010). • Post Graduate, Netherlands Maritime University, Netherlands, Major in: International Shipping and Transport (2014–2016) • Master of Marine Engineering, Bandung Institute of Technology, Bandung (2008–2010) • Master of Strategic Management, University of Indonesia, Jakarta (2009–2010)
Pengalaman Kerja Employment History	• Deputy Vice President (DVP) Pemeliharaan Fasilitas Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018–2020); • Asisten Senior Manager (ASM) Pengendalian Proyek Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014–2018); • Manager Teknik dan Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Banten (2010–2014); • Assisten Manager Penilikan Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2009–2010). • Deputy Vice President (DVP) of Facility Maintenance, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018–2020) • Assistant Senior Manager (ASM) of Project Control, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014–2018) • Technical and Information Systems Manager, Banten Port Branch (2010–2014) • Assistant Manager of Facility Inspection, Tanjung Priok Port Branch (2009–2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 tanggal 14 Agustus 2020 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/14/8/1/MTA/SDM/PI.II-2020 dated August 14, 2020 • Board of Directors Decree of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023 • Board of Directors Decree of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023 • Board of Directors Decree of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023

*) Rikky Afrianto telah meninggal dunia pada 3 Juli 2024
*) Rikky Afrianto has passed away on July 3, 2024



Oka Sudarsono

VP Hukum | VP Legal

Menjabat sejak 1 Januari 2023 | Serving since January 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	55 tahun per 31 Desember 2024 55 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	• M.M., Universitas Bina Darma Palembang, Tahun 2019 • S.Pel. Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Jakarta, Tahun 2002 • A.Md., Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta, Tahun 1993 • M.M. (Master of Management), Bina Darma University Palembang, 2019 • S.Pel. (Bachelor of Maritime Science), Jakarta College of Marine Technology, 2002 • A.Md. (Associate Degree), Bahtera Yogyakarta Academy of Merchant Shipping Administration, 1993
Pengalaman Kerja Employment History	• DGM Kepatuhan bisnis Pelindo (2020-2022) • DVP Penyusunan SOP Pelindo (2018-2020) • DGM operasi dan teknik Pelindo (2016-2017) • Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi Pelindo (2014-2016) • DGM of Business Compliance, Pelindo (2020–2022) • DVP of SOP Development, Pelindo (2018–2020) • DGM of Operations and Engineering, Pelindo (2016–2017) • Manager of Operations Planning and Control, Pelindo (2014–2016)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 01-SEP 202 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 31 Desember 2022 • Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM- 23 tanggal 2 Januari 2023 • Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 dated September 1, 2022 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated December 31, 2022 • Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023 • Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023

Demografi Karyawan
Employee Demographics

Hingga akhir 2024, jumlah pekerja Perusahaan yang merupakan Pekerja Penugasan Pelindo sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penempatan Pekerja (*Secondment Agreement*) tercatat sebesar 102 orang mengalami penurunan sebesar 17,74% jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 124 orang.

As of the end of 2024, the number of Company employees assigned by Pelindo under the Secondment Agreement was recorded at 102 people, showing a decrease of 17.74% compared to 124 people in 2023.

Berikut demografi pekerja Penugasan Pelindo untuk tahun 2024 dan 2023, berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, rentang usia, wilayah kerja, dan jenis kelamin.

The following is the demographic profile of Pelindo Secondment Employees for 2024 and 2023, based on organizational level, educational background, age range, work location, and gender.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Number of Employees by Organizational Level (people)

Level Organisasi Organizational Level	2024			2023		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Direksi Board of Directors	-	2	2	1	2	3
Vice President	9	-	9	10	-	10
Deputy Vice President	9	7	16	12	5	17
General Manager	5	-	5	5	-	5
Deputy General Manajer	3	1	4	4	1	5
Officer	34	3	37	37	4	41
ABK Crew	29	-	29	43	-	43
JUMLAH **TOTAL**	**89**	**13**	**102**	**112**	**12**	**124**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Number of Employees by Educational Background (people)

Tingkat Pendidikan Educational Background	2024			2023		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Pascasarjana (S2) Post Graduate (S2)	7	5	12	11	4	15
Sarjana (S1) Bachelor (S1)	27	6	33	30	6	36
Diploma (D3) Diploma (D3)	7	2	9	11	2	13
SLTA Senior High School	48	0	48	60	-	60
JUMLAH **TOTAL**	**89**	**13**	**102**	**112**	**2**	**124**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Number of Employees by Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2024			2023		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
<35 tahun | years old	9	3	12	10	5	15
35–50 tahun | years old	30	9	39	54	7	61
>50 tahun | years old	50	1	51	48	0	48
JUMLAH TOTAL	**89**	**13**	**102**	**112**	**12**	**124**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pekerja Berdasarkan Unit Kerja (orang)

Number of Employees by Work (people)

Wilayah Kerja Work Location	2024			2023		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	30	11	41	33	11	44
Area I						
Tanjung Priok, Meulaboh, Nusantara Regas	31	1	32	39	1	40
Area II						
Banten, Pontianak, Nipa	9	1	10	13	-	13
Area III						
Panjang, Bengkulu, Weda, Halmahera & Sekitar (Lauwi)	5	-	5	8	-	8
Area IV						
Palembang, Teluk Bayur, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan	11	-	11	15	-	15
Area V						
Cirebon, Patimban, Jawa Satu Power, Kanci	3	-	3	4	-	4
JUMLAH TOTAL	**89**	**13**	**102**	**112**	**12**	**124**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pegawai Gender (orang)

Number of Employees by Gender (people)

Gender	2024	2023
Laki-laki Male	89	112
Perempuan Female	13	12
JUMLAH TOTAL	**102**	**124**

Uraian lengkap terkait pekerja atau pekerja dan kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

A full description of the Company's employees and policies in managing and developing human resources can be found in the discussion of Human Resources in the Business Support Functions chapter of this Annual Report.



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

COMPOSITION OF COMPANY SHARE OWNERSHIP

Kepemilikan Saham IPCM per 1 Januari 2024

IPCM Share Ownership as of January 1, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Jumlah Nilai Nominal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Total Issued and Fully Paid Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Jasa Maritim	4.063.504.600	406.350.460.000	76,89%
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,11%
Publik: Public:			
• PT Pelabuhan Indonesia Investama	569.551.400	56.955.140.000	10,78%
• Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Others (each with ownership percentage below 5%)	637.915.300	63.791.530.000	12,07%
Sub Total	**5.276.771.300**	**527.677.130.000**	**99,85%**
Saham Treasuri Treasury Stock	8.039.800	803.980.000	0,15%
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH ISSUED AND FULLY PAID	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100%**

Kepemilikan Saham IPCM per 31 Desember 2024

IPCM Share Ownership as of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Jumlah Nilai Nominal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Nominal Value of Issued and Fully Paid Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Jasa Maritim	4.063.504.600	406.350.460.000	76,89%
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,11%

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Jumlah Nilai Nominal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Nominal Value of Issued and Fully Paid Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Publik: Public:			
• PT Pelabuhan Indonesia Investama	569.551.400	56.955.140.000	10,78%
• Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Others (each with ownership percentage below 5%)	637.915.300	63.791.530.000	12,07%
Sub Total	**5.276.771.300**	**527.677.130.000**	**99,85%**
Saham Treasuri Treasury Stock	8.039.800	803.980.000	0,15%
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH **ISSUED AND FULLY PAID**	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100,00%**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM IPCM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH AWAL TAHUN DAN AKHIR TAHUN 2024

SHAREHOLDERS COMPOSITION OF IPCM WITH 5% OWNERSHIP OR MORE AT THE BEGINNING AND END OF THE YEAR 2024

Status Pemilik/ Pemegang Saham Owners/Shareholders Status	1 Januari 2024 January 1, 2024			31 Desember 2024 December 31, 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Domestik Domestic						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholders with 5% or More Ownership	2	4.633.056.000	87,67%	2	4.633.056.000	87,67%
Sub Total	2	4.633.056.000	87,67%	2	4.633.056.000	87,67%
Asing Foreign						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholders with 5% Ownership or More	-	-	-			
Sub Total	**-**	**-**	**-**			
TOTAL	**2**	**4.633.056.000**	**87,67%**	**2**	**4.633.056.000**	**87,67%**

DAFTAR STATUS INVESTOR

LIST OF INVESTOR STATUS

Tabel Pemegang Saham IPCM Berdasarkan Status Investor Awal Tahun dan Akhir Tahun 2024

IPCM Shareholders by Investor Status at the Beginning and End of the Year 2024

Status Status	1 Januari 2024 January 1, 2024			31 Desember 2024 December 31, 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Domestik Domestic						
Individu Individual	5.852	340.641.100	6,45%	5.865	338.146.200	6,40%
Institusi Institution	16	4.930.974.000	93,30%	20	4.931.912.800	93,32%
Subtotal	**5.868**	**5.271.615.100**	**99,75%**	**5.885**	**5.270.059.000**	**99,72%**
Asing Foreign						
Individu Individual	3	70.500	0,00%	2	10.200	0,00%
Institusi Institution	16	13.125.500	0,25%	15	14.741.900	0,28%
Subtotal	**19**	**13.196.000**	**0,25%**	**17**	**14.752.100**	**0,28%**
TOTAL	**5.887**	**5.284.811.100**	**100,00%**	**5.902**	**5.284.811.100**	**100,00%**

Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors

Berikut adalah kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung, pada awal tahun dan akhir tahun buku 2024, sebagaimana terlampir di bawah ini.

The following is the share ownership of the Company by the Board of Commissioners and the Board of Directors, both directly and indirectly, at the beginning and end of the 2024 fiscal year, as presented below.

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2024

Direct Share Ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors at the Beginning and End of the 2024 Fiscal Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	158.100	0,002%	387.600	0,007%
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
F. Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors					
Shanti Puruhita	Direktur Utama/Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director/Act. Director of Commercial and Business Development	492.100	0,009%	1.072.100	0,020%
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	459.100	0,008%	964.100	0,018%
Reini Delfianti*	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	329.500	0,006%	864.600	0,016%
Dessy Emastari Prihatiningtyas**	Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HR & Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Tidak lagi menjabat sejak 12 Juni 2024
**) Menjabat sejak 12 Juni 2024
*) No longer serving since June 12, 2024
**) Serving since June 12, 2024

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Tidak Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2024

Indirect Share Ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors at the Beginning and End of the 2024 Fiscal Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
F. Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors					
Shanti Puruhita	Direktur Utama/Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director/Act. Director of Commercial and Business Development	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Reini Delfianti*	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dessy Emastari Prihatiningtyas**	Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HR & Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Tidak lagi menjabat sejak 12 Juni 2024
**) Menjabat sejak 12 Juni 2024
*) No longer serving since June 12, 2024
**) Serving since June 12, 2024

Informasi Pembelian/Penjualan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Purchase/Sales Information of Company Shares by the Board of Commissioners and Directors

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas transaksi tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies, it is stated that every member of the Board of Commissioners and Board of Directors is required to report to the company regarding their share ownership and any changes thereto no later than 3 (three) working days after the transaction occurs. Subsequently, the company must submit a report to the Financial Services Authority (OJK) regarding the transaction no later than 10 (ten) days from the date of the transaction.

Tabel Pembelian/Penjualan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024

Share Purchases/Sales by the Board of Commissioners and Directors through 2024

Nama Name	Jabatan Position	Transaksi Transaction	Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar) Total Shares Before Transaction (shares)	Jumlah Pembelian /Penjualan (lembar) Total Purchase/ Sales (shares)	Harga Saham (Rp) Share Price (Rp)	Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar) Total Shares After Transaction (shares)	Tanggal Transaksi Transaction Date	Tujuan Transaksi Transaction Objective	Pelaporan Reporting
Dewan Komisaris Board of Commissioners									
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Pembelian Purchase	158.100	229.500	272	387.600	20 November 2024 November 21, 2024	Investasi Investment	21 November 2024 November 21, 2024
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
F. Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Nama Name	Jabatan Position	Transaksi Transaction	Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar) Total Shares Before Transaction (shares)	Jumlah Pembelian /Penjualan (lembar) Total Purchase/ Sales (shares)	Harga Saham (Rp) Share Price (Rp)	Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar) Total Shares After Transaction (shares)	Tanggal Transaksi Transaction Date	Tujuan Transaksi Transaction Objective	Pelaporan Reporting
Direksi Board of Directors									
Shanti Puruhita	Direktur Utama/ Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director/Act. Director of Commercial and Business Development	Pembelian Purchase	492.100	580.000	272	1.072.100	7 November 2024 November 7, 2024	Investasi Investment	8 November 2024 November 8, 2024
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	Pembelian Purchase	459.100	505.000	270	964.100	13 November 2024 November 13, 2024	Investasi Investment	14 November 2024 November 14, 2024
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Director of Finance, HR & Risk Management	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan

Information Regarding Main/Controlling Shareholders

PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang Saham Utama dan Pengendali IPCM adalah PT Pelindo Jasa Maritim dengan kepemilikan sebesar 76,89%. Secara teknis hubungan tata kelola dengan Pemegang Saham (*liaison function*) dilakukan antara Sekretaris Perusahaan IPCM dengan Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim.

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI/ENTITAS PEMILIK AKHIR

Hingga akhir tahun 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki 99% saham PT Pelindo Jasa Maritim dan menjadi pemegang saham utama dan pengendali PT Pelindo Jasa Maritim yang merupakan Induk IPCM. Dengan demikian, entitas pemilik akhir/ pemegang saham pengendali PT Pelindo Jasa Maritim dan IPCM adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

MAIN SHAREHOLDEERS

The Main and Controlling Shareholder of IPCM is PT Pelindo Jasa Maritim, with an ownership of 76.89%. The governance relationship with the Shareholder (liaison function) is technically carried out between the Corporate Secretary of IPCM and the Corporate Secretary of PT Pelindo Jasa Maritim.

CONTROLLING SHAREHOLDERS/ULTIMATE BENEFICIAL OWNER

As of the end of 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) owns 99% of the shares of PT Pelindo Jasa Maritim and serves as the main and controlling shareholder of PT Pelindo Jasa Maritim, which is IPCM's parent company. Accordingly, the ultimate beneficial owner/controlling shareholder of both PT Pelindo Jasa Maritim and IPCM is PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associate Entities, and Joint Ventures

ENTITAS ANAK

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki Anak Perusahaan sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan anak Perusahaan.

ENTITAS ASOSIASI

Sampai dengan akhir tahun 2024, JAI Tbk tidak memiliki perusahaan patungan maupun dalam bentuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan entitas asosiasi Perusahaan.

KERJASAMA DENGAN PIHAK TERAFILIASI DAN PIHAK KETIGA

SUBSIDIARIES

As of the end of 2024, the Company does not have any Subsidiaries; therefore, there is no information regarding the name, ownership percentage, line of business, or operational status related to any Subsidiary.

ASSOCIATE ENTITIES

As of the end of 2024, JAI Tbk does not have any joint ventures or Special Purpose Vehicle (SPV) entities; therefore, there is no information regarding the name, ownership percentage, line of business, or operational status related to the Company's associate entities.

COOPERATION WITH AFFILIATED PARTIES AND THIRD PARTIES

No	Pihak Parties	Nomor PKS PKS Number	Tanggal Berlaku Valid Date	Tanggal Berakhir End Date	Judul PKS PKS Title
1.	PT PLN Gas, PT Adhi Guna Putera	2963/126/IX DIREKSI-2023 PD.02/1/9/1 SPB/DUT/JAI-23	1 Juli 2023 July 1, 2023	30 Juni 2028 June 30, 2028	Perjanjian Sewa Kapal Tunda untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power. Tugboat Charter Agreement for the Operational Area of Jawa Satu Power.
2.	PT Karya Pasific Shipping	KS.02/1/12/2/ KOD/DUT/JAI23 001/KPSJAI/ XII/2023	1 Desember 2023 December 1, 2023	30 November 2024 November 30, 2024	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda Beserta Awak Kapal untuk Pelayanan Jasa Kapal atas Kapal-Kapa Milik dan Kapal-Kapal yang Bekerja untuk Transhipment PT Karya Pacific Shipping dengan Sistem On Call di Area Ship to Ship (STS) Muara Musi Palembang. Cooperation Agreement for the Provision of Tugboats and Crew for Vessel Services involving Owned Vessels and Vessels Operating for Transhipment Activities of PT Karya Pacific Shipping, using an On-Call System in the Ship-to-Ship (STS) Area of Muara Musi, Palembang.

Struktur Grup

Group Structure

IPCM merupakan anak perusahaan subholding PT Pelindo Jasa Maritim yang kepemilikannya juga dipegang oleh PT Multi Terminal Indonesia.

IPCM is a subsidiary of subholding company, PT Pelindo Jasa Maritim, with ownership held by PT Multi Terminal Indonesia.

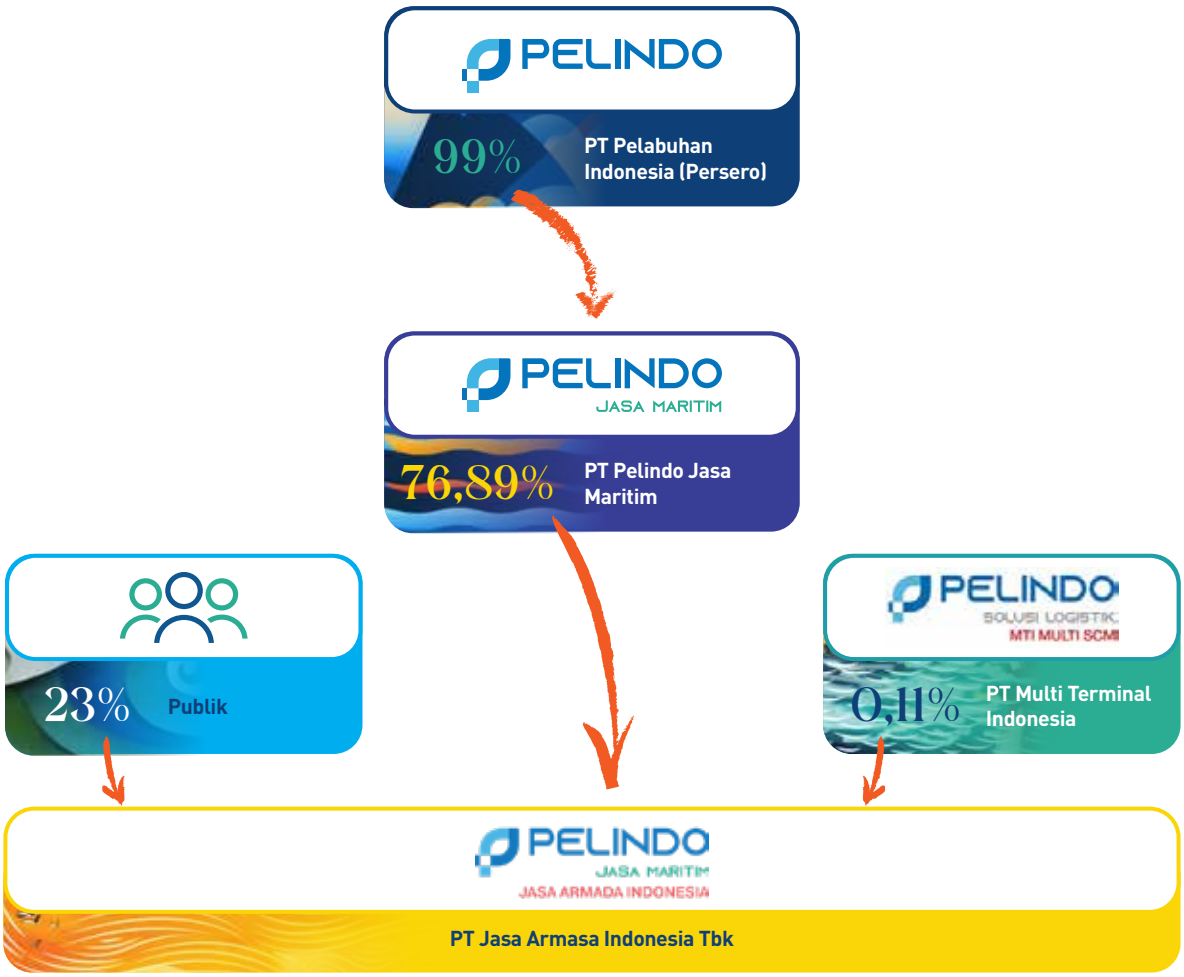

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing Issuance and/or Listing

Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 15–18 Desember 2017 yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perusahaan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perusahaan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2024, secara performa adalah sebagai berikut:

The Company conducted its Initial Public Offering (IPO) from December 15 to 18, 2017, and was officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017. With all shares offered in the IPO successfully sold, the composition of the Company's share capital and shareholders, before and after the IPO as of December 31, 2024, in terms of performance, is as follows:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) Setiap Saham

Registered Common Shares with a Nominal Value of Rp100 (One Hundred Rupiah) per Share

Keterangan Description	Sebelum Penawaran Umum Before Public Offering			Setelah Penawaran Umum s.d Desember 2024 After Public Offering until 2024 December		
	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Nominal Value (Rp)	(%)	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Nominal Value (Rp)	(%)
Modal Dasar Authorized Capital	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid-Up Capital	4.069.304.600	406.930.460.000	100	5.284.811.100	528.481.110.000	100
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	4.063.504.600	406.350.460.000	99,86			
PT Pelindo Jasa Maritim				4.063.504.600	406.350.460.000	76,89
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,14	5.800.000	580.000.000	0,11
Masyarakat Public	-	-	0,00	1.157.611.800	115.761.180.000	21,90
Program ESA ESA Program	-	-	-	57.894.700	5.789.470.000	1,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Paid-Up Capital	**4.069.304.600**	**406.930.460.000**	**100,00**	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel Number of Shares in Portfolio	**10.930.695.400**	**1.093.069.540.000**		**9.715.188.900**	**971.518.890.000**	

Perusahaan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017 dengan menawarkan 1.215.506.500 saham baru saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebesar 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp380 setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp461.892.470.000.

Perusahaan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017 dengan menawarkan 1.215.506.500 saham baru saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebesar 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp380 setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp461.892.470.000.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

Sampai dengan tahun 2024, Perusahaan belum mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek lainnya

As of 2024, the Company has not listed any other securities on the Stock Exchange. Therefore, there is no information available regarding the chronology of listings, type of corporate actions, changes in the number of securities, stock exchange names, or credit ratings of other securities.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Institutions and/or Supporting Professions

Daftar Lembaga dan/atau Profesi Penunjang IPCM Tahun 2024 — List of Institutions and/or Supporting Professions of IPCM in 2024

Kantor Akuntan Publik (KAP)

Public Accounting Firm (KAP)

Nama KAP KAP Name	Purwantono, Sungkoro & Surja
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Akuntan Publik Public Accountant	Moch. Dadang Syachruna
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) sampai dengan tanggal 30 April 2025. From the signing of the Minutes of Work Commencement (BAMK) until April 30, 2025.
Jasa Audit yang Diberikan Audit Services Provided	Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Audit of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.
Biaya Jasa Audit Audit Service Fees	Rp877.000.000,00 belum termasuk PPN Rp877,000,000.00 excluding VAT
Jasa Non-Audit yang Diberikan Non-Audit Services	• Melaksanakan jasa prosedur yang disepakati (Agreed Upon Procedures) atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja ("LHEK") dan pencapaian *Key Performance Indicator* ("KPI") pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. • Sebagai bagian dari audit umum melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2024. • Carry out Agreed Upon Procedures services on Performance Evaluation Results Report ("LHEK") and Key Performance Indicator ("KPI") achievements as of December 31, 2024 and for the year ending on that date. • As part of the general audit carry out procedures related to compliance with laws and regulations and internal control for the financial year 2024.
Biaya Jasa Non-Audit Non-Audit Fee	Rp190.000.000,00 belum termasuk PPN Rp190,000,000.00 excluding VAT

Notaris
Notary

Nama Lembaga Institution Name	Kantor Notaris & PPAT Ashoya Ratam S.H., M.Kn.
Alamat Address	Jl. Suryo No. 54, RT4/RW4, Rawa Barat, Kebayoran Baru Telp / Phone : 021 29236060; 021 29236070
Periode Penugasan Assignment Period	• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2024 • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa di tahun 2024 • Annual General Meeting of Shareholders (GMS) in 2024 • Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) in 2024
Jasa yang Diberikan Services Provided	Kenotariatan terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Notary services related to the implementation of the Company's General Meeting of Shareholders (GMS).

Biro Administrasi Efek
Security Administration Bureau

Nama Lembaga Institution Name	PT Electronic Data Interchange Indonesia
Alamat Address	Gedung Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT09/RW11 Jakarta Utara 14350 Telp / Phone : +62-21-650-5829, +62-21-2960-6330 Faks / Fax : +62-21-650-5987 Website : www.edi-indonesia.co.id
Periode Penugasan Assignment Period	2024
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pengelolaan Administrasi Saham Perusahaan Administration Management of the Company's Shares

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2024

Awards Received in 2024

NASIONAL
NATIONAL







Transparansi & Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024

Best Corporate Emissions Transparency & Reduction 2024

Tanggal | Date
16 Mei 2024
May 16, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Platinum pada Kategori Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi
Platinum in the Corporate Emissions Calculation Transparency Category

Diberikan Oleh | Awarded by
Investortrust

Transparansi & Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024

Best Corporate Emissions Transparency & Reduction 2024

Tanggal | Date
29 Mei 2024
May 29, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
The Best Investortrust Companies 2024 kategori The Best Sectors Investortrust Companies 2024 Sektor Infrastruktur
The Best Investortrust Companies 2024 in the Infrastructure Sector Category

Diberikan Oleh | Awarded by
Investortrust

BUMN & CSR Award 2024

SOEs & CSR Award 2024

Tanggal | Date
30 Juli 2024
July 30, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Gold Pilar Sosial Program TJSL
Gold Pillar of Social Program TJSL

Diberikan Oleh | Awarded by
BUMN Track



Bisnis Indonesia Awards (BISRA) 2024

Tanggal | Date
6 Juni 2024 | June 6, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Gold Champion TJSL Penanaman Mangrove & Pengembangan UMK #TenunNyaman
Gold Champion TJSL Mangrove Planting & SME Development #TenunNyaman

Diberikan Oleh | Awarded by
Bisnis Indonesia



Annual Report Award 2023

Tanggal | Date
7 Oktober 2024 | October 7, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Juara II Perusahaan Go Publik Non Keuangan
Ranked II Non-Finance Public Company

Diberikan Oleh | Awarded by
KNKG



SNI Awards 2024

Tanggal | Date
21 November 2024 | November 21, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Peringkat Perunggu
Bronze Rank

Diberikan Oleh | Awarded by
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
National Standardization Agency (BSN



Bisnis Indonesia Logistics Awards 2024

Tanggal | Date
28 November 2024 | November 28, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Innovation Excellence In Pilotage and Towage Company

Diberikan Oleh | Awarded by
Bisnis Indonesia

INTERNASIONAL
INTERNATIONAL



2023 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Gold Award

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP



2023 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Top 20 Indonesian Reports

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP



2023 Vision Awards Sustainability Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Gold Award

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP



2023 Vision Awards Sustainability Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Top 20 Indonesian Reports

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP



2023 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
7 Consecutive Years

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP



2023 Vision Awards Annual Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Technical Achievement Award

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP



2023 Vision Awards Sustainability Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
7 Consecutive Years

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP



2023 Vision Awards Sustainability Report Competition

Tanggal | Date
20 September 2024
September 20, 2024

Jenis Penghargaan | Award Type
Technical Achievement Award

Diberikan Oleh | Awarded by
LACP

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2024

Valid Certification in 2024

Tanggal Perolehan Received Date	Uraian Description	Pemberi Sertifikasi Issuer	Masa Berlaku Validity Period
Nasional National			
14 April 2022 April 14, 2022	ISO 9001:2015	LRQA	13 April 2025 April 13, 2025
30 Desember 2023 December 30, 2023	ISO 37001:2016	LRQA	29 Desember 2026 December 29, 2026
15 Mei 2022 May 15, 2022	ISO 45001:2018	LRQA	14 Mei 2025 May 14, 2025
17 September 2020 September 17, 2020	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesejahteraan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety, Welfare, and Health Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Manpower Ministry of the Republic of Indonesia	16 September 2023 September 16, 2023
31 Mei 2022 May 31, 2022	ISO 45001:2015	LRQA	2 Mei 2025 May 2, 2025
Internasional International			
17 Mei 2021 May 17, 2021	ISM Code	Direktur Jendral Perhubungan Laut xx	15 Oktober 2025 October 15, 2025


PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA
MSA

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

04



Dalam pengelolaan dan pengoperasian layanan usahanya, IPCM mengendalikan bisnis dalam satu segmen yang menyediakan Jasa Pelayanan Kapal, Jaas Pengangkutan dan Lainnya, serta Jasa Pengelolaan Kapal.

In managing and operating its business, IPCM controls its in a segment that provides Vessel Service, Freight and Other Services, and Fleet Management Services.



Tinjauan Perekonomian

Economic Review

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Pada tahun 2024, perekonomian global menghadapi tantangan yang signifikan akibat ketidakpastian pasar keuangan, tekanan geopolitik, serta kebijakan moneter yang masih ketat di berbagai negara. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,2% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% pada 2023. Bank Indonesia dalam Tinjauan Kebijakan Moneter 2024 juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan serta risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Faktor-faktor utama yang menjadi perhatian para pemangku kebijakan mencakup pergerakan nilai tukar, kebijakan suku bunga global, serta tekanan inflasi.

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi global pada 2024 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Negara-negara utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan tren pelemahan, meskipun risiko resesi tetap rendah. Di kawasan Eropa, pemulihan ekonomi masih berlangsung dengan dukungan sektor jasa, sementara industri manufaktur mengalami kontraksi. Fragmentasi perdagangan dan investasi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan global, sebagaimana dicatat dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Bank Indonesia.

Kebijakan moneter global tetap didominasi oleh suku bunga yang relatif tinggi. Federal Reserve AS mulai menurunkan suku bunganya pada September 2024, yang kemudian diikuti oleh beberapa bank sentral lainnya. Namun, Jepang menjadi pengecualian dengan menaikkan suku bunganya, menandai perubahan dari kebijakan suku bunga negatif yang telah diterapkan sejak 2016. Bank Indonesia mencatat bahwa kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh berbagai bank sentral dunia telah berdampak pada arus modal dan nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

In 2024, the global economy faced significant challenges due to financial market uncertainty, geopolitical pressures, and persistently tight monetary policies in various countries. The International Monetary Fund (IMF), in its October 2024 World Economic Outlook (WEO), estimated that global economic growth would reach 3.2% year-on-year (yoy), slightly lower than the 3.3% growth recorded in 2023. Bank Indonesia, in its 2024 Monetary Policy Review, also highlighted the increasing uncertainty in financial markets and the risk of a global economic slowdown. Key concerns for policymakers included exchange rate fluctuations, global interest rate policies, and inflationary pressures.

Overall, the pace of global economic growth in 2024 slowed compared to the previous year. Major economies such as the United States and China showed signs of weakening, although the risk of a recession remained low. In the European region, the economic recovery continued, supported by the service sector, while the manufacturing industry contracted. Trade and investment fragmentation driven by geopolitical tensions was one of the factors hindering global growth, as noted in Bank Indonesia's Financial Economic Development and International Cooperation Report.

Global monetary policy remained dominated by relatively high interest rates. The US Federal Reserve began lowering interest rates in September 2024, followed by several other central banks. However, Japan was an exception, raising its interest rates and marking a departure from the negative interest rate policy in place since 2016. Bank Indonesia noted that the tight monetary policies implemented by various central banks had affected capital flows and currency exchange rates in developing countries, including Indonesia.

Aliran Modal ke Negara Berkembang

Capital Flows to Emerging Countries

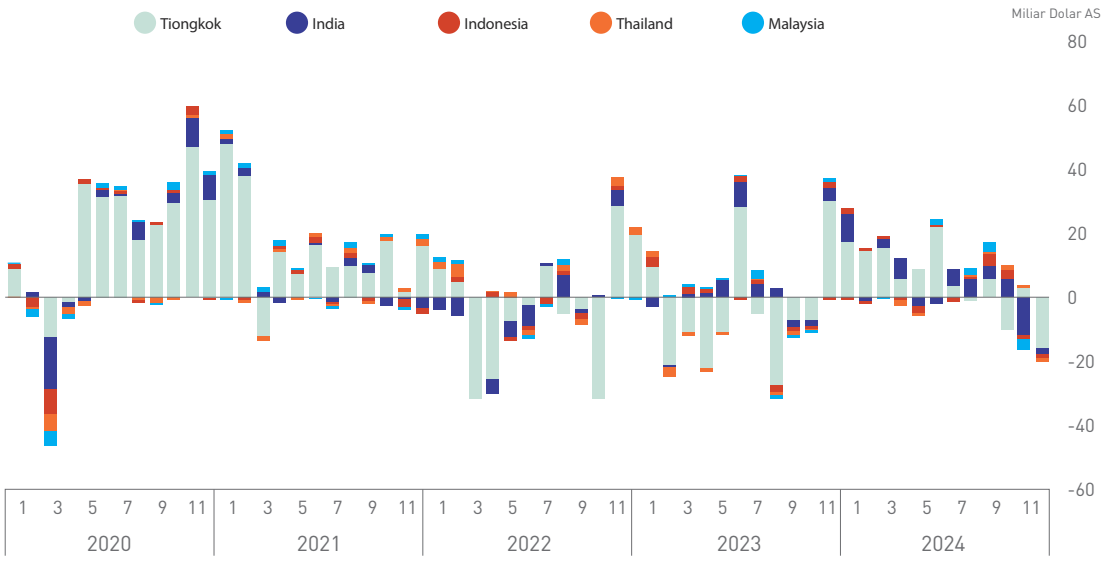

Sumber: IIF, diolah
Source: IIF, processed

Tekanan geopolitik masih tinggi akibat konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah. Selain itu, kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS November 2024 meningkatkan ketidakpastian global, khususnya terkait kebijakan proteksionisme perdagangan yang lebih agresif, termasuk rencana kenaikan tarif impor dari Tiongkok. Laporan Bank Indonesia menyoroti bahwa dinamika politik di Amerika Serikat turut memperburuk sentimen pasar global, berdampak pada fluktuasi harga komoditas dan arus investasi internasional.

Sementara itu, perekonomian nasional menghadapi tantangan yang cukup besar di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia melaporkan bahwa pada triwulan IV 2024, ekonomi global diperkirakan tumbuh sekitar 2,8%, dengan negara-negara maju mengalami perlambatan hingga 1,7%, sementara negara berkembang, termasuk Indonesia, mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik di kisaran 4,0%.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan kontribusi sebesar 4,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan IV 2023, mencerminkan stabilitas daya beli masyarakat di tengah dinamika global.

Geopolitical pressures remain high due to the ongoing Russia-Ukraine conflict and tensions in the Middle East. Additionally, Donald Trump's victory in the U.S. presidential election in November 2024 has heightened global uncertainty, particularly concerning the potential implementation of more aggressive trade protectionist policies, including plans to raise import tariffs on Chinese goods. Bank Indonesia's report highlights that political dynamics in the United States have also worsened global market sentiment, affecting commodity price fluctuations and international investment flows.

Meanwhile, the national economy continues to face significant challenges amid global uncertainty. Bank Indonesia reported that in the fourth quarter of 2024, the global economy is projected to grow by around 2.8%, with developed countries slowing to 1.7%, while developing countries, including Indonesia, recorded stronger growth, estimated at around 4.0%.

According to the Central Statistics Agency (BPS) in the 2024 Indonesian Economic Report, national economic growth is projected to be in the range of 4.7% to 5.5%. Household consumption remains the primary driver of growth, contributing 4.91% to Gross Domestic Product (GDP) in the fourth quarter of 2023, reflecting the resilience of consumer purchasing power amid ongoing global uncertainties.

Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%), 2020-2023

Household Consumption Growth (%), 2020-2023

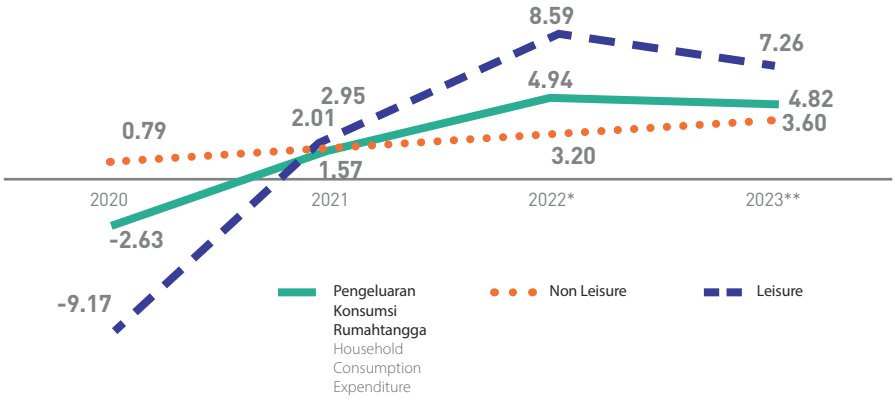

Sumber: Badan Pusat Statistik
Source: Badan Pusat Statistik

Dari sisi investasi, proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional menjadi faktor utama penggerak ekonomi. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta proyek besar lainnya. Data BPS menunjukkan bahwa investasi di sektor bangunan mencatat pertumbuhan sebesar 5,31% pada kuartal IV 2023. Meskipun demikian, investasi sektor non-bangunan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2024, menginformasikan bahwa akan menerapkan kebijakan moneter yang adaptif guna menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi domestik pada 2024 diperkirakan tetap terkendali di kisaran 2,5±1%, didukung oleh kebijakan suku bunga yang fleksibel serta koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) tercatat di level 5,75% pada triwulan IV 2024, yang dinilai efektif dalam menekan tekanan inflasi. Nilai tukar rupiah tetap stabil, meskipun mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian global, dengan posisi di level 15.450 per USD pada Desember 2023.

Di sektor ketenagakerjaan, terjadi perbaikan dengan penurunan tingkat pengangguran dari 6,49% pada 2022 menjadi 5,86% pada Agustus 2023. Namun, tantangan terkait produktivitas tenaga kerja masih menjadi perhatian utama. Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, mencapai 20,9% dari total tenaga kerja nasional pada 2023.

Dalam perdagangan internasional, meskipun Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 50 bulan berturut-turut, tren surplus tersebut diperkirakan melambat pada 2024. Pada Desember 2023, surplus neraca perdagangan mencapai USD5,33 miliar, namun ekspor pada triwulan pertama 2024 mengalami penurunan sebesar 3,91%. Penurunan terbesar terjadi pada ekspor batu bara, yang merosot 16,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

In terms of investment, infrastructure and national strategic projects remain the primary drivers of economic growth. The government continues to develop the National Capital City (IKN) along with other major projects. According to BPS data, investment in the building sector recorded a growth of 5.31% in the fourth quarter of 2023. However, investment in the non-building sector showed a slowdown compared to the previous year.

Bank Indonesia, in the 2024 Indonesian Economic Report, stated that it will implement an adaptive monetary policy to maintain macroeconomic stability. Domestic inflation in 2024 is expected to remain under control within the range of 2.5±1%, supported by a flexible interest rate policy and close coordination between the government and Bank Indonesia. The BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) was recorded at 5.75% in the fourth quarter of 2024, which is considered effective in curbing inflationary pressures. The rupiah exchange rate remained stable despite global uncertainties, standing at Rp 15,450 per USD in December 2023.

In the employment sector, improvements were observed, with the unemployment rate falling from 6.49% in 2022 to 5.86% in August 2023. However, challenges related to labor productivity remain a significant concern. The manufacturing industry contributed the largest share to labor absorption, accounting for 20.9% of the total national workforce in 2023.

In international trade, although Indonesia has maintained a trade surplus for 50 consecutive months, the surplus trend is expected to slow in 2024. In December 2023, the trade surplus reached USD5.33 billion, but exports declined by 3.91% in the first quarter of 2024. The largest drop was recorded in coal exports, which fell by 16.8% compared to the previous year.

Neraca Perdagangan
Balance of Trade

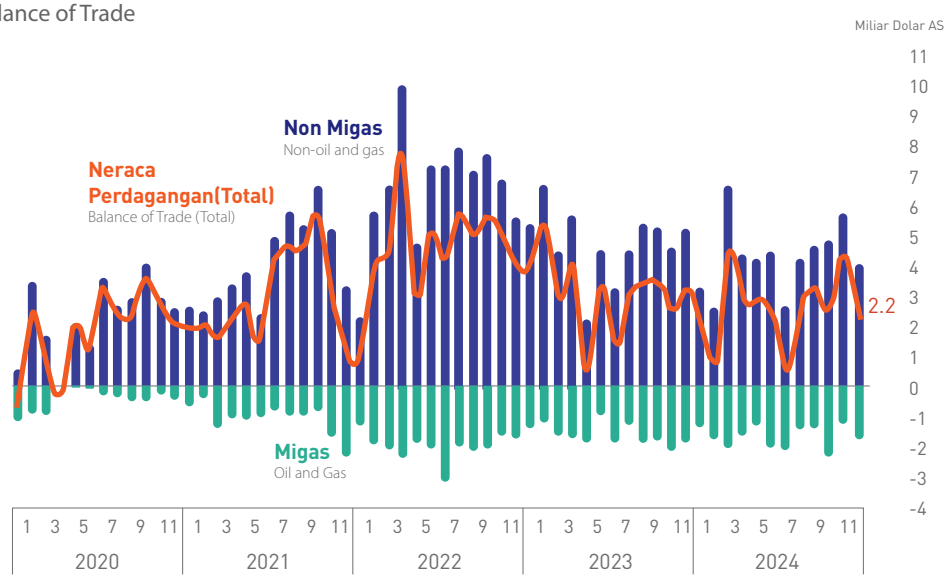

Sumber: Badan Pusat Statistik
Source: Badan Pusat Statistik

ANALISIS INDUSTRI DAN POSISI PERUSAHAAN DALAM INDUSTRI

Industri maritim global saat ini berada dalam fase transformasi dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan *Review of Maritime Transport 2024* yang disusun oleh UNCTAD menggarisbawahi pentingnya peran jalur laut strategis atau *maritime chokepoints* dalam menjaga kelancaran rantai pasok global. Namun, kerentanan jalur tersebut terhadap gangguan geopolitik, perubahan iklim, dan ketegangan keamanan internasional, seperti yang terjadi di Laut Merah, Terusan Suez, dan Terusan Panama, telah menyebabkan pergeseran jalur pelayaran, peningkatan biaya operasional, dan implikasi serius terhadap efisiensi transportasi laut.

Dalam konteks tersebut, posisi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI) sebagai penyedia layanan kapal, khususnya pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia, memiliki relevansi strategis yang semakin meningkat. Perubahan-perubahan global tersebut turut berdampak pada alur logistik nasional, mendorong perlunya efisiensi dan ketahanan layanan pelabuhan dalam negeri. Di tengah meningkatnya kebutuhan untuk memperpendek rantai distribusi dan mengoptimalkan operasi pelabuhan, keberadaan JAI sebagai operator utama jasa *marine service* di wilayah Pelindo Regional 2 berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan keandalan layanan kepelabuhanan nasional.

INDUSTRY ANALYSIS AND COMPANY POSITION WITHIN THE INDUSTRY

Industry Analysis and Company Position within the Industry
The global maritime industry is currently undergoing an unprecedented phase of transformation and pressure. The Review of Maritime Transport 2024 report by UNCTAD highlights the critical importance of strategic maritime chokepoints in maintaining the seamless flow of global supply chains. However, the vulnerability of these routes to geopolitical disruptions, climate change, and international security tensions, such as those in the Red Sea, Suez Canal, and Panama Canal, has led to shifts in shipping routes, increased operational costs, and serious implications for the efficiency of sea transport.

In this context, the position of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI) as a provider of marine services, specifically pilotage and towage services at Indonesia's major ports, has become increasingly strategic. These global developments have also impacted national logistics flows, highlighting the need for greater efficiency and resilience in domestic port services. Amid growing demands to shorten distribution chains and optimize port operations, JAI's role as a key marine service operator within Pelindo Regional 2 directly contributes to the stability and reliability of Indonesia's port services.

Kondisi maritim global yang digambarkan dalam laporan UNCTAD menunjukkan bahwa *rerouting* kapal akibat gangguan di jalur strategis menyebabkan jarak tempuh rata-rata kargo meningkat, yang pada gilirannya menuntut efisiensi lebih tinggi pada pelabuhan tujuan dan transit. Hal ini membuka ruang bagi pelabuhan-pelabuhan di Asia, termasuk Indonesia, untuk memperkuat peran dalam jaringan logistik global, sepanjang mampu menyediakan layanan kapal yang andal dan efisien. JAI, dalam hal ini, memegang peran penting sebagai penyedia layanan penundaan dan pemanduan yang mendukung kelancaran arus kapal dan barang.

UNCTAD juga menyoroti pentingnya transisi industri maritim ke arah yang lebih berkelanjutan melalui dekarbonisasi dan penggunaan teknologi bersih. Dalam upaya merespons tuntutan ini, JAI telah mulai mengembangkan layanan *green marine* dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan pada armada kapal tunda dan motor pandunya. Inisiatif ini tidak hanya sejalan dengan agenda global, tetapi juga memperkuat daya saing Perusahaan di tengah meningkatnya preferensi pasar terhadap jasa kepelabuhanan yang berorientasi keberlanjutan.

Selain aspek lingkungan, digitalisasi menjadi isu sentral dalam pembentukan ekosistem maritim yang tangguh. Dalam hal ini, JAI juga tengah melaksanakan transformasi digital melalui penerapan sistem ERP SAP dan aplikasi *Maroon* di armada operasional. Langkah ini mendukung efisiensi operasional, pelaporan data *real-time*, serta penguatan integrasi layanan antar pelabuhan. Hal ini selaras dengan rekomendasi UNCTAD mengenai perlunya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan dan konektivitas hinterland.

Tren peningkatan volume perdagangan laut global yang diproyeksikan akan terus tumbuh pada periode 2025–2029, seperti dipaparkan dalam laporan UNCTAD, turut menjadi peluang bagi JAI dalam memperluas cakupan layanannya. Peningkatan permintaan terhadap kargo curah, energi, dan kontainer akan berdampak langsung pada kebutuhan terhadap layanan kapal di pelabuhan-pelabuhan strategis Indonesia, yang menjadi simpul penting dalam arus perdagangan Asia-Pasifik.

Namun demikian, laporan tersebut juga menekankan bahwa pertumbuhan perdagangan laut semakin dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti perubahan iklim, fragmentasi geopolitik, dan proteksionisme dagang. Maka dari itu, posisi JAI sebagai bagian dari ekosistem pelabuhan nasional harus diarahkan untuk mendukung ketahanan sistem logistik Indonesia melalui peningkatan kapabilitas operasional, sinergi dengan pemangku kepentingan logistik, serta optimalisasi pelayanan di pelabuhan non-primer yang selama ini kurang terjamah.

UNCTAD's report highlights how rerouting ships due to disruptions in strategic routes has led to longer average cargo travel distances, which in turn demands higher efficiency from destination and transit ports. This presents an opportunity for Asian ports, including Indonesia, to strengthen their role in the global logistics network, provided they can deliver reliable and efficient marine services. In this regard, JAI plays a vital role as a provider of towage and pilotage services that support the smooth flow of vessels and cargo.

UNCTAD also emphasizes the importance of transitioning the maritime industry towards greater sustainability through decarbonization and the adoption of clean technologies. In response, JAI has begun developing green marine services by implementing environmentally friendly technologies on its towage and pilot boat fleet. This initiative not only aligns with global sustainability agendas but also enhances the Company's competitiveness amid growing market preferences for sustainable port services.

In addition to environmental concerns, digitalization has become a central issue in building a resilient maritime ecosystem. JAI is undergoing digital transformation through the implementation of the SAP ERP system and the Maroon application in its operational fleet. These steps enhance operational efficiency, enable real-time data reporting, and strengthen service integration across ports. This is in line with UNCTAD's recommendations on the need to leverage technology to boost port efficiency and hinterland connectivity.

The projected growth in global maritime trade volumes between 2025 and 2029, as presented in the UNCTAD report, also presents an opportunity for JAI to expand its service coverage. The increasing demand for bulk cargo, energy, and containers will directly impact the need for marine services at Indonesia's strategic ports, which serve as crucial nodes in the Asia-Pacific trade flow.

However, the report also stresses that the growth of maritime trade is increasingly shaped by non-economic factors such as climate change, geopolitical fragmentation, and trade protectionism. Therefore, JAI's position within the national port ecosystem must be directed toward supporting the resilience of Indonesia's logistics system through enhanced operational capabilities, synergy with logistics stakeholders, and the optimization of services at underutilized non-primary ports.

Dengan latar belakang tersebut, strategi ekspansi JAI ke pelabuhan Tersus dan TUKS di luar wilayah Pelindo menjadi relevan untuk memperkuat jejaring jasa maritim nasional. Ketika jalur pelayaran global menghadapi ketidakpastian, kemampuan untuk menyediakan layanan kapal yang cepat, aman, dan terintegrasi di wilayah domestik akan menjadi keunggulan kompetitif. Dalam jangka panjang, JAI berpeluang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung efisiensi rantai pasok nasional serta mewujudkan transformasi pelabuhan Indonesia ke arah yang lebih modern, tangguh, dan berdaya saing internasional.

Against this backdrop, JAI's expansion strategy into Tersus and TUKS ports outside the Pelindo network becomes highly relevant to strengthen the national maritime service network. As global shipping routes face growing uncertainty, the ability to deliver fast, safe, and integrated marine services domestically will be a key competitive advantage. In the long term, JAI is well-positioned to play a greater role in enhancing the efficiency of national supply chains and contributing to the transformation of Indonesia's ports into more modern, resilient, and globally competitive hubs.



Tinjauan Operasional

Operational Review

STRATEGI PERUSAHAAN

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2023-2027, tema *Roadmap* Tahun 2024 adalah *Elevating The Integrated Core Capabilities*. Perusahaan memiliki target pertumbuhan antara 2,5 hingga 3,0 kali lipat dari posisi pada tahun 2019. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aset dan kapitalisasi pasar Perusahaan masing-masing hingga mencapai setidaknya Rp3,00 triliun pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Perusahaan akan menerapkan strategi berikut:

1. Meningkatkan daya saing:
   a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM.
   b. Meningkatkan kualitas produk dan jasa.
   c. Meningkatkan tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
   d. Meningkatkan citra dan reputasi Perusahaan.
   e. Melakukan kolaborasi dengan Mitra Bisnis.

2. Ekspansi Bisnis secara Organik dan Inorganik:
   a. Memperluas pasar yang sudah ada.
   b. Menambah jumlah pelanggan maupun produk dan jasa yang diberikan.
   c. Menjajaki usaha baru yang berkaitan atau yang mendukung pertumbuhan Perusahaan melalui kerja sama/akuisisi dan/atau merger.
   d. Optimalisasi Kinerja Operasional dan Keuangan:
   e. Memperkuat sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi.
   f. Optimalisasi penggunaan produk dan jasa instansi keuangan guna membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi.
   g. Otomasi/digitalisasi untuk mempercepat proses kerja dan pengembangan produk & jasa.
   h. Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis.
   i. Fokus Pelanggan
   j. Melakukan survei kepuasan pelanggan.
   k. Menindaklanjuti perbaikan survei kepuasan pelanggan.
   l. Pemberian *customer awards* di wilayah BUP JAI.

COMPANY STRATEGY

Based on the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2023-2027, the theme of the 2024 Roadmap is Elevating the Integrated Core Capabilities. The Company has set a growth target of 2.5 to 3.0 times its 2019 position. This is expected to increase the Company's assets and market capitalization to at least Rp3.00 trillion in 2024. To achieve this target, the Company will implement the following strategies:

1. Increase Competitiveness:
   a. Enhance the capability and quality of HR.
   b. Improve the quality of products and services.
   c. Strengthen good corporate governance and risk management.
   d. Enhance the Company's image and reputation.
   e. Foster collaboration with business partners.

2. Organic and Inorganic Business Expansion:
   a. Expand existing markets.
   b. Increase the number of customers and the range of products and services offered.
   c. Explore new business opportunities related to or supporting the Company's growth through partnerships, acquisitions, and/or mergers.
   d. Optimization of Operational and Financial Performance:
   e. Strengthen funding sources to support working capital and expansion needs.
   f. Optimize the use of financial institution products and services to improve productivity and efficiency.
   g. Implement automation and digitalization to accelerate work processes and product/service development.
   h. Ensure the active role of the Board of Directors in formulating strategic initiatives and policies.
   i. Customer Focus:
   j. Conduct regular customer satisfaction surveys.
   k. Follow up with improvements based on survey results.
   l. Provide customer appreciation awards within the BUP JAI area.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Dalam rangka menyesuaikan keadaan industri yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan, diperlukan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Berikut langkah strategis yang telah dilakukan Perusahaan, antara lain seperti:

1. Meningkatkan dan memperluas pasar untuk jasa pelayanan/penyewaan kapal dengan mekanisme kerjasama dengan Mitra/Tersus melalui kerjasama operasi.
2. Pengelolaan kerjasama dengan mitra Pelabuhan/Tersus/TUKS untuk menggunakan jasa pelayanan atau jasa penyewaan kapal tunda JAI.
3. Membuka layanan bisnis pemanduan dan penundaan di Tersus LnG.
4. Melakukan investasi pada kapal tunda dengan tujuan untuk mengurangi beban sewa kapal yang menjadi kontributor utama dalam biaya operasional pelayanan kapal.
5. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pengelolaan kemitraan, baik komersial maupun operasional.
6. Modernisasi kapal tunda, sarana prasarana dan teknologi pendukung bisnis marine lainnya.
7. Optimalisasi aset kapal tunda.
8. Menerapkan aktivitas ramah lingkungan dalam upaya pengurangan emisi karbon.
9. Penerapan *digitalized* marine *system*.
10. Meningkatkan kapabilitas SDM dalam ruang lingkup operasional pelayanan kapal.
11. Mengimplementasi KPI terintegrasi untuk mengukur kinerja.
12. Implementasi dan penguatan budaya JAI.

Pangsa Pasar

Dalam rangka peningkatan pendapatan perusahaan, sejalan dengan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2024, perusahaan terus berupaya mempertahankan pangsa pasar yang ada serta melakukan ekspansi ke pasar-pasar baru untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

Pangsa pasar utama perusahaan mencakup pelayanan penundaan kapal di Wilayah Pelimpahan Regional II PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pemanduan dan Penundaan di Wilayah Pelimpahan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan Penundaan di Wilayah Join Operation, di berbagai sektor industri yang berada di lokasi sebagai berikut:

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

In order to adjust to industrial conditions that align with the Company's vision and mission, a targeted marketing strategy is essential. The following strategic steps have been taken by the Company:

1. Increasing and expanding the market for ship service/rental services through cooperation with partners/Tersus via operational collaborations.
2. Managing partnerships with Port/Tersus/TUKS to promote the use of JAI tugboat services or rental services.
3. Launching a pilotage and towing service at Tersus LNG.
4. Investing in tugboats to reduce the burden of ship rental costs, which are a significant contributor to operational expenses.
5. Enhancing the capability and capacity of partnership management, both commercially and operationally.
6. Modernizing tugboats, infrastructure, and other supporting technologies for marine operations.
7. Optimizing tugboats assets.
8. Implementing environmentally friendly initiatives to reduce carbon emissions.
9. Adopting a digitalized marine system.
10. Improving human resource capabilities in ship service operations.
11. Implementing integrated Key Performance Indicators (KPIs) to measure performance.
12. Strengthening and promoting the JAI culture.

Market Coverage

In order to increase the Company's revenue and in line with the 2024 Management Work Plan, the Company continues to strive to maintain its existing market share while expanding into new markets to support business growth.

The Company's primary market share includes ship towing services in the Regional II Delegation Area of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), pilotage and towing services in the Delegation Area of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, and towing services in the Delegation Area of Business Partners, across various industrial sectors located in the following areas:

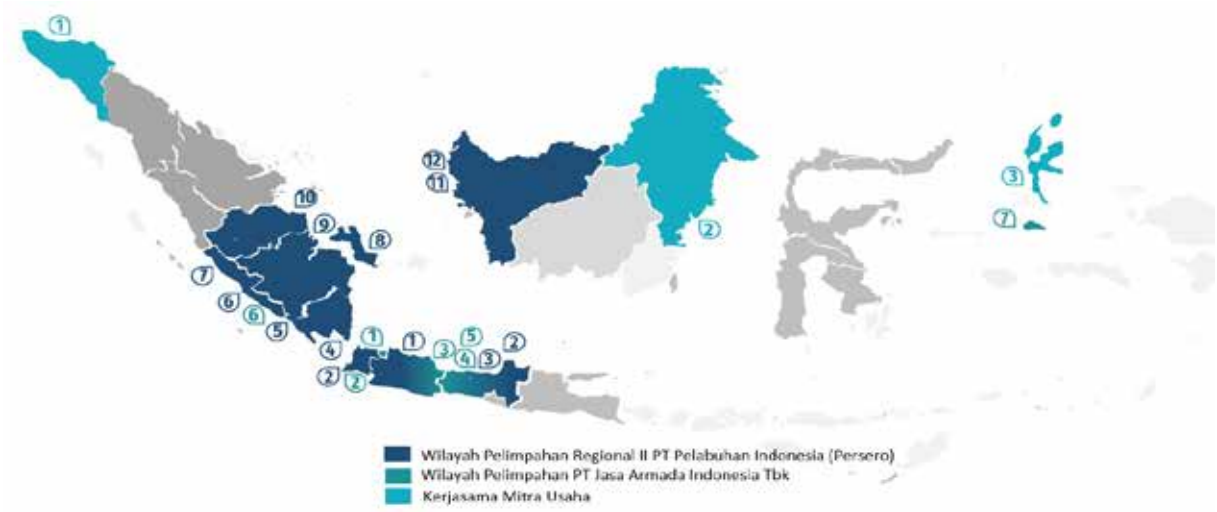

No	Nama Pelabuhan Port Name	Lokasi Location
I	**Wilayah Pelimpahan Regional II PT Pelabuhan Indonesia (Persero)** **Regional II Delegation Area PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**	
1	Pelabuhan Tanjung Priok	Tanjung Priok, DKI Jakarta
2	Pelabuhan Banten	Ciwandan, Banten
3	Pelabuhan Cirebon	Cirebon, Jawa Barat
4	Pelabuhan Panjang	Panjang, Lampung
5	Pelabuhan Boom Baru	Boom Baru, Sumatera Selatan
6	Pelabuhan Pulau Baai	Bengkulu, Bengkulu
7	Pelabuhan Teluk Bayur	Padang, Sumatera Barat
8	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkal Pinang, Pangkal Balam
9	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung, Kep. Bangka Belitung
10	Pelabuhan Jambi	Muaro Jambi, Jambi
11	Pelabuhan Dwikora	Pontianak, Kalimantan Barat
12	Kawasan Terminal Kijing	Mempawah, Kalimantan Barat
II	**Wilayah Pelimpahan PT Jasa Armada Indonesia Tbk** **Delegation Area PT Jasa Armada Indonesia Tbk**	
1	Terminal Khusus PT Nusantara Regas	Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
2	Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang	Bayah, Banten
3	Pelabuhan Patimban	Subang, Jawa Barat
4	TUKS Kanci 1 dan Terminal Khusus Kanci 2	Cirebon, Jawa Barat
5	Terminal Khusus PT Jawa Satu Power	Cilamaya, Jawa Barat
6	STS Ambang Luar Musi	Tanjung Buyut, Sumatera Selatan
7	Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada	Obi Halmahera, Maluku Utara
III	**Wilayah Join Operation** **Delegation Area Business Partners**	
1	Terminal Khusus PT MIFA Bersaudara	Meulaboh, Aceh
2	Terminal Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park	Halmahera, Maluku Utara
3	Pelabuhan Tarakan	Tarakan, Kalimantan Utara

Bantu dikembangkan, difokuskan dalam terminal sumber daya alam seperti oil and gas atau hasil tambang di Indonesia timur (Mengacu ke RJPP)

Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha

Performance Review by Business Segment

Segmen usaha adalah bagian dari entitas perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis serta menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang berasal dari transaksi dengan komponen lain dalam perusahaan yang sama. Seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas—beserta pendapatan, beban, serta hasil aset merupakan item yang dapat secara langsung diatribusikan kepada segmen tersebut atau dialokasikan berdasarkan metode yang sesuai.

Dalam pengelolaan dan pengoperasian layanan usahanya, Perusahaan mengendalikan bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa pelayanan kapal, jasa pengangkutan, dan jasa pengelolaan kapal. Uraian masing-masing segmen usaha Perusahaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jasa Pelayanan Kapal
   Jasa Pelayanan Kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, Perusahaan memberikan produk dan jasa utama dalam pelayanan jasa kapal yang meliputi jasa penundaan dan jasa pemanduan. Pada segmen jasa penundaan mencakup kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Pada segmen jasa pemanduan, melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

   Berdasarkan jenisnya, pelayanan kegiatan pemanduan memiliki 3 jenis layanan kegiatan pemanduan, yaitu: (a) pandu laut; (b) pandu bandar; dan (c) pandu bandar utama. "Pandu laut" bertugas memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan sampai batas perairan wajib pandu atau sebaliknya; sedangkan "pandu bandar" memandu kapal-kapal di kolam pelabuhan. Terakhir, "pandu bandar utama" melayani pelabuhan utama dengan ukuran kapal yang lebih besar.

2. Jasa Pengangkutan dan Lainnya
   Jasa Pengangkutan dan Lainnya merupakan kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil

A business segment is a part of a company that engages in specific business activities and generates revenue and expenses, including those resulting from transactions with other components within the same company. All assets, liabilities, and equity—along with revenues, expenses, and asset outcomes are items that can be directly attributed to the segment or allocated using an appropriate method.

In managing and operating its services, the Company conducts its business within a single segment that provides ship services, transportation services, and ship management services. The details of each of the Company's business segments are as follows:

1. Vessel Service
   Vessel Service is an operational support for vessels from port entry to departure. As a partner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, the Company provides core products and services in this area, including towing and pilotage services. Towing services include pushing, pulling, towing, escorting, and assisting ships moving through shipping lanes, anchorage areas, or pools for mooring or leaving the dock. Pilotage services support ships entering and exiting the dock via port channels to ensure safe, orderly, and efficient navigation for both vessels and the environment.

   Based on the type, pilotage services are categorized into 3 types: (a) sea pilot; (b) port pilot (c) main port pilot. Sea pilot, responsible for guiding vessels between the port pool and mandatory pilotage waters or vice versa; port pilot, guiding vessels within the port pool. Lastly, main port pilot, serving larger vessels at major ports.

2. Freight and Other Services
   Freight and Other Services are the Company's services in transporting materials, goods, and production outputs between port areas. This business segment, primarily

produksi antar wilayah pelabuhan. Segmen bisnis ini, utamanya dalam melayani pengangkutan material dan hasil produksi dari BUMN. Kegiatan pelayanan jasa pengangkutan sejalan dengan pangsa pasar bisnis angkutan laut saat ini dimana *cargo owner* terbesarnya merupakan Perseroan-perseroan BUMN seperti: PT Perseroan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perseroan Gas Negara (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

serves the transport needs of SOEs. Transportation services are in line with the current market share of the sea transportation business where the largest cargo owners are from SOEs such as: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), and PT Pupuk Indonesia (Persero).

3. Jasa Pengelolaan Kapal
Jasa Pengelolaan Kapal merupakan kegiatan usaha Perusahaan dengan menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional 2 dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk memobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

3. Fleet Management Services
Fleet Management Services involve a partnership with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 to manage and maintain pilot boats used to transport pilot officers for ship pilotage activities across the waters managed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Perawatan yang dilakukan terdiri dari 2 macam yaitu: (1) perawatan berkala, dilakukan setiap tahun; (2) perawatan incidental, dilakukan sesuai kebutuhan terutama apabila terjadi kerusakan di tengah operasi. Pemeriksaan menyeluruh (termasuk baling-baling dan shaft yang dimiliki oleh kapal) dilakukan pada periode maintenance yang mengharuskan kapal masuk gelanggang yaitu setiap 2,5 tahun.

Maintenance services include 2 kinds: (1) periodic maintenance, conducted annually; (2) Incidental maintenance, carried out as needed, particularly in the event of damage during operations. A comprehensive inspection (including the ship's propeller and shaft) is performed every 2.5 years, requiring the vessel to enter a dry dock.

Pada tahun 2024, terdapat penyesuaian pola bisnis di lingkup Pelindo Grup yang semula terdapat jasa pengelolaan kapal kemudian dipadukan dalam jasa pelayanan kapal.

In 2024, there was an adjustment in the business model within the Pelindo Group, where vessel management services were integrated into vessel service operations.

PRODUKTIVITAS SEGMEN

SEGMENT PRODUCTIVITY

Penundaan dan Pemanduan Kapal

Towaging and Pilotage Services

PT Jasa Armada Indonesia Tbk saat ini beroperasi di 11 (sebelas) Pelabuhan Umum dan beberapa Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah Regional 2 Pelindo, yaitu di Tanjung Priok, Banten, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Bengkulu, Pangkal Balam, Cirebon, Pontianak, Jambi dan Tanjung Pandan.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk currently operates in 11 (eleven) Public Ports and several Terminals for Own Use (TUKS) within Pelindo Regional 2, namely: Tanjung Priok, Banten, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Bengkulu, Pangkal Balam, Cirebon, Pontianak, Jambi, and Tanjung Pandan.

Selain itu, PT Jasa Armada Indonesia Tbk juga melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan di 8 (delapan) lokasi pelimpahan sendiri, yaitu di Terminal Khusus (Tersus) PT Nusantara Regas, PT Cemindo Gemilang, Pelabuhan Patimban, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, PT Jawa Satu Power, STS Ambang Luar Sungai Musi, PT Trimegah Bangun Persada, serta 4 (empat) lokasi kerjasama operasi yaitu di perairan Meulaboh, Weda, Laiwui dan Tarakan.

In addition, PT Jasa Armada Indonesia Tbk also provides pilotage and Towaging services in 8 (eight) self-managed handover locations, namely PT Nusantara Regas Private Port, PT Cemindo Gemilang, Patimban Port, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, PT Jawa Satu Power, STS Ambang Luar Sungai Musi, and PT Trimegah Bangun Persada, as well as in 4 (four) joint operation locations: the waters of Meulaboh, Weda, Laiwui, and Tarakan.

Berikut adalah gambaran realisasi produksi jasa kapal pada tahun 2024, yaitu:

Below is an overview of the vessel service production realization in 2024, specifically:

Penundaan

Towaging

Pelayanan Services		Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
1		2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Penundaan Towage	Umum General	Jam | Hour	98.300	113.630	89.881	91,44%	79,10%
		GT Jam | GT Hour	981.838.545	1.081.146.438	891.317.426	90,78%	82,44%
	TUKS	Jam | Hour	46.442	52.560	66.288	142,73%	126,12%
		GT Jam | GT Hour	375.144.738	419.525.444	429.199.954	114,41%	102,31%
	Tersus	Jam | Hour	27.827	27.228	41.651	149,68%	152,97%
		GT Jam | GT Hour	217.104.472	288.527.482	411.762.902	189,66%	142,71%
	Total	Jam | Hour	172.569	193.418	197.819	114,63%	102,28%
		GT Jam | GT Hour	1.574.087.754	1.789.199.365	1.732.280.282	110,05%	96,82%

Pemanduan

Pilotage

Pelayanan Services		Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
1		2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Pemanduan Pilotage	Umum General	Gerak | Movement	7.134	32.120	29.154	408.65%	90,77%
		GT	57.002.575	247.911.735	214.892.976	376.99%	86,68%
	TUKS	Gerak | Movement	3.127	12.078	11.692	373.86%	96,81%
		GT	24.148.599	77.431.811	72.411.796	299.86%	93,52%
	Tersus	Gerak | Movement	16.635	14.225	20.407	122,68%	143,46%
		GT	122.681.997	120.920.885	153.070.107	124,77%	126,59%
	Total	Gerak | Movement	26.897	58.423	61.253	227,74%	104,85%
		GT	203.833.171	446.264.431	440.374.879	216,05%	98,68%

Berdasarkan penyajian data di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian produksi penundaan kapal dilihat dari aspek Jam (Pelabuhan Umum, TUKS, dan Tersus) pada tahun 2024 tercatat sebesar 102,28% sedangkan dari aspek GT Jam (Pelabuhan Umum, TUKS, dan Tersus) sebesar 96,82% dari Target tahun 2024. Nilai tersebut meningkat sebesar 14,63% pada aspek Jam dan meningkat 10,05% pada aspek GT Jam dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Based on the data presented above, it can be seen that the realization of towage service production in 2024, measured in terms of Hours (at Public Ports, TUKS, and Special Terminals/Tersus), reached 102.28% and in terms of GT-Hours, the achievement was 96.82% of the target 2024. These figures represent an increase of 14.63% in Hours and 10.05% in GT-Hours compared to the realization in 2023.

Selanjutnya, realisasi pencapaian produksi pemanduan kapal dilihat dari aspek Umum, TUKS, dan Tersus dalam Gerak mencapai 104,85% sedangkan dari aspek GT mencapai 98,68% dari Target tahun 2024. Dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023, terdapat peningkatan yaitu 127,74% dari aspek Gerak dan peningkatan juga sebesar 116,05% dari realisasi aspek GT.

Furthermore, the realization of pilotage service production in 2024, measured in terms of Movements at Public Ports, TUKS, and Tersus, reached 104.85% of the target 2024. In terms of GT, it achieved 98.68% . Compared to the achievements in 2023, this reflects an increase of 127.74% in Movements and 116.05% in GT.

Total kinerja data produksi pelayanan penundaan dan pemanduan kapal diperhitungkan dengan melihat kinerja baik di Pelabuhan Umum dan TUKS di wilayah operasi Pelindo maupun di Tersus di luar wilayah operasi Pelindo, dengan penjabaran detail sebagai berikut:

The overall performance of towage and pilotage service production is calculated by considering performance at both Public Ports and TUKS within Pelindo's operational areas, as well as at Special Terminals (Tersus) outside Pelindo's operational regions, with detailed elaboration as follows:

Penundaan

Towaging

1. Penundaan Pelabuhan Umum

1. Towage of Public Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Umum General	TPK	Jam | Hour	63.582	71.530	59.511	93.60%	83.20%
		GT Jam | GT Hour	779.362.553	834.931.347	726.511.631	93.22%	87.01%
	BTN	Jam | Hour	7.516	8.869	3.779	50.28%	42.61%
		GT Jam | GT Hour	44.241.974	52.205.529	34.384.380	77.72%	65.86%
	PJG	Jam | Hour	5.875	6.933	3.991	67.92%	57.56%
		GT Jam | GT Hour	68.012.070	80.254.243	39.630.118	58.27%	49.38%
	PLG	Jam | Hour	4.589	5.415	3.652	79.57%	67.43%
		GT Jam | GT Hour	17.354.911	20.478.795	11.882.041	68.47%	58.02%
	TBS	Jam | Hour	3.489	4.117	2.653	76.02%	64.43%
		GT Jam | GT Hour	25.350.702	29.913.828	20.174.173	79.58%	67.44%
	BKL	Jam | Hour	2.731	3.648	3.976	145.61%	108.99%
		GT Jam | GT Hour	9.170.961	11.280.282	11.067.433	120.68%	98.11%
	PBM	Jam | Hour	2.966	6.658	2.511	84.64%	37.71%
		GT Jam | GT Hour	6.086.363	7.486.226	4.821.711	79.22%	64.41%
	CRB	Jam | Hour	2.139	3.102	2.432	113.67%	78.38%
		GT Jam | GT Hour	7.161.435	13.726.169	6.778.824	94.66%	49.39%
	PTK	Jam | Hour	5.413	3.359	7.379	136.31%	219.70%
		GT Jam | GT Hour	25.097.576	30.870.018	36.067.116	143.71%	116.84%
Jumlah Umum Total General		Jam | Hour	98.300	113.630	89.881	91.44%	79.10%
		GT Jam | GT Hour	981.838.545	1.081.146.438	891.317.426	90.78%	82.44%

2. Penundaan Pelabuhan TUKS

2. Towaging of Private Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
TUKS	TPK	Jam | Hour	-	-	2.013	-	-
		GT Jam | GT Hour	-	-	22.259.710	-	-
	BTN	Jam | Hour	23.716	26.799	20.803	87.72%	77.62%
		GT Jam | GT Hour	279.147.644	315.436.838	225.143.061	80.65%	71.38%
	PJG	Jam | Hour	2.431	2.541	3.902	160.51%	153.56%
		GT Jam | GT Hour	13.593.704	14.208.982	35.264.412	259.42%	248.18%

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	PLG	Jam | Hour	8.065	9.920	24.906	308.82%	251.07%
		GT Jam | GT Hour	29.715.098	36.549.571	85.737.458	288.53%	234.58%
	TBS	Jam | Hour	2.735	2.868	3.694	135.06%	128.81%
		GT Jam | GT Hour	24.484.544	25.673.578	31.114.934	127.08%	121.19%
	BKL	Jam | Hour	-	-	368	-	-
		GT Jam | GT Hour	-	-	915.130	-	-
	PBM	Jam | Hour	478	480	1.210	253.03%	252.22%
		GT Jam | GT Hour	850.466	853.195	1.956.564	230.06%	229.32%
	CRB	Jam | Hour	363	-	-	57.85%	-
		GT Jam | GT Hour	4.046.082	-	-	87.12%	-
	PTK	Jam | Hour	8.654	9.952	9.183	106.11%	92.27%
		GT Jam | GT Hour	23.307.201	26.803.281	23.283.864	99.90%	86.87%
Jumlah TUKS Total Tuks		Jam | Hour	46.442	52.560	66.288	142.73%	126.12%
		GT Jam | GT Hour	375.144.738	419.525.444	429.199.954	114.41%	102.31%

3. Penundaan Pelabuhan Tersus

3. Towaging of Tersus Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Tersus Penundaan Towage Terminal	NUSANTARA REGAS	Jam | Hour	163	130	168	102.60%	128.62%
		GT Jam | GT Hour	14.876.357	14.464.262	17.011.864	114.36%	117.61%
	CEMINDO GEMILANG	Jam | Hour	1.036	779	1.025	98.94%	131.60%
		GT Jam | GT Hour	10.800.974	9.804.264	10.158.499	94.05%	103.61%
	STS AMBANG LUAR MUSI	Jam | Hour	21.486	18.600	25.589	119.09%	137.57%
		GT Jam | GT Hour	141.665.199	131.180.525	170.646.741	120.46%	130.09%
	PLTU KANCI	Jam | Hour	1.721	1.539	2.350	136.55%	152.72%
		GT Jam | GT Hour	10.706.562	10.139.050	14.526.500	135.68%	143.27%
	JSP	Jam | Hour	-	282	209	-	74.19%
		GT Jam | GT Hour	-	22.116.918	16.409.374	-	74.19%
	PATIMBAN	Jam | Hour	3.421	912	1.482	43.32%	162.47%
		GT Jam | GT Hour	39.055.380	16.514.154	17.866.520	45.75%	108.19%
	MEULABOH	Jam | Hour	-	1.671	5.639	-	337.50%
		GT Jam | GT Hour	-	18.983.136	64.068.099	-	337.50%
	WEDA	Jam | Hour	-	3.069	4.533	-	147.69%
		GT Jam | GT Hour	-	61.458.192	90.764.722	-	147.69%
	LAIWUI	Jam | Hour	-	246	657	-	266.63%
		GT Jam | GT Hour	-	3.866.981	10.310.584	-	266.63%
Jumlah Tunda Tersus Total Towage Terminal		Jam | Hour	27.827	27.228	41.651	149.68%	152.97%
		GT Jam | GT Hour	217.104.472	288.527.482	411.762.902	189.66%	142.71%

Pemanduan

Pilotage

1. Pemanduan Pelabuhan Umum

1. Pilotage of Public Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Umum General	TPK	Gerak | Movement	3.386	14.495	12.925	381.72%	89.17%
		GT	38.589.693	165.191.557	148.301.516	384.30%	89.78%
	BTN	Gerak | Movement	434	1.289	1.226	282.24%	95.06%
		GT	2.439.665	7.243.124	5.640.540	231.20%	77.87%
	PJG	Gerak | Movement	512	2.128	1.383	270.21%	65.00%
		GT	6.961.816	28.940.964	18.811.627	270.21%	65.00%
	PLG	Gerak | Movement	44	278	269	611.34%	96.81%
		GT	176.311	1.113.431	714.091	405.02%	64.13%
	TBS	Gerak | Movement	315	1.644	1.592	504.80%	96.81%
		GT	2.006.145	10.461.249	9.763.286	486.67%	93.33%
	BKL	Gerak | Movement	218	1.758	1.702	780.73%	96.81%
		GT	859.124	6.928.823	6.343.706	738.39%	91.56%
	PBM	Gerak | Movement	303	1.593	1.542	509.46%	96.81%
		GT	572.699	3.013.983	2.553.929	445.95%	84.74%
	CRB	Gerak | Movement	577	1.124	1.088	188.57%	96.81%
		GT	1.541.221	3.002.141	2.542.465	164.96%	84.69%
	PTK	Gerak | Movement	704	3.516	3.270	464.49%	93.00%
		GT	2.236.512	11.170.319	10.449.704	467.23%	93.55%
	JBI	Gerak | Movement	537	3.598	3.483	648.25%	96.81%
		GT	1.439.484	9.639.402	8.967.693	622.98%	93.03%
	TGP	Gerak | Movement	104	697	675	649.34%	96.81%
		GT	179.904	1.206.741	804.420	447.14%	66.66%
Jumlah Umum Total General		Gerak | Movement	7.134	32.120	29.154	408.65%	90.77%
		GT	57.002.575	247.911.735	214.892.976	376.99%	86.68%

2. Pemanduan Pelabuhan TUKS

2. Pilotage of TUKS Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
TUKS	TPK	Gerak | Movement	-	-	-	-	-
		GT	-	-	-	-	-
	BTN	Gerak | Movement	1.348	4.002	3.874	287.41%	96.81%
		GT	15.462.943	45.907.945	44.077.608	285.05%	96.01%
	PJG	Gerak | Movement	512	2.128	2.060	402.43%	96.81%
		GT	1.133.652	4.712.703	4.198.381	370.34%	89.09%
	PLG	Gerak | Movement	429	2.710	2.624	611.34%	96.81%
		GT	1.484.357	9.373.939	8.710.710	586.83%	92.92%

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	TBS	Gerak | Movement	77	404	391	504.80%	96.81%
		GT	709.764	3.701.137	3.219.131	453.55%	86.98%
	BKL	Gerak | Movement	-	-	-	-	-
		GT	-	-	-	-	-
	PBM	Gerak | Movement	86	453	439	509.46%	96.81%
		GT	187.518	986.862	591.565	315.47%	59.94%
	CRB	Gerak | Movement	154	301	291	188.57%	96.81%
		GT	3.996.475	7.784.726	7.172.267	179.46%	92.13%
	PTK	Gerak | Movement	416	2.080	2.014	483.50%	96.81%
		GT	993.988	4.964.499	4.442.134	446.90%	89.48%
	JBI	Gerak | Movement	-	-	-	-	-
		GT	-	-	-	-	-
	TGP	Gerak | Movement	104	-	-	-	-
		GT	179.904	-	-	-	-
Jumlah TUKS Total TUKS		Gerak | Movement	3.127	12.078	11.692	373.86%	96.81%
		GT	24.148.599	77.431.811	72.411.796	299.86%	93.52%

3. Pemanduan Pelabuhan Tersus

3. Pilotage of Tersus Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2024 As of December 2024			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization		
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Tersus Pemanduan Tersus Pilotage	NUSANTARA REGAS	Gerak | Movement	62	53	74	119.35%	139.87%
		GT	6.165.702	3.593.922	3.751.790	60.85%	104.39%
	CEMINDO GEMILANG	Gerak | Movement	941	677	955	101.49%	141.09%
		GT	8.805.424	8.096.666	8.726.437	99.10%	107.78%
	STS AMBANG LUAR MUSI	Gerak | Movement	14.322	12.160	17.059	119.11%	140.28%
		GT	94.443.463	88.379.963	113.764.494	120.46%	128.72%
	PLTU KANCI	Gerak | Movement	688	604	940	136.63%	155.70%
		GT	4.278.556	4.456.925	5.810.600	135.81%	130.37%
	JSP	Gerak | Movement	-	65	48	-	74.19%
		GT	-	4.544.833	3.371.983	-	74.19%
	PATIMBAN	Gerak | Movement	622	445	741	119.13%	166.51%
		GT	8.988.852	8.581.315	8.933.260	99.38%	104.10%
	LAIWUI	Gerak | Movement	-	221	590	-	266.63%
		GT	-	3.267.261	8.711.543	-	266.63%
Jumlah Pandu Tersus Total Tersus Pilotage		Gerak | Movement	16.635	14.225	20.407	122.68%	143.46%
		GT	122.681.997	120.920.885	153.070.107	124.77%	126.59%

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Berdasarkan tinjauan operasional, berikut disajikan data keuangan untuk masing-masing segmen usaha pada tahun 2023 dan tahun 2024, yaitu:

REVENUES AND PROFITABILITY

Based on the operational review, the following presents the financial data for each business segment in 2023 and 2024:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2024
Revenues and Profitability of Business Segment in 2024 Fiscal Year

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2024 Year 2024			
	Jasa Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Frieght and Other Services	Jasa Pengelolaan Kapal Fleet Management Services	Total
Pendapatan Operasi Segmen Segment Operating Revenues	1.301.250	43.780	-	1.345.030
Beban Pokok Pendapatan Segment Cost of Revenues	(897.075)	(29.817)	-	(926.893)
Laba Bruto Gross Profit	404.174	13.963	-	418.137
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	-	-	-	(203.273)
Pendapatan Operasi Lainnya *Other Operating Income*	-	-	-	1.341
Beban Operasi Lainnya *Other Operating Expenses*	-	-	-	(8.802)
Laba Usaha *Income from Operation*	-	-	-	207.403
Pendapatan Keuangan *Finance Income*	-	-	-	17.933
Beban Keuangan *Finance Expenses*	-	-	-	(11.148)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan *Income Before Corporate Income Tax*	-	-	-	214.188
Beban Pajak Penghasilan *Income Tax Expenses*	-	-	-	47.345
Laba Tahun Berjalan *Income for the Year*	-	-	-	166.843
Penghasilan Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income*				-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive for the Year	-	-	-	166.843

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2023

Revenue and Profitability of Business Segment for the 2023 Fiscal Year

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2023 Year 2023			
	Jasa Kapal* Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya* Frieght and Other Services	Jasa Pengelolaan Kapal Fleet Management Services	Total*
Pendapatan Operasi Segmen Segment Operating Revenues	1.060.762	46.276	31.500	1.138.537
Beban Pokok Pendapatan Segment Cost of Revenues	(723.047)	(32.466)	(22.099)	(777.612)
Laba Bruto Gross Profit	337.714	13.810	9.401	360.925
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	-	-	-	(186.618)
Pendapatan Operasi Lainnya *Other Operating Income*	-	-	-	10.181
Beban Operasi Lainnya *Other Operating Expenses*	-	-	-	(729)
Laba Usaha *Income from Operation*	-	-	-	183.759
Pendapatan Keuangan *Finance Income*	-	-	-	14.959
Beban Keuangan *Finance Expenses*	-	-	-	(2.773)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan *Income Before Corporate Income Tax*	-	-	-	195.944
Beban Pajak Penghasilan *Income Tax Expenses*	-	-	-	(38.282)
Laba Tahun Berjalan *Income for the Year*	-	-	-	157.662
Penghasilan Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income*		-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive for the Year	-	-	-	157.662

*) Disajikan kembali
*) Restated

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan operasi segmen tahun 2024 tercatat mencapai Rp1.345,03 miliar atau meningkat 18,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.138,54 miliar. Segmen jasa pelayanan kapal masih menempati urutan nomor satu penyumbang pendapatan operasi terbesar bagi Perusahaan. Pada tahun 2024, segmen jasa pelayanan kapal mencatatkan pendapatan sebesar Rp1.301,25 miliar mengalami peningkatan 22,67% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.060,76 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume

Based on the table above, the Company's segment operating revenue in 2024 reached Rp1,345.03 billion, an increase of 18.14% compared to the previous year's Rp1,138.54 billion. The vessel services remained the top contributor to the Company's operating revenue. In 2024, the vessel service recorded revenue of Rp1,301.25 billion, a 22.67% increase from Rp1,060.76 billion in the previous year. This increase was driven by higher service volumes and better rates in the vessel service segment, which enabled the Company to generate greater revenue. Meanwhile, the

layanan dan tarif yang lebih baik pada segmen jasa kapal yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar. Kemudian segmen jasa pengangkutan dan lainnya mencatatkan pendapatan sebesar Rp43,78 miliar di tahun 2024, mengalami penurunan 5,39% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp46,28 miliar. Hal tersebut dikarenakan penurunan permintaan layanan transportasi angkutan pada beberapa periode tahun 2024. Sementara segmen jasa pengelolaan kapal mencatatkan pendapatan sebesar nihil, mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31,50 miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh berkurangnya kontrak pengelolaan kapal yang dapat menghasilkan pendapatan segmen tersebut.

freight and other services recorded revenue of Rp43.78 billion in 2024, a decrease of 5.39% from Rp46.28 billion in the previous year. This was due to a decrease in demand for transportation services during several periods in 2024. The fleet management services recorded zero revenue in 2024, a change from Rp31.50 billion in the previous year, mainly due to a reduction in vessel management contracts that previously contributed to revenue in this segment.

Dari sisi profitabilitas segmen, di tahun 2024, Perusahaan tercatat berhasil membukukan total laba bruto sebesar Rp418,14 miliar atau meningkat 15,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp360,93 miliar. Segmen jasa pelayanan kapal membukukan laba kotor sebesar Rp404,17 miliar mengalami peningkatan 19,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp337,71 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan margin laba seiring dengan pertumbuhan pendapatan segmen jasa kapal dan efisiensi biaya dalam operasional.

In terms of profitability, in 2024, the Company successfully recorded a total gross profit of Rp418.14 billion, an increase of 15.85% from Rp360.93 billion in the previous year. The vessel services posted a gross profit of Rp404.17 billion, up 19.68% from Rp337.71 billion in the previous year. This increase was due to improved profit margins in line with the revenue growth of the vessel services segment and operational cost efficiency.

Kemudian segmen jasa pengangkutan dan lainnya membukukan laba kotor sebesar Rp13,96 miliar di tahun 2024, mengalami peningkatan 1,10% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,81 miliar. Hal tersebut lebih dikarenakan peningkatan efisiensi dan pengelolaan biaya yang lebih baik pada segmen pengangkutan, meskipun pendapatan sedikit menurun. Sementara segmen jasa pengelolaan kapal membukukan laba kotor sebesar nihil, mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,40 miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh berkurangnya aktivitas dalam pengelolaan kapal pada tahun 2024.

The freight and other services recorded a gross profit of Rp13.96 billion in 2024, an increase of 1.10% compared to Rp13.81 billion in the previous year. This was due to improved cost efficiency and better cost management in the transportation segment, despite a slight decline in revenue. Meanwhile, the fleet management services posted zero gross profit, a change from Rp9.40 billion in the previous year. This was mainly due to a decrease in vessel management activities in 2024.

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Total Pendapatan dan Laba Kotor Tahun 2024

Contribution of Business Segments to Total Revenue and Gross Profit in 2024

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Total Pendapatan (%)
Contribution of Business Segments to Total Revenue (%)

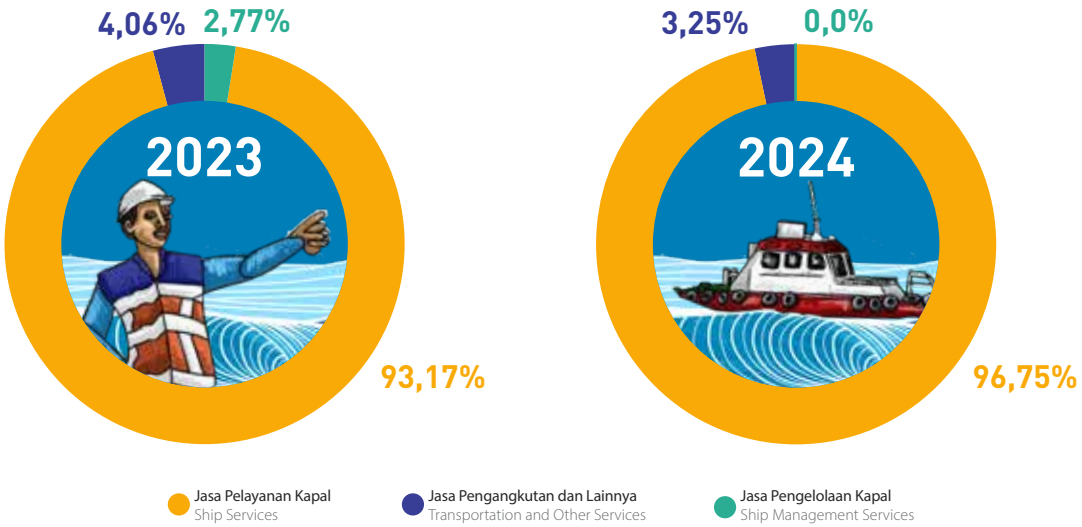

Tabel berikut menyajikan data Aset dan Liabilitas per Segmen untuk tahun 2024 dan 2023, yaitu:

The following table presents the data on Assets and Liabilities by Segment for the years 2024 and 2023:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Desription	Tahun 2024 Year 2024			
	Jasa Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Frieght and Other Services	Jasa Pengelolaan Kapal Fleet Management Services	Total
Aset Segmen Segment Asset	835.689	-	-	835.689
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Asset				814.292
Total Aset Total Assets	835.689	-	-	1.649.981
Liabilitas Liabilities	312.544	-	-	312.544
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Liabilities				48.327
Total Liabilitas Total Liabilities	312.544	-	-	360.871

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Desription	Tahun 2024 Year 2024			
	Jasa Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Frieght and Other Services	Jasa Pengelolaan Kapal Fleet Management Services	Total
	Tahun 2023 Year 2023			
Aset Segmen Segment Asset	654.295	-	-	654.295
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Asset				867.839
Total Aset Total Assets	654.295	-	-	1.522.134
Liabilitas Liabilities	236.914	-	-	236.914
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Liabilities				44.701
Total Liabilitas Total Liabilities	236.914	-	-	281.615

Berdasarkan tabel di atas, sokongan terbesar jumlah aset yang dapat didistribusikan per segmen pada tanggal 31 Desember 2024 berasal dari segmen jasa pelayanan kapal, yaitu sebesar Rp835,69 miliar atau 100,00% dari total aset segmen yang dapat didistribusikan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 27,77% dibanding posisi 31 Desember 2023 yang sebesar Rp654,30 miliar. Sementara dari sisi kewajiban, kontribusi yang dapat dialokasikan per segmen pada tanggal 31 Desember 2024 terbesar berasal dari segmen jasa pelayanan kapal, yaitu sebesar Rp312,54 miliar atau 100,00% dari total kewajiban segmen yang dapat dialokasikan. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 31,85% dibanding posisi 31 Desember 2023 yang sebesar Rp236,91 miliar.

Based on the table above, the largest contribution to the total distributable assets by segment as of December 31, 2024, came from the vessel service segment, amounting to Rp835.69 billion or 100.00% of the total distributable segment assets. This amount represents an increase of 27.77% compared to the position as of December 31, 2023, which was Rp654.30 billion. On the liabilities side, the highest allocable segment contribution as of December 31, 2024, also came from the vessel service segment, amounting to Rp312.54 billion or 100.00% of the total allocable segment liabilities. This figure also increased by 31.85% compared to the position as of December 31, 2023, which was Rp236.91 billion.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

Uraian data dan penjelasan keuangan dalam bagian tinjauan keuangan ini merujuk pada Laporan Keuangan Perusahaan, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dalam laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan mendapatkan opini "Wajar Dalam Semua Hal yang Material".

Kinerja keuangan Perusahaan atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

The data and financial analysis presented in this financial review section refer to the Company's Financial Statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, as presented in this Annual Report. The Financial Statements were audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja under report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 dated March 24, 2025, and received an Opinion "Fair in All Material Respects".

The Company's financial performance based on the Statement of Financial Position, Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and Statement of Cash Flows is presented in the following table:

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

Laporan Posisi Keuangan 2023-2024

Statement of Financial Position 2023-2024

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Total Aset Total Assets	1.649.981	1.522.135	127.846	8,40
Total Liabilitas Total Liabilities	360.871	281.615	79.256	28,14
Ekuitas Equity	1.289.110	1.240.520	48.590	3,92

Berdasarkan tabel di atas, laporan posisi keuangan Perusahaan di tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya, dari sisi jumlah aset tercatat meningkat 8,40%, sementara jumlah liabilitas mengalami peningkatan 28,14% dan jumlah ekuitas tercatat naik 3,92%.

Berikut uraian terkait laporan posisi keuangan JAI di tahun 2024 dibanding tahun 2023, beserta penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak atas perubahan tersebut.

Based on the table above, the Company's statement of financial position in 2024, compared to the previous year, shows an increase of 8.40% in total assets, while total liabilities rose by 28.14%, and total equity increased by 3.92%.

The following is a description of JAI's statement of financial position in 2024 compared to 2023, along with an explanation of the causes of these changes and their impacts.

Aset

Nilai Aset tercatat Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.649,98 miliar, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp127,85 miliar atau 8,40% jika dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu Rp1.522,14 miliar. Peningkatan aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, serta kenaikan nilai piutang dan aset tetap.

Asset

The Company's recorded total assets as of December 31, 2024, amounted to Rp1,649.98 billion, representing an increase of Rp127.85 billion or 8.40% compared to the position as of December 31, 2023, which was Rp1,522.14 billion. This asset growth was primarily driven by an increase in cash and cash equivalents, as well as higher receivables and fixed assets.

Tabel Aset 2023-2024
Asset 2023-2024

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar **Current Assets**				
• Kas dan Setara Kas • Cash and Cash Equivalent	473.084	408.816	64.268	15,72
Piutang Usaha - Neto **Accounts Receivable - Neto**				
• Pihak Ketiga • Third Parties	44.892	37.676	7.216	19,15
• Pihak Berelasi • Related Parties	147.565	4.443	143.122	3.221,29
Aset Kontrak – Neto **Contract Assets – Net**				
• Pihak Ketiga • Third Parties	76.150	44.941	31.209	69,44
• Pihak Berelasi • Related Parties	129.201	313.410	(184.209)	(58,78)
Piutang lain-lain **Other Receivables**				
• Pihak Berelasi • Third Parties	-	5.640	(5.640)	(100,00)
Persediaan Inventories	21.596	25.073	(3.477)	(13,87)
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	40.856	48.573	(7.717)	(15,89)
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	5.494	940	4.554	484,47
Total Aset Lancar Total Current Assets	938.838	889.512	49.326	5,55
Aset Tidak Lancar **Non-Current Assets**				
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	18.987	12.987	6.000	46,20
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	79.937	38.508	41.429	107,59
Taksiran tagihan restitusi Estimated claims for tax refund	49.658	-	49.658	100,00

Tabel Aset 2023-2024
Asset 2023-2024

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Aset tetap - neto Fixed assets - net	562.431	581.006	(18.575)	(3,20)
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	130	122	8	6,50
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	711.143	632.623	78.520	12,41
Total Aset Total Assets	1.649.981	1.522.135	127.846	8,40

*) Disajikan kembali
*) Restatement

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. Nilai kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp473,08 miliar dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp408,82 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tahun ini mengalami peningkatan sebesar 15,72%. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari aktivitas operasional dan peningkatan pendapatan yang diterima tunai selama tahun berjalan.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, bank accounts, and time deposits that are neither pledged nor restricted in use. As of December 31, 2024, the value of cash and cash equivalents was recorded at Rp473.08 billion, compared to Rp408.82 billion as of December 31, 2023. Compared to the previous year, this represents an increase of 15.72%. The increase was driven by higher cash receipts from operating activities and an increase in revenue received in cash during the year.

Piutang Usaha

Piutang Usaha neto pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp192,46 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp150,34 miliar atau 356,94% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp42,12 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari pihak berelasi yang meningkat signifikan sebesar Rp143,12 miliar atau 3.221,29%, serta peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp7,22 miliar atau 19,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan piutang usaha sejalan dengan peningkatan penagihan kepada pelanggan.

Trade Receivables

Net trade receivables as of December 31, 2024, were recorded at Rp192.46 billion, an increase of Rp150.34 billion or 356.94% compared to the position as of December 31, 2023, which stood at Rp42.12 billion. This increase was due to a significant rise in trade receivables from related parties, which increased by Rp143.12 billion or 3,221.29%, as well as an increase in trade receivables from third parties amounting to Rp7.22 billion or 19.15% compared to the previous year. The rise in trade receivables aligns with increased billing to customers.

Aset Kontrak

Aset kontrak neto merupakan jenis piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan).

Contract Assets

Net contract assets represent receivables from customers for services that have been completed by the Company but have not yet been invoiced (unbilled receivables).

Pada laporan keuangan per 31 Desember 2024, nilai dari aset kontrak neto tercatat sebesar Rp205,35 miliar, sementara pada posisi per 31 Desember 2023 mencatat sejumlah Rp358,35 miliar untuk nilai aset kontrak neto. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp153,00 miliar atau setara dengan 42,70%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya percepatan proses penagihan ke pelanggan sehingga lebih banyak pendapatan yang sudah difakturkan dibandingkan tahun sebelumnya.

As of the financial statements dated December 31, 2024, the value of net contract assets was recorded at Rp205.35 billion, while as of December 31, 2023, the value of net contract assets stood at Rp358.35 billion. Compared to the previous year, this represents a decrease of Rp153.00 billion or 42.70%. This decline was due to an acceleration in the billing process to customers, resulting in more revenue being invoiced compared to the previous year.

Piutang Lain-lain

Tercatat per 31 Desember 2024, nilai piutang lain-lain neto sejumlah nihil, nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp5,64 miliar atau 100,00% dibandingkan posisi keuangan per 31 Desember 2023 yaitu sejumlah Rp5,64 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan piutang lain-lain dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Other Receivables

It is recorded that as of December 31, 2024, the net value of other receivables was recorded as nil, representing a decrease of Rp5.64 billion or 100.00% compared to the financial position as of December 31, 2023, which was Rp5.64 billion. This decrease was due to the settlement of other receivables from PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Persediaan

Aspek persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari bahan bakar, suku cadang, perlengkapan kapal, alat tulis dan barang cetakan, obat, bahan dan alat medis serta persediaan lain-lain.

Per tanggal 31 Desember 2024, nilai aspek persediaan yang tercatat sebesar Rp21,60 miliar, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp25,07 miliar (pada posisi per tanggal 31 Desember 2023). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah persediaan suku cadang kapal akibat peningkatan penggunaan operasional Perusahaan.

Inventories

The Company's inventory consists of fuel, spare parts, ship supplies, stationery and printed materials, medicines, medical supplies and equipment, and other inventory items.

As of December 31, 2024, the recorded value of inventories was Rp21.60 billion, down from the previous year's value of Rp25.07 billion (as of December 31, 2023). The decrease was caused by a reduction in the quantity of ship spare parts due to increased operational usage by the Company.

Pajak Dibayar di Muka

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, pajak dibayar di muka tercatat sebesar Rp40,86 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatat sebesar Rp48,57 miliar per 31 Desember 2023. Apabila dibandingkan dengan perolehan di tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 15,89% atau setara dengan Rp7,72 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian pembayaran pajak di muka yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Prepaid Taxes

Based on the financial statements as of December 31, 2024, prepaid taxes amounted to Rp40.86 billion, compared to Rp48.57 billion as of December 31, 2023. This reflects a decrease of 15.89% or Rp7.72 billion year-on-year. The decline was due to lower prepaid tax payments compared to the previous year.

Aset Lancar Lainnya

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, nilai aset lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp4,55 miliar atau 484,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan berhasil membukukan nilai aset lancar lainnya sebesar Rp5,50 miliar sedangkan tahun sebelumnya hanya

Other Current Assets

According to the financial statements as of December 31, 2024, the value of other current assets increased by Rp4.55 billion or 484.47% compared to the previous year. The Company recorded other current assets amounting to Rp5.50 billion, up from Rp0.94 billion in the previous year.

mencatatkan senilai Rp0,94 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya saldo uang muka dan biaya dibayar di muka yang berkaitan dengan operasional Perusahaan.

This increase was driven by higher balances of advances and prepaid expenses related to the Company's operations.

Aset Pajak Tangguhan

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, nilai aset pajak tangguhan mengalami peningkatan dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Dalam laporan keuangan tahun 2024, Perusahaan mencatatkan nilai aset pajak tangguhan sebesar Rp18,99 miliar yang berarti terdapat peningkatan sebesar 46,20% dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2023, yang tercatat sebesar Rp12,99 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya koreksi negatif atas beda temporer sehingga mempengaruhi nilai aset pajak tangguhan yang dicatat oleh perusahaan.

Deferred Tax Assets

As of December 31, 2024, the value of deferred tax assets increased compared to the previous year. In the 2024 financial statements, the Company recorded deferred tax assets of Rp18.99 billion, reflecting an increase of 46.20% compared to the position as of December 31, 2023, which was Rp12.99 billion. The increase was due to a higher amount of negative adjustments from temporary differences, which affected the deferred tax assets recognized by the Company.

Aset Hak Guna - Neto

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, nilai aset hak guna-neto Perusahaan tercatat sebesar Rp79,94 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp38,51 miliar (per 31 Desember 2023). Terdapat peningkatan sebesar 107,59% atau setara dengan Rp41,43 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan perjanjian sewa baru atau perpanjangan kontrak sewa yang mengakibatkan kenaikan nilai aset hak guna. Selain itu, perubahan dalam estimasi masa manfaat atau nilai sewa yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya juga berkontribusi terhadap peningkatan aset hak guna Perusahaan.

Right-of-Use Assets – Net

Based on the financial statements as of December 31, 2024, the Company's net right-of-use assets were recorded at Rp79.94 billion. This represents an increase compared to the previous year's figure of Rp38.51 billion (as of December 31, 2023). The increase of Rp41.43 billion or 107.59% was due to new lease agreements or lease contract extensions that resulted in a higher value of right-of-use assets. In addition, changes in estimated useful lives or higher lease values compared to the previous year also contributed to the increase in the Company's right-of-use assets.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 116 "Sewa" yang sebelumnya adalah PSAK 73 "Sewa" yang penerapannya dimulai tanggal 1 Januari 2024. Standar tersebut mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa baik jangka pendek dan jangka panjang sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "Sewa Operasi". Kebijakan ini telah diberlalukan untuk kontrak yang disepakati atau di amandemen pada atau setelah 1 Januari 2024.

The Company has adopted PSAK 116 "Leases," which replaced PSAK 73 "Leases" and has been applied starting January 1, 2024. This standard requires the recognition of lease liabilities, both short-term and long-term, related to leases previously classified as "Operating Leases." This policy applies to contracts entered into or amended on or after January 1, 2024.

Awal tanggal permulaan sewa, perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset Hak Guna diukur pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

At the commencement date of the lease, the Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is measured at cost, which includes the initial measurement of the lease liability adjusted for lease payments made on or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and estimated costs to dismantle and remove the underlying asset or restore it as required under lease terms, minus any lease incentives received.

Kemudian aset hak guna disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Taksiran Tagihan Restitusi

Jumlah taksiran tagihan restitusi yang dicatatkan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp49,66 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp49,66 miliar atau 100,00% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023, yang tercatat sebesar nihil.

Aset Tetap

Nilai buku aset tetap bersih pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp562,43 miliar mengalami penurunan sebesar Rp18,58 miliar atau 3,20% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp581,01 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penyusutan aset tetap tahun berjalan.

Subsequently, the right-of-use asset is depreciated on a straight-line basis from the commencement date to the earlier of the end of the asset's useful life or the end of the lease term.

Estimated Claims for Tax Refund

As of December 31, 2024, the Company recorded estimated claims for refund of Rp49.66 billion. This amount represents an increase of Rp49.66 billion or 100.00% compared to the position as of December 31, 2023, which was none.

Fixed Assets

The net book value of fixed assets as of December 31, 2024, was Rp562.43 billion, reflecting a decrease of Rp18.58 billion or 3.20% compared to the position as of December 31, 2023, which was Rp581.01 billion. The decline was due to depreciation of fixed assets during the year.

Tabel Aset Tetap 2023-2024
Fixed Assets 2023-2024

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Harga Perolehan **Acquisition Cost**				
Pemilikan Langsung **Direct Ownership**				
• Kapal • Vessels	808.456	785.329	23.127	2,94
• Bangunan • Buildings	12.360	12.360	0	0,00
• Instalasi Fasilitas Pelabuhan • Port Equipments Installation	5.401	5.401	0	0,00
• Kendaraan • Vehicles	580	-	580	100,00
• Aset dalam Penyelesaian • Construction in Progress	1.025	-	1.025	100,00
Total Harga Perolehan Total Acquisition Cost	827.822	803.090	24.733	3,08
Akumulasi Penyusutan **Accumulated Depreciation**				
Pemilikan Langsung **Direct Ownership**				
• Kapal • Vessel	260.321	218.438	41.883	19,17
• Bangunan • Buildings	726	241	485	201,24

Tabel Aset Tetap 2023-2024
Fixed Assets 2023-2024

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
• Instalasi Fasilitas Pelabuhan • Port Equipments	4.286	3.405	881	25,87
• Kendaraan • Vehicle	58	-	58	100,00
Total Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	265.391	222.084	43.307	19,50
Nilai Buku Neto Net Book Value	562.431	581.006	(18.575)	(3,20)

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, Perusahaan mencatatkan nilai beban penyusutan aset tetap masing-masing Rp43,31 miliar sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38,65 miliar. Seluruhnya dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

Aset dalam penyelesaian merupakan perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) untuk dua kapal tunda. Progress hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar 70,00%.

Seluruh aset tetap dimiliki secara langsung oleh Perusahaan. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan kondisi yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Perusahaan juga berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Based on the financial statements as of December 31, 2024, the Company recorded depreciation expenses on fixed assets amounting to Rp43.31 billion, compared to Rp38.65 billion as of December 31, 2023. The entire amount was allocated to the cost of revenue.

Assets under construction represent the Detail Engineering Design (DED) planning for two tugboats. As of December 31, 2024, the progress had reached 70.00%.

All fixed assets are owned directly by the Company. The Company believes that there were no events or conditions indicating potential impairment of fixed assets as of December 31, 2024 and 2023. The Company also believes that the insurance coverage is adequate to cover any potential losses arising from insured risks.

Liabilitas

Total liabilitas tercatat pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp360,87 miliar, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp79,26 miliar atau 28,14% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp281,62 miliar. Komponen biaya yang masih harus dibayar merupakan bagian terbesar yaitu 51,54% dari total liabilitas. Peningkatan jumlah liabilitas disebabkan oleh peningkatan kewajiban terkait biaya yang masih harus dibayar atas pencadangan terkait operasional Perusahaan.

Liabilities

Total liabilities as of December 31, 2024, were recorded at Rp360.87 billion, representing an increase of Rp79.26 billion or 28.14% compared to the position as of December 31, 2023, which stood at Rp281.62 billion. Accrued expenses constituted the largest component, accounting for 51.54% of the total liabilities. The increase in total liabilities was primarily due to a rise in obligations related to accrued expenses for provisions associated with the Company's operations.

Tabel Liabilitas 2023-2024
Liabilities

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek **Current Liabilities**				
Utang Usaha **Trade Payables**				
• Pihak Ketiga • Third Parties	15.263	4.095	11.168	272,72
• Pihak Berelasi • Related Parties	14.113	18.464	(4.351)	(23,56)
Uang Titipan Deposits	12.476	15.425	(2,948)	(19,11)
Beban Akrual Accrued Expenses	185.986	174.840	11.146	6,37
Utang Pajak Taxes Payable	21.318	9.225	12.093	131,09
Utang Dividen **Dividend Payable**				
• Pihak Ketiga • Third Parties	2.424	2.450	(26)	(1,06)
• Pihak Berelasi • Related Parties	17.628	17.601	27	0,15
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Current Maturities of Long-Term Lease Liabilities	84.927	32.485	52.442	161,43
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	354.135	274.585	79.550	28,97
Liabilitas Jangka Panjang **Non-Current Liabilities**				
Liabilitas Sewa Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-Term Lease Liabilities - Net of Current Maturities	6.736	7.030	(294)	(4,18)
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	6.735	7.030	(295)	(4,20)
Total Liabilitas Total Liabilities	360.871	281.615	79.256	28,14

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Utang Usaha

Jumlah utang usaha total pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp29,38 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp6,82 miliar atau 30,22% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp22,56 miliar. Peningkatan ini berasal dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga seiring dengan peningkatan kegiatan operasional pada tahun 2024.

Trade Payables

The total amount of trade payables as of December 31, 2024, was recorded at Rp29.38 billion, representing an increase of Rp6.82 billion or 30.22% compared to the position as of December 31, 2023, which stood at Rp22.56 billion. This increase was driven by a rise in trade payables to third parties in line with the increase in operational activities during 2024.

Uang Titipan

Jumlah uang titipan pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp12,48 miliar, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2,95 miliar atau 19,11% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp15,42 miliar. Penurunan uang titipan tersebut merupakan penurunan jumlah uang titipan yang diterima Perusahaan atas potongan penghasilan karyawan yang akan disalurkan ke dana pensiun karyawan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan PT Taspen (Persero).

Beban Akrual

Jumlah beban akrual pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp185,99 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp11,15 miliar atau 6,37% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp174,84 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh pencadangan biaya pemeliharaan kapal seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemeliharaan kapal di tahun 2024.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp21,32 miliar, terjadi peningkatan sebesar Rp12,09 miliar atau 131,09% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp9,22 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan atas kewajiban pajak penghasilan badan tahun 2024.

Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Jumlah liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp84,93 miliar, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp52,44 miliar atau 161,43% dari posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp32,49 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan kewajiban sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun, yang berasal dari perjanjian sewa baru atau perpanjangan kontrak sewa yang memerlukan pembayaran dalam waktu dekat. Selain itu, perubahan dalam estimasi pembayaran sewa terkait dengan penyesuaian tarif atau jumlah sewa juga berdampak pada peningkatan liabilitas sewa.

Deposits

The amount of deposits as of December 31, 2024, was recorded at Rp12.48 billion, reflecting a decrease of Rp2.95 billion or 19.11% compared to the position as of December 31, 2023, which stood at Rp15.42 billion. The decrease in deposits was due to a reduction in employee income deductions received by the Company that are to be distributed to employee pension funds, BPJS Employment, BPJS Health, and PT Taspen (Persero).

Accrued Expenses

As of December 31, 2024, accrued expenses amounted to Rp185.99 billion, representing an increase of Rp11.15 billion or 6.37% compared to the position as of December 31, 2023, which was Rp174.84 billion. This increase was driven by provisions for vessel maintenance costs in line with higher maintenance needs in 2024.

Taxes Payable

Taxes payable as of December 31, 2024, were recorded at Rp21.32 billion, an increase of Rp12.09 billion or 131.09% compared to the position as of December 31, 2023, which was Rp9.22 billion. The increase was mainly due to a rise in corporate income tax obligations for the year 2024.

Current Maturities of Long-Term Lease Liabilities

The current maturities of long-term lease liabilities as of December 31, 2024, amounted to Rp84.93 billion, representing an increase of Rp52.44 billion or 161.43% compared to the position as of December 31, 2023, which stood at Rp32.49 billion. This increase was due to a rise in lease obligations maturing within one year, originating from new lease agreements or lease contract extensions requiring near-term payments. In addition, changes in estimated lease payments related to rate adjustments or revised lease amounts also contributed to the increase in lease liabilities.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas 2023-2024
Equity 2023-2024

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Modal Dasar - 15.000.000.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) **Authorized Capital - 15,000,000,000 Shares at Rp100 (Full Amount)**				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 5.284.811.100 Saham dengan Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) Issued and Fully Paid Capital – Rp5,284,811,100 Shares at Rp100 (Full Amount)	528.481	528.481	0	0,00
Saham Treasuri Treasury Stock	(1.618)	(1.618)	0	0,00
Tambahan Modal Disetor – Neto Additional Paid-in Capital – Net	317.981	317.981	0	0,00
Saldo Laba **Retained Earnings**				
• Telah Ditentukan Penggunaannya • Appropriated	158.421	126.889	31.532	24,85
• Belum Ditentukan Penggunaannya • Unappropriated	285.844	268.786	17.058	6,35
Total Ekuitas Total Equity	1.289.110	1.240.520	48.590	3,92

*)Disajikan kembali
*) Restatement

Per 31 Desember 2024, total ekuitas tercatat sebesar Rp1.289,11 miliar, meningkat sebesar 3,92% atau setara dengan Rp48,59 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.240,52 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan saldo laba tahun berjalan.

As of December 31, 2024, total equity was recorded at Rp 1,289.11 billion, an increase of 3.92% or Rp48.59 billion compared to Rp1,240.52 billion in 2023. This increase was driven by the addition of retained earnings from the current year.

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Per 31 Desember 2024, Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp166,84 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp9,18 miliar atau 5,82% dibanding capaian kinerja pada tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp157,66 miliar.

PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

As of December 31, 2024, the Company recorded a profit for the year of Rp166.84 billion, an increase of Rp9.18 billion or 5.82% compared to the performance in 2023, which was recorded at Rp157.66 billion.

Tabel Laporan Laba (Rugi) 2023-2024
Profit (Loss) 2023-2024

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan - Neto Revenue - Net	1.345.030	1.138.537	206.493	18,14
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(926.893)	(777.612)	(149.281)	(19,20)
Laba Bruto Gross Profit	418.137	360.925	57.212	15,85
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(203.273)	(186.618)	(16.655)	(8,92)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	1.341	10.181	(8.839)	(86,82)
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	(8.802)	(729)	(8.073)	(1.107,41)
Laba Usaha Income from Operations	207.403	183.759	23.644	12,87
Pendapatan Keuangan Finance Income	17.933	14.959	2.974	19,88
Beban Keuangan Finance Expenses	(11.148)	(2.773)	(8.375)	302,02
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax	214.188	195.944	18.244	9,31
Beban Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	(47.345)	(38.282)	(9.063)	23,67
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	166.843	157.662	9.181	5,82
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	166.843	157.662	9.181	5,82
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings (Full Amount)	31,62	29,88	1,74	5,82

*) Disajikan kembali
*) Restatement

Pendapatan

Pendapatan usaha Perusahaan selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.345,03 miliar, kinerja ini mengalami kenaikan sebesar Rp206,49 miliar atau 18,14% dibanding tahun 2023 lalu yaitu sebesar Rp1.138,54 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan jasa pelayanan kapal, khususnya pada penundaan dan pemanduan, yang masing-masing mencatatkan kenaikan sebesar Rp211,72 miliar atau 21,22% dan Rp28,76 miliar atau 45,68%. Sementara itu, pendapatan jasa pengangkutan mengalami penurunan sebesar Rp2,5 miliar atau 5,39%, dan pendapatan jasa pengelolaan kapal tercatat nihil pada tahun 2024.

Revenues

The Company's operating revenue in 2024 was recorded at Rp1,345.03 billion, an increase of Rp206.49 billion or 18.14% compared to 2023, which amounted to Rp1,138.54 billion. This growth was driven by an increase in vessel service revenue, particularly in towage and pilotage services, which recorded increases of Rp211.72 billion or 21.22% and Rp28.76 billion or 45.68%, respectively. Meanwhile, freight service revenue declined by Rp2.5 billion or 5.39%, and no revenue was recorded from fleet management services in 2024.

Tabel Pendapatan 2023-2024
Revenues 2023-2024

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Persentase
Jasa Pelayanan Kapal **Vessel Services**				
• Penundaan • Towage service	1.209.515	997.791	211.724	21,22
• Pemanduan • Pilotage service	91.735	62.971	28.764	45,68
Pendapatan Jasa Pelayanan Kapal Total Revenue from Vessel Services	1.301.250	1.060.762	240.488	22,67
Jasa Pengangkutan dan Lainnya Freight and Other Services	43.780	46.276	(2.496)	(5,39)
Jasa Pengelolaan Kapal Fleet Management Services	-	31.500	31.500	(100,00)
Total Pendapatan - Neto Total Revenues - Net	1.345.030	1.138.537	206.493	18,14

Beban Pokok Pendapatan

Perusahaan mencatatkan beban pokok pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp926,89 miliar, kondisi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp149,28 miliar atau 19,20% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp777,61 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan aktivitas operasional selama tahun 2024.

Beban Umum dan Administrasi

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatat beban umum dan administrasi sebesar Rp203,27 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp16,66 miliar atau 8,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp186,62 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan beban administrasi dan umum sejalan dengan program Perusahaan dalam rangka perluasan pasar baru.

Laba Usaha

Pada tahun 2024, Perusahaan membukukan laba usaha sebesar Rp207,40 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp23,64 miliar atau 12,87% dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp183,76 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha sebesar 18,14%, yang berasal dari peningkatan pendapatan jasa pelayanan kapal, terutama pada layanan penundaan dan pemanduan pada wilayah terminal khusus.

Cost of Revenue

The Company recorded a cost of revenue of Rp926.89 billion in 2024, which increased by Rp149.28 billion or 19.20% compared to Rp777.61 billion in 2023. This increase was due to higher revenue and operational activities throughout 2024.

General and Administrative Expenses

In 2024, the Company recorded general and administrative expenses of Rp203.27 billion, an increase of Rp16.66 billion or 8.92% compared to Rp186.62 billion in 2023. This increase was driven by higher administrative and general expenses in line with the Company's market expansion programs.

Income from Operations

In 2024, the Company recorded operating income of Rp207.40 billion, an increase of Rp23.64 billion or 12.87% compared to Rp183.76 billion in 2023. The increase was due to an 18.14% rise in operating revenue, primarily from higher vessel service revenue, especially in towage and pilotage services in the dedicated terminal area.

Pendapatan dan Beban Operasi Lainnya

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatatkan pendapatan usaha lain sebesar Rp1,34 miliar, menurun sebesar Rp8,84 miliar atau 86,82% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10,18 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari denda klaim atas keterlambatan pekerjaan.

Sementara itu, beban operasional lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp8,80 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp8,07 miliar atau 1.107,41% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp0,73 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh pencadangan atas restitusi pajak yang tengah diajukan.

Pendapatan dan Beban Keuangan

Pada tahun 2024, Perusahaan membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp17,93 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp2,97 miliar atau 19,88% dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp14,96 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan deposito di tahun 2024.

Sedangkan beban keuangan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp11,15 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp8,38 miliar atau 302,02% dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp2,77 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh bunga akibat tambahan liabilitas sewa.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun 2024, laba keuangan bersih sebesar Rp214,19 miliar, meningkat sebesar Rp18,24 miliar atau 9,31% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp195,94 miiliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban usaha, serta pertumbuhan pendapatan keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan beban keuangan.

Laba Tahun Berjalan

Perusahaan mampu membukukan laba tahun berjalan pada tahun 2024 sebesar Rp166,84 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp9,18 miliar atau 5,82% dari jumlah tahun 2023 yang sebesar Rp157,66 miliar. Konsekuensi dari peningkatan laba tahun berjalan yaitu meningkatnya beban pajak penghasilan badan tahun 2024 yang dibukukan sebesar Rp47,35 miliar, meningkat Rp9,06 miliar atau 23,67% dari posisi tahun 2023 yang sebesar Rp38,28 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak yang berdampak pada tingginya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Perusahaan.

Other Operating Income and Expenses

In 2024, the Company recorded other operating income of Rp1.34 billion, a decrease of Rp8.84 billion or 86.82% compared to Rp10.18 billion in 2023. This decrease was due to a reduction in revenue from penalty claims for delayed work.

Meanwhile, other operating expenses in 2024 amounted to Rp8.80 billion, an increase of Rp8.07 billion or 1,107.41% compared to Rp0.73 billion in 2023. The increase was due to provisions for tax restitution that are currently being filed.

Finance Income and Expenses

In 2024, the Company recorded finance income of Rp17.93 billion, an increase of Rp2.97 billion or 19.88% compared to Rp14.96 billion in 2023. This increase was due to higher deposit income in 2024.

Finance expenses in 2024 amounted to Rp11.15 billion, an increase of Rp8.38 billion or 302.02% compared to Rp2.77 billion in 2023. This increase was due to interest resulting from additional lease liabilities.

Income Before Corporate Income Tax

In 2024, the Company recorded a net income of Rp214.19 billion, an increase of Rp18.24 billion or 9.31% compared to Rp195.94 billion in 2023. The increase was driven by higher operating revenue than operating expenses, as well as greater finance income growth compared to finance expenses.

Income for the Year

The Company was able to record a net income of Rp166.84 billion for the year 2024. This represents an increase of Rp9.18 billion or 5.82% compared to Rp157.66 billion in 2023. As a consequence of the higher net income, the corporate income tax expense for 2024 increased to Rp47.35 billion, up by Rp9.06 billion or 23.67% compared to Rp38.28 billion in 2023. This increase was due to the higher income before tax, which resulted in a higher corporate income tax liability.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan merupakan akumulasi dari laba (rugi) tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 2024 Perusahaan membukukan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp166,84 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp9,18 miliar atau 5,82% dari jumlah tahun 2023 yang sebesar Rp157,66 miliar.

Laba Per Lembar Saham

Pada tahun 2024, Perusahaan meningkatkan nilai per lembar saham diangka Rp31,62. Nilai ini meningkat sebesar Rp1,74 atau 5,82% dari tahun 2023 yang sebesar Rp29,88. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih Perusahaan yang berdampak pada peningkatan laba per saham dasar.

Arus Kas

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, Perusahaan membukukan nilai kas dan setara kas sebesar Rp473,08 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp64,27 miliar atau setara dengan 15,27% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 yang mencatatkan nilai kas dan setara kas sebesar Rp408,82 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh implementasi sistem auto collection di area Patimban dan Meningkatnya aktivitas collecting piutang.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

Total comprehensive income (loss) for the year represents the accumulation of net income and other comprehensive income. In 2024, the Company recorded total comprehensive income of Rp166.84 billion. This represents an increase of Rp9.18 billion or 5.82% compared to Rp157.66 billion in 2023.

Basic Earnings per Share

In 2024, the Company increased its earnings per share to Rp31.62. This is an increase of Rp1.74 or 5.82% compared to Rp29.88 in 2023. This increase was due to the higher net profit, which led to an increase in basic earnings per share.

Cash Flow

According to the financial statements as of December 31, 2024, the Company recorded cash and cash equivalents of Rp473.08 billion. This represents an increase of Rp64.27 billion or 15.27% compared to Rp408.82 billion as of December 31, 2023. This increase was due to the implementation of auto-collection system in Patimban and the increase receivables collecting activities.

Ikhtisar Laporan Arus Kas
2023-2024

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	309.406	(16.243)	325.648	(2.004,85)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(26.148)	(14.522)	(11.626)	(80,06)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(218.990)	(132.146)	(86.844)	(65,72)
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) of Cash and Cash Equivalents	64.268	(162.911)	227.179	139,45
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	408.816	571.727	(162.911)	(28,49)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	473.084	408.816	64.268	15,72

*) Disajikan kembali
*) Restatement

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tercatat per tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memperoleh nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp309,41 miliar, nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencatat nilai sebesar minus Rp16,24 miliar. Terjadi peningkatan senilai 2.004,85% atau Rp325,65 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan percepatan penagihan piutang di tahun 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tercatat per tanggal 31 Desember 2024, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi tercatat minus Rp26,15 miliar, nilai ini menurun sebesar 80,06% atau senilai Rp11,63 miliar dibanding pencapaian di tahun 2023 yaitu sebesar minus Rp14,52 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan docking kapal di tahun 2024 yang menambah nilai aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tercatat per tanggal 31 Desember 2024, nilai nominal arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar minus Rp218,99 miliar, nilai ini mengalami penurunan 65,72% atau setara dengan Rp86,84 miliar apabila dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yaitu sebesar minus Rp132,15 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran liabilitas sewa di tahun 2024.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan pembayaran utang atau kredit suatu Perusahaan dapat diuraikan melalui kapasitasnya untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2024, seperti berikut:

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Dalam menilai sejauh mana Perusahaan mampu memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek, Perusahaan mengacu pada rasio likuiditas. Tingkat likuiditas ini dapat tercermin dari rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas mencerminkan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas yang dimiliki. Di sisi lain, rasio lancar menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk melunasi hutang dengan menggunakan Aset Lancar.

Cash Flows from Operating Activities

As of December 31, 2024, the Company recorded net cash flows from operating activities of Rp309.41 billion, a significant improvement compared to the previous year, which recorded a negative cash flow of Rp16.24 billion. This marks an increase of 2,004.85% or Rp325.65 billion. The improvement was due to cash receipts from customers, supported by accelerated receivables collection during 2024.

Cash Flows from Investing Activities

As of December 31, 2024, net cash flows from investing activities stood at negative Rp26.15 billion, a decrease of 80.06% or Rp11.63 billion compared to the previous year's negative Rp14.52 billion. This decline was due to increased ship docking activities in 2024, which added to the value of fixed assets.

Cash Flow from Financing Activities

As of December 31, 2024, net cash flows from financing activities were recorded at negative Rp218.99 billion, a decrease of 65.72% or Rp86.84 billion compared to the previous year's figure of negative Rp132.15 billion. This decrease was caused by increased lease liability payments in 2024.

The Ability to Pay Debt and the Level of Collectibility

A company's ability to repay its debt or credit can be described through its capacity to settle short-term and long-term liabilities in 2024, as follows:

Ability to Pay Short-Term Debt

In assessing the extent to which the Company is able to meet its short-term obligations or liabilities, the Company refers to liquidity ratios. This level of liquidity is reflected in the cash ratio and current ratio. The cash ratio indicates the Company's ability to pay its short-term obligations using its Cash and Cash Equivalents. On the other hand, the current ratio reflects the Company's ability to settle its debts using its Current Assets.

L

Tabel Rasio Likuiditas 2023-2024
Liquidity Ratio 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
Rasio Kas Cash Ratio	134%	149%	-10,27%
Rasio Lancar Current Ratio	265%	324%	-18,16%
Rasio Cepat Quick Ratio	259%	315%	-17,73%

Rasio Kas

Rasio Kas per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 134% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 149%. Hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas yang tersedia mengalami penurunan di tahun 2024, hal ini merupakan bagian dari strategi Perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan kas untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penurunan rasio ini disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas akibat peningkatan pembayaran kewajiban jangka pendek serta arus kas keluar dari aktivitas pendanaan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Cash Ratio

As of December 31, 2024, the Cash Ratio was recorded at 134%, lower than the 149% recorded in 2023. This indicates a decline in the Company's ability to settle its short-term obligations using available Cash and Cash Equivalents in 2024. This decline is part of the Company's strategy to optimize cash utilization for sustainable business growth. The decrease in this ratio was due to a reduction in cash and cash equivalents as a result of increased short-term obligation payments and higher cash outflows from financing activities compared to the previous year.

Rasio Lancar

Pada tahun 2024, Rasio Lancar tercatat sebesar 265% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 324%. Hal ini menunjukan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset Lancar yang tersedia mengalami penurunan di tahun 2024 yang disebabkan oleh peningkatan kewajiban jangka pendek atas kegiatan operasional Perusahaan. Meskipun terjadi penurunan, rasio lancar tetap berada di atas standar yang sehat, menunjukkan bahwa Perusahaan masih memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Current Ratio

In 2024, the Current Ratio stood at 265%, lower than the 324% recorded in 2023. This indicates a decrease in the Company's ability to pay off its short-term obligations using its available Current Assets, mainly due to an increase in short-term liabilities related to the Company's operational activities. Despite the decline, the current ratio remains above healthy standards, showing that the Company still has adequate liquidity to meet its short-term obligations.

Rasio Cepat

Rasio Cepat Perusahaan untuk tahun 2024 tercatat sebesar 259%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 315%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas akibat peningkatan pembayaran kewajiban jangka pendek atas kegiatan operasional Perusahaan. Meskipun terjadi penurunan, rasio cepat tetap berada pada tingkat yang sehat, menunjukkan bahwa Perusahaan masih memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan.

Quick Ratio

The Company's Quick Ratio for 2024 was recorded at 259%, down from 315% in 2023. This decrease was driven by a decline in cash and cash equivalents due to increased payments of short-term obligations arising from operational activities. Despite the drop, the quick ratio remains at a healthy level, indicating that the Company still holds sufficient liquid assets to cover its short-term liabilities without relying on inventories.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Sebaliknya, dalam mengevaluasi kemampuan Perusahaan untuk melunasi semua hutangnya, termasuk hutang jangka panjang, Perusahaab merujuk pada rasio solvabilitas. Rasio ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya setelah melikuidasi Perusahaan.

Ability to Pay Long-Term Debt

In contrast, when evaluating the Company's ability to repay all of its debts, including long-term obligations, the Company refers to solvency ratios. These ratios are used as a measure to assess the Company's ability to meet all of its liabilities upon liquidation.

Tabel Rasio Solvabilitas 2023-2024
Solvency Ratio 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
Liabilitas terhadap Aset Debt to Assets Ratio (DAR)	21,87%	18,50%	3,37
Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	27,99%	22,70%	5,29

Liabilitas Terhadap Aset

Pada tahun 2024, Liabilitas terhadap Aset Perusahaan adalah sebesar 21,87% atau meningkat dibanding dengan perolehan tahun sebelumnya yang sebesar 18,50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan tetap berada dalam posisi yang solid dengan pengelolaan liabilitas yang efisien. Peningkatan ini mencerminkan bahwa Perusahaan memanfaatkan utang secara bijak untuk mendukung ekspansi dan investasi strategis, dengan tetap menjaga keseimbangan yang sehat antara utang dan aset. Perusahaan terus menjaga pertumbuhannya melalui penggunaan sumber daya yang optimal tanpa mengorbankan kestabilan keuangan, sehingga tetap memiliki fleksibilitas untuk merespons peluang pasar di masa depan.

Debt to Asset

In 2024, the Company's Debt to Assets ratio was 21.87%, an increase compared to the previous year's figure of 18.50%. This indicates that the Company remains in a solid position with efficient liabilities management. The increase reflects that the Company is utilizing debt wisely to support expansion and strategic investments, while maintaining a healthy balance between debt and assets. The Company continues to sustain its growth through optimal resource utilization without compromising financial stability, thereby retaining the flexibility to respond to future market opportunities.

Liabilitas Terhadap Ekuitas

Per 31 Desember 2024, Liabilitas terhadap Ekuitas Perusahaan adalah sebesar 27,99% atau meningkat dibanding perolehan pada akhir tahun sebelumnya yang sebesar 22,70%. Hal tersebut menunjukan bahwa Perusahaan telah memanfaatkan lebih banyak sumber daya eksternal untuk mendukung pertumbuhannya dan ekspansi bisnis. Meskipun terdapat peningkatan, rasio ini tetap berada dalam batas yang wajar, yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki kapasitas untuk mengelola kewajiban dengan baik, tanpa mengorbankan posisi ekuitas yang kuat. Peningkatan ini juga mencerminkan strategi Perusahaan untuk mengambil peluang-peluang baru yang dapat mendorong pendapatan di masa depan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil yang optimal.

Debt to Equity

As of December 31, 2024, the Company's Debt to Equity ratio stood at 27.99%, an increase compared to the 22.70% recorded at the end of the previous year. This suggests that the Company has utilized more external resources to support its growth and business expansion. Despite the increase, the ratio remains within a reasonable range, indicating the Company's ability to manage its obligations effectively without compromising a strong equity position. This increase also reflects the Company's strategy to seize new opportunities that could drive future revenue, while maintaining an optimal balance between risk and return.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Siklus piutang mencerminkan seberapa cepat piutang dapat diubah menjadi uang tunai selama satu tahun. Tingkat efisiensi dalam penagihan piutang dapat ditingkatkan dengan meningkatnya perputaran piutang dan penurunan rata-rata periode penagihan (jumlah hari penjualan piutang) dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Receivables Collectability

The receivables cycle reflects how quickly receivables can be converted into cash within a year. The efficiency of receivables collection can be improved through an increase in receivables turnover and a decrease in the average collection period (days sales outstanding) compared to the previous period.

Rasio Aktivitas 2023-2024
Activity Ratio 2023-2024

Uraian Description	2024	2023
Receivable Turn Over (kali) Receivable Turn Over (times)	11 Kali 11 Times	11 Kali 11 Times
Average Collection Period (hari) Average Collection Period (days)	32 Hari 32 Days	29 Hari 29 Days

Pada tahun tahun 2024 ini, *receivable turn over* menjadi sebesar 11 kali atau sama dengan realisasi tahun 2023 yang hanya menunjukan tingkat perputaran sebesar 11 kali. Selanjutnya, *average collection period* pada tahun 2024 menunjukan tren negatif yaitu terealisasi sebesar 32 hari atau naik dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 29 hari. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan jumlah piutang yang belum dibayar pada tahun 2024. Adapun piutang usaha Perusahaan tahun 2024 dibanding tahun 2023, berdasarkan umur piutangnya, dapat dilihat sebagaimana terlampir berikut ini:

In 2024, the receivables turnover remained at 11 times, the same as the realization in 2023, which also showed a turnover rate of 11 times. Furthermore, the average collection period in 2024 showed a negative trend, reaching 32 days, which increased compared to 29 days in 2023. This was due to a rise in outstanding receivables in 2024. The Company's trade receivables in 2024 compared to 2023, based on the aging schedule, can be seen in the attachment below:

Tabel Umur Piutang Usaha 2023-2024
Trade Receivables 2023-2024

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Belum jatuh tempo Not yet due	25.985	20.166	5.820	28,86
Telah jatuh tempo **Overdue**				
• 1 sampai dengan 30 hari • 1-30 days	29.699	4.589	25.111	547,32
• 31 sampai dengan 60 hari • 31-60 days	67.763	2.409	65.354	2.712,91
• 61 sampai dengan 90 hari • 61-90 days	2.447	3.062	(615)	(20,08)
• Lebih dari 90 hari • Over 90 days	71.074	15.591	55.483	355,87
Total piutang usaha Total trade receivables	196.968	45.817	151.151	329,90

Tabel Umur Piutang Usaha 2023-2024
Trade Receivables 2023-2024

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
(Penyisihan penurunan nilai) (Allowance for impairment)	(4.512)	(3.698)	(814)	(22,01)
Total Piutang Usaha Neto Total Trade Receivables – Net	192.456	42.119	150.337	356,93

Berdasarkan tabel diatas total piutang usaha neto Perusahaan adalah sebesar Rp192,46 miliar di tahun 2024, mengalami peningkatan Rp150,34 miliar atau 356,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp42,12 miliar. Dari total piutang usaha neto Perusahaan tersebut, jumlah piutang belum jatuh tempo di tahun 2024 tercatat sebesar Rp25,99 miliar, mengalami peningkatan Rp5,82 miliar atau 28,86% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp20,17 miliar.

Sementara piutang usaha yang sudah jatuh tempo 1 sampai dengan 30 hari, tercatat sebesar Rp29,70 miliar di tahun 2024, mengalami peningkatan Rp25,11 miliar atau 547,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,59 miliar. Piutang usaha dengan telah jatuh tempo 31 sampai dengan 60 hari, tercatat sebesar Rp67,76 miliar di tahun 2024, mengalami peningkatan Rp65,35 miliar atau 2.712,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,41 miliar. Piutang usaha dengan telah jatuh tempo 61 sampai dengan 90 hari, mengalami penurunan Rp0,62 miliar atau 20,08% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,06 miliar. Piutang usaha dengan telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, tercatat sebesar Rp71,07 miliar di tahun 2024, mengalami peningkatan Rp55,48 miliar atau 355,87%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,59 miliar.

Adapun penyisihan penurunan nilai tercatat sebesar minus Rp4,51 miliar di tahun 2024, mengalami penurunan Rp0,81 miliar atau 22,01%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar minus Rp3,70 miliar.

Based on the table above, the Company's total net trade receivables amounted to Rp192.46 billion in 2024, an increase of Rp150.34 billion or 356.93% compared to the previous year, which stood at Rp42.12 billion. Of the total net trade receivables, the amount not yet due in 2024 was recorded at Rp25.99 billion, an increase of Rp5.82 billion or 28.86% compared to Rp20.17 billion in the previous year.

Meanwhile, trade receivables that were overdue by 1 to 30 days amounted to Rp29.70 billion in 2024, an increase of Rp25.11 billion or 547.32% compared to Rp4.59 billion in the previous year. Trade receivables overdue by 31 to 60 days stood at Rp67.76 billion in 2024, an increase of Rp65.35 billion or 2,712.91% compared to Rp2.41 billion in the previous year. Trade receivables overdue by 61 to 90 days decreased by Rp0.62 billion or 20.08% compared to Rp3.06 billion in the previous year. Trade receivables overdue by more than 90 days amounted to Rp71.07 billion in 2024, an increase of Rp55.48 billion or 355.87% compared to Rp15.59 billion in the previous year.

Allowance for impairment was recorded at minus Rp4.51 billion in 2024, a decrease of Rp0.81 billion or 22.01% compared to minus Rp3.70 billion in the previous year.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Rincian Struktur Modal

Saham yang dimiliki oleh pemilik induk merupakan modal yang dikelola oleh Perusahaan. Pengelolaan modal Perusahaan bertujuan utama untuk memastikan pemeliharaan rasio solvabilitas yang sehat guna mendukung operasi bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Capital Structure Details

Shares owned by the parent company represent the capital managed by the Company. The primary objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a healthy solvency ratio to support business operations and maximize shareholder value. The Company

Perusahaan mengelola struktur modalnya dan melakukan perubahan sesuai dengan perubahan situasi ekonomi.

manages its capital structure and makes adjustments in response to changes in economic conditions.

Tabel Komposisi Struktur Modal 2023-2024
Capital Structure Composition 2023-2024

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	354.135	21,46%	274.585	18,04%	79.550	28,97
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	6.736	0,41%	7.030	0,46%	(294)	(4,18)
Total Liabilitas Total Liabilities	360.871	21,87%	281.615	18,50%	79.256	28,14
Ekuitas Equity	1.289.110	78,13%	1.240.520	81,50%	48.590	3,92
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	1.649.981	100,00%	1.522.135	100,00%	127.846	8,40

Komposisi Struktur Modal Tahun 2024 dan 2023

Komposisi struktur permodalan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah ekuitas yaitu sebesar 78,13% dan 21,87% merupakan liabilitas. Saldo ini mengalami perubahan dibandingkan 31 Desember 2023, dimana komposisi struktur modal dalam bentuk ekuitas sebesar 81,50% dan utang sebesar 18,50%. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek yang signifikan, sementara ekuitas tumbuh stabil sehingga meningkatkan proporsi liabilitas terhadap ekuitas.

Capital Structure Composition for 2024 and 2023

As of December 31, 2024, the capital structure composition consisted of 78.13% equity and 21.87% liabilities. This reflects a change compared to December 31, 2023, when the capital structure was comprised of 81.50% equity and 18.50% liabilities. This shift was due to a significant increase in short-term liabilities, while equity grew at a stable rate, resulting in a higher proportion of liabilities to equity.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Management Policy on Capital Structure

The primary objective of the Company's capital management is to maintain a healthy capital ratio to support its operations and maximize returns for shareholders.

The Company manages its capital to ensure the sustainability of its business, aiming to maximize shareholder wealth and provide benefits to other stakeholders and seeks to maintain a balanced level of debt and equity to preserve an optimal capital structure and reduce the cost of capital.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, suatu transaksi dianggap material jika nilainya mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Namun, sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak menemukan adanya ikatan material terkait investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang dapat disampaikan mengenai hal tersebut dalam Laporan Tahunan ini.

Material Commitments for Capital Goods Investment

According to Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a transaction is considered material if its value reaches 20% or more of the equity of a public company. However, throughout 2024, the Company did not have any material commitments related to capital goods investment. Therefore, there is no information to be disclosed on this matter in the Annual Report.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Dalam ekspansi bisnisnya, investasi menjadi faktor krusial. Perusahaan terlibat dalam investasi pada barang modal, yang melibatkan pengeluaran dana untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap. Tujuan dari investasi ini adalah untuk memperoleh manfaat jangka panjang yang diharapkan akan berkontribusi pada nilai keseluruhan Perusahaan di masa mendatang.

Types and Value of Capital Goods Investment

In its business expansion, investment is a crucial factor. The Company engaged in capital goods investments, which involved expenditure for acquiring or enhancing fixed assets. The purpose of these investments is to obtain long-term benefits that are expected to contribute to the Company's overall value in the future.

Tabel Investasi 2023-2024

Investment 2023-2024

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

No	Item Investasi Investment Item	Kebutuhan Dana Financial Need	RKAP 2024 2024 RKAP	Realisasi s/d 2024 Realization until 2024	TAKSASI 2024 2024 TAKSASI
1	2	3	4	5	7
1	Investasi 2: (Pengajuan Baru 2024) 1 Unit Kapal Tunda 2 X1600HP & 1 Unit Kapal Tunda 2 X 1200HP Investment 2: (New Submission 2024) 1 Unit of 2 X1600HP Tugboats & 1 Unit of 2 X 1200HP Tugboats	148,80	66,96	0,42%	14,88
2	Investasi 3: Repowering Mesin Bantu Kiri Kanan Kt Bima 035 Min.175 Kva Investment 3: Repowering of Left Right Auxiliary Engine Kt Bima 035 Min.175 Kva	3,40	2,72	-	0,34
3	Investasi 4: Pengadaan Forklift Kebutuhan Gudang Cws Kapasitas. Min.3 Ton Investment 4: Forklift Procurement Cws Warehouse Needs Capacity. Min.3 Ton	0,60	0,60	100,00%	0,60
4	Investasi 4: Modifikasi Sistem Propulsi Waterjet Menjadi FPP 2 Unit Motor Pandu Investment 4: Modification of Waterjet Propulsion System to FPP 2 Units Scout Motor	6,00	3,00	10%	2,10

Tujuan Investasi Barang Modal

Perusahaan melakukan investasi pada barang modal dengan maksud untuk mendukung operasional bisnisnya guna meningkatkan kinerja. Perusahaan selalu menerapkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan investasi ini, sejalan dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Purpose of Capital Goods Investment

The Company invests in capital goods with the aim of supporting its business operations to enhance performance. The Company always applies prudence and careful consideration in making such investments, in line with its efforts to maintain business sustainability.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sepanjang periode setelah tanggal laporan akuntan, tidak terdapat informasi atau fakta material yang terjadi yang perlu diungkapkan. Perseroan memastikan bahwa tidak ada peristiwa atau transaksi signifikan yang berdampak pada laporan keuangan atau kondisi usaha setelah tanggal tersebut. Dengan demikian, tidak ada penyesuaian atau pengungkapan tambahan yang perlu disampaikan terkait hal ini.

Material Information and Facts Occurring After the Date of the Accountant's Report

During the period following the date of the accountant's report, there were no material information or facts that need to be disclosed. The Company ensures that no significant events or transactions occurred that would impact the financial statements or business conditions after that date. Therefore, no adjustments or additional disclosures are necessary in this regard.

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dalam target tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kondisi industri dan ekonomi. Adapun perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan berdasarkan target tahun 2024 dengan realisasi tahun buku 2024, adalah sebagai berikut:

Comparison Between Target and Realization as well as Projection for the Next 1 (One) Year

Comparison Between Target and Realization for 2024

The Company set a number of targets in its 2024, which were adjusted to the prevailing industry and economic conditions. The comparison between the targets set in the 2024 and the actual results for the 2024 fiscal year is as follows:

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024
Comparison Between Target and Realization for 2024

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-Juta) 2024 Realization (Rp-Million)	Target 2024 (Rp-Juta) 2024 Target (Rp-Million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 (%) Realization Achievement Against 2024 Target (%)
Pendapatan Usaha Revenues	1.345.030	1.162.979	115,65
Laba Usaha Operating Profit	207.403	200.395	103,50
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	214.188	204.193	104,89
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	166.843	165.918	100,56
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Assets	1.649.981	1.538.525	107,24
Liabilitas Liabilities	360.871	230.287	156,70
Ekuitas Equity	1.289.110	1.308.237	98,54
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	1.649.981	1.538.525	107,24

Secara umum, kinerja keuangan Perusahaan di tahun 2024, sangat positif, hal tersebut terlihat dari total pendapatan usaha yang terealisasi sebesar Rp1.345,03 miliar, atau lebih tinggi 15,65% terhadap target yang sebesar Rp1.162,98 miliar. Realisasi pendapatan usaha yang tercatat lebih tinggi terhadap target tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa pelayanan kapal yang cukup signifikan pada tahun 2024. Perusahaan juga mencatatkan realisasi laba usaha sebesar Rp207,40 miliar atau lebih tinggi 3,50% terhadap target laba usaha yang sebesar Rp200,40 miliar. Selain itu, Perusahaan juga mencatatkan realisasi laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp214,19 miliar atau lebih tinggi 4,89% terhadap target laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp204,19 miliar. Lainnya, Perusahaan mencatatkan realisasi laba tahun berjalan sebesar Rp166,84 miliar atau lebih tinggi 0,56% terhadap target laba tahun berjalan sebesar Rp165,92 miliar.

In general, the Company's financial performance in 2024 was very positive. This is reflected in the total operating revenue realization of Rp1,345.03 billion, which was 15.65% higher than the target of Rp1,162.98 billion. The operating revenue was higher than targeted and it was primarily driven by a significant increase in revenue from vessel services in 2024. The Company also recorded an operating profit of Rp207.40 billion, or 3.50% above the target of Rp200.40 billion. In addition, the Company posted a profit before tax of Rp214.19 billion, exceeding the a profit before tax target of Rp204.19 billion by 4.89%. The net profit for the year amounted to Rp166.84 billion, which was 0.56% higher than the target of Rp165.92 billion.

Sementara dari sisi struktur modal, jumlah aset Perusahaan di tahun 2024, tercatat sebesar Rp1.649,98 miliar atau lebih tinggi 7,24%% terhadap target sebesar Rp1.538,53 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha neto dari pihak berelasi. Jumlah liabilitas Perusahaan di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp360,87 miliar atau mencapai 156,70% terhadap target sebesar Rp230,29 miliar. Sementara jumlah ekuitas, tercatat sebesar Rp1.289,11 miliar di tahun 2024 atau mencapai 98,54% terhadap target sebesar Rp1.308,24 miliar. Lainnya, jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2024, tercatat sebesar Rp1.649,98 miliar atau mencapai 107,24% terhadap target sebesar Rp1.538,53 miliar.

From a capital structure perspective, the Company's total assets in 2024 amounted to Rp1,649.98 billion, or 7.24% higher than the target of Rp1,538.53 billion. This was mainly due to an increase in net trade receivables from related parties. The Company's total liabilities in 2024 were realized at Rp360.87 billion, or 156.70% of the target of Rp230.29 billion. Meanwhile, total equity stood at Rp1,289.11 billion in 2024, or 98.54% of the target of Rp1,308.24 billion. In total, the sum of liabilities and equity in 2024 reached Rp1,649.98 billion, or 107.24% of the target of Rp1,538.53 billion.

Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024

Untuk 1 (tahun) ke depan, Perusahaan telah menetapkan sejumlah proyeksi yang hendak dicapai, dan telah disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan, serta kondisi industri dan ekonomi. Adapun proyeksi yang telah ditetapkan Perusahaan untuk 1 (satu) tahun ke depan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut.

Comparison Between 2025 Projections and 2024 Realizations

For 1 (one) year ahead, the Company has set several projections to be achieved, which have been adjusted in line with the Company's developments as well as industry and economic conditions. The projections established by the Company for the next one (1) year are as follows.

Tabel Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024
Comparison Between 2025 Projections and 2024 Realizations

Uraian	Proyeksi 2025 (Rp-Juta) 2025 Projection Rp-Million)	Realisasi 2024 (Rp-Juta) 2024 Realization (Rp-Million)	Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) 2025 Projection against 2025 Realization (%)
Pendapatan Usaha Revenues	1.372.099	1.345.030	102,01
Beban Usaha Operating Expenses	238.929	207.403	115,20
Laba Usaha Operating Profit	239.035	214.188	111,60

Tabel Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024

Comparison Between 2025 Projections and 2024 Realizations

Uraian	Proyeksi 2025 (Rp-Juta) 2025 Projection Rp-Million)	Realisasi 2024 (Rp-Juta) 2024 Realization (Rp-Million)	Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%) 2025 Projection against 2025 Realization (%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	186.448	166.843	111,75
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Assets	1.556.192	1.649.981	94,32
Liabilitas Liabilities	190.508	360.871	52,79
Ekuitas Equity	1.365.685	1.289.110	105,94
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	1.556.192	1.649.981	94,32

Perusahaan menargetkan mampu membukukan peningkatan kinerja keuangan di tahun 2025, di mana total pendapatan usaha diproyeksikan dapat dibukukan sebesar Rp1.372,10 miliar, atau lebih tinggi 2,01% terhadap realisasi 2024 sebesar Rp1.345,03 miliar. Perusahaan juga memproyeksikan laba usaha sebesar Rp238,93 miliar atau mencapai lebih tinggi 15,20% terhadap realisasi 2024 laba usaha sebesar Rp207,40 miliar. Selain itu, Perusahaan juga mencatatkan memproyeksikan laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp239,04 miliar atau meningkat 11,60% terhadap realisasi 2024 laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp214,19 miliar. Lainnya, Perusahaan memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp186,45 miliar atau mencapai lebih tinggi 11,75% terhadap realisasi 2024 laba tahun berjalan sebesar Rp166,84 miliar.

The Company is targeting improved financial performance in 2025, with total operating revenue projected to reach Rp1,372.10 billion, higher 2.01% of the 2024 realization of Rp1,345.03 billion. The Company also projects an operating profit of Rp238.93 billion, which represents a 15.20% increase compared to the 2024 operating profit realization of IDR 207.40 billion. In addition, the Company projects a pre-tax profit of IDR 239.04 billion, marking an 11.60% increase over the 2024 pre-tax profit realization of Rp214.19 billion. Furthermore, the Company projects a net profit for the year of IDR 186.45 billion, or an 11.75% increase compared to the 2024 net profit realization of Rp166.84 billion.

Sementara dari sisi struktur modal, jumlah aset Perusahaan di tahun 2024, diproyeksikan sebesar Rp1.555,19 miliar atau mencapai 94,32% terhadap realisasi 2024 sebesar Rp1.649,98 miliar. Jumlah liabilitas Perusahaan di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp190,51 miliar atau mencapai 52,79% terhadap realisasi 2024 yang sebesar Rp360,87 miliar. Sementara jumlah ekuitas, diproyeksikan sebesar Rp1.365,69 miliar di tahun 2024, atau meningkat 5,94% terhadap realisasi 2024 yang sebesar Rp1.289,11 miliar. Lainnya, jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2024, diproyeksikan sebesar Rp1.556,19 miliar atau mencapai 94,32% terhadap realisasi 2024 yang sebesar Rp1.649,98 miliar.

From a capital structure perspective, the Company's total assets in 2025 are projected to reach Rp1,555.19 billion, or 94.32% of the 2024 realization of Rp1,649.98 billion. The Company's total liabilities in 2025 are projected at Rp190.51 billion, or 52.79% of the 2024 realization of Rp360.87 billion. Meanwhile, total equity is projected to reach Rp1,365.69 billion in 2025, reflecting a 5.94% increase over the 2024 realization of Rp1,289.11 billion. In total, liabilities and equity in 2025 are projected at Rp1,556.19 billion, or 94.32% of the 2024 realization of Rp1,649.98 billion.

Proyeksi Pembagian Dividen

Perusahaan saat ini belum memiliki proyeksi mengenai kemungkinan pembagian dividen pada tahun 2025 atas kinerja tahun buku 2024.

Dividend Distribution Projection

At the moment, the Company has not yet prepare a projection regarding the possibility of dividend distribution in 2025 on the 2024 fiscal year performance

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Kebijakan Pembagian Dividen

Pembagian dan penyetoran dividen sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham. Penentuan besarnya dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham berdasarkan keputusan RUPS. Adapun Kebijakan Pemegang Saham melalui RUPS terkait besarnya dividen yang dibagikan kepada Pemegang Saham.

Pembagian Dividen dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2024, Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui antara lain mengenai penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2023 untuk dividen final sebesar Rp118,25 miliar. Adapun informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2024 atas kinerja tahun buku 2023, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2023 atas kinerja tahun buku 2022, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2022 atas kinerja tahun buku 2021, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2021 atas kinerja tahun buku 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dividend Policy and Distribution

Dividend Policy

The distribution and payment of dividends are entirely the right of the Shareholders. The amount of dividends distributed to Shareholders is determined based on resolutions of the GMS. The policy regarding the amount of dividends to be distributed is determined by the Shareholders through the GMS.

Dividend Distribution Over the Last 5 (Five) Years

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 12, 2024, the Shareholders resolved and approved, among other things, the appropriation of the Company's net profit for the 2023 fiscal year for a final dividend of Rp118.25 billion. Details on the dividend distribution and payment in 2024 based on the financial performance of the 2023 fiscal year, in 2023 based on the 2022 fiscal year, in 2022 based on the 2021 fiscal year, and in 2021 based on the 2020 fiscal year, can be found in the table below.

Tabel Pembagian Dividen per Tahun Buku 2023-2024
Dividend Distribution by Fiscal Year 2023-2024

Kebijakan Dividen Dividend Policy	Tahun Buku Fiscal Year				
	2024 (Dividen Interim) (Interim Dividend)	2023	2022	2021	2020
Laba Tahun Berjalan (Rp) Net Income for the Year (Rp)	121.101.965.249 (Laba Bersih per September 2024)	157.661.987.548	150.654.848.841	136.582.719.666	80.234.174.519
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Distributed Cash Dividend (Rp)	20.051.730.940	118.252.444.833	113.028.441.246	109.281.933.623	64.218.306.721
Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	3,80	22,41	21,42	20,71	12,17
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	16,55	75,00	75,02	80,01	80,03

Tabel Pembagian Dividen per Tahun Buku 2023-2024
Dividend Distribution by Fiscal Year 2023-2024

Kebijakan Dividen Dividend Policy	Tahun Buku Fiscal Year				
	2024 (Dividen Interim) (Interim Dividend)	2023	2022	2021	2020
Keputusan RUPS GMS Resolution	Berdasarkan Keputusan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 10 Desember 2024 Based on the Board of Directors' resolution approved by the Company's Board of Commissioners on December 10, 2024	Akta No. 31 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 12 Juni 2024 Deed No. 31 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, dated June 12, 2024	Akta No. 26 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 21 Juni 2023 Deed No. 26 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, dated June 21, 2023	Akta No. 43 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 23 Juni 2022 Deed No. 43 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, dated June 23, 2022	Akta No. 32 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 17 Juni 2021 Deed No. 32 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, dated June 17, 2021
Tanggal Pengumuman Announcement Date	11 Desember 2024 December 11, 2024	27 Desember 2023 (kas interim) & 13 Juni 2024 (kas final) December 27, 2023 (Interim Cash) & June 13, 2024 (Final Cash)	28 November 2022 (Kas Interim) & 23 Juni 2023 (Kas Final) November 28, 2022 (Interim Cash) & June 23, 2023 (Final Cash)	24 November 2021 (Interim) & 27 Juni 2022 (Kas FInal) November 24, 2021 (Interim) & June 27, 2022 (Final Cash	6 November 2020 (Interim) & 21 Juni 2021 (Kas Final) November 6, 2020 (Interim) & June 21, 2021 (Final Cash)
Tanggal Pembayaran Payment Date	10 Januari 2025 January 10, 2025	26 Januari 2024 (kas interim) & 12 Juli 2024 (kas final) January 26, 2024 (interim cash) & July 12, 2024 (final cash)	23 Desember 2022 (Kas Interim) & 21 Juli 2023 (Kas Final) December 23, 2022 (Interim Cash) & July 21, 2023 (Final Cash)	24 Desember 2021 (Interim) & 27 Juli 2022 (Tunai) December 24, 2021 (Interim) & July 27, 2022 (Cash)	2 Desember 2020 (Interim) & 16 Juli 2021 (Tunai) December 2, 2020 (Interim) & July 16, 2021 (Cash)

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Tahun 2024, tidak terdapat aksi penawaran umum. Adapun penawaran umum perdana dilakukan pada tahun 2017 dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut informasi terkait penawaran umum dan penerbitan saham tersebut:

1. Total Perolehan Dana Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

In 2024, there were no public offering activities. The initial public offering was conducted in 2017, with the realization of the use of proceeds aligned with the predetermined plan.

The following is information related to the public offering and share issuance:

1. Total Proceeds from Public Offering

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Hasil Penawaran Umum Proceeds from Public Offering	461.892.470.000
2	Biaya Penawaran Umum Public Offering Expenses	22.360.645.000
3	Hasil Bersih Net Proceeds	439.531.825.000

2. Rencana Penggunaan Dana
Rencana Penggunaan dana hasil penawaran umum berdasarkan keputusan RUPS antara lain untuk:

2. Planned Use of Proceeds
The planned use of proceeds from the public offering, based on the resolution of the GMS, includes:

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Investasi (Capex) Investment (Capex)	395.578.642.500
2	Modal Kerja (Opex) Working Capital (Opex)	43.953.182.500

3. Rincian Penggunaan Dana
Sampai dengan 31 Desember 2024, penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp364.053.533.967,- dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:

3. Details of Fund Utilization
As of December 31, 2024, the total funds utilized from the Public Offering amounted to Rp364,053,533,967 with the following breakdown of fund utilization:

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Investasi (Capex) Investment (Capex)	320.100.351.467 *)
2	Modal Kerja (Opex) Working Capital (Opex)	43.953.182.500

*) Rp320.100.351.467 telah dialokasikan untuk pembangunan 5 (lima) unit kapal tunda dan 3 (tiga) kapal pandu yang seluruhnya telah dibayarkan.
*) Rp320,100,351,467 has been allocated for the construction of 5 (five) towage and 3 (three) pilot boats, all of which have been fully paid.

Program Kepemilikan Saham oleh Pekerja dan/atau Manajemen

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA (*Employee Stock Allocation*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan akan mengalokasikan saham kepada pekerja sebanyak-banyaknya 57.894.700 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan 4,76% (empat koma tujuh enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama program ESA adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk ikut memiliki Perusahaan melalui kepemilikan saham, sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta peningkatan produktivitas kerja yang akan berdampak positif pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan peningkatan nilai Perusahaan yang dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholders*. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program ESA akan ditentukan kemudian. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Employee and/or Management Stock Ownership Program

Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 14 dated October 11, 2017, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company will allocate up to 10% (ten percent) of the Offered Shares during the Initial Public Offering (IPO) for the ESA (Employee Stock Allocation) Program. In this regard, the Company will allocate shares to employees totaling up to 57,894,700 (fifty-seven million eight hundred ninety-four thousand seven hundred) common shares, representing 4.76% (four point seventy-six percent) of the Offered Shares during the IPO, with the exercise price of the ESA being the same as the Offering Price.

The main objective of the ESA program is to provide employees with an opportunity to become shareholders in the Company, thereby increasing their sense of ownership and improving work productivity, which will positively impact the overall corporate performance and the increase in Company value that can be enjoyed by all stakeholders. The source of funding for the implementation of the ESA Program will be determined later. The implementation of the ESA Program will comply with the provisions set out in Regulation No. IX.A.7, which involves a fixed allocation with a maximum of 10% (ten percent) of the total Offered Shares in the IPO.

Alokasi dengan jatah pasti yang diberikan Perusahaan untuk membeli saham Penawaran Umum oleh Peserta Program ESA sebanyak-banyaknya 57.894.700 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham. Peserta ESA dapat membeli saham sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima dengan skema pembayaran cicilan selama 12 bulan kepada Perusahaan. Harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran. Saham untuk Program ESA memiliki *lock-up period* selama 12 bulan, dimulai sejak tanggal Pencatatan Saham Perusahaan di Bursa Efek. Apabila terdapat sisa alokasi saham untuk Program ESA yang tidak dibeli oleh Peserta maka saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini.

Jumlah peserta Program ESA adalah sekitar 780 orang, kecuali bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Atas Usulan Direksi untuk Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan Nomor DK/21/11/33/2017 tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris
2. Pekerja Aktif sampai keluarnya efektif OJK
3. Pekerja Aktif minimal sejak 1 November 2016
4. Tidak sedang terkena sanksi dari Perusahaan
5. Tidak dalam status Cuti di luar Tanggungan Perusahaan (CDTP)

Apabila peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/ persyaratan di atas sehingga menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA pada waktu periode penawaran ESA, maka saham milik peserta ESA akan dilepas untuk dijual ke publik bersamaan dengan proses IPO.

Dan jika peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/ persyaratan di atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengunduran diri baik secara sukarela maupun pemecatan yang menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA setelah periode penawaran ESA sampai dengan berakhirnya *lock-up period*, maka saham akan dikembalikan ke Perusahaan dan pembayaran cicilan Peserta yang telah dilakukan akan dikembalikan oleh Perusahaan.

Pelaksanaan atas program tersebut mencakup informasi antara lain:

1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya
   Jumlah saham ESOP/MSOP yang ditawarkan adalah sebanyak 57.849.700 lembar dan realisasi sebanyak 7.473.700 lembar
2. Jangka waktu 12 bulan
3. Persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak

The fixed allocation provided by the Company for employees to purchase shares from the IPO under the ESA Program is up to 57,894,700 (fifty-seven million eight hundred ninety-four thousand seven hundred) shares. ESA participants can purchase shares according to the allocated amount, with a payment installment scheme over 12 months to the Company. The exercise price of the ESA is the same as the Offering Price. Shares under the ESA Program have a lock-up period of 12 months, starting from the Company's listing date on the Stock Exchange. If there are any remaining allocated shares in the ESA Program that are not purchased by participants, these shares will be offered to the public during the IPO.

The number of ESA participants is around 780 people, excluding the Board of Directors and Commissioners of the Company, who meet the requirements in accordance with the Board of Commissioners' Approval Letter for the Implementation of the Employee Stock Allocation (ESA) Program in connection with the Company's Initial Public Offering, Number DK/21/11/33/2017 dated November 20, 2017, as follows:

1. Not applicable to the Board of Directors and Commissioners
2. Active employees until the OJK's effective date
3. Active employees who have been employed since at least November 1, 2016
4. Employees not under any sanction from the Company
5. Employees not on leave outside the Company's responsibility (CDTP)

If an ESA participant does not meet the above criteria/ requirements, resulting in the forfeiture of the ESA program rights during the ESA offering period, their shares will be sold to the public along with the IPO process.

If an ESA participant does not meet the above criteria/ requirements, including but not limited to resignation, whether voluntary or due to dismissal, leading to the forfeiture of ESA program rights after the ESA offering period until the end of the lock-up period, the shares will be returned to the Company, and the installment payments made by the participant will be refunded by the Company.

The implementation of this program includes the following information:

1. The number of ESOP/MSOP shares and their realization
   The number of ESOP/MSOP shares offered is 57,849,700 shares, and the realization is 7,473,700 shares
2. 12-month period
3. The criteria for eligible employees and/or management

4. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
   a. Pekerja aktif sampai dengan keluarnya efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   b. Pekerja Aktif minimal terhitung sejak tanggal 1 November 2016;
   c. Pekerja tidak sedang terkena sanksi dari Perusahaan;
   d. Pekerja tidak dalam status cuti diluar tanggungan Perusahaan.
   e. Harga *exercise* Rp380/lembar

4. Not applicable to the Board of Directors and Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk:
   a. Active employees until the effective date of the Financial Services Authority (OJK).
   b. Active employees who have been employed since at least November 1, 2016;
   c. Employees not under any sanction from the Company;
   d. Employees not on leave outside the Company's responsibility
   e. Exercise price: Rp380 per share.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestitures, Mergers/ Amalgamations, Acquisitions, and Debt/ Capital Restructuring

Informasi Material Mengenai Investasi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material mengenai investasi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information Regarding Investments

Throughout 2024, there was no material information regarding investments. Therefore, there is no information on this matter to be presented in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material mengenai ekspansi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information Regarding Expansions

Throughout 2024, there was no material information regarding expansion. Therefore, there is no information on this matter to be presented in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material mengenai divestasi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information Regarding Divestitures

Throughout 2024, there was no material information regarding divestitures. Therefore, there is no information on this matter to be presented in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Penggabungan/ Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material mengenai penggabungan atau peleburan usaha. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information Regarding Mergers/ Amalgamations

Throughout 2024, there was no material information regarding mergers or consolidations. Therefore, there is no information on this matter to be presented in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material mengenai akuisisi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Information Regarding Acquisitions

Throughout 2024, there was no material information regarding acquisitions. Therefore, there is no information on this matter to be presented in this Annual Report.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material mengenai restrukturisasi utang atau modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi Perusahaan telah diaudit oleh Auditor. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, yang dilakukan Perusahaan, senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Dewan Komisaris dalam kapasitas pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi baik secara langsung maupun melalui Komite Audit telah melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Komitmen Perusahaan atau Manajemen atas Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Adapun, Transaksi afiliasi adalah kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

Material Information Regarding Debt/Capital Restructuring

Throughout 2024, there was no material information regarding debt or capital restructuring. Therefore, there is no information on this matter to be presented in this Annual Report.

Material Information Regarding Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliates/Related Parties

Policy and Mechanism for Reviewing Transactions and Compliance with Relevant Regulations

The review mechanism for transactions with affiliates/related parties involves an audit process conducted by both internal and external auditors. In an effort to ensure the fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, the Company's affiliate transactions have been audited by the Auditor. Material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliates/related parties, carried out by the Company, always adhere to the principle of prudence in accordance with generally accepted business practices and have complied with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflicts of Interest, as well as PSAK No. 7 on Disclosure of Related Parties.

The Board of Commissioners, in carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors either directly or through the Audit Committee, has implemented adequate procedures to ensure that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, including by adhering to the arm's length principle.

Company or Management's Commitment to Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliates/Related Parties

In carrying out material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliates/related parties, the Board of Directors affirms that affiliate transactions have gone through adequate procedures and have been conducted in accordance with generally accepted business practices, including adhering to the arm's length principle.

Affiliate transactions are business activities undertaken to generate revenue and are conducted regularly, repeatedly, and/or continuously, based on the annual financial statements audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja in report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 dated March 24, 2025.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam POJK No. 42/POJK.04/2020. Adapun di tahun 2024, tidak terdapat transaksi dengan pihak afiliasi.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika mereka:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.
2. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:
   a. Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, Perusahaan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;
   b. Suatu pihak adalah entitas asosiasi Perusahaan;
   c. Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan sebagai *venturer*;
   d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan atau induknya;
   e. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d)
   f. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
   g. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

Pihak-pihak Berelasi dan Sifat Transaksi

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

Information Regarding Transactions with Affiliates

The transactions conducted with affiliates have complied with the provisions set out in POJK No. 42/POJK.04/2020. In 2024, there were no transactions with affiliates.

Information Regarding Transactions with Related Parties

Throughout 2024, the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No.7 on "Disclosure of Related Parties." A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

1. A person or close family member has a relationship with the Company if they:
   a. Have control or joint control over the Company;
   b. Have significant influence over the Company; or
   c. Are key management personnel of the Company or its parent entity.
2. A party is considered related to the Company if:
   a. Directly, or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controls, is controlled by, or is under joint control with the Company; (ii) has an interest in the Company that gives significant influence over the Company; or (iii) has joint control over the Company;
   b. A party is an associate of the Company;
   c. A party is a joint venture where the Company is a venturer;
   d. A party is a member of key management personnel of the Company or its parent;
   e. A party is a close family member of an individual described in item (a) or (d);
   f. A party is an entity controlled, jointly controlled, or significantly influenced by, or where significant voting rights are held by, directly or indirectly, individuals as described in item (d) or (e);
   g. A party is a post-employment benefit plan for the Company's employees or an entity related to the Company.

Related Parties and Nature of Transactions

Transactions are carried out based on terms agreed upon by both parties, which may not be the same as transactions conducted with non-related parties. Material transactions and balances with related parties. Except when specifically disclosed as related parties, other parties mentioned in the notes to the financial statements are non-related parties.

Berikut tabel yang menginformasikan nama pihak berelasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan untuk tahun 2024 sebagai berikut:

The table below provides information on the names of related parties and the types of transactions with related parties conducted by the Company for the year 2024 as follows:

Sifat Relasi Nature of Relations	Nama Pihak Berelasi Name of Related Parties	Jenis Transaksi Transaction Type
Pemegang Saham Shareholders	SPJM	Penjualan jasa dan dividen Sales of service and dividend
	MTI	Dividen Dividend
	PII	Dividen Dividend
Entitas Induk SPJM SPJM Parent Entity	Pelindo	Penjualan dan pembelian jasa dan imbalan kerja Sales and purchase of services, work benefits
Entitas Sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PTP	Penjualan jasa Sales of services
	PEL	Penjualan jasa dan pembelian barang Purchase and sales of services
	JPPI	Penjualan dan pembelian jasa Purchase and sales of services
	PMLI	Pembelian jasa Sales of services
	ILCS	Pembelian jasa Sales of services
	LEGI	Pembelian barang Sales of goods
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa Purchase of services
	PT PLN Energi Gas	Penjualan jasa Purchase of services
	PT Adhi Guna Putera	Penjualan jasa Purchase of services
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Pembelian jasa asuransi Purchase of insurance services
	PT Asuransi Jasa Indonesia	Pembelian jasa asuransi
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa Purchase of services
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa Purchase of services

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan untuk tahun 2023 dan 2024 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Transaksi dalam Laporan Posisi Keuangan

Aset Pihak Berelasi
Related Party Assets

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023
Kas di Bank Cash in Bank	473.084	408.816
Piutang Usaha – Neto Trade Receivables – Net	147.565	4.443
Aset Kontrak – Neto Acrrued Revenues – Net	129.201	313.409
Piutang Lain-lain Neto Other Receivables. – Net	-	5.640
Total Aset kepada Pihak Berelasi Total Assets to Related Parties	749.850	732.308
Persentase dari Total Aset Percentage of Total Assets	45,45%	48,11%

Liabilitas Pihak Berelasi
Liabilities to Related Parties

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023
Utang Usaha Trade Payables	14.113	18.464
Total Liabilitas kepada Pihak Berelasi Total Liabilities to Related Parties	14.113	18.464
Persentase dari Total Liabilitas Percentage of Total Liabilities	3,91%	6,72%

Transaksi dalam Laporan Laba Rugi
Transaction in Income Statement

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023
Pendapatan Pihak Berelasi Revenue from Related Parties	919.274	804.878
Persentase dari Total Pendapatan Percentage of Total Revenues	68,35%	70,69%

Realization of Related Party Transactions

The realization of balances and transactions with related parties in relation to the Company's financial performance for 2023 and 2024 can be presented as follows:

1. Transactions in the Statement of Financial Position

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan alasan yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pengembangan operasional dan bisnis.

Prospek Usaha

Memasuki tahun 2024, JAI menghadapi dinamika usaha yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global, termasuk eskalasi perang Rusia–Ukraina dan volatilitas harga komoditas global, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga energi sebagai dampak lanjutan dari konflik geopolitik telah memberikan tekanan signifikan terhadap efisiensi operasional sektor pelayaran dan jasa kepelabuhanan. Namun demikian, JAI hadir dengan kekuatan fundamental internal yang kokoh, ditopang oleh kapabilitas inovasi, tata kelola yang adaptif, dan efisiensi operasional yang unggul.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi, JAI telah mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis, seperti pemanfaatan *shore connection* atau sambungan listrik darat pada kapal tunda yang sedang docking atau tidak beroperasi di tiga pelabuhan utama, penggunaan *harbour generator* yang efisien, serta pengoperasian unit motor pandu berbasis solar panel yang ramah lingkungan. Strategi penghematan BBM ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat reputasi JAI dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara nyata dan terukur.

Sejalan dengan arah transformasi Pelindo Group, JAI kini berada di bawah naungan Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) dan memperoleh peluang strategis untuk memperluas cakupan operasional di luar wilayah pelabuhan milik Pelindo. Salah satu keunggulan yang dimiliki JAI adalah kepemilikan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yang memungkinkan Perseroan menjajaki dan melayani pasar jasa pandu dan tunda di pelabuhan umum maupun terminal khusus (TUKS) secara lebih luas, termasuk pelabuhan-pelabuhan strategis yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Explanation Regarding Fairness of Transactions

In the normal course of business, the Company engages in transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All related party transactions have been carried out based on mutually agreed policies and terms.

Alasan Dilakukanya Transaksi

The Company enters into transactions with related parties for the same reasons as with third parties, namely to meet the needs related to operational and business development.

Business Prospect

Entering 2024, JAI faces increasingly complex business dynamics amid global uncertainty, including the escalation of the Russia–Ukraine war and the volatility of global commodity prices, particularly fuel. The rise in energy prices as a consequence of the geopolitical conflict has exerted significant pressure on the operational efficiency of the shipping and port services sector. Nevertheless, JAI stands strong with robust internal fundamentals, supported by innovation capabilities, adaptive governance, and superior operational efficiency.

As a commitment to sustainability and energy efficiency, JAI has implemented various strategic initiatives, such as utilizing shore connection for tugboats that are docked or not operating at three major ports, using efficient harbor generators, and operating pilot boat units powered by environmentally friendly solar panels. These fuel-saving strategies not only support operational efficiency but also strengthen JAI's reputation for the tangible and measurable application of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles.

In line with the transformation direction of Pelindo Group, JAI is now under the umbrella of Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Subholding and has gained strategic opportunities to expand its operational coverage beyond Pelindo-owned ports. One of JAI's advantages is its ownership of a Port Business Entity (BUP) license, allowing the company to explore and serve the pilotage and tugboats service markets at both public ports and special terminals (TUKS) more extensively, including strategic ports involved in the National Strategic Projects (PSN) and Special Economic Zones (KEK).

Pertumbuhan ekspor komoditas unggulan nasional, seperti nikel dan gas alam (LNG), juga menjadi peluang ceruk pasar baru yang potensial bagi JAI, baik dalam bentuk layanan jasa kapal maupun pengangkutan. Ditambah dengan proyeksi pemulihan ekonomi domestik dan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan maritim, JAI optimistis mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang positif. Di tengah lanskap persaingan yang ketat, kekuatan internal dalam hal inovasi teknologi, penerapan tata kelola yang adaptif, serta fokus pada efisiensi energi dan operasional menjadi fondasi utama bagi JAI dalam memperkuat daya saing dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

The growth of key national commodity exports, such as nickel and natural gas (LNG), also presents new niche market opportunities for JAI, both in terms of ship services and transportation. Coupled with projections for domestic economic recovery and the increasing activity in logistics and maritime trade, JAI is optimistic about maintaining positive growth momentum. Amid a competitive landscape, internal strengths in technological innovation, the application of adaptive governance, and a focus on energy and operational efficiency serve as the main foundation for JAI to enhance competitiveness and create sustainable business growth.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan selalu memperhatikan setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan usahanya. Berikut adalah perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada Perusahaan pada tahun 2024:

Changes in Laws and Regulations Affecting the Company in the Most Recent Fiscal Year

The Company is committed to complying with all applicable laws and regulations. Therefore, the Company consistently monitors any changes in regulations that may be implemented in its business activities. Below are the changes in laws and regulations that impacted the Company in 2024:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Changes in Laws and Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Regulations	Pokok Perubahan Changes	Dampak Bagi Perusahaan Impact on the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
1	Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Perubahan Pasal 198: • Penambahan ayat (1a), ayat (5a) dan ayat (7) • Perubahan ketentuan ayat (5) dimana pada UU Pelayaran 17/2008 mengatur dalam hal pemerintah belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, pengelolaan dan pengoperasian pemanduan dapat dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus, sedangkan dalam UU 66/2024, dalam hal Pemerintah belum menyediakan jasa pemanduan pada perairan Terminal Khusus yang ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa, dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan sehingga PT JAI Tbk selaku BUP memiliki banyak potensi untuk mendapatkan pelimpahan untuk pengelolaan dan pengoperasian Pemanduan	Signifikan	-

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Changes in Laws and Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Regulations	Pokok Perubahan Changes	Dampak Bagi Perusahaan Impact on the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
	Law Number 66 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 on Shipping	Amendment to Article 198: • Addition of paragraph (1a), paragraph (5a), and paragraph (7) • Amendment to the provisions of paragraph (5), where under the previous Shipping Law 17/2008, in the event that the government has not yet provided pilotage services in compulsory pilotage waters and extraordinary pilotage waters, the management and operation of pilotage could be delegated to special terminal operators. However, under Law 66/2024, in the event that the government has not yet provided pilotage services in Special Terminal waters designated as Compulsory Pilotage Waters and Extraordinary Pilotage Waters, the authority may be delegated to Port Business Entities (BUP). As such, PT JAI Tbk, as a BUP, has significant potential to receive delegation for the management and operation of pilotage services	Significant	-

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Changes in Accounting Policy Applied by the Company in the Last Financial Year

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Reason for Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
1	Amandemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan Amendment to PSAK 201 (formerly PSAK 1): Long-term Liabilities with Covenants	Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan: • Hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan; • Hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan; • Klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas; dan • Hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya. Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.	Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan. *These amendments are not expected to have an impact on the Company's financial statements.*

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Changes in Accounting Policy Applied by the Company in the Last Financial Year

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Reason for Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
		These amendments specify the requirements for classifying a liability as either current or non-current and clarify the following: • What constitutes a right to defer settlement; • The right to defer settlement must exist at the end of the reporting period; • The classification is not affected by the likelihood that the entity will exercise its right to defer the liability; and • Only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument, will the terms and conditions of the convertible liability not affect its classification. In addition, new requirements have been introduced mandating disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement depends on compliance with future covenants within twelve months.	
2	Amandemen PSAK 116 (dahulu PSAK 73): Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik Amendment to PSAK 116 (formerly PSAK 73): Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions	Amandemen PSAK 116 (dahulu PSAK 73) Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan. The amendment to PSAK 116 (formerly PSAK 73) Leases sets out the requirements for how a seller-lessee should measure lease liabilities arising from a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognize the full amount of any gain or loss related to the right of use retained.	Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan. These amendments are not expected to have an impact on the Company's financial statements.
3	Amandemen PSAK 207 (dahulu PSAK 2) dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60): Pengaturan Pembiayaan Pemasok Amendment to PSAK 207 (formerly PSAK 2) and PSAK 107 (formerly PSAK 60): Supplier Financing Arrangements	Amandemen PSAK 207 (dahulu PSAK 2) dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60) mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas. *The amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2) and PSAK 107 (formerly PSAK 60) clarify the characteristics of supplier financing arrangements and require additional disclosures regarding such arrangements. These disclosure requirements are intended to help financial statement users understand the effects of supplier financing arrangements on an entity's liabilities, cash flows, and exposure to liquidity risk.*	Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan. *These amendments are not expected to have an impact on the Company's financial statements.*

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Perusahaan menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai pedoman strategis untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam periode lima tahun. Dalam penyusunannya, RJPP dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, mencakup lingkungan, sosial, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Visi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2027

Menjadi penyedia jasa marine terdepan dalam ekosistem maritim Indonesia serta global.

Misi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2027

Mewujudkan jasa marine yang andal, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan demi memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Deskripsi

1. JAI menyediakan layanan marine yang tersertifikasi serta sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
2. JAI menyediakan layanan marine yang unggul dan terintegrasi sebagai sebuah solusi jasa kepelabuhanan.
3. JAI menyediakan layanan marine yang tersebar dengan jangkauan Indonesia dan global, baik di pelabuhan milik Pelindo maupun non-Pelindo.
4. JAI berkomitmen untuk melakukan upaya ramah lingkungan pada rantai nilai perusahaan.
5. JAI berkomitmen untuk memaksimalkan penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola.
6. JAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi mutakhir serta memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk di sepanjang rantai nilai logistik guna memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.
7. JAI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan konstruktif dalam meningkatkan kompetensi serta keterampilan seluruh pegawai.
8. JAI berkomitmen untuk memastikan kelancaran arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui efisiensi biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Company Long-Term Plan

The Company has established its Long-Term Plan (RJPP) as a strategic guideline to achieve its goals and objectives over a five-year period. In its formulation, the RJPP is designed by taking into account sustainability aspects, including environmental, social, and the implementation of Good Corporate Governance.

Vision of the Company Long-Term Plan 2024–2027

To become a leading marine service provider in the Indonesian and global maritime ecosystem.

Mission of the Company Long-Term Plan 2024–2027

To provide reliable, safe, competitive, and sustainable marine services in order to maximize added value for all stakeholders.

Description

1. JAI provides certified marine services that comply with applicable safety standards.
2. JAI delivers excellent and integrated marine services as a port service solution.
3. JAI offers widespread marine services with coverage across Indonesia and globally, both at Pelindo-owned and non-Pelindo ports.
4. JAI is committed to implementing environmentally friendly practices across its value chain.
5. JAI is dedicated to maximizing value creation for shareholders through improved financial performance and governance management optimization.
6. JAI is committed to continuously improving service quality by utilizing advanced technology and maximizing accessibility through product integration along the logistics value chain to meet the satisfaction of customers and partners.
7. JAI is committed to creating a supportive and constructive work environment to enhance the competence and skills of all employees.
8. JAI is committed to ensuring the smooth flow of trade in support of Indonesia's economy by improving logistics cost efficiency to enhance community welfare.

JAI menetapkan dua arahan utama korporat yang difokuskan pada penguatan bisnis marine secara terpadu serta percepatan *operational excellence*. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian visi perusahaan sebagai penyedia jasa marine yang andal dengan jangkauan di Indonesia dan global.

JAI has set two main corporate directions focused on strengthening the integrated marine business and accelerating operational excellence. This initiative is undertaken to support the achievement of the Company's vision as a reliable marine service provider with both national and global reach.

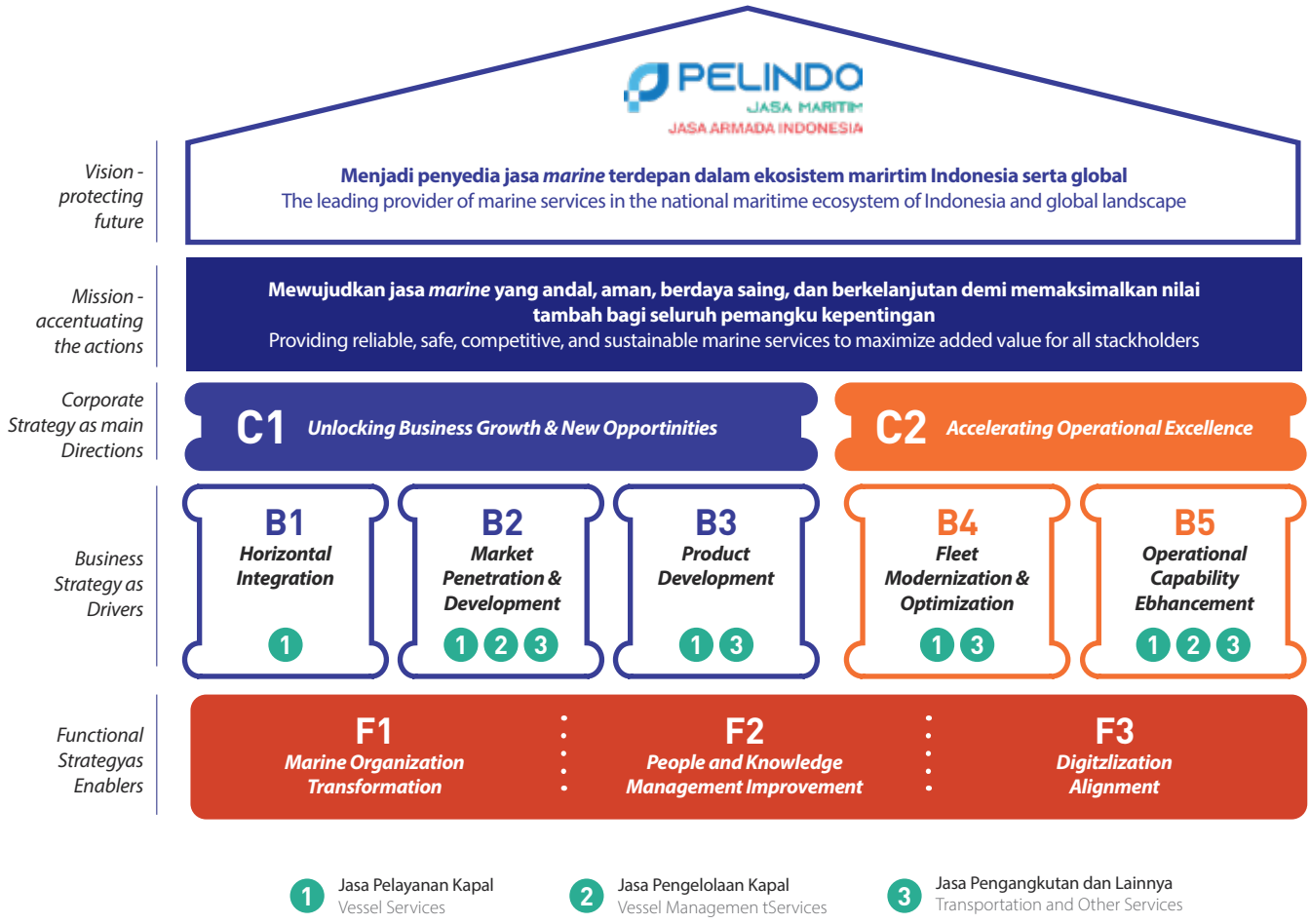

1 Jasa Pelayanan Kapal
Vessel Services

2 Jasa Pengelolaan Kapal
Vessel Managemen tServices

3 Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Transportation and Other Services

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

05



IPCM berkomitmen penuh untuk senantiasa melakukan pengembangan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) yang baik sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja Perusahaan di era yang semakin berkembang.

IPCM is fully committed to always improve the good governance of its Human Resources (HR) and Information Technology (IT) to increase the Company's productivity and performance in an increasingly developing era.



Sumber Daya Manusia

Human Resources



Sebagai penyedia layanan pemanduan dan penundaan kapal di perairan Indonesia, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan garda terdepan yang menampilkan kualitas layanan Perusahaan. Perusahaan senantiasa membekali SDM dengan kompetensi, profesionalisme, dan komitmen tinggi, untuk memastikan keunggulan operasional, mendorong pertumbuhan bisnis, serta memenuhi kepatuhan terhadap standar keselamatan maritim. Dengan demikian, Perusahaan berkomitmen untuk terus mengerahkan upaya terbaik dalam memberdayakan SDM agar mampu beradaptasi dengan dinamika industri dan memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan sektor maritim nasional, melalui berbagai program pengembangan kapabilitas, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.

As a provider of pilotage and towage services in Indonesian waters, Human Resources (HR) serve as the frontline in delivering the Company's service quality. The Company consistently equips its HR with strong competencies, professionalism, and a high level of commitment to ensure operational excellence, drive business growth, and comply with maritime safety standards. Accordingly, the Company is committed to continuously making its best efforts to empower its HR to adapt to industry dynamics and contribute optimally to the advancement of the national maritime sector through various capability development programs, training, and welfare improvement initiatives.

KOMPOSISI PEKERJA

Komposisi pekerja Perusahaan terdiri dari Pekerja Penugasan Pelindo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penempatan Pekerja (*Secondment Agreement*), Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Tenaga Alih Daya.

EMPLOYEE COMPOSITION

The composition of the Company's employees consists of Seconded Employees from Pelindo based on the Secondment Agreement, Fixed-Term Contract Employees (PKWT), and Outsourced Workers. As of December 31, 2024,

Terhitung hingga 31 Desember 2024, Perusahaan mencatat jumlah BOD dan pekerja sejumlah 818 orang, yang meliputi 2 orang BOD yang berasal dari Pelindo, 1 orang BOD Non Pelindo, 100 orang Pekerja Penugasan Pelindo, 23 orang PKWT, dan 692 orang Tenaga Alih Daya. Berikut uraian rinci terkait komposisi BOD dan pekerja Perusahaan:

the Company recorded a total of 818 employees and BOD members, comprising 2 BOD members from Pelindo, 1 Non-Pelindo BOD member, 100 Seconded Employees from Pelindo, 23 PKWT employees, and 692 Outsourced Workers. The following is a detailed breakdown of the Company's BOD and employee composition:

Status Pekerja Employee Status	Realisasi tahun 2023 (orang) 2023 Realization (people)	RKAP Tahun 2024 (orang) 2024 RKAP (people)	Realisasi tahun 2024 (orang) 2024 Realization (people)	Capaian Achievement	
				Tren Trend	Deviasi Deviation
	1	2	3	4 = (3-1) : 1	5 = 3 : 2
BOD Pelindo	3	3	2	-33,33%	66,67%
BOD Non Pelindo	0	0	0	0	0
Pekerja Penugasan Pelindo Pelindo Secondment Employees	124	129	100	-19,35%	77,52%
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) PKWT (Temporary Appointment Work Agreement)	60	65	23	-61,67%	35,38%
Tenaga Alih Daya Outsourced Workers	664	714	692	4,22%	96,92%
JUMLAH TOTAL	**848**	**911**	**818**	**-3,54%**	**89,79%**

Terlihat pada tabel tersebut, total pekerja Perusahaan di tahun 2024 mengalami fluktuasi penurunan jumlah sebesar 3,54%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan manajemen untuk menerapkan *minus growth* dalam rangka efisiensi Perusahaan. Apabila mengacu pada komposisi BOD dan pekerja Perusahaan di tahun 2024 yang mencapai 818 orang, maka Perusahaan berhasil merealisasikan pemenuhan jumlah SDM hingga 89,79% terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian realisasi pemenuhan SDM, antara lain disebabkan oleh 2 (dua) orang meninggal dunia, 7 (tujuh) orang pensiun, 20 (dua puluh) orang mutasi keluar dari Perusahaan.

As shown in the table, the total number of Company employees in 2024 experienced a fluctuation, there was a decline of 3.54%. This was due to a management policy implementing minus growth as part of the Company's efficiency measures. Referring to the composition of the BOD and Company employees in 2024, which reached 818 personnel, the Company successfully realized 89.79% of its Human Resources target based on the Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Factors influencing the actual HR realization include the passing of 2 (two) employees, 7 (seven) retirements, and 20 (twenty) transfers out of the Company.

BERDASARKAN JENIS PEKERJA (OPERASIONAL LANGSUNG)

Formasi Anak Buah Kapal (ABK) dan Pandu memiliki peran krusial sebagai penggerak utama bisnis inti Perusahaan. Adapun rincian pergerakan jumlah pekerja ABK dan Pandu, baik yang berstatus sebagai Pekerja Penugasan Pelindo, PKWT, maupun Tenaga Alih Daya yang bekerja sama dengan pihak ketiga, adalah sebagai berikut:

BASED ON EMPLOYEE TYPE (DIRECT OPERATIONAL)

The formation of crew members and guides has a crucial role as the main driver of the Company's core business. The details of the movement of the number of crew members and scouts, both with the status of Pelindo Assignment Workers, PKWT, and Outsourcing Workers in collaboration with third parties, are as follows:

Jenis Pekerja Employee Type	Tahun Year	
	2024 (orang) (people)	2023 (orang) (people)
ABK Crew		
Pekerja Penugasan Pelindo Pelindo Secondment Employees	29	40
Tenaga Alih Daya Outsourced	577	583
PANDU Indirect Operational Employees		
PKWT	8	6
Tenaga Alih Daya Outsourced	8	10
JUMLAH OPERASIONAL LANGSUNG TOTAL DIRECT OPERATIONAL	**622**	**639**

Jumlah pekerja yang dimiliki Perusahaan mencerminkan skala operasional dan kapasitas dalam menjalankan bisnis secara efektif. Sementara, komposisi pekerja yang kompleks menunjukkan keberagaman keahlian dan fungsi yang saling melengkapi demi mencapai tujuan strategis. Perusahaan tetap berkomitmen dalam mengelola SDM secara adil, dengan persebaran SDM yang terdiri dari berbagai jenjang usia, pendidikan, serta status, guna memperkaya perspektif dan inovasi sekaligus memastikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan industri. Keberagaman latar belakang yang dimiliki pekerja Perusahaan menjadi kekuatan utama dalam mendorong kolaborasi internal maupun antar tim, sehingga Perusahaan dapat membangun fondasi bisnis yang kokoh untuk mewujudkan tujuan perkembangan bisnis.

Setiap tahunnya, terdapat semangat baru yang dimiliki Perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan. Maka dari itu, Pengelola Human Capital PT Jasa Armada Indonesia Tbk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas, bermodalkan SDM yang memiliki kompetensi strategis dalam menyediakan, membangun, dan mengoperasikan pelayanan kepelabuhan dan logistik secara terintegrasi, berkualitas, dan andal. Upaya yang dilakukan, kemudian akan berdampak terhadap kelancaran pergerakan kapal dan distribusi barang.

The total number of employees within the Company reflects the scale of its operations and its capacity to conduct business effectively. Meanwhile, the complex composition of employees demonstrates the diversity of skills and complementary functions aimed at achieving strategic goals. The Company remains committed to managing its human resources fairly, through employee distribution across various age groups, educational backgrounds, and employment statuses to enrich perspectives and innovation, while ensuring flexibility in facing industry challenges. The diverse backgrounds of the Company's employees serve as a key strength in fostering internal and cross-team collaboration, enabling the Company to build a solid business foundation for achieving its growth objectives.

Each year, the Company brings renewed enthusiasm to improving service quality. Therefore, the Human Capital Management of PT Jasa Armada Indonesia Tbk is committed to creating a professional and integrity-driven work environment, supported by human resources equipped with strategic competencies in providing, developing, and operating integrated, high-quality, and reliable port and logistics services. These efforts ultimately contribute to the smooth movement of vessels and the distribution of goods.

PENGELOLAAN SDM DENGAN PIHAK KETIGA

Sebagai bagian dari pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung tercapainya visi dan misi Perusahaan, Perusahaan dapat melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Berkat dukungan dari pihak ketiga, pekerjaan penunjang di lingkungan Perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dengan pekerja yang memiliki fokus pada bidang tertentu. Berikut uraian Tenaga Alih Daya di lingkungan Perusahaan:

HR MANAGEMENT WITH THIRD PARTIES

As part of Human Resource management to support the achievement of the company's vision and mission, the Company may outsource some of its tasks to third parties. With the support of third parties, supporting tasks within the Company can be carried out more optimally with employees who focus on specific fields. Below is an overview of the Outsourced Employees within the Company:

Jenis Pekerja Employee Type	Realisasi Tahun 2023 (orang) 2023 Realization (people)	RKAP Tahun 2024 (orang) 2024 RKAP (people)	Realisasi Tahun 2024 (orang) 2024 Realization (people)	Capaian Achievement	
				Tren Trend	Deviasi Deviation
	1	2	3	4 = (3-1) : 1	5 = 3 : 2
ABK Crew Member	583	633	577	-1,03%	91,15%
Pandu Harbor Pilots	12	12	8	-33,33%	66,67%
Tenaga Penunjang Lainnya Other Supporting Personnel	69	69	107	55,07%	155,07%
JUMLAH TOTAL	**664**	**714**	**692**	**4,22%**	**96,92%**

Realisasi jumlah pekerja selain pekerja Penugasan Pelindo dan PKWT tahun 2024 meningkat sebanyak 28 orang. Pergerakan jumlah pekerja tersebut telah sesuai dengan pertimbangan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan ABK, pandu, dan tenaga penunjang lainnya, selaras dengan strategi yang dijalani dan perkembangan usaha Perusahaan.

The realization of the number of employees, excluding Pelindo's Assignment employees and PKWT, increased by 28 people in 2024. This change in workforce aligns with considerations made to meet the needs for crew members, harbor pilots, and other supporting personnel, in line with the Company's ongoing strategy and business development.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perusahaan dibagi pelaksanaannya ke dalam 3 (tiga) fungsi, antara lain Strategi SDM, Pengelolaan SDM, dan Layanan SDM, sesuai dengan Kepmenaker 149 Tahun 2020 terkait matriks peran manajemen sumber daya manusia berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Company's Human Resources Management divided its implementation into 3 (three) functions, namely HR Strategy, HR Management, and HR Services, in accordance with the Minister of Manpower Decree No. 149 of 2020 regarding the matrix of human resources management roles based on the Indonesian National Work Competency Standards.

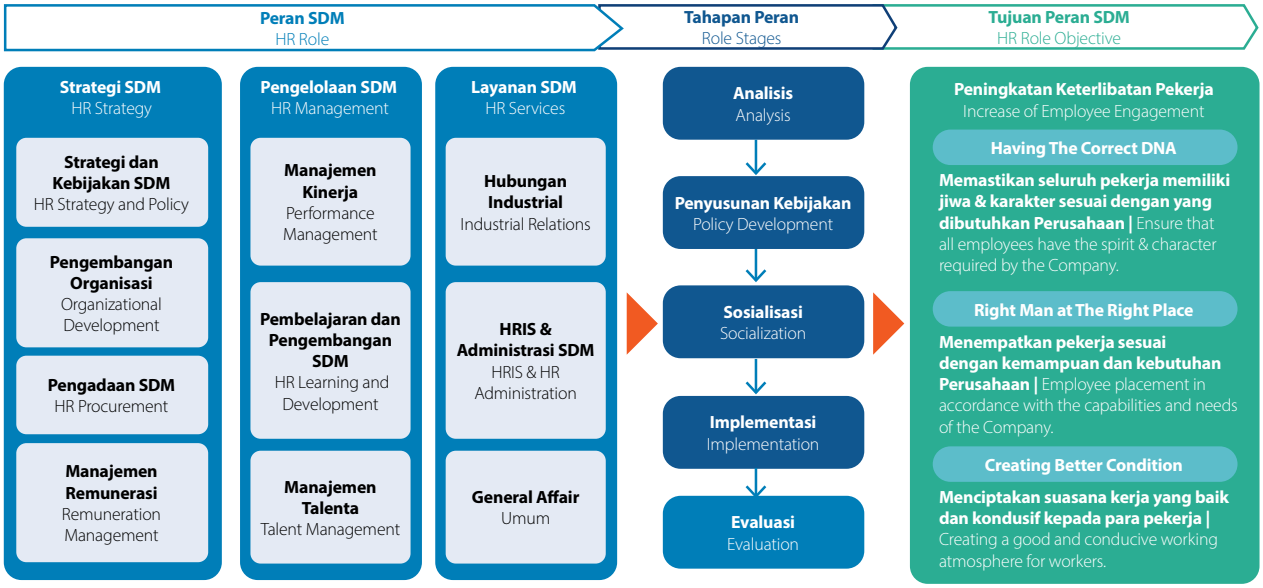

Program Strategis 2024

Langkah strategis yang diambil Perusahaan khususnya dalam pengelolaan SDM disusun oleh unit yang menjalankan fungsi Strategi SDM, yang berperan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan SDM, Pengembangan Organisasi, Pengadaan SDM, serta Manajemen Remunerasi. Berdasarkan hal tersebut, berikut kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024:

1. Restrukturisasi Organisasi yang dijalankan pada TW 1 Tahun 2024 meliputi penataan kelengkapan organ pengelola risiko dalam upaya Perusahaan untuk menjamin kepatuhan bisnis dijalankan di Perusahaan.
2. Penetapan mengenai ketentuan jam dan hari kerja, ketentuan ijin dan cuti Pekerja, serta perubahan atas penetapan insentif dan bantuan operasional bagi Pekerja.

Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM Perusahaan dilakukan oleh unit yang menjalankan fungsi Pengelolaan SDM, yang mengatur segala kebijakan terkait Manajemen Kinerja, Pembelajaran dan Pengembangan SDM, serta Manajemen Talenta. Berikut kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 terkait implementasi Fungsi Pengelolaan SDM:

1. Pengenalan aplikasi Portaverse sebagai *dashboard* yang akses penggunaannya diberikan juga kepada PT JAI Tbk selaku salah satu Perusahaan Afiliasi Pelindo, yang digunakan dalam menjalankan fungsi pengelolaan SDM, di antaranya:
   a. LMS (*Learning Management System*)
      1. Fitur ini digunakan untuk mengakses pelatihan baik secara berbayar maupun gratis;
      2. Setiap Pekerja Penugasan Pelindo mendapatkan saldo senilai Rp 3.500.000,00 tiap tahunnya untuk mengakses pelatihan dalam Portaverse;

Strategic Program in 2024

The strategic steps from the Company, particularly in Human Resource management, are formulated by the unit responsible for HR Strategy, which plays a key role in determining HR Strategies and Policies, Organizational Development, HR Procurement, and Remuneration Management. Based on this, the following activities were carried out throughout 2024:

1. Organizational Restructuring, scheduled for Q1 2024, which includes the arrangement of the risk management team to ensure the Company's business compliance.
2. The establishment of regulations regarding working hours and days, employee leave policies, and changes in the determination of incentives and operational assistance for employees.

HR Management

The Company's HR Management is carried out by the unit running the HR Management function, which oversees all policies related to Performance Management, Learning and HR Development, and Talent Management. The following are the activities carried out throughout 2024 in relation to the implementation of the HR Management Function:

1. Introduction of Portaverse application as a dashboard whose access is also given to PT JAI Tbk as one of Pelindo's Affiliated Companies, which is used in carrying out HR management functions, including:

   a. LMS (Learning Management System)
      1. This feature is used to access both paid and free training programs;
      2. Each Pelindo Secondment Employee receives an annual balance of Rp3,500,000 to access training through Portaverse;

3. Setiap Pekerja Penugasan Pelindo memiliki KPI untuk mencapai 50 jam belajar (*learning hour*) dalam tahun 2024;
4. Pekerja yang mengikuti pelatihan di luar *dashboard* Portaverse, dapat melakukan klaim *learning hour* sehingga dapat tercatat pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri atau dilaksanakan atas kebutuhan Perusahaan.

b. KMS (*Knowledge Management System*)
1. Fitur ini digunakan untuk bersosialisasi dengan seluruh Pekerja Penugasan Pelindo;
2. Fitur ini terdiri dari: *social media, knowledge map, community of practice, community of interest*, dan *ask the expert*;
3. Setiap aktivitas yang dilakukan dalam fitur ini akan mendapatkan poin.

c. TMS (*Talent Management System*)
1. Fitur ini digunakan untuk mengelola kinerja individu pekerja yang terdiri dari KPI Individu dan Penilaian Perilaku;
2. Perusahaan mulai menggunakan fitur ini pada Triwulan IV tahun 2024 sebagaimana *timeline* yang telah disampaikan oleh Sub-holding Pelindo Jasa Maritim;
3. Periode *monitoring* KPI dilakukan baik secara triwulanan, semesteran dan tahunan;
4. Dalam hal nilai akhir atas kinerja individu, perlu dilakukan kalibrasi di tiap unit kerja.

2. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja SDM secara objektif dan transparan. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan sebagai tinjauan untuk menentukan pengembangan dan strukturisasi kebutuhan organisasi. Adapun proses penilaian kinerja yang dilakukan Perusahaan terlebih dahulu dilakukan penentuan KPI Perusahaan yang kemudian didefinisikan ke dalam KPI Direksi, untuk kemudian dilakukan *cascading* ke seluruh Kepala Divisi (VP), Kepala Departemen (DVP) hingga level staf.
3. Terkait Pembelajaran dan Pengembangan SDM, Perusahaan membagi sistem *learning* menjadi 2 (dua), yaitu: *Self Learning* dan *Corporate Learning*. Tujuan dari masing-masing program adalah untuk memberikan pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan *skill* bagi SDM.

a. *Self learning* yaitu pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dan dapat dilakukan klaim *learning hour* pada Portaverse secara mandiri sehingga tercatat historinya;

b. *Corporate learning* terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

i. *Experiential Learning*
Perusahaan telah menerapkan *job assignment* kepada beberapa pekerja sebagai pelaksana tugas baik pada posisi struktural maupun *general*.

3. Each Pelindo Secondment Employee has a KPI target of completing 50 learning hours in 2024;
4. Employees who participate in training outside the Portaverse dashboard may claim learning hours to record training conducted independently or as required by the Company.

b. KMS (Knowledge Management System)
1. This feature is used to socialize with all Pelindo Secondment Employees;
2. The feature includes: social media, knowledge map, community of practice, community of interest, and ask the expert;
3. Every activity conducted within this feature will earn points.

c. TMS (Talent Management System)
1. This feature is used to manage individual employee performance, consisting of Individual KPIs and Behavioral Assessment;
2. The Company began using this feature in the fourth quarter of 2024, in accordance with the timeline provided by the Pelindo Jasa Maritim Sub-holding;
3. KPI monitoring is conducted on a quarterly, semi-annual, and annual basis;
4. Final performance scores for individuals must be calibrated within each work unit.

2. The Company conducts evaluations of human resource performance objectively and transparently. The results of these assessments are used as a reference by the Company to determine development initiatives and organizational structuring needs. The performance appraisal process begins with the establishment of Company KPIs, which are then defined into KPIs for the Board of Directors, which then cascaded to all Division Heads (VP), Department Heads (DVP), and down to staff level.
3. Regarding Learning and Development, the Company divides the learning system into 2 (two) categories: Self Learning and Corporate Learning. The objective of each program is to enhance the capabilities, knowledge, and skills of human resources.

a. Self-learning refers to learning conducted independently, where employees can independently claim their learning hours on Portaverse so that the history is recorded.

b. Corporate learning consists of 3 (three) aspects:

i. Experiential Learning
The Company has implemented job assignments for several employees to act as interim task executors in both structural and general positions.

ii. *Social Learning*
- Perusahaan telah menerapkan *coaching* dan *mentoring* pada sesi penilaian KPI Individu dari atasan ke bawahan secara *one on one*;
- Perusahaan telah melaksanakan beragam sesi *knowledge sharing* seperti JANGKAR (JAI Ngajak Bicara), CWS Learning, dan Evaluasi Akhir Tahun;
- Pekerja dapat melakukan *posting knowledge* pada fitur KMS Portaverse.

iii. *Structured Learning*
- Perusahaan melakukan pelatihan kepada Pekerja menyesuaikan kebutuhan Perusahaan baik *soft skill* maupun *hard skill*;
- Pekerja Perusahaan, khususnya Pekerja Penugasan Pelindo mendapatkan minimal 1 (satu) pelatihan tiap tahunnya;

4. Manajemen Talenta dilakukan dengan melakukan pendefinisian Top *Talent Millenials, Top Talent* Perempuan, *High Potential Talent* dan *Promotable Talent*. Pendefinisian ini berdasarkan kelas jabatan, jabatan, usia, gender dan hasil kalibrasi skor KPI tahun 2024.
5. Bentuk penghargaan lain atas kinerja baik dalam Perusahaan, dilakukan IPCM Award 2024 dengan memberikan award dengan kategori *Best Employee, Best Division, Best Area, Best Fleet, Best Crew, Best Digital Content Creator, Best Innovation*.

Layanan SDM

Perusahaan senantiasa memperhatikan setiap kebutuhan pekerja melalui Fungsi Layanan SDM, yang memiliki peran dalam Hubungan Industrial, HRIS dan Administrasi SDM, serta Umum. Adapun berikut hal-hal yang telah dilaksanakan Fungsi Layanan SDM di tahun 2024:

1. Dalam kaitannya dengan hubungan Industrial, hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan SDM memainkan peran kunci dalam perjalanan Perusahaan meraih kesuksesan. Keterlibatan antara manajemen dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif, diwujudkan melalui keberadaan serikat pekerja di lingkungan Perusahaan. Adanya dialog terbuka serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dalam bentuk Leadership Improvement Workshop telah menjadi prioritas, dalam mendukung pertumbuhan

ii. Social Learning
- The Company has implemented coaching and mentoring during individual KPI assessments in one-on-one sessions between supervisors and subordinates;
- The Company has conducted various knowledge-sharing sessions such as JANGKAR (JAI Ngajak Bicara), CWS Learning, and Year-End Evaluations;
- Employees can post knowledge through the KMS feature on Portaverse.

iii. Structured Learning
- The Company conducts training for employees according to the Company's needs, covering both soft skills and hard skills;
- Company employees, especially Pelindo Secondment Employees, receive a minimum of one (1) training session per year.

4. Talent Management is carried out by defining Top Talent Millennials, Top Female Talent, High Potential Talent, and Promotable Talent. These definitions are based on job grade, position, age, gender, and the calibrated KPI scores for 2024.
5. As a form of appreciation for good performance within the Company, the IPCM Award 2024 was held, presenting awards in the categories of Best Employee, Best Division, Best Area, Best Fleet, Best Crew, Best Digital Content Creator, and Best Innovation.

HR Services

The Company consistently addresses the needs of its employees through the Human Capital Services Function, which plays a role in Industrial Relations, HRIS and HR Administration, and General Affairs. The following are the initiatives carried out by the Human Capital Services Function in 2024:

1. In terms of Industrial Relations, the harmonious relationship between the Company and its human resources plays a key role in the Company's journey toward success. Engagement between management and employees in creating a stable and productive work environment is manifested through the existence of a labor union within the Company. Open dialogue and effective conflict resolution mechanisms contribute significantly to increased productivity and employee well-being. Additionally, initiatives to strengthen employee skills and capacity in the form of Leadership Improvement Workshop have become a priority in supporting the Company's sustainable growth. The continuity of healthy industrial relations forms a solid

berkelanjutan Perusahaan. Kesinambungan hubungan industrial yang sehat menjadi landasan bagi pencapaian tujuan Perusahaan dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang.

2. Implementasi *Human Resource Information System* di Perusahaan dilakukan dengan implementasi beberapa sistem yang berjalan di Pelindo diantaranya: PEO sebagai dashboard korespondensi Perusahaan, Portaverse, SAP dan aplikasi surrounding.
3. Layanan kesehatan pekerja turut menjadi fokus Perusahaan demi memastikan Pekerja dalam kondisi sehat sehingga dapat bekerja dengan optimal. Beberapa program dilaksanakan diantaranya: *fit to work* kepada pekerja operasional, *medical check up*, dan evaluasi layanan kesehatan yang lebih baik lagi. Sampai saat ini pelaksanaan *monitoring* kesehatan pekerja bekerja sama dengan PT Rumah Sakit Pelabuhan.
4. Program pendukung *wellbeing* pekerja lainnya yaitu pelaksanaan olahraga yang rutin dilaksanakan seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, futsal dan golf; pelaksanaan *employee gathering*; kajian keagamaan, dan talkshow seputar *wellness* sehingga dapat meningkatkan ss pekerja pada Perusahaan.

Proses Rekrutmen

Seiring dengan perkembangan Perusahaan, menemukan individu yang tepat untuk mengisi berbagai peran menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Sebagai upaya memastikan hal tersebut, Perusahaan menerapkan serangkaian langkah seleksi yang dirancang untuk menyaring kandidat terbaik, tidak hanya berdasarkan keterampilan dan pengalaman, tetapi juga kesesuaian dengan budaya serta visi Perusahaan. Proses rekrutmen Perusahaan berpedoman pada surat SOP PT Jasa Armada Indonesia Tbk Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Pekerja Nomor: SOP-SDBP-01 yang kemudian dilaksanakan sebagaimana berikut:

1. Unit kerja mengajukan permohonan kebutuhan pekerja ke Direktur keuangan dan SDM;
2. SDM menentukan sumber dan metode rekrutmen;
3. Publikasi melalui tiga metode headhunter, Penugasan Pelindo, dan perusahaan penyedia Tenaga kerja;
4. Koordinasi antar unit kerja;
5. Hasil seleksi ke Direktur Keuangan dan SDM;
6. Dokumentasi administrasi pekerja (Surat Perjanjian Kerja).

Penilaian Kinerja

Perusahaan melakukan penilaian terhadap kinerja SDM secara sistematis untuk mengukur produktivitas dan kontribusi pekerja. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menilai pencapaian kerja, tetapi juga sebagai dasar

foundation for achieving corporate goals and long-term growth.

2. The implementation of the Human Resource Information System in the Company is carried out by utilizing several systems in use at Pelindo, including: PEO as the Company's correspondence dashboard, Portaverse, SAP, and surrounding applications.
3. Employee health services are also a focus of the Company to ensure that employees are in optimal health to perform their duties effectively. Several programs were implemented, including fit-to-work assessments for operational employees, medical check-ups, and evaluations to further improve health services. Health monitoring continues to be carried out in collaboration with PT Rumah Sakit Pelabuhan (Harbor Hospital).
4. Other well-being support programs for employees include regular sports activities such as badminton, tennis, table tennis, futsal, and golf; employee gatherings; religious study sessions; and wellness-themed talk shows, all aimed at enhancing employees' sense of belonging to the Company.

Recruitment Process

As the Company continues to grow, finding the right individuals to fill various roles is a key factor in ensuring business continuity and growth. To ensure this, the Company implements a series of selection steps designed to filter the best candidates, not only based on skills and experience but also alignment with the Company's culture and vision. The recruitment process is guided by PT Jasa Armada Indonesia Tbk's SOP on Recruitment and Selection Procedures Number: SOP-SDBP-01, and is carried out as follows:

1. Work unit submits a workforce request to the Director of Finance and Human Resources;
2. HR determines the recruitment sources and methods;
3. Publication using three methods: headhunters, Pelindo Secondment, and labor service providers;
4. Coordination between work units;
5. Selection results are submitted to the Director of Finance and HR;
6. Administrative documentation of employees (Employment Agreement Letter).

Performance Assessment

The Company conducts a systematic assessment of employee performance to measure productivity and contribution. The evaluation is not only intended to review work achievements but also serves as a basis for career development decisions,

dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier, pelatihan, serta *benefit* terhadap karyawan berprestasi. Proses penilaian kinerja karyawan yang dilakukan Perusahaan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Adapun pengisian KPI dilakukan melalui sistem Portaverse.

Kebijakan Pemberian Penghargaan

Penghargaan terhadap kinerja dan dedikasi pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan kebijakan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi yang diberikan. Pemberian penghargaan oleh Perusahaan salah satunya melakukan pemberian Insentif bagi Pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Kebijakan yang Mengatur Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan telah memiliki kebijakan yang jelas untuk memastikan kesejahteraan pekerja, mencegah risiko kecelakaan, dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman. Kebijakan yang dimaksud mengatur tentang keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, serta informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja, sesuai dengan Kebijakan Mutu & SMK3L PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang disahkan Oktober 2019 dan Manual Sistem Manajemen QHSSE No. Dok: MANUAL-JAI-01 No. Rev: 01 tanggal efektif 1 Oktober 2015, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga yang tercantum dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No HK.568/20/1/2/PI.II-17 tentang Penghasilan non bulanan bagi pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 20 Januari 2017.

Khususnya di tahun 2024, Perusahaan memperkuat komitmennya dalam memastikan kenyamanan lingkungan kerja melalui Peraturan Direksi No.HK.01/25/2/ARD/DUT/JAI-24 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Hubungan Industrial

Keberhasilan yang diraih oleh Perusahaan diawali oleh hubungan sinergis yang baik antara manajemen dan pekerja. Jalinan yang kokoh tersebut dibangun melalui keberadaan serikat pekerja di lingkungan Perusahaan, yang berfungsi sebagai representasi pekerja dalam mengutarakan aspirasinya. Perusahaan selalu berupaya menjaga komitmen menindaklanjuti isu yang ada, melalui dialog terbuka serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan

training, and rewarding high-performing employees. Employee performance assessment is based on the Key Performance Indicators (KPIs). KPI submission is carried out through the Portaverse system.

Reward Policy

Acknowledging employee performance and dedication is a crucial factor in creating a productive work environment. Therefore, the Company implements a reward policy as a form of appreciation for employee contributions. One form of appreciation given by the Company is the provision of incentives to employees in accordance with the applicable regulations within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Policies Governing Occupational Health and Safety

The Company has established clear policies to ensure employee well-being, prevent accidents, and promote a safe work environment. These policies cover work safety, K3 (or "OHS") management, OHS certification, workplace health facilities, and information about potential workplace hazards. These are aligned with the Quality & SMK3L Policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (ratified in October 2019), and the QHSSE Management System Manual No. Doc: MANUAL-JAI-01 Rev. No: 01, effective from October 1, 2015. Health insurance for employees and their families is stipulated in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors' Decree No. HK.568/20/1/2/PI.II-17 on Non-Monthly Income for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dated 20 January 2017.

Particularly in 2024, the Company strengthened its commitment in ensuring the comfort of the work environment through the Board of Directors Regulation No.HK.01/25/2/ARD/DUT/JAI-24 dated October 25, 2024 concerning Guidelines for Integrated Management System within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Industrial Relations

The Company's success is built upon a strong, synergistic relationship between management and employees. This is fostered through the presence of labor unions that represent employee voices within the Company. The Company remains committed to addressing any emerging issues through open dialogue and effective conflict resolution mechanisms to enhance productivity and employee welfare. Moreover, employees are given opportunities to expand their capabilities, particularly on industrial relations

bagi pekerja untuk memperluas kapabilitasnya, terutama pada kompetensi hubungan industrial berupa workshop dan sertifikasi. Perusahaan dapat memastikan stabilitas operasional, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif dan saling menghargai.

Program Pensiun

Sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa yang telah diberikan selama masa kerja, Perusahaan memiliki program pensiun sebagai upaya dalam memastikan kesejahteraan pekerja dalam masa purnabakti, sehingga mereka dapat menjalani masa pensiun dengan tenang dan aman. Perusahaan memberikan fasilitas sesuai dengan aturan terkait program pensiun yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERUSAHAAN

Seiring dengan perkembangan bisnis dan tuntutan industri, Perusahaan terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui berbagai program pelatihan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Pengembangan tersebut bertujuan untuk membekali pekerja dengan *skill* yang lebih kompleks dan menempa keterampilan yang sudah dimiliki. Maka dari itu, Perusahaan menyusun strategi baik jangka pendek hingga jangka panjang untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan, memastikan adanya penerus yang *capable*, dan merancang rencana karier yang dapat mengoptimalkan potensi pekerja.

Kebijakan Mengenai Program Pelatihan bagi Pekerja

Perusahaan menyediakan 2 (dua) jenis program pendidikan dan pelatihan, antara lain *Self Learning* dan *Corporate Learning*. Masing-masing program memberikan peluang bagi pekerja untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya. Program *Self Learning* dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Portaverse. Sedangkan, program *Corporate Learning* diadakan secara *hybrid* baik reguler maupun *workshop*.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan dan pengembangan kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Program pelatihan terstruktur yang disajikan, memberikan peluang bagi pekerja untuk mengasah keterampilan teknis maupun *soft skills* yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Selain itu, pengembangan kompetensi juga mendorong inovasi, adaptabilitas, serta kesiapan pekerja dalam menghadapi perubahan dan tuntutan industri. Dengan demikian, Perusahaan tidak hanya membangun tenaga kerja yang unggul, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

through workshop and certification. By maintaining good industrial relations, the Company ensures operational stability, enhances employee engagement, and cultivates a collaborative and respectful work culture.

Pension Program

As a token of appreciation for the services rendered during employment, the Company provides a retirement program aimed at ensuring the welfare of employees during retirement, enabling them to enjoy peace of mind and security. The Company provides facilities in accordance with the applicable pension program regulations within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

COMPANY HR DEVELOPMENT PROGRAM

In line with business growth and industry demands, the Company continuously enhances employee competencies through various training programs held throughout 2024. These development efforts aim to equip employees with more complex skills and strengthen existing capabilities. Thus, the Company has devised both short- and long-term strategies to prepare future leaders, ensure a capable succession pipeline, and design career paths that maximize employee potential.

Policies on Employee Training Program

The Company provides 2 (two) types of education and training programs, among others Self Learning and Corporate Learning. Each program offers opportunities for employees to develop their abilities, knowledge, and skills. Self Learning is conducted online via the Portaverse application, while Corporate Learning is conducted in hybrid formats, including regular classes and workshops.

Training Objectives

The goal of training and competency development is to enhance the quality of Human Resources to better adapt to the dynamic demands of the work environment. Structured training programs offer employees the opportunity to refine both technical and soft skills needed to boost productivity and performance. Furthermore, competency development fosters innovation, adaptability, and readiness to face industry challenges. Thus, the Company not only builds a superior workforce but also creates a more competitive and sustainable workplace.

Peserta Pelatihan

Terhitung per 31 Desember 2024, Perusahaan telah melaksanakan program pelatihan sebanyak 26 jenis kegiatan. Seluruh kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh peserta dengan jumlah 249 orang.

Training Participants

As of December 31, 2024, the Company conducted 26 training activities, with a total of 249 participants.

Biaya Pelatihan

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah melakukan investasi dalam pengembangan SDM dengan total biaya sebesar Rp983.571.982. Adapun jenis pelatihan yang diadakan Perusahaan mencakup bidang Sekretaris Perusahaan, Hukum, Pengawas Internal, Transformasi & Pengembangan Bisnis, Komersial, Armada, QHSSE, Operasi & DPA, Sumber Daya Manusia & Umum, Keuangan, Manajemen Risiko, Pengadaan/ *Procurement, Fundamental/General*.

Training Costs

Throughout 2024, the Company invested a total of Rp983,571,982 in human capital development. Training programs covered areas such as Corporate Secretary, Legal, Internal Supervision, Transformation & Business Development, Commercial, Fleet, QHSSE, Operations & DPA, Human Resources & General Affairs, Finance, Risk Management, Procurement, and Fundamental/General.

Tabel Biaya Pelatihan Pekerja Tahun 2024 (dalam Rupiah)

Employee Training Costs in 2024 (in Rupiah)

No	Jenis Diklat Training Type	2024
Teknik Substansial Substantial Technique		
1	Bidang Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	48.385.270
2	Bidang Hukum Legal	43.263.468
3	Bidang Pengawas Internal Internal Control	62.513.468
4	Bidang Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation & Development	46.343.603
5	Bidang Komersial Commerce	63.843.603
6	Bidang Armada dan QHSSE Fleet and QHSSE	71.765.675
7	Bidang Operasi & DPA Operation & PDA	524.699.546
8	Bidang SDM & Umum HR & General Affair	56.113.071
9	Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management	51.817.341
10	Bidang Pengadaan Procurement	14.826.937
JUMLAH TOTAL		**983.571.982**

Tabel Biaya Pelatihan Pekerja Tahun 2023 (dalam Rupiah)

Employee Training Costs in 2023 (in Rupiah)

No	Jenis Diklat Training Type	2023
Teknik Substansial Substantial Technique		
1	Bidang Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	19.700.000
2	Bidang Hukum Legal	42.565.000
3	Bidang Pengawas Internal Internal Control	11.950.000
4	Bidang Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation & Development	14.750.000
5	Bidang Komersial Commerce	17.700.000
6	Bidang Armada dan QHSSE Fleet and QHSSE	53.790.820
7	Bidang Operasi & DPA Operation & PDA	284.323.280
8	Bidang SDM & Umum HR & General Affair	29.577.002
9	Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management	9.600.000
10	Bidang Pengadaan Procurement	2.950.000
JUMLAH TOTAL		**844.741.699**

RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

Perusahaan senantiasa berupaya untuk melakukan *improvement* dalam fungsinya untuk mengelola dan mengembangkan SDM sebagai aset Perusahaan yang harus dijaga dan dioptimalkan melalui Rencana Pengelolaan dan Pengembangan SDM yang lebih baik kedepannya, khususnya dalam Penyusunan Kamus Kompetensi sebagai dasar pengembangan SDM serta Pengelolaan *Talent* Perusahaan.

FUTURE HR MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PLAN

The Company continuously strives to improve its function in managing and developing human resources as valuable assets that must be preserved and optimized through a better Human Resource Management and future Development Plan, particularly in the development of a Competency Dictionary as a foundation for HR development and Talent Management within the Company.

Teknologi Informasi

Information Technology

Teknologi Informasi (TI) memiliki peran strategis dalam mendukung operasional Perusahaan dalam menyediakan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Indonesia. Penerapan sistem TI yang optimal dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan lalu lintas kapal, *monitoring* armada, serta koordinasi dengan pelabuhan dan pihak terkait. Selain itu, TI juga berperan dalam mendukung berbagai proses bisnis, seperti pemantauan real-time, manajemen sumber daya, serta analisis kinerja operasional, sehingga dapat mengurangi risiko operasional dan meningkatkan profitabilitas Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan TI guna mendukung keunggulan operasional, meningkatkan standar layanan, serta memastikan ketepatan dan keandalan dalam setiap aspek bisnis.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan yang disusun secara terstruktur, demi memastikan efisiensi dan keamanan pada infrastruktur yang dimiliki. Kebijakan yang diterapkan Perusahaan berfokus pada pemeliharaan serta implementasi prosedur pengelolaan sistem. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan program pelatihan pekerja di bidang keamanan informasi serta pengelolaan data secara bijaksana sebagai upaya untuk menjaga keamanan (*Security*) dan kerahasiaan (*Confidentiality*) data Perusahaan.

Perusahaan melakukan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas dari pengelolaan TI, seiring dengan perkembangan teknologi yang dimiliki serta perubahan dinamika bisnis. Oleh karena itu, strategi pengelolaan TI Perusahaan tidak hanya berperan sebagai penunjang kegiatan operasional, tetapi juga sebagai aspek vital dalam menjaga kredibilitas, efektivitas, dan keberlanjutan Perusahaan di tengah perkembangan industri.

Information Technology (IT) plays a strategic role in supporting the Company's operations in providing pilotage and towage services across Indonesian waters. The optimal implementation of IT systems helps improve efficiency and accuracy in managing vessel traffic, fleet monitoring, as well as coordination with ports and relevant stakeholders. In addition, IT supports various business processes such as real-time monitoring, resource management, and operational performance analysis, thereby reducing operational risks and increasing the Company's profitability. Thus, the Company is committed to strengthening IT management to support operational excellence, improve service standards, and ensure accuracy and reliability in every aspect of the business.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT POLICY

The Company's IT system management is guided by a structured policy to ensure efficiency and security of its infrastructure. The policy focuses on system maintenance and the implementation of proper management procedures. In addition, the Company provides employee training programs related to information security and responsible data management, as part of efforts to safeguard the Security and Confidentiality of Company data.

The Company regularly evaluates the effectiveness of its IT management in line with technological advancements and dynamic business changes. Therefore, the Company's IT strategy not only supports operational activities but also serves as a vital aspect in maintaining the Company's credibility, effectiveness, and sustainability amid industry developments.



ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah menetapkan roadmap pengembangan TI sebagai panduan strategis dalam mengoptimalkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung inovasi bisnis. Maka, sepanjang tahun 2024 Perusahaan telah menjalani berbagai langkah strategis, yang meliputi:

1. Implementasi ERP SAP & *Surrounding*
2. *Journey to Cloud*
3. Konsolidasi & *Enhancement* Aplikasi Layanan Kapal
4. Operation Survillence (CCTV, *Vessel Tracking*) Cabang Banten

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

The Company has established an IT development roadmap as a strategic guide to optimize infrastructure, enhance operational efficiency, and support business innovation. Throughout 2024, the Company has implemented several strategic initiatives, including:

1. Implementation of SAP ERP & Surrounding Systems
2. Journey to Cloud
3. Consolidation & Enhancement of Vessel Service Applications
4. Operational Surveillance (CCTV, Vessel Tracking) at Banten Branch

Organisasi Pengelola Teknologi Informasi
Information Technology Management Organization

No	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Total		Kapasitas Capacity	
		Organik Organic	Non-Organik Non-Organic	Support Apps	Support Hardware
1	VP Transformasi & Pengembangan Bisnis VP of Business Transformation & Development	1	-	-	-
2	DVP Sistem Informasi DVP of Information System	1	-	-	-
3	Pelaksana Junior Sistem Informasi Junior Officer of Information System	-	1	-	1
JUMLAH TOTAL		**2**	**1**	**0**	**1**

KINERJA TI TAHUN 2024

Perusahaan telah menetapkan *roadmap* pengembangan TI sebagai panduan strategis dalam mengoptimalkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung inovasi bisnis. Maka, sepanjang tahun 2024 Perusahaan telah menjalani berbagai langkah strategis, yang meliputi:

1. **Implementasi ERP SAP & *Surrounding***
   Single ERP menjadi salah satu *tools* untuk Standardisasi Proses dan Kebijakan, melalui standar integrasi *surrounding* dan *Single* ERP, untuk Aplikasi *Surrounding* (seperti SIMOP JAI, CSS, Peo, PProc), entitas di bawah Pelindo group dapat menggunakan sistem yang *competitive* mengikuti standar yang digunakan Pelindo.

IT PERFORMANCE IN 2024

The Company has established an IT development roadmap as a strategic guide to optimize infrastructure, enhance operational efficiency, and support business innovation. Accordingly, throughout 2024, the Company has undertaken various strategic initiatives, including:

1. **Implementation of SAP ERP & Surrounding Systems**
   Single ERP serves as a tool for standardizing processes and policies through standardized integration with surrounding systems and Single ERP. With this approach, surrounding applications (such as SIMOP JAI, CSS, Peo, PProc) enable entities under the Pelindo Group to utilize a competitive system aligned with Pelindo's standards.

Aplikasi ERP SAP PT Jasa Armada Indonesia
SAP ERP Application of PT Jasa Armada Indonesia

SAP IMPLEMENTATION SCOPE & DATA OWNERSHIP

FI (Financial Accounting)	CO (Controlling)	MM (Materials Management)	Human Capital Management	SAP Process Orchestrations – Middleware Surrounding
• General Ledger (Parallel Currency, Parallel Ledger/ Accounting) • Accounts Payable • Accounts Receivable • Fixed Asset Accounting • Bank & Tax Accounting	• Overhead Cost Controlling Cost Element, Cost Center, Internal Order • Profitability Analysis • Profit Center Accounting • CO Reporting and Embedded Analytics	• Consumption based Planning (Materials Planning) • Purchasing • Inventory Management • External Services Management • Logistics Invoice Verification	• Personnel Administration • Organization, Time & Travel Management • Personnel Cost Planning • Payroll (Indonesia specific Localization) • ESS (Employee Self-Service)	**Integrasi Vessel System (SIMOP Nota Rekap & TUKS JAI), AKBI dan Front-End Apps lainnya pada Pelindo ERP SAP** Integration of Vessel System (SIMOP Nota Rekap & TUKS JAI), AKBI and other Front-End Apps on Pelindo ERP SAP
Group Akuntansi, Layanan Keuangan & Perpajakan dan PengelolaanKeuangan Accounting, Financial Services & Taxation and Financial Management Group	**Group Akuntansi dan Anggaran & Pelaporan** Accounting and Budget & Reporting Group	**Group Pengadaan dan Perencanaan Investasi** Procurement and Investment Planning Group	**Group Strategi SDM, Layanan SDM dan Pengelolaan SDM** HR Strategy, HR Services and HR Management Group	

Project System	Funds Management	Business Planning & Consolidation	SAP Fiori (UI/UX)	OpenText untuk Digital Document Management
• PS Logistics (WBS, Network, Activity) • PS Accounting (Budget, Cost, Settlement) • PS Reporting and Embedded Analytics	• FM Master Data (Fund Centers and Commitment Items) • Budget Control System (Entry, Revision, Supplement, Transfer, Availability Check)	• Planning & Budgeting • Financial Consolidation	• Mobile user interface untuk Transaksi, Mobile Approval, dan Analytics	**Penyimpanan data digital pada Layanan IT** Digital data storage in IT Services
Group Manajemen Proyek dan Anggaran & Pelaporan, Fasilitas & Peralatan Pelabuhan, dan TIK Project Management and Budget & Reporting, Port Facilities & Equipment, and ICT Groups	**Group Akuntansi dan Anggaran & Pelaporan** Accounting and Budget & Reporting Group	**Group Anggaran & Pelaporan dan Akuntansi** Budget & Reporting and Accounting Group	**Seluruh Group untuk layanan mobile approval dan analytics** Group-wide mobile approval and analytics service	

Aplikasi *surrounding* PT Jasa Armada Indonesia
Surrounding application of PT Jasa Armada Indonesia

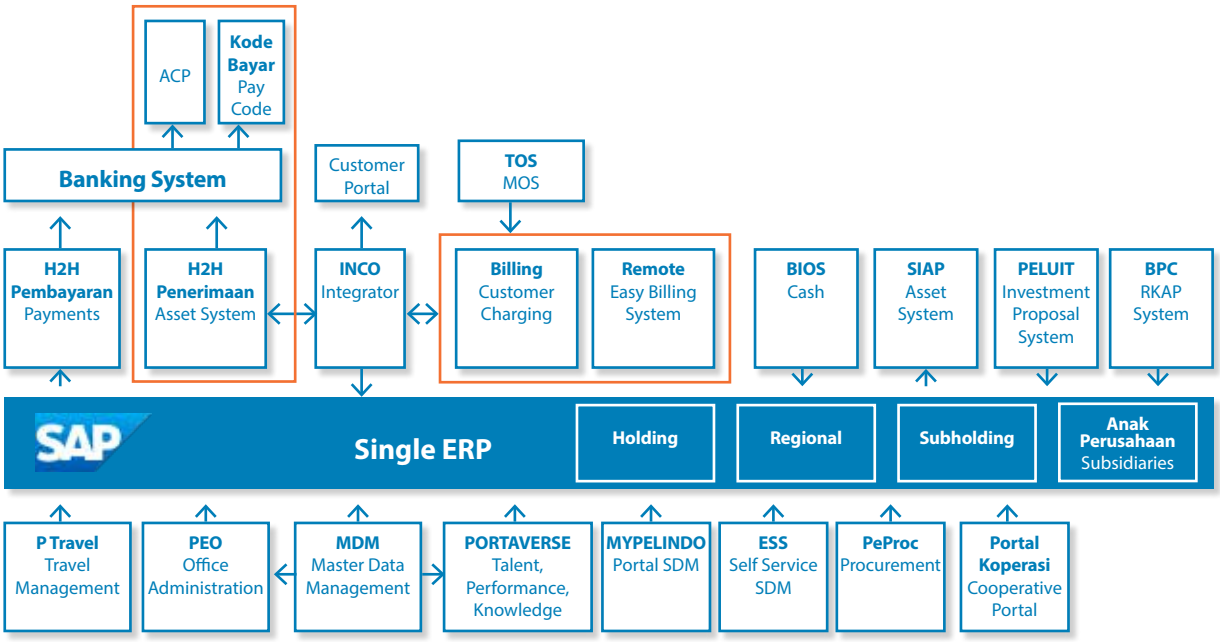

2. ***Journey to Cloud***
Migrasi server ke Cloud adalah proses memindahkan data, aplikasi, dan layanan dari infrastruktur *on-premise* (lokal) PT Jasa Armada Indonesia Tbk ke lingkungan Cloud AWS dan Exabyte. Proses ini dapat meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi operasional. Adapun Aplikasi lokal PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang sudah dimigrasikan ke lingkungan Cloud adalah:

- Aplikasi SIMOP Kapal Jai
- Portal *Customer Self Service* (CSS)
- Database Aplikasi AMOS
- Aplikasi ISM Code

3. **Konsolidasi & *Enhancement* Aplikasi Layanan Kapal JAI**
Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Operasional Pelayanan Pemanduan dan Penundaan PT Jasa Armada Indonesia Tbk (SIMOP JAI) dengan diberlakukannya:
a. Sistem pelayanan E-Payment direct *host to host* Bank dengan menggunakan kode bayar.
b. Sistem Auto Collection di Unit Operasi Patimban. Auto Collection adalah Layanan pembayaran yang terintegrasi dengan ERP nasabah Principal. Layanan ini memiliki fitur autodebit dan blokir dana.

2. **Journey to Cloud**
The migration of servers to the Cloud is the process of transferring data, applications, and services from PT Jasa Armada Indonesia Tbk's on-premises infrastructure to the AWS and Exabyte Cloud environment. This migration enhances scalability, flexibility, and operational efficiency. The following local applications of PT Jasa Armada Indonesia Tbk have been migrated to the Cloud environment:
- SIMOP Kapal Jai application
- Customer Self Service (CSS) Portal
- AMOS Application Database
- ISM Code Application

3. **Consolidation & Enhancement of JAI Vessel Service Applications**
Development of the Operational Management System for Pilotage and Towage Services (SIMOP JAI) includes the implementation of:
a. An E-Payment system with direct host-to-host integration with banks using a payment code.
b. An Auto Collection system at the Patimban Operations Unit. Auto Collection is a payment service integrated with the ERP system of Principal clients. This service features auto-debit and fund-blocking functionalities.

4. **Operation Surveillance (CCTV, *Vessel Tracking*) Cabang Banten**
   Pemasangan CCTV Di kapal - Kapal Tunda yang beroperasi di cabang Banten. Pemasangan CCTV ini bertujuan untuk mengawasi operasional pergerakkan kapal tunda sehingga mempunyai histori *Track Record* sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan *safety & operation*.

PENGENDALIAN KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER

Ketahanan dan keamanan Siber memiliki keterkaitan erat dalam memastikan perlindungan terhadap aset digital dan operasional Perusahaan. Keduanya diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) sistem TI yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Perusahaan. Sebagai upaya dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Perusahaan terus memperkuat strategi ketahanan dan keamanan siber untuk memastikan kelangsungan bisnis dari potensi gangguan (*cyberattack*) yang dapat menghambat pertumbuhan.

AUDIT TI

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi terhadap penerapan pengelolaan TI secara sistematis, yang mencakup pemeriksaan terhadap sistem, infrastruktur, dan prosedur yang terkait dengan Teknologi Informasi. Audit TI yang dilakukan Perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, menilai efisiensi sistem, serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan telah mendukung pencapaian tujuan bisnis secara optimal. Berikut hal-hal yang dipastikan Perusahaan dalam melaksanakan audit TI:

1. Mencegah adanya risiko kebocoran data;
2. Menekan kerugian akibat kesalahan proses perhitungan;
3. Menekan kerugian akibat kehilangan data;
4. Meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan;
5. Tingginya investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
6. Mencegah adanya penyalahgunaan komputer.

PENGEMBANGAN SDM BIDANG TI

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak menyelenggarakan pelatihan khusus di bidang Teknologi Informasi (TI) seiring dengan kebijakan strategis Perusahaan dalam mengadopsi sistem *managed service* untuk pengelolaan infrastruktur dan operasional TI. Pendekatan ini memungkinkan Perusahaan untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis inti, efisiensi operasional, dan percepatan transformasi digital tanpa mengesampingkan kualitas layanan TI yang andal dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

4. **Operation Surveillance (CCTV, Vessel Tracking) of Banten Branch**
   Installation of CCTV on tugboats operating in the Banten branch area. This CCTV installation aims to monitor the operational movement of tugboats and provide a historical track record that can be used for safety and operational needs.

CYBER RESILIENCE AND SECURITY MANAGEMENT

Cyber resilience and security play a crucial role in protecting the Company's digital assets and operations. These practices are implemented to safeguard the confidentiality, integrity, and availability of IT systems that support Company operations. In response to increasingly complex cyber threats, the Company continuously strengthens its cyber resilience and security strategies to ensure business continuity and protect against potential disruptions (cyberattacks) that could hinder growth.

IT AUDIT

The Company conducts systematic evaluations of its IT management practices, including assessments of systems, infrastructure, and procedures related to Information Technology. The purpose of these audits is to identify potential risks, evaluate system efficiency, and ensure that the technologies in use effectively support the achievement of business goals. The IT audits focus on the following aspects:

1. Preventing data breaches;
2. Minimizing losses due to calculation errors;
3. Preventing data loss;
4. Reducing errors in decision-making;
5. Addressing high investments in computer hardware and software;
6. Preventing computer misuse

HR DEVELOPMENT IN THE IT SECTOR

Throughout 2024, the Company did not conduct any specific training in the field of Information Technology (IT) in line with its strategic policy of adopting a managed service system for the management of IT infrastructure and operations. This approach allows the Company to focus more on core business development, operational efficiency, and accelerating digital transformation without compromising the quality of IT services, ensuring they remain reliable and adaptable to the evolving needs of the business.

INVESTASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan investasi baru dalam pengembangan teknologi informasi, namun tetap menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan TI sebagai penunjang produktivitas dan efisiensi kinerja. Sebagai upaya dalam menjaga kinerja operasional yang andal dan aman, Perusahaan melakukan sejumlah *submission* terhadap layanan dan sistem teknologi informasi sebagai berikut:

1. **Microsoft Office 365**: Perusahaan mengadopsi Microsoft Office 365 untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas kerja berbasis cloud.
2. **Trend Micro:** Investasi dilakukan pada Trend Micro untuk memperkuat sistem keamanan siber perusahaan.
3. **VPS Cloud Hexabyte**: Penggunaan VPS Cloud Hexabyte mendukung fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur digital.
4. **Zoom Meetings**: Zoom Meetings digunakan untuk mendukung komunikasi daring yang efisien dan efektif.
5. **VPN IP**: VPN IP diimplementasikan untuk memastikan koneksi jaringan yang aman antar lokasi kerja.
6. **PN Client (SASE Connectivity)**: VPN Client dengan SASE meningkatkan keamanan dan akses jaringan berbasis cloud.
7. **Managed Service Interkoneksi**: Layanan interkoneksi terkelola digunakan untuk memastikan konektivitas antar sistem yang andal.
8. **Remote Desktop Service**: Remote Desktop Service memungkinkan akses jarak jauh ke sistem kerja secara aman dan terkontrol.

INVESTMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Throughout 2024, the Company did not make any new investments in information technology development. However, it continued to demonstrate a strong commitment to optimizing IT as a support for productivity and performance efficiency. As part of its efforts to maintain reliable and secure operational performance, the Company carried out several submissions related to information technology services and systems, as follows:

1. **Microsoft Office 365**: The Company adopted Microsoft Office 365 to enhance cloud-based collaboration and work productivity.
2. **Trend Micro**: Investment was made in Trend Micro to strengthen the Company's cybersecurity systems.
3. **VPS Cloud Hexabyte**: The use of VPS Cloud Hexabyte supports flexibility and scalability of digital infrastructure.
4. **Zoom Meetings**: Zoom Meetings was utilized to support efficient and effective online communication.
5. **VPN IP:** VPN IP was implemented to ensure secure network connections between work locations.
6. **VPN Client (SASE Connectivity)**: The VPN Client with SASE improves security and cloud-based network access.
7. **Managed Service Interconnection**: Managed interconnection services are used to ensure reliable system-to-system connectivity.
8. **Remote Desktop Service:** Remote Desktop Service allows for secure and controlled remote access to work systems.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Rencana pengembangan IT sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

FUTURE PLANS FOR IT DEVELOPMENT

IT development plans are outlined as follows:

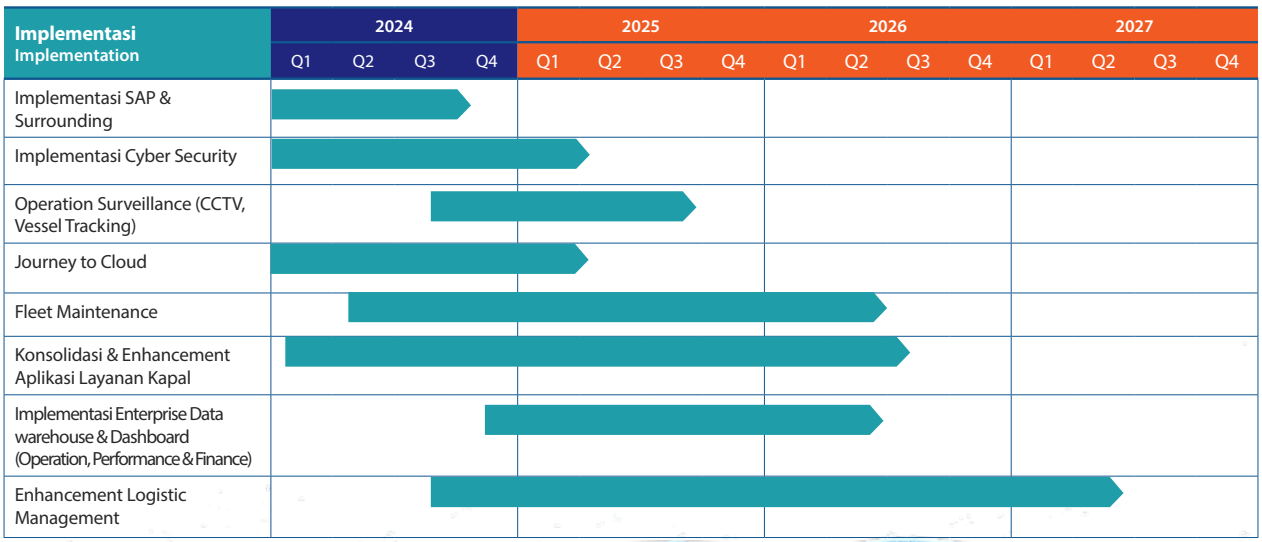

Sistem Manajemen Mutu

Quality Management System

Perusahaan secara aktif melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap aspek lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh area operasional, sesuai dengan regulasi yang berlaku di setiap area operasional. Perusahaan senantiasa memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan prosedur melalui berbagai instrumen pemantauan dan metode pengukuran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah tersebut diambil guna menjaga keselamatan kerja, meminimalkan dampak lingkungan, serta memastikan operasional berjalan dengan aman dan berkelanjutan.

PENGENDALIAN PERALATAN, PEMANTAUAN, DAN PENGUKURAN

Perusahaan melakukan *monitoring* dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk memastikan setiap aspek pada kegiatan operasional dapat berjalan selaras dan optimal. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui penerapan prosedur yang terstruktur, yang mencakup dokumentasi dan analisis data untuk mengukur perkembangan kinerja, menilai efektivitas kontrol operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap sasaran dan standar QHSSE. Perusahaan juga menitikberatkan pada implementasi sistem manajemen QHSSE yang terintegrasi, dengan pendekatan yang proaktif dan adaptif terhadap perubahan. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan keunggulan operasional Perusahaan.

Perusahaan telah menetapkan metode terbaik, termasuk pendekatan berbasis analisis statistik, untuk memastikan penerapannya secara menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan kerja, Perusahaan mengintegrasikan aspek K3 dalam sistem evaluasi yang komprehensif dengan mengadopsi *Integrated Management* System yang mencakup ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan Standar Internasional Pengoperasian Kapal sesuai dengan ISM Code, guna memastikan operasional yang aman sesuai dengan standar internasional. Kemudian, Perusahaan menanamkan standar tersebut melalui sosialisasi informasi yang meliputi:

The Company actively monitors and evaluates environmental aspects as well as Occupational Health and Safety (OHS) across all operational areas, in accordance with the regulations applicable in each area. The Company consistently ensures compliance and effectiveness of procedures through various monitoring instruments and measurement methods aligned with established standards. These measures are taken to maintain workplace safety, minimize environmental impact, and ensure that operations run safely and sustainably.

EQUIPMENT CONTROL, MONITORING, AND MEASUREMENT

The Company conducts monitoring to control risks associated with work activities, ensuring that every aspect of operational activities runs in a coordinated and optimal manner. Additionaly, performance evaluations are carried out regularly through structured procedures, which include documentation and data analysis to measure performance progress, assess the effectiveness of operational controls, and ensure compliance with QHSSE goals and standards. The Company also emphasizes the implementation of an integrated QHSSE management system, using a proactive and adaptive approach to changes. These efforts aim to create a safe, efficient, and productive workplace that supports the Company's sustainability and operational excellence.

The Company has adopted best-practice methods, including a statistics-based analytical approach, to ensure comprehensive implementation. As part of its commitment to improving workplace safety, the Company integrates OHS aspects into a comprehensive evaluation system by adopting an Integrated Management System that includes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018. In addition, the Company applies the International Safety Management (ISM) Code, to ensure safe operations aligned with international standards. The Company reinforces these standards through information dissemination efforts, including:

1. Mencanangkan transformasi Budaya, yang salah satu sasarannya adalah transformasi budaya K3 (*safety first*).
2. Melakukan induksi/pelatihan K3 bagi semua pekerja baru.
3. Memasukkan unsur K3 pada setiap *project* yang dilakukan di Cabang/Anak Perusahaan, minimal implementasi *house-keeping* dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada area wajib APD
4. Melakukan *Safety Patrol* di lingkungan kerja yang mempunyai risiko tinggi.
5. Melakukan Inspeksi dan Internal Audit untuk memastikan Sistem Manajemen Terpadu Keselamatan dapat berjalan dengan baik.

METODE PROSES PDCA DALAM SISTEM MANAJEMEN K3

Perusahaan mengimplementasikan sistem manajemen K3 dengan mengadopsi pendekatan PDCA sebagai strategi utama dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pendekatan tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan K3 secara berkelanjutan. Metode PDCA terdiri dari empat tahap utama, yaitu: Perencanaan (Plan), Pelaksanaan (Do), Evaluasi (Check), dan Tindak Lanjut (Act). Adapun penerapan metode PDCA di Perusahaan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. ***Plan*/Perencanaan**
   Perusahaan melakukan kajian terhadap tujuan implementasi K3 serta proses yang dibutuhkan untuk merespon masalah yang terjadi. Tahapan ini dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen yang terukur dan tepat sasaran. Selain itu, Perusahaan juga ingin meraih hasil yang diharapkan melalui perencanaan ini.

2. ***Do*/Pelaksanaan**
   Setelah mengkaji problematika yang ada, Perusahaan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Selama proses eksekusi, Perusahaan senantiasa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sebagai acuan kinerja sistem manajemen. Hal tersebut akan memberikan gambaran untuk tahapan selanjutnya kepada Perusahaan terhadap proses implementasi yang dilakukan.

1. Launching a Cultural Transformation program, one of its key goals being a transformation towards a safety-first culture.
2. Conducting OHS induction/training for all new employees.
3. Incorporating OHS elements into every project at Branches/Subsidiaries, at a minimum by implementing housekeeping practices and ensuring the use of Personal Protective Equipment ("APD" or "PPE") in mandatory PPE zones.
4. Carrying out Safety Patrols in high-risk work environments. Performing inspections and internal audits to ensure that the Integrated Safety Management System is functioning effectively.

PDCA METHOD IN THE OHS MANAGEMENT SYSTEM

The Company implements its OHS management system by adopting the PDCA approach as a key strategy for addressing various challenges in occupational health and safety. This method serves as a systematic framework to continuously improve the effectiveness of OHS implementation. The PDCA method consists of the following stages:

1. **Plan**
   The Company conducts a review of its OHS implementation objectives and the processes needed to address identified issues. This stage is carried out to implement a targeted and measurable management system. Additionally, it aims to help the Company achieve its expected outcomes through careful planning.

2. **Do**
   After identifying and reviewing current issues, the Company proceeds to implement the established procedures. During execution, the Company collects as much data as possible to serve as a performance reference for the management system. This data provides insight for the subsequent phases of implementation.

3. ***Check*/Evaluasi**
Pada tahap ini, Perusahaan melakukan evaluasi atas kinerja implementasi sistem manajemen yang sudah diterapkan. Evaluasi dilakukan guna menilai apakah hasil eksekusi sudah sesuai sasaran dan juga permasalahan yang terjadi Ketika proses implementasi. Selanjutnya, Perusahaan akan mengkaji solusi untuk diterapkan pada tahap selanjutnya.

4. ***Act*/Tindak Lanjut**
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Perusahaan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada. Tahap ini dilakukan untuk menjaga konsistensi implementasi metode terhadap sistem manajemen K3. Setelah melakukan tindak lanjut, Perusahaan dapat meningkatkan kinerja yang berhasil serta memperbaiki permasalahan untuk proses selanjutnya.

3. **Check**
At this stage, the Company evaluates the performance of the implemented management system. The evaluation is conducted to determine whether the outcomes meet the objectives and to identify issues that arose during implementation. Based on this, the Company formulates solutions for the next phase.

4. **Act**
Based on the evaluation results, the Company takes follow-up actions to address identified issues. This stage ensures consistent implementation of the management system. After these corrective actions, the Company aims to enhance successful practices and resolve issues for continuous improvement.



SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN K3

OHS MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Tanggal Perolehan Receipt Date	Uraian Description	Pemberi Sertifikasi Issuer	Masa Berlaku Validity Period
Nasional National			
14 April 2022 April 14, 2022	ISO 9001:2015	LRQA	13 April 2025 April 13, 2025
30 Desember 2023 December 30, 2023	ISO 37001:2016	LRQA	29 Desember 2026 December 29, 2026
15 Mei 2022 May 15, 2022	ISO 45001:2018	LRQA	14 Mei 2025 May 14, 2025
31 Mei 2022 May 31, 2022	ISO 14001:2015	LRQA	2 Mei 2025 May 2, 2025
Internasional International			
17 Mei 2021 May 17, 2021	ISM Code	Direktur Jendral Perhubungan Laut Director General of Maritime Transportation	15 Oktober 2025 October 15, 2025



PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

06

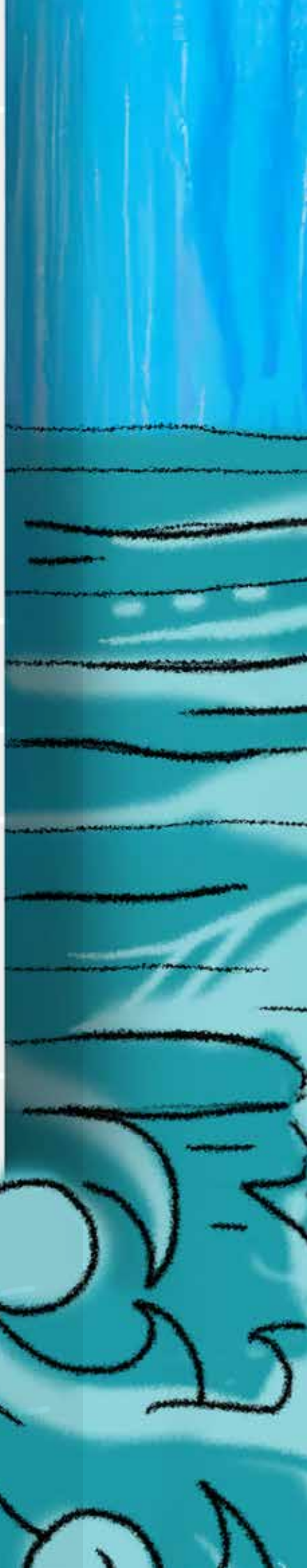

IPCM terus berupaya mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta menerapkan nilai-nilai terbaik guna menciptakan nilai jangka panjang yang dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

IPCM strives to prioritize the principles of Good Corporate Governance (GCG) and apply the best values to create long-term value for an optimal benefit for all stakeholders.

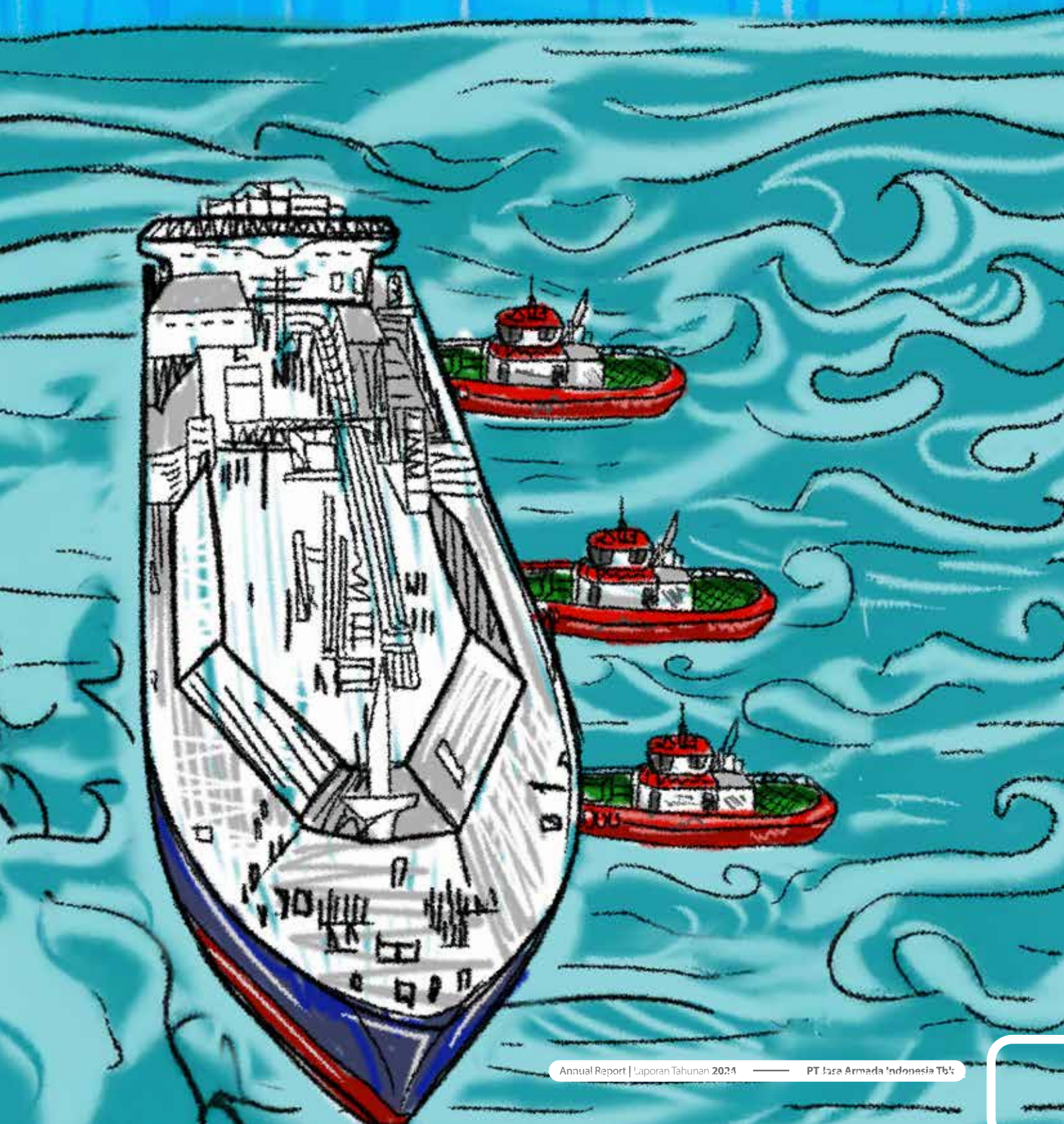

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy

KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN GCG

Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang baik, IPCM senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek operasionalnya. Penerapan GCG tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan struktur tata kelola yang kuat, IPCM terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Dalam praktiknya, IPCM berpegang pada lima prinsip utama GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Perusahaan secara konsisten meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi guna memberikan kejelasan bagi investor serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, mekanisme pengawasan yang efektif diterapkan melalui Dewan Komisaris dan komite-komite terkait, yang memastikan setiap keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan dan keberlanjutan bisnis.

Dalam hal ini, IPCM terus membangun budaya tata kelola yang berintegritas dengan menginternalisasikan etika bisnis dan pedoman perilaku di seluruh lini organisasi. Perusahaan juga memperkuat sistem manajemen risiko serta pengendalian internal untuk memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Dengan langkah-langkah ini, IPCM menegaskan komitmennya untuk menjalankan bisnis secara profesional, bertanggung jawab, dan selaras dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

PRINSIP UMUM GCG

Dalam penerapannya, IPCM berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini diterapkan dengan mengacu pada Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

COMPANY COMMITMENT ON GCG IMPLEMENTATION

As a manifestation of its commitment to good governance, IPCM always applies the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every aspect of its operations. The implementation of GCG not only ensures compliance with regulations, but also increases transparency, accountability, and stakeholder trust. With a solid governance structure, IPCM continues to strengthen its internal monitoring and control system to create a sustainable and highly competitive business.

In its practice, IPCM adheres to the five main principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The Company consistently improves the quality of financial reporting and information disclosure to provide clarity for investors and other stakeholders. Furthermore, the Company has an effective oversight mechanism in place through the Board of Commissioners and related committees, which ensures that every strategic decision is made with compliance and business sustainability in mind.

IPCM continues to build a culture of governance with integrity by internalizing business ethics and code of conduct throughout the organization. The Company also strengthens its risk management system and internal controls to mitigate potential risks that could hinder the achievement of strategic goals. Through these measures, IPCM affirms its commitment to conduct business professionally, responsibly, and in line with the interests of all stakeholders.

GENERAL PRINCIPLES OF GCG

IPCM is guided by 5 (five) basic GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in its practice. These principles are applied with reference to the GCG General Guidelines of the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the Integrated Governance Guidelines applicable at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Transparansi **Transparency**	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.	Openness in the decision-making process and disclosure of material and relevant information regarding the Company.
Akuntabilitas **Accountability**	Kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	Compliance of Company management with applicable laws and regulations, as well as sound corporate principles.
Responsibilitas **Responsibility**	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.	Openness in the decision-making process and disclosure of material and relevant information regarding the Company.
Independensi **Independence**	Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	The Company is managed professionally, without conflicts of interest, and free from influence or pressure from any party not in accordance with applicable laws, regulations, and sound corporate principles.
Kewajaran dan Kesetaraan **Fairness and Equality**	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.	Justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders based on agreements and statutory regulations.
Terpercaya **Trusted**	Mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan	Gaining full trust and support from all Stakeholders.

IPCM terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Dalam rangka ini, IPCM mengadopsi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUGKI) 2021 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KNKG). Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari PUGKI 2019 dengan menyesuaikan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang lebih relevan dengan kondisi terkini.

PUGKI 2021 menguraikan 4 (empat) pilar utama tata kelola yang menjadi dasar implementasi di IPCM, yaitu:

IPCM strives to strengthen good corporate governance as part of its efforts to improve competitiveness and business sustainability. For this purpose, IPCM adopts the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) prepared by the National Committee on Corporate Governance Policy (KNKG). This guideline is an improvement of PUGKI 2019 by adjusting the TARIF principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) which are more relevant to the latest conditions.

PUGKI 2021 sets out 4 (four) main pillars of governance that form the basis for implementation at IPCM, namely:

Perilaku Beretika	Ethical Conduct
Definisi: Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	**Definition:** In its operations, the Corporation consistently prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and upholds moral values and trust consistently. The Corporation also emphasizes shareholder and stakeholder interests, adhering to principles of fairness and equality, independently managed to ensure that no corporate organ dominates over others and remains free from external intervention.
Penerapan di lingkup JAI: • JAI memiliki Kode Etik sebagai panduan dalam mengarahkan perilaku dan tindakan di dalam Perusahaan, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. • JAI menerapkan nilai-nilai utama "AKHLAK" sebagai bagian integral dari budaya perusahaan. • JAI memiliki kebijakan anti korupsi dan gratifikasi untuk mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap, dan/atau gratifikasi.	**Application at JAI:** • JAI has a Code of Conduct serving as a Guideline for behavior and actions within the Company, including interactions with stakeholders. • JAI integrates the main values of "AKHLAK" into its company culture. • JAI has an anti-corruption and gratification policy aimed at addressing corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification.

Akuntabilitas

Definisi:
Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Penerapan di lingkup JAI:
- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pembagian tugas yang telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, serta memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
- JAI secara berkala melaporkan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham.
- Pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal.
- JAI secara konsisten melakukan evaluasi atas penerapan GCG, manajemen risiko, tata kelola IT.
- JAI senantiasa melakukan pelaksanaan RUPS serta penyampaian laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan.

Accountability

Definition:
Corporation must be transparent and fair in being accountable for their performance. Therefore, they need to be managed correctly, measurably, and in alignment with corporate interests, while also considering the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary requirement for achieving sustainable performance.

Application at JAI:
- In performing their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Directors have allocated segregation of duties in accordance with the Articles of Association and relevant regulations, and adhering to a Work Guideline for the Board of Commissioners.
- JAI routinely presents the Company's performance to Shareholders.
- The audit of the Company's financial statements is conducted by an external auditor.
- JAI consistently evaluates the implementation of GCG, risk management, and IT governance.
- JAI consistently holds GMS and submits annual report as a form of accountability for company management.

Transparansi

Definisi:
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan di lingkup JAI:
- Perusahaan secara rutin mengirimkan laporan keuangan dan informasi terkait kepada OJK dan BEI untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi.
- Informasi mengenai JAI tersedia di website perusahaan yang dapat diakses oleh pihak eksternal.
- JAI menggunakan media sosial untuk informasi dan transparansi kegiatan perusahaan.
- Perusahaan menyediakan media pelaporan pelanggaran yang dapat diakses melalui *email* maupun *platform* yang telah disediakan.

Transparency

Definition:
To maintain objectivity in business operations, corporation ensures the provision of material and relevant information in a manner that is easily accessible and comprehensible to stakeholders. Corporation takes the initiative to disclose not only the issues required by statutory regulations but also matters crucial for decisionmaking by shareholders, creditors, and other stakeholders.

Application at JAI:
- The Company routinely submits financial reports and related information to the OJK and BEI to fulfill its information disclosure obligations.
- Information about JAI is available on the company website, accessible to external parties.
- JAI utilizes social media for disseminating information and ensuring transparency of company activities.
- The Company provides a violation reporting mediawhich can be accessed via email or the platform that has been provided.

Keberlanjutan

Definisi:
Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penerapan di lingkup JAI:
- JAI melaksanakan program CSR untuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya.
- JAI menjalankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola atau *Environmental, Social and Governance* (ESG).
- JAI menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sustainability

Definition:
Corporation complies with statutory regulations and is committed to fulfilling its responsibilities towards society and the environment to contribute to sustainable development by collaborating with all relevant stakeholders to enhance their well-being in a manner aligned with both business interests and the sustainable development agenda.

Application at JAI:
- JAI implements a CSR program to fulfill its social responsibility towards the surrounding community.
- JAI adheres to environmental, social, and governance (ESG) principles
- JAI implements Sustainable Development Goals (SDG's).

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

IPCM mengimplementasikan GCG dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia:
   a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 14/2008);
   b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 11/2008);
   c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah
   Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (PP BUMN 45/2005);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.04/ 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/ POJK.04/ 2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan/Keputusan Menteri
   a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
   b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
   c. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada Badan Usaha Milik Negara;

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

The implementation of GCG in IPCM is based on:

1. Laws of the Republic of Indonesia:
   a. Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP 14/2008);
   b. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE 11/2008);
   c. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   d. Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes;
   e. Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Government Regulations
   Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOE (PP BUMN 45/2005).
3. Financial Services Authority Regulations
   a. Financial Services Authority Regulation No. 42/ POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflicts of Interest;
   b. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/ 2014 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
   c. Financial Services Authority Circular Number 32/ SEOJK.04/2014 concerning Guidelines for Public Company Governance;
   d. Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/ 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
   e. Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies.
4. Ministerial Regulations/Decree
   a. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
   b. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
   c. Copy of Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for Preparing Key Performance Indicators for State-Owned Enterprises;

d. Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-8/DKU. MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

5. Anggaran Dasar PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
6. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Tahun 2004 (Pedoman Komisaris Independen KNKG 2004);
7. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Tahun 2004 (Pedoman Komite Audit KNKG 2004);
8.
9. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, dan terakhir dimutakhirkan pada tahun 2021, sebagai pemutakhiran dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Tahun 2006 (Pedoman GCG KNKG 2006).

GOVERNANCE FRAMEWORK

Sebagai wujud komitmen dalam menerapkan prinsip GCG, IPCM telah menetapkan kerangka kerja tata kelola *(governance house)* yang mencakup pondasi awal hingga pencapaian tujuan akhir Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Prinsip Tata Kelola (*Governance Principle*) IPCM yakni prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola IPCM yaitu TARIFT.
2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) IPCM yakni desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan terhadap Perusahaan.
3. Proses Tata Kelola (*Governance Process*) IPCM yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh Direksi dan pekerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola IPCM telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.
4. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) IPCM yakni perwujudan dari penerapan dan penegakan Tata Kelola IPCM dalam bentuk pencapaian kredibilitas Perusahaan.

d. Copy of Decree of the Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Instructions for Risk Maturity Index Assessment in State-Owned Enterprises.

5. Articles of Association of PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
6. Independent Commissioner Guidelines, issued by the National Committee for Governance Policy, 2004 (2004 KNKG Independent Commissioner Guidelines);
7. Guidelines for Establishing an Effective Audit Committee, issued by the National Committee for Governance Policy, 2004 (2004 KNKG Audit Committee Guidelines);
8. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI), published by the National Committee for Governance Policy, last updated in 2021, as an update to the General Guidelines for Indonesian Good Corporate Governance, issued by the National Committee for Governance Policy, 2006 (KNKG GCG Guidelines 2006).

GOVERNANCE FRAMEWORK

In order to show its commitment in implementing GCG principles, IPCM has established a governance framework comprising the foundational elements to achieve the Company's ultimate goals, as follows:

1. IPCM Governance Principles as the underlying principles Guideline the implementation and enforcement of IPCM governance, encapsulated in TARIFT.
2. IPCM Governance Structure, encompasses the design of the functions, duties, authority, and supervisory roles within the Company.
3. IPCM Governance Process that includes a set of standards and procedures utilized by the Board of Directors and employees to ensure that the implementation and enforcement of IPCM Governance are performed in a planned, consistent, and sustainable manner.
4. IPCM Governance Outcomes that represent the tangible results of implementing and enforcing IPCM Governance, culminating in the achievement of Company credibility.

Governance House

Governance House

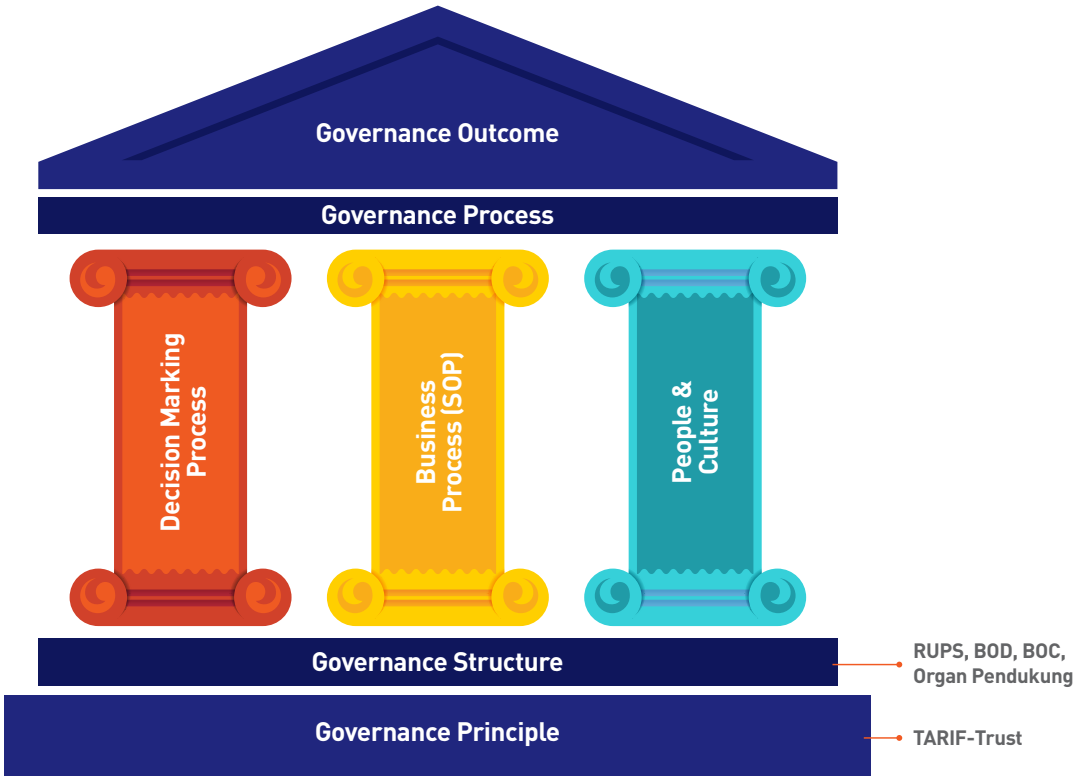

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan

Development of the Implementation of Good Corporate Governance within the Company

PENETAPAN STANDAR KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

IPCM menetapkan standar kualitas tata kelola perusahaan yang baik dengan merujuk pada regulasi dan pedoman yang berlaku. Sebagai bagian dari BUMN, IPCM memastikan bahwa penerapan GCG sesuai dengan ketentuan pemerintah dan otoritas terkait. Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola di perusahaan terbuka. Selain itu, IPCM mengadopsi prinsip-prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan.

SOFT STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

IPCM telah menyusun pedoman dan aturan tertulis sebagai dasar penerapan GCG, yang dirancang dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan perundang-undangan, serta *best practices* penerapan *Good Corporate Governance*. Pedoman ini mencakup berbagai kebijakan dan prosedur operasional yang berfungsi sebagai panduan bagi manajemen hingga unit kerja, guna memastikan mekanisme *checks and balances* dalam aktivitas bisnis sehari-hari sesuai dengan standar terbaik penerapan GCG. Adapun *soft structure* GCG yang diterapkan di IPCM meliputi:

DETERMINATION OF QUALITY STANDARDS FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN THE COMPANY

IPCM establishes good corporate governance quality standards by referring to applicable regulations and guidelines. As part of State-Owned Enterprises, IPCM ensures that the implementation of GCG is in accordance with government regulations and relevant authorities. The Company refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises and the regulations of the Financial Services Authority to ensure compliance with governance in public companies. Furthermore, IPCM adopts the principles of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) 2021 to strengthen transparency, accountability, and sustainability in corporate governance.

SOFT STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

IPCM has developed guidelines and regulations as the basis for implementing GCG, which are designed with reference to the Company's Articles of Association, Laws and Regulations, as well as best practices in implementing Good Corporate Governance. This guideline includes various operational policies and procedures that serve as a reference for management to work units, ensuring checks and balances mechanism in daily business activities in accordance with the best standards of GCG implementation. The GCG soft structure implemented at IPCM includes:

Soft Structure/Kebijakan IPCM Soft Structure/IPCM Policy	Pemberlakuan Implementation
Anggaran Dasar Perusahaan Company's Articles of Association	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022. Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders Number 44 dated June 23, 2022, made before Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notary in Jakarta and ratified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022.
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) Corporate Governance Policy (GCG Code)	Surat Keputusan No. HK-56/4/10/2/MS-21 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Decree No. HK-56/4/10/2/MS-21 dated October 4, 2021 concerning Good Corporate Governance (GCG)

Soft Structure/Kebijakan IPCM Soft Structure/IPCM Policy	Pemberlakuan Implementation
Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Work Procedures for the Board of Commissioners and Directors	Surat Keputusan Bersama Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The Collective Decree Number: HK.56/4/10/3/MS-21 ratified on October 4, 2021 concerning the Board of Commissioners and Directors Work Procedure Guidelines (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pedoman Perilaku Perusahaan (Kode Etik Perusahaan) Company Code of Conduct (Company Code of Ethics)	Surat Keputusan Nomor: HK.56/4/10/4/MS-21 pada tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree Number: HK.56/4/10/4/MS-21 dated October 4, 2021 concerning Guidelines for the Code of Business Conduct within PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Surat Keputusan Nomor SK.DK/28/03/01/JAI-2024 28 Maret 2024 tanggal 26 April 2021 tentang Piagam Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree No. SK.DK/26/04/02/JAI-2021 dated April 26, 2021 concerning the Audit Committee Charter of PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Piagam Internal Audit Internal Audit Charter	Piagam Audit Satuan Pengawasan Internal Tahun 2020 tanggal 7 April 2020 Internal Audit Unit Audit Charter 2020 dated April 7, 2020
Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu Integrated Management System Policy	Peraturan Direksi No. HK.01/25/10/2/ARD/DUT/JAI-24 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board of Directors Regulation No. No. HK.01/25/10/2/ARD/DUT/JAI-24 dated October 25, 2024 concerning Guidelines for Integrated Management Systems within PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan Policy for Receiving and Providing Gifts/Entertainment	Surat Keputusan No. HK.56/4/10/5/MS-21 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree No. HK.56/4/10/5/MS-21 dated October 4, 2021 concerning Guidelines for Gratification Management, Reporting of Extortion and Implementation of the Whistleblowing System (WBS) within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* Whistleblowing System Implementation	Surat Keputusan No. HK.56/4/10/5/MS-21 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree No. HK.56/4/10/5/MS-21 dated October 4, 2021 regarding Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies and Implementation of the Whistleblowing System (WBS) within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy	Surat Keputusan Direksi Nomor HK-56/8/11/1/MS-19 tanggal 8 November 2019 tentang Pedoman dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Directors Number HK-56/8/11/1/MS-19 dated November 8, 2019 regarding Guidelines and Risk Management Framework of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Human Resources (HR) Policy	Surat Keputusan No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 3 Maret 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor OT-690/1/10/1/MS-21 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24 dated March 3, 2024 concerning the Second Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number OT-690/1/10/1/MS-21 dated October 1, 2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Management of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Standar Pelayanan Informasi/Data dan Dokumentasi Kepada Pengguna Informasi	Surat Keputusan No. HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree No. HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024 concerning Guidelines for the Implementation of Public Information Disclosure within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-Bribery Management System (SMAP	Surat Keputusan No. HK.56/4/5/1/MS-20 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Decree No. HK.56/4/5/1/MS-20 dated May 29, 2020 concerning the Implementation of the Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001:2016

SOSIALISASI GCG

Untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi GCG di lingkungan IPCM, Perusahaan secara konsisten mengadakan sosialisasi berkala. Kegiatan ini diselenggarakan melalui berbagai forum formal, pertemuan, dan acara *gathering*, serta didukung oleh media informasi lainnya. Selain dilakukan secara langsung, sosialisasi GCG juga disampaikan melalui portal internal dan *website* Perusahaan. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan setiap individu di lingkungan Perusahaan memahami dan mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

GCG SOCIALIZATION

The Company consistently conducts regular socialization to improve understanding of GCG implementation within IPCM. This activity is organized through various formal forums, meetings, gathering events, and supported by other media. In addition to being conducted directly, GCG socialization is also delivered through the Company's internal portal and website. These initiatives are aimed at ensuring that every individual within the Company understands and supports the implementation of good corporate governance.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024

PT Jasa Armada Indonesia Tbk. secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Proses pemetaan atas implementasi GCG dilakukan dengan mengacu pada lima aspek utama, delapan prinsip dasar, serta dua puluh lima rekomendasi penerapan tata kelola yang tercantum dalam pedoman tersebut. Rekomendasi tersebut merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan terbuka untuk memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di PT Jasa Armada Indonesia Tbk. untuk Tahun Buku 2024, Perseroan dinilai telah memenuhi seluruh dari 25 rekomendasi yang diatur dalam regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola yang sesuai dengan peraturan serta sejalan dengan kepentingan seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Ke depannya, PT Jasa Armada Indonesia Tbk. akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam penerapan GCG untuk memperkuat fondasi tata kelola yang berkelanjutan dan berkontribusi pada penciptaan nilai jangka panjang. Rincian hasil pemetaan penerapan GCG untuk masing-masing aspek disampaikan sebagai berikut:

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

Assessment of GCG Implementation for Financial Year 2024

PT Jasa Armada Indonesia Tbk. consistently implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines of Public Companies.

The mapping process for the GCG implementation is carried out by referring to five main aspects, eight basic principles, and twenty-five recommendations for the implementation of governance listed in the guidelines. These recommendations are the minimum standards that must be met by public companies to ensure transparent, accountable, and responsible governance.

Based on the mapping results of the Governance Guidelines of Public Companies at PT Jasa Armada Indonesia Tbk. for the 2024 Financial Year, the Company is considered to have fulfilled all of the 25 recommendations stipulated in the regulation. This shows the Company's strong commitment to implementing governance practices that are in accordance with regulations and in line with the interests of all shareholders and stakeholders.

Goinf forward, PT Jasa Armada Indonesia Tbk. will continue to evaluate and improve the implementation of GCG to strengthen the foundation of sustainable governance and contribute to long-term value creation. Details of the mapping results of the GCG implementation for each aspect are presented as follows:

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 1: Aspect 1 Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Relationship between the Public Company and Shareholders in Guaranteeing Shareholders' Rights	**Prinsip 1:** Principle 1 Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Improving the Value of Convening General Meeting of Shareholders (GMS)	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. Public Company has technical voting methods or procedures, either open or close, prioritizing independence and interest of Shareholders.	Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024. All Members of the Board of Directors and Commissioners of the Public Company were present at the Annual GMS of PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., as stated in the Minutes of the Annual GMS dated June 12, 2024.	Terpenuhi (*Comply*)
		1.2 Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of Board of Directors and members of Board of Commissioners of Public Company attend the Annual GMS.	Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024. All Members of the Board of Directors Commissioners of the Public Company were present at the Annual GMS of PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., as stated in the Minutes of the Annual GMS dated June 12, 2024.	Terpenuhi (*Comply*)
	Prinsip 2: Principle 2 Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham Improving the Communication Quality between the Public Company and Shareholders or Investors.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Public Company has communication policy with the Shareholders or Investors.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor, yaitu Layanan e-PPID adalah layanan online yang ditujukan untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Public Company has a communication policy with shareholders or investors, namely the online e-PPID Service to facilitate the public in requesting for information and documentation to PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	Terpenuhi (*Comply*)
		2.2 Kebijakan komunikasi harus diungkapkan di Situs Web. The communication policy must be available on the website.	Kebijakan komunikasi telah diungkapkan di Situs Web, yaitu https://ipcmarine.co.id/hubungan-investor/ The communication policy has been disclosed on the Website, namely https://ipcmarine.co.id/hubungan-investor/	Terpenuhi (*Comply*)
		2.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun, yaitu https://ipcmarine.co.id/pengumuman__pemanggilan/ A summary of the minutes of the GMS has been available on the Public Company Website for at least 1 (one) year, namely https://ipcmarine.co.id/pengumuman__pemanggilan/	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 2: Aspect 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and Roles of the Board of Commissioners.	**Prinsip 3:** Principle 3: Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Strengthening Board of Commissioners Membership and Composition.	3.1 Kondisi Perseroan senantiasa menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris. The Company's condition shall always be the basis for consideration in determining the number of the Board of Commissioners members.	Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini ada 4 Orang dengan jumlah Anggota Komisaris Independen ada 2. The current number of the Board of Commissioners members consists of 4 people and 2 of them are Independent Commissioners.	Terpenuhi (*Comply*)
		3.2 Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of composition of the Board of Commissioners considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Jumlah anggota Dewan komisaris telah memperhatikan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan. The number of the Board of Commissioners members has taken into account the background of expertise, knowledge, and experience required by the Company.	Terpenuhi (*Comply*)
	Prinsip 4: Principle 4: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Improving the Implementation Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: HK-56/4/10/3/MS-21 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Hal 62. Regulated in Joint Decree Number: HK-56/4/10/3/MS-21 dated October 4, 2021 concerning the Work Procedures of the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Page 62.	Terpenuhi (*Comply*)
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*Self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company's Annual Report.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The Board of Commissioners has policy related to resignation of members of Board of Commissioners if involved in financial crime.	Berdasarkan Permen BUMN 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/ART Perusahaan, bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris dapat diberhentikan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri makan akan diputuskan dalam mekanisme RUPS. Based on SOE Ministry Regulation 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014 and also the Company's Articles of Association, that any member of the Board of Commissioners who does not meet the requirements to become a member of the Board of Commissioners for any reason, including being involved in financial crimes, then his/her position as a Board of Commissioners can be dismissed. In the event that the member of the Board of Commissioners resigns, it will be decided in the GMS mechanism.	Terpenuhi (*Comply*)
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi. The Board of Commissioners or Committees performing the Nomination and Remuneration Functions prepares a succession policy in the nomination process of members of Board of Directors.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Nomor: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function has prepared a succession policy in the Nomination process for Members of the Board of Directors which is contained in the Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Number: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 concerning the Policy on Supervision and Provision of Advice to the Board of Commissioners.	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 3: Aspect 3: Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of the Board of Directors.	**Prinsip 5:** Principle 5: Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening Membership and Composition of the Board of Directors.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta efektivitas dalam pengambilan Keputusan. The determination of number of Board of Directors considers the Public Company's condition and effectiveness in decision making.	Karena kondisi Perseroan dan pengambilan keputusan yang efektif senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Direksi. Because the Company's condition and effective decision-making are the basis for consideration in determining the number of the Board of Directors members.	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of composition of Board of Directors considers the range of expertise, knowledge, and experience required.	Komposisi Direksi saat ini berdasarkan kajian dokumen CV para anggota Direksi dan berdasarkan konfirmasi diketahui sudah mencerminkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan. The current composition of the Board of Directors is based on a review of the CV documents of the Board of Directors members and based on confirmation that is known to reflect the diversity of expertise, knowledge and experience required by the Company.	Terpenuhi (*Comply*)
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance have the skills and/or knowledge in accounting.	Perseroan memiliki anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. The Company has members of the Board of Directors who oversee the accounting and finance and with expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Terpenuhi (*Comply*)
	Prinsip 6: **Principle 6:** Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Improving the Implementation Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has self-assessment policy to assess the Board of Directors' performance.	Direksi memiliki kebijakan self-assessment yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau dan dievaluasi oleh komite Nominasi dan Remunerasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors has a self-assessment policy that is carried out periodically based on their KPIs, the results of which are reviewed and evaluated by the Nomination and Remuneration Committee and reported to the Board of Commissioners.	Terpenuhi (*Comply*)
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (Self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the Directors' performance is disclosed through the Public Company's Annual Report.	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi, telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors has been disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Terpenuhi (*Comply*)
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has policy related to resignation of members of Board of Directors if involved in financial crime.	Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/ART PT JAI, Tbk. Bahwa setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka akan diberhentikan sebagai anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS. Based on the Regulation of the Minister of SOEs 03/03/2023 and POJK 33/POJK.04/2014 and also the Articles of Association of PT JAI, Tbk. that any member of the Board of Directors who does not meet the requirements to become a member of the Board of Directors for any reason, including being involved in financial crimes, will be dismissed as a member of the Board of Directors. In the event that the member of the Board of Directors resigns, it will be decided in the GMS mechanism.	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 4: Aspect 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Participation.	**Prinsip 7:** Principle 7: Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan Improving the Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. The Public Company has a policy to prevent the occurrence of insider trading.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading dalam Pedoman Etik Bisnis yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris tanggal 15 April 2022. The Company has a policy to prevent insider trading in the Business Ethics Guidelines that have been approved by the Board of Directors and Commissioners on April 15, 2022.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti penipuan. Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading dalam Pedoman Etik Bisnis yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris tanggal 15 April 2022. The Company has a policy to prevent insider trading in the Business Ethics Guidelines that have been approved by the Board of Directors and Commissioners on April 15, 2022.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Company has a policy on selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	Perseroan telah melakukan seleksi pemasok (vendor) berdasarkan SOP/kebijakan terkait pengadaan yang sudah ditetapkan Perseroan. Perseroan juga melakukan evaluasi pemasok (vendor) berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. The Company has conducted supplier (vendor) selection based on SOP/policies related to procurement that have been set by the Company. The Company also conducts periodic supplier (vendor) evaluations every year.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Company has a policy on the fulfillment of creditors' rights.	Perseroan telah memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur. Hal ini dikelola oleh Divisi keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditur. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum. The Company has a policy to fulfill the rights of creditors. This is managed by the Finance Division which regulates and manages the payment of creditor rights. These rights are also stated in a legally binding agreement.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Public Company has policies of whistleblowing system.	Perseroan telah memiliki kebijakan sistem whistleblowing system (WBS) yaitu Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistleblowing System yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT JAI, Tbk tanggal 15 April 2022. The Company has a whistleblowing system (WBS) policy, namely the Guidelines for Gratification Management, Reporting of Illegal Levies and Implementation of the Whistleblowing System which has been approved by the Board of Commissioners and Directors of PT JAI, Tbk on April 15, 2022.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	Perseroan telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi yaitu berupa tantiem dan karyawan dalam bentuk bonus (reward). The Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors in the form of bonuses and employees in the form of bonuses (rewards).	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 5: Aspect 5: Keterbukaan Informasi Information Disclosure.	**Prinsip 8:** Principle 8: Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi Improving the Implementation of Information Disclosure.	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilized the use of information technology more broadly than the website as a media for information disclosure.	Disamping menggunakan situs web resmi perusahaan (https://ipcmarine.co.id/) dan pelaporan secara elektronik seperti IDXNet dan OJK Reporting. Perseroan juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti IG, LinkdIn, Twiter/Threads untuk mengungkapkan informasi tentang perseroan. In addition to using the company's official website (https://ipcmarine.co.id/) and electronic reporting such as IDXNet and OJK Reporting. The Company also utilizes various social media platforms such as IG, LinkdIn, Twitter/Threads to disclose information about the company.	Terpenuhi (*Comply*)
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the final beneficiary of the Public Company's share ownership of at least 5%, in addition to the disclosure of final beneficiary in the share ownership of Public Company through Main and Controlling Shareholders.	Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% dalam Laporan Tahunan ini. The Company has disclosed the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership of at least 5% in this Annual Report.	Terpenuhi (*Comply*)

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Seiring dengan meningkatnya risiko yang dihadapi, kesadaran akan pentingnya kredibilitas dan reputasi perusahaan juga semakin berkembang. IPCM terus berupaya menjadi perusahaan yang dapat dipercaya (*well-governed corporation*). Ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin tinggi dalam lingkungan korporasi mendorong IPCM untuk mencapai keunggulan daya saing, terutama dalam kinerja keuangan dan operasional, agar dapat menjadi perusahaan yang dikelola dengan baik (*well-managed corporation*).

ASEAN Corporate Governance Scorecard

As the Company faces increasing risks, the importance of credibility and reputation is becoming more apparent. IPCM is committed to being a trusted and well-governed corporation. Higher expectations of stakeholders in the corporate sphere drives for excellence, especially for achieving competitive advantage in financial and operational performance, to establish itself as a well-managed corporation.

ASEAN GCG *Scorecard* digunakan sebagai alat kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan publik di ASEAN terhadap pedoman tata kelola perusahaan. Penilaian ini mengacu pada standar internasional, khususnya prinsip-prinsip tata kelola yang ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Untuk menilai praktik tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN CG Scorecard, IPCM menunjuk PT Pratama Indomitra Konsultan sebagai pihak independen dalam melakukan analisis dan pengukuran.

Analisis ini dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan merujuk pada informasi yang tersedia untuk publik, terutama melalui situs web perusahaan. Sumber yang digunakan mencakup Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, kebijakan internal, serta dokumentasi RUPS yang dipublikasikan pada tahun 2024 dalam Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya juga dalam Bahasa Inggris. Selain itu, keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi bagian dari evaluasi.

Hasil akhir penilaian menunjukkan bahwa IPCM memperoleh skor keseluruhan sebesar 118,39 poin, dengan tingkat kepatuhan yang dikategorikan sebagai "*Leadership in Corporate Governance*" Adapun rincian skor tertimbang untuk masing-masing komponen *Scorecard* adalah sebagai berikut:

The ASEAN GCG Scorecard is used as a quantitative tool to measure the level of compliance of public companies in ASEAN with corporate governance guidelines. This assessment refers to international standards, particularly the principles of governance established by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). In order to assess corporate governance practices based on the ASEAN CG Scorecard, IPCM appointed PT Pratama Indomitra Konsultan as an independent party in conducting the analysis and measurement.

The assessment was conducted in accordance with applicable standards, with reference to publicly available information, mainly through the Company's website. The sources used include the Annual Report, Sustainability Report, internal policies, and GMS documentation published in 2024 in Bahasa Indonesia and at least in English. Furthermore, information disclosure on the websites of the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Financial Services Authority (OJK) is also part of the evaluation.

The final assessment results show that IPCM obtained an overall score of 118.39 points, with the level of compliance categorized as "Leadership in Corporate Governance." The result details for each Scorecard component are as follows:

No.	Komponen Nilai Tahun 2024 Component Value in 2024 Komponen Penilaian Assessment Components	Skor 2024 Score 2024	Skor 2023 Score 2023	Perbandingan Comparison
A	Hak dan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	20,00	20,00	-
C	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilienc	15,00	15,00	-
D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	23,53	22,79	0,74
E	Tanggung Jawab Dewan Komisaris Responsibilities of the Board	35,86	32,38	3,48
TOTAL LEVEL 1		**94,39**	**90,18**	
1	Bonus	22	12	10
2	Pinalti	-4	-4	-
TOTAL LEVEL 2		**44**	**8**	**36**
LEVEL 1 + LEVEL 2		**118,39**	**98,18**	**20,21**

Peningkatan Skor Assessment GCG

Berikut adalah pencapaian hasil *assessment* penerapan GCG JAI dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni sebagaimana terlampir di bawah ini.

Improvement of GCG Assessment Score

The following are the achievements of JAI's GCG implementation assessment results in the last 5 (five) years.

Tahun Buku Financial Year	Skor *Assessment* GCG GCG Assessment Score	Parameter	Predikat Predicate	Lembaga Penilai Assessor
2024	118,39	ACGS	*Leadership in Corporate Governance*	PT Pratama Indomitra Konsultan
2023	98,18	ACGS	*Very Good*	PT Pratama Indomitra Konsultan
2022	98,58	SK 16 Kementerian BUMN	Sangat Baik	PT Pratama Indomitra Konsultan
2021	98,24	SK 16 Kementerian BUMN	Sangat Baik	PT Kharisma Integrasi Manajemen
2020	98,24	SK 16 Kementerian BUMN	Sangat Baik	PT Kharisma Integrasi Manajemen

PETA JALAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Hingga saat ini IPCM belum memiliki *roadmap* GCG secara formal. Namun, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dievaluasi secara berkala melalui *assessment* yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT ROADMAP

Currently, IPCM does not have a formal GCG roadmap. However, the implementation of good corporate governance is still evaluated periodically through assessments that refer to the applicable provisions and regulations.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Structure

STRUKTUR ORGAN GCG DAN MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN

Dalam menjalankan tata kelola yang baik, IPCM mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan mencakup tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk membentuk komite pendukung guna memastikan efektivitas pengawasan dan kebijakan yang selaras dengan tugasnya. Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, komite pendukung Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sementara itu, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan dengan dukungan dari Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal yang berperan dalam menjaga kepatuhan serta efektivitas sistem pengendalian internal.

GCG ORGAN STRUCTURE AND RELATIONSHIP MECHANISMS BETWEEN ORGANS

In practicing good governance, IPCM refers to the principles set out in the existing regulations. Based on Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, the corporate governance structure includes three main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

The Board of Commissioners has the authority to establish supporting committees to ensure the effectiveness of supervision and policies that are aligned with its duties. In accordance with the Corporate Governance Guidelines, the supporting committees of the Board of Commissioners comprises of the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

Additionally, the Board of Directors is responsible for managing the company's operations with the support of the Corporate Secretary and Internal Audit, which play a role in maintaining compliance and the effectiveness of the internal control system.

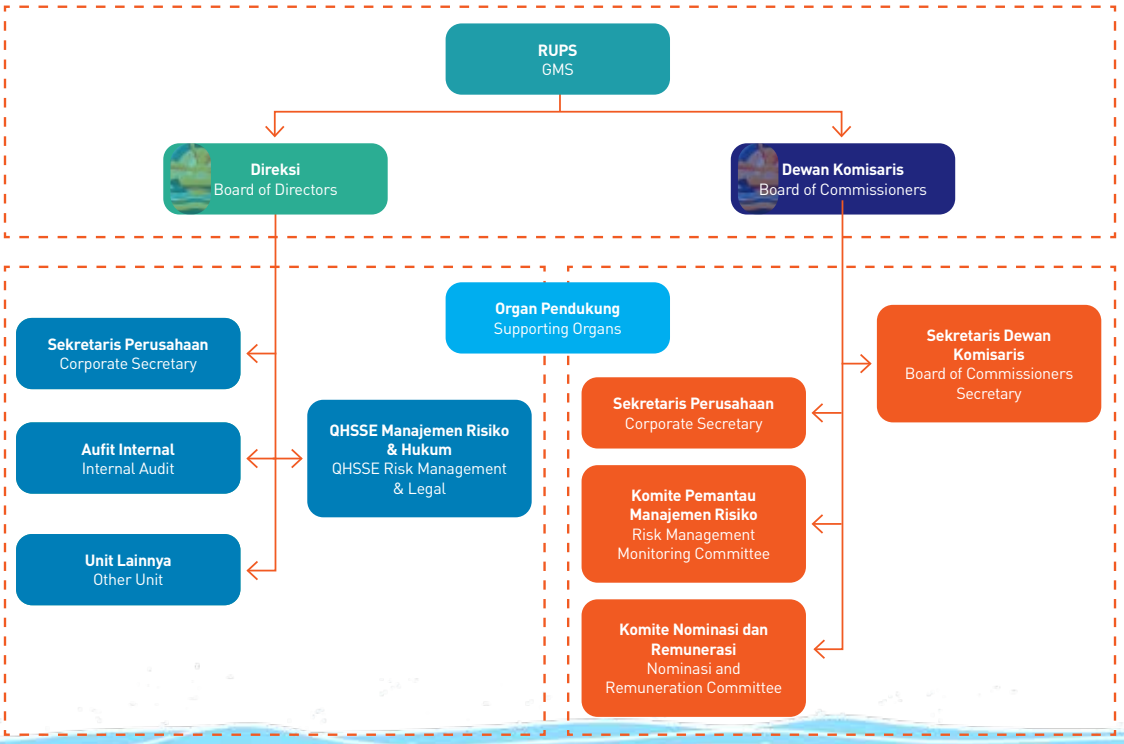

Tata kelola perusahaan dirancang untuk memastikan pengelolaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Mekanisme ini diperkuat oleh keberadaan berbagai organ perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta organ pendukung lainnya. Konsistensi dalam penerapannya bertujuan menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap organ perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara transparan dan adil, dengan memastikan tidak adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham dan Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali hingga Entitas Pemilik Akhir

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Mereka tidak berwenang untuk mengintervensi fungsi, tugas, serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur kepemilikan saham IPCM terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali serta Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri Perusahaan. Adapun komposisi kepemilikan saham di lingkungan Perusahaan, yaitu PT Pelindo Jasa Maritim sebesar 76,89 %, IDX sebesar 23,00 %, dan PT Multi Terminal Indonesia sebesar 0,11 %. Informasi lebih lanjut mengenai struktur serta rincian Pemegang Saham Utama dan Pengendali dapat ditemukan dalam bagian "Komposisi Pemegang Saham" pada Bab Profil Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*). Hak-hak Pemegang Saham meliputi:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan, secara tepat waktu dan teratur;
6. Hak untuk menerima sebagian dan keuntungan Perusahaan yang diperuntungkan bagi pemegang saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

Corporate governance is designed to ensure that the management is in line with GCG principles. This mechanism is strengthened by the existence of various company organs, such as the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, and other supporting organs. Consistent implementation aims to maintain long-term business sustainability and increase value for shareholders and other stakeholders. Each of the Company's organs carries out its functions and responsibilities transparently and fairly, by ensuring that there is no conflict of interest in the performance of duties.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Shareholders and Information about Major/ Controlling Shareholders, up to the Final Owner Entity

Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company's shares. They are not authorized to intervene in the functions, duties, and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors. IPCM's shareholding structure consists of the Main/Controlling Shareholders and other Shareholders who are the founders of the Company. The composition of share ownership within the Company, namely PT Pelindo Jasa Maritim by 76.89%, IDX by 23.00%, and PT Multi Terminal Indonesia by 0.11%. Further information on the structure and details of the Major and Controlling Shareholders can be found in the "Shareholder Composition" section in the Company Profile Chapter.

Shareholders Rights

The Company is dedicated to protecting the rights of its shareholders as outlined in the Articles of Association and Corporate Governance Policy (GCG Code). These rights includes:

1. The right to request the convening of a General Meeting of Shareholders (GMS);
2. The right to seek information regarding the agenda of the GMS;
3. The right to propose items for discussion at the GMS agenda
4. The right to attend and cast votes at the GMS;
5. The right to receive timely and regular updates regarding the Company;
6. The right to receive a portion of the Company's profits through dividends and other profit-sharing mechanisms.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS berfungsi sebagai forum bagi Pemegang Saham untuk berperan dalam perkembangan perusahaan melalui keputusan serta arahan yang disampaikan dalam rapat.

RUPS terbagi menjadi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan minimal sekali dalam setahun, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan urgensi perusahaan guna membahas serta memutuskan agenda tertentu. Namun, agenda utama seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan penggunaan laba hanya dibahas secara khusus dalam RUPS Tahunan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS memiliki peran penting bagi keberlangsungan Perusahaan. Beberapa keputusan yang ditetapkan dalam RUPS mencakup perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, persetujuan laporan keuangan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

Penyelenggaraan RUPS di Perusahaan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku. Setiap tahapan melibatkan persiapan waktu serta penyediaan bahan-bahan yang diperlukan guna memastikan kelancaran jalannya RUPS. Berikut adalah langkah-langkah standar yang diterapkan dalam proses pelaksanaan RUPS di Perusahaan, yaitu:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the corporate governance structure and cannot be replaced by other parties in accordance with applicable laws and regulations. The GMS serves as a forum for Shareholders to play a role in the development of the company through decisions and directions submitted at the meeting.

GMS is divided into Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS must be held at least once a year, no later than six months after the financial year ends. Meanwhile, an Extraordinary GMS can be held at any time in accordance with the needs, interests and urgency of the company to discuss and decide on certain agendas. However, the main agenda such as the annual report, financial statements, and the use of profit are only specifically discussed in the Annual GMS.

Decisions made in the GMS have an important role for the sustainability of the Company. Some of the decisions made in the GMS include amendments to the Company's Articles of Association, approval of financial statements, appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, and determining remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors with reference to the Articles of Association and the Limited Liability Company Law.

Holding Stages of GMS

The implementation of the GMS in the Company is carried out through a series of stages that have been determined based on applicable regulations. Each stage involves time preparation and provision of necessary materials to ensure the smooth running of the GMS. The standard steps applied in the GMS implementation process in the Company are as follows:



Prosedur Teknis Pengumpulan Suara

Dalam RUPS, keputusan diambil dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai, maka keputusan akan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara. Proses pemungutan suara dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah saham yang menyatakan setuju, tidak setuju, atau abstain, sesuai dengan prinsip *one share one vote*.

Voting Procedure

Decision-making at the General Meeting of Shareholders (GMS) is initially prioritized through deliberation to reach a consensus, as mandated by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. If consensus cannot be reached through deliberation, voting is conducted based on the number of shares that disagree, abstain, or agree, following the principle of one share, one vote.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024

Di tahun 2024, Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 12 Juni 2024 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 September 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

GMS Holding in 2024

In 2024, the Company has held 2 (two) GMS, namely the Annual GMS for Financial Year 2023 held on June 12, 2024 and the Extraordinary GMS on September 25, 2024, with the following details:

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Annual GMS for Financial Year 2023

Penyelenggaraan RUPST
Holding of AGMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 12 Juni 2024 Wednesday, June 12, 2024
Waktu Time	:	Pukul 10.31 WIB s.d. 11.37 WIB
Tempat Location	:	Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	**Dewan Komisaris** • Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) • R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) • Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) **Direksi** • Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) • Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) • Reini Delfianti (Direktur Keuangan dan SDM) **Board of Commissioners** • Zuhri Iryansyah (President Commissioner) • R.R. Dewi Ariyani (Commissioner) • Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner) **Board of Directors** • Shanti Puruhita (President Director and Commercial and Business Development Director) • Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation) • Reini Delfianti (Director of Finance and HR)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	-

Tahapan Pelaksanaan RUPS

AGMS Holding Stages

6 Mei 2024 May 6, 2024	21 Mei 2024	12 Juni 2024	12 Juni 2024
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/6/5/2/KGC/SPR/JAI-24 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. SK.03/6/5/2/KGC/SPR/JAI-24	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/21/5/2/KGC/SPR/JAI-24 GMS Summons to Shareholders via Letter No. SK.03/21/5/2/KGC/SPR/JAI-24	Pelaksanaan RUPS di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 GMS holding at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310	Berita Acara RUPS Tahunan dimuat dalam Risalah RUPS Tahunan No. 31 tanggal 12 Juni 2024 The minutes of the AGM are contained in the Deed of Minutes of AGM No. 31 dated June 12, 2024.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.650.339.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,13% dari 5.276.771.300 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen, yaitu PT EDI Indonesia untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi suara, serta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang bertugas memverifikasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Berikut ini adalah hasil keputusan RUPS beserta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024.

Resolution of the Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2023 was attended by all of the members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the Company's Shareholders, representing 4.650.339.500 shares with valid votes, equivalent to 88,13% of the total 5.276.771.300 shares issued by the Company.

The Company has appointed an independent party, PT EDI Indonesia, to count and/or validate the votes, and Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., to verify and announce the results of the vote count.

The following are the results of the GMS Decision and the follow-up by the Company's Management until the end of 2024.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024	Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024
Mata Acara Rapat ke-1: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.	**First Meeting Agenda:** Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2023, and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2023.
Hasil keputusan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".	**Resolutions:** 1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report conducted for the Financial Year 2023, and ratifed the Company's Financial Statement for the same period. The Financial Statement has been audited by the PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm, as indicated in their report Number: 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 dated March 26, 2024, with the opinion stating ""the attached financial report present fairly, in all material respects, its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024	Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023."	2. Granted full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners for management and supervisory actions during the financial year 2023. This release of responsibility applies as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statement for the financial year 2023.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2024.
Mata Acara Rapat ke-2: Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	**Second Meeting Agenda:** Determination of the Determination of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year.
Hasil keputusan: Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp157.661.987.548,- (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dipergunakan sebagai berikut: a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp31.532.397.509,60 (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah enam puluh sen) atau sebesar 20%. b. Dividen final sebesar Rp118.252.444.833,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau kurang lebih sebesar 75% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari: 1) Dividen interim sebesar Rp20.051.730.940,00 (dua puluh miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau Rp3,80 (tiga rupiah delapan puluh sen) per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 26 Januari 2024. 2) Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp98.200.713.893,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau Rp18,61 (delapan belas rupiah enam puluh satu sen) per lembar saham. c. Sisanya sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebesar Rp7.877.145.205,40 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah empat puluh sen) atau kurang lebih sebesar 5%. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2023 serta mengumumkannya dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	**Hasil keputusan:** Approved the determination of the use of the Company's profits for the 2023 financial year, totaling Rp157.661.987.548,- (one hundred fifty-seven billion six hundred sixty-one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred forty-eight rupiahs), to be allocated as follows: a. Reserves as referred to in Article 70 of the Company Law amounting to Rp31.532.397.509,60 (thirty-one billion five hundred thirty-two million three hundred ninety-seven thousand five hundred nine rupiah sixty cents), or 20%. b. Final dividend of Rp118.252.444.833,00 (one hundred eighteen billion two hundred fifty-two million four hundred forty-four thousand eight hundred thirty-three rupiahs), or approximately 75%, to be distributed to shareholders as follows: 1) Interim dividend of Rp20.051.730.940,00 (twenty billion fifty-one million seven hundred thirty thousand nine hundred forty rupiahs), or Rp3.80 per share, distributed to shareholders on December 26, 2024. 2) The rest as ash dividends amounting to Rp98.200.713.893,00 (ninety-eight billion two hundred million seven hundred thirteen thousand eight hundred ninety-three rupiahs), or Rp18.61 (eighteen rupiah sixty-one cents) per share. c. Retained earnings of Rp7.877.145.205,40 (seven billion eight hundred seventy-seven million one hundred forty-five thousand two hundred five rupiah forty cents), or approximately 5%, to be used as the Company's working capital. Furthermore, granted authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for distributing dividends for the 2023 financial year and to announce it on the Company's website, the Stock Exchange website, and the KSEI website in accordance with applicable regulations.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2024.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024	Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024
Mata Acara Rapat ke-3: Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.	**Third Meeting Agenda:** Appointment of the Company's Public Accounting Firm for the 2024 Financial Year.
Hasil keputusan: 1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	**Resolutions:** 1. Approved the reappointment of the Public Accounting Firm "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's financial statements for the 2023 financial year and granted the authority to the Board of Commissioners to determine the public accountant's honorarium and any other requirements for their designation. 2. Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm for KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" in the event they are unable to complete the audit of the Company's financial statements for the 2024 financial year due to any reason, including to determine the honorarium for the replacement public accountant, along with fulfilling other requirements for appointment, the Board must consider recommendations from the Company's Audit Committee and adhere to the criteria as stipulated in POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2024.
Mata Acara Rapat ke-4: Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	**Fourth Meeting Agenda:** Determining the salary, honorarium, and other allowances for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company, as well as bonuses for these members.
Hasil keputusan: Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Utama untuk: 1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024; 2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.	**Resolutions:** Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, after consulting with major shareholders, to: 1. Determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2024; 2. Determine tantiems for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 financial year.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2024.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024	Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024
Mata Acara Rapat ke-5: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi.	**Fifth Meeting Agenda:** Changes in the Company's Management Structure and Changes in the Nomenclature of Directors' Positions.
Hasil keputusan: 1. Menyetujui perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan meninggalnya Komisaris Independen Perseroan yaitu Bapak Hary Kriswanto pada tanggal 24 Juni 2023. 2. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu yang semula Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan menjadi Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko Perseroan. 3. Menyetujui: a. Mengangkat kembali: 1) Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Utama Perseroan; dan 2) Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan. b. Mengangkat Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko Perseroan. 4. Pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Menunjuk Ibu Shanti Puruhita untuk menjalankan pekerjaan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang lowong sampai dengan diangkatnya seorang Direktur untuk mengisi jabat dimaksud. 6. Dengan adanya perubahan sebagaimana disebut pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisaris Utama : Bapak Zuhri Iryansyah Komisaris : Ibu R.R. Dewi Ariyani Komisaris Independen : Bapak Bay Mokhamad Hasani **Direksi** Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Ibu Shanti Puruhita Direktur Armada dan Operasi : Bapak Muhammad Iqbal Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko : Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas 7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Resolutions:** 1. Approved the changes of the Company's Board of Commissioners members due to the Company's Independent Commissioner, Mr. Hary Kriswanto passed away on June 24, 2023. 2. Approved the changes in the nomenclature of the Company's Board of Directors, which was originally the Director of Finance and Human Resources of the Company to become the Director of Finance, Human Resources and Risk Management of the Company. 3. Approved: a. Reappoint: 1) Mrs. Shanti Puruhita as President Director of the Company; and 2) Mr. Muhammad Iqbal as Director of Fleet Management and Operation of the Company. b. Appoint Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas as the Company's Director of Finance, Human Resources and Risk Management. 4. The reappointment and appointment is effective as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 with regard to the laws and regulations in the Capital Market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time. 5. Appoint Mrs. Shanti Puruhita to carry out the vacant position of Commercial and Business Development Director until the appointment of a Director to fill the position. 6. With With the changes as referred to in numbers 1, 2, 3, 4, and 5, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows: **Board of Commissioners** President Commissioner : Mr. Zuhri Iryansyah Commissioner : Mrs. R.R. Dewi Ariyani Independent Commissioner : Mr. Bay Mokhamad Hasani **Board of Directors** President Director and Commercial and Business Development Director : Mrs. Shanti Puruhita Director of Fleet Management and Operation : Mr. Muhammad Iqbal Director of Finance, Human Resources and Risk Management : Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas 7. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state in a separate Notarial deed and take all necessary actions related to changes in the nomenclature of the Company's Board of Directors and changes in the composition of the Company's Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2024.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024	Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024
Mata Acara Rapat ke-6: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.	Mata Acara Rapat ke-6: Report on the Realization of Public Offering Proceeds Usage.
Hasil keputusan: Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut: Total dana hasil penawaran umum bersih Rp439.531.825.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebesar 10% digunakan untuk modal kerja Perseroan dan telah digunakan seluruhnya dan sebesar 90% dialokasikan untuk belanja modal yakni 4 unit kapal tunda tipe *Azimuth Stern Driven* (ASD) dengan gaya 2x2200 HP yang telah direalisasikan sebesar Rp228.723.815.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah. Sedangkan Rp90.530.000.000 (sembilan puluh miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah terealisasi secara bertahap pembayarannya untuk pembangunan 1 unit kapal tunda tipe *Azimuth Stern Driven* (ASD) dengan daya 2x2200 HP dan 3 unit motor pandu dengan daya 2x300 HP. Sisa dana IPO sebesar Rp76.324.827.500 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2024.	**Resolutions**: As the Sixth Meeting Agenda only serves as a report, there were no decision-making processes involved. The Company's Board of Directors has submitted a report regarding the Realization Report on the Public Offering Proceeds Usage, outlined as follows: A total of Rp439,531,825,000.00 (four hundred thirty nine billion five hundred thirty one million eight hundred twenty five thousand rupiah) net public offering proceeds of 10% were used for the Company's working capital and have been fully utilized and 90% were allocated for capital expenditures, namely 4 units of Azimuth Stern Driven (ASD) type tugboats with 2x2200 HP which have been realized amounting to Rp228,723,815,000.00 (two hundred twenty eight billion seven hundred twenty three million eight hundred fifteen thousand rupiah). While Rp90,530,000,000 (ninety billion five hundred thirty million rupiah) has been realized in stages of payment for the construction of 1 unit of Azimuth Stern Driven (ASD) type tugboat with 2x2200 HP power and 3 units of motor guide with 2x300 HP power. The remaining IPO funds of Rp76,324,827,500 (seventy-six billion three hundred twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand five hundred rupiah) will be used for other investment needs in 2024.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2024.

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan pada Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana disebutkan di atas, Rapat telah menetapkan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp98.200.713.893,00. Jumlah ini setara dengan Rp18,61 per lembar saham. Dividen tersebut akan diberikan kepada seluruh saham yang berhak, yaitu sebanyak 5.276.771.300 saham, setelah dikurangi *treasury stock* sebanyak 8.039.800 saham.

In accordance with the resolution on the Second Meeting Agenda as mentioned above, the Meeting has determined the payment of cash dividends to the Company's shareholders amounting to Rp98,200,713,893.00. This amount is equivalent to Rp18.61 per share. The dividend will be paid to all eligible shares, totaling 5,276,771,300 shares, net of treasury stock of 8,039,800 shares.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Those entitled to receive dividends are shareholders according to the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for the 2023 Financial Year as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Schedule of Cash Dividend Distribution

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)** End Stock Trading Date with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai • Regular and Negotiated Markets • Cash Market	24 Juni 2024 26 Juni 2024 June 24, 2024 June 26. 2024
2	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)** End Stock Trading Date without Dividend Rights (Ex Dividend)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai • Regular and Negotiated Markets • Cash Market	25 Juni 2024 27 Juni 2024 June 25, 2024 June 27. 2024

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) Shareholders List Date entitled to Dividends (Recording Date)	26 Juni 2024 June 26. 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Cash Dividend Payment Date for 2023 Financial Year	12 Juli 2024 July 12, 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 26 Juni 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 26 Juni 2024.
2. Pembayaran Dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia ("EDI"), beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id atau *Corporate Secretary* Perseroan, beralamat di Pelindo Tower, Lt. 8 Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta 14230, email: corsec@ipcmarine.co.id paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp.10.000,-.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2024.
3. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk

Procedures for Cash Dividends Distribution:

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on June 26, 2024, and/or owners of Company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on June 26, 2024.
2. Dividend Payment:
   a. For entitled Shareholders whose shares are still in script (physical), Dividend payments will be made by transferring the book to the account of the Eligible Shareholder who has provided the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholder to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia ("EDI"), having its address at the Securities Administration Services Office, Wisma SMR Floor 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id or Corporate Secretary of the Company, located at Pelindo Tower, Lt. 8 Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta 14230, email: corsec@ipcmarine.co.id no later than June 26, 2024, at 16.00 WIB accompanied by a photocopy of KTP or passport according to the address in the Register of Shareholders via a stamped letter of Rp.10,000,-.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2024.
3. Dividends to be distributed are subject to tax in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, Eligible Shareholders are requested to pay attention to the following matters:
   a. For Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), they are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or EDI no later than June 26, 2024, at 16.00 WIB. In accordance with Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
2) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
   1) Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
   2) Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, Cash Dividends are not deducted from Income Tax (PPh) for:

1) Domestic Individual Taxpayers with the condition that the Dividends must be invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period. If the Individual Taxpayer does not meet these requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the domestic Individual Taxpayer himself as regulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021.
2) Domestic Corporate Taxpayers.

b. For Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares:
   1) Placed in KSEI collective custody, or
   2) Not included in KSEI's collective custody (holding shares in scrip form), and whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax as well as submitting a Certificate of Domicile ("SKD") to KSEI (for those whose shares are in collective custody) or EDI (for those whose shares are not included in KSEI's collective custody or shareholders in scrip form), no later than June 26, 2024, at 16:00 WIB, using the format and procedures as stipulated in Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements. Without an SKD in the format referred to, Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Extraordinary GMS in 2024

Penyelenggaraan RUPSLB

Holding of EGMS

Hari/Tanggal **Day/Date**	:	Rabu, 25 September 2024 Wednesday, September 25, 2024
Waktu **Time**	:	Pukul 10.32 WIB s.d. 10.49 WIB
Tempat **Location**	:	Pelindo Tower Lt. 8, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara, 14230
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir **Present Members of the Board of Commissioners and Directors**	:	Dewan Komisaris • Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) • R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) • Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) **Direksi** • Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) • Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) • Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko) **Board of Commissioners** • Zuhri Iryansyah (President Commissioner) • R.R. Dewi Ariyani (Commissioner) • Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner) **Board of Directors** • Shanti Puruhita (President Director and Commercial and Business Development Director) • Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation) • Reini Delfianti (Director of Finance and HR)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPSLB **Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS**	:	-

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB

EGMS Holding Stages

19 Agustus 2024	3 September 2024	25 September 2024	25 September 2024
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/19/8/2/KGC/SPR/JAI-24 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. SK.03/19/8/2/KGC/SPR/JAI-24	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/3/9/2/KGC/SPR/JAI-24 GMS Summons to Shareholders via Letter No. SK.03/3/9/2/KGC/SPR/JAI-24	Pelaksanaan RUPSLB di Pelindo Tower Lt. 8, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara, 14230 GMS holding at the Pelindo Tower Lt. 8, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara, 14230	Berita Acara RUPSLB dimuat dalam Risalah RUPSLB No. 03 tanggal 25 September 2024 Minutes of the EGMS are contained in the Minutes of the EGMS No. 03 dated September 25, 2024

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Tahun 2024 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.646.745.510 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,06% dari 5.276.771.300 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Resolution of the Extraordinary GMS

The Extraordinary GMS 2024 was attended by the entire Board of Commissioners and Directors, as well as the Company's Shareholders who attended as many as 4,646,745,510 shares with valid votes or equivalent to 88.06% of 5,276,771,300 shares which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu PT EDI Indonesia dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

The Company has appointed an independent party, PT EDI Indonesia to count and/or validate the votes and Notary Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. to further validate and announce the results of the vote count.

Berikut ini adalah hasil keputusan RUPSLB beserta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024.

The following are the results of the EGMS Decision and the follow-up by the Company's Management until the end of 2024.

RUPS Luar Biasa tanggal 25 September 2024	Extraordinary GMS dated September 25, 2024
Mata Acara Rapat ke-1: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	**First Meeting Agenda:** Changes in the composition of the Company's Management
Hasil keputusan: 1. Menyetujui mengangkat Bapak Fransiscus Budi Prayitno sebagai Komisaris Independen Perseroan. 2. Pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Dengan adanya pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisaris Utama : Bapak Zuhri Iryansyah Komisaris : Ibu R.R. Dewi Ariyani Komisaris Independen : Bapak Bay Mokhamad Hasani Komisaris Independen : Bapak Fransiscus Budi Prayitno **Direksi** Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis: Ibu Shanti Puruhita Direktur Armada dan Operasi : Bapak Muhammad Iqbal Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko : Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Resolutions:** 1. Approved the appointment of Mr. Fransiscus Budi Prayitno as Independent Commissioner of the Company. 2. The The appointment is effective as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 with due observance of the laws and regulations in the Capital Market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time. 3. With these appointments, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors will be as follows: **Board of Commissioners** President Commissioner : Mr. Zuhri Iryansyah Commissioner : Mrs. R.R. Dewi Ariyani Independent Commissioner : Mr. Bay Mokhamad Hasani Independent Commissioner : Mr. Fransiscus Budi Prayitno **Board of Directors** President Director and Commercial and Business Development Director : Mrs. Shanti Puruhita Director of Fleet Management and Operation : Mr. Muhammad Iqbal Director of Finance, Human Resources and Risk Management : Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas 4. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state in a separate Notarial deed and take all necessary actions related to changes in the nomenclature of the Company's Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.	**Follow-up on Resolution::** The resolutions have been realized in 2024.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023, Hasil Keputusan dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Di tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Implementation of the 2023 GMS, Resolutions, and Follow-up by Management

In 2023, the Company has held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS for Financial Year 2022 with the following details:

Penyelenggaraan RUPS
Holding of GMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 21 Juni 2023 Wednesday, June 21, 2023
Waktu Time	:	Pukul 10.22 WIB s/d 11.23 WIB
Tempat Location	:	Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	**Dewan Komisaris** • Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) • Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) **Direksi** • Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis • Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) • Reini Delfianti (Direktur Keuangan dan SDM) **Board of Commissioners** • Zuhri Iryansyah (President Commissioner) • Bay Mokhamad Hasani (Independent Commissioner) **Board of Directors** • Shanti Puruhita (President Director and Commercial and Business Development Director) • Muhammad Iqbal (Director of Fleet Management and Operation) • Reini Delfianti (Director of Finance and HR)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	**Dewan Komisaris** • R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) tidak dapat hadir dikarenakan sedang menjalankan ibadah haji. • Hary Kriswanto (Komisaris Independen) tidak dapat hadir dikarenakan sakit. **Board of Commissioners** • R.R. Dewi Ariyani (Commissioner) was unable to attend because she was on Hajj pilgrimage. • Hary Kriswanto (Independent Commissioner) was unable to attend because of sickness.

Tahapan Pelaksanaan RUPS
GMS Holding Stages

15 Mei 2023	30 Mei 2023	21 Juni 2023	23 Juni 2023
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/15/5/1/KGC/SPR/JAI-23 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. SK.03/15/5/1/KGC/SPR/JAI-23	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/30/5/1/KGC/SPR/JAI-23 GMS Summons to Shareholders via Letter No. SK.03/30/5/1/KGC/SPR/JAI-23	Pelaksanaan RUPS di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 GMS holding at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310	Berita Acara RUPS dimuat dalam Risalah RUPS No. SK.03/23/6/1/KGC/SPR/JAI-23 The minutes of the GMS are contained in the GMS Minutes No. SK.03/23/6/1/KGC/SPR/JAI-23

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.689.124.810 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,86% dari 5.276.771.300 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Resolution of the Annual GMS

The The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2022 was attended by the members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the Company's Shareholders, representing 4,689,124,810 shares with valid votes, equivalent to 88.86% of the total 5,284,811,100 shares issued by the Company.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu PT EDI Indonesia dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Berikut hasil Keputusan RUPS dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023.

To ensure transparency and accuracy, the Company appointed an independent party, namely PT EDI Indonesia, to calculate and validate the votes, and Notary Ashoya Ratam, to further validate and announce the results of the vote count.

The following are the results of the GMS Decision and the followup by Company Management until the end of 2023. Furthermore, in connection with the resolution on the Second

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 21 Juni 2023	Annual GMS for the Financial Year 2022 dated June 21, 2023
Mata Acara Rapat ke-1: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.	**First Meeting Agenda:** Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2022, and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2022.
Hasil keputusan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00418/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.	**Resolutions:** 1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report conducted for the Financial Year 2022, and ratifed the Company's Financial Statement for the same period. The Financial Statement has been audited by the PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm, as indicated in their report Number: 00418/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 dated March 27, 2023, with the opinion stating "the attached financial report presented fairly, in all material respects, the financial position of PT Jasa Armada Indonesia Tbk as of December 31, 2022, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards." 2. Granted full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners for management and supervisory actions during the financial year 2022. This release of responsibility applies as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statement for the financial year 2022.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2023.
Mata Acara Rapat ke-2: Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	**Second Meeting Agenda:** Determination of the Determination of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year.
Hasil keputusan: Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp150.654.848.841,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dipergunakan sebagai berikut: a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp30.130.969.768,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau kurang lebih sebesar 20%.	**Resolutions:** Approved the determination of the use of the Company's profits for the 2022 financial year, totaling Rp150,654,848,841.00 (one hundred fifty billion six hundred fifty-four million eight hundred forty-eight thousand eight hundred and forty-one rupiah), to be allocated as follows: a. Reserves as referred to in Article 70 of the Company Law amounting to Rp30,130,969,768.00 (thirty billion one hundred thirty million nine hundred sixty-nine thousand seven hundred and sixty-eight rupiah), or approximately 20%.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 21 Juni 2023	Annual GMS for the Financial Year 2022 dated June 21, 2023
b. Dividen final sebesar Rp113.028.441.246,00 (seratus tiga belas miliar dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau kurang lebih sebesar 75,02% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari: 1) Dividen interim sebesar Rp19.418.518.384,00 (sembilan belas miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau Rp3,68 per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 23 Desember 2022. 2) Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp93.609.922.862,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau Rpl 7,74 per lembar saham.	b. The resolutions have been realized in 2023 Final dividend of Rp113,028,441,246.00 (one hundred thirteen billion twenty-eight million four hundred forty-one thousand two hundred and forty-six rupiah), or approximately 75.02%, to be distributed to shareholders as follows: 1) Interim dividend of Rp19,418,518,384.00 (nineteen billion four hundred eighteen million five hundred eighteen thousand three hundred and eighty-four rupiah), or Rp3.68 per share, distributed to shareholders on December 23, 2022. 2) The rest as cash dividends amounting to Rp93,609,922,862.00 (ninety-three billion six hundred nine million nine hundred twenty-two thousand eight hundred and sixty-two rupiah), or Rp7.74 per share.
c. Sisanya sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebesar Rp7.495.437.827,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar 4,98%. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 serta mengumumkannya dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	c. Retained earnings of Rp7,495,437,827.00 (seven billion four hundred ninety-five million four hundred thirty-seven thousand eight hundred and twenty-seven rupiah), or approximately 4.98%, to be used as the Company's working capital. Furthermore, granted authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for distributing dividends for the 2022 financial year and to announce it on the Company's website, the Stock Exchange website, and the KSEI website in accordance with applicable regulations.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.	**Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2023.
Mata Acara Rapat ke-3: Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	**Third Meeting Agenda:** Appointment of the Company's Public Accounting Firm for the 2023 Financial Year.
Hasil keputusan: 1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam bal KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	**Hasil keputusan:** 1. Approved the reappointment of the Public Accounting Firm "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's financial statements for the 2023 financial year and granted the authority to the Board of Commissioners to determine the public accountant's honorarium and any other requirements for their designation. 2. Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm for KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" in the event they are unable to complete the audit of the Company's financial statements for the 2023 financial year due to any reason, including to determine the honorarium for the replacement public accountant, along with fulfilling other requirements for appointment, the Board must consider recommendations from the Company's Audit Committee and adhere to the criteria as stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
Tindak Lanjut atas Hasil keputusan: Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.	**Follow-up on Resolution::** The resolutions have been realized in 2023.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 21 Juni 2023	Annual GMS for the Financial Year 2022 dated June 21, 2023
Mata Acara Rapat ke-4: Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. **Hasil keputusan:** Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Utama untuk: 1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023; 2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022." 3. **Tindak Lanjut atas Hasil keputusan:** Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.	**Fourth Meeting Agenda:** Determining the salary, honorarium, and other allowances for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company, as well as bonuses for these members. **Resolutions:** Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, after consulting with major shareholders, to: 1. Determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2023; 2. Determine tantiems for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 financial year. **Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2023.
Mata Acara Rapat ke-5: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. **Hasil keputusan:** Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut: Total dana hasil penawaran umum bersih Rp439.531.825.000,00 sebesar 10% digunakan untuk modal kerja Perseroan dan telah digunakan seluruhnya dan sebesar 90% dialokasikan untuk belanja modal yakni 4 (empat) kapal tunda yang telah direalisasikan sebesar Rp228.723.815.000,00. Sedangkan Rp90.530.000.000,00 telah dialokasikan untuk pembangunan 1 (satu) kapal tunda dan 3 (tiga) motor pandu. Sisa dana IPO sebesar Rp76.324.827.500,00 akan digunakan untuk kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2023 dan 2024. **Tindak Lanjut atas Hasil keputusan:** Telah ditindak lanjuti di tahun 2023.	**Fifth Meeting Agenda:** Report on the Realization of Public Offering Proceeds Usage. **Resolutions:** As the Fifth Meeting Agenda only serves as a report, there were no decision-making processes involved. The Company's Board of Directors has submitted a report regarding the Realization Report on the Public Offering Proceeds Usage, outlined as follows: A total 10% of the total proceeds from the net public offering of Rp439,531,825,000.00 has been fully utilized for the Company's working capital, and 90% of the rest was allocated for capital expenditure for 4 (four) tugboats amounting to Rp228,723,815,000.00. Additionally, Rp90,530,000,000.00 has been allocated for the construction of 1 (one) tugboat and 3 (three) Pilotaged motorbikes. The remaining IPO funds totaling Rp76,324,827,500.00 will be use for other investment needs in 2023 and 2024. **Follow-up on Resolution:** The resolutions have been realized in 2023.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp93.609.922.8662,00.

Meeting Agenda as mentioned above, the Meeting has decided to pay cash dividends to the Company's shareholders amounting to Rp93,609,922,862.00.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Those entitled to receive dividends are shareholders according to the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for the 2022 Financial Year as follows:

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1.	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)** End Stock Trading Date with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai • Regular and Negotiated Markets • Cash Market	4 Juli 2023 6 Juli 2023 July 4, 2023 July 6, 2023

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
2.	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)** **End Stock Trading Date without Dividend Rights (Ex Dividend)**	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai • Regular and Negotiated Markets • Cash Market	5 Juli 2023 7 Juli 2023 July 5, 2023 July 7, 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) Shareholders List Date entitled to Dividends (Recording Date)	6 Juli 2023 July 6, 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 Cash Dividend Payment Date for 2022 Financial Year	21 Juli 2023 July 21, 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan ("DPS") atau recording date pada tanggal 5 Juli 2022 dan/atau pemilik saham Perusahaan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2022.
2. Pembayaran Dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perusahaan, yaitu PT EDI Indonesia ("EDI"), beralamat beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id atau Corporate Secretary Perusahaan, beralamat di Gedung Citra Towers, Tower Utara Lantai 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta 10630, Tel. (021) 4306789, email: corsec@ipcmarine.co.id paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp.10.000,-.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 21 Juli 2023.
3. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"),

Procedures for Cash Dividends Distribution:

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on July 5, 2022, and/or owners of Company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on July 6, 2022.
2. Dividend Payment:
   a. For entitled Shareholders whose shares are still in script (physical), Dividend payments will be made by transferring the book to the account of the Eligible Shareholder who has provided the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholder to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia ("EDI"), having its address at the Securities Administration Services Office, Wisma SMR Floor 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id or Corporate Secretary of the Company, located at Citra Towers Building, North Tower Floor 21, Jl. Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kebon Blank Kemayoran, Jakarta 10630, Tel. (021) 4306789, email: corsec@ipcmarine.co.id no later than July 6, 2022, at 16.00 WIB accompanied by a photocopy of KTP or passport according to the address in the Register of Shareholders via a stamped letter of Rp. 10,000,-.
   b. For entitled Shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, payment will be made through KSEI and Entitled Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder on July 21, 2023.
3. Dividends to be distributed are subject to tax in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, Eligible Shareholders are requested to pay attention to the following matters:
   a. For Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), they are

diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang -Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
2) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
   1) Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
   2) Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 TAHUN 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or EDI no later than July 6, 2022, at 16.00 WIB. In accordance with Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, Cash Dividends are not deducted from Income Tax (PPh) for:

1) Domestic Individual Taxpayers with the condition that the Dividends must be invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period. If the Individual Taxpayer does not meet these requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the domestic Individual Taxpayer himself as regulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021.
2) Domestic Corporate Taxpayers.

b. For Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares:
   1) Placed in KSEI collective custody, or
   2) Not included in KSEI's collective custody (holding shares in scrip form), and whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 OF 2008 concerning Income Tax as well as submitting a Certificate of Domicile ("SKD") to KSEI (for those whose shares are in collective custody) or EDI (for those whose shares are not included in KSEI's collective custody or shareholders in scrip form), no later than July 6, 2022, at 16:00 WIB, using the format and procedures as stipulated in Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements. Without an SKD in the format referred to, Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

DEWAN KOMISARIS

Sebagai organ pengawas dalam struktur tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris berperan dalam memastikan efektivitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Secara kolegial, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi, memberikan arahan, serta menyampaikan masukan kepada Direksi guna mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam mengawasi kebijakan strategis Direksi, terutama yang berkaitan dengan operasional perusahaan berdasarkan rencana bisnis yang telah disepakati. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Direksi memiliki kompetensi yang memadai serta beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan diangkat dengan tahapan penentuan sumber bakal calon, penjaringan, penilaian serta usulan pengangkatan. Dalam pengangkatan Dewan Komisaris, Pemegang Saham telah mempertimbangkan kriteria dan persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat track record yang bersangkutan, hal ini mengacu kepada pada Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023. Seluruh anggota Komisaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Perusahaan memiliki Pedoman Dewan Komisaris yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pedoman tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: HK.56/4/10/3/ MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Pedoman tersebut senantiasa ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan peraturan dan best practices terkini.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris terhitung efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

BOARD OF COMMISSIONERS

As the supervisory organ in the Company's governance structure, the Board of Commissioners plays a role in ensuring the effectiveness of the Company's management in accordance with the principles of good governance. The Board of Commissioners has the authority to supervise, provide direction, and provide input to the Board of Directors in order to support the achievement of the Company's vision and mission. Furthermore, the Board of Commissioners is responsible to the Shareholders in overseeing the strategic policies of the Board of Directors, especially those related to the company's operations based on the agreed business plan. In carrying out its role, the Board of Commissioners also ensures that the Board of Directors has adequate competence and operates in accordance with applicable laws and regulations.

Board of Commissioners Appointment

The Board of Commissioners of the Company is appointed through the stages of identifying potential candidates, followed by thorough screening, assessment, and nomination. Shareholders carefully consider candidates based on predetermined criteria and requirements, as outlined in the Regulation of the Minister of SOE PER-2/MBU/03/2023, along with an evaluation of their track record. All appointed Commissioners met the requirements, including possessing expertise, integrity, leadership skills, honesty, exemplary conduct, and a strong commitment to advancing the Company's goals in compliance with relevant regulations.

Board of Commissioners Work Guideline

To fulfill its functions and duties effectively, the Board of Commissioners adheres to the Board of Commissioners Guidelines, serving as a roadmap for implementing its responsibilities. These Guidelines are outlined in Joint Decree Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, focusing on the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Regular review and updates ensure alignment with evolving regulatory requirements and best practices.

Board Commissioners Members Term of Office

The term of office for the Board of Commissioners begins from the date set by the GMS and extends until the conclusion of the 5th Annual GMS following the appointment and may be reappointed for an additional 1 (one) more period without diminishing the authority of GMS to dismiss any members at any time.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut dikarenakan berdasarkan kenyataan, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/ atau negara.
- Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Mengundurkan diri.

Board Commissioners Resignation and Dismissal Mechanism

Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time through GMS resolution, provided reasons are stated. Dismissal may occur if the Commissioner:

- Fails to fulfill their duties adequately.
- Violates statutory regulations or provisions of the Articles of Association.
- Engages in actions detrimental to the Company or the country.
- Found guilty by a court decision with permanent legal force.
- Resigns.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2024

Di tahun 2024, terdapat perubahan dalam keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Members Composition, Amount, and Appointment Basis throughout 2024

In 2024, there were changes to the composition of the Company's Board of Commissioners. The Company's Board of Commissioners composition and structure as of December 31, 2024 is as follows:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024
Composition and Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Periods	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	13 Oktober 2020 – RUPST 2025 October 13, 2020 – AGMS 2025	Ke-1 1st	Akta Notaris No. 13 tanggal 13 Oktober 2020 Notary Deed No. 13 dated October 13, 2020
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	14 April 2022 – RUPST 2025 April 14, 2022 – AGMS 2025	Ke-1 1st	Akta Notaris No. 28 tanggal 14 April 2022 Notary Deed No. 28 dated April 14, 2022
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	15 Juli 2020 – RUPST 2025 July 15, 2020 – AGMS 2025	Ke-1 1st	Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020 Notary Deed No. 24 dated July 15, 2020
F. Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	25 September 2024 – RUPST 2029 September 25, 2024 – AGMS 2029	Ke-1 1st	Akta Notaris No. 49 tanggal 24 Oktober 2024 Notary Deed No. 49 dated October 24, 2024

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners is entrusted with supervising management policies and the overall course of management concerning both the Company and its business conducted by the Board of Directors, providing guidance to the Board of Directors, including overseeing the implementation of

panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
4. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
6. Membentuk komite Audit.
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris memiliki hak, sebagai berikut:
1. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan Pemegang Saham disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

the Company's long-term plans, work plans, budgets, and adherence to the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations, all in the best interests of the Company and in alignment with its objectives.

The responsibilities of the Board of Commissioners include:
1. Providing advice to the Board of Directors for the Company's management, prioritizing the Company's interests over specific parties or groups.
2. Reviewing and evaluating the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Examining and approving periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, and signing off on the annual report.
4. Segregating responsibilities among members of the Board of Commissioners.
5. Developing the annual work program for the Board of Commissioners and incorporating it into the Company's work plan and budget.
6. Establishing an Audit Committee.
7. Recommending a Public Accountant to the GMS.
8. Documenting minutes of Board of Commissioners meetings and maintaining copies.
9. Disclosing their and/or their family's share ownership in the Company and other companies, including any changes.
10. Reporting on supervisory tasks conducted during the previous financial year to the GMS.
11. Fulfilling other obligations related to supervisory duties and providing advice, ensuring they do not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

Board of Commissioners Rights and Authorities

In fulfilling its supervisory duties, the Board of Commissioners possesses the following rights:
1. Request the attendance of the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings.
2. Temporarily suspend one or more members of the Board of Directors, with a majority vote, if they act contrary to the Articles of Association, cause losses to the Company, neglect their obligations, or for urgent reasons concerning the Company. The temporary suspension must be communicated in writing to the individual(s) involved and to the Shareholders, along with the reasons for such action.

3. Dewan Komisaris diberi honorarium dan tunjangan serta fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Selain itu, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan mengangkat Satuan Pengawas Internal (SPI), jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk komite-komite selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas usulan/perbuatan Direksi, yaitu:
    a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
    b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kerja Sama Operasi (KSO),

3. Receive honorariums, allowances, and benefits, including post-service compensation, the nature and amount of which are determined by the GMS, considering applicable laws and regulations.
4. Access information about the Company in a timely, accurate, and comprehensive manner.

Additionally, the Board of Commissioners holds the authority to:

1. Review books, correspondence, and other documents, examine cash for verification purposes, inspect securities, and assess the Company's assets.
2. Access the premises, buildings, and offices utilized by the Company.
3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters related to the Company's management.
4. Be informed of all policies and actions undertaken or to be undertaken by the Board of Directors.
5. Summon the Board of Directors and/or other officials, with the Board of Directors' knowledge, to attend Board of Commissioners meetings.
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners and appoint an Internal Audit Unit (SPI), if deemed necessary.
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors as per the Articles of Association.
8. Establish committees, aside from the audit committee, if deemed necessary considering the Company's capabilities.
9. Engage experts for specific matters and within a designated time frame, with expenses covered by the Company, if necessary.
10. Take actions to manage the Company under specific circumstances and for a defined period, in accordance with the Articles of Association and without violating applicable laws and regulations.
11. Attend Board of Directors meetings and provide insights on the matters discussed.
12. Exercise other supervisory powers, provided they do not contravene statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.
13. Provide written approval for the Board of Directors' proposals/actions, namely:
    a. Placing fixed assets as collateral for short-term credit withdrawals;
    b. Organizing cooperation with business entities or other parties for a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Building Operate Transfer (BOT), Build Own

Bangunan Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/ BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/ BTO) dan kerjasama lainnya;

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
g. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
h. Menetapkan dan merubah Logo Perusahaan;
i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
j. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
k. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/ atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
l. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/ atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
m. Melakukan tindakan-tindakan lain yang nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yaitu:
    i. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
    ii. Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
    iii. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
    iv. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP;
    v. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
    vi. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist)

Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO), and other collaborations.

c. Receive or provide medium/long term loans, except for loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to the Company's subsidiaries with the provisions that the loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
d. Write off bad debts and dead goods inventory from the books;
e. Releasing and writing off movable fixed assets with an economic life, which is generally applicable in the industry, for up to 5 (five) years;
f. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
g. Determining the Company's Long Term Plan;
h. Determine and change the Company Logo;
i. Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
j. Establish foundations, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
k. Charging fixed and routine Company costs for foundations, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
l. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint venture companies and/or subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the GMS;
m. Carrying out other actions with a value of up to 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, namely:
    i. Pledging fixed assets for medium/long-term credit withdrawals;
    ii. Making capital investments in other companies;
    iii. Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures;
    iv. Carrying out other actions that have not been specified in the RKAP;
    v. Carrying out mergers, consolidations, takeovers, separations, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
    vi. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist);

vii. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris wajib memberikan keputusan.

vii. Within 30 (thirty) days from receipt of the request or complete explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to provide a decision.

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Untuk memastikan penerapan GCG yang efektif, Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas di antara anggotanya. Keputusan ini didasarkan pada Akta, yang secara jelas mengatur pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota.

Duties Segregation Among the Board of Commissioners Members

To ensure the effective implementation of GCG, the Board of Commissioners establishes a distribution of duties among its members. This decision is based on the Deed, which clearly regulates the distribution of roles and responsibilities of each member.

Rincian Tugas Komisaris Utama

Zuhri Iryansyah bertanggung jawab atas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi di bidang:

- Koordinator pembinaan dan pengawasan pengawasan manajemen, komersial, keuangan dan operasional.
- Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang SDM, Hukum dan Humas.
- Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang Teknik dan Armada.

President Commissioners Duties

Zuhri Iryansyah is tasked with supervising and advising the Board of Directors in the following areas:

- Coordinating management, commercial, financial, and operational development and supervision.
- Coordinating the development and oversight in the fields of HR, Law, and Public Relations.
- Coordinating the development and oversight in the Engineering and Fleet sectors.

Tabel Bidang Tugas Anggota Dewan Komisaris
Table of Duties of the Board of Commissioners Members

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Duties
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	• Koordinator Pembinaan dan pengawasan manajemen, komersial, keuangan dan operasional. • Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang SDM, Hukum dan Humas. • Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang Teknik dan Armada. • Coordinating management, commercial, financial, and operational development and supervision. • Coordinating development and supervision in the fields of HR, Law, and Public Relations. • Coordinating development and supervision in the Engineering and Fleet sector.
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	• Koordinator Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko • Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan dan pengembangan usaha. • Coordinating Finance and Risk Management. • Conducting guidance and supervision in the field of finance and business development.
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan. • Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang SDM. • Providing guidance and supervision in the financial sector. • Conducting guidance and supervision in the HR sector.
Fransiscus Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melakukan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia, GCG dan hal strategis. Providing guidance and supervision of human resources, GCG and strategic matters.

Program Orientasi Bagi Anggota Dewan Komisaris yang Baru

IPCM menetapkan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat sebagai bagian dari upaya memastikan pemahaman menyeluruh terkait perusahaan. Program ini mencakup pengenalan terhadap visi, misi, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, kegiatan usaha, serta kebijakan dan tata kelola yang berlaku. Ketentuan mengenai program orientasi ini diatur dalam Board Manual PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021.

Di tahun 2024, terdapat perubahan dalam susunan maupun komposisi Dewan Komisaris. Oleh karena itu, program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diadakan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Pusat JAI, Jakarta.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Perusahaan menyadari pentingnya peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Untuk itu, berbagai program pelatihan telah diselenggarakan guna memastikan pemahaman yang mendalam terhadap bisnis utama perusahaan serta regulasi yang berlaku. Kebijakan terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi telah diatur dalam Board Manual PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners

IPCM establishes an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners as part of the effort to ensure a thorough understanding of the company. This program includes an introduction to the Company's vision, mission, values, organizational structure, business activities, and applicable policies and governance. Regulations regarding this orientation program are stipulated in the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Number: HK.56/4/10/3/MS-21 which was approved on October 4, 2021.

In 2024, there are changes in the composition of the Board of Commissioners. Therefore, the orientation program for the new members of the Board of Commissioners was held on 25 September 2024 at JAI Head Office, Jakarta.

Board of Commissioners Competency Development Program

The Company recognizes the importance of competency improvement for the Board of Commissioners in order to optimally perform their duties and responsibilities. Therefore, various training programs have been held to ensure a deep understanding of the company's main business and applicable regulations. Policies related to training and competency development of the Board of Directors are regulated in the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Number: HK.56/4/10/3/MS-21 which was approved on October 4, 2021.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has participated in various competency development programs as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	*Finance & Governance*	Finance & Governance	Bali, November 2024	Pusat Pengembangan Akuntansi UI
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) (Commissioner)	*Leadership Program*	*Leadership Program*	Jakarta, September 2024	John Robert Powers
	Project Management	*Project Management*	Maret 2024	LinkedIn Learning

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Sertifikasi Manajemen Risiko	QCRO	Jakarta, Oktober 2024	BNSP
F. Budi Prayitno (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	QCRO	Jakarta, Oktober 2024	BNSP

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan untuk:

1. Mengagungkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja sama Operasi (KSO), Bangunan Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak Perusahaan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi Perusahaan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Types of Decisions that Require Approval from the Board of Commissioners

The following actions can only be carried out by the Board of Directors after obtaining written approval from the Board of Commissioners, while adhering to applicable laws, regulations, and the Company's articles of association:

1. Pledging fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Entering into cooperation with business entities or other parties for a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years, in forms such as licenses, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO), and other collaborations;
3. Receiving or providing medium/long-term loans, excluding loans arising from business transactions, with the provision that loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Writing off bad debts and obsolete inventory from the books;
5. Disposing of the Company's movable fixed assets with an economic life generally applicable in the industry, up to 5 (five) years;
6. Determining the Company's organizational structure one level below the Board of Directors;
7. Carrying out other actions not stipulated in the Company's Work Plan and Articles of Association.

Program Kerja Dewan Komisaris

Perusahaan terus mendorong peningkatan kinerja melalui arahan dan pengawasan yang efektif. Dewan Komisaris berperan dalam memastikan bahwa setiap langkah strategis selaras dengan tujuan jangka panjang Perusahaan. Dengan

Board of Commissioners Work Program

The Company continues to drive performance improvement through effective direction and supervision. The Board of Commissioners plays a role in ensuring that every strategic move is aligned with the Company's long-term goals.

dukungan kepada manajemen dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan, Dewan Komisaris berupaya menciptakan nilai berkelanjutan. Adapun program kerja yang dijalankan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris.
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Rapat dengan Pemegang Saham.
4. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan.
5. Program Pengembangan dan Pelatihan Dewan Komisaris.
6. Program Pengendalian Internal.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2024

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Rencana tersebut mencakup berbagai agenda utama, seperti penyelenggaraan rapat, pengawasan kinerja perusahaan, pemberian arahan, kunjungan kerja, serta program pengembangan kompetensi. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya perusahaan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, di antaranya:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris.
2. Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024.
4. Pengawasan, Rekomendasi dan Nasihat Dewan Komisaris.
5. Penilaian Kinerja Direksi (*Unaudited*).
6. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
7. Kunjungan Kerja.
8. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite-komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris memastikan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan Perusahaan. Untuk mendukung tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketiga Komite ini berperan dalam mengevaluasi, meninjau, dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Kinerja setiap komite dinilai berdasarkan pencapaian program kerja, kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, tingkat kehadiran dalam rapat, serta kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

With management support and active engagement with stakeholders, the BOC seeks to create sustainable value. The work programs carried out throughout 2024 are as follows:

1. Board of Commissioners Meeting
2. Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors
3. Meeting with Shareholders
4. Field Visit Program
5. Board of Commissioners Development and Training Program
6. Internal Control Program

Implementation the Board of Commissioners Duties in 2024

In conducting its role as supervisor and advisor, the Board of Commissioners is guided by the work plan that has been established for 2024. These plans include various main agendas, such as holding meetings, supervising company performance, providing direction, working visits, and competency development programs.
Throughout 2024, the Board of Commissioners actively carried out its duties and responsibilities in overseeing the running of the company, in accordance with the established plan, including:

1. Internal meetings of the Board of Commissioners.
2. Coordination meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors.
3. Implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders (GMS).
4. Supervision, Recommendation and Advice of the Board of Commissioners.
5. Performance Assessment of the Board of Directors (Unaudited).
6. Performance Assessment of the Board of Commissioners.
7. Working Visit.
8. Training and Competency Development of the Board of Commissioners.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners ensures effective supervision of the Company's management throughout its role. In order to support this task, the Board of Commissioners has an Audit Committee, a Risk Management Monitoring Committee, and a Nomination and Remuneration Committee. These three Committees play a role in evaluating, reviewing and providing recommendations to improve the quality of the company's management by the Board of Directors. The performance of each committee is assessed based on the achievement of the work program, compliance with predetermined plans, attendance at meetings, and the quality of recommendations made.

KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam struktur tata kelola perusahaan yang sehat, independensi pengawasan menjadi faktor utama. Oleh karena itu, Komisaris Independen diangkat untuk memastikan pengawasan yang objektif tanpa adanya keterikatan finansial, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali, maupun perusahaan. Dengan posisi yang bebas dari konflik kepentingan, Komisaris Independen dapat menjalankan tugasnya secara mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Komposisi Komisaris Independen Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 2 (dua) Komisaris Independen, yaitu Bay Mokhamad Hasani, yang diangkat sejak 15 Juli 2020 berdasarkan Akta No. 24 tanggal 15 Juli 2020 dan F. Budi Prayitno yang diangkat sejak 25 September 2024 berdasarkan Akta Notaris No. 49 tanggal 24 Oktober 2024.

Jumlah tersebut mencakup lebih dari 50% dari total 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, sehingga memenuhi batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN. Selain itu, komposisi ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan Komisaris Independen sebanyak 30% dari total anggota Dewan Komisaris.

Dengan demikian, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memastikan keberagaman, serta menjaga independensi dalam pengambilan keputusan strategis.

Kriteria Penentuan dan Pemenuhan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan, terdapat kriteria independensi yang tercantum di bawah ini:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Within a sound corporate governance structure, supervisory independence is a key factor. Therefore, Independent Commissioners are appointed to ensure objective supervision without any financial, management, share ownership, or family ties with the Board of Commissioners, Board of Directors, controlling shareholders, or the company. Independent Commissioners are free from conflicts of interest, enabling them to perform their duties independently in accordance with GCG principles.

Independent Commissioner Composition and Membership within the Company's Board of Commissioners Structure

The composition of the Company's Independent Commissioners refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. As of December 31, 2023, the Company has 2 (two) Independent Commissioners, namely Bay Mokhamad Hasani, who was appointed since July 15, 2020 based on Deed No. 24 dated July 15, 2020 and F. Budi Prayitno who was appointed since September 25, 2024 based on Notary Deed No. 49 dated October 24, 2024.

This number covers more than 50% of the total 4 (four) members of the Board of Commissioners, thus meeting the minimum limit stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs. In addition, this composition is also in line with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires an Independent Commissioner of 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Therefore, the Company always applies the principles of good corporate governance, ensures diversity, and maintains independence in making strategic decisions.

Determination and Fulfillment Criteria of the Independent Commissioners Independency

The Company's Independent Commissioner ensures the effective functioning of the monitoring mechanism in accordance with statutory regulations. To be appointed as an Independent Commissioner of the Company, candidates must meet the following independence criteria:

1. They should not hold a Director position in an affiliated Company.

2. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
4. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.
5. Rangkap jabatan komisaris maksimal 2 (dua) perusahaan.

2. They should not have been employed by the Company or its affiliates within the last 1 (one) year.
3. They must not have any financial connections, either directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services and products to the Company and its affiliates.
4. They must be free from conflicts of interest and business activities or other relationships that could impede or interfere with their ability to act or think independently within the scope of the Company.
5. They can concurrently hold the position of commissioner in a maximum of 2 (two) other companies.

Pernyataan tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Di tahun 2024, posisi Anggota Komisaris Independen diisi oleh Saudara Bay Mokhamad Hasani dan Saudara F. Budi Prayitno. Sepanjang tahun 2024, tidak ada situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan oleh para Komisaris Independen.

Independence Statement of Each Independent Commissioner

In 2024, the position of Independent Commissioner was filled by Mr. Bay Mokhamad Hasani and Mr. F. Budi Prayitno. Throughout 2024, there were no situations that could potentially lead to conflicts of interest in decision making by the Independent Commissioners.

Status Independensi Komisaris Independen Tahun 2024
Board of Commissioners Independency Status in 2024

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independency	
	Bay Mokhamad Hasani	F. Budi Prayitno*
Bukan Anggota Manajemen Perusahaan Not a Member of the Company's Management	√	√
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Independent from business and other relationships that may influence decision-making.	√	√
Bukan pemegang saham mayoritas Perusahaan atau pekerja yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to the majority shareholder of the Company.	√	√
Bukan Pekerja atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not an Employee or executive at the company or any of its affiliation within 3 (three) years prior to joining the Board of Commissioners.	√	√
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pekerja yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not a primary professional advisor or consultant for the Company or its affiliates, or in direct contact with such service providers within 3 (three) years prior to joining the Board of Commissioners.	√	√
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pekerja dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. Not a supplier or primary customer of the Company or its affiliates, or an employee with direct or indirect contact with such suppliers or customers.	√	√

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independency	
	Bay Mokhamad Hasani	F. Budi Prayitno*
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi. Not engaged in any contractual relationship with the company or its affiliates as a Director.	√	√
Seluruh Komisaris Perusahaan sebagaimana Disebutkan di atas Telah Memenuhi Kriteria Independensi.	√	√

*) Menjabat sejak 25 September 2024
*) In office since September 25, 2024

Komisaris Independen Perusahaan saat ini masih menjalani periode pertama masa jabatannya. Oleh karena itu, penyampaian Surat Pernyataan Independensi secara terpisah pada saat ini tidak diperlukan.

The Company's Independent Commissioner is currently serving his first term of office. Therefore, the submission of a separate Independence Statement is not required at this time.

DIREKSI

Sebagai penggerak utama dalam pengelolaan Perusahaan, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan operasional sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Dalam menjalankan perannya, Direksi bertindak untuk kepentingan Perusahaan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, dengan berlandaskan Anggaran Dasar serta ketentuan hukum yang berlaku. Setiap anggota Direksi diharuskan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip tata kelola yang baik.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors, as the main driving force in the management of the Company, has full authority and responsibility in carrying out operations under the Company's vision and mission. In carrying out its role, the Board of Directors acts in the interests of the Company, both internally and externally, based on the Articles of Association and applicable legal provisions. Each member of the Board of Directors must carry out their duties with full responsibility, prioritizing professionalism, transparency, accountability, and good governance principles.

Prosedur Pengangkatan Direksi

Pengangkatan Direksi di lingkungan IPCM dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM, yang dimulai dengan penentuan sumber bakal calon, penjaringan, penilaian serta usulan pengangkatan. Sebagai pertimbangan untuk mengangkat Anggota Direksi Perusahaan memiliki kriteria dan persyaratan serta diwajibkan lulus dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh fungsi Talent Pool yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Calon Anggota Direksi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

Board of Directors Appointment Procedure

The Board of Directors appointment within the IPCM follows the Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources, which started from sourcing candidates, selecting, assessing, and submitting an appointment proposal. To be considered for a Board of Directors position, candidates must meet specific criteria and requirements and undergo a Fit and Proper Test conducted by the Talent Pool function organized by Shareholders. General requirements include expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior, and a high dedication to advancing and developing the Company in accordance with applicable regulations.

Untuk Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- Meninggal dunia.
- Masa jabatannya berakhir.
- Diberhentikan berdasarkan keputusan.
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengundurkan diri.

The position of a member of the Board of Directors terminates under the following circumstances:

- Passed away.
- End of term.
- Dismissal based on resolution.
- No longer meeting the requirements as a Board of Directors member as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
- Resigned.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang berlaku sejak 4 Oktober 2021. *Board Manual* ini mengatur peran dan tanggung jawab Direksi, termasuk penyusunan serta penyampaian RJPP, RKAP, dan Laporan Berkala.

Masa Jabatan Anggota Direksi

Masa jabatan Direksi terhitung efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Mekanisme Pengunduran Direksi dan Pemberhentian Direksi

Prosedur terkait pemberhentian direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga Anggaran Dasar Perusahaan.

Untuk Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- Meninggal dunia.
- Masa jabatannya berakhir.
- Diberhentikan berdasarkan keputusan.
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengundurkan diri.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2024

Struktur dan susunan Direksi Perusahaan ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut:

- Jumlah Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan.
- Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Board of Directors Work Guideline

In carrying out its duties, the Board of Directors is guided by the rules that have been established to ensure good corporate governance. These provisions are contained in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedures (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Number: HK.56/4/10/3/MS-21 which has been in effect since October 4, 2021. This Board Manual regulates the roles and responsibilities of the Board of Directors, including the preparation and submission of RJPP, RKAP, and Periodic Reports.

Board of Directors Member Office Term

The office term for the Board of Directors begins from the date determined by the GMS and lasts until the closing of the 5th Annual GMS after the appointment date. They can be reappointed for 1 (one) subsequent period, without diminishing the right of the GMS to dismiss any members of the Board of Directors at any time.

Board of Directors Resignation and Dismissal Mechanism

Procedures regarding the Board of Directors dismissal of PT Jasa Armada Indonesia Tbk are governed by Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014, and the Company's Articles of Association.

The position of a member of the Board of Directors terminates under the following circumstances:

- Passed away.
- End of term.
- Dismissal based on resolution.
- No longer meeting the requirements as a Board of Directors member as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
- Resigned.

Board of Directors Member Composition, Number, Structure, and Appointment Basis Throughout 2024

The Company's Board of Directors structure and composition is determined based on the following provisions:

- The number of Directors is at least 1 (one) person and is adjusted to the needs, level of complexity, and strategic plans of the Company.
- If the Board of Directors consists of more than 1 (one) member, a member is appointed as President Director.

- Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

- The composition, segregation of duties, and authority of the Board of Directors based on the Company's organizational structure are determined by the GMS. If the segregation of duties is not determined by the GMS, it will be decided by the Board of Directors decree.

Di tahun 2024, terjadi perubahan dalam struktur Direksi. Berikut adalah susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2024:

In 2024, there was a change in the structure of the Board of Directors. The following is the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2024:

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2024

Board of Directors Composition and Structure as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Periods	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Shanti Puruhita	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Act. Commercial and Business Development Director	12 Juni 2024 – RUPST 2029 June 12, 2024 - AGMS 2029	Ke-2 2nd	• Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020; • Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Juni 2021; • Akta Notaris No. 16 tanggal 6 Desember 2022. • Akta Notaris Nomor 31 tanggal 12 Juni 2024. • Notary Deed No. 24 dated July 15, 2020; • Notary Deed Number 33 dated June 17, 2021; • Notary Deed Number 16 dated December 6, 2022; • Notary Deed No. 31 dated June 12, 2024.
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	12 Juni 2024 – RUPST 2029 June 12, 2024 - AGMS 2029	Ke-2 2nd	• Akta Notaris No. 13 tanggal 13 Oktober 2020; • Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Juni 2021. • Akta Notaris Nomor 31 tanggal 12 Juni 2024. • Notary Deed No. 13 dated October 13, 2020; • Notary Deed Number 33 dated June 17, 2021; • Notary Deed No. 31 dated June 12, 2024.
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Resources and Risk Management	12 Juni 2024 – RUPST 2029 June 12, 2024 - AGMS 2029	Ke-1 1st	Akta Notaris Nomor 31 tanggal 12 Juni 2024. Notary Deed No. 31 dated June 12, 2024.

Independensi Direksi

Independensi Direksi sangat dijaga agar dapat memberikan keputusan dan dapat melakukan pengelolaan perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan. Direksi Perusahaan tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau kepemilikan saham dan/atau hubungan kepengurusan dengan Perusahaan maupun

Board of Directors Independency

The independency of the Board of Directors is rigorously upheld to ensure the ability to make decisions and manage the company without any conflicts of interest. The Company's Board of Directors are prohibited from having financial or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or controlling shareholders. Additionally, Directors are not

Perusahaan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen serta melaksanakan fungsi dan tugasnya secara individual maupun kolegial.

Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan demi kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan yang meliputi;
      - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;
      - Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
      - Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan Perusahaan;
      - Mengangkat dan memberhentikan Satuan Pengawas Internal Perusahaan.

allowed to hold shares or management positions that could compromise their independence or affect their ability to fulfill their functions and duties independently or collectively.

Board of Directors Duties and Responsibilities

Directors are tasked with managing the Company in its best interests and in alignment with the Company's aims and objectives. They are also responsible for representing the Company internally and externally, subject to the limitations stipulated by applicable laws, regulations, the Articles of Association, and General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.

As per the Company's Articles of Association, Directors have the following duties and authorities:

1. The Board of Directors is responsible for managing the company's affairs in the best interests of the company and in accordance with its aims and objectives, representing the company both internally and externally at court regarding any matters and events, subject to the limitations outlined in statutory regulations, the Articles of Association, and GMS Resolutions.

2. In fulfilling their duties, Directors holds the following authorities and obligations:
   a. Board of Directors hold the authority and obligations as follows:
      - Regulating the delegation of Directors' representation powers, both within and outside the court, to one or several specifically appointed Directors or employees, individually or jointly, as well as to other individuals, and the delegation of representation powers to Branch Heads or Representatives domestically or internationally.
      - Establishing provisions related to Company personnel, such as determining salaries, pensions, or other benefits for employees, in compliance with applicable laws, regulations, and GMS resolutions.
      - Appointing and dismissing Company employees in accordance with Company personnel regulations, as well as applicable laws and regulations.
      - Appointing and dismissing the Company's Corporate Secretary;
      - Appointing and dismissing the company's Internal Audit Unit;

- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

b. Direksi berkewajiban untuk:
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
- Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
- Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perusahaan lainnya;

- Performing all actions related to the management and ownership of the Company's assets, entering into agreements binding the Company with other parties, and representing the company in legal matters, subject to restrictions as stipulated by statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

b. The Board of Directors has the following obligation:
- Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in alignment with its aims, objectives, and business operations;
- Timely prepare the Company's Long Term Plan, Work Plan, Budget, and any amendments thereof, submitting them to the Board of Commissioners for approval;
- Provide explanations to the Board of Commissioners regarding the Company's Long Term Plan, Work Plan, and Budget;
- Generate a Shareholder List, Special List, and Minutes of Directors' Meetings;
- Produce an Annual Report to demonstrate accountability for the Company's management, along with financial documents as mandated by the Law on Company Documents;
- Prepare Financial Statements according to Financial Accounting Standards, forwarding them to the Public Accountant for audit;
- Submit Annual Reports, including Financial Statements, to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval and ratification;
- Offer explanations to the GMS concerning the Annual Report;
- Present the Balance Sheet and Profit and Loss Report, approved by the GMS, to the Minister responsible for Law and Human Rights as per statutory regulations;
- Maintain the Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, Commissioners Meeting Minutes, Directors Meeting Minutes, Annual Report, and Company financial documents, along with other Company documents;

- Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (11) ayat ini;
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perusahaan;
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Store essential documents, including Shareholder Register, Special Register, GMS Minutes, Minutes of Commissioners Meetings, Minutes of Directors Meetings, Annual Report, Company financial documents, and other Company documents, at the Company's premises.
- Develop an accounting system complying with Financial Accounting Standards and internal control principles, particularly the segregation of management, recording, storage, and supervision functions;
- Provide periodic reports as per applicable regulations and other reports as requested by the Board of Commissioners;
- Prepare the Company's organizational structure with detailed responsibilities;
- Offer explanations regarding all matters queried or requested by members of the Board of Commissioners;
- Develop and determine the Company's organizational structure.
- Fulfill other obligations as stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan fungsinya. Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24, dengan rincian sebagai berikut:

Segregation of Duties among Directors

Segregation of duties and authority among members of the Board of Directors aims to enhance the effectiveness of their functions. This is governed in the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24, with the following details

Tabel Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
Segregation of Duties and Authorities among Directors

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision	
Direktur Utama **President Director**	**Fungsi:** • Bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan yang efektif dan efisien berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. • Pembuat Kebijakan strategis dalam penentuan arah pengembangan bisnis perusahaan. • Berperan sebagai koordinator Dewan Direksi perusahaan.	**Function:** • Responsible for managing and ensuring the effective and efficient continuity of the Company's business in accordance with applicable laws and regulations, as well as the principles of Good Corporate Governance. • Acts as the strategic policymaker in determining the direction of the Company's business development. • Serves as the coordinator of the Company's Board of Directors.

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision	
	Tugas: Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan dalam kepengurusan Perusahaan, yang berkaitan dengan pembinaan program kegiatan: a. Audit Internal; b. Sekretaris Perusahaan; c. Hukum; d. Komersial dan Pengembangan Bisnis; e. Armada dan Operasi; f. Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. **Wewenang:** Menetapkan kebijakan-kebijakan pembinaan pada semua kegiatan di Perusahaan.	**Duties:** Responsible for policies related to the management of the Company, particularly in overseeing the following programs and activities: a. Internal Audit; b. Corporate Secretary; c. Legal Affairs; d. Commercial and Business Development; e. Fleet and Operations; f. Finance, Human Resources, and Risk Management. **Authority:** Authorized to establish guidance policies for all activities within the Company.
Direktur Armada dan Operasi **Director of Fleet and Operations**	**Fungsi:** Mengelola program kerja bidang Armada dan Operasi. **Tugas:** 1. Armada a. Merencanakan, melaksanakan, dan memonitor kegiatan perawatan dan perbaikan kapal serta dry-docking b. Memonitor status kelas dan sertifikasi serta mengoordinasikan kegiatan survey dan inspeksi c. Memonitor kegiatan perawatan kapal onboard d. Melakukan inspeksi regular dan memantau kondisi kesiapan dan kelaikan kapal serta mengoordinasikan tindak lanjut yang dibutuhkan e. Mengoordinasikan rencana dry-docking dengan melibatkan kru kapal dan menyusun spesifikasi dan repair list sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan kelancaran operasi f. Menyusun anggaran/budget docking di bawah tanggung jawabnya dan mengajukannya dalam RKA tahunan g. Melaksanakan budgeting control terhadap penyerapan realisasi penggunaan budget docking h. Mengoordinasikan perencanaan docking dan menyusun dock specs atas kebutuhan docking tersebut i. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dalam docking. 2. Operasi pemanduan dan penundaan a. Bertindak selaku Direktur Pembina fungsi DPA pada VP Operasi dan DPA b. Menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan pelayanan kapal dan pemanduan c. Menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan, charter kapal dalam memenuhi kebutuhan operasi d. Membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan kegiatan operasi pelayanan kapal dan pemanduan e. Mengoordinasikan dan menyusun perencanaan jangka panjang dan jangka pendek kegiatan operasi serta melakukan pengendalian sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan f. Merencanakan dan mengarahkan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan, serta sistem dan prosedur kerja bidang operasi g. Mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan operasi, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak lain yang terkait	**Function:** To manage work programs in the Fleet and Operations division. **Duties:** 1. Fleet a. Plan, implement, and monitor vessel maintenance and repair activities, including dry-docking b. Monitor class status and certification, and coordinate survey and inspection activities c. Monitor onboard vessel maintenance activities d. Conduct regular inspections and monitor the readiness and seaworthiness of vessels, as well as coordinate necessary follow-ups e. Coordinate dry-docking plans by involving vessel crews and prepare specifications and repair lists as needed, ensuring operational efficiency and continuity f. Prepare the docking budget under their responsibility and submit it as part of the annual budget plan (RKA) g. Perform budget control over docking budget realization h. Coordinate docking plans and prepare dock specifications as required i. Be responsible for all activities during docking 2. Pilotage and Towage Operations a. Act as the Supervising Director for the DPA function under the VP of Operations and DPA b. Establish, implement, and control the management of ship and pilotage services c. Establish, implement, and control vessel chartering to meet operational needs d. Develop strategic policies in managing ship and pilotage operations e. Coordinate and develop long-term and short-term operational plans and ensure control is in line with the established work plans f. Plan, direct, develop, and implement safety management systems, as well as operational systems and procedures g. Organize, direct, and control operations, including coordination with government or private agencies and other relevant parties

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision
	h. Mengendalikan biaya pemakaian bahan bakar dan air kapal i. Mendorong dan menjalankan penerapan kebijakan QHSSE, SMK3 dan ISM Code dalam kegiatan operasi sesuai dengan aspek dan bidang tugasnya j. Memastikan program penghematan energi & Sumber Daya Manusia serta perlindungan lingkungan kerja dapat berjalan dengan baik. 3. Crewinga a. Menyusun anggaran ABK untuk masing-masing kapal sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku b. Melakukan rekrutmen pelaut dan ABK baik secara mandiri maupun agensi serta mengoordinasikan penempatan dan familiarisasi untuk kru baru c. Memonitor perubahan jadwal kerja pelaut dan ABK dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait d. Mengoordinasikan perpindahan pelaut dan ABK antar wilayah kerja untuk kelancaran kegiatan operasional e. Berkoordinasi dengan bagian SDM mengenai kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pelaut dan ABK. 4. QHSSE a. Melakukan identifikasi, perolehan dan penerapan sertifikasi internasional/regional/nasional yang diperlukan perusahaan untuk memperoleh pengakuan standar secara internasional/regional/nasional b. Memastikan Perusahaan secara efektif melaksanakan program K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) sesuai standar yang berlaku. **Wewenang:** 1. Menetapkan program kerja bidang Armada dan Operasi; 2. Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya; 3. Menetapkan rencana kerja dan anggaran bidang Armada dan Operasi.
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko **Director of Finance, Human Resource, and Risk Management**	**Fungsi:** • Menetapkan Program kerja bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. • Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya. **Tugas:** 1. Keuangan a. Anggaran & Akuntansi Berfungsi untuk mengkoordinir penyusunan, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran, menyimpan segala dokumen anggaran Perusahaan secara aman dan terkendali, mengelola dan merawat data dan sistem informasi keuangan Perusahaan, menyelenggarakan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

	h. Control the costs of fuel and water consumption for vessels i. Promote and implement QHSSE, SMK3, and ISM Code policies within operational activities in line with their responsibilities j. Ensure the energy and human resource saving programs, as well as workplace environmental protection, are well executed 3. Crewing a. Prepare crew budgets for each vessel according to the required number and qualifications as regulated b. Conduct recruitment of seafarers and crew either independently or through agencies, and coordinate the placement and familiarization of new crew members c. Monitor changes in crew and seafarers' work schedules and coordinate with relevant parties d. Coordinate the transfer of crew and seafarers between work areas to ensure smooth operations e. Coordinate with the HR department regarding policies and procedures related to seafarers and crew 4. QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) a. Identify, obtain, and implement international/regional/national certifications required for the company to gain standardized recognition b. Ensure the company effectively implements the K3L (Health, Safety, Security, and Environment) program in accordance with applicable standards **Authority:** 1. Determine work programs for the Fleet and Operations division 2. Establish effective and efficient work methods in their area of responsibility 3. Set work plans and budgets for the Fleet and Operations division
	Function: • Establish work programs in the areas of Finance, Human Resources (HR), and Risk Management. • Establish effective and efficient work methods in accordance with the respective areas of responsibility. **Duties:** 1. Finance a. Budgeting & Accounting Responsible for coordinating the preparation, control, and reporting of budget realization, securely storing all corporate budget documents, managing and maintaining the Company's financial data and information systems, and carrying out financial recording and report preparation in accordance with applicable accounting standards.

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision
	b. Tresuri dan Perencanaan Keuangan Tresuri dan Perencanaan Keuangan Berfungsi untuk menjalankan corporate finance, pengelolaan kas dan ketatausahaan Perusahaan, pengelolaan pendapatan, peningkatan value Perusahaan (harga & likuiditas saham) bekerja sama dengan IR, membina hubungan dengan pelaku industri keuangan dan yang terkait lainnya dan mengembangkan digital asset management beserta valuasinya serta mengelola kewajiban perpajakan Perusahaan yang meliputi perencanaan, pembayaran, dan pelaporan pajak. c. Manajemen Risiko • Melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan dampaknya dan kemungkinan terjadinya peluang risiko serta mitigasi atas risiko; • Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas penerapan budaya manajemen risiko. 2. SDM & Umum a. Strategi dan Pengembangan SDM Berfungsi untuk desain struktur organisasi sesuai kebutuhan Perusahaan, melaksanakan workload analysis, merencanakan dan menganggarkan kebutuhan SDM jangka pendek, menengah dan panjang secara kuantitas dan kualitas, melaksanakan seleksi dan rekrutment, mengelola manajemen kinerja, mengelola succession plan, mengelola administrasi dan dokumentasi SDM, direktori kompetensi beserta profil kompetensi jabatan, mengelola talent management, melaksanakan development (training, mentoring, coaching, counseling) need analysis, menyusun program pengembangan, melaksanakan pengembangan SDM, melaksanakan survei kepuasan dan loyalitas pekerja sesuai dengan target yang ditetapkan, membangun dan mengimplementasikan budaya Perusahaan. b. Hubungan Industrial dan Umum Berfungsi untuk menyusun dalam mengelola hubungan industrial, remunerasi Perusahaan (kompensasi dan benefit), mengelola inventarisasi dan database inventaris Perusahaan secara digital, mengelola kesiapan transportasi, pengelolaan kebersihan, keindahan, ketertiban, pengelolaan kebutuhan rumah tangga, kendaraan dinas dan umum Perusahaan, mengelola kesiapan alat transportasi, pengelolaan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan bangunan Perusahaan, pengelolaan SPPD dan kebutuhan perjalanan dinas (akomodasi, transportasi, konsumsi), pengelolaan penyelengaraan rapat (undangan, kesiapan ruangan beserta kelengkapannya), pengelolaan arsip secara digital. 3. Pengadaan Berfungsi untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pendokumentasian pengadaan barang dan jasa dengan metode e-procurement. **Wewenang:** 1. Menetapkan Program kerja bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; 2. Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya.
	b. Treasury and Financial Planning Responsible for executing corporate finance functions, managing cash and corporate administration, managing revenue, enhancing the Company's value (stock price & liquidity) in collaboration with Investor Relations, maintaining relationships with financial industry players and other relevant stakeholders, developing digital asset management and its valuation, and managing the Company's tax obligations, including planning, payment, and reporting. c. Risk Management • Conduct risk measurement by considering the impact, likelihood, and mitigation of risks; • Conduct dissemination and internalization of a risk management culture. 2. Human Resources & General Affairs a. HR Strategy and Development Responsible for designing the organizational structure based on the Company's needs, conducting workload analysis, planning and budgeting for short-, medium-, and long-term HR requirements in terms of quantity and quality, executing selection and recruitment, managing performance, succession planning, HR administration and documentation, maintaining a competency directory and job competency profiles, managing talent, conducting development need analysis (training, mentoring, coaching, counseling), designing and implementing development programs, carrying out employee development, conducting employee satisfaction and loyalty surveys according to set targets, and building and implementing corporate culture. b. Industrial Relations and General Affairs Responsible for managing industrial relations, corporate remuneration (compensation and benefits), maintaining a digital inventory and asset database, managing transportation readiness, cleanliness, aesthetics, orderliness, housekeeping needs, company and general vehicles, transportation equipment, security, and company buildings. Also responsible for managing business travel (SPPD) and related needs (accommodation, transport, meals), organizing meetings (invitations, room readiness and equipment), and digital archive management. 3. Procurement Responsible for carrying out the planning, implementation, and documentation of goods and services procurement through e-procurement methods. **Authority**: 1. To establish work programs in the areas of Finance, HR, and Risk Management. 2. To determine effective and efficient work methods in accordance with their respective responsibilities.

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis **Director of Commercial and Business Development**	**Fungsi:** Mengelola program kerja bidang komersial dan pengembangan bisnis. **Tugas:** 1. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Kerja Anggaran: a. Bertanggung jawab atas penyusunan strategic business plan, annual business plan (anggaran) dan quarterly forecast sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemegang saham; b. melakukan proses pengendalian anggaran seoptimal mungkin dengan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan oleh pemegang saham; c. membuat kebijakan strategis dalam bidang komersial dan pengembangan bisnis . 2. Komersial dan Pengembangan Bisnis: a. Menetapkan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan komersial dan pengembangan bisnis; b. menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pentarifan, kerjasama usaha, dan pengelolaan pelanggan serta shipping; c. membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan kegiatan komersil dan pengembangan bisnis; d. mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan jangka panjang dan jangka pendek kegiatan pengembangan bisnis serta melakukan pengendalian sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; e. Merencanakan dan mengarahkan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan, serta sistem dan prosedur kerja bidang komersial dan pengembangan bisnis; f. Mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan Komersial dan Pengembangan Bisnis, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak lain yang terkait; g. Menyusun studi kelayakan bisnis dari berbagai aspek (komersial, finansial, legal dan manajemen risiko), memonitor realisasi KPI perusahaan, melakukan pengendalian kinerja, melaksanakan rapat tinjauan manajemen, serta evaluasi dan perencanaan optimalisasi dan penggunaan aset atau alat; h. Merencanakan, mengembangkan dan mengontrol masterplan dan tata kelola ICT beserta implementasinya, menerapkan fully digital marine services, pengelolaan hardware dan software beserta perawatannya serta pengembangan dalam implementasikan sistem informasi. **Wewenang:** 1. Menetapkan program kerja bidang Komersial dan Pengembangan Bisnis; 2. menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya; 3. menetapkan rencana kerja dan anggaran bidang komersial dan pengembangan bisnis.	**Function:** Manage work programs in the areas of Commercial and Business Development. **Duties:** 1. Prepare and Coordinate Budget Work Plans: a. Responsible for preparing the strategic business plan, annual business plan (budget), and quarterly forecasts in accordance with the schedule set by the shareholders; b. Optimize budget control processes based on the budget approved by the shareholders; c. Develop strategic policies in the commercial and business development fields. 2. Commercial and Business Development: a. Establish, implement, and control commercial and business development activities; b. Determine, implement, and manage activities related to tariff setting, business partnerships, customer and shipping management; c. Formulate strategic policies for managing commercial and business development activities; d. Coordinate and develop long-term and short-term business development plans and control activities according to the established work plan; e. Plan, direct, develop, and implement safety management systems, as well as systems and procedures in the commercial and business development area; f. Organize, direct, and control Commercial and Business Development activities, including coordination with government and private institutions and other relevant parties; g. Prepare business feasibility studies from various aspects (commercial, financial, legal, and risk management), monitor the achievement of company KPIs, control performance, conduct management review meetings, and evaluate and plan the optimization and utilization of assets or equipment; h. Plan, develop, and oversee the ICT masterplan and governance along with its implementation, apply fully digital marine services, manage hardware and software and their maintenance, and develop and implement information systems. **Authority:** 1. Determine work programs in the field of Commercial and Business Development; 2. Establish effective and efficient work methods within the respective work area; 3. Set work plans and budgets for the Commercial and Business Development functions.

Program Orientasi Bagi Anggota Direksi yang Baru

IPCM menetapkan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru menjabat sebagai bagian dari upaya memastikan pemahaman menyeluruh terkait perusahaan. Program ini mencakup pengenalan terhadap visi, misi, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, kegiatan usaha, serta kebijakan dan tata kelola yang berlaku. Ketentuan mengenai program orientasi ini diatur dalam Board Manual PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021.

Di tahun 2024, terdapat perubahan dalam susunan maupun komposisi Direksi. Oleh karena itu, program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diadakan pada tanggal 19 Juni 2024 di Kantor Pusat PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Pelindo Tower Lantai 9, DKI Jakarta.

Orientation Program for New Directors

IPCM established an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors as part of the effort to ensure a thorough understanding of the company. The orientation program includes an introduction to the company's vision, mission, values, organizational structure, business activities, and applicable policies and governance. Provisions regarding this orientation program are regulated in the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Number: HK.56/4/10/3/MS-21 which was approved on October 4, 2021.

In 2024, there were changes in the composition of the Board of Directors. Therefore, an orientation program for new members of the Board of Directors was held on June 19, 2024, at the Head Office of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Pelindo Tower 9th Floor, DKI Jakarta.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Perusahaan menyadari pentingnya peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Untuk itu, berbagai program pelatihan telah diselenggarakan guna memastikan pemahaman yang mendalam terhadap bisnis utama perusahaan serta regulasi yang berlaku. Kebijakan terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi telah diatur dalam *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development Program for the Board of Directors

The Company realized the importance of competency improvement for the Board of Commissioners in order to optimally perform their duties and responsibilities. Therefore, various training programs have been held to ensure a deep understanding of the company's main business and applicable regulations. The Board of Directors' training and competency development policy is regulated in the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Number: HK.56/4/10/3/MS-21 which was approved on October 4, 2021.

Throughout 2024, the Board of Directors has participated in various competency development programs as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Type	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director and concurrently Act. Director of Commercial and Business Development)	Pelatihan Training	Risk Beyond International Conference on ERMA	Bali, 5-6 Desember 2024 Bali, December 5-6, 2024	ERMA
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet and Operation)	Pelatihan Training	APA Leadership Program : Advancing Sustainability in Maritime and Port Operators	Jakarta, 2024	PT Pelabuhan Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Type	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resources, and Risk Management)	• Pelatihan Training	• Deep Transformational Coach Certification Program	• Jakarta, 17-18 Februari 2024, 4-5 Mei 2024, 3-4 Agustus 2024 dan 12 Oktober 2024 Jakarta, February 17-18, 2024, May 4-5, 2024, August 3-4, 2024, and October 12, 2024	• Coaching Indonesia
	• Webinar	• ESG and SDG Impact for Accounting Professionals	• *Online*, 14-16 November 2024	• Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
	• Pelatihan Training	• Pelatihan dan Sertifikasi BNSP untuk General Manager SDM	• *Online*, 28-30 Agustus 2024, 17 dan 22-23 September 2024 Online, August 28-30, 2024, September 17 and 22-23, 2024	• Fritmandiri Utama

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta Rencana Kerja yang disusun di awal tahun. Secara garis besar, pelaksanaan tugas Direksi pada tahun tersebut meliputi:

1. Menyusun Laporan Tahunan 2023;
2. Menggelar rapat Direksi pada tahun 2024;
3. Menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024;
4. Menyusun RKAP termasuk strategi Perseroan dan RKM Perseroan Tahun 2024;
5. Menyusun Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan termasuk pelaksanaan strategi Perseroan tahun 2024;
6. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham selama tahun 2024;
7. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan support;
8. Memastikan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha;
9. Melaksanakan kegiatan CSR, selama tahun 2024 telah tersalur dana CSR Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan;
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perusahaan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan belum memiliki Komite di bawah Direksi. Sehingga, tidak terdapat informasi terkait penilaian kinerja Komite di bawah Direksi.

Board of Directors' Duties Report in 2023

Throughout 2024, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and the Work Plan prepared at the beginning of the year. In brief, the implementation of the duties of the Board of Directors during the year included:

1. Prepared the 2023 Annual Report;
2. Held Board of Directors meetings in 2024;
3. Attended joint meetings of the Board of Commissioners and Directors in 2024;
4. Prepared the Company's 2024 RKAP, including corporate strategy and RKM;
5. Prepared quarterly and annual Management Reports, including the implementation of the Company's strategies in 2024;
6. Organized the General Meeting of Shareholders throughout 2024;
7. Established cooperation with third parties in various areas including business, operations, and support functions;
8. Ensured the implementation of Good Corporate Governance in all business activities;
9. Conducted CSR activities, with CSR funds allocated throughout 2024 for community and environmental programs;
10. Carried out other duties related to corporate management.

Assessment of Committee's Performance under the Board of Directors

Until the end of 2024, the Company does not have a Committee under the Board of Directors. Thus, there is no information regarding the assessment of Committees under the Board of Directors.

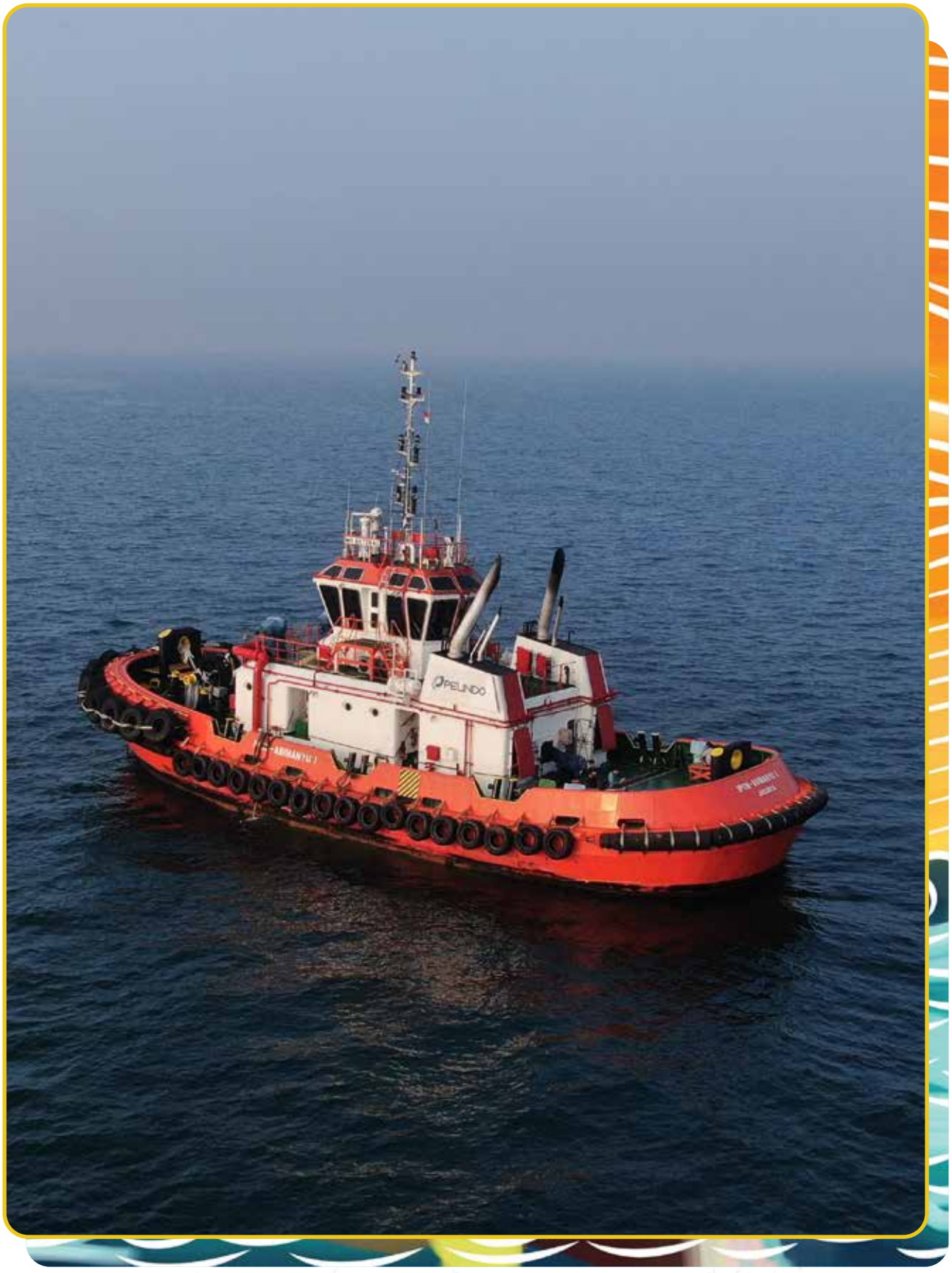
PELINDO

Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency Regarding Board of Commissioners and Directors



KEBIJAKAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IPCM memiliki kebijakan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN. Pemilihan calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan melalui rangkaian mekanisme suksesi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham yang mengacu pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memperhatikan unsur keberagaman dan disesuaikan dengan ukuran organisasi dan kebutuhan Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS SUCCESSION POLICY

IPCM has a Board of Commissioners and Board of Directors succession policy that refers to the Regulation of the Minister of SOEs. The selection of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through a series of succession mechanisms in accordance with the provisions stipulated by the shareholders referring to the applicable Regulations and Laws. In determining the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company pays attention to the element of diversity and is adjusted to the size of the organization and the needs of the Company.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan belum menetapkan kebijakan khusus mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian dengan kebijakan internal Perusahaan.

Namun, dalam proses pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman terhadap manajemen Perusahaan, serta keahlian atau pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selain itu, aspek ketersediaan waktu untuk menjalankan tugas juga menjadi pertimbangan, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah mencerminkan keberagaman yang saling melengkapi dalam berbagai aspek, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, integritas, dedikasi, pemahaman terhadap isu-isu manajemen Perusahaan, serta keahlian atau pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan IPCM.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

The Company has not yet established a specific policy regarding diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Currently, the policy is still in the stage of development and adjustment with the Company's internal policies.

However, in the appointment process of the Board of Commissioners and Directors, the Company considers various factors, including age, gender, education, experience, integrity, dedication, understanding of the Company's management, as well as expertise or knowledge that suits the needs of the Company. In addition, the aspect of availability of time to carry out duties is also a consideration, while still referring to the provisions of applicable laws and regulations.

Overall, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company has reflected diversity that is complementary in various aspects, such as age, gender, education level, work experience, integrity, dedication, understanding of management issues of the Company, as well as expertise or knowledge relevant to the needs of IPCM.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Indonesia	• S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT, Belanda (2011) • S1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, Jakarta (1993) • S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT, Netherland (2011) • S1 Civil Engineering, University of Trisakti, Jakarta (1993)
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia	• S2 Bidang Akuntansi di Universitas Indonesia (2004) • S1 Akuntansi di Universitas Jendral Sudirman (1993) • Masters in Accounting at University of Indonesia (2004) • Bachelor of Accounting at Jendral Sudirman University (1993)
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	• Sekolah Tinggi Manajemen (2007) • Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (1984) • Management College (2007) • College of Maritime Science (STIP) (1984)

Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2024) Age (as of December 31, 2024)	Jenis Kelamin Gender
• Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2023–2024) • Direktur Komersial dan Operasi di PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023) • Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) • SVP Manajemen Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020) • Koordinator Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019) • Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017) • Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017) • Direktur Teknik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015) • Technical Director of PT Pelindo Multi Terminal (2023-2024) • Director of Commercial and Operations Director at PT Pelindo Jasa • Technical Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021)Direktur Komersial dan Operasi PT Pelindo Jasa Maritim (2021) • Director of Commercial and Operation Director of PT Pelindo Jasa Maritime (2021) • SVP Project Management Strategic PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Project Coordinator Strategic Projects of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2019) • Director of Commercial and Business Development PT Port Developer Indonesia (2017) • Construction Director of PT Port Developer Indonesia (2015-2017) • Technical Director of PT Port Developer Indonesia (2014-2015)	• Ilmu Kepelabuhanan • Ilmu Teknik Sipil • Port Science • Civil Engineering Science	55 tahun 55 years old	Laki-laki Male
• Analis Kinerja BUMN Kementerian BUMN (2021-Sekarang) • Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama (2020–2021) • Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Rekayasa Industri (2018–2020) • Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016–2017) • Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017) • Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Indah Karya (Persero) (2007–2012) • Sekretaris Dekom/Dewan Pengawas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007) • Staf Dekom/Dewas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002) • BUMN Performance Analyst at the Ministry of SOEs (2021-Present) • Director of Finance & HR PT Reinsurance Indonesia Main (2020-2021) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT Rekayasa Industri (2018-2020) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016-2017) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT PANN Pembiayaan Maritime (2012-2017) • Commissioner / Member Supervisory Board of PT Indah Karya (Persero) (2007-2012) • Secretary of Dekom/Board Supervisor of PT Kawasan Bonded Nusantara (Persero) (2002-2007) • Dekom/Dewas Staff PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998-2002)	• Ilmu Akuntansi • Manajemen SDM • Accounting Science • HR	55 tahun 55 years old	Perempuan Female
• Komisaris Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018–2020) • Plt Dirjen Perhubungan Laut (2017) • Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (2016–2017) • Kepala Kantor Utama Syahbandar Tanjung Perak (2016) • Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok (2015–2016) • Independent Commissioner PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (2018-2021) • Acting. Director General of Sea Transportation Sea Transportation. (2017) • Director of Traffic and Sea Transportation Ministry Transportation (2016-2017) • Head of the Main Office Syahbandar Tanjung Perak. (2016) • Head of Port Authority Tanjung Priok. (2015-2016)	• Ilmu Manajemen • Ilmu Pelayaran • Management Science • Maritime Science	67 tahun 67 years old	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background
F. Budi Prayitno (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	• Master Degree spesialisasi Air Transport Management, Ecole National de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse-France (2003) • Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Diponegoro di Semarang (1991) • Master Degree specializing in Air Transport Management, Ecole National de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse-France (2003) • Bachelor of International Law from Diponegoro University in Semarang (1991)
Direksi Board of Directors		
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director and Act. Commercial and Business Development Director)	Indonesia	• S2 - Kuhne Logistic University, Hamburg Jerman - Jurusan Logistik (2014) • S1 - Universitas Airlangga - Hukum, (1999) • Masters - Kuhne Logistic University, Hamburg Germany - Major in Logistics (2014) • S1 - Airlangga University - Law, (1999)
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Indonesia	• S2 - Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 2006 • S1 - Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 1995 • Master of Nautical Science from College of Maritime Science (2006) • Bachelor of Nautical Science from College of Maritime Science (1995)
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resource, and Risk Management)	Indonesia	• Master of Commerce dari University of Queensland, Australia (2006) • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga (1997) • Master of Commerce from University of Queensland, Australia (2006) • Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Airlangga (1997)

Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2024) Age (as of December 31, 2024)	Jenis Kelamin Gender
• Kepala Biro Hukum di Kementerian Perhubungan (2023 s.d sekarang) • Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan (2021-2022) • Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum (2020-2021) • Plt. Kepala Bandara Juata Tarakan (2019) • Kepala Bidang Kampen dan Yandar Bandara Juata Tarakan (2019) • Wakil Tetap RI untuk Kantor Kepentingan Indonesia pada ICAO (2018) • Atase Perhubungan RI untuk Kanada-KBRI Ottawa (2018) • Atase Perhubungan RI untuk USA-KBRI Washington DC (2015-2018) • Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2008-2015) • Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Kementerian Perhubungan (2007) • Head of Legal Bureau at the Ministry of Transportation (2023 to present) • Director of Aviation Security, Ministry of Transportation (2021-2022) • Head of International Cooperation, Public Relations and General Affairs (2020-2021) • Act. Head of Juata Tarakan Airport (2019) • Head of Kampen and Yandar Division of Juata Tarakan Airport (2019) • Permanent Representative of Indonesia to the Office of Indonesian Interests at ICAO (2018) • Indonesian Transportation Attaché to Canada-KBRI Ottawa (2018) • Indonesian Transportation Attaché to USA-KBRI Washington DC (2015-2018) • Head of Foreign Cooperation Section Secretary General of the Ministry of Transportation (2008-2015) • Section Head of Aviation Traffic Services Ministry of Transportation (2007)	• Ilmu Hukum • Manajemen Transportasi Udara • Law Science • Air Transportation Management	56 tahun 56 years old	Laki-laki Male
• Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang) • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022) • EVP Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017–2020) • VP Hubungan Lembaga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016–2017) • Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2015–2016) • Senior Manager Layanan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012–2015) • President Director Act. Commercial and Business Development Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022-Present)Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020-2022) • EVP Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017-2020) • VP of Institutional Relations PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016-2017) • Commercial Director of PT Port Developer Indonesia. (2015-2016) • Senior Manager of Services HR and General Services PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012-2015)	• Ilmu Hukum • Ilmu Bidang Logistik • Law Science • Logistic Science	47 tahun 47 years old	Perempuan Female
• Direktur Armada dan Operasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Sekarang) • VP Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Plt. Direktur Armada dan Teknik PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019) • Director of Fleet and Operations of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-Present) • VP Ship Services of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Acting. Director of Fleet and Engineering of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)	• Ilmu Pelayaran • Ilmu Nautika • Sailing Science • Nautical Science	56 tahun 56 years old	Laki-laki Male
• Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2024-Sekarang) • Group Head Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1 Oktober 2021 s.d 11 Juni 2024 • Direktur Keuangan dan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020–2021) • Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019–2019) • Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015-2019) • Senior Manager Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia II (2015-2015) • Senior Manager Pemetaan SDM & Manajemen Karir PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) • Director of Finance, Human Resource, and Risk Management of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2024-Present) • Group Head of HR Management PT Pelabuhan Indonesia (Persero) October 1, 2021 to June 11, 2024 • Director of Finance and HR PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2021) • President Director of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019-2019) • President Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015-2019) • Senior Manager of HR Management PT Pelabuhan Indonesia II (2015-2015) • Senior Manager of HR Mapping & Career Management PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	• Manajemen Akuntansi Keuangan • Accounting Management • Finance	52 tahun 52 years old	Perempuan Female

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Dewan Komisaris

Setiap tahun, kinerja Dewan Komisaris dievaluasi sebagai bagian dari penilaian atas pelaksanaan tugasnya. Evaluasi ini tidak hanya didasarkan pada Laporan Tugas Pengawasan, tetapi juga mencakup tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Penilaian ini dilakukan melalui penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris, menggunakan sistem *self-assessment* atau metode lain yang kemudian ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha.

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris

KPI Dewan Komisaris Tahun 2024 (Kolegial dan Individual)

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris di tahun 2024 menunjukan skor sebesar 101 dengan aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ASSESSMENT

Board of Commissioners Assessment

The performance of the Board of Commissioners is evaluated annually as part of the assessment of the performance of its duties. This evaluation is not only based on the Supervisory Task Report, but also includes attendance at Board of Commissioners meetings and compliance with laws and regulations and company policies. The evaluation is carried out through the preparation of the Board of Commissioners' Key Performance Indicator (KPI), using a self-assessment system or other methods which are then determined at the Board of Commissioners meeting.

Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria

The performance assessment of the Board of Commissioners is measured by the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) that have been prepared at the beginning of the year which cover aspects of Planning, Supervision and Advice, Reporting, and Business Dynamics.

KPI Assessment Results of the Board of Commissioners

KPIs for the Board of Commissioners in 2024 (Collegial and Individual)

The results of the Board of Commissioners performance assessment in 2024 showed a score of 101 with the following assessment aspects:

Tabel KPI Dewan Komisaris Tahun 2024
KPI table for the Board of Commissioners in 2024

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Output Unit Output	Bobot Weight	Rencana Output Output Plan	Realisasi Output Output Realization	Nilai Value	Pencapaian Achievements
I	**Aspek Perencanaan** | Planning Aspect							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2024 Develop Work Plan, Budget and KPIs for the Board of Commissioners in 2024	Tahunan Yearly	Dokumen Document	10	1	1	10	100%
Sub Total				**10**			**10**	
II	**Aspek Pengawasan dan Nasihat** | Supervision and Advice Aspect							
2	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide responses/recommendations to Shareholders on:							
	a Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Work Plan and Budget	Tahunan Yearly	Surat/Risalah Letters/ Minutes	5	1	1	5	100%

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Output Unit Output	Bobot Weight	Rencana Output Output Plan	Realisasi Output Output Realization	Nilai Value	Pencapaian Achievements
	b Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Yearly	Surat/Risalah Letters/ Minutes	5	1	1	5	100%
	c Analisis Kinerja Triwulan Quarterly Performance Analysis	Triwulan Quarterly	Surat/Risalah Letters/ Minutes	5	3	3	5	100%
	d Rencana Bisnis Perusahaan Company Business Plan	Setahun A year	Surat/Risalah Letters/ Minutes	5	12	13	5,4	108%
3	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi Provide approval and advice to the Board of Directors	Setahun A year	Surat/Risalah Letters/ Minutes	10	5	12	11	110%
4	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting							
	a Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Kali Times	8	12	13	9	108%
	b Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors	Bulanan Monthly	Kali Times	8	12	13	9	108%
	c Penyelesaian Risalah Rapat Completion of Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	6	24	26	7	108%
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Working Visit	Setahun A year	Kunjungan Visit	8	3	3	8	100%
Sub Total II				**60**			**63**	
III	**Aspek Pelaporan | Reporting Aspect**							
6	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Annual Board of Commissioners Supervisory Report	Tahunan Yearly	Laporan Report	10	1	1	10	100%
Sub Total III				**10**			**10**	
IV	**Aspek Dinamis | Dynamic Aspect**							
7	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham External Auditor Proposal to Shareholders	Tahunan Yearly	Surat Letter	5	1	1	5	100%
8	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dan lain-lain Competency Improvement through seminars, workshops, etc	Tahunan Yearly	Kali Times	10	2	4	11	110%
9	Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris (*Self Assessment*/Konsultan Independen) GCG Assessment Result of Board of Commissioners (Self Assessment/ Independent Consultant)	Tahunan Yearly	Kategori Category	5	Baik Good	Sangat Baik Very Good	5	-
Sub Total IV				**20**			**21**	
GRAND TOTAL				**100**			**104**	

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial melalui self assessment dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

Penilaian Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Dalam menjalankan tugasnya, kinerja Direksi dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan visi dan tujuan Perusahaan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen, sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Prosedur Pelaksanaan Penilaian Direksi.

Penilaian tidak hanya mengacu pada pencapaian target yang tercantum dalam RKAP dan Kontrak Manajemen, tetapi juga mencakup tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perusahaan.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja individu Direksi. Penilaian ini diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada) atau oleh Dewan Komisaris, untuk kemudian ditetapkan dalam RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
4. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
6. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
7. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan KPI Perspektif keuangan dan pasar:

Party Conducting the Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out collegially through self-assessment and reported at the Annual GMS, where the results of the Board of Commissioners' performance are presented through the Board of Commissioners' task implementation report to the Shareholders. The GMS further grants full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the management and supervision during the Financial Year.

Board of Directors Assessment

Assessment Procedure

In carrying out its duties, the performance of the Board of Directors is evaluated to ensure that it is in line with the Company's vision and objectives. This evaluation is conducted based on the Key Performance Indicators (KPIs) set out in the Management Contract, as approved by the Board of Commissioners in the Board of Directors Assessment Procedure.

The evaluation not only refers to the achievement of the targets stated in the RKAP and Management Contract, but also includes the level of attendance at Board of Directors Meetings as well as compliance with laws and regulations and the Company's internal policies.

Furthermore, evaluation is also conducted on the individual performance of the Board of Directors. This assessment is proposed by the Nomination and Remuneration Committee (if any) or by the Board of Commissioners, to be determined in the GMS with the following provisions:

1. Setting KPIs at the beginning of the year and evaluating their achievement.
2. Attendance levels at internal meetings and meetings with the Board of Commissioners.
3. Contribution to the Company's business activities.
4. Participation in specific assignments.
5. Commitment to advancing the interests of the Company.
6. Compliance with applicable laws, regulations, and Company policies.
7. Achievement of the Company's targets outlined in the RKAP and Management Contract.

Directors' Performance Evaluation Criteria

The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors based on Key Performance Indicators (KPIs) from a financial and market perspective are as follows:

1. Fokus pelanggan
2. Efektivitas produk dan proses
3. Fokus tenaga kerja
4. Kepemimpinan, tata kelola dan CSR

Untuk kriteria penilaian dengan Skala sebagai berikut:
1. 00% - 50% = Kurang
2. 51% - 70% = Cukup
3. 71% - 90% = Baik
4. ≥91% = Sangat Baik

Hasil Penilaian KPI Direksi

Berikut hasil KPI secara kolegial untuk tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Customer focus
2. Product and process effectiveness
3. Workforce focus
4. Leadership, governance, and CSR

The assessment criteria utilize the following scale:
1. 00% - 50% = Lacking
2. 51% - 70% = Enough
3. 71% - 90% = Good
4. ≥91% = Excellent

KPI Assessment for Directors

The following collegial KPI results for 2024 are described as follows:

Tabel KPI Direksi Tahun 2024
Table of KPIs for Directors in 2024

No.	Nama KPI KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Penilaian Assessment Period	Bobot Weight	Target 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor KPI KPI Score
1.	EBITDA	Rp (Juta) Rp (Million)	Maximize	Triwulan Quarterly	15	332.370	380.903	110	16,5
2.	Pendapatan Revenues	Rp (Juta) Rp (Million)	Maximize	Triwulan Quarterly	5	1.338.962	1.345.030	100	5,0
3.	BOPO	%	Minimize	Triwulan Quarterly	10	81,3	84,03	97	9,7
4.	Produksi Pemanduan Pilotage Production	Gerakan	Maximize	Triwulan Quarterly	4	15.780	20.407	110	4,4
5.	Waiting For Pilot	Jam	Minimize	Triwulan Quarterly	4	0,5	0,10	110	4,4
6.	Availability Kapal Tunda Tugboat Availability	%	Maximize	Triwulan Quarterly	4	90	98,22	109	4,4
7.	Availability Kapal Pandu Pilot Boat Availability	%	Maximize	Triwulan Quarterly	4	90	96,03	107	4,3
8.	Implementasi Program TJSL CSR Program Implementation	%	Maximize	Triwulan Quarterly	3	100	100	100	3,0
9.	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	Maximize	Tahunan Annually	4	3	3	100	4,0
10.	Tingkat Compliance Perusahaan: GCG Corporate Compliance Level: GCG	Sangat Baik Very Good	Maximize	Semester Semiannually	5	75	98,18	110	5,5

No.	Nama KPI KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Penilaian Assessment Period	Bobot Weight	Target 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor KPI KPI Score
11.	Tingkat Compliance Perusahaan: Tindaklanjut temuan Audit Corporate Compliance Level: Audit finding follow-up	%	Maximize	Semester Semiannually	4	80	83	104	4,2
12.	Penyampaian Laporan Tepat Waktu Timely Report Submission	%	Maximize	Triwulan Quarterly	4	85	100	110	4,4
13.	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan MEPS MEPS Infrastructure and Tools Development	Rp (Juta) Rp (Million)	Maximize	Triwulan Quarterly	4	16,891	17,086	101	4,0
14.	Pencapaian Value Creation dari Inisiatif Strategis Additional Marine Service Value Creation from Strategic Initiative Additional Marine Service	Rp (Miliar)	Maximize	Triwulan Quarterly	5	9,4	16,88	110	5.5
15.	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Marine Service Standardization and Digitalization	%	Maximize	Triwulan Quarterly	5	100	100	100	5,0
16.	Implementasi HSSE/ Tingkat Fatality HSSE/Fatality Level	%	Maximize	Semester Semiannually	5	100	100	100	5,0
17.	Implementasi Penggunaan PDN (Pembelanjaan Produk Dalam Negeri) Implementation of Domestic Product Procurement (PDN)	Rp (Juta) Rp (Million)	Maximize	Triwulan Quarterly	3	1,5	12.395	110	3,3
18.	Pemetaan High Potential dan Promotable Talent Mapping of High Potential and Promotable Talent	%	Maximize	Triwulan Quarterly	3	90	90	100	3,0
19.	Ide Inovasi Innovation Ideas	Jumlah	Maximize	Tahunan Annually	3	3	9	110	3,3
20.	Implementasi Employee Wellbeing Policy Implementation of Employee Wellbeing Policy	%	Maximize	Semester Semiannually	3	100	100	100	3,0

No.	Nama KPI KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Penilaian Assessment Period	Bobot Weight	Target 2024 2024 Target	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor KPI KPI Score
21.	Pemenuhan kuantitas dan kualitas data SDM pada Portal HC KBUMN Fulfillment of HR data quantity and quality on the HC KBUMN Portal	%	Maximize	Triwulan Quarterly	3	100	100	100	3,0
	TOTAL BOBOT KPI JAI TAHUN 2024 TOTAL KPI WEIGHT OF JAI IN 2024				**100**				
	TOTAL BOBOT KPI JAI S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 TOTAL KPI WEIGHT OF JAI AS OF QUARTER IV				**93**				
					Total Skor KPI JAI KPI Score of JAI				**104,8**
					Total Skor KPI JAI (Tertimbang) KPI Score of JAI (Weighted)				**110**

Pencapaian KPI tahun 2024 adalah sebesar 110 atau kriteria Sangat Baik.

KPI Achievement in 2024 reached 110 and categorized as Very Good.

Adapun berikut hasil KPI Individual Direksi yang didasarkan pada KPI Korporat dengan masing-masing pembobotan secara proporsional disesuaikan dengan fokus bidang dari masing-masing direktorat.

The following are the results of the Directors' Individual KPIs based on the Corporate KPIs with each weighting proportionally adjusted to the focus areas of each directorate.

Tabel *Key Performance Indikator* Individual Direksi Tahun 2024
Table of Key Performance Indicators for Individual Directors in 2024

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Skor Score
I	**Direktur Utama** President Director		**100**			**120,13**
1.	Tingkat Compliance Perusahaan: GCG Corporate Compliance Level: GCG	%	20	75	98,18	26,18
2.	Tingkat Compliance Perusahaan : Tindaklanjut temuan Audit Corporate Compliance Level: Audit finding follow-up	%	20	80	83	20,75
3.	EBITDA	Rp (Juta) Rp (Million)	20	332.370	380.903	22,29
4.	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	10	3	3	10,00
5.	Pemetaan High Potential dan Promotable Talent Mapping of High Potential and Promotable Talent	%	10	90	90	10,00
6.	Pendapatan Revenue	Rp (Juta) Rp (Million)	5	1.338.962	1.345.030	5,02

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Skor Score
7.	Implementasi Program TJSL CSR Program Implementation	%	5	100	100	5,00
8.	Penyampaian Laporan Tepat Waktu Timely Report Submission	%	5	85	100	5,88
9.	Ide Inovasi Innovation Idea	Jumlah Total	5	3	9	15,00
II	**Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis** Director of Commercial and Business Development		**100**			**115,51**
1.	Pendapatan Revenue	Rp (Juta) Rp (Million)	20	1.338.962	1.345.030	20,09
2.	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Marine Services Standardization and Digitalization	%	20	100	100	20,00
3.	EBITDA	Rp (Juta) Rp (Million)	20	332.370	380.903	22,29
4.	Availability Kapal Tunda Tugboat Availability	%	10	90	98,22	10,91
5.	Availability Kapal Pandu Pilot Boat Availability	%	10	90	96,03	10,67
6.	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	5	3	3	5,00
7.	Produksi Pemanduan Pilotage Production	Gerakan Movement	5	15.780	20.407	5,00
8.	Tingkat Compliance Perusahaan: GCG Corporate Compliance Level: GCG	%	5	75	98,18	6,55
9.	Ide Inovasi Innovation Idea	Jumlah Total	5	3	9	15,00
III	**Direktur Armada dan Operasi** Director of Fleet and Operation		**100**			**119,20**
1.	Implementasi HSSE/Tingkat Fatality HSSE Implementation/Fatality Level	%	20	100	100	20,00
2.	Availability Kapal Tunda Tugboat Availability	%	20	90	98,22	21,83
3.	Availability Motor Pandu Pilot Motor Availability	%	20	90	96,03	21,34
4.	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Marine Service Standardization and Digitalization	%	10	100	100	10,00
5.	Waiting Time for Pilot	Jam Hour	10	0,5	0,1	12,00
6.	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan MEPS MEPS Infrastructure and Tools Development	Rp (Juta) Rp (Million)	5	16,891	17,086	5,06
7.	Pencapaian Value Creation dari Inisiatif Strategis Additional Marine Service Value Creation from Strategic Initiative Additional Marine Service	Rp (Miliar) Rp (Billion)	5	9,4	16,88	8,98
8.	Produksi Pemanduan Pilotage Production	Gerakan Movement	5	15.780	20.407	5,00
9.	Ide Inovasi Innovative Idea	Jumlah Total	5	3	9	15,00

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Skor Score
IV	**Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko** Director of Finance, HR, Risk Management		**100**			**116,06**
1.	Pendapatan Revenue	Rp (Juta) Rp (Million)	20	1.338.962	1.345.030	20,09
2.	EBITDA	Rp (Juta) Rp (Million)	20	332.370	380.903	22,29
3.	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	20	3	3	24,00
4.	BOPO	%	10	81,3	84,03	9,68
5.	Pemetaan High Potential dan Promotable Talent Mapping of High Potential and Promotable Talent	%	10	90	90	10,00
6.	Ide Inovasi Innovation Idea	Jumlah Total	5	3	9	15,00
7.	Implementasi Employee Wellbeing Policy Employee Wellbeing Policy Implementation	%	5	100	100	5,00
8.	Implementasi Penggunaan PDN (Pembelanjaan Produk Dalam Negeri) Implementation of Domestic Product Procurement (PDN)	Rp (Juta) Rp (Million)	5	1,5	12.395	5,00
9.	Pemenuhan kuantitas dan kualitas data SDM pada Portal HC KBUMN Fulfillment of HR data quantity and quality on the HC KBUMN Portal	%	5	100	100	5,00

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Direksi di tahun 2024 dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Undang-Undang PT Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 113.
2. Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk kepada Dewan Komisaris PT JAI Tbk nomor: KU.02.04 /11/12/1/ PBP/ UT/PI.II-18 tanggal 11 Desember 2018 tentang penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT JAI Tbk.
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

Assessor

In 2024, the Board of Directors was assessed by the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS REMUNERATION POLICY

The Company has established a Nomination and Remuneration Committee tasked with overseeing the implementation of remuneration policies for the Board of Commissioners and Directors. The policy for determining remuneration for these positions refers to:

1. Republic of Indonesia PT Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 113.
2. A letter from the Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the main shareholder of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, addressed to the Board of Commissioners of PT JAI Tbk, numbered KU.02.04/11/12/1/PBP/ UT/PI.II-18 dated December 11, 2018, regarding adjustments to the remuneration of the Directors and Commissioners of PT JAI Tbk.
3. Company Articles of Association.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi Perusahaan dilakukan melalui mekanisme RUPS. Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran serta pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Utama.

Remuneration Procedure for the Board of Commissioners and Directors

The remuneration for the Company's Directors is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS). During the Annual GMS, shareholders conferred authority upon the Board of Commissioners to establish the amount and distribution of bonuses for members of the Board of Directors and Commissioners for the 2023 financial year, following consultation with the Major Shareholders.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator penetapan remunerasi Direksi yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham, ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak Manajemen Direksi sebagai salah satu ukuran untuk menilai kinerja Direksi.

Remuneration Indicator for the Board of Directors

The indicators for determining Directors' remuneration, as determined by shareholders, take into account the achievements of Key Performance Indicators (KPIs) or the Directors' Management Contract as one of the measures for assessing the performance of Directors.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam memperhatikan ketentuan dari regulator dan kebijakan internal Perusahaan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, struktur remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors

In accordance with the provisions of the regulator and the Company's internal policies approved by shareholders, the remuneration structure of the Board of Commissioners comprises several components, namely:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors in 2024

No.	Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration
1.	Honorarium	Gaji Salary
2.	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Transportasi, Tunjangan Hari Raya, Purna Jabatan Allowance consist of Transportation Allowance, Holiday Allowance, Retirement Allowance	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Jabatan, Tunjangan Perumahan Allowance consist of Holiday Allowance, Retirement Allowance, Housing Allowance
3.	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities consist of Healthcare Facilities, Legal Aid Facilities	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Kendaraan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities consist of Healthcare Facilities, Vehicle Facilities, Legal Aid Facilities
4.	Tantiem Tantiem (Bonus)	Tantiem Tantiem (Bonus)

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris dan Direksi Perusahaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Total Amount of the Board of Commissioners and Directors

Total remuneration and allowances for the Company's Board of Directors and Commissioners are as follows:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2023-2024
Board of Commissioners Remuneration Table for 2023-2024

Remunerasi Remuneration	2024		2023	
	Jumlah Orang Number of Person	Nominal (Rp)	Jumlah Orang Number of Person	Nominal (Rp)
Honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem Honorarium, allowances, facilities, and tantiem (bonus)	4 Orang 4 Persons	2.797.260.203	3 Orang 3 Persons	2.721.314.245

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2023-2024
Total Remuneration of the Board of Directors 2023-2024

Remunerasi Remuneration	2024		2023	
	Jumlah Orang Number of Person	Nominal	Jumlah Orang Number of Person	Nominal
Gaji, tunjangan, fasilitas, dan tantiem Salary, benefits, perks, and tantiem (bonus)	3 Orang 3 Persons	5.387.289.047	3 Orang 3 Persons	5.067.031.673

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 disahkan tanggal 4 Oktober 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Seluruh keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Internal sebanyak 13 (tiga belas) kali dan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal maupun Rapat Gabungan yang diselenggarakan di tahun 2024:

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS MEETING

Board of Commissioners Meeting

According to the PT Jasa Armada Indonesia Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, the Board of Commissioners convenes in a meeting at least once every 2 (two) months. During these meetings, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. Decisions in these meetings are made through deliberation to achieve consensus. However, if consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by majority vote.

In 2024, the Board of Commissioners held internal meetings as much as 13 (thirteen) times and joint meetings inviting the Board of Directors for 13 (thirteen) times. The agenda and minutes of meetings, attendance, as well as a summary of the Board of Commissioners' attendance at Internal Meetings and Joint Meetings held in 2024, are as follows:

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Board of Commissioners Internal Meeting Agenda Table

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	26 Januari 2024 January 26, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait *compliance* JAI terhadap PER-02 • Pembahasan Profil Risiko 2024 • Evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2024 • Penyesuaian *Risk Maturity Index* • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up to previous RAKOM regarding JAI's compliance with PER-02 • Discussion of Risk Profile 2024 • Evaluation of Annual Supervision Work Program (PKPT) 2024 • Adjustment of Risk Maturity Index • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Hary Kriswanto Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Yoshua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi	-
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait aspirasi target laba 2024 • Pembahasan pelaporan LHKPN anggota Komisaris • Rencana Pelatihan Komisaris • Evaluasi struktur organisasi Dewan Komisaris • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up to previous RAKOM related to 2024 profit target aspirations • Discussion of LHKPN reporting for Commissioner members • Commissioner Training Plan • Evaluation of the Board of Commissioners organizational structure • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Hary Kriswanto Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Yoshua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi	-
3	8 Maret 2024 March 8, 2024	• Tindak Lanjut RAKOM sebelumnya. • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of the previous RAKOM. • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Hary Kriswanto Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Yoshua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
4	27 Maret 2024 March 27, 2024	• Tindak Lanjut RAKOM sebelumnya. • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of the previous RAKOM. • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • Hary Kriswanto Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Yoshua P.S.I Anthonie • Ryan Hegar Suryadinatha Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Deby Rahmad Wicaksono • Samekta Hadi	-
5	30 April 2024 April 30, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait penetapan piagam/*charter* Komite • Pembahasan pelaksanaan RUPS Tahunan 2024 • Evaluasi usulan investasi 2 unit kapal tunda • Peninjauan kinerja Maret 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up to the previous RAKOM regarding the establishment of the Committee charter • Discussion of the implementation of the 2024 Annual GMS • Evaluation of the proposed investment of 2 units of tugboats • March 2024 performance review • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-
6	29 Mei 2024 May 29, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait usulan investasi 2025 • Persiapan RUPS Tahunan • Pembahasan kinerja keuangan April 2024 • Evaluasi risiko IT Masterplan • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of previous RAKOM related to investment proposal 2025 • Annual GMS preparation • Discussion of April 2024 financial performance • Risk evaluation of IT Masterplan • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
7	26 Juni 2024 June 26, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait RUPS Tahunan 2023 • Persetujuan penyesuaian nilai penunjukan langsung • Pembahasan usulan RKAP 2025 • Evaluasi kinerja keuangan Mei 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of previous RAKOM related to 2023 AGM • Approval of direct appointment value adjustment • Discussion of proposed 2025 RKAP • Evaluation of financial performance in May 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-
8	31 Juli 2024 July 31, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait hasil RUPS Tahunan 2023 • Evaluasi Laporan Hasil Audit Semester I 2024 • Pembahasan kinerja keuangan Juli 2024 • Peninjauan pengendalian biaya operasional • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of the previous RAKOM related to the results of the 2023 AGM • Evaluation of the Audit Report for Semester I 2024 • Discussion of July 2024 financial performance • Review of operational cost control • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-
9	27 Agustus 2024 August 27, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait penunjukan KAP • Pembahasan hasil audit Semester I 2024 • Persiapan RUPS Luar Biasa 25 September 2024 • Evaluasi kinerja produksi dan pendapatan • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up to the previous RAKOM regarding the appointment of KAP • Discussion of the audit results for Semester I 2024 • Preparation for the Extraordinary GMS on September 25, 2024 • Evaluation of production and revenue performance • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
10	25 September 2024 September 25,, 2024	• Tindak lanjut Rakom sebelumnya • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up to previous Rakom • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-
11	29 Oktober 2024 October 29, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait penunjukan KAP • Update hasil audit internal Semester I 2024 • Persiapan kunjungan kerja Triwulan IV 2024 • Pembahasan kinerja Triwulan III 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up to the previous RAKOM related to the appointment of KAP • Update on internal audit results for Semester I 2024 • Preparation for working visit in Quarter IV 2024 • Discussion of performance in Quarter III 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-
12	26 November 2024 November 26, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait dividen interim 2024 • Pembahasan laporan kinerja Oktober 2024 • Peninjauan transaksi afiliasi dengan PT LEGI • Evaluasi hasil audit internal Semester I 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of previous RAKOM regarding interim dividend 2024 • Discussion of October 2024 performance report • Review of affiliated transactions with PT LEGI • Evaluation of internal audit results for Semester I 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
13	20 Desember 2024 December 20, 2024	• Tindak lanjut RAKOM sebelumnya terkait dividen interim 2024 • Pembahasan laporan keuangan November 2024 • Penyusunan RKAP 2025 • Evaluasi pengendalian risiko 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of previous RAKOM regarding interim dividend 2024 • Discussion of November 2024 financial report • Preparation of 2025 RKAP • Evaluation of risk control 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Zuhri Iryansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris: Board of Commissioners Committee: • Hartian Surya Widhanto • Dadang Budiawan • Ryan Hegar Suryadinatha • Dyah Ayu Anggraheni S. • Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris: Secretariat of the Board of Commissioners: • Siti Hadijah • Doni Permana	-

Tabel Rapat Gabungan Bersama Direksi
Joint Meeting with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	26 Januari 2024 January 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Desember 2023 • Profil Risiko 2024 • Update QHSSE s.d Desember 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to December 2023 • Risk Profile 2024 • QHSSE Update up to December 2023 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Reini Delfianti • Muhammad Iqbal	-
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Januari 2024 • Profil Risiko 2024 • Update Laporan Keuangan Audited 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to January 2024 • Risk Profile 2024 • Update on Audited Financial Statements 2023 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Reini Delfianti • Muhammad Iqbal	-
3	27 Maret 2024 March 27, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Februari 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up to Previous Rakomdir • Performance Report until February 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Reini Delfianti • Muhammad Iqbal	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
4	17 April 2024 April 17, 2024	• Pembahasan Kajian Perubahan Investasi Kapal • Hal-hal strategis lainnya • Discussion of Ship Investment Change Study • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Reini Delfianti • Muhammad Iqbal	-
5	30 April 2024 April 30, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Maret 2024 • Update Laporan Keuangan Audited 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report up to March 2024 • Update on Audited Financial Statements 2023 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Reini Delfianti • Muhammad Iqbal	-
6	29 Mei 2024 May 29, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d April 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until April 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Reini Delfianti • Muhammad Iqbal	-
7	26 Juni 2024 June 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Mei 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until May 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Muhammad Iqbal	-
8	31 Juli 2024 July 31, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Juni 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until June 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Muhammad Iqbal	-
9	27 Agustus 2024 August 27, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Juli 2024 • Update Laporan Keuangan Quarter 2 2024 • Agenda Strategis Lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to July 2024 • Financial Report Update Quarter 2 2024 • Other Strategic Agenda	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Muhammad Iqbal	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
10	25 September 2024 September 25, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Agutstus 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until August 2024 • Other strategic matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • F. Budi Prayitno Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Muhammad Iqbal	-
11	29 Oktober 2024 October 29, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi, dan Keuangan & SDM s.d. bulan September 2024 • Hal-hal strategis lainnya: Update Pemurnian Bisnis, Update Kinerja Saham dan Penggunaan Dana IPO, Agenda strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations, and Finance & HR up to September 2024 • Other strategic matters: Update on Business Refining, Update on Share Performance and Use of IPO Funds, Other strategic agenda.	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • F. Budi Prayitno Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Muhammad Iqbal	-
12	26 November 2024 November 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Oktober 2024 • Usulan Dividen Interim 2024 • Hal-hal Strategis Lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to October 2024 • Proposed Interim Dividend 2024 • Other Strategic Matters	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • F. Budi Prayitno Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Muhammad Iqbal	-
13	20 Desember 2024 December 20, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan kinerja s.d. bulan November 2024 bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi, dan Keuangan & SDM • Usulan RKAP 2025 • Agenda strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance report up to November 2024 in Commercial & Business Development, Fleet & Operations, and Finance & HR • Proposed 2025 RKAP • Other strategic agenda	Dewan Komisaris Board of Commissioners • Zuhri Iriansyah • R.R Dewi Ariyani • Bay Mokhamad Hasani • F. Budi Prayitno Direksi Board of Directors • Shanti Puruhita • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Muhammad Iqbal	-

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners

Nama Name	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meeting between the Board of Commissioners and Directors		
	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	13	13	100%	13	13	100%
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) (Commissioner)	13	13	100%	13	13	100%
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	13	13	100%	13	13	100%
F. Budi Prayitno (Komisaris Independen)* (Independent Commissioner)	4	4	100%	4	4	100%

*) Menjabat sejak 25 September 2024
*) In office since September 25, 2024

Rapat Direksi

Berdasarkan *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 disahkan tanggal 4 Oktober 2021, Direksi mengadakan secara berkala minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan rapat Internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan Rapat Dewan Komisaris. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Internal maupun Rapat Gabungan yang diselenggarakan di tahun 2024.

Board of Directors Meeting

According to the PT Jasa Armada Indonesia Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, the Board of Directors convenes meetings periodically, at least once every month. Additionally, the Board of Directors is obligated to hold a meeting with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months. Decisions made at Board of Directors meetings must be based on deliberation to reach consensus. However, if consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by majority vote. In the event of a tie in the votes, the chairman of the Board of Directors meeting will make the final decision.

In 2024, the Board of Directors held 12 (twelve) internal meetings and 13 (thirteen) meetings with the Board of Commissioners, as previously discussed in the discussion of the Board of Commissioners Meetings. The agenda, minutes of meetings, attendance, and a summary of the level of attendance of the Board of Directors at Internal Meetings and Joint Meetings held in 2024 are as follows:

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Internal Meeting of the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	25 Januari 2024 January 25, 2024	• *Pending Matters* • Laporan Kinerja Bidang Komersial dan Pengembangan, Armada Dan Operasi, Keuangan Periode S.D Desember 2023 • Profil Risiko Tahun 2024 • *Update* QHSSE s.d. Desember 2023 • Agenda strategis lainnya, antara lain: » Tindak Lanjut *Monitoring* Audit Internal dan Eksternal (BPK) » *Update* Migrasi & Implementasi SAP Bidang Keuangan » *Update* Pemurnian Bisnis » Kinerja Saham & Laporan penggunaan dana IPO • Pending Matters • Performance Reports on Commercial and Development, Fleet and Operations, Finance Period S.D December 2023 • Risk Profile Year 2024 • QHSSE Update s.d. December 2023 • Other strategic agenda, among others: » Follow-up of Internal and External Audit Monitoring (BPK) » Update on Migration & Implementation of SAP for Finance » Update on Business Purification » Stock Performance & Report on the Use of IPO Funds	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
2	21 Februari 2024 February 21, 2024	• *Pending Matters* • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi dan Keuangan & SDM s.d Januari 2024 • *Update* KPI 2024 • Agenda strategis lainnya, antara lain: » Kinerja Saham & Laporan penggunaan dana IPO » Lain-lain • Pending Matters • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations and Finance & HR up to January 2024 • KPI Update 2024 • Other strategic agenda, among others: » Stock performance & IPO fund utilization report » Others	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
3	18 Maret 2024 March 18, 2024	• *Pending Matters* • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi dan Keuangan & SDM s.d Februari 2024. • *Update* Laporan Keuangan *Audited* 2023 • Agenda strategis lainnya, antara lain: » *Update* Pemurnian Bisnis » Kinerja Saham & Laporan penggunaan dana IPO • Pending Matters • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations and Finance & HR up to February 2024. • Update on Audited Financial Statements 2023 • Other strategic agenda, among others: » Business Refining Update » Share Performance & IPO fund utilization report	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani
4	1 - 2 April 2024 April 1-2, 2024	Investasi Kapal Tunda Tugboat Investment	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristian
5	14 Mei 2024 May 14, 2024	• *Update* kerja sama BBM • Proyeksi *cashflow* 2024 dan simulasi dividen 2023 • Pengembangan Bisnis di Laiwui • Pemurnian Bisnis SPJM Grup • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi dan Keuangan & SDM • Simulasi *stress test* pragnosa laba rugi 2024	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Reini Delfianti • Eddy Haristiani

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
		• BBM cooperation update • 2024 cashflow projection and 2023 dividend simulation • Business Development in Laiwui • SPJM Group Business Refining • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations and Finance & HR • 2024 profit and loss stress test simulation	
6	28 Juni 2024 June 28, 2024	Pengembangan Bisnis di Laiwui Business Development in Laiwui	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Eddy Haristiani
7	23 Juli 2024 July 23, 2024	• Hasil audit rutin semester I tahun 2024 • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi dan Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko s.d November 2024 • Routine audit results for the first semester of 2024 • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations and Finance, HR and Risk Management up to November 2024	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Eddy Haristiani
8	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Kebutuhan Kapal Tunda di Area I Tanjung Priok Tugboat Requirements in Area I Tanjung Priok	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Eddy Haristiani
9	19 September 2024 September 19, 2024	Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi dan Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko s.d Agustus 2024. Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations and Finance, HR and Risk Management until August 2024.	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Semua VP
1`0	15 Oktober 2024 October 15, 2024	• *Pending Matters* • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi dan Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko s.d November 2024 • *Update* Investasi Kapal • Agenda strategis lainnya: » Kinerja Saham & Laporan penggunaan dana IPO • Pending Matters • Performance report on Commercial & Business Development, Fleet & Operations and Finance, HR and Risk Management until November 2024 • Ship Investment Update • Other strategic agenda: » Share performance & IPO fund utilization report	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Eddy Haristiani
11	12 November 2024 November 12, 2024	Pengembangan Wilayah Baru di Tarakan, Kalimantan Utara New Area Development in Tarakan, North Kalimantan	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Eddy Haristiani
12	19 Desember 2024 December 19, 2024	• *Pending Matters* • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi dan Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko s.d November 2024. • *Update* KPI 2024. • Agenda strategis lainnya, antara lain: » Kinerja Saham & Laporan penggunaan dana IPO » Lain-lain • Pending Matters • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations and Finance, HR and Risk Management up to November 2024. • KPI update 2024. • Other strategic agenda, among others: » Stock performance & IPO fund utilization report » Others	• Shanti Puruhita • Muhammad Iqbal • Dessy Emastari Prihatiningtyas • Eddy Haristiani

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi
Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Directors

Nama Name	Rapat Internal Direksi Directors Internal Meeting			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris Joint Meeting with Commissioners		
	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director Act. Commercial and Business Development Director)	12	12	100%	13	13	100%
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	12	12	100%	13	13	100%
Reini Delfianti (Direksi Keuangan & SDM)* (Director of Finance & HR)*	5	5	100%	6	6	100%
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko)** (Director of Finance, Human Resource, and Risk Management)**	7	7	100%	7	7	100%

*) Tidak lagi menjabat sejak 12 Juni 2024
*) No longer in office since June 12, 2024
**) Menjabat sejak 12 Juni 2024
**) In office since June 12, 2024

Jalannya rapat dan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi telah didokumentasikan dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak.

The meeting and the decisions made at the Board of Directors' meeting have been recorded in the minutes. These minutes are signed by the chairman of the meeting and distributed to all members of the Board of Directors, whether they attended the meeting or not.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi selama periode tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

DISCLOSURE OF AFFILIATE RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

The table below presents the family and financial relationships among members of the Board of Commissioners and Directors, including relationships with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors, as well as shareholders, and share ownership of the Board of Commissioners and Directors during the 2024 period:

Manajemen Kunci Perusahaan Key Management	Hubungan Keluarga dengan Familiy Relation with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**						
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris) (Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
F. Budi Prayitno (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Direksi **Board of Directors**						
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director Act. Commercial and Business Development Director)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resource, and Risk Management)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut ini tabel yang menunjukan hubungan kepengurusan antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain dalam periode tahun 2024.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

The following table shows the management relationship between members of the Board of Commissioners and Directors at other companies in 2024.

Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Posisi Position	Nama Perusahaan/Instansi Company/Institution Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
R.R. Dewi Ariyani (Komisaris)	Analis Kinerja BUMN Assistant Deputy for Energy, Oil and Gas Industries	Kementerian BUMN
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen) (Commissioner)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
F. Budi Prayitno (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Kepala Biro Hukum Head of Legal Bureau	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Direksi Board of Directors		
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director Act. Commercial and Business Development Director)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resource, and Risk Management)	Komisaris Utama President Commissioner	PT Pendidikan Maritime dan Logistik Indonesia PT Pendidikan Maritime dan Logistik Indonesia

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Informasi kepemilikan saham masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Information on share ownership for each member of the Board of Commissioners and Directors in 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		JAI	Di Perusahaan Lain In Other Companies
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil	Nihil
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	387.600 lembar 387.600 shares	Nihil
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil
Fransiscus Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors			
Shanti Puruhita	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director Act. Commercial and Business Development Director	1.072.100 lembar 1.072.100 shares	Nihil
Muhammad Iqbal	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	964.100 lembar 964.100 shares	Nihil
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Resource, and Risk Management	Nihil	Nihil

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organ

Perusahaan memiliki komite-komite pendukung di bawah Dewan Komisaris guna memastikan efektivitas tata kelola dan pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 serta Anggaran Dasar Perusahaan, komite-komite ini berperan dalam memberikan kajian dan rekomendasi sesuai tugas masing-masing. Hingga akhir 2024, Perusahaan didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Company has supporting committees under the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of governance and supervision. In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 and the Company's Articles of Association, these committees play a role in providing studies and recommendations according to their respective duties. Until the end of 2024, the Company is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris untuk memperkuat peran organ pendukung dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Inisiatif ini memastikan bahwa proses pengawasan memenuhi standar tata kelola perusahaan yang berlaku. Sekretaris Dewan Komisaris memainkan peran krusial dalam mendukung fungsi pengawasan dan konsultasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris berperan dalam menjaga kelancaran komunikasi serta koordinasi antara Dewan Komisaris dan pihak-pihak terkait, sehingga proses pengawasan berjalan lebih optimal.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners established the Secretary of the Board of Commissioners to strengthen the role of supporting organs in improving the effectiveness of supervision. This initiative ensures that the supervisory process meets applicable corporate governance standards. The Secretary of the BOC plays a crucial role in supporting the supervisory and consultative functions performed by the BOC. Furthermore, the Secretary of the Board of Commissioners plays a role in maintaining smooth communication and coordination between the Board of Commissioners and related parties, resulting in a more optimized supervisory process.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris merujuk pada Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 tanggal 22 Maret 2024, tentang Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko di Lingkungan Pelindo Group (termasuk Anak dan Cucu Perusahaan). Selain itu, surat tersebut juga menetapkan Direktur yang bertanggung jawab atas tugas fungsional serta Direktur yang bertugas dalam pembinaan.

Secretary of the Board of Commissioners Work Guideline

In carrying out its duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners refers to the Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 dated March 22, 2024, regarding the Determination of Risk Categories and Classifications within the Pelindo Group (including Subsidiaries and Grandchildren). The letter also stipulates the Director in charge of functional duties and the Director in charge of guidance.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu- waktu.

Secretary of the Board of Commissioners Office Term

The term of office of the Secretary and Secretariat Staff as stated in the Second Dictum shall be a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Pengangkatan dan Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Siti Hadijah ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: SK.DK/30/04/01JAI-2024.

Secretary of the Board of Commissioners Appointment and Profile

Siti Hadijah was appointed as Secretary of the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: SK.DK/30/04/01JAI-2024.



Siti Hadijah

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 42 tahun per 31 Desember 2024 Jakarta, 9 Juli 1983
Domisili Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Coastal Engineering & Port Development IHE Delft Institute (2013) • S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia (2006) • S2 Coastal Engineering & Port Development IHE Delft Institute (2013) • S1 Civil Engineering University of Indonesia (2006)
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/30/04/01JAI-2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/30/04/01JAI-2024 regarding the Appointment of Secretary and Staff Secretary of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pengalaman Kerja Working Experience	Department Head Monitoring dan Evaluasi Investasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Department Head of Investment Monitoring and Evaluation at the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dan sebagai penghubung antara Dewan Komisaris dengan manajemen serta bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Komisaris kepada Perusahaan. Tugas Pokok Sekretaris Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Secretary of the Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Secretary of the Board of Commissioners primarily functions to provide support to Commissioners, facilitating their duties and acting as a liaison between the Board of Commissioners and management. They are responsible for providing and conveying crucial information about Board of Commissioners Meetings to the Company. The main duties of the Secretary of the Board of Commissioners include the following:

1. Organizing secretarial administration activities within the Board of Commissioners.
2. Coordinating meetings of the Board of Commissioners and meetings/sessions between the Board of Commissioners and Shareholders, Directors, and other relevant parties.

3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite di lingkungan Dewan komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, ataupun seminar. Di tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

3. Providing necessary data/information required by the Board of Commissioners and Committees within the Board of Commissioners.

Secretary of the Board of Commissioners Competency Development

To support the implementation of its duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners strives to enhance its competence, including by attending training, workshops, or seminars. In 2024, the Secretary of the Board of Commissioners participated in the following competency development program:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Siti Hadijah (Sekretaris Dewan Komisaris) (Secretary of the Board of Commissioners)	Manajemen Risiko Risk Management	QCRO	Bogor, 21 Oktober 2024 Bogor, October 21, 2024	BNSP

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2024

Di tahun 2024, peran Sekretaris Dewan Komisaris tetap berjalan efektif dalam mendukung kelancaran fungsi pengawasan. Beberapa tugas yang telah dijalankan antara lain:

1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Secretary of the Board of Commissioners 2024 Duties Report

In 2024, the Secretary of the Board of Commissioners maintained an effective role in supporting the oversight function. Some of the tasks that have been carried out include:

1. Preparing for meetings, including meeting materials (briefing sheet) of the Board of Commissioners;
2. Preparing minutes of the Board of Commissioners meeting/ Board of Commissioners meeting with the Board of Directors;
3. Administering documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Draft the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Draft reports of the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT

Untuk mendukung pengawasan yang efektif, Perusahaan memiliki Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Komite Audit memiliki peran krusial dalam mendukung Dewan Komisaris, terutama dalam penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta evaluasi independensi akuntan publik.

AUDIT COMMITTEE

The Company has an Audit Committee that is responsible to the Board of Commissioners to ensure effective supervision. Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015, the Audit Committee has a crucial role in supporting the Board of Commissioners, especially in strengthening internal control, increasing transparency of financial statements, and evaluating the independence of public accountants.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan fungsi pengawasan, Perusahaan telah menetapkan Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 tanggal 26 Maret 2021, yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Ketua serta Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Kriteria Komite Audit

Kriteria keanggotaan Komite Audit ditetapkan dalam Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24, tertanggal 22 Maret 2024. Surat ini membahas Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko di Lingkungan Pelindo Group (termasuk anak dan cucu perusahaan) serta menetapkan Direktur yang bertanggung jawab atas tugas fungsional dan pembinaan.

Pedoman Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris melalui SK.DK/28/03/01/JAI-2024. Piagam ini mengatur ketentuan dan kebutuhan Komite Audit dalam menjalankan perannya. Pedoman tersebut akan ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika kegiatan usaha, struktur organisasi, serta tingkat risiko di Perusahaan. Selain itu, pembaruan pedoman akan mempertimbangkan kebutuhan Komite Audit dan memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit di Sepanjang Tahun 2024

Di tahun 2024, terdapat perubahan keanggotaan Komite Audit Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Komite Audit Dewan

In order to comply with regulations and improve supervisory functions, the Company has established an Audit Committee through the Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 dated March 26, 2021, which regulates the appointment and dismissal of the Chairman and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Audit Committee Criteria

The criteria for the Audit Committee membership are set forth in Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/ PLJM-24 dated March 22, 2024 Regarding the Determination of Risk Categories and Classifications within the Pelindo Group (Up to the Company's Grandchildren) and establishing Directors who carry out functional duties and Directors who carry out coaching duties.

Audit Committee Guideline

The Audit Committee carries out its duties and functions based on the Audit Committee Charter authorized by the Board of Commissioners through SK.DK/28/03/01/JAI-2024. This charter regulates the provisions and needs of the Audit Committee in carrying out its role. The guidelines will be reviewed periodically to adjust to the dynamics of business activities, organizational structure, and the level of risk in the Company. Furthermore, the update of the guidelines will consider the needs of the Audit Committee and ensure its compliance with the prevailing laws and regulations.

Audit Committee Term of Office

The term of office of the Audit Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs to dismiss them at any time.

Audit Committee Composition, Numbers, Structure and Appointment Basis in 2024

In 2024, there was a change in the membership of the Company's Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 concerning the Appointment of the Chairman

Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, di mana berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan anggota Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Anggota yang berasal dari luar Perusahaan. Komposisi tersebut telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which amounted to 3 (three) people consisting of 1 (one) Chairman who is an Independent Commissioner and 2 (two) Members from outside the Company. The composition is in accordance with POJK No. 55/POJK.05/2015 regarding the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee. The composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Office Term
Bay Mokhamad Hasani	Ketua Komite Audit Audit Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree No. SK.DK/26/03/01/JAI-2021 dated 26 March 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair of the Audit Committee and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 Mei 2024 - 1 April 2024 May 1, 2024 - April 1, 2024
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board of Commissioners Decree No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 concerning the Appointment of the Chairman and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 Mei 2024 – 1 Mei 2027 May 1, 2021-May 1, 2024
Jaja Suparman	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board of Commissioners Decree No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 concerning the Appointment of the Chairman and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 Mei 2024 – 1 Mei 2027

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Profil Ketua Komite Audit, Bay Mokhamad Hasani telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

The profile of the Chairman of the Audit Committee, Bay Mokhamad Hasani has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report.



Dyah Ayu Anggraheni Sugiri

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)
Audit Committee Member (Independent)

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 46 Tahun per 31 Desember 2024 Lamongan, 3 Juni 1978 46 years old as of December 31, 2024 Lamongan, June 3, 1978
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia (2019) Master of Accounting Science, University of Indonesia (2019)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 regarding the Appointment of the Chairman and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pengalaman Kerja Working Experience	Komite Audit PT IKT Audit Committee of PT IKT
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.
Sertifikasi Certification	• Manajemen Risiko QCRO yang masih berlaku hingga tahun 2027 • Certification in Audit Committee Practices (CACP) nomor 10792/CACP/XII/2023 • - QCRO Risk Management which is still valid until 2027 • - Certification in Audit Committee Practices (CACP) number 10792/CACP/XII/2023



Jaja Suparman

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)
Audit Committee Member (Independent)

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 58 Tahun per 31 Desember 2024 Kuningan, 11 Agustus 1967 58 years old as of December 31, 2024 Kuningan, August 11, 1967
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, tahun lulus 2018 • Magister Bio Medik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun lulus 2002 • Sarjana Nautika, Sekolah Tingga Ilmu Pelayaran Jakarta, tahun lulus 1993 • Doctorate in Educational Management, State University of Surabaya, graduated in 2018 • Master's in Biomedical Sciences, National Development University "Veteran" Jakarta, graduated in 2002 • Bachelor's in Nautical Science, Jakarta School of Shipping Science, graduated in 1993
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Beliau memiliki rangkap di luar IPCM, sementara saat ini beliau tercatat menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kementerian Perhubungan He has concurrent positions outside of IPCM, currently serving as Head of the Subdirectorate of Maritime Affairs of the Ministry of Transportation.
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 regarding the Appointment of the Chairman and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pengalaman Kerja Working Experience	Pembantu Ketua II STIP Jakarta Assistant Principal II College Marine Science Jakarta
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.
Sertifikasi Certification	-

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit. Kriteria independensi anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Audit Committee Independence

All members of the Audit Committee who are independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or relationships with the Company that could affect their ability to act independently. The independence criteria for Audit Committee members are as follows:

Tabel Kriteria Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence Criteria

Kriteria Independensi Independence Criteria	Bay Mokhamad Hasani	Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Jaja Suparman
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir. Not an individual employed by a public accounting firm, legal consultant firm, or any other entity that provided audit, non-audit services, or other consulting services to the Company within the last 6 months.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Does not possess shares, either directly or indirectly, in the Company.	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who held authority or responsibility in planning, leading, and/or controlling the Company within the last six months.	√	√	√

Kriteria Independensi Independence Criteria	Bay Mokhamad Hasani	Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Jaja Suparman
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama Perusahaan. Has no family relationship, by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with Commissioners, Directors, or major Shareholders of the Company.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not currently affiliated with an institution whose business activities involve providing services to the Company.	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur di dalam Piagam Komite Audit. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas berbagai kegiatan Perusahaan, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit The duties and responsibilities of the Audit Committee are outlined in the Audit Committee Charter. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over various Company activities, which include:

1. Reviewing the financial information intended for release to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations regarding the Company's activities;
3. Providing independent opinions in case of disagreements between management and accountants regarding the services provided;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and compensation for services;
5. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the follow-up actions by the Board of Directors regarding the internal auditor's findings;
6. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
7. Reviewing and offering advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company;
8. Maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit merekomendasikan penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit terhadap Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, yang diterbitkan pada 4 Juni 2024. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli 2024, Komite Audit menyampaikan rekomendasi terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Audit Committee Responsibilities in Providing Recommendations for the Appointment and Dismissal of External Auditors

In carrying out its responsibilities, the Audit Committee provides recommendations on the appointment and dismissal of external auditors based on the Evaluation Report on the Implementation of the Provision of Audit Services for Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms, which is issued on the tgl/bln/thn. Furthermore, on the tgl/bln/thn, the Audit Committee submits recommendations regarding the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. K.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, pembagian tugas antar anggota Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

Distribution of Duties and Responsibilities in Audit Committee Membership

As stated in the Decree of the Board of Commissioners No. K.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 regarding Appointment of Chairman and Audit Committee of the Board of Commissioners PT Jasa Armada Indonesia Tbk, the distribution of duties between members of the Audit Committee is described as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Bay Mokhamad Hasani (Ketua Komite Audit) (Audit Committee Chairman)	• Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; • Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; • Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; • Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal • Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; • Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; • Menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. • Reviews financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company; • Reviews compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company; • Provides an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services provided; • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and service fees; • Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors; • Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Issuer or Public Company; • Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Issuer or Public Company; • Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	• Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; • Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; • Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; • Melakukan pene • laahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal • Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; • Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; • Menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. • Reviews financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company; • Reviews compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company; • Provides an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services provided; • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and service fees; • Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors; • Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Issuer or Public Company; • Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Issuer or Public Company; • Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.
Jaja Suparman Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	• Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; • Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; • Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; • Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal • Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; • Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; • Menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. • Reviews financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company; • Reviews compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company; • Provides an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services provided; • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and service fees; • Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors; • Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Issuer or Public Company; • Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Issuer or Public Company; • Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) Rapat Internal. Berikut agenda rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam setiap rapat.

Rapat Komite Audit

Throughout 2024, the Audit Committee held 13 (thirteen) Internal Meetings. The following is the meeting agenda, attendance list, and recapitulation of the attendance level of Audit Committee members in each meeting.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	16 Mei 2024 May 16, 2024	Pembahasan Tanggapan atas Usulan Investasi 2025 Feedback Discussion of the Proposed Investment 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
2	28 Mei 2024 May 28, 2024	Pembahasan Kinerja Keuangan sd April 2024 Discussion of Financial Performance until April 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
3	31 Mei 2024 May 31, 2024	Pembahasan Hal-Hal yang dipersiapkan KA untuk RUPS PT JAI Tgl 12 Juni 2024 Discussion of Matters prepared by KA for the GMS of PT JAI on June 12, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
4	26 Juni 2024 June 26, 2024	Pembahasan Kinerja Keuangan sd Mei 2024 Discussion of Financial Performance until May 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
5	30 Juli 2024 July 30, 2024	Pembahasan Kinerja Keuangan sd Juni 2024 Discussion of Financial Performance until June 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
6	07 Agustus 2024 August 7, 2024	Rapat Pembahasan Temuan Audit Semester I Tahun 2024 Meeting Discussion of Audit Findings for Semester I Year 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
7	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Pembahasan Kinerja Keuangan sd Juli 2024 Discussion of Financial Performance until July 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
8	09 Oktober 2024 October 9, 2024	Pembahasan atas penetapan harga KAP tahun buku 2024 Discussion on the determination of KAP price for fiscal year 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit	-
9	15 Oktober 2024 October 15, 2024	Rapat Pembahasan Monitoring Temuan Audit Semester I Tahun 2024 Meeting Discussion on Monitoring Audit Findings for Semester I Year 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
10	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Pembahasan Kinerja Perusahaan sd Oktober 2024 Discussion on Company Performance until October 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
11	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Pembahasan Kinerja Keuangan sd September 2024 Discussion on Financial Performance until September 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
12	25 November 2024 November 25, 2024	Pembahasan atas rencana Pembayaran dividen Interim PT JAI Tbk Discussion on the plan for Interim dividend payment of PT JAI Tbk	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
13	19 Desember 2024 December 19, 2024	Pembahasan Kinerja Perusahaan sd November 2024 Discussion on Company Performance until November 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Frequency and Attendance of Audit Committee Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Bay Mokhamad Hasani (Ketua Komite Audit) (Audit Committee Chairman)	13	13	100%
Dadang Budiawan Anggota Komite Audit (Pihak Independen)* Audit Committee Member (Independent)*	5	5	100%
Yohsua P.S.I Anthonie Anggota Komite Audit (Pihak Independen)* Audit Committee Member (Independent)*	0	0	0%
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri Anggota Komite Audit (Pihak Independen)** Audit Committee Member (Independent)**	8	8	100%
Jaja Suparman Anggota Komite Audit (Pihak Independen)** Audit Committee Member (Independent)**	8	8	100%

*) Tidak lagi menjabat sejak 1 Mei 2024
*) No longer in office since tgl/bln/thn
**) Menjabat sejak 1 Mei 2024
**) In office since May 1, 2024

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit senantiasa mengasah keahlian dan wawasannya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, *workshop*, serta seminar. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi berikut:

Audit Committee Competency Development

The Audit Committee continues to enhance its expertise and insight to ensure effectiveness in carrying out its duties. This is accomplished through various training programs, workshops, and seminars. Throughout 2024, the Audit Committee has participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Bay Mokhamad Hasani (Ketua Komite Audit) (Audit Committee Chairman)	Manajemen Risiko Risk Management	QCRO	Jakarta, 21 Oktober 2024 Jakarta, October 21, 2024	BNSP
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)	Manajemen Risiko Risk Management	QCRO	Jakarta, 21 Oktober 2024 Jakarta, October 21, 2024	BNSP
Jaja Suparman (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)	-	-	-	-

Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2024

Selama tahun 2024, Komite audit telah melaksanakan tugas yang direalisasikan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Komite dengan SPI dan Pejabat terkait.
2. Rapat Internal Dewan Komisaris.
3. Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
4. Kunjungan kerja di Wilayah PT JAI Tbk.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam menjaga profesionalisme dan keseimbangan dalam pengelolaan Perusahaan, diperlukan sistem yang memastikan proses nominasi dan remunerasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan dalam meninjau serta mengawal kebijakan nominasi dan remunerasi agar dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan Perusahaan serta dinamika perkembangannya.

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite- Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan melalui SK.DK/28/03/03/JAI-2024. Piagam ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite. Secara berkala, piagam tersebut dikaji ulang guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan perusahaan serta regulasi yang berlaku.

Audit Committee Duties Report in 2024

Throughout 2024, the audit committee has conducted the following duties:

1. Committee Coordination Meeting with SPI and related Officials.
2. Internal Meeting of the Board of Commissioners.
3. Meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4. Working visit in the Region of PT JAI Tbk.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In order to maintain professionalism and balance in the management of the Company, a system is needed which ensures that the nomination and remuneration process runs according to the principles of good governance. The Nomination and Remuneration Committee plays a role in reviewing and overseeing nomination and remuneration policies to be implemented fairly, transparently and accountably. Therefore, every decision taken is in line with the interests of the Company and the dynamics of its development.

Nomination and Remuneration Committee Criteria

In carrying out its duties and functions to supervise and advise on the management carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. All Committee Members from independent parties have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.

Nomination and Remuneration Committee Work Guideline

The Nomination and Remuneration Committee is guided by the Charter that has been approved by the Company's Board of Commissioners through SK.DK/28/03/03/JAI-2024. This Charter serves as a reference in the implementation of the Committee's duties and responsibilities. The charter is periodically reviewed to ensure its suitability with the Company's needs and prevailing regulations.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di Sepanjang Tahun 2024

Di tahun 2024, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Office Term

The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs to dismiss them at any time.

Nomination and Remuneration Committee Structure, Numbers, Composition and Appointment Basis in 2024

In 2024, there was a change in the composition of the Nomination and Remuneration Committee membership based on the decision of the Board of Commissioners Decree No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Zuhri Iryansyah	Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	1 April 2024 - 1 April 2026 April 1, 2024 - April 1, 2026
Ryan Hegar Suryadinatha	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	1 April 2024 - 1 April 2026 April 1, 2024 - April 1, 2026

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile



Zuhri Iryansyah

Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee

Profil Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Zuhri Iryansyah telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairman & Member of the Nomination and Remuneration Committee, Zuhri Iryansyah has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report.



Ryan Hegar Suryadinatha

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 32 Tahun per 31 Desember 2024 Mataram, 29 Desember 1992 32 Years Old as of December 31, 2024 Mataram, December 29, 1992
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi di Universitas Brawijaya (2015) Bachelor of Economics from Brawijaya University (2015)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris SK.DK/28/03/03/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners SK.DK/28/03/03/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pengalaman Kerja Working Experience	• Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk (April 2021-Desember 2021) • Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk (Oktober 2016 – Maret 2021) • Junior Konsultan GCG (Good Corporate Governance) untuk Individual Expert (Juli 2016-Juni 2020) • Audit Committee member of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (April 2021-December 2021) • Staff to the Secretary of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (October 2016 – March 2021) • GCG (Good Corporate Governance) Junior Consultant for Individual Expert (July 2016-June 2020)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders or other members of the Board of Commissioners and Directors
Sertifikasi Certification	Enterprise Risk Management Certified Professional valid until 2026

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan adalah anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tanggung jawab yang mencakup:

1. Tugas Pokok Berkaitan Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

   b. Melakukan kegiatan terkait nominasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
   c. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan nominasi independen untuk melakukan penelaahan Kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui *Human Capital*.
2. Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi.
   b. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
   c. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan remunerasi independen untuk melakukan penelaahan Kembali atas remunerasi yang telah ditentukan, maka tugas komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan *monitoring* pekerjaan konsultan melalui *Human Capital*.

Nomination and Remuneration Committee Profile Nomination and Remuneration Committee Independency

Members of the Company's Nomination and Remuneration Committee are independent and have no personal interests or connections that could negatively impact or create a conflict of interest with the Company. They have fulfilled the requirements to be appointed as members of the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has responsibilities that include:

1. Main Duties Related to Nominations:
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - The composition of positions for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
      - Policies and criteria required in the nomination process.
      - Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   b. Conducting activities related to nominations and reporting them to Shareholders in accordance with applicable legal procedures or provisions.

   c. If the Committee deems it necessary to use an independent nomination consultant to review the nominations, the Committee's task is to provide input regarding the criteria and competency of the consultant and to monitor the consultant's work through Human Capital.

2. Main Tasks Related to Remuneration
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and amount of remuneration.
   b. Conducting activities related to remuneration and reporting them to Shareholders in accordance with applicable legal procedures or provisions.

   c. If the Committee considers it necessary to use an independent remuneration consultant to review the remuneration, the Committee's task is to provide input regarding the criteria and competency of the consultant and to monitor the consultant's work through Human Capital.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, pembagian tugas antar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan sebagai berikut:

Distribution of Duties and Responsibilities in Nomination and Remuneration Committee Membership

As stated in the Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, the distribution of duties between members of the Nomination and Remuneration Committee is described as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Zuhri Iryansyah (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee)	• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; • Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan • Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi. • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, policies and criteria required in the nomination process and performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. • Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material; • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; • Provide proposals for candidates who qualify as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and • Evaluate the Board of Directors' proposal regarding the Company's organizational structure. • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policy and amount of remuneration. • Assist the Board of Commissioners in assessing performance with the suitability of remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.
Ryan Hegar Suryadinatha (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Member of Nomination and Remuneration Committee)	• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; • Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan • Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi. • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
	• Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, policies and criteria required in the nomination process and performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. • Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material; • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; • Provide proposals for candidates who qualify as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and • Evaluate the Board of Directors' proposal regarding the Company's organizational structure. • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policy and amount of remuneration. • Assist the Board of Commissioners in assessing performance with the suitability of remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) Rapat Internal. Berikut agenda rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam setiap rapat.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held 13 (thirteen) Internal Meetings. The following is the meeting agenda, attendance list, and recapitulation of the attendance level of the Nomination and Remuneration Committee members in each meeting.

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
	26 Januari 2024 January 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Desember 2023 • Profil Risiko 2024 • Update QHSSE s.d Desember 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to December 2023 • Risk Profile 2024 • QHSSE Update up to December 2023 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	26 Februari 2024 February 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Januari 2024 • Profil Risiko 2024 • Update Laporan Keuangan Audited 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to January 2024 • Risk Profile 2024 • Update on Audited Financial Statements 2023 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	27 Maret 2024 March 27, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Februari 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to February 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
	17 April 2024 April 17, 2024	• Pembahasan Kajian Perubahan Investasi Kapal • Hal-hal strategis lainnya • Review of Changes on Ship Investment • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	30 April 2024 April 30, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Maret 2024 • Update Laporan Keuangan Audited 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report up to March 2024 • Update on Audited Financial Statements 2023 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	30 April 2024 April 30, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Maret 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until March 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	29 Mei 2024 May 29, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d April 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until April 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	26 Juni 2024 June 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Mei 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until May 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	24 Juli 2024 July 24, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Juni 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until June 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	27 Agustus 2024 August 27, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Juli 2024 • Update Laporan Keuangan Quarter 2 2024 • Agenda Strategis Lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to July 2024 • Financial Report Update Quarter 2 2024 • Other Strategic Agenda	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	September, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Agustus 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until August 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
	29 Oktober 2024 October 29, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi, dan Keuangan & SDM s.d. bulan September 2024 • Hal-hal strategis lainnya: Update Pemurnian Bisnis, Update Kinerja Saham dan Penggunaan Dana IPO, Agenda strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations, and Finance & HR up to September 2024 • Other strategic matters: Update on Business Refining, Update on Share Performance and Use of IPO Funds, Other strategic agenda.	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-
	26 November 2024 November 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Oktober 2024 • Usulan Dividen Interim 2024 • Hal-hal Strategis Lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to October 2024 • Proposed Interim Dividend 2024 • Other Strategic Matters	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Frequency and Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Bay Mokhamad Hasani (Plt. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi)* (Act. Chairman of Nomination and Remuneration Committee)*	4	4	100%
Zuhri Iryansyah (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)** (Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee)**	9	9	100%
Ryan Hegar Suryadinatha (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Member of Nomination and Remuneration Committee)	13	13	100%

*) Tidak lagi menjabat sejak 1 April 2024
*) No longer in office since April 1, 2024
**) Menjabat sejak 1 April 2024
**) In office since March 28, 2024

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa mengasah keahlian dan wawasannya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, *workshop*, serta seminar. Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi berikut:

Competency Development of Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee continues to enhance its expertise and insight to ensure effectiveness in carrying out its duties. This is accomplished through various training programs, workshops, and seminars. Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee has participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Type	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Zuhri Iryansyah (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee	Keuangan Finance	Finance for Non Finance and Governance	Kuta - Bali, 14 - 15 November 2024 Kuta - Bali, November 14 – 15, 2024	Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Indonesia
Ryan Hegar Suryadinatha (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) Member of Nomination and Remuneration Committee	Manajemen Risiko Risk Management	ISO 31000 ERM Fundamentals	6 - 8 Meri 2024 March 6 - 8, 2024	CRMS & ERMA
	GCG	Aligning the Tension of Interest the main issue on achieving objectives	20 Juli 2024 July 20, 2024	IAMI (Institut Akuntan Manajemen Indonesia)
	Environmental, Social & Governance	ESG Fundamentals	17 - 19 September 2024 September 17 - 19, 2024	CRMS
	Anti-Fraud	Integrated Anti-Fraud Management System	3 - 4 Oktober 2024 October 3 - 4, 2024	CRMS
	Governance, Risk & Compliance	Implementing GRC	10 - 12 Desember 2024 December 10 -12, 2024	CRMS
	Enterprise Risk Management Certified Professional	Risk Management	27 Mei 2024 Mei 27, 2024	ERMS

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang nominasi dan remunerasi, meliputi:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit.
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024.
4. Pengawasan, Rekomendasi dan Nasihat Dewan Komisaris.
5. Kunjungan Kerja.

Implementation of Nomination and Remuneration Committee Duties in 2024

Throughout 2024, the audit committee has conducted the following duties:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners with the Audit Committee.
2. Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors.
3. Implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders (GMS).
4. Supervision, Recommendation and Advice of the Board of Commissioners.
5. Working Visit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan menerapkan pengawasan manajemen risiko secara menyeluruh guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas usaha. Untuk mendukung fungsi ini, Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko.

Kriteria Komite Pemantau Risiko

Kriteria keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan dalam Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24, tertanggal 22 Maret 2024. Surat ini membahas Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko di Lingkungan Pelindo Group (termasuk anak dan cucu perusahaan) serta menetapkan Direktur yang bertanggung jawab atas tugas fungsional dan pembinaan.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Perusahaan memiliki mekanisme pengawasan risiko yang dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko. Sebagai landasan kerja, Komite ini berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang disahkan melalui keputusan Dewan Komisaris Perusahaan SK.DK/26/04/01/JAI-2021. Piagam tersebut mengatur tata kelola serta ruang lingkup tugas Komite dalam memastikan efektivitas manajemen risiko secara independen. Piagam Komite Pemantau Risiko ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan Piagam tersebut sejalan dengan kebutuhan dan regulasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Company implements comprehensive risk management oversight to ensure business sustainability and stability. In order to support this function, the Risk Monitoring Committee was established with responsibility to the Board of Commissioners in overseeing and evaluating the implementation of risk management.

Risk Monitoring Committee Criteria

The criteria for the Risk Monitoring Committee membership is stipulated in the Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24, dated March 22, 2024. This letter discusses the Determination of Risk Categories and Classifications within the Pelindo Group (including subsidiaries and grandchildren) as well as establishing the Director responsible for functional duties and guidance.

Risk Monitoring Committee Work Guideline

The Company has a risk monitoring mechanism run by the Risk Monitoring Committee. The Committee is guided by the Charter of the Risk Management Oversight Committee, which was approved by the decision of the Company's Board of Commissioners SK.DK/26/04/01/JAI-2021. This charter regulates the governance and scope of duties of the Committee in ensuring the effectiveness of risk management independently. The Risk Monitoring Committee Charter is reviewed periodically to ensure that the scope of the Charter is in line with the needs and other regulations relating to the Company's business activities.

Risk Monitoring Committee Office Term

The term of office of the Risk Monitoring Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs is a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs to dismiss them at any time.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko di Sepanjang Tahun 2024

Di tahun 2024, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Structure, Number, Composition and Appointment Basis in 2024

In 2024, there was a change in the membership composition of the Risk Monitoring Committee based on the decision of the Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
R. R. Dewi Ariyani	Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman & Member of Risk Management Monitoring Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Pemantau Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/26/03/03/JAI-2021 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Management Monitoring Committee as a Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2021 - 1 April 2024 April 1, 2021 - April 1, 2024
Hartian Surya Widhanto*	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Management Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2021 - 1 April 2024 April 1, 2021 - April 1, 2024
Dadang Budiawan**	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Management Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2024 - 1 April 2025 April 1, 2024 - April 1, 2025

*Berakhir 2026 | Ended in 2026
**Berakhir 2025 | Ended in 2025

Profil Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Profile



R. R. Dewi Ariyani

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, R. R. Dewi Ariyani telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
The profile of the Chairman & Member of the Risk Monitoring Committee, R. R. Dewi Ariyani has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report.



Hartian Surya Widhanto

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 54 Tahun per 31 Desember 2024 21 November 1970 54 years old as of December 31, 2024 November 21, 1970
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master of Science in Engineering pada bidang Engineering Management dari the University of Birmingham, UK (1996) • Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1994) • Master of Science in Engineering majoring in Engineering Management from the University of Birmingham, UK (1996) • Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1994)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pengalaman Kerja Working Experience	• Praktisi pada bidang *corporate oversight* • Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) • Practitioner in corporate oversight • Member of Risk Monitoring Committee (Independent Party)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.



Dadang Budiawan

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 64 Tahun per 31 Desember 2024 Bandung, 15/10/1960 64 Years Old as of December 31, 2024 Bandung, 15/10/1960
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Akuntansi Manajemen, Universitas Padjadjaran, tahun lulus 2001 Bachelor of Management Accounting, Padjadjaran University, graduated in 2001.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Pemantau Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Management Monitoring Committee as a Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Pengalaman Kerja Working Experience	• Auditor Madya Auditor Ahli Muda, Deputi Bidang Investigasi BPKP 2011 -2020 • Ketua Tim, Deputi Bidang Investigasi BPKP • Associate Auditor Junior Expert Auditor, Deputy Investigation of BPKP 2011-2020 • Team Leader, Deputy Investigation of BPKP
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.
Sertifikasi Certification	• Manajemen Risiko QCRO yang masih berlaku hingga tahun 2027 • QCRO Risk Management valid until 2027

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Risk Monitoring Committee Independency

All members of the Risk Monitoring Committee, who are independent parties, meet the requirements to be appointed as a member of the committee. They have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Directors, and/or Shareholders, or relationships with the Company, which could affect their ability to act independently.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

The Risk Management Monitoring Committee has the following duties and responsibilities:

1. Mengevaluasi kecukupan kebijakan dan pedoman manajemen risiko Perusahaan dibandingkan dengan praktik terbaik dan/atau praktik umum yang berlaku.
2. Memastikan efektivitas pelaksanaan praktik manajemen risiko termasuk kepatuhan pelaksanaannya terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Perseroaan.
3. Mengevaluasi kecukupan *risk appetite* Perusahaan.
4. Mengevaluasi kecukupan dan kewajaran laporan profil risiko Perusahaan dan/atau hasil asesmen risiko oleh manajemen, termasuk risiko-risiko yang berkenaan dengan inisiatif strategi Perusahaan.
5. Melakukan pengawasan atas realisasi dari rencana mitigasi atau respon atas risiko-risiko signifikan Perusahaan.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi atas rencana kerja unit manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
7. Memberikan masukan dan rekomendasi atas strategi dan rencana peningkatan maturitas manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
8. Memberikan masukan dan rekomendasi atas rencana pengembangan sistem pendukung dan kompetensi sumber daya manusia yang berperan penting dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

1. Evaluate the adequacy of the Company's risk management policies and Guidelines compared to applicable best practices and/or general practices.
2. Ensure the effectiveness of the implementation of risk management practices, including compliance with the risk management policies and Guidelines applicable within the Company.
3. Evaluate the adequacy of the Company's risk appetite.
4. Evaluate the adequacy and fairness of the Company's risk profile report and/or the results of risk assessments by management, including risks related to the Company's strategic initiatives.
5. Supervise the realization of mitigation plans or responses to the Company's significant risks.
6. Provide input and recommendations on the work plan of the Company's risk management unit, and monitor its realization.
7. Provide input and recommendations on strategies and plans to increase the Company's risk management maturity, and monitor their realization.
8. Provide input and recommendations on plans to develop support systems and human resource competencies that play an important role in implementing the Company's risk management, as well as monitor their realization.
9. Carry out other duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners from time to time.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Pemantau Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, pembagian tugas antar anggota Komite Pemantau Risiko diuraikan sebagai berikut:

Distribution of Duties and Responsibilities in the Risk Monitoring Committee Membership

As stated in the Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Management Monitoring Committee as a Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, the distribution of duties between members of the Risk Management Monitoring Committee is described as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
R. R. Dewi Ariyani (Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko) (Chairman & Member of the Risk Monitoring Committee)	• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko; • Melakukan komunikasi dengan kepala unit dan pihak lain dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klasifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang yang diperlukan; • Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS;

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
	• Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya; • Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan • Access all relevant information about the Company related to the duties and functions of the risk monitoring committee; • Communicate with the head of the unit and other parties in the Company to obtain information, classification and request the necessary documents and reports; • Monitor and review risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; • Monitor and evaluate the suitability of the implementation of the Company's risk management policies and strategies; • Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of risk management implementation and the suitability of the Company's risk management policies; • Carry out monitoring and evaluation of the implementation of other risk management functions with the provisions of laws and regulations, articles of association, and / or GMS Decisions; • Carry out other authorities, duties and responsibilities related to its functions; • Conduct monitoring and review of risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; • Conduct monitoring and evaluation of the suitability of the implementation of the Company's risk management policies. • Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of risk management implementation and the suitability of the Company's risk management policies.
Hartian Surya Widhanto (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of the Risk Monitoring Committee)	• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko; • Melakukan komunikasi dengan kepala unit dan pihak lain dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klasifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang yang diperlukan; • Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS; • Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya; • Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan • Access all relevant information about the Company related to the duties and functions of the risk monitoring committee; • Communicate with the head of the unit and other parties in the Company to obtain information, classification and request the necessary documents and reports; • Monitor and review risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; • Monitor and evaluate the suitability of the implementation of the Company's risk management policies and strategies; • Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of risk management implementation and the suitability of the Company's risk management policies; • Carry out monitoring and evaluation of the implementation of other risk management functions with the provisions of laws and regulations, articles of association, and / or GMS Decisions; • Carry out other authorities, duties and responsibilities related to its functions; • Conduct monitoring and review of risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; • Conduct monitoring and evaluation of the suitability of the implementation of the Company's risk management policies. • Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of risk management implementation and the suitability of the Company's risk management policies.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Dadang Budiawan (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of the Risk Monitoring Committee)	• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko; • Melakukan komunikasi dengan kepala unit dan pihak lain dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klasifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang yang diperlukan; • Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS; • Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya; • Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan • Access all relevant information about the Company related to the duties and functions of the risk monitoring committee; • Communicate with the head of the unit and other parties in the Company to obtain information, classification and request the necessary documents and reports; • Monitor and review risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; • Monitor and evaluate the suitability of the implementation of the Company's risk management policies and strategies; • Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of risk management implementation and the suitability of the Company's risk management policies; • Carry out monitoring and evaluation of the implementation of other risk management functions with the provisions of laws and regulations, articles of association, and / or GMS Decisions; • Carry out other authorities, duties and responsibilities related to its functions; • Conduct monitoring and review of risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; • Conduct monitoring and evaluation of the suitability of the implementation of the Company's risk management policies. • Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of risk management implementation and the suitability of the Company's risk management policies.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) Rapat Internal. Berikut agenda rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam setiap rapat.

Risk Monitoring Committee Meeting

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee held 13 (thirteen) Internal Meetings. The following is the meeting agenda, attendance list, and recapitulation of the attendance level of the Risk Management Oversight Committee members in each meeting.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	26 Januari 2024 January 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Desember 2023 • Profil Risiko 2024 • Update QHSSE s.d Desember 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to December 2023 • Risk Profile 2024 • QHSSE Update up to December 2023 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Januari 2024 • Profil Risiko 2024 • Update Laporan Keuangan Audited 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to January 2024 • Risk Profile 2024 • Update on Audited Financial Statements 2023 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
3	27 Maret 2024 March 27, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Februari 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to February 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
4	17 April 2024 April 17, 2024	• Pembahasan Kajian Perubahan Investasi Kapal • Hal-hal strategis lainnya • Review of Changes on Ship Investment • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
5	30 April 2024 April 30, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Maret 2024 • Update Laporan Keuangan Audited 2023 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report up to March 2024 • Update on Audited Financial Statements 2023 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
6	30 April 2024 April 30, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Maret 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until March 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
879	29 Mei 2024 May 29, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d April 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until April 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
10	26 Juni 2024 June 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Mei 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until May 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
11	24 Juli 2024 July 24, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Juni 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until June 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
12	27 Agustus 2024 August 27, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Juli 2024 • Update Laporan Keuangan Quarter 2 2024 • Agenda Strategis Lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to July 2024 • Financial Report Update Quarter 2 2024 • Other Strategic Agenda	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
13	September, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya; • Laporan Kinerja s.d Agustus 2024 • Hal-hal strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir; • Performance Report until August 2024 • Other strategic matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
14	29 Oktober 2024 October 29, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan kinerja bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Armada & Operasi, dan Keuangan & SDM s.d. bulan September 2024 • Hal-hal strategis lainnya: Update Pemurnian Bisnis, Update Kinerja Saham dan Penggunaan Dana IPO, Agenda strategis lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance reports on Commercial & Business Development, Fleet & Operations, and Finance & HR up to September 2024 • Other strategic matters: Update on Business Refining, Update on Share Performance and Use of IPO Funds, Other strategic agenda.	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-
15	26 November 2024 November 26, 2024	• Tindak Lanjut Rakomdir Sebelumnya • Laporan Kinerja s.d Oktober 2024 • Usulan Dividen Interim 2024 • Hal-hal Strategis Lainnya • Follow-up of Previous Rakomdir • Performance Report up to October 2024 • Proposed Interim Dividend 2024 • Other Strategic Matters	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Frequency and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
R. R. Dewi Ariyani (Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko) (Chairman & Member of Risk Monitoring Committee)	13	13	100%
Hartian Surya Widhanto (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of Risk Monitoring Committee)	13	13	100%
Dadang Budiawan (Anggota Komite Pemantau Risiko)* (Member of Risk Monitoring Committee)*	9	9	100%

*) Menjabat sejak 1 April 2024
*) In office since April 1, 2024

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko terus berupaya meningkatkan kompetensinya, di antaranya dengan mengikuti pelatihan, workshop, ataupun seminar. Di tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development of Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee continues to improve its competence, including by attending training, workshops, or seminars to support the implementation of its duties and responsibilities. In 2024, the Risk Monitoring Committee participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
R. R. Dewi Ariyani (Ketua Komite Pemantau Risiko) (Chairman & Member of Risk Monitoring Committee)	*Project Management*	*Project Management*	Maret 2024 March 2024	LinkedIn Learning
Hartian S. Widhanto, CIA, CRMA, CISA, CRISC, GRCA, GRCP, CACP (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of Risk Monitoring Committee)	*Compliance*	Mastering Compliance in a Dynamic Regulatory Landscape	Oktober 2024 October 2024	OCEG
	Compliance	Essential Operation Resillience	November 2024 November 2024	OCEG
Dadang Budiawan (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of Risk Monitoring Committee)	Manajemen Risiko Risk Management	QCRO	Jakarta, 21 Oktober 2024 Jakarta, October 21, 2024	BNSP

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang nominasi dan remunerasi, meliputi:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit.
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024.
4. Pengawasan, Rekomendasi dan Nasihat Dewan Komisaris.
5. Kunjungan Kerja.

Duties Implementation of Risk Monitoring Committee in 2024

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee has conducted the following duties:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners with the Audit Committee.
2. Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors.
3. Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) Year 2024.
4. Supervision, Recommendation and Advice of the Board of Commissioners.
5. Working Visit.

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of the Board of Directors

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan belum membentuk Komite di bawah Direksi. Namun, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, Direksi didukung oleh organ struktural yang memperkuat sistem tata kelola. Dua organ yang mendukung keberlanjutan operasional dan kesehatan manajerial Perusahaan adalah Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

Until the end of 2024, the Company has not established any Committee under the Board of Directors. However, in carrying out its duties and responsibilities in managing the Company, the Board of Directors is supported by structural organs that strengthen the governance system. Two organs that support the Company's operational sustainability and managerial soundness are the Corporate Secretary and Internal Audit.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai penghubung antara perusahaan dan pemangku kepentingan, Sekretaris Perusahaan berperan dalam memastikan keterbukaan informasi serta kepatuhan terhadap regulasi. Tugas ini mencakup pengelolaan komunikasi yang efektif dengan regulator, investor, dan masyarakat guna membangun hubungan yang harmonis. Melalui Divisi Corporate Secretary, IPCM menerapkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan dan praktik terbaik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga mengelola informasi bisnis untuk memperkuat reputasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary serves as a liaison between the company and its stakeholders, ensuring information disclosure and regulatory compliance. This includes managing effective communication with regulators, investors, and the public to build harmonious relationships. Through the Corporate Secretary Division, IPCM implements good governance principles in accordance with regulations and best practices. Furthermore, the Corporate Secretary also manages business information to strengthen reputation and increase public trust in the Company.

Profil Sekretaris Perusahaan

Penunjukan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama, dengan tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berdasarkan SK Direksi PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19 tanggal 16 Juli 2019, Perusahaan telah menetapkan Eddy Haristiani sebagai Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary Profile

The appointment and dismissal of the Corporate Secretary is carried out by the President Director, with direct responsibility to the President Director. Based on the Decree of the Board of Directors of PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19 dated July 16, 2019, the Company has appointed Eddy Haristiani as Corporate Secretary.



Eddy Haristiani

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 54 tahun Per 31 Desember 2024 4 Desember 1970 54 years old as of December 31, 2024 December 4, 1970
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003–2005) • Sarjana Komunikasi Massa, Universitas Gadjah Mada (1990–1995) • Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003-2005) • Bachelor of Mass Communication, Gadjah Mada University (1990-1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.
Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	SK Direksi PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, Tanggal 16 Juli 2019. Decree of the Board of Directors of PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, dated July 16, 2019.
Pengalaman Kerja Working Experience	• SVP/*Group Head of Corporate Secretary* of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (Juni 2018–Juli 2019) • *Manager of Learning of Port and Maritime* - PT PMLI (IPC Corporate University)/One of PT Pelindo II's Subsidiaries (November 2014 – June 2018) • *Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of* PT Pelindo II (Persero) - (2012 – Oktober 2014) • SVP/Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (June 2018–July 2019) • Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University)/One of PT Pelindo II's Subsidiaries (November 2014 – June 2018) • Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) - (2012 – October 2014)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.
Sertifikasi Certification	Certified Chief Governance Officer (CCGO)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK-468/1/9/1/MS-21 Tanggal 1 September 2021 Tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk, yang mencakup:

1. Komunikasi Perusahaan dan CSR
   Komunikasi perusahaan, *corporate branding*, membangun profesional intimasi dengan media & *stakeholders*, mengelola *database* media dan

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are established based on Decree Number: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024 regarding Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK-468/1/9/1/MS-21 Dated September 1, 2021 Regarding the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which includes:

1. Corporate Communication and CSR
   Corporate communications, corporate branding, building professional intimacy with media & stakeholders, managing media and stakeholder

stakeholders, pengelolaan *website* (dual Bahasa) dan media sosial, mengelola dan menyusun serta melakukan *press release*, sebagai *bridging* komunikasi antara *ultimate shareholder*, BOC beserta perangkatnya (Sekdekom, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko) dan BOD, penyaluran CSR.

2. Hubungan Investor dan Tata Usaha Direksi
   Membangun dan memperkuat kepercayaan pasar kepada Perusahaan melalui formulasi dan implementasi strategi komunikasi. Mengikuti perkembangan bursa saham domestik, regional dan global. Membangun hubungan baik yang profesional dengan para pelaku pasar. Menyajikan informasi yang relevan dan akurat bagi investor mengenai perkembangan perusahaan, seperti yang terkait dengan kinerja operasional dan keuangan. Bersama sub divisi komunikasi perusahaan dan CSR menyusun dan mendistribusikan press release kepada pelaku pasar dan media. Membantu dalam menyiapkan dan menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

databases, managing websites (dual language) and social media, managing and compiling and conducting press releases, as a bridging communication between ultimate shareholders, BOC and its apparatus (Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee) and BOD, CSR distribution

2. Investor Relations and Board of Directors Administration
   Building and strengthening market trust in the Company through the formulation and implementation of communication strategies. Follow developments in domestic, regional and global stock exchanges. Building good, professional relationships with market players. Provide relevant and accurate information for investors regarding company developments, such as those related to operational and financial performance. Together with the corporate communications and CSR sub-divisions, prepare and distribute press releases to market players and the media. Assist in preparing and compiling Annual Reports and Sustainability Reports.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 yang diterbitkan pada 15 Maret 2024.

Organizational Structure of Corporate Secretary

The organizational structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk is established through the Decree of the Board of Directors Number HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 issued on March 15, 2024.



Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengembangkan kompetensi melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi, antara lain:

Corporate Secretary Competency Development

To enhance the implementation of its duties and responsibilities, the Corporate Secretary continually strives to enhance its expertise by participating in various training sessions, workshops, and seminars. In 2024, the Corporate Secretary has engaged in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan xx	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Eddy Haristiani (Sekretaris Perusahaan) (Corporate Secretary)	Pelatihan Training	Jakarta 12-13 Agustus 2024 Jakarta August 12-13, 2024	Jakarta 12-13 Agustus 2024 Jakarta August 12-13, 2024	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
	Workshop	Jakarta 10-11 Agustus 2024 Jakarta August 10-11, 2024	Jakarta 10-11 Agustus 2024 Jakarta August 10-11, 2024	Ferry Latuhihin
	Workshop	Jakarta 9-10 Oktober 2024 Jakarta October 9-10, 2024	Jakarta 9-10 Oktober 2024 Jakarta October 9-10, 2024	Pusat Pengembangan Akuntansi - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PPA-FEUI).
	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Ciawi 16-18 Oktober 2024 Ciawi October 16-18, 2024	Ciawi 16-18 Oktober 2024 Ciawi October 16-18, 2024	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
	Workshop	Webinar "SR Assurance Berdasarkan Standar AA 1000 & SR Assurance Berdasarkan ISAE 3000" Webinar "SR Assurance Based on the AA 1000 Standard and SR Assurance Based on the ISAE 3000	Jakarta, 29 Oktober 2024	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindak lanjut *improvement area* hasil pengukuran tata kelola perusahaan tahun 2023;
2. Menyelesaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dengan batas waktu yang ditentukan dan ikut serta dalam ajang kompetisi terkait;
3. Menyalurkan dana CSR yang tepat sasaran dan tepat guna sesuai visi dan misi perusahaan;
4. Melaksanakan investor/*analyst visit* dan *meeting*;
5. Melaksanakan penyebaran informasi melalui *press release* dan melaksanakan media *gathering*;
6. Mengelola konten informasi perusahaan pada *platform* media sosial dan *website* serta partisipasi dalam kompetisi bidang kesekretariatan Perusahaan;
7. Melaksanakan penyusunan program K3, pelaksanaan program K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 (APAR, Obat P3K, LSP/FFA Kapal), evaluasi program K3.

CORPORATE SECRETARY 2024 DUTIES REPORT

Throughout 2024, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities as follows:

1. Implemented follow-up improvements based on the GCG scoring results from 2023;
2. Accelerated the completion of the Annual Report and Sustainability Report, surpassing the previous year's deadline, and participated in related competitions;
3. Allocated CSR funds with precision and suitability for designated purposes in line with the Company's vision and mission;
4. Conducted investor/analyst meetings;
5. Conducted information distribution through press releases and organized media gatherings;
6. Managed corporate information content across social media platforms and websites, also participating in company secretarial competitions;
7. Oversaw the preparation, execution, and evaluation of the Occupational Health and Safety (OHS) program, including the provision of K3 facilities and infrastructure (such as APAR, First Aid Medicine, Ship LSP/FFA).

AUDIT INTERNAL

Sebagai organ pendukung Direksi, Audit Internal berperan dalam memberikan keyakinan dan konsultasi secara independen serta objektif kepada manajemen. Fokus utama Audit Internal adalah meningkatkan nilai tambah dan menyempurnakan operasional perusahaan dengan mengevaluasi serta memperkuat efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

Audit Internal juga bertugas meninjau serta memastikan bahwa proses dan kinerja keuangan maupun non-keuangan, termasuk manajemen mutu dan operasional, berjalan sesuai dengan arahan Direktur Utama. Seluruh aktivitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, keputusan, prosedur, dan pengendalian manajemen diimplementasikan secara efektif, efisien, sesuai dengan norma pengelolaan yang berlaku, serta berstandar dan beretika.

Pengangkatan dan Profil Kepala Kepala Audit Internal

Kepala Audit Internal (Ka SPI), Amir Indra Sasongko, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 22 Juni 2023. Keputusan ini ditandatangani oleh Direktur Perusahaan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Berikut adalah profil Kepala Audit Internal untuk periode 2024.

INTERNAL AUDIT

As a supporting organ of the Board of Directors, Internal Audit plays a role in providing independent and objective assurance and consultation to management. The main focus of Internal Audit is to increase added value and improve the company's operations by evaluating and strengthening the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.

Internal Audit is also tasked with reviewing and ensuring that financial and non-financial processes and performance, including quality management and operations, are in accordance with the direction of the President Director. All these activities are carried out to ensure that policies, decisions, procedures, and management controls are implemented effectively, efficiently, comply with applicable management norms, and are standardized and ethical.

Internal Audit Head Profile and Appointment

The Head of Internal Audit, Amir Indra Sasongko, was appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated June 22, 2023. This decision was signed by the Director of the Company and approved by the Board of Commissioners. The following is the profile of the Head of Internal Audit for the period 2024.



Amir Indra Sasongko

Kepala Audit Internal
Internal Audit Head

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tanggal Lahir Age/Date of Birth	Berusia 54 tahun Per 31 Desember 2024 54 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Sosial (S. Sos), Universitas Krisnadwipayana (1996) • Qualified Internal Audit (QIA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019) • Pendidikan Sertifikasi Praktisi Komite Audit Batch 37, Indonesia Institute of Audit Committee (2023) • Bachelor of Social (S. Sos), Krisnadwipayana University (1996) • Qualified Internal Audit (QIA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019) • Batch 37 Audit Committee Practitioner Certification Education, Indonesia Institute of Audit Committee (2023)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.

Dasar Hukum Penunjukan Appointment Basis	• Pelindo Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02/2/4/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 2 April 2023 | Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/2/4/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated April 2, 2023 • SPJM Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 22 Juni 2023 | Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated June 22, 2023 • JAI Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 tanggal 2 April 2023 | Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 dated April 2, 2023
Pengalaman Kerja Working Experience	Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pengerukan Indonesia, periode (2016-2023) Head of Internal Audit Unit, PT Pengerukan Indonesia (2016-2023)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Does not have affiliated relationship with main shareholder or either members of the Board of Commissioners and Directors.
Sertifikasi Certification	Qualified Internal Audit (QIA) Certification in Audit Committee Practices (CACP), Qualified Chief Risk Officer (QCRO)

Pedoman Audit Internal

Pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Audit Charter*. Piagam Audit Internal Perusahaan, yang disahkan oleh Direktur Utama pada 7 April 2020, telah disusun sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. *Audit Charter* ini menetapkan tujuan, posisi, wewenang, tanggung jawab, serta cakupan pekerjaan internal audit secara komprehensif. Adapun aspek-aspek yang termuat dalam *Internal Audit Charter* meliputi:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Definisi, Visi dan Misi
- Bab III Tujuan Pengawasan Internal
- Bab IV Struktur dan Kedudukan
- Bab V Kewenangan dan Kerahasiaan
- Bab VI Peran dan Tanggung Jawab
- Bab VII Kode Etik Auditor Internal

Independensi Audit Internal

Auditor Internal harus selalu menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk memastikan kedua prinsip tersebut tetap terjaga, Auditor Internal perlu:

1. Menghindarkan diri dari kondisi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan objek pengawasan;
2. Bekerja dengan bebas tanpa pengaruh dan campur tangan dari pihak lain;
3. Memetakan, mencatat dan melaporkan suatu hal sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Audit Internal Guideline

The implementation of Internal Audit duties and functions is based on the principles stated in the Audit Charter. The Company's Internal Audit Charter, which was approved by the President Director on April 7, 2020, has been developed in accordance with POJK No. 56/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charter. The Audit Charter sets out the objectives, position, authority, responsibilities, and scope of work of the internal audit in a comprehensive manner. Aspects contained in the Internal Audit Charter include:

- Chapter I: Introduction
- Chapter II: Definition, Vision, and Mission
- Chapter III: Objectives of Internal Control
- Chapter IV: Structure and Position
- Chapter V: Authority and Confidentiality
- Chapter VI: Roles and Responsibilities
- Chapter VII: Internal Auditor Code of Ethics

Internal Audit Independency

Internal Auditors must always maintain independence and objectivity in every supervisory task. In order to ensure that these two principles are maintained, Internal Auditors need to:

1. Avoid conditions of conflict of interest between personal interests and the interests of the object of supervision;
2. Work freely without influence and interference from other parties;
3. Mapping, recording and reporting a matter in accordance with the actual conditions;

4. Menghindarkan diri untuk melaksanakan tugas pada objek pengawasan di mana yang bersangkutan terlibat aktif pada objek pengawasan tersebut dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terakhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang penting dari tata kelola perusahaan, aktivitas Pengawasan Internal memberikan jaminan terhadap sistem pengendalian internal, efektivitas dan efisiensi operasional, ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta ketepatan dan keandalan pelaporan. Adapun Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Audit Internal akan berperan aktif dalam:
   a. Mengembangkan dan menjaga budaya akuntabilitas dan integritas;
   b. Memfasilitasi integrasi sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko ke dalam kegiatan pengelolaan perusahaan sehari-hari;
   c. Mempromosikan budaya efisiensi dan efektivitas kerja, penilaian mandiri serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku baik internal maupun eksternal untuk terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.
2. Ruang lingkup pengawasan internal meliputi namun tidak terbatas pada:
   a. Efektivitas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian internal;
   b. Evaluasi kinerja satuan unit perusahaan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan Audit Internal meliputi area sebagai berikut:
   a. Kegiatan pengawasan dengan orientasi pada:
      - Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
      - Pencatatan, pengendalian dan pengelolaan aset dan sumber daya Perusahaan;
      - Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur Perusahaan;
      - Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional;
      - Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Pengawasan Internal, seperti penyelidikan dan pengungkapan penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.

4. Avoiding to carry out duties on the object of supervision where the person concerned is actively involved in the object of supervision in a period of less than one year.

Internal Audit Duties and Responsibilities

As one of the important supporting organs of the Board of Directors in corporate governance, Internal Audit activities provide guarantees for the internal control system, operational effectiveness and efficiency, compliance with applicable rules and regulations, as well as accuracy and reliability of reporting. The Internal Audit has the following duties:

1. In carrying out its duties and functions, Internal Audit will play an active role in:
   a. Developing and maintaining a culture of accountability and integrity;
   b. Facilitating the integration of Internal Control and Risk Management systems into daily company management activities;
   c. Promoting a culture of work efficiency and effectiveness, independent assessment, and compliance with applicable laws and regulations, both internal and external, to realize good corporate governance.
2. The The scope of internal supervision includes but is not limited to:
   a. Assessing the effectiveness of governance, risk management, and internal control;
   b. Evaluating the performance of company units in achieving predetermined goals and objectives.

3. Internal Audit activities cover the following areas:
   a. Supervision activities with orientation to:
      - Ensure that the management control system is adequate, works efficiently and economically, and functions effectively in achieving the set goals and objectives;
      - Record, control, and manage Company assets and resources;
      - Evaluate compliance with applicable laws and regulations, as well as Company policies and procedures;
      - Assess the reliability and integrity of financial and operational information;
      - Perform special assignments relevant to the scope of Internal Audit work, such as investigating and disclosing irregularities, fraud, and waste.

b. Kegiatan Konsultansi dan Asistensi
Audit Internal dapat memberikan konsultansi dan asistensi kepada manajemen perusahaan terkait dengan penerapan tatakelola perusahaan yang baik dan pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan.
c. Tanggung Jawab Audit Internal.
Audit Internal bertanggung jawab untuk memonitor dan memberikan asistensi tindak lanjut hasil audit kepada *auditee* hingga tuntas.

b. Consultancy and Assistance Activities:
Internal Audit can provide consultancy and assistance to company management regarding the implementation of good corporate governance and achieving the Company's goals and objectives.
c. Internal Audit Responsibilities.
Internal Audit is responsible for monitoring and providing follow-up assistance to audit results to auditees until completion.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Fungsi Audit Internal berada di bawah kepemimpinan Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Responsible Party to Appoint and Dismiss Internal Audit Head

The Internal Audit function is under the leadership of the Head of Internal Audit who is responsible to the President Director. The appointment and dismissal of the Head of Internal Audit is carried out by the President Director through an internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Struktur Organisasi Audit Internal

Struktur Audit Internal Perusahaan saat ini berpedoman pada SK Direksi Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK-468/1/9/1/MS-21 Tanggal 1 September 2021 Tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun Struktur Organisasi Audit Internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

Internal Audit Organization Structure

The Company's Internal Audit structure is currently based on the Decree of the Board of Directors Number: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024 regarding Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK-468/1/9/1/MS-21 Dated September 1, 2021 Regarding the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The Company's Internal Audit Organization Structure is as follows:



Sertifikasi sebagai Profesi SDM Audit Internal

Per 31 Desember 2024, jumlah personel Audit Internal tercatat sebanyak 2 (dua) orang. Berikut adalah daftar sertifikasi profesi yang dimiliki oleh pekerja Audit Internal hingga akhir tahun 2024:

Professional Certification as an Internal Audit

As of December 31, 2024, Internal Audit has 2 (two) personnel. The following are the professional certifications held by Internal Audit employees until the end of 2024:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1.	Amir Indra Sasongko	Kepala Audit Internal Head of Internal Audit	• QIA (*Qualified Internal Audit*) • CACP (*Certification in Audit Committee Practices*) • QCRO (*Qualified Chief Risk Officer*)
2.	Nurwan Bayu Setyawan	Auditor Internal Internal Auditor	QIA (*Qualified Internal Audit*)

Pengembangan Kompetensi SDM Audit Internal

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Audit Internal senantiasa mengembangkan kompetensinya melalui berbagai program pelatihan. Sepanjang tahun 2024, Audit Internal telah berpartisipasi dalam sejumlah pelatihan, *workshop*, dan seminar guna mendukung peningkatan kapabilitas. Adapun program yang telah diikuti mencakup:

Internal Audit Competency Development

To improve the effectiveness of the supervisory function, Internal Audit continues to develop its competence through various training programs. Throughout 2024, Internal Audit has participated in a number of trainings, workshops, and seminars to support capability enhancement. The programs that have been participated in include:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Amir Indra Sasongko (Kepala Audit Internal) (Internal Audit Head)	Pelatihan Training	*Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	Jakarta, 21 Oktober 2024 Jakarta, October 21, 2024	LSP MKS
Nurwan Bayu Setyawan (Auditor Internal) (Internal Audit Head)	Pelatihan Training	*Qualified Internal Audit* (QIA)	Jakarta, 24 Juni - 3 Juli 2024 Jakarta, June 24 - July 1, 2024	YPIA

Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dengan melakukan audit secara rutin.
2. Melakukan kegiatan konsultansi dan asistensi kepada manajemen perusahaan terkait penerapan tata kelola perusahaan.
3. Melakukan monitoring dan asistensi kepada auditee terkait tindak lanjut hasil audit hingga tuntas.

Internal Audit 2024 Duties Report

Throughout 2024, Internal Audit has carried out the following duties and responsibilities:

1. Conducting supervision by performing audits on a regular basis.
2. Conducting consultancy activities and assistance to company management related to the implementation of corporate governance.
3. Monitoring and providing assistance to auditees regarding the follow-up of audit results until completion.

Pelaksanaan Audit

a. Audit Internal telah menyelesaikan penugasan tahun 2024 dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

Audit Implementation

a. Internal Audit has finished their 2024 duties with the following results:

Pelaksanaan Implementation	Jumlah Penugasan Number of Assignemtn	Wilayah Operasi Operational Areas	Direktorat Unit Directorate Units	Audit Khusus Special Audit
Semester I 2024 First Semester of 2024	1	5	10	0
Semester II 2024 Second Semester of 2024	1	5	10	0

b. Jumlah temuan pada Kantor Pusat dan wilayah operasi sebagai berikut:

b. Number of findings in Head Office and operational areas are as follows:

Penyelesaian Temuan Unit Audit Internal Tahun 2024 | Settlement of Internal Audit Unit Findings in 2024

No.	Satuan Kerja Unit	Tahun Pemeriksaan Audit Year	Awal Temuan Beginning of Findings	Penambahan Addition	Penyelesaian Settlement	Akhir Temuan Final of Findings
1.	Kantor Pusat dan Wilayah Operasi Head Office and Operational Areae	2023	4	29	32	1
2.	Kantor Pusat dan Wilayah Operasi Head Office and Operational Areae	2024	1	10	7	4

c. Komunikasi hasil audit dengan Direktur Utama, Komisaris dan komite Audit:
Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Audit Internal disampaikan terlebih dahulu kepada Direksi melalui Direktur Utama. Selanjutnya, Direktur Utama meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit. Untuk mendalami temuan yang ada, Komite Audit memiliki ruang untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan Audit Inernal.

c. Communication of Audit Results with the President Director, Board of Commissioners, and Audit Committee:
Audit reports conducted by Internal Audit are submitted first to the Board of Directors through the President Director. Furthermore, the President Director forwards the report to the Board of Commissioners with a copy to the Audit Committee. To explore the findings, the Audit Committee has the space to coordinate intensively with Internal Audit.

Rapat Audit Internal

Sepanjang tahun 2024, Audit Internal menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Berikut agenda rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Audit Internal dalam setiap rapat.

Internal Audit Meeting

Throughout 2024, the Internal Audit held 10 (ten) meetings. The following is the meeting agenda, attendance list, and recapitulation of the attendance level of Internal Audit in each meeting.

Tabel Agenda Rapat Audit Internal
Internal Audit Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	26 Februari 2024 February 26, 2024	*Entry Meeting* Audit Rutin Semester I 2024 Entry Meeting Routine Audit Semester I 2024	Para Vice President dan General Manager Area Area Vice Presidents and General Managers
2	10 Juni 2024 June 10, 2024	Pembahasan Hasil Audit Semester I Tahun 2024 Discussion of Audit Results for Semester I Year 2024	Tim Audit Audit Team
3	12 Juni 2024 June 12, 2024	Rapat Pembahasan Konfirmasi Draft Hasil Audit Discussion Meeting on Confirmation of Draft Audit Results	PIC Auditee
4	10 Juli 2024 July 10, 2024	*Exit Meeting* Audit Rutin Semester I Tahun 2024 Exit Meeting Routine Audit Semester I Year 2024	Para Vice President dan General Manager Area Area Vice Presidents and General Managers
5	7 Agustus 2024 August 7, 2024	Pembahasan Hasil Audit Semester I Tahun 2024 Discussion of Audit Results Semester I Year 2024	Komite Audit, Divisi Audit Internal Audit Committee, Internal Audit Division
6	9 September 2024 September 9, 2024	*Entry Meeting* Audit Rutin Semester II 2024 Entry Meeting Routine Audit Semester II 2024	Para Vice President dan General Manager Area Area Vice Presidents and General Managers
7	15 Oktober 2024 October 15, 2024	Pembahasan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Discussion of Follow-up Monitoring of Audit Findings	Divisi Audit Internal, Komite Audit, PIC Auditee Internal Audit Division, Audit Committee, PIC Auditee
8	5 Desember 2024 December 5, 2024	Pembahasan Hasil Audit Semester II Tahun 2024 Discussion of Audit Results Semester II Year 2024	Tim Audit Audit Team
9	10 Desember 2024 December 10, 2024	Rapat Pembahasan Konfirmasi Draft Hasil Audit Discussion Meeting on Confirmation of Draft Audit Results	PIC Auditee
10	13 Desember 2024 December 13, 2024	*Exit Meeting* Audit Rutin Semester II Tahun 2024 Exit Meeting Routine Audit Semester II Year 2024	Para Vice President dan General Manager Area Area Vice Presidents and General Managers

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Audit Internal
Frequency and Attendance of Internal Audit Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Amir Indra Sasongko **(Kepala Audit Internal)** (Internal Audit Head)	10	10	100%
Nurwan Bayu Setyawan **(Auditor Internal)** (Internal Auditor)	10	8	80%

Auditor Eksternal

External Auditor

Pengelolaan laporan keuangan Perusahaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka menjaga kredibilitasnya, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang bertugas menilai kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Auditor eksternal yang dipilih dipastikan bebas dari benturan kepentingan guna menjaga independensi dalam proses audit. Untuk memastikan audit berjalan sesuai standar profesional dan selesai tepat waktu, Perusahaan mengadakan pertemuan rutin dengan auditor, Komite Audit, dan Manajemen. Komunikasi yang efektif antara semua pihak terus ditingkatkan agar setiap tantangan dalam proses audit dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik.

The Company's financial statements are managed with the principles of transparency and accountability. In order to maintain its credibility, the Company appoints a Public Accounting Firm as an external auditor in charge of assessing the conformity of financial statements with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The selected external auditor is ensured to be free from conflicts of interest in order to maintain independence in the audit process. To ensure that the audit runs according to professional standards and is completed on time, the Company holds regular meetings with the auditors, Audit Committee, and Management. Effective communication between all parties is continuously improved so that any challenges in the audit process can be anticipated and resolved properly.

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan. Untuk memastikan independensi dan kualitas pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT POLICY

The appointment of a Public Accounting Firm is determined through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), considering the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process follows the Company's procurement mechanism for goods and services. To ensure the independence and quality of audit results, the appointed External Auditor must not have any conflicts of interest with the Company.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 12 Juni 2024, pemegang saham Perusahaan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024.

PUBLIC ACCOUNTANT IN 2024

In accordance with the Resolution of the Annual GMS on June 12, 2024, the Company's shareholders approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.

Kantor Akuntan Publik **Public Accounting Firm**	:	Purwantono, Sungkoro & Surja
Akuntan **Accountant**	:	Moch. Dadang Syachruna
Tahun Audit **Audit Year**	:	2024
Periode Penugasan **Assignment Period**	:	2023-2024
Jasa **Service**	:	Audit Umum atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 General Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2024

Biaya Audit **Audit Fee**	:	Rp877.000.000,-
Opini **Opinion**	:	Wajar dalam Semua Hal yang Material Fair in All Material Matters
Jasa Selain Audit yang Diberikan **Other Services Besides Audit**	:	Jasa Prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja ("LHEK") dan Key Performance Indicator ("KPI") Agreed Service Procedure for Performance Evaluation Report ("LHEK") and Key Performance Indicator ("KPI").
Biaya **Fee**	:	Rp190.000.000,-

AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA PERIODE ENAM TAHUN TERAKHIR

PUBLIC ACCOUNTANT AND FEE IN THE LAST FIVE YEARS

Daftar Kantor Akuntan Publik Tahun 2019-2024

Public Accounting Firm 2019-2024

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Ruang Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Opinion	Biaya Fee
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja	Moch Dadang Syachruna	• Melaksanakan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. • Sebagai bagian dari audit, umum melaksanakan prosedur terhadap kepatuhan Perusahaan atas peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2024. • Conduct an audit and issue an audit report on the financial statements for the year ending December 31, 2024. • As part of the audit, perform general procedures on the Company's compliance with laws and regulations and internal controls for the 2024 financial year.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp1.067.000.000
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited)	Moch Dadang Syachruna	Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Financial Statements of 2023 Financial Year	Tidak ada None	Rp984.966.800

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Ruang Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Opinion	Biaya Fee
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited)	Moch. Dadang Syachruna	• Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. • Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2022. • Sebagai bagian dari audit umum melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2022. • Conduct a general audit and express an opinion on the fairness of the Company's financial statements for the year ending December 31, 2022. • Perform agreed procedures for reports on evaluation results and KPI achievements for the 2022 financial year. • As part of the general audit, conducted procedures related to compliance with laws and regulations and internal control for the 2022 financial year.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp918.720.000
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited)	Moch. Dadang Syachruna	• Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. • Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2021. • Sebagai bagian dari audit umum, melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2021. • Menerbitkan management letter. • Perform a comprehensive audit and provide an opinion on the accuracy of the Company's financial statements for the year ending December 31, 2021. • Execute agreed procedures for reports on performance evaluation results and Key Performance Indicator (KPI) achievements for the 2021 financial year. • Conduct procedures related to compliance with laws and regulations, as well as internal controls, as part of the general audit for the 2021 financial year. • Issue a management letter.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp792.000.000

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Ruang Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Opinion	Biaya Fee
2020	Purwantono Sungkoro & Surja	Moch. Dadang Syachruna	• Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. • Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2020. • Sebagai bagian dari audit umum, melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2020. • Menerbitkan management letter. • Menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan dalam bentuk softcopy untuk setiap lingkup pekerjaan. • Perform a comprehensive audit and provide an opinion on the accuracy of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2020. • Execute agreed procedures for reports on performance evaluation results and Key Performance Indicator (KPI) achievements for the 2020 financial year. • Conduct procedures related to compliance with laws and regulations, as well as internal controls, as part of the general audit for the 2020 financial year. • Issue a management letter. • Submit written reports consisting of 10 (ten) hard copies and soft copies for each scope of work.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp750.000.000
2019	Purwantono Sungkoro & Surja	Muhammad Kurniawan	• Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan • Pengendalian Internal • Audit KPI • Compliance with laws and regulations by the Company has a direct and material impact on the presentation of financial statements • Internal Control Assessment • Key Performance Indicator (KPI) Audit	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp662.000.000

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Untuk memastikan operasional berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, Perusahaan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang terstruktur dan menyeluruh. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang dirancang untuk memitigasi risiko serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam setiap aktivitas Perusahaan. Dengan serangkaian aturan, prosedur, dan mekanisme yang terintegrasi, sistem ini memastikan bahwa setiap proses bisnis berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

The Company implements a structured and comprehensive Internal Control System to ensure that operations run in accordance with the principles of good governance. This system serves as a supervisory instrument designed to mitigate risks and prevent irregularities in every activity of the Company. With an integrated set of rules, procedures, and mechanisms, this system ensures that every business process runs efficiently, transparently, and in accordance with established standards.

Lebih dari sekadar alat pengendalian, Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam menjaga keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset Perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Implementasi yang konsisten dari sistem ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas dan profesional, sekaligus memperkuat budaya tata kelola yang transparan dan akuntabel di seluruh tingkatan organisasi.

The Internal Control System is more than just a control tool, it also plays a role in maintaining the reliability of financial reporting, protecting the Company's assets, and ensuring compliance with applicable regulations. Consistent implementation of this system supports the creation of a work environment with integrity and professionalism, while strengthening a culture of transparent and accountable governance at all levels of the organization.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN DENGAN *COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK*

Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan mengadopsi konsep Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission yang terdiri dari 5 (lima) komponen Sistem Pengendalian Internal yang efektif:

1. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*).
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan.
4. Proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

COMPLIANCE OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The Internal Control System within the Company adopts the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) concept of the Treadway Commission, which comprises 5 (five) components of an effective Internal Control System:

1. The internal control environment within the Company is implemented in a disciplined and structured manner.
2. Assessment of business risk management (risk assessment).
3. Control activities, namely actions carried out to control company activities at each level and unit in the Company's organizational structure.
4. The process of presenting reports regarding operational and financial activities, as well as compliance and adherence to statutory provisions.
5. The process of assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and unit in the organizational structure.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Agar sistem pengendalian internal dapat berjalan secara optimal, diperlukan mekanisme penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas serta efisiensi dalam penerapannya. Monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, dengan tujuan memperkuat sistem pengendalian internal seiring dengan perkembangan perusahaan.

Divisi Audit Internal pada PT Jasa Armada Indonesia Tbk bertugas membantu Direksi dan Manajemen dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Perusahaan, maka Audit Internal harus dapat memberikan keyakinan, bahwa aktivitas manajemen telah sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditentukan dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas, kepatuhan dan tata kelola serta semua risiko yang telah teridentifikasi dan dikelola secara memadai. Audit Internal juga senantiasa memberikan konsultansi yang independen dan obyektif kepada manajemen.

Sasaran pengawasan internal dalam tahun 2024 ditekankan pada penilaian efektivitas manajemen risiko Perusahaan, kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, efisiensi dan efektifitas suatu proses bisnis, sebagai upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang ada dan kecukupan waktu pelaksanaan audit, serta pengawasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal.

Rincian pelaksanaan aktivitas pada tahun 2024:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS

To ensure that the internal control system can run optimally, an assessment and evaluation mechanism that is carried out periodically and thoroughly is required. This evaluation aims to ensure effectiveness and efficiency in its implementation. Monitoring and evaluation of the Company's internal control system is carried out through continuous monitoring and follow-up on audit recommendations, with the aim of strengthening the internal control system in line with company development.

The Internal Audit Division at PT Jasa Armada Indonesia Tbk is tasked with assisting the Board of Directors and Management in carrying out the mission to achieve the Company's vision, so Internal Audit must be able to provide assurance that management activities are in accordance with company objectives that have been determined in the principles of Good Corporate Governance (GCG) by taking into account efficiency and effectiveness, compliance and governance factors and all risks that have been identified and managed adequately. Internal Audit also always provides independent and objective consultancy to management.

The objectives of internal supervision in 2024 are emphasized on assessing the effectiveness of the Company's risk management, the Company's compliance with applicable rules and regulations, the efficiency and effectiveness of a business process, as an effort to achieve predetermined targets by considering the amount of available resources and the adequacy of audit implementation time, as well as supervising the implementation of follow-up recommendations on internal audit results.

The following are the details of the implementation of activities in 2024:

Jumlah Penugasan pada Tahun 2024
Number of Assignments in 2024

Penugasan Audit Audit Assignment	Wilayah Area	Direktorat Directorate
• Audit Rutin Semester I tahun 2024 • Dasar Penugasan Surat Perintah Nomor: KP.20.01/29/2/2/SRA/SDU/JAI-24 • Regular Audit of the First Semester of 2024 • Basis for Assignment of Letter of Order Number: KP.20.01/29/2/SRA/SDU/JAI-24	5	10
• Audit Rutin Semester II tahun 2024 • Dasar Penugasan Surat Perintah Nomor: PW02.01/6/9/1/HIU/DKS/JAI-24 • Regular Audit of Semester II in 2024 • Basis for Assignment of Letter of Order Number: PW02.01/6/9/1/HIU/DKS/JAI-24	5	10

Dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap realisasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil audit internal yang ada dilakukan oleh Divisi Audit Internal dilakukan secara aktif berkesinambungan dengan menghubungi para Auditee, untuk memaksimalkan realisasi tindak lanjut rekomendasi yang diperlukan di internal dan eksternal sebagai laporan periodik kepada manajemen.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan secara konsisten memastikan implementasi sistem pengendalian internal yang optimal guna mendukung keandalan operasional. Manajemen memiliki tanggung jawab penuh atas efektivitas sistem ini serta penguatan budaya kesadaran risiko di seluruh tingkatan organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, penerapan sistem pengendalian internal dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan penilaian tersebut, Direksi bersama Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah berfungsi dengan baik tanpa terdapat indikasi penyimpangan atau kelemahan yang signifikan.

It can be stated that the supervision implementation on the follow-up realization of the recommendations of the existing internal audit report is carried out by the Internal Audit Division actively on an ongoing basis by contacting the Auditees, to maximize the realization of the follow-up recommendations required internally and externally as periodic reports to management.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company consistently ensures the implementation of an optimal internal control system to support operational reliability. The Company's management has full responsibility for the effectiveness of this system and the strengthening of risk awareness culture at all levels of the organization.

Based on the results of the evaluation that has been carried out, the implementation of the internal control system is considered to have met the established standards. By considering this assessment, the Board of Directors together with the Board of Commissioners concluded that the Company's internal control system has functioned properly without any indication of significant deviations or weaknesses.

Manajemen Risiko

Risk Management

Perusahaan menyadari bahwa dinamika bisnis selalu diiringi oleh berbagai risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan pencapaian target. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali dan mengelola risiko menjadi hal yang esensial dalam operasional sehari-hari.

Manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk mengurangi dampak ketidakpastian, tetapi juga sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan yang lebih cermat dan terarah. Dengan pendekatan yang sistematis, perusahaan dapat mengantisipasi tantangan serta mengoptimalkan peluang demi menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik, perusahaan menerapkan sistem manajemen risiko sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang mengacu pada tiga elemen utama dalam implementasinya.

1. Kebijakan atau komitmen yang dipegang oleh BOD Perusahaan. Kebijakan tersebut mutlak harus disosialisasikan sehingga dipahami oleh seluruh level personal perusahaan.

2. Perencanaan sistem manajemen risiko yang merambah pada bidang anggaran, struktur organisasi, kinerja hingga sumber daya manusia. Agar sistem manajemen risiko perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi dan aktual perusahaan.

3. Penerapan sistem manajemen risiko yang mengadaptasi siklus *plan, do, check, action*. "Agar sistem dapat diterapkan dan mendapatkan manfaat. Penerapan sistem manajemen risiko juga terintegrasi kepada setiap lini bisnis dan diawasi oleh BOD dan BOC sehingga penerapannya lebih efektif.

GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko semakin menjadi perhatian utama bagi Perusahaan.

Dalam menyusun Rencana Kerja Manajemen untuk tahun 2024, Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko tersebut berlandaskan pada:

The Company realizes that business dynamics are always accompanied by various risks that can affect performance and target achievement. Therefore, the ability to recognize and manage risks is essential in daily operations.

Risk management is not only used to reduce the impact of uncertainty, but also serves as a foundation for more careful and targeted decision-making. Through a systematic approach, companies can anticipate challenges and optimize opportunities to maintain business continuity and growth.

Following its commitment to good governance, the Company implements a risk management system in accordance with the prevailing laws and regulations, which refers to three main elements in its implementation.

1. Policies Policies or commitments established by the Company's Board of Directors (BOD). These policies must be thoroughly communicated to ensure understanding across all levels of company personnel.

2. Planning of a risk management system that encompasses budgeting, organizational structure, performance, and human resources. This ensures the Company's risk management system operates effectively in alignment with actual company conditions.

3. Implementation siImplementation of a risk management system that adheres to the plan-do-check-action (PDCA) cycle. To ensure that the system can be implemented and get benefits, the implementation of the risk management system is also integrated into each line of business and supervised by the BOD and BOC so that its implementation is more effective.

OVERVIEW OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The importance of understanding risk management is increasingly becoming a major concern for the Company.

In formulating the Management Work Plan for 2024, the Company has applied the principles of Risk Management. The risk management is based on:

1. Isu – Isu baik internal maupun eksternal serta harapan pihak – pihak yang berkepentingan.
2. Ketepatan Investasi Dengan melakukan pengelolaan risiko Investasi, maka akan dapat terserap seluruh alokasi anggaran, dan tidak muncul tambahan biaya dalam Investasi yang telah direncanakan.
3. Ketepatan Biaya Setelah diketahui Program kerja dan rencana Investasi pada tahun yang akan datang, maka perusahaan dapat menetapkan anggaran biaya sehingga penggunaan biaya yang efisien dalam mencapai visi perusahaan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan menerapkan pendekatan yang terstruktur dalam mengelola risiko, yang terdiri dari model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023, tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 51.

Perusahaan menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) di mana Pemilik risiko bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko, fungsi manajemen risiko menyediakan kerangka kerja, dan Audit Internal memastikan kepatuhan dan efektivitas. Dengan kerja sama antara ketiga lini ini, Perusahaan meningkatkan pengelolaan risiko secara efektif.

1. Internal and external issues and expectations of stakeholders.
2. Precision in Investments: Managing investment risks ensures that the entire budget allocation is utilized effectively, avoiding additional costs in planned investments.
3. Cost Precision: Once the work program and investment plans for the upcoming year are established, the Company can develop a cost budget, ensuring efficient utilization of resources in alignment with the company's vision.

THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company applies a structured approach in managing risks, which consists of a three lines risk governance model in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023, concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises article 51.

The Company implements a three lines risk governance model where the risk owner is directly responsible for risk management, the risk management function provides the framework, and Internal Audit ensures compliance and effectiveness. With the cooperation between these three lines, the Company enhances effective risk management.



Gambar 1. Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini (three lines model) PT JAI
Figure 1. PT JAI's three lines model of risk governance

Dengan model ini, Perusahaan berupaya memperkuat pengendalian internal terhadap berbagai risiko yang berpotensi muncul. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Perusahaan dapat lebih optimal dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons risiko, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap operasional dan keberlangsungan bisnis.

Through this model, the Company seeks to strengthen internal control over various risks that could potentially arise. With a coordinated approach, the Company can identify, evaluate and respond to risks more optimally, thereby minimizing negative impacts on operations and business continuity.

Model ini juga mendukung komunikasi yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan dalam manajemen risiko, memastikan penyampaian dan pemrosesan informasi yang relevan secara cepat. Dengan begitu, Perusahaan dapat merespons perubahan lingkungan yang dinamis dengan lebih tepat waktu dan efisien.

This model also supports effective communication among various stakeholders in risk management, ensuring rapid delivery and processing of relevant information. As a result, the Company can respond to dynamic environmental changes in a more timely and efficient manner.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan manajemen risiko di IPCM dibawah Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor:HK-568/1/9/1MS-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

RISK MANAGEMENT STRUCTURE

The implementation of risk management in IPCM is under the Directorate of Finance, Human Resources and Risk Management based on the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024 regarding Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-568/1/9/1MS-21 Dated September 1, 2021 regarding the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

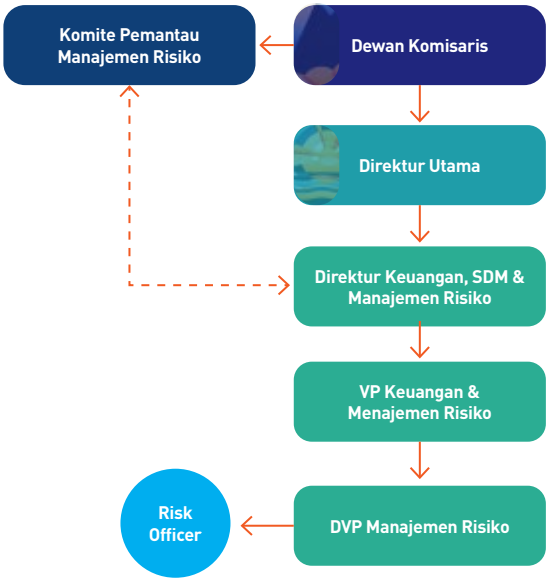

1. Struktur organisasi Manajemen Risiko didasarkan pada filosofi bahwa proses Manajemen Risiko yang efektif tercapai apabila perusahaan berhasil membangun komitmen yang kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris, serta berhasil mengintegrasikan proses Manajemen Risiko ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan.

1. The Risk Management organizational structure is based on the philosophy that an effective Risk Management process is achieved if the company succeeds in building a strong commitment from the Board of Directors and the Board of Commissioners, and successfully integrates the Risk Management process into all business processes of the company.

2. Perusahaan memiliki organ komite di bawah Komisaris yang fungsinya memantau aktivitas pengelolaan manajemen risiko perusahaan.
3. Perseroan menetapkan struktur kuasi di mana setiap unit memiliki Agen Risiko masing-masing (*Risk Agent*) yang ditetapkan pada Surat Perintah nomor: PW.05.01/9/1/1/QMR/DUT/JAI-24 Struktur ini bersifat kuasi yang mewakili setiap divisi untuk menjadi Agen Manajemen Risiko.
4. Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses Manajemen Risiko dapat berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien, Direksi menetapkan kepala unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan. Mereka bertugas menjabarkan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*/"ERM") menjadi pedoman, prosedur, dan instruksi kerja serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penerapannya.

Kegiatan-Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di tahun 2024:

1. Penyusunan strategi risiko dalam bentuk Profil Risiko, meliputi Identifikasi risiko, penilaian risiko dan penyusunan rencana penanganan (mitigasi) risiko;
2. Pelaporan Profil Risiko secara berkala setiap Bulan pada sistem prima;
3. Pelaporan Profil Risiko secara berkala setiap Triwulanan yang dikirim ke BOC dan Pemegang Saham;
4. Penilaian Peringkat Komposit Risiko Tahunan;
5. Penilaian *Self Assessment Risk Maturity Index* (RMI) oleh Satuan Pengendalian Internal;
6. Keikutsertaan dalam Risk Award Pelindo kategori Rindu (Risiko Individu) dan Kangen untuk FMR;
7. Rapat Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko untuk membahas perkembangan implementasi Manajemen Risiko;
8. Rapat Manajemen Risiko dengan *Risk Officer* untuk membahas realisasi mitigasi risiko;
9. Pelatihan dan Sertifikasi terkait Manajemen Risiko bagi BOD, Para BOD-1, dan staff Manajemen Risiko.

RISIKO PERUSAHAAN DAN UPAYA MITIGASI RISIKO

Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk memahami sumber serta dampaknya. Profil risiko kemudian disusun dengan penjelasan mengenai langkah mitigasi yang telah dijalankan, yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

2. The Company has a committee under the Board of Commissioners whose function is to monitor the Company's risk management activities.
3. The Company has established a quasi structure in which each unit has its own Risk Agent as stipulated in the Order number: PW.05.01/9/1/1/QMR/DUT/JAI-24 This structure is quasi representing each division to become a Risk Management Agent.
4. To ensure the implementation and maintain the Risk Management process can run well and with effective and efficient control, the Board of Directors establishes the head of the unit responsible for managing corporate risk. They are tasked with translating the Enterprise Risk Management ("ERM") policy into guidelines, procedures, and work instructions as well as providing guidance and coordination in its implementation.

Risk Management Implementation Activities in 2024:

1. Formulation of risk strategies in the form of Risk Profiles, including risk identification, risk assessment and preparation of risk handling (mitigation) plans;
2. Reporting of Risk Profile periodically every month on the prime system;
3. Reporting of Risk Profile periodically every Quarterly sent to BOC and Shareholders;
4. Annual Risk Composite Rating Assessment;
5. Risk Maturity Index (RMI) Self Assessment by the Internal Control Unit;
6. Participation in the Risk Award Pelindo category of Rindu (Individual Risk) and Kangen for FMR;
7. Risk Management Meeting with Risk Management Monitoring Committee to discuss the progress of Risk Management implementation;
8. Risk Management Meeting with Risk Officer to discuss the realization of risk mitigation;
9. Training and Certification related to Risk Management for BOD, BOD-1, and Risk Management staff.

COMPANY RISK AND MITIGATION EFFORTS

The Company identifies and analyzes risks to understand their sources and impacts. Risk profiles are then compiled with an explanation of the mitigation measures that have been implemented, which are outlined in the table below.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi Mitigation
1.	**Pengembangan Bisnis Baru** Stagnasi Pertumbuhan Bisnis **New Business Development** Business Growth Stagnation	• Kerjasama pengembangan pasar baru melalui kolaborasi dan sinergi bisnis dengan mitra; • Aktif menjajaki dan mencari pasar baru diluar area bisnis saat ini; • Menyusun kajian studi kelayakan yang komprehensif terkait pengembangan lini bisnis baru. • New market development through collaboration and business synergy with partners; • Actively explore and seek new markets outside the current business area; • Develop a comprehensive feasibility study on the development of new business lines.
	Kecelakaan Kerja **Work Accidents**	• Melakukan sosialisasi SOP kerja; • Sosialisasi rutin dan pemahaman budaya K3 yang aman; • Safety Patrol dan monitoring secara intensif proses kerja operasional; • Sosilisasi keadaan alam pada musim musim tertentu (hujan atau panas, angin, dll); • Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja pada area kerja tertentu (operasional). • Conduct socialization of work SOPs; • Routine socialization and understanding of a safe K3 culture; • Safety Patrol and intensive monitoring of operational work processes; • Socialization of natural conditions in certain seasons (rain or heat, wind, etc.); • Use of personal protective equipment (PPE) when working in certain work areas (operational).
	Sales & Marketing Kegagalan Meraih Market Baru **Sales & Marketing** Failure to Reach New Markets	• Optimalisasi pelayanan; • Melakukan kerjasama dan sinergi bisnis; • Menerapkan layanan berbasis pelanggan yang menguntungkan Perusahaan. • Service optimization; • Collaboration and business synergy; • Implementing customer-based services that benefit the Company.
	Cash Flow Piutang Macet **Cash Flow** Accounts Receivable Jammed	• Melakukan monitoring dan penagihan piutang secara rutin; • Melakukan penjajakan langkah hukum proses penagihan piutang; • Mengembangkan sistem pembayaran sebelum layanan. • Conduct routine monitoring and collection of receivables; • Implementing legal measures in the accounts receivable collection process; • Develop a pre-service payment system.
	Peningkatan Biaya Inefisiensi Biaya **Cost Increase** Cost Inefficiency	• Efisiensi penggunaan BBM • Efisiensi atas seluruh beban usaha • Optimalisasi dan monitoring penggunaan BBM untuk konsumsi pelayanan dan non pelayanan • Negosiasi harga BBM • Penyediaan fasilitas listrik darat (Onshore Power Supply/Ops) pada area operasi tertentu • Perawatan armada sesuai jadwal oleh vendor pemeliharaan yang qualified • Menjalin kerjasama pengolahan / penyaluran limbah berbahaya (B3) • Fuel efficiency • Efficiency of all business expenses • Optimization and monitoring of fuel usage for service and non-service consumption • Fuel price negotiation • Provision of onshore power supply (OPS) facilities in certain operating areas • Fleet maintenance on schedule by qualified maintenance vendors • Establish cooperation in the processing / distribution of hazardous waste (B3)
	Pergerakan Komoditas Penurunan *Throughput*/Trafik **Commodity Movement** Decrease in Throughput/Traffic	• Penjajakan pengembangan diarea yang mempunyai potensi (Banten, Palembang dll); • Customer Gathering; • Kajian FS untuk investasi baru yang akurat untuk menambah pendapatan; • Melakukan koordinasi dan progres penyesuaian tarif pada area yang berpotensi ada penyesuaian tarif. • Exploration of development in areas that have potential (Banten, Palembang etc.); • Customer Gathering; • FS study for accurate new investment to increase revenue; • Coordination and progress of tariff adjustment in areas with potential tariff adjustment.
	Keamanan Jaringan *Cyber Security* **Network Security** Cyber Security	• Penggunaan system firewall pada jaringan; • Adanya system backup baik data maupun aplikasi; • Menyiapkan prosedur operasi manual jika terjadi down sistem; • Melakukan pemulihan (recovery) sistem aplikasi • Use of a firewall system on the network; • The existence of a backup system for both data and applications; • Prepare manual operating procedures in the event of a system down; • Performing application system recovery

KOMPOSISI KEANGGOTAAN & SERTIFIKASI DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Per 15 Maret 2024, Fungsi Manajemen Risiko bergabung kepada Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko dalam rangka pemenuhan aturan *3rd lines model* berjumlah 3 (Tiga) orang yang meliputi 1 (satu) VP Keuangan & Manajemen Risiko, 1 (satu) DVP Manajemen Risiko dan 1 (satu) Staff.

Personil yang ditugaskan pada Manajemen Risiko aktif mengikuti sejumlah program sertifikasi yang relevan dengan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualifikasi mereka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga diharapkan pengelolaan risiko Perseroan juga dapat berjalan efektif karena dikelola oleh orang-orang yang berkompetensi tinggi.

Berikut ini adalah beberapa jenis sertifikasi/Pelatihan yang sudah dimiliki oleh sejumlah Personil Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan, antara lain:

MEMBERSHIP COMPOSITION & RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

As of March 15, 2024, the Risk Management function joined the Directorate of Finance, Human Resources and Risk Management in order to fulfill the 3rd lines model rules totaling 3 (Three) people which include 1 (one) VP Finance & Risk Management, 1 (one) DVP Risk Management and 1 (one) Staff.

The assigned personnel in Risk Management actively participate in a number of certification programs relevant to risk management. This aims to improve their knowledge and qualifications to support the smooth implementation of their duties and responsibilities so that it is expected that the Company's risk management can also run effectively because it is managed by highly competent people.

The following are several types of certification/training that have been owned by a number of the Company's Risk Management Personnel, among others:

Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Jumlah Karyawan Number of Employees
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	1
Qualified Risk Management Professional (QRM0)	1
Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	2

PENILAIAN RISIKO TERKAIT IT

IPCM berkomitmen untuk terus menjaga data dan dokumen perusahaan dari serangan Cyber dengan penerapan teknologi dan IT meliputi:

1. Penggunaan *system firewall* pada jaringan;
2. Adanya system backup baik data maupun aplikasi;
3. Menyiapkan prosedur operasi manual jika terjadi *down* sistem;
4. Melakukan pemulihan (*recovery*) sistem aplikasi.

Pada tahun 2024, Risiko terkait keamanan data ini telah direalisasikan dalam bentuk proses *End Point Security* dan *monitoring system firewall* pada jaringan masing – masing *Hardware*. Secara data adanya serangan sepanjang tahun 2024 masih dapat terkendali sehingga risiko yang semula dalam kategori *Moderate to High* 18 dapat diminimalisir pada tingkat Moderate 13.

IT RISK ASSESSMENT

IPCM is committed to continuously protect the Company's data and documents from cyber attacks by implementing technology and IT covering:

1. Use of a firewall system on the network;
2. The availability of a backup system for both data and applications;
3. Prepare manual operating procedures in the event of a system down;
4. Performing application system recovery.

In 2024, risks related to data security have been realized in the form of End Point Security processes and monitoring firewall systems on each Hardware network. According to the data, attacks throughout 2024 can still be controlled so that the risk that was originally in the Moderate to High 18 category can be minimized at the Moderate 13 level.

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Perusahaan pada tahun 2024, Manajemen telah melakukan evaluasi dan peninjauan atas tingkat risiko yang dihadapi, mendeteksi potensi risiko baru,

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The implementation of risk management in the Company in 2024, Management has evaluated and reviewed the level of risk faced, detected potential new risks, and realized the

serta realisasi mitigasi yang diperlukan guna mengatasi risiko Perusahaan. Efektivitas atas evaluasi penerapan manajemen risiko diukur berdasarkan seberapa besar kemampuan mitigasi atau rencana penanganan dalam menurunkan tingkat risiko dan potensi keterjadian risiko atau Loss Event sehingga Sasaran Perusahaan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat Inherent Risk awal tahun dari total 8 (Delapan) Risiko Utama terdapat diantaranya 6 (Enam) risiko dengan tingkat risiko High, dalam menanggapi hal ini Perusahaan fokus melakukan mitigasi atas risiko tersebut sehingga pada akhir tahun semua risiko telah masuk dalam batas toleransi maupun selera risiko yang ditetapkan dan tidak terdapat kejadian Loss Event yang secara signifikan merugikan Perusahaan. Perusahaan juga berusaha agar tidak terdapat tambahan risiko baru yang mempengaruhi kinerja Perusahaan dan terhadap risiko yang telah diminimalisir saat ini, akan terus dilakukan monitor dan diantisipasi mengingat adanya faktor eksternal yang diluar kendali Perusahaan sehingga risiko tidak terjadi dikemudian hari.

Telah dilakukan pengukuran Risk Maturity Index (RMI) secara Self Assessment yang dilakukan oleh Tim Internal Perusahaan dengan dipimpin oleh Kepala Audit Internal dengan skor RMI JAI sebesar 3,0 kategori Good Practice A (dari skala 5) dengan menggunakan pendekatan 5 (lima) dimensi yaitu Budaya dan Kapabilitas Risiko, Organisasi dan Tata Kelola Risiko, Kerangka Risiko dan Kepatuhan, Proses dan Kontrol Risiko, Model Data dan Teknologi Risiko serta penilaian atas Kesehatan Perusahaan dan Peringkat Komposit Risiko. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran kembali pada tahun 2025 melalui Self Assessment sebagai persiapan Assessment menggunakan lembaga Eksternal.

PERNYATAAN MANAJEMEN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Risiko selaku salah satu organ Dewan Komisaris berpandangan bahwa secara umum manajemen telah menunjukkan komitmen yang relatif memadai dalam mengelola risiko yang melekat pada bisnis Perusahaan, utamanya melalui berbagai inisitiaf-inisiatif penting sepanjang tahun 2024, yaitu:

1. Penyajian profil risiko Perusahaan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan entitas induk berikut pembahasannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan SPJM (Subholding Pelindo Jasa Maritim) selaku induk Perusahaan;
2. Realisasi atas rencana kerja terkait manajemen risiko sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM) termasuk kegiatan-kegiatan untuk memperkuat budaya risiko;

necessary mitigation to overcome the Company's risks. The effectiveness of the evaluation of the implementation of risk management is measured based on how much the mitigation or handling plan is able to reduce the level of risk and potential risk occurrence or Loss Event so that the Company's goals can be achieved.

Based on the evaluation results of the Inherent Risk level at the beginning of the year from a total of 8 (Eight) Main Risks, there were 6 (Six) risks with a High risk level, in response to this the Company focused on mitigating these risks so that at the end of the year all risks were within the tolerance limits and risk appetite set and there were no Loss Events that significantly harmed the Company. The Company also strives so that there are no additional new risks that affect the Company's performance and for risks that have been minimized at this time, will continue to be monitored and anticipated given the external factors that are beyond the Company's control so that risks do not occur in the future.

A Self Assessment Risk Maturity Index (RMI) measurement has been carried out by the Company's Internal Team led by the Head of Internal Audit with a JAI RMI score of 3.0 in the Good Practice A category (on a scale of 5) using a 5 (five) dimension approach, namely Risk Culture and Capability, Risk Organization and Governance, Risk and Compliance Framework, Risk Processes and Controls, Risk Data and Technology Models as well as an assessment of the Company's Health and Risk Composite Rating. Furthermore, the measurement will be carried out again in 2025 through Self Assessment in preparation for the Assessment using an external agency.

MANAGEMENT'S STATEMENT ON THE ACCOMPLISHMENTS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Risk Monitoring Committee as one of the organs of the Board of Commissioners is of the view that in general management has demonstrated a relatively adequate commitment to managing the risks inherent in the Company's business, mainly through various important initiatives throughout 2024, namely:

1. Presentation of the Company's risk profile periodically to the Board of Commissioners and the parent entity along with the discussion, in accordance with the applicable provisions within SPJM (Subholding Pelindo Jasa Maritim) as the parent company;
2. Realization of the work plan related to risk management as outlined in the Management Work Plan (MWP) including activities to strengthen risk culture;

3. Penetapan struktur organisasi yang menjadi pengampu dalam pengelolaan risiko Perusahaan yaitu Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Divisi Keuangan & Manajemen Risiko sebagaimana tercantum pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor:HK-568/1/9/1MS-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
4. Penunjukkan Risk Officer secara konsisten yang diperbaharui dengan anggota dari perwakilan setiap Divisi untuk mendukung implementasi manajemen risiko melalui Surat Perintah nomor: PW.05.01/9/1/1/QMR/DUT/JAI-24;
5. Pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen risiko bagi Dewan Komisaris berikut organ Dewan Komisaris, Direktur Pengelola Risiko, Vice President, Deputy Vice President dan Staff Manajemen Risiko;
6. Digitalisasi implementasi manajemen risiko melalui penggunaan aplikasi Pelindo Risk Management (PRiMa) untuk mendokumentasikan dan mengadmistrasikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Selanjutnya, Komite Pemantau Risiko berharap agar manajemen risiko secara konsisten berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas dan maturitas dari praktik manajemen risiko Perusahaan.

RENCANA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

1. Penetapan Strategi & Profil risiko Perusahaan baik risiko-risiko yang melekat pada kegiatan operasional maupun investasi;
2. Pemutakhiran perangkat tata kelola manajemen risiko (Komitmen, Perdir, SOP, Strategi Risiko);
3. Pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi organ pengelola risiko;
4. Monitoring realisasi mitigasi risiko 2025 Bulanan dan Triwulanan;
5. Penyusunan risiko 2026 yang terintegrasi dengan sasaran, RKM dan RKAP;
6. Penyusunan tata kelola BCM dan pelaksanaan simulasi/pengujian;
7. Evaluasi triwulanan dengan Dewan Komisaris dan SPJM selaku induk Perusahaan;
8. Survei Manajemen Risiko;
9. Risk Appreciation;
10. Assessment RMI Tahun Buku 2024.

3. Determination of the organizational structure in charge of managing the Company's risks, namely the Directorate of Finance, Human Resources and Risk Management, Finance & Risk Management Division as stated in the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01.01./15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024 concerning Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-568/1/9/1MS-21 Dated September 1, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
4. Appointment of Risk Officers consistently updated with members from representatives of each Division to support the implementation of risk management through Order number: PW.05.01/9/1/1/QMR/DUT/JAI-24;
5. Training and certification in risk management for the Board of Commissioners and its organs, Risk Management Director, Vice President, Deputy Vice President and Risk Management Staff;
6. Digitalization of risk management implementation through the use of Pelindo Risk Management (PRiMa) application to document and administer the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks.

Furthermore, the Risk Monitoring Committee expects that risk management consistently strives to continuously improve the effectiveness and maturity of the Company's risk management practices.

PROGRAM PLAN OF SYSTEM MANAGEMENT RISK MANAGEMENT YEAR 2025

1. Determination of the Company's strategy and risk profile, both risks inherent in operational and investment activities;
2. Updating risk management governance tools (Commitments, Perdir, SOP, Risk Strategy);
3. Implementation of training and certification programs for risk management organs;
4. Monitoring the realization of 2025 risk mitigation Monthly and Quarterly;
5. Preparation of 2026 risks integrated with goals, RKM and RKAP;
6. Preparation of BCM governance and implementation of simulation/testing;
7. Quarterly evaluation with the Board of Commissioners and SPJM as the parent company;
8. Risk Management Survey;
9. Risk Appreciation;
10. RMI Assessment for Financial Year 2024.

Perkara Hukum

Legal Issues

Perusahaan mengedepankan tata kelola yang bertanggung jawab dalam setiap aspek operasionalnya. Untuk itu, berbagai langkah diterapkan guna mencegah pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum.

Di tahun 2024, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Perusahaan yang dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan secara signifikan.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2024, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat, memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki anak Perusahaan, dengan demikian tidak terdapat informasi terkait permasalahan hukum terhadap entitas anak.

The Company emphasizes responsible governance in every aspect of its operations. Therefore, various measures are implemented to prevent violations, especially those related to legal aspects.

In 2024, there were no important matters with significant impact on the Company's business which the Company had to face.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES CURRENTLY BEING FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN OFFICE

Throughout 2024, no members of the Company's Board of Commissioners or Directors who are currently serving have had any legal issues, whether civil or criminal.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES BEING FACED BY SUBSIDIARIES

Until the end of 2024, the Company does not have any subsidiaries, thus there is no information regarding legal issues faced by subsidiaries.

Sanksi Administrasi

Administrative Sanctions

Selama tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai organisasi, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

INFORMASI TENTANG SANKSI PERKARA PAJAK

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Perusahaan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan pajak tertinggi terkait masalah pajak maupun sengketa pajak.

Throughout 2024, there were no material administrative sanctions issued by the relevant authorities that affected the continuity of the Company's business and no administrative sanctions imposed on the Company as an organization, on subsidiaries, members of the Board of Directors or Commissioners.

INFORMATION ABOUT TAX CASE SANCTIONS

In the last five years, the Company has never been found guilty by the highest tax court regarding tax issues or tax disputes.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Information Access and Company Data

Perusahaan menempatkan keterbukaan informasi sebagai aspek penting dalam hubungan dengan pemangku kepentingan. Untuk mendukung transparansi, Perusahaan memastikan akses informasi yang mudah dijangkau, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pemegang saham serta pihak terkait lainnya. Penyampaian informasi dilakukan secara tepat waktu melalui berbagai kanal, termasuk media massa, situs web resmi, paparan publik, dan *platform* pelaporan elektronik.

Selain itu, Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyajian informasi keuangan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kejelasan, objektivitas, serta ketepatan waktu guna memastikan kepercayaan dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

The Company considers information disclosure as an important aspect of stakeholder relations. The Company ensures access to information that is easily accessible, relevant, and appropriate to the needs of shareholders and other related parties to support transparency. Information delivery is done in a timely manner through various channels, including mass media, official websites, public exposures, and electronic reporting platforms.

Furthermore, the Company presents financial reports that are accurate and in accordance with applicable regulations. The presentation of financial information is done by upholding the principles of clarity, objectivity, and timeliness to ensure trust and accountability to all stakeholders.

Media Elektronik Electronic Media	Laporan Tahunan Annual Report	Media Sosial Social Media
E-mail: corsec@ipcmarine.co.id *Website*: www.ipcmarine.co.id	• *Annual Report* tahun 2019 • *Annual Report* tahun 2020 • *Annual Report* tahun 2021 • *Annual Report* tahun 2022 • *Annual Report* tahun 2023	FP Facebook: IPCMarine Instagram: @ipcmarine X: @ipcmarine_ Tiktok: @ipcmarine Youtube: PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk/IPCM

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan secara aktif membagikan informasi kepada publik melalui 13 (tiga belas) siaran pers yang dipublikasikan di media cetak dan elektronik dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Company actively shared information with the public through 13 (thirteen) press releases published in print and electronic media with details as follows:

No.	Daftar *Press Release* Tahun 2024 Press Releases in 2024
1	28 Maret 2024 - Laporan Keuangan FY 2023: IPCM Raih Kenaikan Laba Bersih Menjadi Rp 157,6 Miliar March 28, 2024 - FY 2023 Financial Report: IPCM Achieves Increase in Net Profit to Rp 157.6 Billion
2	7 Mei 2024 - IPCM Temu Retail Investor Palembang, Berikan Pengalaman Melihat Langsung Bisnis Pandu Tunda Kapal May 7, 2024 - IPCM Gathers Palembang Retail Investors, Provides Experience of Directly Seeing the Tugboat Guiding Business
3	14 Mei 2024 - Gandeng Komunitas Alumni, IPCM Expose Wilayah Ekspansi Baru Sekaligus Ajak Site Visit May 14, 2024 - Collaborating with Alumni Community, IPCM Expose New Expansion Area and Invite Site Visit
4	22 Mei 2024 - IPCM Optimis Terus Ekspansi Pasar di Tahun 2024 May 22, 2024 - IPCM Optimistic to Continue Market Expansion in 2024
5	22 Juni 2024 - Laba Meningkat - RUPST PT Jasa Armada Indonesia Tbk Putuskan Pembagian Dividen Rp118 Miliar June 22, 2024 - Profit Increases - PT Jasa Armada Indonesia Tbk's AGMS Decides to Distribute Dividends of Rp118 Billion
6	20 Juni 2024 - Berbagi ke Wilayah Operasional Seluruh Indonesia, Jasa Armada Indonesia Bagikan 33 Hewan Kurban June 20, 2024 - Sharing to Operational Areas Throughout Indonesia, Jasa Armada Indonesia Distributes 33 Qurban Animals
7	26 Juli 2024 - Pertahankan Kinerja Keuangan Semester I 2024, IPCM Bukukan Pendapatan Rp 599 Miliar July 26, 2024 - Maintain Financial Performance in the First Semester of 2024, IPCM Posts Revenue of Rp 599 Billion
8	1 Agustus 2024 – Penghargaan untuk Kontribusi Pelindo pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan August 1, 2024 - Award for Pelindo's Contribution to Sustainable Development Goals

No.	Daftar *Press Release* Tahun 2024 Press Releases in 2024
9	29 Agustus 2024 - Paparkan Kinerja Perseroan Positif dalam Public Expose Live 2024: IPCM Catatkan Kinerja Baik, Expose Wilayah Ekspansi Baru di 2024 August 29, 2024 - Present Positive Company Performance in Public Expose Live 2024: IPCM Records Good Performance, Expose New Expansion Areas in 2024
10	25 September 2024 - RUPSLB IPCM, Tambahan Formasi Semakin Memperkuat Perseroan September 25, 2024 - IPCM EGMS, Additional Formation Further Strengthens the Company
11	7 Oktober 2024 – IPCM Raih Annual Report Award 2023 October 7, 2024 - IPCM wins Annual Report Award 2023
12	28 Oktober 2024 - Kinerja Keuangan 9M-2024: IPCM Catatkan Kenaikan Pendapatan 10,31% (Yoy) October 28, 2024 - 9M-2024 Financial Performance: IPCM Records 10.31% (Yoy) Revenue Increase
13	11 Desember 2024 – IPCM Umumkan Pembagian Dividen Interim Sebesar Rp20,05 Miliar December 11, 2024 - IPCM Announces Interim Dividend Distribution of Rp20.05 Billion

Kode Etik

Code of Conduct

Setiap individu di lingkungan Perusahaan bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika yang telah ditetapkan. Kode Etik berperan sebagai pedoman yang memastikan setiap tindakan dan keputusan selaras dengan nilai-nilai moral serta profesionalisme. Dengan menjunjung tinggi integritas, seluruh Insan IPCM diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga reputasi Perusahaan.

Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang baik, PT Jasa Armada Indonesia telah menetapkan Kode Etik melalui Surat Keputusan Nomor: HK.56/4/10/4/MS21 tanggal 4 Oktober 2021. Kode Etik ini menjadi acuan dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan transparansi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap standar moral yang tinggi.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Berikut ini adalah pokok-pokok Kode Etik Perusahaan, antara lain:

1. Etika Profesional
   a. Insan PT Jasa Armada Indonesia Tbk
   b. Pelanggan Kami
   c. Vendor Kami
   d. Kompetitor Kami
   e. Komunitas dan Lingkungan Kami
   f. Institusi Pemerintah
   g. Aktivitas Politik
2. Etika Kerja
   a. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan

All individuals within the Company are responsible for acting in accordance with established ethical principles. The Code of Ethics serves as a guideline that ensures every action and decision is in line with moral values and professionalism. By upholding integrity, all IPCM personnel are expected to build harmonious relationships with stakeholders and maintain the Company's reputation.

PT Jasa Armada Indonesia has established a Code of Ethics through Decree Number: HK.56/4/10/4/MS21 dated October 4, 2021 as a form of commitment to good governance. This Code of Ethics serves as a reference in building a work culture that emphasizes transparency, responsibility, and adherence to high moral standards.

CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

The following are the highlights of the Company's Code of Ethics:

1. Professional Ethics
   a. PT Jasa Armada Indonesia Tbk Personnel
   b. Customers
   c. Vendors
   d. Competitors
   e. Community and Environment
   f. Government Institutions
   g. Political Activities
2. Work Ethics
   a. Company Documentation and Recording

b. Kontrol Internal
c. Perjalanan Dinas
d. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
e. Insider Trading
f. Menghadapi Konflik Kepentingan
g. Anti Penyuapan
h. Benturan Kepentingan
i. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi

3. Komitmen
   a. Penutup
   b. Uji Diri Anda
   c. Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik
   d. Daftar Istilah

KORELASI KODE ETIK DENGAN NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menjadikan nilai-nilai budaya sebagai prinsip utama. Penerapan Kode Etik Perusahaan selaras dengan Budaya/Tata Nilai "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, & Kolaboratif), dan Em*ployee Value Proposition* (EVP) yaitu *Learn, Grow, and Contribute to* Indonesia (Belajar, Bertumbuh, dan Berkontribusi Untuk Indonesia).

IPCM berkomitmen kuat untuk menerapkan dan menyelaraskan Nilai-nilai Utama serta EVP. Komitmen ini bertujuan mendukung peran BUMN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial, pencipta lapangan kerja, dan penyedia talenta. Dengan mendukung sepenuhnya nilai-nilai inti dan EVP, IPCM secara aktif memperkuat perannya sebagai kontributor utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Adapun penjelasan mengenai *Core Values* AKHLAK telah dijabarkan dalam bab Profil Perusahaan.

TUJUAN PENERAPAN KODE ETIK

1. Sebagai pedoman perilaku untuk seluruh Jajaran Perusahaan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
2. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif serta mendorong perilaku etis dari Jajaran Perusahaan;
3. Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

b. Internal Controls
c. Business Trips
d. Confidentiality of Data and/or Information
e. Insider Trading
f. Conflicts of Interest
g. Anti-Bribery
h. Conflict of Interest
i. Media, Communication, and Information Dissemination

3. Commitment
   a. Conclusion
   b. Test Yourself
   c. Statement of Integrity Pact and Code of Conduct Compliance
   d. Glossary of Terms

CODE OF CONDUCT CORRELATION WITH CORPORATE CULTURAL VALUES

In conducting its business activities, the Company prioritizes cultural values as its fundamental principle. The implementation of the Company's Code of Conduct is aligned with the "AKHLAK" Culture/Values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, & Collaborative), as well as the Employee Value Proposition (EVP), which is Learn, Grow, and Contribute to Indonesia.

IPCM is strongly committed to implementing and aligning its Core Values and EVP. This commitment aims to support the role of SOEs as drivers of economic growth, accelerators of social welfare, job creators, and talent providers. By fully supporting the core values and EVP, IPCM actively strengthens its role as a key contributor to economic development and social welfare. The explanation of the AKHLAK Core Values has been described in the Company Profile chapter.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION PURPOSES

1. As a code of conduct for all levels of the Company which must be adhered to in daily interactions with all parties, and must be used as a basis for thinking in the decision making process;
2. Create and maintain a positive work environment and encourage ethical behavior from Company Staff;
3. Increase the confidence of Shareholders and Stakeholders that the Company is managed prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the expected level of profitability while still taking into account the interests of the Company.

MANFAAT PENERAPAN KODE ETIK

Pelaksanaan *Code of Conduct* diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Pekerja
   a. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Perusahaan;
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja.
2. Perusahaan
   a. Meningkatkan nilai Perusahaan dalam membangun hubungan dengan para stakeholders melalui kepastian dan perlindungan hak-haknya guna menciptakan reputasi positif bagi keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
   b. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pekerja, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan.
3. Pemegang Saham (*Shareholders*)
   Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
4. *Stakeholders*
   Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan stakeholders sehingga mendorong reputasi Perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

PEMBERLAKUAN PENGATURAN PEDOMAN KODE ETIK

Pedoman Kode Etik Perusahaan berlaku bagi semua individu yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, termasuk anak perusahaan serta afiliasi yang berada di bawah pengendaliannya. Selain itu, pedoman ini juga mengikat Pemegang Saham, serta seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja yang terlibat dalam transaksi bisnis dengan Perusahaan.

MEKANISME PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN KODE ETIK

1. Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Etika Perusahaan;
2. Perusahaan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan stakeholder termasuk Pekerja dan/atau Perwakilan *stakeholder* terkait dengan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan;

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION BENEFITS

The implementation of the Code of Conduct is expected to provide benefits for:

1. Employees
   a. Serve as a Guideline regarding desirable and undesirable behavior by the Company;
   b. Create a work environment that upholds the Company's values and culture, thereby improving performance.
2. Company
   a. Increase the Company's value in building relationships with stakeholders by providing certainty and protection of their rights, leading to a positive reputation for long-term business success.
   b. Encourage more efficient and effective operational activities, considering that ethical standards must be observed in relationships with workers, partners, customers, society, government, and other stakeholders.
3. Shareholders
   Increase Shareholders' confidence that the Company is managed prudently, efficiently, transparently, accountably, and fairly to achieve the expected level of profitability while still considering the interests of the Company.
4. Stakeholders
   Create harmonious and mutually beneficial relationships with stakeholders, thereby enhancing the Company's reputation as a responsible corporate citizen.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT

The Company's Code of Conduct applies to all individuals acting for and on behalf of the Company, including its subsidiaries and affiliates under its control. Furthermore, this guideline is also bind to Shareholders, as well as all stakeholders and partners involved in business transactions with the Company.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT MECHANISM

1. Violations refer to attitudes, actions, or behaviors that deviate from the Company's Code of Conduct;
2. The Company addresses every violation report submitted by stakeholders, including Employees and/or their representatives, related to breaches of the Company's Code of Conduct;

3. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stakeholder dalam rangka menjamin hak-hak *stakeholder* berhubungan dengan Perusahaan;
4. Pelaporan pelanggaran oleh *stakeholders* yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Perusahaan;
5. Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perusahaan;
6. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran;
7. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat perlindungan hukum dari Perusahaan.

PENANDATANGANAN KOMITMEN PEDOMAN KODE ETIK

Dalam rangka menegaskan komitmen terhadap implementasi Kode Etik Perusahaan, setiap tahunnya diperlukan penandatanganan komitmen terkait Etika Bisnis dan Etika Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi dan Manajer sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun;
2. Setiap Insan Perusahaan menerima satu salinan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang didokumentasikan oleh fungsi *Human Resource* atau fungsi yang ditunjuk. Komitmen setiap Insan Perusahaan yang melaksanakan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun.

PENYEMPURNAAN PEDOMAN KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan merupakan dokumen yang terus berkembang dan dapat diperbarui serta ditinjau secara berkala agar tetap selaras dengan perkembangan bisnis dan perubahan peraturan perundang-undangan. IPCM melakukan pemutakhiran Kode Etik Perusahaan pada tahun 2021.

3. Addressing violation reports is one way to enhance stakeholder protection and ensure their rights concerning the Company;
4. Failure to promptly address violation reports from stakeholders may increase reputation risks for the Company;
5. To address violation reports, the Company has established written policies and procedures outlined in the Company's Whistleblowing System Policies and Procedures;
6. Violation reports are submitted in writing to the Violation Complaint Management Team, which then follows up according to the severity of the violation;
7. Those who report violations are entitled to legal protection from the Company.

SIGNING COMMITMENT TO CODE OF CONDUCT GUIDELINES

To reaffirm the commitment to implementing the Company's Code of Conduct, it is necessary for every individual to sign a commitment related to Business Ethics and Work Ethics annually, with the following provisions:

1. Directors and Managers are designated as officials responsible for implementing the Business Ethics and Work Ethics Guidelines in their respective work units. The commitment of these officials is documented at the end of each year.
2. Each Company Personnel receives a copy of the Business Ethics and Work Ethics Guidelines and signs a statement form indicating that they have received, understood, and agreed to comply with the Guidelines. This commitment is documented at the beginning of each year by the Human Resources function or designated function.

CODE OF CONDUCT GUIDELINE PERFECTION

The Company's Code of Conduct is a dynamic document that can be updated and reviewed periodically to stay in line with business developments and changes in laws and regulations. IPCM updated the Company's Code of Ethics in 2021.

SOSIALISASI PEDOMAN KODE ETIK

Penyebarluasan Pedoman Kode Etik Perusahaan berperan penting dalam memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten di seluruh lingkungan Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2024, IPCM telah melaksanakan inisiatif penyebaran Kode Etik Perusahaan baik melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media komunikasi Perusahaan. Perusahaan juga melakuka sosialisasi pada berbagai kesempatan kegiatan terkait. Sebagai hasilnya, seluruh pekerja dilingkungan IPCM telah memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pedoman kode etik untuk diimplementasikan pada lingkungan pekerjaan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pertimbangan-pertimbangan berikut merupakan dasar untuk memberikan keputusan terhadap tindakan terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran, meliputi:

1. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang dapat menjadi teladan dalam implementasi Pedoman Etika Perusahaan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
2. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan;
3. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Disiplin Pekerja yang berlaku;
4. Mitra Kerja Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan;
5. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran pidana dan perdata oleh Mitra Kerja Perusahaan, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat kasus pelanggaran yang melibatkan pegawai JAI.

SOCIALIZATION OF CODE OF CONDUCT GUIDELINE

The distribution of the Company's Code of Ethics Guideline is instrumental in ensuring a deep understanding and consistent application throughout the Company.

By the end of 2024, IPCM had carried out initiatives to disseminate the Company's Code of Conduct through direct socialization and corporate communication channels. The Company also conducted socialization efforts in several occassions. As a result, all employees within IPCM have received comprehensive information regarding the Code of Conduct guidelines to be implemented in the workplace.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

The following considerations serve as the basis for making decisions regarding actions against employees who commit violations:

1. The Company may grant awards to Company Personnel who serve as role models in implementing the Company's Code of Conduct, as determined by the Board of Directors;
2. Individuals who contribute to saving the Company by uncovering materially or non-materially detrimental cases are eligible to receive awards from the Company;
3. Company personnel found to have violated the Company's Code of Conduct may face disciplinary actions in accordance with the applicable Worker Disciplinary Regulations;
4. Company Partners found to have committed violations will be subject to sanctions as per Company regulations and decisions;
5. In cases involving criminal or civil violations by Company Partners, the matter may be escalated to the authorities.

TOTAL CODE OF CONDUCT VIOLATION

Until the end of 2024, there were cases of violations involving JAI employees.

Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies



Perusahaan secara tegas menerapkan kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi sebagai prinsip utama dalam operasionalnya guna menghadapi tantangan global terkait korupsi dan gratifikasi. Kebijakan ini disusun untuk memastikan lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Untuk mencegah praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap, dan gratifikasi di PT Jasa Armada Indonesia Tbk, telah diimplementasikan program serta prosedur khusus. Selain itu, telah diterbitkan publikasi terkait Komitmen dan Implementasi Pengendalian Gratifikasi serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bukti nyata dalam mengendalikan praktik gratifikasi di lingkungan perusahaan.

PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUP PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B, setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya

The Company strictly implements the Anti-Corruption and Gratification policy as a key principle in its operations to face global challenges related to corruption and gratification. This policy is designed to ensure a clean, transparent and integrity business environment.

To prevent corruption practices, kickbacks, fraud, bribery, and gratification at PT Jasa Armada Indonesia Tbk, special programs and procedures have been implemented. Furthermore, publications related to the Commitment and Implementation of Gratification Control and Anti-Bribery Management System have been published as concrete evidence in controlling gratification practices within the company.

BASIC PRINCIPLES OF GRATIFICATION CONTROL AT THE COMPANY

According to Law No. 20/2001 Article 12B, any gift to a civil servant or state administrator that is related to his/her position and contrary to his/her obligations or duties is categorized as bribery. In line with the principles of

dikategorikan sebagai suap. Sejalan dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan, hal ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemberian imbalan kepada karyawan atau pihak terkait dalam kegiatan bisnis harus dilakukan dengan transparansi dan berlandaskan integritas. Kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku menjadi aspek krusial dalam mencegah praktik korupsi serta memastikan tata kelola yang baik dalam perusahaan.

KLASIFIKASI GRATIFIKASI

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan *Whistle Blowing System (*WBS), klasifikasi gratifikasi di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan
2. Gratifikasi yang terkait kedinasan
3. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Perusahaan telah membentuk Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melaksanakan sistem pencegahan dan penanggulangan gratifikasi di lingkungan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-56/29/5/2/MS-20 Tanggal 29 Mei 2020.

gratification control within the company, this emphasizes that any form of reward to employees or related parties in business activities must be carried out with transparency and based on integrity. Compliance with applicable ethical and legal standards is a crucial aspect in preventing corrupt practices and ensuring good governance within the company.

GRATIFICATION CLASSIFICATION

As stated in the Guidelines for Gratification Management, Illegal Levy Reporting and Whistle Blowing System (WBS) Implementation, the classification of gratification in the Company is as follows:

1. Gratuities that must be reported
2. Officially related gratuities
3. Gratuities that do not need to be reported

GRATIFICATION USAGE AND MANAGEMENT

The Company has established a Gratification Control Team/Unit (UPG) which is responsible to the Board of Directors to implement a gratification prevention and control system within the Company based on the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-56/29/5/2/MS-20 Dated May 29, 2020.

No.	Unit Kerja Work Unit	Jabatan dalam Tim Position in the Team
1	Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary	Ketua | Chairman
2	Kepala Satuan Pengawas Internal | Head of Internal Supervisory Unit	Wakil Ketua | Vice Chairman
3	VP Hukum & Asuransi | VP Legal & Insurance	Anggota | Member
4	VP SDM & Budaya Perusahaan | VP HR & Corporate Culture	Anggota | Member

Dalam hal ini Tim/Unit Pengendali Gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengelola terhadap semua laporan yang masuk ke saluran yang tersedia yang dilaporkan oleh Insan Perusahaan;
2. Melakukan pemilahan kategori gratifikasi dan menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Insan Perusahaan;
3. Menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan (setelah ada review dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan);
4. Menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;

In this case, the Gratification Control Team/Unit has duties and responsibilities, as follows:

1. Receive and manage all reports that enter the available channels reported by Company personnel;
2. Sorting gratification categories and submitting gratification reports to the KPK no later than 30 (thirty) days from the date of receipt by Company personnel;
3. Determining the status of ownership of gratuities received in the official capacity (after there is a review from KPK that the gratification report is included in the official category);
4. Determine the distribution of gratuities in the form of perishable/rotten or expired goods by keeping proof of delivery;

5. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima gratifikasi dan menitipkannya kepada divisi keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai surat keputusan pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
6. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman perusahaan terkait dengan gratifikasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);
7. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada manajemen Perusahaan;
8. Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Perusahaan;
9. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan;
10. Melaporkan kegiatan Tim/Unit Pengendalian Gratifikasi UPG) kepada Direksi setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan;
11. Melakukan rapat internal dengan Tim/Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) setiap bulannya;
12. Membuat laporan bulanan mengenai statistik pelaporan, tindak lanjut hingga pemberian reward dan punishment kepada pelapor dan terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Direksi.

PELAPORAN DAN SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

PELATIHAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI KEPADA KARYAWAN

Sebagai bagian dari komitmen dalam menjunjung tinggi etika bisnis, Perusahaan mengadakan Pelatihan Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh karyawan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman kolektif mengenai pentingnya praktik bisnis yang bersih, sekaligus memberikan wawasan mendalam terkait dampak hukum dan reputasi akibat tindakan korupsi. Pada tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan pelatihan bagi karyawan mengenai Anti Korupsi dan Gratifikasi, yang mencakup:

1. Pelindo Good Corporate Performance (P-Good)
   P-Good merupakan program tahunan dari Pelindo Group yang wajib diikuti seluruh karyawan, termasuk di IPCM, sebagai bentuk penguatan budaya antikorupsi dan gratifikasi. Kegiatan ini terdiri dari pelatihan, pengisian kuisioner, dan penandatanganan pakta integritas. Sebelum menandatangani pakta, karyawan diminta membaca seluruh peraturan perusahaan, termasuk kode etik dan kebijakan antikorupsi. Kuisioner yang diisi akan menghasilkan skor pemahaman, dengan target

5. Receive money or goods handed over by the gratification recipient and entrust them to the finance division for safekeeping and hand them over or deposit them with a party appointed in accordance with the KPK leadership decree regarding ownership.
6. Disseminating or socializing company Guidelines related to gratuities to stakeholders;
7. Provide information related to the development of the gratification control system to the Company's management;
8. Formulating further instructions needed for the implementation of gratification control in the Company;
9. Administering and archiving activities;
10. Reporting the activities of the UPG Gratification Control Team/Unit) to the Board of Directors every quarter, no later than 10 (ten) working days after the end of the relevant quarterly period;
11. Conduct internal meetings with the Gratification Control Team/Unit (UPG) every month;
12. Prepare a monthly report on reporting statistics, follow-up to reward and punishment to the reporter and the reported party and report the results to the Board of Directors.

GRATIFICATION REPORTING

Violation of the provisions in the gratuity Guidelines will be subject to sanctions in accordance with the provisions and regulations applicable in the Company.

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION TRAINING FOR EMPLOYEES

As part of its commitment to upholding business ethics, the Company conducts Anti-Corruption and Gratification Training for all employees. This program is designed to increase collective awareness and understanding of the importance of clean business practices, while providing in-depth insight into the legal and reputational impacts of corruption. In 2024, the Company has conducted training for employees on Anti-Corruption and Gratification, which includes:

1. Pelindo Good Corporate Performance (P-Good)
   P-Good is an annual program from Pelindo Group that must be followed by all employees, including at IPCM, as a form of strengthening anti-corruption and gratification culture. This activity consists of training, filling out questionnaires, and signing an integrity pact. Before signing the pact, employees are asked to read all company regulations, including the code of ethics and anti-corruption policies. The completed questionnaire will generate an understanding score, with a maximum

maksimal 100. Pada tahun 2024, capaian rata-rata IPCM mencapai 85%. Program ini menjadi alat ukur sekaligus komitmen nyata terhadap penerapan tata kelola yang bersih.

2. Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)
   Sebagai bagian dari pelatihan Anti Korupsi dan Gratifikasi, IPCM memanfaatkan momentum HAKORDIA 2024 untuk memperdalam pemahaman karyawan terhadap nilai-nilai integritas. Kegiatan ini tidak hanya mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang bebas korupsi, tetapi juga menyajikan pemaparan konkret dari aparat penegak hukum mengenai modus korupsi yang kerap terjadi di lingkungan bisnis. Dengan pendekatan langsung dan aplikatif, pelatihan HAKORDIA memperkuat komitmen seluruh insan perusahaan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Untuk memastikan integritas dan transparansi tetap terjaga, Perusahaan secara konsisten mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan korupsi dan gratifikasi. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkeadilan, di mana setiap karyawan memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya menjaga etika bisnis serta menolak segala bentuk praktik yang dapat mengancam integritas perusahaan.

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) melaksanakan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi melalui sharing session bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kegiatan ini memperkuat pemahaman seluruh insan IPCM terhadap potensi fraud serta pentingnya membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.

Selain itu, semangat antikorupsi juga disuarakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh pekerja JAI pada momentum Lebaran dan Natal 2024. Kegiatan ini turut diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas di awal tahun sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas di lingkungan kerja.

MEKANISME PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Laporan atau pengaduan atas penerimaan gratifikasi akan ditangani sebagai berikut:

target of 100. By 2024, IPCM's average achievement will reach 85%. This program is a measuring tool as well as a real commitment to the implementation of clean governance.

2. World Anti-Corruption Day (HAKORDIA)
   As part of the Anti-Corruption and Gratification training, IPCM utilized the momentum of HAKORDIA 2024 to deepen employees' understanding of integrity values. This activity not only reminds the importance of building a corruption-free work culture, but also presents concrete explanations from law enforcement officials regarding modes of corruption that often occur in the business environment. With a direct and applicable approach, the HAKORDIA training strengthens the commitment of all company personnel in realizing clean and responsible governance.

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION SOCIALIZATION

To maintain integrity and transparency, the Company consistently conducts socialization on corruption and gratification prevention. This initiative aims to create a fair working environment, where every employee has a strong understanding of the importance of maintaining business ethics and rejecting all forms of practices that can threaten the integrity of the Company.

In celebrating World Anti-Corruption Day (HAKORDIA), PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) conducted anti-corruption and gratification socialization through a sharing session with the North Jakarta District Attorney's Office. This activity strengthens the understanding of all IPCM people on the potential for fraud and the importance of building a clean and transparent work culture.

Furthermore, the spirit of anti-corruption was also voiced through socialization carried out by all JAI workers at the momentum of Lebaran and Christmas 2024. This activity was also strengthened by signing an integrity pact at the beginning of the year as a form of joint commitment in maintaining integrity in the work environment.

GRATIFICATION INCOMING REPORT MECHANISM

Reports or complaints on the receipt of gratuities will be handled as follows:

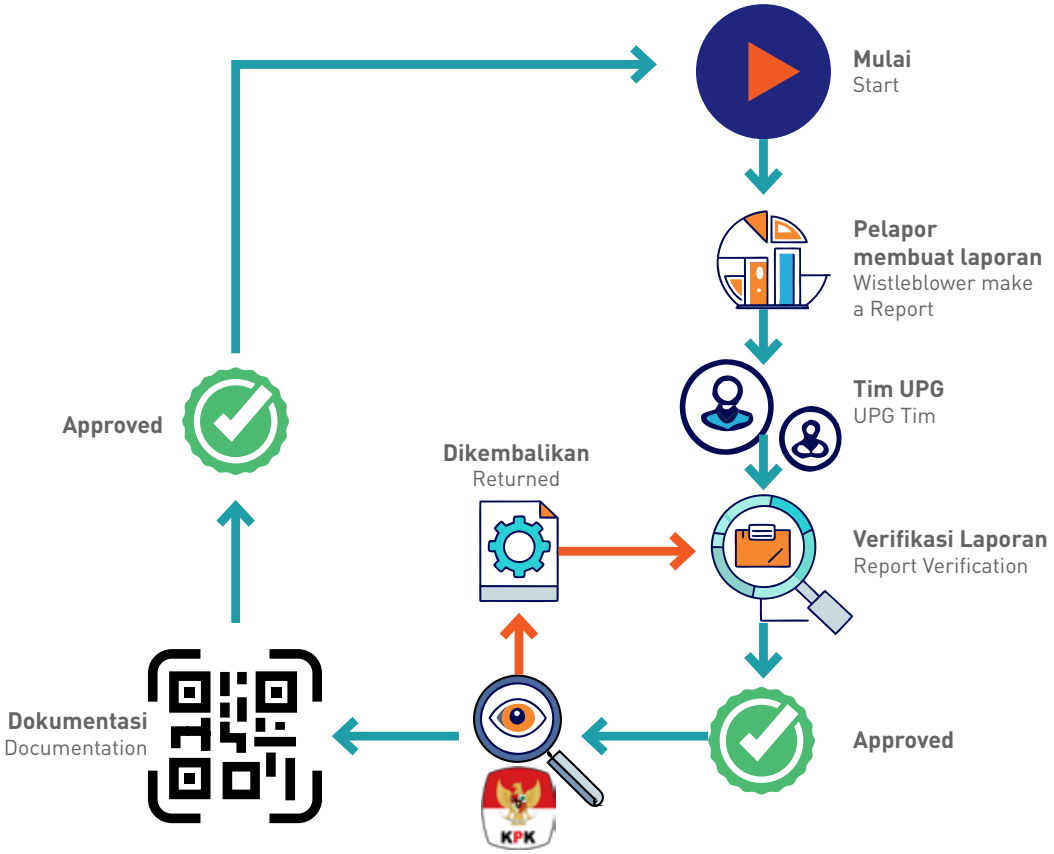

Apabila terdapat penerimaan hadiah/cenderamata dan/atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur perusahaan. Maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perusahaan dengan sepengetahuan atasan langsung masing- masing oleh Insan Perusahaan penerima hadiah/cenderamata selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan formulir penerimaan hadiah/ cenderamata dengan contoh format sebagaimana diatur dalam lampiran pedoman ini;
2. *Whistle Blowing System* yang dikelola PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang mana dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/ jabatan. Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem Whistle blowing System.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak menerima adanya laporan gratifikasi.

If there is a receipt of gifts/souvenirs and/or entertainment outside the limits set by the company. Then Company personnel are required to report this through:

1. The Company's Gratification Control Team/Unit (UPG) with the knowledge of the respective direct supervisor by the Company's personnel receiving the gift/gift no later than 7 (seven) working days from the date of receipt by submitting a gift/gift receipt form with a sample format as stipulated in the attachment to this Guideline;
2. Whistle Blowing System managed by PT Jasa Armada Indonesia Tbk which is carried out if the reporter is a Company Personnel or other parties (customers, work partners and the community) who do not have direct involvement, but know gratification in the Company that has the potential for abuse of authority/position. Reporting through the Whistle Blowing System is carried out in accordance with a separate mechanism that regulates the Whistle blowing System.

INCOMING GRATIFICATION REPORT IN 2024

Throughout 2024, the Company has not received any gratification reports.

Kebijakan Pencegahan Insider Trading

Insider Trading Prevention Policy

Peraturan perundang-undangan mengharuskan setiap Anggota Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk melarang keterlibatan dalam perdagangan orang dalam (*insider trading*) demi kepentingan dan/atau keuntungan pribadi.

Regulation governs that each member of the Board of Directors comply with applicable provisions, including the prohibition of involvement in insider trading for personal interest or gain.

Demikian pula, dalam pengaturan *Board Manual* Anggota Dewan Komisaris, dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat/pekerja instansi pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Similarly, the Board Manual stipulates that members of the Board of Commissioners are prohibited from offering or receiving anything of value directly or indirectly to influence a customer or government official/worker, in accordance with applicable laws and regulations.

Seluruh individu di PT Jasa Armada Indonesia Tbk diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini, dan jika terjadi, diwajibkan melaporkan situasi tersebut kepada atasan langsung untuk mengklarifikasi konflik kepentingan. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mengakibatkan tindakan disipliner yang tegas terhadap individu yang bersangkutan.

All individuals at PT Jasa Armada Indonesia Tbk are expected to avoid conflicts of interest and report any such situations to their immediate superior for clarification. Violations of this code of ethics will result in strict disciplinary action.

Dalam hal ini, penting pula untuk menghindari hubungan pribadi atau keterlibatan emosional dengan kompetitor, vendor, atau bawahan yang dapat mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan, untuk mencegah konflik kepentingan.

It is also crucial to avoid personal or emotional involvement with competitors, vendors, or subordinates that could influence decision-making, thus preventing conflicts of interest.

Insan PT Jasa Armada Indonesia Tbk harus selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan ini harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan, atasan daripada atasan, atau SDM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk personnel must refrain from engaging in business relationships with family members to avoid conflicts of interest. Any transactions involving family members must be discussed with superiors or HR in accordance with regulations.

Selama tahun 2024 dan pada tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat insiden perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan Direksi, Komisaris, atau manajemen pekerja.

Throughout 2024 and in previous years, there were no incidents of insider trading involving Directors, Commissioners, or employee management.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Untuk menjaga kelancaran rantai bisnis dan mencapai target mutu, waktu, serta biaya, Perusahaan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif. Kebijakan pengadaan ini dirancang untuk memastikan setiap proses berlangsung secara optimal, memenuhi standar mutu yang ditetapkan, serta sesuai dengan batas waktu dan biaya yang telah ditentukan.

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan atas Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 25 September 2024.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN

Prosedur dan Tata Cara proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 25 September 2024 dan dijabarkan lebih detail pada Buku Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

PELAKSANAAN KEGIATAN/JENIS PROGRAM DI 2024

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 telah menyelesaikan sebanyak 61 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun jenis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pengadaan tersebut secara garis besar merupakan kebutuhan utama dan rutin yang menunjang kinerja Perusahaan, antara lain Pekerjaan Docking Kapal, Sewa-Menyewa Kapal General

To ensure a smooth business chain and achieve quality, time, and cost targets, the Company implements an effective procurement system. This procurement policy is designed to ensure that every process takes place optimally, meets the set quality standards, and complies with the predetermined time and cost limits.

POLICIES AND GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The policy on the implementation of procurement of goods and services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk refers to the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 dated June 27, 2024 regarding Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 dated September 25, 2024.

PROCUREMENT PROCEDURES AND GUIDELINES

Procedures and Guidelines for the procurement of goods and services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk refer to the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 dated June 27, 2024 regarding Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 dated September 25, 2024 and elaborated in more detail in the Technical Manual on Procedures for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES/TYPES OF PROGRAMS IN 2023

Until the fourth quarter period of 2024, 61 Procurement Contracts for Goods and Services have been completed within PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The procurement of goods and services that have been carried out by the Procurement Division are generally the main and routine needs that support the Company's performance, including Ship Docking, Ship Leasing General Overhaul of Ship Machinery, Consultancy

Overhaul Mesin Kapal, Jasa Konsultansi, , Pembangunan Aplikasi/ Sistem , dan lainnya. Selama kurun waktu Triwulan IV Tahun 2024 total nilai pekerjaan dari seluruh kontrak yang ada mencapai Rp234.392.360.136,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari total nilai HPS/OE sebesar Rp238.047.600.914,60 (dua ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu sembilan ratus empat belas koma enam rupiah). Dari paparan total nilai pekerjaan dan HPS/ OE tersebut dapat kita lihat bahwa Divisi Pengadaan telah berhasil mencapai penghematan biaya sebesar Rp3.655.240.778,60 (tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam rupiah) atau dengan rata – rata persentase di setiap Paket sebesar (3,84%) . Selanjutnya ditinjau dari sisi metode pemilihan penyedia bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang telah diselenggarakan oleh Divisi Pengadaan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tender Terbatas : 10 Kontrak Pekerjaan
2. Seleksi Terbatas : 1 Kontrak Pekerjaan
3. Penunjukan Langsung : 38 Kontrak Pekerjaan
4. Pengadaan Langsung : 12 Kontrak Pekerjaan

Services, Application / System Development, and others. During the Fourth Quarter of 2024, the total value of work from all existing contracts reached Rp234,392,360,136.00 (two hundred thirty-four billion three hundred ninety-two million three hundred sixty thousand one hundred thirty-six rupiah) from the total HPS/OE value of Rp238,047,600,914.60 (two hundred thirty-eight billion forty-seven million six hundred thousand nine hundred fourteen point six rupiah). From the total value of work and HPS/OE, we can see that the Procurement Division has succeeded in achieving cost savings of Rp3,655,240,778.60 (three billion six hundred fifty five million two hundred forty thousand seven hundred seventy eight point six rupiah) or with an average percentage in each package of (3.84%). Furthermore, in terms of provider selection methods, the procurement process of goods and services that has been organized by the Procurement Division uses the following methods:

1. Limited Tender : 10 Job Contracts
2. Limited Selection : 1 Job Contract
3. Direct Appointment : 38 Job Contracts
4. Direct Procurement : 12 Job Contracts

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

Perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengadopsi sistem pelaporan pelanggaran sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi, suap, dan kecurangan. Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini untuk mencegah pelanggaran yang dapat berdampak negatif secara finansial maupun non-finansial serta merusak citra Perusahaan.

Penerapan WBS memungkinkan seluruh Insan Perusahaan dan pihak terkait untuk melaporkan indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku. Sistem ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan dari potensi tindakan balasan, asalkan laporan disampaikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan niat baik.

Sebagai bagian dari kebijakan tata kelola, Perusahaan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar, dan Penerapan Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana diatur dalam dokumen Nomor: HK.56/4/10/5/MS-21

The Company practices good governance principles by implementing a whistleblowing system as a preventive measure against corruption, bribery, and fraud. The Whistleblowing System (WBS) policy serves as an early detection mechanism to prevent violations that can have negative financial and non-financial impacts and damage the Company's image.

The implementation of WBS allows all Company personnel and related parties to report indications of violations of applicable ethical values. This system is designed to maintain the confidentiality of the reporter's identity and provide protection from potential retaliation, provided that the report is submitted with reliable evidence and good intentions.

As part of the governance policy, the Company refers to the Guidelines for Gratification Management, Illegal Levy Reporting, and Whistleblowing System (WBS) Implementation within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as stipulated in document Number: HK.56/4/10/5/MS-21

tertanggal 4 Oktober 2021. Kebijakan ini menetapkan sistem pelaporan pelanggaran yang terstruktur guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional Perusahaan.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perusahaan secara rutin menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh Insan IPCM. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif *IPCM Bersih*, yang turut diperkuat oleh Manajemen melalui pemanfaatan saluran pelaporan resmi yang tersedia di lingkungan Pelindo Grup, yaitu *Pelindo Bersih*.

Perusahaan secara konsisten mengedukasi baik pihak internal maupun eksternal terkait penggunaan saluran pelaporan ini. Sistem pelaporan tersebut dikelola oleh pihak independen, guna menjamin kerahasiaan informasi yang disampaikan serta identitas pelapor.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup Perusahaan digambarkan dalam bagan berikut.

dated October 4, 2021. This policy establishes a structured whistleblowing system to ensure transparency and accountability in the Company's operations.

SOCIALIZATION OF THE VIOLATION REPORTING SYSTEM

The Company regularly conducts socialization to all IPCM personnel to improve their understanding of the Whistleblowing System policy. This activity is part of the Clean IPCM initiative, which is also strengthened by Management through the utilization of official reporting channels available within the Pelindo Group, namely Pelindo Bersih.

The Company consistently educates both internal and external parties regarding the use of this reporting channel. The reporting system is managed by an independent party, to ensure the confidentiality of the information submitted and the identity of the reporter.

MECHANISM FOR SUBMITTING VIOLATION REPORTS

The Violation Reporting System mechanism within the Company is depicted in the following chart.

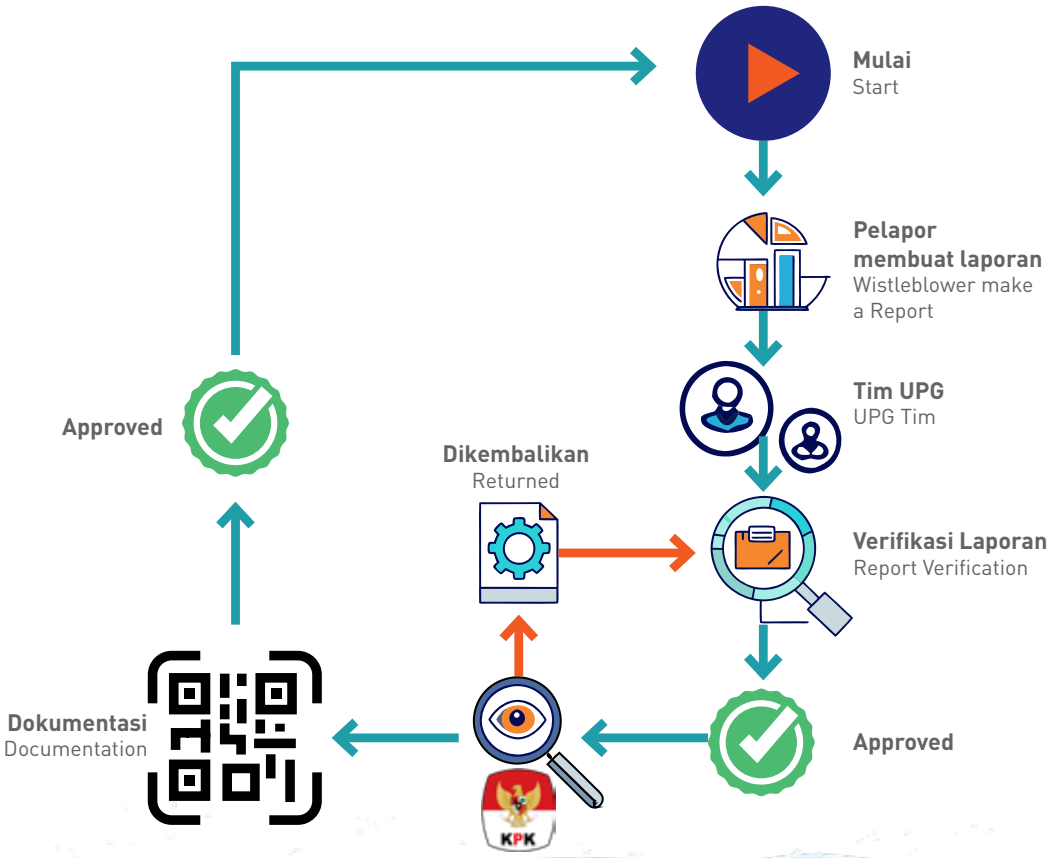

Apabila terdapat penerimaan hadiah/cenderamata dan/atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan. Maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perusahaan dengan sepengetahuan atasan langsung masing-masing oleh Insan Perusahaan penerima hadiah/ cenderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan formulir penerimaan hadiah/ cenderamata.
2. *Whistleblowing System* yang dikelola PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang mana dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/ jabatan. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem *Whistleblowing System* yang dapat diakses melalui:

If Company Personnel receive gifts/souvenirs and/or entertainment exceeding the set limits, they must report this through:

1. The Company's Gratification Control Team/Unit (UPG), informing their respective direct superiors no later than 7 (seven) working days from the date of receipt. This is done by submitting the gift/souvenir acceptance form.
2. The Whistleblowing System managed by PT Jasa Armada Indonesia Tbk is applicable if the reporter is Company personnel or other parties (customers, work partners, and the public) who do not have direct involvement but are aware of gratification in the Company, which has the potential for abuse of authority/position. Reporting via the Whistleblowing System follows a separate mechanism accessible through:

https://pelindobersih.whistleblowing.link/
+62 21 2782 2345
+62 21 2782 3456
+62 811 933 2345 / +62811 9511 665
pelindobersih@whistleblowing.link
Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Pelaporan dapat dilakukan dengan atau tanpa menyebutkan identitas (anonim). Bagi pelapor yang mencantumkan identitasnya, manajemen memberikan perlindungan serta kemudahan dalam proses tindak lanjut jika diperlukan informasi tambahan. Melalui mekanisme ini, setiap Insan Perusahaan maupun stakeholder yang melaporkan pelanggaran dijamin kerahasiaan identitasnya serta dilindungi dari kemungkinan tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan.

PROTECTION FOR REPORTERS

The reporting can be done with or without mentioning identity (anonymous). For reporters who state their identity, management provides protection and ease in the follow-up process if additional information is needed. Through this mechanism, every employee of the Company and stakeholders who report violations are guaranteed the confidentiality of their identity and are protected from possible retaliation by the reported party.

PROSES PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Dalam implementasi Whistleblowing System, Perusahaan memanfaatkan infrastruktur yang disediakan oleh induk perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek kegiatan bisnis dan program kerja.

PROCESS FOR HANDLING VIOLATION COMPLAINTS

The Company utilizes the infrastructure provided by its parent company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), to implement the Whistleblowing System. This step was taken as part of the commitment to internalize GCG principles in every aspect of business activities and work programs.

PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi mengacu pada SK No. HK-56/29/5/2/MS-20 Tanggal 29 Mei 2020, yang terdiri dari:

1. Ketua : Sekretaris Perusahaan
2. Wakil Ketua : Kepala Satuan Pengawas Internal
3. Anggota : VP Hukum & Asuransi VP SDM dan Budaya Perusahaan

VIOLATION REPORTING SYSTEM MANAGER

The Company has established a Gratification Control Unit referring to Decree No. HK-56/29/5/2/MS-20 Dated May 29, 2020, which consists of:

1. Chairman : Corporate Secretary
2. Vice Chairman : Head of the Internal Audit Unit
3. Member : VP Legal & Insurance, VP HR and Corporate Culture

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES SERTA SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES TAHUN 2024

Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan masuk, sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini.

NUMBER OF COMPLAINTS INCOMING AND PROCESSED AND SANCTIONS/FOLLOW UP FOR COMPLAINTS THAT HAVE COMPLETED IN 2024

During 2024, there were no incoming reports, as attached in the table below.

	2024	2023
Jumlah pengaduan yang masuk Incoming reports	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang diproses Processed reports	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang telah selesai Settled Reports	Nihil None	Nihil None

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Hingga akhir tahun 2024, perusahaan tidak mengambil tindakan atau menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan praktik *Bad Corporate Governance* sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Until the end of 2024, the Company has not carry out actions or policies related to Bad Corporate Governance practices as listed below:

Transparansi Praktik *Bad Corporate Governance* Tahun 2024
Bad Corporate Governance Practice in 2024

No.	Praktik Practice	Keterangan Description
1	Laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan Report on Company activities that harm the environment	Nihil None
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan Material legal cases involving the Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners currently in office are not disclosed in the Annual Report	Nihil None
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan Non-compliance in the disclosure of tax obligation fulfillment	Nihil None
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Non-conformity in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK	Nihil None
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan No disclosure of operating segments in the Financial Statements	Nihil None
6	Kasus terkait buruh dan karyawan Cases related to labor and employees	Nihil None
7	Ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital Discrepancies between the Printed Annual Report and the Digital Annual Report	Nihil None

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of the Public Company Corporate Governance Guidelines

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, regulasi ini menetapkan pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka yang mencakup 5 aspek, 8 prinsip utama, dan 25 rekomendasi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berikut adalah implementasi aspek dan prinsip tata kelola perusahaan di IPCM. Adapun capaian hasil mapping GCG berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka untuk masing-masing aspek dijelaskan pada pembahasan penilaian Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015 pada Laporan Tahunan ini.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for the Governance of Public Companies, these regulations establish governance guidelines for public companies covering 5 aspects, 8 core principles, and 25 recommendations for the implementation of Good Corporate Governance principles. The following is the implementation of governance aspects and principles at IPCM. The achievements of the GCG mapping results based on the Public Company Governance Guidelines for each aspect are described in the GCG Implementation Assessment for Financial Year 2024 section of this Annual Report, based on the Public Company Governance Guidelines POJK 21/POJK.04/2015.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan	Status
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham.	Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024.	Terpenuhi (Comply)
		1.2 Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024.	Terpenuhi (Comply)
	Prinsip 2: Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor, yaitu Layanan e-PPID adalah layanan online yang ditujukan untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	Terpenuhi (Comply)
		2.2 Kebijakan komunikasi harus diungkapkan di Situs Web.	Kebijakan komunikasi telah diungkapkan di Situs Web, yaitu https://ipcmarine.co.id/hubungan-investor/	Terpenuhi (Comply)

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan	Status
		2.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun, yaitu https://ipcmarine.co.id/pengumuman__pemanggilan/	Terpenuhi (Comply)
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris	3.1 Kondisi Perseroan senantiasa menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini ada 4 Orang dengan jumlah Anggota Komisaris Independen ada 2.	Terpenuhi (Comply)
		3.2 Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Jumlah anggota Dewan komisaris telah memperhatikan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.	Terpenuhi (Comply)
	Prinsip 4: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: HK-56/4/10/3/MS-21 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Hal 62.	Terpenuhi (Comply)
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (Self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (Self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi (Comply)
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Berdasarkan Permen BUMN 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/ART Perusahaan, bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris dapat diberhentikan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri makan akan diputuskan dalam mekanisme RUPS.	Terpenuhi (Comply)

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan	Status
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Nomor: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris.	Terpenuhi (Comply)
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta efektivitas dalam pengambilan Keputusan.	Karena kondisi Perseroan dan pengambilan keputusan yang efektif senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Direksi.	Terpenuhi (Comply)
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatika keberagaman keahlian pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Direksi saat ini berdasarkan kajian dokumen CV para anggota Direksi dan berdasarkan konfirmasi diketahui sudah mencerminkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.	Terpenuhi (Comply)
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Perseroan memiliki anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi (Comply)
	Prinsip 6: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi memiliki kebijakan self-assessment yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau dan dievaluasi oleh komite Nominasi dan Remunerasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.	Terpenuhi (Comply)

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan	Status
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (Self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi, telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi (Comply)
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/ART PT JAI, Tbk. Bahwa setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka akan diberhentikan sebagai anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS.	Terpenuhi (Comply)
Aspek 4: Partisipas Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading dalam Pedoman Etik Bisnis yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris tanggal 15 April 2022.	Terpenuhi (Comply)
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti penipuan.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading dalam Pedoman Etik Bisnis yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris tanggal 15 April 2022.	Terpenuhi (Comply)
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Perseroan telah melakukan seleksi pemasok (vendor) berdasarkan SOP/kebijakan terkait pengadaan yang sudah ditetapkan Perseroan. Perseroan juga melakukan evaluasi pemasok (vendor) berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.	Terpenuhi (Comply)
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Perseroan telah memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur. Hal ini dikelola oleh Divisi keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditur. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum.	Terpenuhi (Comply)
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Perseroan telah memiliki kebijakan sistem whistleblowing system (WBS) yaitu Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistleblowing System yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT JAI, Tbk tanggal 15 April 2022.	Terpenuhi (Comply)
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Perseroan telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi yaitu berupa tantiem dan karyawan dalam bentuk bonus (reward).	Terpenuhi (Comply)

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan	Status
Aspek 5: Keterbukaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Disamping menggunakan situs web resmi perusahaan (https://ipcmarine.co.id/) dan pelaporan secara elektronik seperti IDXNet dan OJK Reporting. Perseroan juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti IG, LinkdIn, Twiter/ Threads untuk mengungkapkan informasi tentang perseroan.	Terpenuhi (Comply)
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (Comply)

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** xx		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi**		
Rekomendasi			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: • berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; • beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; • berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta • berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience)	*Apply*	Direksi menjalankan kepemimpinan perusahaan sesuai dengan tata kelola peraturan yang berlaku untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang telah disampaikan kepada pemegang saham dengan arahan dan masukan dari Dewan Komisaris The Board of Directors leads the company in accordance with the applicable governance regulations to achieve the company's vision and mission, as well as the company's Long-Term Plan (RJPP), which has been communicated to shareholders with guidance and input from the Board of Commissioners.
Panduan			
1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas.	*Apply*	Direksi PT Pelabuhan Indonesia Tbk berkomitmen mewujudkan standar etika bisnis dengan mengimplemtasikan kebijakan Kode Etik Bisnis Perusahaan Nomor HK.56/4/10/4/MS- 21 Serta implementasinya, Direksi dan Dewan Komisaris telah mendatangani pakta integritas The Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia Tbk is committed to realizing business ethics standards by implementing the Company's Business Code of Ethics Policy Number HK.56/4/10/4/MS-21. As part of its implementation, the Board of Directors and the Board of Commissioners have signed an integrity pact.
1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi.	*Apply*	Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi untuk melibatkan karyawan perusahaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi The Company regularly conducts socialization to engage employees in behaving according to corporate values and high business ethics standards.
1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.	*Apply*	Dalam rapat Direksi perusahaan terdapat monitoring Implementasi perencanaan strategis tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. In the company's Board of Directors meetings, there is monitoring of the implementation of the strategic planning for corporate social responsibility and environmental responsibility.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional.	*Apply*	Secara rutin Direksi memonitoring pencapaian kinerja finansial dan operasional perusahaan dan melaporkan kinerja melalui Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2024. The Board of Directors regularly monitors the company's financial and operational performance and reports the performance through the Company's 2024 Management Report.
Rekomendasi			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	*Apply*	Perusahaan melakukan pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan menyertakannya kepada Visi, Misi dan RJPP. The Company utilizes innovation and technology by incorporating them into its Vision, Mission, and Long-Term Corporate Plan (RJPP).
Panduan			
1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.	*Apply*	Dalam penyusunan RJPP dan RKAP Perusahakan Inovasi dan Teknologi Mutakhir untuk meningkatkan value serta daya saing perusahaan dengan tetap memperhatikan harapan pemangku kepentingan dan TJSL In the preparation of the RJPP and RKAP, the company incorporates cutting-edge innovation and technology to enhance value and competitiveness, while also considering the expectations of stakeholders and TJSL.
1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi	*Apply*	Budaya Inovasi di perusahaan sudah rutin dilakukan, dimana Pelindo Group setiap tahunnya melaksanakan Inovation Award dan pada penyusunan RJPP dan RKAP Pean, Direksi menyertarusahaan memperhatikan aspek inovasi. The culture of innovation within the company is regularly implemented, with Pelindo Group holding the Innovation Award annually. In the preparation of the RJPP and RKAP, the Board of Directors ensures that innovation aspects are taken into account.
1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra.	*Apply*	Perusahaan berupaya menjadikan inovasi sebagai nilai tambah yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan produksi dan operasi serta berkolaborasi dengan stakeholder perusahaan. The company strives to make innovation an added value that can be implemented to improve production and operations, as well as collaborate with the company's stakeholders.
Rekomendasi			
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	*Apply*	Direksi PT JAI Tbk berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko dimana pada tahun pelaporan disesuaikannya struktur organisasi untuk menguatkan implementasi manajemen risiko untuk melindungi nilai dalam pencapaian target perusahaan. The Board of Directors of PT JAI Tbk is committed to the implementation of risk management, where during the reporting year, the organizational structure was adjusted to strengthen the implementation of risk management to protect value in achieving the company's targets.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	*Apply*	Penyusunan laporan Keuangan Perusahaan telah sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang berlaku dan dilakukan sesuai periode yang ditetapkan dengan informasi yang akurat. The preparation of the company's financial statements has been in accordance with the applicable accounting policies and conducted within the designated period with accurate information.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
1.1.4	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai.	*Apply*	Vice President Sekretaris Perusahaan sebagai pengungkap informasi perusahaan diangkat dengan memperhatikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidangnya serta disetiap tahunnya melaksanakan pengembangan kompetensi yang relevan dan bereputasi. The Vice President of Corporate Secretary, as the company's information discloser, is appointed based on knowledge, skills, and experience in the field, and every year, relevant and reputable competency development is carried out.
1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain Pendapat Komite Audit Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan.	*Apply*	Laporan Keuangan Perusahaan senantiasa diaudit oleh auditor independen, yaitu Kantor Akuntan Publik, sehingga pelaporan keuangan Perusahaan dan pengungkapannya tepat waktu dan akurat atas sema informasi yang material tentang Perusahaan. The Company's financial statements are always audited by an independent auditor, namely a Public Accounting Firm, ensuring that the financial reporting and disclosures are timely and accurate for all material information about the Company.
1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi.	*Apply*	Perusahaan memastikan bahwa laporan keuangan Audited perusahaan telah di publis di Annual Report dan website perusahaan serta disampaikan kepada regulator terkait. The Company ensures that its audited financial statements have been published in the Annual Report and on the company's website, and are also submitted to the relevant regulators.
Rekomendasi 5			
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, kami juga berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan Pelindo telah dipublish pada website Perusahaan. The company has prepared a Sustainability Report referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which became effective for issuers and public companies on January 1, 2021. In addition, we also adhere to the GRI Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) – an organization established by the Global Reporting Initiative (GRI) to oversee the development of sustainability reporting standards. Pelindo's sustainability report has been published on the company's website.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, kami juga berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) The company has prepared a Sustainability Report referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which became effective for issuers and public companies on January 1, 2021. In addition, we also adhere to the GRI Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) – an organization established by the Global Reporting Initiative (GRI).
1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan.	*Apply*	Laporan Keberlanjutan mencerminkan praktik Perusahaan untuk mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan Visi Misi Perusahaan. The Sustainability Report reflects the Company's practices in supporting the creation of sustainable value in accordance with the regulations and the Company's Vision and Mission.
Rekomendasi 6			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	*Apply*	Direksi PT JAI Tbk membuat kebijakan dalam RJPP terkait kerangka kerja governansi teknologi informasi (TI) yang selaras dengan IT Masterplan Pelindo Group 2022-2025. The Board of Directors of PT JAI Tbk has established a policy in the RJPP regarding the information technology (IT) governance framework that aligns with the Pelindo Group IT Masterplan 2022-2025.
Panduan			
1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal.	*Apply*	Terdapat begian dalam Struktur Perusahaan yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal di Perusahaan. There is a division within the Company's Structure that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources in the Company.
1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI.	*Apply*	Dalam implementasi manajemen risiko diperusahaan, salah satunya termasuk terkait IT yang dilakukan monitoring mitigasi. In the implementation of risk management within the company, one of the aspects includes IT, which is monitored for mitigation.
1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data.	*Apply*	PT JAI Tbk Memiliki kebijakan terkait IT yang telah disahkan oleh Direksi dan disosialisasikan kepada seluruh lini Perusahaan yang salah satunya adalah perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. PT JAI Tbk has a policy related to IT that has been approved by the Board of Directors and communicated to all levels of the company, one of which is the protection of data security and confidentiality.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi 7			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.	*Explain*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk menjalankan kegiatan usaha tidak berlandaskan prinsip syariah PT Jasa Armada Indonesia Tbk conducts its business activities without being based on sharia principles.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	*Apply*	Direksi dan Dewan Komisaris PT JAI Tbk telah memiliki kebijakan Board Manual Perusahaan yang terus dijalankan dan ditinjau secara periodik. The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT JAI Tbk have a Company Board Manual policy that is continuously implemented and reviewed periodically.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	*Apply*	Telah tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Kebijakan Board Manual. It is outlined in the Company's Articles of Association and the Board Manual Policy.
1.2	**Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya**		
Rekomendasi 1			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan evaluasi efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur Perusahaan The Board of Commissioners conducts an evaluation of the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director of the Company.
Panduan			
1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris.	*Apply*	Direksi memiliki kebijakan self-assessment yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau dan dievaluasi oleh komite Nominasi dan Remunerasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors has a self-assessment policy that is conducted periodically based on their KPIs, the results of which are reviewed and evaluated by the Nomination and Remuneration Committee and reported to the Board of Commissioners.
1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris.	*Apply*	Setiap tahunnya disusun Kontrak Kinerja Direksi dan KPI yang dimonitoring dan evaluasi oleh Dewan Komisaris. Each year, a Performance Contract for the Board of Directors and KPIs are established, which are monitored and evaluated by the Board of Commissioners.
1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada direktur, komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.	*Explain*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk tidak memberikan remunerasi dalam bentuk saham kepada direktur, komisaris, dan karyawan PT Jasa Armada Indonesia Tbk does not provide remuneration in the form of shares to the directors, commissioners, and employees.
1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.	*Apply*	Perpanjangan masa jabatan Direktur didasari dengan evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya The extension of the Director's term is based on a satisfactory performance evaluation of their contributions.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi 2			
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	*Apply*	Komite Nominasi dan Remunerasi menentukan kriteria dan memonitoring kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya sebagaimana charter dan agenda rapat. The Nomination and Remuneration Committee determines the criteria and monitors the performance of the President Director and other members of the Board of Directors in accordance with the charter and meeting agenda.
Panduan			
1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan.	*Apply*	Kinerja Direktur Utama diukur dengan kriteria yang telah ditetapkan dan diberikan insentif terhadap pencapaiannya. The performance of the President Director is measured against the established criteria, and incentives are provided based on their achievements.
1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama.	*Apply*	Hasil pengukuran kinerja disampaikan kepada Direktur Utama dalam Rapat Gabungan. The performance measurement results are presented to the President Director in the Joint Meeting.
1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara objektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.	*Apply*	Direktur utama mengevaluasi dan memonitoring kinerja anggota Direksi lainnya dan melaporkannya kepada Dewan komisaris. The President Director evaluates and monitors the performance of other members of the Board of Directors and reports it to the Board of Commissioners.
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**		
Rekomendasi 1			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memberikan telaah terhadap penyusunan RJPP 2023-2027 yang disampaikan oleh Direksi The Board of Commissioners has reviewed the preparation of the 2023-2027 Long-Term Corporate Plan (RJPP) submitted by the Board of Directors.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	*Apply*	Keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah di ungkapkan pada laporan tahunan PT JAI Tbk 2023 pada bab Tata Kelola Perusahaan. Decisions that require the approval of the Board of Commissioners have been disclosed in the 2023 Annual Report of PT JAI Tbk in the Corporate Governance section.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	*Apply*	Telah terdokumentasi dalam dokumen usulan Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS. It has been documented in the proposal document from the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the GMS.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	*Apply*	Kebijakan suksesi telah terdapat dalam charter Komite Nominasi dan Remunerasi dan terdokumentasi dalam rapat komite nominasi dan renumerasi. The succession policy is included in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee and is documented in the meetings of the Nomination and Remuneration Committee.
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	*Apply*	Dewan Komisaris mengusulkan penetapan remunerasi kepada RUPS berdasarkan usulan Komite Nominasi & Remunerasi setelah dikonsultasikan kepada Pemegang Saham Utama. The Board of Commissioners proposes the determination of remuneration to the GMS based on the proposal of the Nomination & Remuneration Committee after being consulted with the Majority Shareholder.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan review atas kebijakan-kebijakan perangkat GCG PT JAI Tbk. The Board of Commissioners conducts a review of the GCG framework policies of PT JAI Tbk.
Panduan			
1.3.6.1	Dewan komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen.	*Apply*	Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan assessment GCG menggunakan parameter ACGS dan POJK yang pantau juga oleh Dewan Komisaris. In 2024, the company conducted a GCG assessment using ACGS parameters and POJK, which was also monitored by the Board of Commissioners.
Rekomendasi			
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.	*Apply*	Terdokumentasi dalam Charter / kebijakan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit serta dalam risalah rapat. Documented in the Charter/policies of the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee, as well as in the meeting minutes.
1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (risk appetite) korporasi, kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (early warning signals) atas risiko material, kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun.	*Apply*	Dalam agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi salah satunya membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan. One of the items on the agenda of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors is the discussion of the implementation of risk management in the Company.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal.	*Apply*	Dalam agenda rapat melalui Komite Pemantau Risiko membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan. The agenda of the meeting through the Risk Monitoring Committee discusses the implementation of risk management in the Company.
1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat	*Apply*	Dalam agenda rapat melalui Komite Pemantau Risiko membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan. The agenda of the meeting through the Risk Monitoring Committee discusses the implementation of risk management in the Company.
1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi	*Apply*	Rapat membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan dilakukan secara periodik. The meeting discussing the implementation of risk management in the Company is conducted periodically.
Rekomendasi			
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.	*Apply*	Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, oversees the financial statements.
Panduan			
1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif.	*Apply*	Direksi meminta masukan dan arahan kepada Dewan Komisaris atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan. The Board of Directors seeks input and guidance from the Board of Commissioners regarding the preparation of the company's financial statements.
Rekomendasi			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.	*Apply*	Pada Laporan Tahunan dan laporan keberlanjutan 2023 terdapat pengesahan dari Dewan Komisaris. The 2023 Annual Report and Sustainability Report include an endorsement from the Board of Commissioners.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	*Apply*	Kebijakan Board Manual dilakukan tinjauan secara periodik. The Board Manual policy is reviewed periodically.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	*Apply*	Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dalam Board Manual. The Company has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners in the event of involvement in financial crimes, as stipulated in the Board Manual.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.	*Apply*	Komisaris Independen memberikan masukan dalam setiap rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan maupun rapat bersama komite dibawah Dewan Komisaris. The Independent Commissioner provides input at every Board of Commissioners meeting, joint meeting, and meetings with committees under the Board of Commissioners.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: a) mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; b) dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; c) mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.
1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.
1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan dan pada tahun pelaporan tidak ada komisaris independen yang berakhir masa jabatannya. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual, and in the reporting year, there were no independent commissioners whose term of office ended.
Rekomendasi			
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.
Panduan			
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi.	*Apply*	Tertuang dalam Laporan Tahunan pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris, tugas Dewan Komisaris It is outlined in the Annual Report in the Corporate Governance Chapter, under the Subchapter of the Board of Commissioners, which details the duties of the Board of Commissioners.
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris.	*Apply*	Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' Decree on the Allocation of Duties of the Board of Commissioners.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.
1.4	**Pembentukan Komite**		
Rekomendasi			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	*Apply*	Dewan Komisaris memiliki komite sebagai berikut : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi The Board of Commissioners has the following committees: 1. Audit Committee 2. Risk Monitoring Committee 3. Nomination and Remuneration Committee
Panduan			
1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.	*Apply*	Komite yang dimiliki oleh organ Dewan Komisaris telah sesuai dengan aturan perundangan. The committees owned by the Board of Commissioners are in accordance with the applicable laws and regulations.
Rekomendasi			
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independent.	*Apply*	Komite Audit telah memiliki Piagam Charter. The Audit Committee has a Charter.
Panduan			
1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan.	*Apply*	Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi di PT JAI Tbk telah memiliki piagam/ charter. The Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee at PT JAI Tbk have their own charters.
Rekomendasi			
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	*Apply*	Ketua Komite Audit PT JAI Tbk bukan merupakan Komisaris Utama The Chairperson of the Audit Committee at PT JAI Tbk is not the President Commissioner.
1.5	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya**		

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.	*Apply*	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap komite sebagaimana tertuang dalam agenda rapat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has conducted an evaluation of the committees as outlined in the Board of Commissioners' meeting agenda.
Panduan			
1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self -assessment) untuk menilai kinerja sebagai dewan secara keseluruhan.	*Apply*	Metode self assessment dimungkinkan dalam menilai kinerja kolegial Dewan Komisaris. The self-assessment method is possible for evaluating the collective performance of the Board of Commissioners.
1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris.	*Apply*	Tolok ukur penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan sebelum dijalankan dan diukur. The performance evaluation criteria for the Board of Commissioners have been established before being implemented and measured.
1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.	*Apply*	Perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris salah satunya didasarkan oleh evaluasi kinerja yang dilakukan. The extension of the term of office for the Board of Commissioners is partly based on the performance evaluation conducted.
1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur.	*Apply*	Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara self assessment dan dibantu konsultan eksternal independen secara periodik. Performance evaluations are conducted through self-assessment and supported by an independent external consultant periodically.
1.6	**Benturan Kepentingan**		
Rekomendasi			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	*Apply*	Pada tahun pelaporan terdapat 1 anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam kebijakan Board Manual Perusahaan In the reporting year, there was 1 member of the Board of Directors who held multiple positions and had obtained approval from the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Board Manual policy.
Panduan			
1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the issue of dual positions held by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Rekomendasi			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	*Apply*	Aturan terkait penandatangan telah diatur dalam Peraturan terkait rangkap jabatan juga diatur dalam Peraturan Direksi terkait Board Manual. Pada tahun pelaporan, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan penandatangan pakta integritas. The rules regarding signing authority have been regulated in the regulations, and dual positions are also governed by the Board Manual regulations. In the reporting year, the Board of Commissioners and the Board of Directors have signed an integrity pact.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait benturan kepentigan dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding conflicts of interest in decision-making by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait benturan kepentingan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding conflicts of interest for the Board of Commissioners.
1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait rangkap jabatan Direksi. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding the dual positions of the Board of Directors.
1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding dual positions held by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**		
Rekomendasi			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	*Apply*	Aturan mengenai pelatihan ditetapkan dalam kebijakan Board Manual dan sepanjang tahun pelaporan Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan beberapa pelatihan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan PT JAI Tbk. The rules regarding training are set forth in the Board Manual policy, and throughout the reporting year, the Board of Commissioners and the Board of Directors have undergone several training sessions coordinated by the Corporate Secretary of PT JAI Tbk.
Panduan			
1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka.	*Apply*	Pada tahun pelaporan telah dilaksanakan pengenalan perusahaan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat pada bulan Septemberi 2024 yaitu Bpk F Budi Prayitno yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. In the reporting year, an introduction to the company was conducted for the newly appointed Board of Commissioners member, Mr. F Budi Prayitno, in September 2024, coordinated by the Corporate Secretary.
1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.	*Apply*	Aturan mengenai pelatihan ditetapkan dalam kebijakan Board Manual dan sepanjang tahun pelaporan Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan beberapa pelatihan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan PT JAI Tbk. The rules regarding training are established in the Board Manual policy, and throughout the reporting year, the Board of Commissioners and the Board of Directors have participated in several training sessions coordinated by the Corporate Secretary of PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi.	*Apply*	Direksi dan Dewan Komisaris membahas perkembangan terkini perihal perusahaan dalam Rapat Gabungan sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat. The Board of Directors and the Board of Commissioners discuss the latest developments regarding the company in the Joint Meeting, as documented in the meeting minutes.
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**		
2.1	**Komposisi Direksi**		
Rekomendasi			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	*Apply*	Dilakukan rapat khusus pada Komite Nominasi dan remunerasi untuk melakukan validasi atas usulan yang disampaikan Dewan Komisaris. A special meeting was held in the Nomination and Remuneration Committee to validate the proposals submitted by the Board of Commissioners.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait seleksi jabatan Anggota Direksi. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the selection of the Board of Directors members.
Panduan			
2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: identitas calon dan alasan pengangkatan; kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; lama masa jabatan; kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan setiap kepemilikan saham dalam korporasi	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait calon seleksi jabatan Anggota Direksi. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the selection process for candidates for the position of Board of Directors members.
Rekomendasi			
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	*Apply*	Keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan, pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris. serta dituangkan pula pada Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk Diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report, in the GCG chapter, under the sub-chapter on the Board of Commissioners, and is also outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris.	*Apply*	Keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan, pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris. serta dituangkan pula pada Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk Diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report, in the GCG chapter, under the sub-chapter on the Board of Commissioners, and is also outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.
Rekomendasi			
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait transparansi seleksi jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations regarding the transparency of the selection process for members of the Board of Commissioners.
Panduan			
2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: identitas calon dan alasan pengangkatan; kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; lama masa jabatan; kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk komisaris baru); dan setiap kepemilikan saham dalam korporasi	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait transparansi seleksi jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has provisions regarding the transparency of the selection process for members of the Board of Commissioners.
2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan.	*Apply*	Seleksi calon Dewan Komisaris tahun pelaporan menggunakan internal Pelindo Group. The selection of candidates for the Board of Commissioners during the reporting year used internal personnel from the Pelindo Group.
Rekomendasi			
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.	*Apply*	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham. The implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process is conducted by the shareholders.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.	*Apply*	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham. The implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process is conducted by the shareholders.
Panduan			
2.1.6.1	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi.	*Apply*	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan, Komisaris Utama memiliki pengalaman dibidang kepelabuhanan. The implementation has been carried out in accordance with the provisions, and the President Commissioner has experience in the port sector.
2.1.6.2	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi.	*Apply*	Penentuan jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi Perusahaan. The determination of the number of the Board of Commissioners has been in accordance with the provisions and the conditions of the Company.
Rekomendasi			
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.	*Apply*	Jumlah anggota Dewan Komisaris saat tahun pelaporan ada 4 Orang dengan jumlah Anggota Komisaris Independen ada 2. The number of members of the Board of Commissioners during the reporting year is 4, with 2 Independent Commissioners.
Panduan			
2.1.7.1	Mantan direktur utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the positions of the members of the Board of Commissioners.
2.1.7.2	Mantan komisaris independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the positions of the members of the Board of Commissioners.
2.1.7.3	Masa jabatan komisaris independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (Sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang komisaris independen dapat terus menjabat hanya sebagai komisaris.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the positions of the members of the Board of Commissioners.
Rekomendasi			
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	*Apply*	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Nomor: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration functions has developed a succession policy for the Nomination process of the Board of Directors members, as outlined in the Board of Commissioners' Decree of PT Jasa Armada Indonesia Number: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 concerning the Supervisory and Advisory Policy of the Board of Commissioners.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
2.1.8.1	• Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: • menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: • Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada dewan komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya. • Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota komisaris dan anggota komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan dewan komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut. • secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi direksi dan dewan komisaris. • menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite. • mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	*Apply*	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Nomor: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration functions has developed a succession policy for the Nomination process of the Board of Directors members, as stated in the Board of Commissioners' Decree of PT Jasa Armada Indonesia Number: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 concerning the Supervisory and Advisory Policy of the Board of Commissioners.
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**		

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has provisions related to the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Panduan			
2.2.1.1	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Renumerasi Pekerja di lingkungan PT JAI Tbk yang mengacu kepada Kebijakan Pelindo Group. As per the remuneration policy for employees within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, it refers to the Pelindo Group's policy.
2.2.1.2	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (clawback).	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy and the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
2.2.1.3	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Rekomendasi			
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Panduan			
2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk Komisaris Independen Tidak menerima opsi saham dikaitkan dengan kinerja atau bonus. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Independent Commissioners do not receive stock options linked to performance or bonuses.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Panduan			
2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: • menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan, • mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang. • secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak direktur/komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik, • mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi direktur dan komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk direktur dan komisaris yang hampir pensiun. • menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite. • mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi PT JAI Tbk As per the Board Manual policy and the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk
3	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris**		
3.1	**Sifat Hubungan Kerja**		
Rekomendasi			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	*Apply*	Terdapat Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, dimana di dalam nya dibahas mengenai hal-hal strategis. There is a Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors, where strategic matters are discussed.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	*Apply*	Buku RJPP disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. The RJPP book is submitted to the Board of Commissioners for approval.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
Panduan			
3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: • memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi • memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, • Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah • Mengatur dan memfasilitasi orientasi direktur/komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional direktur/komisaris/anggota komite • Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
3.1.3.2	Setiap direktur dan komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan sekretaris korporat dan sebaliknya.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
3.2	**Akses informasi Dewan Komisaris**		

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
Panduan			
3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual of PT JAI Tbk.
3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual of PT JAI Tbk.
3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual of PT JAI Tbk.
3.3	**Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi**		
Rekomendasi			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk terkait kepemilikan saham Perusahaan. As per the Board Manual policy of PT JAI Tbk regarding the ownership of the Company's shares.
Panduan			
3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk terkait kepemilikan saham Perusahaan. As per the Board Manual policy of PT JAI Tbk regarding the ownership of the Company's shares.
3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk terkait kepemilikan saham Perusahaan. As per the Board Manual policy of PT JAI Tbk regarding the ownership of the Company's shares.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi.	*Apply*	Setiap informasi material yang akan diungkapkan telah disampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentadi pada agenda rapat gabungan. Any material information that will be disclosed has been communicated to the Board of Commissioners in advance, as documented in the joint meeting agenda.
4	**Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab**		
4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku**		
Rekomendasi			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; • Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; • Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; • Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; • Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. • Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. • Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. • Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. • Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. It is outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual dan Pengelolaan Gratifikasi PT JAI Tbk. It is outlined in the Board Manual and the Gratification Management policy of PT JAI Tbk.
Panduan			
4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Pengelolaan Gratifikasi dan Whistleblowing System PT JAI Tbk It is outlined in the Gratification Management and Whistleblowing System policies of PT JAI Tbk.
4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Pengelolaan Gratifikasi dan Whistleblowing System PT JAI Tbk It is outlined in the Gratification Management and Whistleblowing System policies of PT JAI Tbk.
4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual PT JAI Tbk It is outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.
4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Pengelolaan Gratifikasi dan Kode Etik PT JAI Tbk It is outlined in the Gratuity Management and Code of Conduct policy of PT JAI Tbk.
4.2	**Nilai – nilai dan Budaya Organisasi**		
Rekomendasi			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam kebijakan budaya Perusahaan dan laporan program kerja implementasi budaya / nilai-nilai Perusahaan PT JAI Tbk. As outlined in the company's culture policy and the work program report on the implementation of the company's culture/values at PT JAI Tbk.
Panduan			
4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.
4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya		
Rekomendasi			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	*Apply*	Perusahaan telah melakukan sosialisasi perdir kode etik bisnis kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka, menggunakan media internal perusahaan. The company has conducted a socialization of the business code of ethics regulation to all employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The socialization was carried out in person, using the company's internal media.
Panduan			
4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik.	*Apply*	PT JAI Tbk telah memiliki kebijakan Kode Etik Perusahaan dan Whistleblowing System dimana didalamnya terdapat pengaturan terkait perlindungan pelapor. PT JAI Tbk has a Company Code of Ethics and Whistleblowing System policy, which includes provisions regarding the protection of whistleblowers.
4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Ethics policy at PT JAI Tbk.
4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik dan Whistleblowing System di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Ethics and Whistleblowing System policy at PT JAI Tbk.
4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.
5	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan**		
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan**		
Rekomendasi			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	*Apply*	Setiap tahun Direksi Perusahaan melakukan review atas penerapan tata kelola< Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko pada Dewan Komisaris. Every year, the Company's Board of Directors conducts a review of the implementation of governance, risk management, and corporate compliance in coordination with the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya; Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.	*Apply*	Setiap tahun Direksi Perusahaan melakukan review atas penerapan tata kelola< Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko pada Dewan Komisaris. Every year, the Company's Board of Directors conducts a review of the implementation of governance, risk management, and corporate compliance, in coordination with the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners.
5.1.1.2	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi.	*Apply*	Untuk memastikan perusahaan mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada struktur organisasi terdapat Divisi Hukum To ensure the company complies with changes in various applicable laws and regulations, the organizational structure includes a Legal Division.
5.2	**Manajemen Risiko**		
Rekomendasi			
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Board Manual dan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Board Manual and Risk Management policies at PT JAI Tbk.
Panduan			
5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.
5.2.1.2	Direksi mengungkapkan a) risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan b) apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan."	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.
5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.
Rekomendasi			
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko dan Piagam Komite Pemantau Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy and the Charter of the Risk Monitoring Committee at PT JAI Tbk.
Panduan			
5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (fraud risk); mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan.	*Apply*	Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko di PT JAI Tbk In accordance with the Risk Monitoring Committee Charter at PT JAI Tbk
5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Pemantau Risiko di PT JAI Tbk In accordance with the Risk Monitoring Committee Charter at PT JAI Tbk
5.3	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan**		

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	*Apply*	Perusahaan telah membentuk Komite Governance, Risk and Compliance (GRC) PT JAI Tbk. The Company has formed the Governance, Risk and Compliance (GRC) Committee of PT JAI Tbk.
Panduan			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.	*Apply*	Perusahaan memastikan Komite GRC PT JAI Tbk melaksanakan peningkapan kapabilitas melalui pelatihan. The company ensures that the GRC Committee of PT JAI Tbk carries out capability disclosure through training.
Rekomendasi			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	*Apply*	Kepala Divisi Hukum/Fungsi Kepatuhan tidak ada rangkap fungsi Head of Legal Division/Compliance Function does not have any dual functions
5.4	**Audit Internal**		
Rekomendasi			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	*Apply*	Dalam pelaksanaan GRC di Perusahaan berkoordinasi dengan Komite Audit Dewan Komisaris. In implementing GRC in the Company, coordinate with the Audit Committee of the Board of Commissioners.
Panduan			
5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk
5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki a. wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk
5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk
5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit dan Audit Internal di PT JAI Tbk In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk
5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk
6	**Pengungkapan dan Transparansi**		
6.2	**Kebijakan Pengungkapan**		
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki peraturan Direksi terkait penyebaran informasi dan PPID Nomor HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 Tanggal 20 Agustus 2024; The Company has a Board of Directors regulation regarding the dissemination of information and PPID Number HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024;
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Direksi terkait penyebaran informasi dan PPID Nomor HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 Tanggal 20 Agustus 2024; In accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Directors' Regulations regarding the dissemination of information and PPID Number HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024;
Panduan			
6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Direksi terkait penyebaran informasi dan PPID Nomor HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 Tanggal 20 Agustus 2024; In accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Directors' Regulations regarding the dissemination of information and PPID Number HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024;
6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan**		
Rekomendasi			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris melalui Komite Audit memiliki tugas meneliti dan menelaah laporan berkala termasuk laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. In accordance with the Company's Articles of Association and the Audit Committee Charter, the Board of Commissioners through the Audit Committee has the task of examining and reviewing periodic reports including interim financial reports to be published.
Panduan			
6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/ pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris melalui Komite Audit memiliki tugas meneliti dan menelaah laporan berkala termasuk laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. In accordance with the Company's Articles of Association and the Audit Committee Charter, the Board of Commissioners through the Audit Committee has the task of examining and reviewing periodic reports including interim financial reports to be published.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	*Apply*	Laporan Keuangan Audited PT JAI Tbk yang dilakukan auditor eksternal dikoordinasikan kepada Komite Audit The Audited Financial Report of PT JAI Tbk conducted by the external auditor is coordinated with the Audit Committee
Panduan			
6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya.	*Explain*	Proses seleksi auditor Perseroan dilakukan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS. The Company's auditor selection process is carried out through decision-making at the GMS.
6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan.	*Apply*	Proses kontrak auditor eksternal dikoordinasikan juga dengan Komite Audit. The external auditor contract process is also coordinated with the Audit Committee.
6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen.	*Apply*	Proses komunikasi auditor eksternal dikoordinasikan juga dengan Komite Audit. The external auditor's communication process is also coordinated with the Audit Committee.
6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit.	*Apply*	Proses audit oleh Auditor Eksternal berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. The audit process by the External Auditor is coordinated with the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor.	*Apply*	Proses audit oleh Auditor Eksternal berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit The audit process by the External Auditor is coordinated with the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
Rekomendasi			
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan PT JAI Tbk telah dipublish pada website Perusahaan. The Company has prepared a Sustainability Report by referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which will be effective for issuers and public companies as of January 1, 2021. In addition, it is guided by the GRI Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) - an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards. PT JAI Tbk's sustainability report has been published on the Company's website.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asurans oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten.	*Apply*	Penyusunan Sustainability Report PT JAI Tbk berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI). The preparation of PT JAI Tbk's Sustainability Report is guided by the GRI Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) - an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI).
Rekomendasi			
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan PT JAI Tbk telah dipublish pada website Perusahaan. The Company has prepared a Sustainability Report by referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which will be effective for issuers and public companies as of January 1, 2021. In addition, it is guided by the GRI Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) - an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards. PT JAI Tbk's sustainability report has been published on the Company's website.
6.3	**Diseminasi Informasi**		
Rekomendasi			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki peraturan terkait penyebaran informasi dan PPID. Saluran penyebaran informasi yang digunakan berupa Website perusahaan, Annual report, Sosial Media, Email Perusahaan dan Kontak. The company has regulations related to the dissemination of information and PPID. The information dissemination channels used are the company's website, annual report, social media, company email and contacts.
Panduan			
6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan	*Apply*	Perusahaan bertemu dengan analis keuangan secara berkala pada tahun 2024.
6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi	*Apply*	Perusahaan telah memiliki peraturan terkait penyebaran informasi dan PPID. Saluran penyebaran informasi yang digunakan salah satunya adalah Website perusahaan. The company has regulations related to the dissemination of information and PPID. One of the information dissemination channels used is the company's website.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya	*Apply*	Perlindungan dan keamanan informasi yang disampaikan diatur dalam peraturan penyebaran informasi dan PPID Perusahaan. Protection and security of information submitted is regulated in the Company's information dissemination regulations and PPID.
Rekomendasi			
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.	*Apply*	Perusahaan senantiasa membuka berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses publik. Informasi disampaikan melalui berbagai sarana seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), media cetak dan elektronik, serta platform media sosial termasuk X, Facebook, Youtube, Instagram, dan Tiktok. Selain itu, Perusahaan juga memanfaatkan situs web resminya sebagai media penyampaian informasi yang transparan. Laporan Tahunan ini juga telah mencantumkan pernyataan tahunan terkait penerapan Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia. The Company always opens various communication channels that can be accessed by the public. Information is delivered through various means such as the General Meeting of Shareholders (GMS), print and electronic media, and social media platforms including X, Facebook, Youtube, Instagram, and Tiktok. In addition, the Company also utilizes its official website as a medium for delivering transparent information. This Annual Report has also included an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.	*Apply*	Perusahaan selalu menerapkan Kode Etik Bisnis dalam setiap kegiatan berusahanya dan perusahaan tidak terdaftar (listing) dalam bursa lai selain yuridiksi asal.. The company always applies the Code of Business Ethics in all its business activities and the company is not registered (listed) on any stock exchange other than the jurisdiction of origin.
7	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham**		
7.1	**Hak Pemegang Saham**		
Rekomendasi			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor	*Apply*	Sebagaimana tertuang dalam kebijakan PPID PT Jasa Armada Indonesia Tbk. As stated in the PPID policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Panduan			
7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan.	*Apply*	Sebagaimana telah disampaikan pada agenda RUPS kepada para pemegang saham PT JAI Tbk. As stated in the GMS agenda to the shareholders of PT JAI Tbk.
7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang.	*Apply*	Sebagaimana telah disampaikan pada agenda RUPS kepada para pemegang saham dan risalah RUPS PT JAI Tbk. As stated in the agenda of the GMS to shareholders and the minutes of the GMS of PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen.	*Apply*	Telah disediakan kontak perusahaan yang dimuat pada media komunikasi Perusahaan. Company contacts have been provided and published on the Company's communication media.
7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa.	*Apply*	Informasi telah disediakan dan dimuat pada media komunikasi Perusahaan. Information has been provided and published on the Company's communication media.
7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan.	*Apply*	Informasi telah disediakan dan dimuat pada media komunikasi Perusahaan. Information has been provided and published on the Company's communication media.
Rekomendasi			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.	*Apply*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk bukan merupakan entitas induk. PT Jasa Armada Indonesia Tbk is not a parent entity.
Panduan			
7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: • wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; • efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan • pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. • Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain Perusahaan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya.	*Apply*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk bukan merupakan entitas induk. PT Jasa Armada Indonesia Tbk is not a parent entity.
7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak.	*Apply*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk bukan merupakan entitas induk. PT Jasa Armada Indonesia Tbk is not a parent entity.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Kebijakan Pengembangan Bisnis PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association and Business Development Policy of PT JAI Tbk.
Panduan			
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Kebijakan Pengembangan Bisnis PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association and Business Development Policy of PT JAI Tbk.
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (anti-take-over devices) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Kebijakan Pengembangan Bisnis PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association and Business Development Policy of PT JAI Tbk.
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham**		
Rekomendasi			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
Panduan			
7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/ dividen per saham.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (beneficial owner) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen).	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: a). perjanjian antar pemegang saham, b). voting cap, c). multiple voting rights, d). perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.	*Apply*	Perusahaan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, tanpa membedakan asal-usul domestik atau non-domestik. Informasi yang relevan bagi pemegang saham disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses, seperti situs web resmi Perusahaan. Laporan Tahunan ini juga mengungkapkan bahwa Perusahaan senantiasa memastikan transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Potensi benturan kepentingan telah dikelola secara tepat guna melindungi kepentingan Perusahaan dan seluruh pemegang saham. Selain itu, Perusahaan telah menerapkan kebijakan pencegahan insider trading. The Company upholds the principle of equality by providing equal treatment to all shareholders, both majority and minority, without distinguishing between domestic or non-domestic origins. Relevant information for shareholders is conveyed openly to the public through easily accessible media, such as the Company's official website. This Annual Report also discloses that the Company always ensures that transactions with related parties are carried out in accordance with applicable laws. Potential conflicts of interest have been managed appropriately to protect the interests of the Company and all shareholders. In addition, the Company has implemented a policy to prevent insider trading.
Panduan			
7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (arm's length transaction).	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk dan mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 25 September 2024 dan dijabarkan lebih detail pada Buku Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk and referring to the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 dated June 27, 2024 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 dated September 25, 2024 and described in more detail in the Technical Instructions Book concerning Procedures for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/ minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: • Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris • bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Board Manual PT JAI Tbk. As regulated in the Articles of Association and Board Manual of PT JAI Tbk.
7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan board Manual PT JAI Tbk. As regulated in the Articles of Association and Board Manual of PT JAI Tbk.
Rekomendasi			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.	*Apply*	Perusahaan memastikan perlakuan setara bagi seluruh pemegang saham, tanpa membedakan mayoritas atau minoritas, domestik maupun asing. Informasi penting disampaikan secara terbuka melalui media yang mudah diakses, termasuk situs web resmi. Laporan Tahunan ini juga menegaskan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai regulasi, dan potensi benturan kepentingan dikelola untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan pun telah memiliki kebijakan untuk mencegah praktik insider trading. The Company ensures equal treatment for all shareholders, without distinction between majority or minority, domestic or foreign. Important information is conveyed openly through easily accessible media, including the official website. This Annual Report also confirms that transactions with related parties are carried out in accordance with regulations, and potential conflicts of interest are managed to protect the interests of the Company and shareholders. The Company also has a policy to prevent insider trading practices.
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham**		
Rekomendasi			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.	*Apply*	Perusahaan telah melakukan pemanggilan RUPS Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Company has issued a summons for a GMS in accordance with applicable provisions.
Panduan			
7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (rationale) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
Panduan			
7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan, memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS, dan mengajukan usulan resolusi.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham pemungutan secara tertutup (poll-voting) dan bukan dengan mengacungkan tangan (show of hands) memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (bundling).	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
Rekomendasi			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	*Apply*	Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham. Determination of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a GMS attended by shareholders.
Panduan			
7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi.	*Apply*	Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Komite Nominasi dan Renumerasi. Determination of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a GMS attended by shareholders, after prior examination by the Nomination and Remuneration Committee.
7.3.3.2	Direktur dan komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali.	*Apply*	Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Board Manual Perusahaan dan Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi PT JAI Tbk. As stated in the Company's Board Manual Policy and the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT JAI Tbk.
7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat direktur dan komisaris.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
Rekomendasi			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024 As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
Panduan			
7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS.	*Apply*	Sesuai dengan pemanggilan dan agenda RUPS Tahun 2024. In accordance with the summons and agenda of the 2024 GMS.
7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023, agenda dan risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
Rekomendasi			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023 dan agenda serta risalah RUPS Tahun 2024 As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Panduan			
7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023 dan agenda serta risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023 dan agenda serta risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2023 dan agenda serta risalah RUPS Tahun 2024. As contained in the 2023 Annual Report, agenda and minutes of the 2024 GMS.
8	**Pemangku Kepentingan Lainnya**		
8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)**		
Rekomendasi			
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	*Apply*	Perusahaan telah melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan kunci serta melibatkan harapan dan keluhan pemangku kepentingan. The company has communicated with key stakeholders and involved stakeholders' expectations and complaints.
Panduan			
8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan.	*Apply*	Telah Terdapat pada Laporan Tahunan tahun 2023. Available in the 2023 Annual Report.
8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci.	*Apply*	Telah Terdapat pada Laporan Tahunan tahun 2023. Available in the 2023 Annual Report.
8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka.	*Apply*	Sebagaimana Kebijakan Whistleblowing PT JAI Tbk. As per the Whistleblowing Policy of PT JAI Tbk.
8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: respons korporasi, dan kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan.	*Apply*	Sebagaimana Kebijakan Whistleblowing PT JAI Tbk. As per the Whistleblowing Policy of PT JAI Tbk.
8.2	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis**		

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.	*Apply*	Sebagaimana tertuang pada RJPP PT JAI Tbk dan Agenda Rapat Direksi dan Dewan Komisaris. As stated in the RJPP of PT JAI Tbk and the Agenda of the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting.
Panduan			
8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.	*Apply*	Sebagaimana tergambar dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT JAI Tbk, As described in the Long Term Plan document of PT JAI Tbk,
8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya.	*Apply*	Sebagaimana tergambar dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT JAI Tbk, As described in the Long Term Plan document of PT JAI Tbk,
8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi.	*Apply*	Telah terimplementasi sebagaimana kebijakan manajemen risiko PT JAI Tbk. Has been implemented as per PT JAI Tbk's risk management policy.
8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi.	*Apply*	Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Struktur Organisasi PT JAI Tbk. As stated in the Organizational Structure Policy of PT JAI Tbk.
8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan**		
Rekomendasi			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik dan tata kelola perusahaan yang baik PT JAI Tbk. As per the Code of Conduct and good corporate governance policy of PT JAI Tbk.
Panduan			
8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi.	*Apply*	Telah terdapat pada kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. It is included in the PT JAI Tbk Code of Conduct policy.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Pengadaan PT JAI Tbk. As per the Procurement policy of PT JAI Tbk.
8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik dan Kebijakan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT JAI Tbk. As per the Code of Conduct and Social and Environmental Responsibility Implementation Policy of PT JAI Tbk.
8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: • bahan baku, • energi, • penggunaan air, • pemanfaatan sumber daya terbarukan • pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta penyusunan laporan keberlanjutan PT JAI Tbk. As per the policy of Implementing Social and Environmental Responsibility and preparing the sustainability report of PT JAI Tbk.
8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik antipersaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar.	*Apply*	Sebagaimana Tertuang dan implemenyasi kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. As stated in the Code of Ethics policy of PT JAI Tbk.
8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. • Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. • Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam anggatan dasar dan Board Manual PT JAI Tbk. As regulated in the articles of association and Board Manual of PT JAI Tbk.

No.	Uraian xx	Apply/Explain	Keterangan Penerapan xx
Rekomendasi			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	*Apply*	Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan Stated in the Company's Joint Work Agreement
Panduan			
8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.	*Apply*	Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan Stated in the Company's Joint Work Agreement
8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (risk-adjusted return), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan.	*Apply*	Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan Stated in the Company's Joint Work Agreement
8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. As per the Code of Conduct policy of PT JAI Tbk.
8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman.	*Apply*	Perusahaan memiliki kebijakan pengembangan kompetensi pekerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. The company has a policy of developing employee competencies which is implemented annually.
8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan jender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. As per the Code of Ethics policy of PT JAI Tbk.

Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecards

Implementation of ASEAN Corporate Governance Scorecarda

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
A.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights		
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights		
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh rapat umum pemegang saham untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari. Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	Ya Yes	185-186
A.2	**Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif dan Memberikan Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Harus Mengetahui Peraturan, termasuk Prosedur Pemungutan Suara, yang mengatur Rapat Umum Pemegang Saham**		
A.2.1	Apakah pemegang saham mempunyai kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (fee, tunjangan, benefit natura, dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direktur/komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	Ya Yes	244-261
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non pengendali untuk mencalonkan calon direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	Ya Yes	.....
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham memilih direktur/komisaris secara individu? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	Ya Yes	244-261
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	Ya Yes	245-261
A.2.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	Ya Yes	245-261
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terkini? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	Ya Yes	245-261

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Ya Yes	245-261
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota dewan direksi dan CEO (jika dia bukan anggota dewan direksi) menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM	Ya Yes	245-261
A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara in-absentia? Does the company allow voting in absentia?	Ya Yes	245-261
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (dan bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	Ya Yes	245-261
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen (pemeriksa/ pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/ inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	Ya Yes	245-261
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara pada RUPS/RUPSLB terkini untuk semua keputusan? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	Ya Yes	245-261
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	Ya Yes	245-261
A.2.14	Apakah perseroan memberikan alasan dan penjelasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemanggilan RUPS/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	Ya Yes	245-261
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara rapat umum dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	Ya Yes	245-261
A.3	**Pasar untuk Pengendalian Perusahaan Harus dibiarkan Berfungsi secara Efisien dan Transparan** **Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner**		
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris perseroan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	N/A	189-190
A.4	**Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Seluruh Pemegang Saham, Termasuk Investor** **The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.**		

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	Ya Yes	187-189
A.5	**Saham dan Hak Suara** **Shares and voting rights**		
A.5.1	Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham tersebut (misalnya melalui website perusahaan/laporan/bursa/website regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	N/A	187-189
A.6	**Pemanggilan RUPS** **Notice of GMS**		
A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, yaitu tidak ada penggabungan beberapa hal menjadi satu keputusan yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	Ya Yes	245-261
A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran terbaru perusahaan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	Ya Yes	245
Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut: **Does the notice of AGM/circulars have the following details:**			
A.6.3	Apakah profil direksi/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	Ya Yes	262-267
A.6.4	Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	Ya Yes	262-267
A.6.5	Apakah dokumen proksi tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?	Ya Yes	245
A.7	**Perdagangan Orang Dalam dan Transaksi Mandiri yang Bersifat Kekerasan Harus Dilarang** **Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.**		
A.7.1	Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi saham perseroan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	Ya Yes	125-126
A.8	**Transaksi Pihak Berelasi oleh Direktur dan Eksekutif Kunci** **Related party transactions by directors and key executives.**		
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari direktur/komisaris independen untuk meninjau materi RPT (transaksi dengan pihak yang terafiliasi) untuk menentukan apakah RPT tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/ commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	Ya Yes	190-194

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direktur/ komisaris) untuk tidak ikut serta dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu jika ada konflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Ya Yes	190-194
A.8.3	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pinjaman kepada direksi dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	Ya Yes	190-194
A.9	**Melindungi Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Sewenang-Wenang** **Protecting minority shareholders from abusive actions**		
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa RPT tersebut adil dan wajar? Does the company disclose that RPTs (Transaksi Related-party) are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	Ya Yes	193
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Ya Yes	190-194
B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** Sustainability and Resilience		
B.1	**Pengungkapan Terkait Keberlanjutan Harus Konsisten, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Diandalkan, serta Mencakup Informasi Material yang Bersifat Retrospektif dan Berwawasan ke Depan yang Dianggap Penting oleh Investor Dalam Membuat Keputusan Investasi atau Pemungutan Suara** **Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision**		
Informasi penting terkait Keberlanjutan harus disebutkan **Material Sustainability-related information should be specified**			
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG (Environmental, Social, and Governance.) yang penting bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Ya Yes	Sustainability Report
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu? Does the company identify climate change as an issue?	Ya Yes	Sustainability Report
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Ya Yes	Sustainability Report
Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus menyediakan metrik yang andal dan diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses. **If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form.**			
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	Ya Yes	Sustainability Report
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Ya Yes	Sustainability Report

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
B.1.6	Apakah perusahaan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporannya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and / or approved by the Board or Board Committee?	Ya Yes	Sustainability Report
B.2	**Kerangka Tata Kelola Perusahaan Harus Memungkinkan Terjadinya Dialog Antara Perusahaan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan untuk Bertukar Pandangan Mengenai Masalah Keberlanjutan** **Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters**		
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?.	Ya Yes	Sustainability Report
B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Ya Yes	Sustainability Report
B.3	**Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Memastikan Bahwa Dewan Direksi Secara Memadai Mempertimbangkan Risiko dan Peluang Keberlanjutan yang Material Ketika Memenuhi Fungsi Utama Mereka Dalam Meninjau, Memantau, dan Memandu Praktik Tata Kelola, Pengungkapan Informasi, Strategi, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Internal, Termasuk Sehubungan Dengan Risiko Fisik dan Transisi Risiko yang Berkaitan dengan Iklim**		
B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan melakukan peninjauan setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	Ya Yes	179-180
B.4	**Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Mengakui Hak-Hak Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Hukum atau Melalui Kesepakatan Bersama dan Mendorong Kerja Sama Aktif antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam Menciptakan Kekayaan, Lapangan Kerja, dan Keberlanjutan Perusahaan yang Sehat Secara Finansial** **The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate- related physical and transition risks**		
Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address :			
B.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan dalam mengatasi kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Ya Yes	55-56
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	Ya Yes	385-386

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mendorong pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Ya Yes	82-83
B.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Ya Yes	82-83
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programmes and procedures?	Ya Yes	379-383
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	N/A	228
B.4.7	Apakah perusahaan mempunyai laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Ya Yes	458-459
B.5	**Apabila Kepentingan Pemangku Kepentingan Dilindungi oleh Undang-Undang, Maka Pemangku Kepentingan Harus Mempunyai Kesempatan untuk Mendapatkan Ganti Rugi yang Efektif atas Pelanggaran Hak-Hak Mereka** **Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.**		
B.5.1	Apakah perusahaan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Ya Yes	373-374
B.6	**Mekanisme Partisipasi Karyawan Harus Dibiarkan Berkembang** **Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.**		
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	Ya Yes	210
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Ya Yes	211-213
B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Ya Yes	211-213

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
B.7	**Para Pemangku Kepentingan Termasuk Karyawan Perorangan dan Badan Perwakilan Mereka, Harus Dapat Secara Bebas Mengkomunikasikan Keprihatinan Mereka Tentang Praktik-Praktik Ilegal atau Tidak Etis Kepada Dewan Direksi dan Hak-Hak Mereka Tidak Boleh Dikompromikan untuk Melakukan Hal Ini** **Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.**		
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report	Ya Yes	386-389
B.7.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkap dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	Ya Yes	388-389
C	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
C.1	**Struktur Kepemilikan yang Transparan** **Transparent ownership structure**		
C.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat yang memiliki 5% kepemilikan saham atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Ya Yes	187-189
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (yang dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Ya Yes	187-189
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) oleh direktur (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	Ya Yes	187-189
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham manajemen senior secara langsung dan tidak langsung (dianggap)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Tidak No	187-189
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/ (SPV)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	Ya Yes	127
C.2	**Kualitas Laporan Tahunan** **Quality of Annual Report**		
C.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	Ya Yes	82-88

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
C.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	Ya Yes	10-11
C.2.3	Indikator kinerja non keuangan Non-financial performance indicators	Ya Yes	11-12
C.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	Ya Yes	185-186
C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lainnya di perusahaan tercatat) dari seluruh direktur/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/ commissioners	Ya Yes	96-116
Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan **Corporate Governance Confirmation Statement**			
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode etik tata kelola perusahaan dan jika terdapat ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan setiap permasalahan tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Ya Yes	374-378
C.3			
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/ komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Ya Yes	299-301
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik] rincian remunerasi setiap karyawan non-eksekutif? direktur/komisaris? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	Ya Yes	299-301
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan, dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif dan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk direktur eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	Ya Yes	299-301
C.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	Ya Yes	299-301
C.4	**Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi** **Disclosure of related party transactions**		
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT yang material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Ya Yes	536
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	Ya Yes	536
C.5	**Direksi dan Komisaris Berurusan Dengan Saham Perusahaan** **Directors and commissioners dealings in shares of the company**		
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	Ya Yes	123-124 dan 187-189

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
C.6	**Auditor Eksternal dan Laporan Auditor** **External auditor and Auditor Report**		
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	Ya Yes	357-358
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	Tidak No	358
C.7	**Media Komunikasi** **Medium of communications**		
C.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	Ya Yes	373-374
C.7.2	Situs Perusahaan Company website	Ya Yes	373-374
C.7.3	Pengarahan analis Analyst's briefing	Ya Yes	373-374
C.7.4	Pengarahan media/konferensi pers Media briefings /press conferences	Ya Yes	373-374
C.8			
C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun buku? Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Ya Yes	62-63
C.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Ya Yes	62-63
C.8.3	Apakah laporan/laporan keuangan tahunan telah ditegaskan secara benar dan wajar/wajaran oleh direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan terkait? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Ya Yes	463
C.9	**Situs Perusahaan** **Company website**		
Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: **Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:**			
C.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulanan terbaru) Financial statements/reports (latest quarterly)	Ya Yes	460
C.9.2	Materi diberikan dalam briefing kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Ya Yes	373-374
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Ya Yes	373-374
C.9.4	Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB Notice of AGM and/or EGM	Ya Yes	245-261
C.9.5	Risalah RUPS dan/atau RUPSLB Minutes of AGM and/or EGM	Ya Yes	245-261
C.9.6	Anggaran dasar perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Tidak No	232
C.10	**Hubungan dengan Investor** **Investor relations**		
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat/ kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?	Ya Yes	373-374

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.	**Tanggung Jawab Dewan** Board Duties and Responsibilities		
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	Ya Yes	226-231
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed ?	Ya Yes	262-266
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris disebutkan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated ?	Ya Yes	262-266
Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission			
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	Ya Yes	84
D.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	Ya Yes	84
D.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy	Ya Yes	84
D.2			
D.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Ya Yes	374-378
D.2.2	Apakah seluruh direktur/komisaris, manajemen senior, dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik ini? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	Ya Yes	374-378
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	Ya Yes	374-378
Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition			
D.2.4	Apakah jumlah direktur/komisaris independen minimal 50% dari dewan direksi/komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	Ya Yes	92-95
D.2.5	Apakah perusahaan mempunyai batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing- masing lima tahun untuk direktur/komisaris independen? 1 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years1 each for its independent directors/ commissioners? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Ya Yes	106

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima kursi dewan direksi yang dapat dipegang oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	Ya Yes	94-105
D.2.7	Apakah perusahaan mempunyai direktur eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan perusahaan tercatat di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	Tidak No	94-105
Komite Nominasi Nominating Committee			
D.2.8	Apakah perusahaan mempunyai Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	Ya Yes	243
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/ komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	Tidak No	243-244
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/ komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	Tidak No	243-244
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	Ya Yes	243-244
D.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Ya Yes	243-244
Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee			
D.2.13	Apakah perusahaan mempunyai Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	Ya Yes	328-336
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of independent directors/commissioners ?	Tidak No	328-336
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan direktur/ komisaris independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/ commissioner?	Tidak No	328-336
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola /piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	Ya Yes	328-336
D.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	Ya Yes	328-336
Komite Audit Audit Committee			
D.2.18	Apakah perusahaan mempunyai Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	Ya Yes	318
D.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/ komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Tidak No	318-328
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes	318-328

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	Ya Yes	318-328
D.2.22	Apakah setidaknya salah satu direktur/komisaris independen komite mempunyai keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Ya Yes	318-328
D.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan pertemuan setidaknya empat kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Ya Yes	318-328
D.2.24	Apakah Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	Ya Yes	318-328
D.3	**Proses Dewan** **Board Processes**		
D.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum awal tahun buku? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	Ya Yes	301-312
D.3.2	Apakah dewan direksi/komisaris mengadakan pertemuan minimal enam kali dalam setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	Ya Yes	301-312
D.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari seluruh rapat dewan yang diselenggarakan sepanjang tahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Ya Yes	301-312
D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Ya Yes	301-312
D.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan bertemu secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	N/A	301-312
Akses ke informasi **Access to information**			
D.3.6	Apakah kertas rapat dewan direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Ya Yes	301-312
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Ya Yes	301-312
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	Ya Yes	301-312
Pengangkatan Dewan dan Pemilihan Kembali **Board Appointments and Re-Election**			
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Ya Yes	286-301

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/ komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/ commissioners?	Ya Yes	286-301
D.3.11	Apakah seluruh direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan tercatat di negara yang peraturan perundang-undangannya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun2? 2 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years2 each? 2 The five years term must be required by legislation which pre-existed the i ntroduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Ya Yes	329
Masalah Remunerasi Remuneration Matters			
D.312	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Ya Yes	300 dan 329
D.3.13	Apakah perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penarikan kembali kembali bonus yang sudah diberikan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	N/A	301
Audit internal Internal Audit			
D.3.14	Apakah perusahaan mempunyai fungsi audit internal tersendiri? Does the company have a separate internal audit function?	Ya Yes	351-356
D.3.15	Apakah kepala audit internal sudah diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Ya Yes	351-356
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Ya Yes	351-356
Pengawasan Risiko Risk Oversight			
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Ya Yes	364-371
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/ komisaris telah melakukan peninjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/ commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Ya Yes	364-371

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan hidup, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Ya Yes	364-371
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan direksi/komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Ya Yes	364-371
D.4	**Orang-Orang di Dewan** **People on the Board**		
D.4.1	Apakah ada orang yang berbeda yang mengambil peran sebagai ketua dan CEO? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	N/A	Tidak dibedakan Ketua dan CEO
D.4.2	Apakah ketuanya adalah direktur/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	N/A	Tidak dibedakan Ketua dan CEO
D.4.3	Apakah ada di antara direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	Tidak No	94-105
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	Ya Yes	94-105
Direktur Independen Utama *Lead Independent Director*			
D.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk Pemimpin/Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	N/A	94-105
Keterampilan dan Kompetensi **Skills and Competencies**			
D.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif mempunyai pengalaman kerja di sektor utama tempat perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	Ya Yes	94-105
D.5	**Kinerja Dewan** **Board Performance**		
Pengembangan Direksi **Directors Development**			
D.5.1	Apakah perusahaan mempunyai program orientasi bagi direksi/komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	Ya Yes	268, 283
D.5.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan atau berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Ya Yes	268, 288, 289
Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif **CEO/Executive Management Appointments and Performance**			

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Utama/ Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Tidak No	286
D.5.4	Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Ya Yes	297-299
Penilaian Direktur Director Appraisal			
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang dilakukan untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	13, 262, 292, 294, 295
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	13, 262, 292, 294, 295
Penilaian Komite Committee Appraisal			
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria serta proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	270
Bonus dan Penalti Bonus Items			
(B). A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders			
(B) A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.		
(B) A.1.1	Apakah perusahaan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan real-time secara in-abstia pada rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	Ya Yes	245
(B) A.2	Pemanggilan RUPS Notice of AGM		
(B) A.2.1	Apakah perusahaan mengeluarkan pemanggilan RUPS (dengan rincian agenda dan penjelasan surat edaran), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, paling lambat 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Ya Yes	245
(B) B.1	Hak dan Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders		
(B) B.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara mereka mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Ya Yes	47 & 61

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(B) B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Sustainability Reporting-nya mendapat jaminan dari pihak eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report/Sustainability Reporting is externally assured?	Ya Yes	47 & 61
(B) B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan ESG (Environmental, Social, and Governance)? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Ya Yes	47 & 61
(B) B.1.4	Apakah perusahaan mempunyai unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab mengelola urusan keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Ya Yes	347
(B) B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan dewan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Ya Yes	41-47
(B) B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Tidak No	41-47
(B) B.1.7	Apakah Whistleblowing System perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties / institutions?	Ya Yes	386-389
(B). C.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
(B) C.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report		
(B) C.1.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	Tidak No	179
(B). D.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board		
(B) D.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Board Competencies and Diversity		
(B) D.1.1	Apakah perusahaan memiliki minimal satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	Tidak No	94-99
(B) D.1.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keberagaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives??	Ya Yes	46
(B) D.2	Struktur Dewan Board Structure		
(B) D.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	Tidak No	328-336
(B) D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arahan strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	Ya Yes	328-336

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(B) D.3	Pengangkatan Dewan dan Pemilihan Kembali Board Appointments and Re-Election		
(B) D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	Tidak No	101-102
(B) D.4	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
(B) D.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen mencakup lebih dari 50% dewan direksi/komisaris pada perusahaan yang ketuanya independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50%of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	Ya Yes	46
(B) D.5	Pengawasan Risiko Risk Oversight		
(B) D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan telah mengidentifikasi risiko-risiko utama yang terkait dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	Ya Yes	94-95
(B) D.6	Kinerja Dewan Board Performance		
(B) D.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	Ya Yes	337
(P). A			
(P) A.1	Hak dasar pemegang saham Basic shareholder rights		
(P) A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama dalam pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	Tidak No	244-261
(P) A.2	Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diperbolehkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.		
(P) A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Tidak No	244-261
(P) A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.		
(P) A.3.1	Apakah perusahaan mencantumkan agenda tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya dalam pemanggilan RUPST/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	Tidak No	234, 235, 244-261

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(P) A.3.2	Apakah Ketua Dewan dan Ketua seluruh Komite Dewan serta CEO tidak hadir dalam Rapat Umum terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Tidak No	244-261
(P) A.4	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed. enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.		
Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan: **Did the company fail to disclose the existence of:**			
(P) A.4.1	Perjanjian pemegang saham? Shareholders agreement?	Tidak No	126
(P) A.4.2	Batasan pemungutan suara? Voting cap?	Tidak No	126
(P) A.4.3	Hak pilih ganda? Multiple voting rights?	Tidak No	126
(P) A.5	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.		
(P) A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	Ya Yes	126
(P) A.6	Perdagangan orang dalam dan transaksi mandiri yang bersifat kekerasan harus dilarang Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.		
(P) A.6.1	Apakah terdapat kasus insider trading yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	Tidak No	372
(P) A.7	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang Protecting minority shareholders from abusive action		
(P) A.7.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan sehubungan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	Tidak No	372
(P) A.7.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs (Transaksi Related-party) that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	Tidak No	372
(P). B	Peran Pemangku Kepentingan Roles of Stakeholders		
(P) B.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.		

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(P) B.1.1	Apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/ ketenagakerjaan/konsumen/kebangkrutan/komersial/kompetisi atau lingkungan hidup? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/insolvency/ commercial/competition or environmental issues?	Tidak No	46 dan 61
(P) B.2	Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.		
(P) B.2.1	Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	Tidak No	372
(P) B.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas greenwashing? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	Tidak No	372
(P). C	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
(P) C.1	Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan Sanctions from regulator on financial reports		
(P) C.1.1	Apakah perusahaan menerima "pendapat wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	Tidak No	Perusahaan tidak pernah menerima pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit eksternal
(P) C.1.2	Apakah perusahaan menerima "opini buruk" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	Tidak No	Perusahaan tidak pernah menerima opini buruk dalam laporan audit eksternal
(P) C.1.3	Apakah perusahaan menerima "disclaimer opinion" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	Tidak No	Perusahaan tidak pernah menerima "disclaimer opinion" dalam laporan audit eksternal
(P) C.1.4	Apakah perusahaan dalam satu tahun terakhir telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	Tidak No	484 dan 499
(P) D	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board		
(P) D.1	Kepatuhan terhadap aturan pencatatan, peraturan dan hukum yang berlaku Compliance with listing rules, regulations and applicable laws		
(P) D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selain peraturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	Tidak No	182, 191, 372. 390
(P) D.1.2	Pernahkah ada kejadian di mana direktur/komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat permasalahan terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	Tidak No	94-105

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(P) D.2	Struktur Dewan Board structure		
(P) D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selain peraturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	Tidak No	182, 191, 372. 390
(P) D.1.2	Pernahkah ada kejadian di mana direktur/komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat permasalahan terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	Tidak No	94-105
(P) D.2	Struktur Dewan Board structure		
(P) D.2.1	Apakah Perseroan mempunyai direktur/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? 1 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (which ever is higher) in the same capacity? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Tidak No	94-105
(P) D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan tepat gambaran seluruh direkturnya sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	Tidak No	101-105
(P) D.2.3	Apakah perusahaan mempunyai direktur/non eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima dewan di perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non-executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	Tidak No	101-105
(P) D.3	Audit Eksternal External Audit		
(P) D.3.1	Apakah ada di antara direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	Tidak No	94-116
(P) D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board structure and composition		
(P) D.4.1	Apakah ketuanya pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	Tidak No	101 dan 106
(P) D.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif menerima opsi, bagi hasil atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	Ya Yes	249, 259, 300, 301, 394, 520. dan 536

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan

Social and Environmental Responsibilities

07



Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh IPCM dijalankan selaras dengan prinsip keberlanjutan, IPCM berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan citra positif yang mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

The Social and Environmental Responsibility (TJSL) program of IPCM is carried out in line with the principle of sustainability to build harmonious relationships with the community and all stakeholders, while improving the Company's positive image for long-term business sustainability.



Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Governance of Social and Environmental Responsibility



PT Jasa Armada Indonesia Tbk terus mewujudkan komitmen dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan lingkungan, melalui implementasi program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalani sepanjang tahun 2024. Perusahaan senantiasa merancang dan melaksanakan program TJSL dengan mempertimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan serta aspek keberlanjutan lingkungan guna menciptakan manfaat yang baik bagi masyarakat dan ekosistem sekitar.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk remains committed to making a positive contribution to social and environmental development through the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs throughout 2024. The Company consistently designs and executes its SER programs by taking into account the needs of stakeholders and environmental sustainability aspects in order to generate meaningful benefits for surrounding communities and ecosystems.

Sebagai bagian dari tanggung jawab, Perusahaan memastikan bahwa setiap program TJSL yang dijalankan tidak hanya memberikan dampak sosial yang berarti, tetapi juga turut mendukung kelestarian lingkungan. Didasari oleh pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan, Perusahaan berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan citra positif yang mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Informasi mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di tahun 2024, secara komprehensif telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 yang disajikan secara terpisah, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini, sebagaimana arahan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021, yang mencakup poin-poin sebagai berikut:

As part of its responsibility, the Company ensures that every SER program implemented not only delivers significant social impact but also supports environmental preservation. Guided by a sustainability-oriented approach, the Company strives to build harmonious relationships with communities and all stakeholders, while also enhancing a positive image that supports long-term business sustainability.

Information regarding the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) program in 2023 has been comprehensively disclosed in the Sustainability Report of the 2023 Financial Year. This report is presented separately but is an inseparable part of this Annual Report, as instructed by the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021. The Sustainability Report includes the following points:

- Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
- Ikhtisar Aspek Kinerja Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup);
- Profil Singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
- Penjelasan Direksi;
- Tata Kelola Keberlanjutan;
- Kinerja Keberlanjutan;
- Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
- Lembar Umpan Balik (feedback) untuk Pembaca; dan
- Tanggapan Perusahaan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

- Explanation of Sustainability Strategy;
- Overview of Sustainability Performance (Economic, Social, and Environmental);
- Brief Profile of the Issuer or Public Company;
- Directors' Explanation;
- Sustainability Governance;
- Sustainability Performance;
- Written Verification from an Independent Party;
- Feedback Form for Readers; and
- Company Response to Previous Year Report Feedback.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Laporan Keuangan

Financial Report

08





PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2024 and
for the year then ended with independent auditor's report

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGALTERSEBUT
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Shanti Puruhita
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung Pelindo Tower Lt. 8
   Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Taman Century 2, jalan Tanjung I blok C No. 17 RT/RW 001/023. Kel. Pekayon, Kec. Bekasi Selatan
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Dessy Emastari Prihatiningtyas
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung Pelindo Tower Lt. 8
   Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Perumahan Metland Menteng Jl. Menteng Purnama II Blok D5/22. Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
   Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko/*Director of Finance, HR, and Risk Management*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
   b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT ON THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

We, the undersigned below:

declare that:

1. *We responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company as of December 31, 2024 and for the year then ended.*
2. *The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Company, and,*
   b. *The financial statements of the Company do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *We are responsible for the Company internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 24 Maret 2025 / *March 24, 2025*



Shanti Puruhita
Direktur Utama/
President Director

Dessy Emastari Prihatiningtyas
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko/
Director of Finance, HR, and Risk Management

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	6-81	*Notes to the Financial Statements*

****

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal[-hal] audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit Utama (lanjutan)

Kecukupan Penyisihan Atas Kerugian Kredit Ekspektasi

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang usaha setelah penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian ("KKE") adalah sebesar Rp192 miliar. Penilaian atas piutang usaha penting bagi audit kami karena jumlahnya material terhadap laporan keuangan dan pengukuran KKE melibatkan pelaksanaan pertimbangan manajemen yang signifikan, seperti segmentasi eksposur risiko kredit serta penentuan metode untuk memperkirakan KKE dan asumsi yang akan digunakan dalam model KKE (yaitu, exposure at default (EAD), probability of default (PD) dan loss given default (LGD)).

Pengungkapan terkait piutang usaha dan penyisihan atas KKE disajikan dalam Catatan 2f dan 6 atas laporan keuangan.

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman tentang metodologi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam menentukan jumlah KKE dari penggunaan model KKE. Kami melibatkan spesialis internal kami dalam mengevaluasi metodologi dan asumsi utama yang digunakan dalam model.

Kami menguji asumsi utama dalam model KKE seperti PD, LGD, dan EAD dengan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber input, analisis koleksi historis, dan menganalisa umur piutang usaha. Kami membandingkan informasi ekonomi yang digunakan dalam skenario berwawasan ke depan dalam model KKE dengan data ekonomi makro, informasi yang tersedia untuk umum, dan pengetahuan industri. Kami menguji akurasi aritmetika dari penyisihan KKE. Kami juga menilai kecukupan pengungkapan mengenai piutang usaha dan KKE yang dibuat dalam laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

Adequacy of Allowance for Expected Credit Loss

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2024, the balance of trade receivables after allowance for expected credit loss ("ECL") amounted to Rp192 billion. The valuation of trade receivables is significant to our audit as the amount is material to the financial statements and the measurement of ECL involves the exercise of significant management judgment, such as segmentation of credit risk exposure and determination of method to estimate ECL and assumptions to be used in the ECL model (i.e., the exposure at default (EAD), the probability of default (PD) and the loss given default (LGD)).

The disclosures of trade receivables and allowance for ECL are presented in Notes 2f and 6 to the financial statements.

Audit response:

We obtained an understanding of the methodology applied by the Company in determining the ECL amount through the use of an ECL model. We involved our internal specialist in evaluating the methodologies and key assumptions used in the model.

We tested key assumptions in the ECL model such as PD, LGD and EAD by comparing them with the information obtained from source inputs, historical collection analysis, and analyzing trade receivables aging. We compared the economic information used in the forward-looking scenarios in the ECL model against macro-economic data, publicly available information and industry knowledge. We tested the arithmetical accuracy of the allowance for ECL. We also assessed the adequacy of the disclosures regarding trade receivables and ECL made in the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the The Annual Report other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Moch. Dadang Syachruna
Registrasi Akuntan Publik No.: AP.0697/*Public Accountant Registration No.: AP.0697*

24 Maret 2025/*March 24,2025*

00328

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	473.084.134	4,5,27,28,29,30	408.816.377	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto		6,29,30		*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	44.891.610		37.675.720	*Third parties*
Pihak berelasi	147.564.783	27	4.443.250	*Related parties*
Aset kontrak - neto		7,29		*Contract assets - net*
Pihak ketiga	76.150.102		44.941.152	*Third parties*
Pihak berelasi	129.201.455	27	313.409.671	*Related parties*
Piutang lain - lain		8,29,30		*Other receivables*
Pihak ketiga	-		-	*Third parties*
Pihak berelasi	-	27	5.640.100	*Related parties*
Persediaan	21.596.039	9	25.072.666	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	40.855.517	16a	48.572.645	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	5.493.970	4,10,29,30	939.993	*Other current assets*
TOTAL ASET LANCAR	**938.837.610**		**889.511.574**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	562.431.197	11	581.005.721	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	79.936.685	12	38.507.956	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	18.986.597	16e	12.986.577	*Deferred tax assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak	49.658.080	16f	-	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	130.846	4,10,29,30	122.820	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**711.143.405**		**632.623.074**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**1.649.981.015**		**1.522.134.648**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		13,29,30		*Trade payables*
Pihak ketiga	15.263.232		4.095.090	*Third parties*
Pihak berelasi	14.112.757	27	18.464.080	*Related parties*
Uang titipan	12.475.836	14,29,30	15.424.418	*Deposits*
Beban akrual	185.986.435	15,29,30	174.839.605	*Accrued expenses*
Utang pajak	21.318.132	16b	9.224.532	*Taxes payable*
Utang dividen		19,29,30,20		*Dividend payables*
Pihak ketiga	2.424.078		2.450.322	*Third parties*
Pihak berelasi	17.627.653	27	17.601.409	*Related parties*
Liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	84.927.058	12,29,30	32.485.372	*Current maturities of long-term lease liabilities*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**354.135.181**		**274.584.828**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.735.657	12,29,30	7.030.080	*Long-term lease liabilities - net of current maturities*
TOTAL LIABILITAS	**360.870.838**		**281.614.908**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				*Share capital - par value Rp100 (full amount) per share*
Modal dasar - 15.000.000.000 saham				*Authorized capital - 15,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.284.811.100 saham	528.481.110	17	528.481.110	*Issued and fully paid capital - 5,284,811,100 shares*
Saham tresuri	(1.617.838)	18	(1.617.838)	*Treasury stocks*
Tambahan modal disetor	317.981.175	19	317.981.175	*Additional paid-in capital*
Saldo laba		4,20		*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	158.421.458		126.889.061	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	285.844.272		268.786.232	*Unappropriated*
EKUITAS NETO	**1.289.110.177**		**1.240.519.740**	***NET EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.649.981.015**		**1.522.134.648**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ *Notes***	**2023**	
Pendapatan	1.345.030.257	21,27,32	1.138.537.475	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	(926.892.911)	4,22,32	(777.612.300)	*Cost of revenues*
LABA BRUTO	**418.137.346**		**360.925.175**	***GROSS INCOME***
Beban umum dan administrasi	(203.273.321)	4,23,32	(186.618.278)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	1.341.816	24,32	10.181.184	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	(8.801.910)	25,32	(729.210)	*Other operating expenses*
LABA USAHA	**207.403.931**		**183.758.871**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	17.932.644	26a,32	14.958.550	*Finance income*
Beban keuangan	(11.148.283)	26b,32	(2.773.465)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**214.188.292**		**195.943.956**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan badan - neto	(47.345.409)	16c,16d,32	(38.281.968)	*Corporate income tax expenses - net*
LABA TAHUN BERJALAN	**166.842.883**		**157.661.988**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**-**		**-**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**166.842.883**		**157.661.988**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**31,62**		**29,88**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMA
STATEMENT OF
For the Year End
(Expressed in Thousands of

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Share capital - issued and fully paid*	Saham tresuri/ *Treasury stocks*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings*	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*
Saldo 31 Desember 2022		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**96.758.091**	**254.916.868**
Pembagian dividen kas	20	-	-	-	-	(113.661.654)
Pembentukan cadangan umum	20	-	-	-	30.130.970	(30.130.970)
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	157.661.988
Saldo 31 Desember 2023		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**126.889.061**	**268.786.232**
Pembagian dividen kas	20	-	-	-	-	(118.252.446)
Pembentukan cadangan umum	20	-	-	-	31.532.397	(31.532.397)
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	166.842.883
Saldo 31 Desember 2024		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**158.421.458**	**285.844.272**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying note
an integral part of th

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2024	**Catatan/ Notes**	**2023**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.344.743.520		999.296.499	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(941.722.511)		(940.642.427)	*Payment to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(118.472.625)		(151.985.596)	*Payment to employees*
Penerimaan pajak	-		6.499.000	*Cash receipt of taxes*
Penerimaan dari pendapatan keuangan	17.932.644	26a	14.958.550	*Cash receipts of finance income*
Pembayaran beban keuangan	(15.131)		(56.440)	*Payments for finance expenses*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(42.738)		(184.230)	*Placement of restricted cash*
Penerimaan dari kegiatan operasi lain	6.981.915		55.872.035	*Receipt from other operating activities*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**309.405.074**		**(16.242.609)**	***Net cash flows provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(26.147.743)		(14.522.186)	*Acquisitions of fixed assets*
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FOR FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen	(98.200.715)	20	(93.609.923)	*Dividend payment*
Pembayaran liabilitas sewa	(120.788.859)	12	(38.535.789)	*Payments of lease liabilities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(218.989.574)**		**(132.145.712)**	***Net cash flows used in financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**64.267.757**		**(162.910.507)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**408.816.377**	4,5	**571.726.884**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**473.084.134**	4,5	**408.816.377**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-47228.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 9 September 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 44 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tanggal 23 Juni 2022, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan operasional di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan kapal, penumpang, barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan, dapat melakukan kegiatan:

a. Kegiatan usaha utama Perusahaan untuk menyediakan:
   - Pelayanan kepelabuhan laut;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
   - Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;
   - Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
   - Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
   - Pergudangan dan penyimpanan;
   - Reparasi mesin untuk keperluan umum;
   - Penanganan kargo (bongkar muat barang).

1. GENERAL

a. Establishment of the Company and General Information

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-47228.AH.01.01.TAHUN 2013 dated September 9, 2013, and has been published in the State Gazette No. 78 dated September 27, 2013. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Notary Deed No. 44 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, dated June 23, 2022, regarding changes to the Company's Articles of Association, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022.

Based on the Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to carry out operational activities in the scope of organizing and operating ship services, passengers, goods and activities related to ports as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and highly competitive services. to obtain or pursue profits in order to increase the value of the Company, may carry out activities:

a. The Company's main business activities are to provide:
   - *Maritime port services;*
   - *Domestic sea transportation for general goods;*
   - *River and lake transportation for general goods and/or animals;*
   - *Domestic sea freight port for goods;*
   - *Domestic sea transportation for special goods;*
   - *International sea transportation for general goods;*
   - *Warehousing and storage;*
   - *General machinery repair for public needs;*
   - *Cargo handling (loading and unloading goods).*

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum (lanjutan)

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagai berikut:
- Industri kapal dan perahu;
- Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung.

Saat ini, perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa pengepilan, jasa pengangkutan laut, jasa penyewaan kapal, dan jasa pengoperasian kapal.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 September 2014.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi Pelindo Tower Lantai 8 dan 9, Jl Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM") dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 22 Desember 2017, Perusahaan telah menawarkan 1.215.506.500 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, yang mewakili sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat. Saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan harga penawaran perdana sebesar Rp380 (nilai penuh) per saham.

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 12 Juni 2024 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan, antara lain:
1. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perusahaan yaitu yang semula Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia menjadi Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.
2. Menyetujui mengangkat Dessy Emastari Prihatiningtyas sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company and General Information (continued)

b. Supporting business activities that support the main business activities are as follows:
- *Vessel and boat manufacturing;*
- *Vessel, boat, and floating structure repair service.*

Currently, the Company operates in the pilotage services, tug services, mooring services, maritime transportation services, vessel leasing services, and vessel operations services.

The Company started its commercial operations on September 1, 2014.

The Company's head office is located at Pelindo Tower, 8th and 9th Floor, Jl Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, North Jakarta 14230.

The Company's direct parent entity is PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM") and the Company's ultimate parent entity is the Government of the Republic of Indonesia.

b. Public Offering of the Company's Shares of Stock

On December 22, 2017, the Company offered 1,215,506,500 shares with a nominal value of IDR 100 (full amount) per share, representing 23% (twenty-three percent) of the issued and paid-up capital of the Company following the Initial Public Offering to the public. These shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) at an initial offering price of Rp380 (full amount) per share.

c. Key Management and Other Informations

Based on Notorial Deed No. 32 dated June 12, 2024 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta regarding the Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, among others:
1. *To approve the change in the nomenclature of the Company's Board of Directors' positions, from Director of Finance and Human Resources to Director of Finance, Human Resources, and Risk Management.*
2. *To approve the appointment of Dessy Emastari Prihatiningtyas as Director of Finance, Human Resources, and Risk Management.*

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 25 September 2024 dari Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, menyetujui mengangkat Fransiscus Budi Prayitno sebagai Komisaris Independen.

Susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Key Management and Other Informations (continued)

Based on Notarial Deed No. 03 dated September 25, 2024 of Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H, M.Kn., Notary in Jakarta regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders, approve the appointment of Fransiscus Budi Prayitno as Independent Commissioner.

The composition of the Company's key management, consisting of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2024, are as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Zuhri Iryansyah	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Bay Mokhamad Hasani	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Fransiscus Budi Prayitno	*Independent Commissioner*
Komisaris	R. R. Dewi Ariyani	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Shanti Puruhita	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Shanti Puruhita	*Acting Director of Commercial and Business Development*
Direktur Armada dan Operasi	Muhammad Iqbal	*Director of Fleet and Operations*
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	Dessy Emastari Prihatiningtyas	*Director of Finance, Human Resources and Risk Management*

Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the composition of the Company's key management, which consists of Board of Commissioners and Directors are as follow:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Zuhri Iryansyah	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Bay Mokhamad Hasani	*Independent Commissioner*
Komisaris	R. R. Dewi Ariyani	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Shanti Puruhita	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Shanti Puruhita	*Acting Director of Commercial and Business Development*
Direktur Armada dan Operasi	Muhammad Iqbal	*Director of Fleet and Operations*
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Reini Delfianti	*Director of Finance and Human Resources*

Susunan Komite Audit dan sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The members of the Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Bay Mokhamad Hasani	Bay Mokhamad Hasani	*Head*
Anggota	Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Dadang Budiawan	*Member*
Anggota	Jaja Suparman	Yoshua P.S.I Anthonie	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Eddy Haristiani	Eddy Haristiani	***Corporate Secretary***

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sejumlah 123 dan 181 karyawan (tidak diaudit).

d. Perizinan

1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor: 91202075920050001 telah menerbitkan izin usaha sebagai Pelaku Usaha tanggal 20 Mei 2019 yang telah diperbaharui tanggal 5 Februari 2024 kepada Perusahaan sehingga Perusahaan dapat melakukan aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, meliputi:

- Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- Memelihara kelestarian lingkungan;
- Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

2) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BX-311/AL 001 tanggal 8 Agustus 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. SIUPAL berlaku selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022. Kepemilikan SIUPAL/SIOPSUS Perusahaan telah beberapa kali dilakukan evaluasi dan verifikasi data administrasi dan teknis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang terakhir berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS No. AL.010/3048/DA-2024 tanggal 20 September 2024.

1. GENERAL (continued)

c. Key Management and Other Informations (continued)

As of December 31, 2024, and 2023, the Company has employees with total of 123 and 181 employees, respectively (unaudited).

d. Permits

1) The Head of the Investment Coordinating Board, through Risk-Based Business Licensing Standard Certificate Number: 91202075920050001, has issued a business permit to the Company as a Business Operator dated May 20, 2019 which has been updated on February 5, 2024 enabling the Company to carry out maritime port service activities, which include:

- *Providing and maintaining the suitability of port facilities;*
- *Providing service to port service users in accordance with the service standards set by the government;*
- *Maintaining the security, safety, and orderliness of the operated port facilities;*
- *Contributing to the maintenance of safety, security, and orderliness concerning transportation in waters;*
- *Preserving the environment;*
- *Fulfilling obligations in accordance with the concession in the agreement; and*
- *Complying with the provisions of laws and regulations, both national and international.*

2) Letter of Permit for Sea Transportation Company (SIUPAL) No. BX-311/AL 001 dated August 8, 2014 from the Minister of Transportation Directorate General of Sea Transportation. SIUPAL is valid as long as the Company is still conducting its operational activities and evaluated once every 2 (two) years by the Director General in accordance with Minister of Transportation Regulation Number PM 93 Year 2013 juncto Minister of Transportation Regulation Number PM 74 Year 2016 juncto Minister of Transportation Regulation Number PM 23 Year 2022. The ownership of SIUPAL by the Company has been evaluated and verified by the Minister of Transportation Directorate General of Sea Transportation, most recently based on Minute No. AL.010/3048/DA-2024 dated September 20, 2024.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

3) Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi juncto Permenhub Nomor 13 Tahun 2023. Pada 20 Mei 2019, Perusahaan telah melakukan *Online Single Submission* (OSS) dan telah menerima Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120207592005 dari Lembaga OSS (BKPM) dengan berbasis Risiko dan telah melakukan perubahan pertama pada tanggal 3 November 2023. Oleh karena itu, masa izin usaha Perusahaan berlaku "Selama Badan Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya".

e. Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 24 Maret 2025. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

3) Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) No. 12 of 2021 concerning The Standard of Business Activity and Product on the Implementation of Risk Based Business License in Transportation Sector juncto Permenhub Number 13 Year 2023. On May 20, 2019, the company has made an Online Single Submission (OSS) and has received a Business Registration Number (NIB): 9120207592005 from the OSS Institution (BKPM) based on risk and has made the first changes on November 3, 2023. Therefore, the Company's business permit is applicable "as long as the business entity runs its business and/or activities".

e. Issuance of Financial Statements

The management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company's Directors on March 24, 2025. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

*The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("*SAK*"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (*Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia *or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("*Otoritas Jasa Keuangan*" or "*OJK*").*

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah (”Rp”), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

Amandemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:
- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Company are consistently applied for the years covered by the financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah (“Rp”), unless otherwise stated.

b. Changes in accounting principles

Financial Accounting Standards Nomenclature

The revised nomenclature is reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for financial periods beginning on and after January 1, 2024.

Amendment of PSAK 201 (formerly PSAK 1): Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (lanjutan)

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen PSAK 116 (dahulu PSAK 73): Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 116 (dahulu PSAK 73) Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen PSAK 207 (dahulu PSAK 2) dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60): Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 207 (dahulu PSAK 2) dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60) mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini tidak diharapkan akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 201 (formerly PSAK 1): Non-current Liabilities with Covenants (continued)

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

The amendments are not expected to have an impact on the Company's financial statements.

Amendment of PSAK 116 (formerly PSAK 73): Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 116 (formerly PSAK 73) Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendments are not expected to have an impact on the Company's financial statements.

Amendment of PSAK 207 (dahulu PSAK 2) and PSAK 107 (formerly PSAK 60): Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2) and PSAK 107 (formerly PSAK 60) clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments are not expected to have an impact on the Company's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:
- diekspektasikan akan direalisasi, dimaksudkan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:
- diekspektasikan akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

d. Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar. Perusahaan juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:
- *expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- *held primarily for the purpose of trading,*
- *expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*
- *cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:
- *expected to be settled in the normal operating cycle,*
- *held primarily for the purpose of trading,*
- *due to be settled within 12 months after the reporting period, or*
- *there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Fair value measurement

The Company initially measure financial instruments at fair value. The Company also initially measures financial instruments. The Company also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati *(observable)* baik secara langsung atau tidak langsung.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Fair value measurement (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liabilities are measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut: (lanjutan)

iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati *(unobservable)*.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole: (continued)

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun disajikan sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya" sebagai bagian dari "aset lancar lainnya". Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai bagian dari "aset tidak lancar lainnya" (Catatan 10).

f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115 (dahulu PSAK 72), seperti diungkapkan pada Catatan 2k.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents which are restricted for repayment of current maturing obligations are presented as "restricted cash" under "other current assets". Cash and cash equivalents which are restricted for repayment of obligations maturing after 1 (one) year are presented as part of "other non-current assets" (Note 10).

f. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115 (formerly PSAK 72), as disclosed in Note 2k.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:
- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain serta kas yang dibatasi penggunaannya, dikelompokkan sebagai aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui NWPKL dan NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:
- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and also restricted cash, which are classified as other current assets and other non-current assets.

The Company has no financial assets measured in FVOCI and FVTPL.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
  atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
  or
- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha, aset kontrak dan piutang lain-lain tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Perusahaan menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables, contract assets and other receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Selain itu, Perusahaan mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 365 hari dari tanggal jatuh tempo.

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR dan utang.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang, seperti utang usaha, uang titipan, beban akrual, utang dividen, dan liabilitas sewa.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 365 days past due.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL and payables.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as payables, such as trade payables, deposits, accrued expenses, dividend payables, and lease liabilities.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Perusahaan dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71) dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang)

1. Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

   Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entere into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109 (formerly PSAK 71). Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 (formerly PSAK 71) are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.

Financial liabilities at amortized cost (Borrowings)

1. *Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings*

   Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang) (lanjutan)

1. Utang Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga (lanjutan)

   Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

2. Utang dan Akrual

   Liabilitas untuk utang usaha, beban akrual, uang titipan, utang dividen dan liabilitas sewa, dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Borrowings) *(continued)*

1. Long-term Interest-bearing Borrowings (continued)

   Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

2. Payables and Accruals

   Liabilities for trade payable, accrued expenses, deposits, dividend payables and lease liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224 (dahulu PSAK 7): *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.*

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 27.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Persediaan terdiri dari bahan bakar, suku cadang dan perlengkapan kapal, dan alat tulis kantor.

i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g. Transactions with Related Parties

The Company have transactions with related parties as defined in PSAK 224 (formerly PSAK 7): Related Party Disclosure.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 27.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.

h. Inventories

Inventory was recorded using the weighted average method. Inventories consists of fuel, vessels spare parts, vessel equipments, and office supplies.

i. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Perusahaan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fixed Assets (continued)

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Company and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	25	*Buildings*
Kapal	3-20	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5	*Port facilities*
Kendaraan	5	*Vehicles*

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Constructions in progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Perusahaan mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas UPK terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

The Company assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Companys of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each CGU's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets (continued)

If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss.

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 115 (dahulu PSAK 72), "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk pendapatan, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat jasa telah diserahkan kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

l. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Revenue and Expenses

The Company has adopted PSAK 115 (formerly PSAK 72), "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

For revenues, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognized, when the services has been transferred to the customer (a point in time).

Expense Recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

l. Foreign Currency Transactions and Balances

The financial statements are presented in Rupiah, which is The Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode yang bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Dolar AS	Rp16.162	Rp15.416	*US Dollar*

m. Sewa

Perusahaan menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

l. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

At the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average buying and selling rates of exchange quoted by Bank Indonesia at the closing of the last banking day of the period. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

The exchange rates used as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

m. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as Lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna (lanjutan)

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2j).

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan.

Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

Right-of-use assets *(continued)*

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2j).

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made.

In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Perusahaan juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontinjensi tersebut diperoleh.

n. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

Lease liabilities (continued)

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Company also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

n. Taxation

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Perusahaan telah menerapkan amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:
i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2024, the Company has applied amendments to PSAK 212: Income Taxes, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:
i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii) in respect of deductible temporary differences, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:
- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212(dahulu PSAK 46): *Pajak Penghasilan.*

2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

n. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:
- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 212 (formerly PSAK 46): Income Tax.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun berjalan.

Total rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu masing-masing sebesar 5.276.771.300 saham.

p. Saham Tresuri

Instrumen ekuitas sendiri yang diperoleh kembali (saham tresuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Perusahaan. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

q. Informasi Segmen

Perusahaan secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 32, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

r. Biaya emisi saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of shares outstanding during the year.

Total weighted average number of shares outstanding for the years ended December 31, 2024 and 2023 are 5,276,771,300 shares, respectively.

p. Treasury Shares

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares) are recognized at reacquisition cost and deducted from equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration, if reissued, is recognized as part of additional paid-in capital in the equity.

q. Segment Information

The management regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 32, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

r. Issuance Costs of Share Capital

Costs incurred in connection with the Company's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the statement of financial position.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Saldo kontrak

Aset kontrak

Aset kontrak merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan). Pada saat penyelesaian jasa pelayanan kapal serta jasa pengangkutan dan lainnya dan penerimaan oleh pelanggan, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

Aset kontrak tunduk pada penilaian penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi tentang penurunan nilai aset keuangan di Catatan 2f Instrumen keuangan – pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

t. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 24 Maret 2025:

Mulai Efektif pada atau setelah Tanggal 1 Januari 2025

Amendemen PSAK 221 (dahulu PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Amendemen tersebut mengklarifikasi bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan dan bagaimana entitas harus menentukan nilai tukar spot ketika kemampuan tukarnya kurang, serta mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari adanya mata uang yang bisa ditukar. Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan dapat diterapkan lebih dini.

Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Revenue from Contracts with Customers

Contract balances

Contract assets

Contract assets represents receivables from customers for services that have been completed by the Company but have not yet been billed (unbilled receivables). Upon completion of the ship services and freight and other services and acceptance by the customer, the amount recognized as contract assets is reclassified to trade receivables.

Contract assets are subject to impairment assessment. Refer to accounting policies on impairment of financial assets in Note 2f Financial instruments – initial recognition and subsequent measurement.

t. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of March 24, 2025:

Effective Beginning on or after January 1, 2025

Amendment PSAK 221 (formerly PSAK 10): The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The amendments clarify how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking, as well as require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable. The amendments will be effective on January 1, 2025 and earlier application is permitted.

The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai Efektif pada atau setelah Tanggal 1 Januari 2025 (lanjutan)

PSAK 117 (dahulu PSAK 74): Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 (dahulu PSAK 74) akan menggantikan PSAK 62: Kontrak Asuransi. PSAK 117 (dahulu PSAK 74) berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 (dahulu PSAK 74) adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 117 (dahulu PSAK 74) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71) dan PSAK 115 (dahulu PSAK 72) pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117 (dahulu PSAK 74). Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

PSAK 109 (dahulu PSAK 71): Instrumen Keuangan dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60) Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71) terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective Beginning on or after January 1, 2025 (continued)

PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 (formerly PSAK 74) will replace PSAK 62: Insurance Contracts. PSAK 117 (formerly PSAK 74) applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 (formerly PSAK 74) is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 117 (formerly PSAK 74) is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 109 (formerly PSAK 71) and PSAK 115 (formerly PSAK 72) on or before the date of initial application of PSAK 117 (formerly PSAK 74). This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption.

Effective beginning on or after January 1, 2026

PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instruments and PSAK 107 (formerly PSAK 60) Financial Instruments: Disclosure on Classification and Measurement of Financial Instruments

This amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 (formerly PSAK 71) regarding the derecognition of financial liabilities, as well as clarifying the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

PSAK 109 (dahulu PSAK 71): Instrumen Keuangan dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60) Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan (lanjutan)

Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 (dahulu PSAK 60) terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instruments and PSAK 107 (formerly PSAK 60) Financial Instruments: Disclosure on Classification and Measurement of Financial Instruments (continued)

This amendment also modifies the provisions in PSAK 107 (formerly PSAK 60) regarding the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual requirements that alter the timing or amount of contractual cash flows.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Management believes that the following represent a summary of the significant judgments, estimates and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 16.

Taksiran tagihan restitusi pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 16f.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa.

Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 12.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Taxes (continued)

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 16.

Claims for tax refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 16f.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109 (formerly PSAK 71). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Compay's accounting policies disclosed in Note 2f.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Company as lessee

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not.

The Company considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 12.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estmasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Company as lessee (continued)

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimates and Assumptions

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for Groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha (lanjutan)

Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

Beban pajak kini

Perusahaan mengakui beban pajak kini berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada masa depan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Penyusutan, estimasi nilai sisa dan masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 25 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables (continued)

Further details on trade receivables are disclosed in Note 6.

Current tax expense

The Company recognizes current tax expense based on the estimated taxable income for the period computed using the prevailing tax rates.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that the deductible temporary differences can be utilized to reduce taxable income in the future. Significant estimates by management are required in determining the total deferred tax assets that can be recognized, based on the timing of utilization, the level of future taxable income, and future tax planning strategies.

Depreciation, estimate of residual values and useful life of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 25 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details on fixed asset are disclosed in Note 11.

4. REKLASIFIKASI AKUN

Perusahaan melakukan reklasifikasi pada beberapa akun pada dalam laporan keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

4. ACCOUNT RECLASSIFICATION

The Company reclassified several accounts financial statements to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements for the financial statements as of December 31, 2024, and for the year then ended. The reclassifications are as follows:

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassified*	***Reklasifikasi/ Reclassification***	**Setelah reklasifikasi/ After *reclassified***	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	409.000.607	(184.230)	408.816.377	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	878.583	61.410	939.993	*Other current assets*
TOTAL ASET LANCAR	**409.879.190**	**(122.820)**	**409.756.370**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tidak lancar lainnya	-	122.820	122.820	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**-**	**122.820**	**122.820**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**409.879.190**	**-**	**409.879.190**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
EKUITAS				***EQUITY***
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan Penggunaannya	96.758.091	30.130.970	126.889.061	*Appropriated*
Belum ditentukan Penggunaannya	298.917.202	(30.130.970)	268.786.232	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**395.675.293**	**-**	**395.675.293**	***TOTAL EQUITY***
Beban pokok pendapatan	(798.761.967)	21.149.667	(777.612.300)	*Cost of revenues*
Beban umum dan administrasi	(165.468.611)	(21.149.667)	(186.618.278)	*General and administrative expenses*
TOTAL BEBAN OPERASI	**(964.230.578)**	**-**	**(964.230.578)**	***TOTAL OPERATING EXPENSES***

5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/*December 31,* 2024	2023	
Kas	**-**	**23**	***Cash on hand***
Bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 27)			*Related parties (Note 27)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.743.932	81.241.304	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.913.956	3.018.558	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.799.079	10.612.540	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.401.985	5.728.239	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi (Catatan 27)			*Related party (Note 27)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	225.182	215.713	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-total bank	**74.084.134**	**100.816.354**	***Sub-total cash in banks***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 27)			*Related parties (Note 27)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	206.000.000	76.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	115.000.000	115.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78.000.000	78.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	39.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-total deposito berjangka	**399.000.000**	**308.000.000**	***Sub-total time deposits***
Total kas dan setara kas	**473.084.134**	**408.816.377**	***Total cash and cash equivalents***

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on the time deposits are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2024	2023	
Rupiah	3,50% - 6,80%	2,25% - 6,10%	*Rupiah*

Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat kas dan setara kas yang dijadikan sebagai jaminan.

As of the reporting date, there were no cash and cash equivalents pledged as collateral.

Saldo kas dan setara kas dibatasi penggunaannya, pada tanggal pelaporan, diklasifikasikan sebagai aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya (catatan 10).

Cash and cash equivalents were restricted to use at the reporting date, classified as other current asset and other non-current asset (note 10).

6. PIUTANG USAHA / *TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables per customer are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bali Infra Gas	8.186.104	6.397.524	*PT Bali Infra Gas*
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	6.289.917	-	*PT Trimegah Bangun Persada Tbk*
PT Energy Marine Indonesia	5.267.163	-	*PT Energy Marine Indonesia*
PT Riandy Fiesta Samudera	4.612.903	-	*PT Riandy Fiesta Samudera*
PT Penascop Maritim Indonesia	4.268.341	2.770.322	*PT Penascop Maritim Indonesia*
PT Lintas Bahari Nusantara	2.453.478	649.119	*PT Lintas Bahari Nusantara*
PT Karya Pacific Shipping	2.404.696	2.504.567	*PT Karya Pacific Shipping*
PT Bahari Eka Nusantara	1.893.843	1.710.134	*PT Bahari Eka Nusantara*
PT Adhika Samudera Jaya	1.735.027	-	*PT Adhika Samudera Jaya*
PT Asia Maritim Line	1.586.884	-	*PT Asia Maritim Line*
PT Bahtera Mitra Sepupu	1.306.936	583.575	*PT Bahtera Mitra Sepupu*
PT Tirta Permai Bahari	774.190	468.763	*PT Tirta Permai Bahari*
PT Bilqis Mutiara Bahari	721.770	606.235	*PT Bilqis Mutiara Bahari*
PT IDT Trans Agency	649.507	1.417.101	*PT IDT Trans Agency*
PT Prima Lestari Segara Abadi	603.077	843.705	*PT Prima Lestari Segara Abadi*
PT Dwidaya Agensi Indonesia	598.327	832.424	*PT Dwidaya Agensi Indonesia*
PT Pelayaran Sinar Dhafitha Utama	561.121	570.408	*PT Pelayaran Sinar Dhafitha Utama*
PT HUA Indonesia Agensi	532.836	-	*PT HUA Indonesia Agensi*
PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping	472.766	947.076	*PT Pelayanan Nasional Bahtera Bestari Shipping*
PT International Total Services and Logistics	437.013	2.798.999	*PT International Total Services and Logistics*
PT Trielang Indo Maritim	67.946	1.173.905	*PT Trielang Indo Maritim*
PT Admiral Lines	-	4.429.459	*PT Admiral Lines*
PT Lintas Samudera Sejahtera	-	3.236.899	*PT Lintas Samudera Sejahtera*
PT Muara Laju Lancar	-	1.537.350	*PT Muara Laju Lancar*
PT Metro Pearl Indonesia	-	1.233.590	*PT Metro Pearl Indonesia*
PT Trans Energy Indonesia	-	770.440	*PT Trans Energy Indonesia*
PT Wallem Sentosa Shipping Indonesia	-	751.408	*PT Wallem Sentosa Shipping Indonesia*
PT Lautan Jaya Manggala	-	512.698	*PT Lautan Jaya Manggala*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	3.610.078	4.571.678	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total pihak ketiga	49.033.923	41.317.379	*Sub-total third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(4.142.313)	(3.641.659)	*Allowance for impairment*
Sub-total pihak ketiga - neto	44.891.610	37.675.720	*Sub-total third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 27)			***Related parties (Note 27)***
SPJM	72.713.764	-	*SPJM*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	52.184.561	-	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")*
PT PLN Energi Gas (dahulu PT PLN Gas & Geothermal)	8.809.480	-	*PT PLN Energi Gas (formerly PT PLN Gas & Geothermal)*
PT Pertamina Trans Kontinental	8.171.454	1.464.542	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	2.590.198	2.590.198	*PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")*
PT Adhi Guna Putera	2.517.006	-	*PT Adhi Guna Putera*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	947.714	444.508	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total pihak berelasi	147.934.177	4.499.248	*Sub-total related parties*

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of trade receivables per customer are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Sub-total pihak berelasi (lanjutan)	147.934.177	4.499.248	*Sub-total related parties (continued)*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan atas penurunan nilai	(369.394)	(55.998)	*Allowance for impairment*
Sub-total pihak berelasi - neto	147.564.783	4.443.250	*Sub-total related parties - net*
Neto	**192.456.393**	**42.118.970**	***Net***

Seluruh transaksi piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivable transactions are denominated in Rupiah

Piutang usaha tidak dijaminkan dan tidak dikenakan bunga.

Trade receivables are unsecured and non-interest bearing.

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Lancar	25.985.273	20.165.451	*Current*
Telah jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	29.698.712	4.588.404	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	67.763.489	2.409.303	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	2.447.054	3.062.486	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	71.073.572	15.590.983	*More than 90 days*
Total	196.968.100	45.816.627	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(4.511.707)	(3.697.657)	*Allowance for impairment*
Neto	**192.456.393**	**42.118.970**	***Net***

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	3.697.657	3.079.480	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	814.050	618.177	*Allowance for the year*
Saldo akhir	**4.511.707**	**3.697.657**	***Ending balance***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha (Catatan 30).

6. *TRADE RECEIVABLES (continued)*

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible expected credit losses that may arise from the uncollectability of trade receivables (Note 30).

7. ASET KONTRAK

Aset kontrak merupakan piutang kepada pelanggan atas jasa yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan, namun belum difakturkan (piutang belum difakturkan). Rincian aset kontrak sebagai berikut:

7. *CONTRACT ASSETS*

Contract assets represents receivables from customers for services that have been completed by the Company but have not yet been billed (unbilled receivables). The details of the contract assets are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Langlang Laju Layang	77.058.450	42.621.881	*PT Langlang Laju Layang*
PT Bali Infra Gas	-	1.980.642	*PT Bali Infra Gas*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000)	1.353.830	338.629	*Others (below Rp1.000.000 each)*
Sub-total pihak ketiga	78.412.280	44.941.152	*Sub-total third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(2.262.178)	-	*Allowance for impairment*
Sub-total pihak ketiga - neto	**76.150.102**	**44.941.152**	*Sub-total third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 27)			***Related parties (Note 27)***
SPJM	68.695.589	183.762.810	*SPJM*
Pelindo	50.849.700	92.399.601	*Pelindo*
PT Adhi Guna Putera	5.770.461	11.422.853	*PT Adhi Guna Putera*
PT PLN Energi Gas (dahulu PT PLN Gas & Geothermal)	2.473.055	11.937.774	*PT PLN Energi Gas (formerly PT PLN Gas & Geothermal)*
PT Jawa Satu Power	-	9.882.774	*PT Jawa Satu Power*
PT Pertamina Trans Kontinental	-	4.003.859	*PT Pertamina Trans Kontinental*
Lain-lain (masing-masing Dibawah Rp1.000.000)	1.412.650	-	*Others (below Rp1.000.00 each)*
Sub-total pihak berelasi	129.201.455	313.409.671	*Sub-total related parties*
Total	**205.351.557**	**358.350.823**	***Total***

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	2.262.178	-	*Allowance for the year*
Saldo akhir	**2.262.178**	**-**	***Ending balance***

7. ASET KONTRAK (lanjutan) / *CONTRACT ASSETS (continued)*

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari aset kontrak (Catatan 30).

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible expected credit losses that may arise from contract assets (Note 30).

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *OTHER RECEIVABLES*

Piutang lain-lain merupakan piutang atas penggantian biaya pemeliharaan kapal milik Pelindo.

Other receivables represent receivables for reimbursements of the maintenance costs of Pelindo's vessels.

Piutang lain-lain tidak dijaminkan dan tidak dikenakan bunga.

Other receivables are unsecured and non-interest bearing.

9. PERSEDIAAN / *INVENTORIES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Bahan bakar	21.596.039	23.502.239	*Fuel*
Suku cadang kapal	-	1.356.142	*Vessel Spare parts*
Perlengkapan kapal	-	98.548	*Vessel equipments*
Alat tulis kantor	-	17.276	*Office supplies*
Lain-lain	-	98.461	*Others*
Total	**21.596.039**	**25.072.666**	***Total***

Persediaan tidak diasuransikan karena manajemen menilai risiko kerugian adalah minimal.

Inventories are not covered by insurance, as management has assessed the risk of loss as minimal.

Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat persediaan yang dijadikan sebagai jaminan.

As of the reporting date, there are no inventories pledged as collateral.

10. ASET LAINNYA / *OTHER ASSETS*

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Aset lancar lainnya			***Other current assets***
Uang muka	3.444.078	-	*Advances*
Beban dibayar dimuka	1.953.770	-	*Prepaid expenses*
Kas yang dibatasi penggunaannya	96.122	61.410	*Restricted cash*
Uang jaminan	-	878.583	*Collateral fund*
Total aset lancar lainnya	**5.493.970**	**939.993**	***Total other current asset***
Aset tidak lancar lainnya			***Other non-current assets***
Kas yang dibatasi penggunaannya	130.846	122.820	*Restricted cash*
Total aset tidak lancar lainnya	**130.846**	**122.820**	***Tota other non-current assets***

10. ASET LAINNYA (lanjutan)

Uang muka merupakan uang muka atas pembelian suku cadang, bahan bakar dan biaya operasi lainnya.

Beban dibayar dimuka merupakan premi asuransi kesehatan pegawai untuk periode Januari - Juni 2025.

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi yang ditangguhkan dan akan distribusikan selama satu hingga tiga tahun kedepan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

10. *OTHER ASSETS (continued)*

Advances mainly represent advances for purchases of spare parts, fuel and other operating costs.

Prepaid expenses represent employee health insurance premiums for the period January - June 2025.

Restricted cash represents the deferred bonuses for the Board of Commissioners and Directors, which will be distributed over a period of one to three years. This matter regulated in Ministerial Regulation SOE 03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

11. ASET TETAP - NETO

Akun ini terdiri dari:

11. *FIXED ASSETS - NET*

This account consists of the following:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	12.359.784	-	-	-	12.359.784	*Buildings*
Kapal	785.328.899	23.127.426	-	-	808.456.325	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.400.603	-	-	-	5.400.603	*Port facilities*
Kendaraan	-	580.000	-	-	580.000	*Vehicle*
Aset dalam penyelesaian	-	1.025.422	-	-	1.025.422	*Construction in progress*
Total harga perolehan	803.089.286	24.732.848	-		827.822.134	*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(241.041)	(484.504)	-	-	(725.545)	*Buildings*
Kapal	(218.437.510)	(41.883.959)	-	-	(260.321.469)	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.405.014)	(880.909)	-	-	(4.285.923)	*Port facilities*
Kendaraan	-	(58.000)	-	-	(58.000)	*Vehicle*
Total akumulasi penyusutan	(222.083.565)	(43.307.372)	-	-	(265.390.937)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**581.005.721**				**562.431.197**	***Net book value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	626.684	-	-	11.733.100	12.359.784	*Buildings*
Kapal	642.497.928	49.785.330	-	93.045.641	785.328.899	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	4.290.547	-	-	1.110.056	5.400.603	*Port facilities*
Aset dalam penyelesaian	71.577.371	34.311.426	-	(105.888.797)	-	*Construction in progress*
Total harga perolehan	718.992.530	84.096.756	-	-	803.089.286	*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(45.990)	(195.051)	-	-	(241.041)	*Buildings*
Kapal	(178.999.969)	(39.437.541)	-	-	(218.437.510)	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.822.449)	(1.582.565)	-	-	(3.405.014)	*Port facilities*
Total akumulasi penyusutan	(180.868.408)	(41.215.157)	-	-	(222.083.565)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**538.124.122**				**581.005.721**	***Net book value***

Seluruh aset tetap dimiliki secara langsung oleh Perusahaan.

All fixed assets are directly owned by the Company.

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *11. FIXED ASSETS - NET (continued)*

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan kondisi yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that there are no events and conditions that indicate a potential impairment of fixed assets as of December 31, 2024 and 2023.

Aset dalam penyelesaian merupakan perencanaan *detail engineering design* (DED) untuk 2 (dua) kapal tunda. Progress hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar 70%.

Construction in progress represent the detail engineering design (DED) work for 2 (two) tugboats. Until December 31, 2024, construction in progress is 70%.

Penyusutan aset tetap dibebankan sebagai berikut:

Fixed assets depreciation is charged as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban pokok pendapatan	41.883.959	39.437.541	*Cost of revenues*
Beban umum dan administrasi	1.423.413	1.777.616	*General and administrative expenses*
Total	**43.307.372**	**41.215.157**	***Total***

Tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan.

There are no fixed assets that have been fully depreciated but are still used to support the Company's operations.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mengasuransikan aset tetap kapal sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the Company insured its vessels as follows:

31 Desember 2024: / *December 31, 2024:*

Perusahaan Asuransi/ ***Insurance Company***	**Risiko Asuransi/** ***Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT BRI Asuransi Indonesia PT Asuransi Ramayana Tbk PT Asuransi Centra Asia PT Asuransi Arthagraha PT Asuransi Jasa Raharja Putera PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan hull (machinery breakdown) / *risk of loss caused by machine and hull damage (machinery breakdown)*	Rp531.038.536

31 Desember 2023: / *December 31, 2023:*

Perusahaan Asuransi/ ***Insurance Company***	**Risiko Asuransi/** ***Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Ramayana PT Asuransi Arthagraha	Risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan hull (machinery breakdown) / *risk of loss caused by machine and hull damage (machinery breakdown)*	Rp317.689.759

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Management believes the insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan.

11. FIXED ASSETS - NET (continued)

As of the reporting date, there are no fixed assets pledged as collateral.

12. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

12. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Bangunan	21.735.650	1.318.460	(1.398.776)	-	21.655.334	*Buildings*
Kapal Tunda	106.577.392	151.923.580	(72.157.878)	-	186.343.094	*Tug vessels*
Kendaraan	2.969.406	445.510	(496.545)	-	2.918.371	*Vehicles*
Total harga perolehan	131.282.448	153.687.550	(74.053.199)	-	210.916.799	*Total acquisition costs*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	(8.918.789)	(7.700.299)	1.398.776	-	(15.220.312)	*Buildings*
Kapal Tunda	(81.161.061)	(103.838.249)	72.157.878	-	(112.841.432)	*Tug vessels*
Kendaraan	(2.694.642)	(720.273)	496.545	-	(2.918.370)	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	(92.774.492)	(112.258.821)	74.053.199	-	(130.980.114)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**38.507.956**				**79.936.685**	***Net book value***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Bangunan	9.277.662	19.323.616	(6.865.628)	-	21.735.650	*Buildings*
Kapal Tunda	119.863.752	48.982.022	(62.268.382)	-	106.577.392	*Tug vessels*
Kendaraan	6.286.661	-	(3.317.255)	-	2.969.406	*Vehicles*
Total harga perolehan	135.428.075	68.305.638	(72.451.265)	-	131.282.448	*Total acquisition costs*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	(7.763.520)	(8.020.897)	6.865.628	-	(8.918.789)	*Buildings*
Kapal Tunda	(115.852.373)	(27.577.070)	62.268.382	-	(81.161.061)	*Tug vessels*
Kendaraan	(5.118.645)	(893.252)	3.317.255	-	(2.694.642)	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	(128.734.538)	(36.491.219)	72.451.265	-	(92.774.492)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**6.693.537**				**38.507.956**	***Net book value***

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Bagian jangka pendek	84.927.058	32.485.372	*Current portion*
Bagian jangka panjang	6.735.657	7.030.080	*Non-current portion*
Total	**91.662.715**	**39.515.452**	***Total***

12. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

12. RIGHT-OF-USE ASETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban bunga atas liabilitas sewa	11.133.152	2.717.025	*Interest expense on lease liabilities*
Beban penyusutan aset hak-guna	112.258.821	36.491.219	*Depreciation expense of right-of-use assets*

Penyusutan aset hak-guna dibebankan sebagai berikut:

Right-of-use assets depreciation is charged as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban pokok pendapatan	103.838.249	27.577.070	*Cost of revenues*
Beban umum dan administrasi	8.420.572	8.914.149	*General and administrative expenses*
Total	**112.258.821**	**36.491.219**	***Total***

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

Some leases contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Saldo awal	39.515.452	7.028.581	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	153.687.551	68.305.635	*Addition during the year*
Arus kas	(120.788.859)	(38.535.789)	*Cash flow*
Perubahan non-kas	19.248.571	2.717.025	*Non-cash changes*
Total	**91.662.715**	**39.515.452**	***Total***

13. UTANG USAHA / *13. TRADE PAYABLES*

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on vendors are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	5.463.543	-	*PT Trimegah Bangun Persada Tbk*
PT Petro Gasindo Intiniaga	2.389.608	-	*PT Petro Gasindo Intiniaga*
PT Hokari Linex Pratama	1.395.285	-	*PT Hokari Linex Pratama*
PT Pelayaran Nusantara Putra Samudra	1.180.000	-	*PT Pelayaran Nusantara Putra Samudra*
PT Panca Bina Persada	1.021.601	-	*PT Panca Bina Persada*
PT Karya Teknik Sentosa	-	1.284.252	*PT Karya Teknik Sentosa*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000)	3.813.195	2.810.838	*Others (below Rp1,000,000 each)*
Sub-total pihak ketiga	15.263.232	4.095.090	*Sub-total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 27)			***Related parties (Note 27)***
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	2.721.787	414.561	*PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia("PMLI")*
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	2.391.779	-	*PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")*
PT Nusantara Regas	2.238.749	5.441.452	*PT Nusantara Regas*
Pelindo	2.231.310	10.718.976	*Pelindo*
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	1.721.133	-	*PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")*
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")	1.227.688	-	*PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")*
PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	-	1.614.257	*PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	1.580.311	274.834	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total pihak berelasi	14.112.757	18.464.080	*Sub-total related parties*
Total	**29.375.989**	**22.559.170**	***Total***

Seluruh transaksi utang usaha Perusahaan menggunakan Rupiah Indonesia.

All of the Company's trade payables transaction denominated in Indonesian Rupiah.

14. UANG TITIPAN / *14. DEPOSITS*

Akun ini merupakan uang titipan pelanggan dan uang titipan atas potongan penghasilan karyawan yang akan disalurkan ke dana pensiun karyawan, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan PT Taspen (Persero).

The account represents customer deposits and deposits for employee income deductions that will be disbursed to pension fund, BPJS Employment, BPJS Health and PT Taspen (Persero).

15. BEBAN AKRUAL / *15. ACCRUED EXPENSES*

Beban akrual terdiri dari:

Accrued expenses consist of:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Kerja sama mitra usaha	54.568.444	84.913.770	*Partnership*
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	46.492.476	44.132.383	*Salaries, allowance and employee welfare*
Pemeliharaan kapal	38.467.210	13.547.658	*Ship maintenance*
Bahan bakar dan pelumas	35.124.161	26.055.976	*Fuel and lubricants*
Pencadangan pajak	3.476.066	-	*Tax provision*
Asuransi	2.250.686	-	*Insurance*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	5.607.392	6.189.818	*Others (below Rp500,000 each)*
Total	**185.986.435**	**174.839.605**	***Total***

15. BEBAN AKRUAL (lanjutan) / *15. ACCRUED EXPENSES (continued)*

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan pelanggan atas kegiatan pelayanan kapal dan beban pegawai nonorganik.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with customers for ship services and outsourcing expenses.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban atas gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan

Accrued expenses - employee mainly represents the expense arising from salaries, allowance and employee welfare

16. PERPAJAKAN / *16. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid tax*

Pajak dibayar di muka merupakan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Prepaid taxes represent Value Added Tax ("VAT").

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Rincian utang pajak terdiri dari: / *Details of taxes payable consists of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 29	19.157.863	4.352.916	*Article 29*
Pajak penghasilan lain-lain:			*Other income taxes:*
Pasal 4 (2)	245.519	44.875	*Article 4 (2)*
Pasal 15		6.288	*Article 15*
Pasal 21	1.233.122	3.400.818	*Article 21*
Pasal 23	114.550	214.678	*Article 23*
Pasal 25	567.078	1.175.425	*Article 25*
Pasal 26	-	29.532	*Article 26*
Total	**21.318.132**	**9.224.532**	***Total***

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Years ended December 31*,		
	2024	**2023**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	214.188.292	195.943.956	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Bonus	17.270.763	14.696.999	*Bonus*
Penyusutan aset tetap	(4.337.601)	(2.257.591)	*Depreciation of fixed assets*
Beban sewa	2.603.114	672.455	*Lease expense*
Penyisihan penurunan nilai Piutang usaha dan aset kontrak	3.076.228	618.177	*Allowance for impairment of trade receivables and contract assets*
Sub-total perbedaan temporer	18.612.504	13.730.040	*Sub-total temporary differences:*

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba pajak adalah sebagai berikut:

16. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

The reconciliation between income before corporate income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Years ended December 31*,		
	2024	**2023**	
Sub-total perbedaan temporer (lanjutan)	18.612.504	13.730.040	*Sub-total temporary differences (continued)*
Perbedaan permanen:			*Permanent differences:*
Kesejahteraan karyawan, imbalan kerja dan beban lainnya	18.573.760	16.321.493	*Employee welfare, employee benefits and other expenses*
Promosi dan pemasaran	7.139.144	10.920.563	*Promotion and marketing*
Hasil pemeriksaan pajak	1.898.168	(6.499.000)	*Tax letter assessment result*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(17.932.644)	(14.233.852)	*Finance income subject to final tax*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	-	(40.706.743)	*Revenue subjected to final income tax*
Sub-total perbedaan permanen	9.678.428	(34.197.539)	*Sub-total permanent differences:*
Taksiran penghasilan kena pajak	**242.479.224**	**175.476.457**	***Estimated taxable income***

Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

The calculation of current income tax expense - current year and estimated payable corporate income tax are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Taksiran penghasilan kena pajak	242.479.222	175.476.457	*Estimated taxable income*
Pajak penghasilan badan - tahun berjalan	53.345.429	38.604.820	*Corporate income tax - current year*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan dibayar di muka :			*Prepaid income taxes :*
Pasal 23	20.837.759	15.862.576	*Article 23*
Pasal 25	13.349.807	18.389.328	*Article 25*
Taksiran utang pajak tahun berjalan - Pasal 29	**19.157.863**	**4.352.916**	***Estimated tax payable current year - Article 29***

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

16. PERPAJAKAN (lanjutan) / *16. TAXATION (continued)*

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) / *c. Corporate income tax (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Years ended December 31*,		
	2024	**2023**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	214.188.292	195.943.956	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	(47.121.424)	(43.107.670)	*Income tax calculated at applicable rate*
Dampak perbedaan permanen:			*Effect of permanent differences:*
Kesejahteraan karyawan, imbalan kerja dan beban lainnya	(4.086.228)	(3.590.728)	*Employee welfare, employee benefits and other expenses*
Promosi dan pemasaran	(1.570.612)	(2.402.524)	*Promotion and marketing*
Hasil pemeriksaan pajak	(417.597)	1.429.780	*Tax letter assessment result*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	3.945.182	3.131.447	*Finance income subject to final tax*
Pendapatan (beban) yang dikenakan pajak final	-	8.955.484	*Revenue (expense) subjected to final income tax*
Penyesuaian	1.905.270	(2.697.757)	*Adjustments*
Beban pajak penghasilan	**(47.345.409)**	**(38.281.968)**	***Income tax expense***

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2024 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2024.

The calculation of estimated taxable income for the year 2024 will be used as basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2024.

d. Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut: / *d. The details of income tax expenses is as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Kini	(53.345.429)	(38.604.820)	*Current*
Tangguhan	6.000.020	322.852	*Deferred*
Beban pajak penghasilan	**(47.345.409)**	**(38.281.968)**	***Income tax expense***

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

16. TAXATION (continued)

e. Deferred taxes

The details of deferred tax assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Laporan Laba Rugi/ *Statement of Profit or Loss*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Bonus	9.379.890	3.799.568	92.208	13.271.666	*Bonus*
Penyusutan aset tetap	2.571.553	(954.272)	27.670	1.644.951	*Depreciation of fixed assets*
Beban sewa	8.693.399	(24.124.257)	35.596.653	20.165.795	*Lease expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dan aset kontrak	813.483	676.770	-	1.490.253	*Allowance for impairment of receivables and contract assets*
Total	**21.458.325**	**(20.602.191)**	**35.716.531**	**36.572.665**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Beban sewa	(8.471.748)	24.696.941	(33.811.261)	(17.586.068)	*Lease expense*
Total	**(8.471.748)**	**24.696.941**	**(33.811.261)**	**(17.586.068)**	***Total***
Aset pajak tangguhan, neto	**12.986.577**	**4.094.750**	**1.905.270**	**18.986.597**	***Deferred tax assets, net***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Laporan Laba Rugi/ *Statement of Profit or Loss*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Bonus	7.794.837	3.233.340	(1.648.287)	9.379.890	*Bonus*
Penyusutan aset tetap	4.117.693	(496.670)	(1.049.470)	2.571.553	*Depreciation of fixed assets*
Beban sewa	1.546.287	(7.880.128)	15.027.240	8.693.399	*Lease expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dan aset kontrak	677.484	135.999	-	813.483	*Allowance for impairment of receivables and contract assets*
Total	**14.136.301**	**(5.007.459)**	**12.329.483**	**21.458.325**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Beban sewa	(1.472.576)	8.028.068	(15.027.240)	(8.471.748)	*Lease expense*
Total	**(1.472.576)**	**8.028.068**	**(15.027.240)**	**(8.471.748)**	***Total***
Aset pajak tangguhan, neto	**12.663.725**	**3.020.609**	**(2.697.757)**	**12.986.577**	***Deferred tax assets, net***

16. PERPAJAKAN (lanjutan) / *16. TAXATION (continued)*

f. Taksiran tagihan restitusi pajak dan Surat Ketetapan Pajak / *f. Estimated claims for tax refund and Tax Assessment Letter*

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Pajak Pertambahan Nilai	49.658.080	-	*Value Added Tax*
Neto	**49.658.080**	**-**	***Net***

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa 2022 dan 2023

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Perusahaan mengajukan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") masa pajak 2022 dan 2023 sebesar Rp49.658.080. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan restusi ini sedang dalam proses pemeriksaan di Kantor Pajak.

Value Added Tax Refunds Period 2022 and 2023

On October 18, 2024, the Company filed a refund of Value Added Tax ("VAT") for the tax period of 2022 and 2023 amounting to Rp49,658,080. Until the issuance date of the financial statements, the restitution request is in the process of examination at the Tax Office.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Pada tanggal 10 Oktober 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp19.728.831 dari pengajuan restitusi PPN masa 2021 sebesar Rp19.745.078.

Pada tanggal 14 November 2023, Perusahaan menerima pembayaran atas SKPLB tersebut sebesar Rp17.994.078 setelah dikompensasi dengan beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") sebesar Rp1.734.753.

Selisih antara pengajuan restitusi awal dengan SKPLB serta kompensasi atas STP dan SKPKB sehubungan dengan proses restitusi PPN ini, telah dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Tax assessment letter for fiscal yeas 2021

On October 10, 2023, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") amounting to Rp19,728,831 for the VAT refund submission for the period of 2021, which was initially claimed at Rp19,745,078.

On November 14, 2023, the Company received a payment of Rp17,994,078 for the the SKPLB after compensated to several Tax Collection Letters ("STP") and Underpayment Tax Assessment Letters ("SKPKB") amounting to Rp1,734,753.

The difference between the initial restitution submission and SKPLB as well as compensation for STP and SKPKB in relation with the VAT restitution process, has been recorded in statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023.

g. Pajak Penghasilan Pilar Dua / *g. Pillar Two Income Taxes*

Berbagai negara telah memberlakukan atau bermaksud memberlakukan undang-undang perpajakan untuk mematuhi aturan model Pilar Dua, termasuk Indonesia (Catatan 2n). Perusahaan berada dalam lingkup PMK 136/2024, yang tidak berdampak pada laporan keuangan 2024 tetapi mungkin akan mempengaruhi laporan keuangan mulai 1 Januari 2025 dan seterusnya.

Various countries have enacted or intend to enact tax legislation to comply with Pillar Two model rules, including Indonesia (Note 2n). The Company is within the scope of PMK 136/2024, which did not impact 2024 financial statements but may impact the Company's financial statements from January 1, 2025 onward.

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Pajak Penghasilan Pilar Dua (lanjutan)

PMK 136/2024 menerapkan mekanisme perpajakan baru yang mensyaratkan Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk membayar pajak tambahan di suatu yurisdiksi ketika tarif pajak efektif, yang ditentukan berdasarkan yurisdiksi menurut aturan Pilar Dua, lebih rendah dari tarif minimum 15%. PMK 136/2024 menetapkan mekanisme untuk menentukan entitas mana (atau entitas-entitas mana) dalam Grup PMN yang harus menerapkan pajak tambahan tersebut dan porsi pajak yang dibebankan kepada setiap entitas terkait.

Aturan model Pilar Dua adalah kompleks dan Perusahaan sedang dalam proses untuk mengestimasi dampak potensialnya terhadap laporan keuangan, jika ada. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Perusahaan tidak mengharapkan adanya dampak material terhadap laporan keuangan.

16. TAXATION (continued)

g. Pillar Two Income Taxes (continued)

PMK 136/2024 applies new taxing mechanisms under which a Multinational Enterprises ("MNE") would pay a top-up tax in a jurisdiction whenever the efective tax rate, determined on a jurisdictional basis under the Pillar Two rules is below a 15% minimum rate. PMK 136/2024 sets out the mechanics for determining which entity (or entities) in an MNE Group should apply the top-up tax and the portion of such tax that is charged to each relevant entity.

The Pillar Two model rules are complex and the Company is still in the process of assessing potential impact to the financial statements, if any. Based on currently available information, the Company does not expect any material impact to the financial statements.

17. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

17. SHARE CAPITAL

The shareholder of the Company as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Nominal/ *Amount*	*Shareholders*
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	4.063.504.600	76,89%	406.350.460	*PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")*
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	5.800.000	0,11%	580.000	*PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")*
Masyarakat:				*Public:*
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	569.551.400	10,78%	56.955.140	*PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")*
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	637.915.300	12,07%	63.791.530	*Others (less than 5% each equity for shareholders)*
	5.276.771.300	99,85%	527.677.130	
Saham tresuri	8.039.800	0,15%	803.980	*Treasury stock*
Total	**5.284.811.100**	**100%**	**528.481.110**	***Total***

Pada tanggal 3 Januari 2022, Pelindo dan SPJM menyepakati Perjanjian No.SK.03/3/1/2/PBAN/UTMA/PLND-22 perihal Pengalihan Hak Atas Saham Pelindo pada Perusahaan sebanyak 4.063.504.600 lembar saham atau sama dengan 76,89% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan kepada SPJM.

Pada tanggal 4 Januari 2022, SPJM telah melaporkan Kepemilikan Saham atas Perusahaan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. HM.01.01/2/PLJM-2022.

On January 3, 2022 Pelindo and SPJM consented to Agreement No. SK.03/3/1/21PBAN/UTMA/PLND-22 regarding the Transfer of Rights of Pelindo's shares around 4,063,504,600 shares or equal to 76.89% of the total issued and paid-up capital of the Company to SPJM.

On January 4, 2022, SPJM have reported Share Ownership of the Company to the Chief Executive of Capital Market Supervisory of Otoritas Jasa Keuangan through letter No. HM.01.01/2/PLJM-2022.

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan susunan pemegang saham Perusahaan telah diaktakan melalui Akta No. 29 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 14 April 2022. Perubahan tersebut telah diberitahukan dan telah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-01.09-0010472 tanggal 28 April 2022.

17. SHARE CAPITAL (continued)

The change in the composition of the Company's shareholders has been notarized through Deed No. 29 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, on April 14, 2022. This change has been notified and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Letter No. AHU-01.09-0010472 dated April 28, 2022.

18. SAHAM TRESURI

Dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi pada tanggal 18 Maret 2020 dan 2 Juli 2020, para pemegang saham menyetujui rencana manajemen untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang beredar di Masyarakat, dalam jangka waktu, antara tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dan 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020, dengan pembelian maksimum masing-masing sejumlah 20.000.000 saham dan 15.000.000 saham dari seluruh saham Perusahaan yang beredar di masyarakat.

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham tresuri sebanyak 8.039.800 saham dengan harga perolehan sebesar Rp1.617.838, yang disajikan sebagai akun “Saham Tresuri” yang mengurangi ekuitas pada laporan posisi keuangan.

18. TREASURY STOCK

In the Minutes of the Directors' Agreement dated March 18, 2020, and July 2, 2020, the shareholders approved the management's plan to repurchase shares outstanding in the public within the periods from March 20, 2020, to June 18, 2020, and from July 7, 2020, to September 30, 2020, with a maximum purchase of 20,000,000 shares and 15,000,000 shares, respectively, from all shares of the Company outstanding in the public.

The Company has purchased amounting to 8,039,800 treasury stock with acquisition price amounting to Rp1,617,838, which presented as “Treasury Stock” account that deducted the equity in the statement of financial position.

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari selisih lebih hasil penawaran umum perdana atas nilai nominal saham setelah dikurangi biaya penerbitan (Catatan 1b).

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the premium on stock from excess of proceeds from the initial public offering of shares over par value after deducting the issuance cost (Note 1b).

20. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

Pada tanggal 11 Desember 2024, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2024 sebesar Rp3,80 (nilai penuh) per saham atau seluruhnya sebesar Rp20.051.731 dan dibayarkan pada tanggal 8 dan 17 Januari 2025.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 12 Juni 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2023 untuk dividen dan cadangan umum masing-masing sebesar Rp118.252.446 dan Rp31.532.397. Dividen terdiri dari dividen interim sebesar Rp20.051.731 yang telah dibagikan pada tanggal 24 Januari 2024 dan 16 Februari 2024 dan dividen tunai sebesar Rp98.200.715 pada tanggal 10 Juli, 17 Juli dan 8 Agustus 2024.

20. GENERAL RESERVE AND DIVIDEND

On December 11, 2024, the Company declared the distribution of an interim dividend for 2024 amounting to Rp3.80 (full amount) per share or in total amounting to Rp20,051,731 and paid on January 8 and 17, 2025.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated June 12, 2024, the Company’s shareholders agreed the utilization of the Company’s net income year 2023 for dividend and general reserve amounting to Rp118,252,446 and Rp31,532,397, respectively. The dividend consists of interim dividend amounting to Rp20,051,731 which were paid on January 24, 2024 and February 16, 2024 and cash dividend amounting to Rp98,200,715 which were paid on July 10, July 17 and August 8, 2024.

20. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN (lanjutan)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 21 Juni 2023, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2022 untuk dividen dan Cadangan umum masing-masing sebesar Rp113.028.441 dan Rp30.130.970. Dividen terdiri dari dividen interim sebesar Rp19.418.518 yang telah dibagikan pada tanggal 24 Desember 2022 dan dividen tunai sebesar Rp93.609.923 pada tanggal 20 Juli 2023.

20. GENERAL RESERVE AND DIVIDEND (continued)

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated June 21, 2023, the Company's shareholders agreed the utilization of the Company's net income year 2022 for dividend and general reserve amounting to Rp113,028,441 and Rp30,130,970, respectively. The dividend consists of interim dividend amounting to Rp19,418,518 which were paid on December 24, 2022 and cash dividend amounting to Rp93,609,923 which were paid on July 20, 2023.

21. PENDAPATAN

Pendapatan usaha menurut jenis usaha adalah sebagai berikut:

21. REVENUES

Revenues based on type of operating are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Jasa pelayanan kapal:			*Ship services:*
Penundaan	1.209.515.449	997.791.280	*Tug services*
Pemanduan	91.734.911	62.970.573	*Pilotage services*
Jasa pelayanan kapal	1.301.250.360	1.060.761.853	*Ship services*
Jasa pengangkutan dan lainnya	43.779.897	46.275.622	*Freight and other services*
Jasa pengelolaan kapal	-	31.500.000	*Fleet management services*
Total pendapatan	**1.345.030.257**	**1.138.537.475**	***Total revenues***

Jasa pelayanan kapal merupakan kegiatan operasional utama Perusahaan yang berupa penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal untuk membantu kapal masuk hingga keluar pelabuhan.

Ship service is the Company's main operational activity in the form of providing pilotage and tug services to help ships enter and leave the port.

Rincian pendapatan berdasarkan jenis pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of revenues based on customer type are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pihak ketiga	425.756.385	333.659.850	*Third parties*
Pihak berelasi	919.273.872	804.877.625	*Related parties*
Total pendapatan	**1.345.030.257**	**1.138.537.475**	***Total revenues***

21. PENDAPATAN (lanjutan) / *REVENUES (continued)*

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represent more than 10% of the total revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*				
	Pendapatan/*Revenue*		Persentase dari total pendapatan/*Percentage of total revenue*		
	2024	2023	2024	2023	
SPJM	765.149.068	163.529.263	56,89	14,36	*SPJM*
Pelindo	54.606.833	514.578.319	4,06	45,20	*Pelindo*
Total	**819.755.901**	**678.107.582**	**60,95**	**59,56**	***Total***

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *COST OF REVENUES*

Beban pokok pendapatan menurut jenis usaha adalah sebagai berikut:

Cost of revenues based on type of operating are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	2023	
Jasa pelayanan kapal	897.075.453	723.047.378	*Ship services*
Jasa pengangkutan dan lainnya	29.817.458	32.465.516	*Freight and other services*
Jasa pengelolaan kapal	-	22.099.406	*Fleet management services*
Total	**926.892.911**	**777.612.300**	***Total***

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan jenis biaya adalah sebagai berikut:

Details of cost of revenues based on type of expenses are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	2023	
Bahan bakar, pelumas, air dan makanan	330.734.000	338.089.816	*Fuel, lubricant, water and food*
Kerjasama mitra usaha	270.854.066	239.371.901	*Partnership*
Penyusutan	145.722.208	67.014.611	*Depreciation*
Perbaikan dan pemeliharaan	104.805.150	49.905.770	*Repair and maintenance*
Gaji	41.607.356	48.408.916	*Salaries*
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	14.434.361	13.853.269	*Non-tax state income*
Surat kapal	11.725.143	10.602.528	*Ship letter*
Asuransi	5.502.882	4.238.168	*Insurance*
Lainnya	1.507.745	6.127.321	*Others*
Total	**926.892.911**	**777.612.300**	***Total***

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *22. COST OF REVENUES (continued)*

Pembelian dari pemasok dengan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Purchases from supplier which represent more than 10% of the total revenue are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*				
	Beban/*Expense*		Persentase dari total pendapatan/*Percentage of total revenue*		
	2024	2023	2024	2023	
LEGI	210.015.270	-	15,61	-	*LEGI*
PEL	-	126.917.103	-	11,15	*PEL*
Total	**210.015.270**	**126.917.103**	**15,61**	**11,15**	***Total***

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	2023	
Gaji	78.098.392	87.228.792	*Salaries*
Umum	66.835.566	52.990.237	*General*
Kerjasama mitra usaha	30.854.763	21.138.813	*Partnership*
Penyusutan	9.843.985	10.691.765	*Depreciation*
Bahan bakar, pelumas, air dan makanan	7.772.024	7.805.366	*Fuel, lubricant, water and food*
Perbaikan dan pemeliharaan	7.142.520	4.693.074	*Repair and maintenance*
Asuransi	2.179.533	734.797	*Insurance*
Administrasi kantor	546.538	1.335.434	*Office administrative*
Total	**203.273.321**	**186.618.278**	***Total***

24. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA / *24. OTHER OPERATING INCOME*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	2023	
Penerimaan restitusi pajak	-	6.499.000	*Receipt of tax refund*
Lain-lain	1.341.816	3.682.184	*Others*
Total	**1.341.816**	**10.181.184**	***Total***

25. BEBAN OPERASI LAINNYA / *25. OTHER OPERATING EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	2023	
Pencadangan pajak	3.476.066	-	*Tax provision*
Beban berasal dari surat ketetapan pajak	1.898.168	-	*Expenses from tax assessment letter*
Pajak final atas pendapatan keuangan	1.764.269	724.698	*Final tax on financial income*
Lain-lain	1.663.407	4.512	*Others*
Total	**8.801.910**	**729.210**	***Total***

26. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN / *26. FINANCE INCOME AND EXPENSES*

a. Pendapatan keuangan / *a. Finance income*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pendapatan bunga deposito	14.175.519	13.780.913	*Interest income from time deposit*
Pendapatan jasa giro	3.757.125	1.177.637	*Interest income from current accounts*
Total	**17.932.644**	**14.958.550**	***Total***

b. Beban keuangan / *b. Finance expenses*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Beban bunga sewa	11.133.152	2.717.025	*Lease interest expenses*
Beban administrasi bank	15.131	56.440	*Bank administrative expenses*
Total	**11.148.283**	**2.773.465**	***Total***

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI / *27. RELATED PARTIES INFORMATION*

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Pemegang saham/*Shareholders*	SPJM	Penjualan jasa dan dividen/ *Sales of services and dividend*
	MTI	Dividen/*Dividend*
	PII	Dividen/*Dividend*
Entitas induk SPJM/ *Parent entity of SPJM*	Pelindo	Penjualan dan pembelian jasa dan imbalan kerja/ *Sales and purchase of services, and employee benefits*
Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/*Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*	PTP	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PEL	Penjualan jasa dan pembelian barang/ *Sales of services and purchase of goods*
	JPPI	Penjualan dan pembelian jasa/ *Sales and purchase of services*
	PMLI	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	ILCS	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	LEGI	Pembelian barang/*Purchase of good*

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

27. *RELATED PARTIES INFORMATION (continued)*

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Entitas berelasi dengan pemerintah/ *Government-related entity*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT PLN Energi Gas (dahulu PT PLN Gas & Geothermal)	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Adhi Guna Putera	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi/ *Purchase of insurance services*
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi/ *Purchase of insurance services*
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa/*Sales of services*

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Remunerasi personil manajemen kunci

Key management personnel remuneration

Jumlah gaji, tantiem dan tunjangan lainnya yang dibayar atau diakru kepada manajemen kunci Perusahaan adalah sebesar Rp14.069.485 dan Rp14.303.557 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The amount of salary, tantiem and other benefits paid or accrued to the Company's key management were Rp14,069,485 and Rp14,303,557 for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi

a. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di Lingkungan Pelindo dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut:
   - Kerjasama penyediaan dan pengelolaan kapal tunda dengan bagi hasil sebesar 85% dan 15% masing masing untuk Perusahaan dan Pelindo, dihitung dari pendapatan jasa penundaan dikurangi PNBP, PPh pasal 23, nota koreksi serta pungutan resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku dari pemerintah dan/atau regulator.
   - Kerjasama pengelolaan kapal pandu dengan besaran biaya pengelolaan kapal pandu yang diterima Perusahaan sebesar Rp4.500.000 per bulan pada tahun 2023.
   - Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

   Pada tanggal 11 November 2023, Perusahaan dan Pelindo menandatangani pengakhiran atas perjanjian tersebut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023.

   Pada tanggal 11 Desember 2023, Perusahaan dan SPJM menandatangani Kerjasama Pengelolaan dan Penyediaan Sarana bantu Pemanduan dan Penundaan (SBPP) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 No. KS.02/11/12/2/KOS/DUT/JAI-23 dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2033. Berdasarkan perjanjian, besaran bagi hasil untuk Perusahaan sebagai berikut:
   - Jasa pemanduan 5%
   - Jasa penundaan 90%

b. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara PTP dengan Perusahaan pada tanggal 10 Oktober 2019, PTP sepakat untuk melakukan penyelesaian utang kepada Perusahaan sebesar Rp31.062.213 paling lambat tanggal 5 November 2019. Perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp28.472.015. Pada tanggal 31 Desember 2024 and 2023, sisa saldo piutang kepada PTP masing-masing sebesar Rp2.590.198 (Catatan 6).

27. *RELATED PARTIES INFORMATION (continued)*

The significant agreements and commitments with related parties

a. On December 21, 2018, the Company and Pelindo have signed an agreement regarding the Provision of Supporting Facilities and Infrastructure in Pelindo with the following conditions:
   - *Supply and management cooperation of tug vessels with a sharing fee of 85% and 15% for the Company and Pelindo respectively shall be calculated from tug service revenue after deducting PNBP, Income tax payable of article 23, correction note and and official collection based on applicable regulations from the government and/or regulators.*
   - *Cooperation in the management of pilotage vessel with the management fee of pilotage vessel received by the Company amounting to Rp4,500,000 per month for 2023.*
   - *The period of this agreement is from January 1, 2019 to December 31, 2028.*

   On November 11, 2023, the Company and Pelindo signed a termination of the agreement, effective from August 1, 2023.

   On December 11, 2023, the Company and SPJM signed a Management and Provision of Pilotage and Tug Services (SBPP) Cooperation within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 No. KS.02/11/12/2/KOS/DUT/JAI-23, with a duration of 10 (ten) years, effective from August 1, 2023 to July 31, 2033. Based on agreement, the revenue sharing portion for the Company, are as follows:
   - *Pilotage services 5%*
   - *Tug services 90%*

b. Based on Minutes of Agreement between PTP and the Company dated October 10, 2019, PTP agreed to settled its payables to the Company amounting to Rp31,062,213 by November 5, 2019 at the latest. The Company has received the payment amounting to Rp28,472,015. As of December 31, 2024 and 2023, outstanding of receivables to PTP are Rp2,590,198, respectively (Note 6).

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan karyawan, pada 1 Oktober 2014, Perusahaan melakukan kerjasama dengan Pelindo, untuk menempatkan beberapa karyawan Pelindo ke Perusahaan. Kerjasama tersebut meliputi pembinaan, pengembangan kompetensi serta penghasilan dan remunerasi pegawai sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan Pelindo yang ditugaskan di Perusahaan masing-masing sebanyak 102 dan 124 orang.

d. Pada tanggal 8 Juni 2022, Perusahaan dengan SPJM menandatangani Perjanjian tentang Kerjasama Penyediaan Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Wilayah Kerja Nipa, Batam No. HK.301/8/6/1/MS-22. Nilai Kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Perusahaan mendapatkan bagi hasil sebesar 90% dan SPJM sebesar 10%. Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun sampai dengan Juni 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian.

e. Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan, Pelindo, dan SPJM sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama No. HK.566/30/11/3/MS-22 tentang Penerapan *Fuel Surcharge* atas Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan Pelindo. Perjanjian ini menyepakati besaran bagi hasil adalah 60% untuk Perusahaan, 30% untuk Pelindo, dan 10% untuk SPJM. Jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan 30 November 2027.

Pada tanggal 9 Januari 2023, Perusahaan, Pelindo, dan SPJM sepakat untuk membuat addendum Perjanjian Kerjasama tentang Penerapan *Fuel Surcharge* atas Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan Pelindo. Perjanjian ini menyepakati perubahan besaran bagi hasil adalah 65% untuk Perusahaan, 25% untuk SPJM dan 10% untuk Pelindo.

27. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

The significant agreements and commitments with related parties (continued)

c. In order to meet the needs of employees, on October 1, 2014, the Company entered into agreement with Pelindo, to register several of Pelindo employees in the Company. The Agreement including coaching, competency development employee's income and remuneration in accordance with the agreement of both parties. As of December 31, 2024, and 2023, the number of Pelindo employees assigned in the Company are 102 and 124, respectively.

d. On June 8, 2022, the Company and SPJM entered into Agreement regarding Provision of Tugboats for Tug Services in Nipa, Batam No. HK.301/8/6/1/MS-22. The value of the cooperation agreed in this agreement is that the Company gets a profit sharing of 90% and SPJM of 10%. The term of this agreement is 2 (two) years until June 2023 and the agreement was not extended.

e. On November 30, 2022, the Company, Pelindo and SPJM agreed to entered into Agreement No. HK.566/30/11/3/MS-22 regarding Application of Fuel Surcharge for the Use of Guide Motors and Tugboats within Pelindo. The Agreement agrees to amount of revenue sharing is 60% for the Company, 30% for Pelindo, and 10% for SPJM. A duration of 5 (five) years, effective from November 30, 2022 to November 30, 2027.

On January 9, 2023, the Company, Pelindo and SPJM agreed to made an addendum of Agreement regarding Appllication of Fuel Surcharge for the Use of Guide Motors and Tugboats within Pelindo. This agreement agrees to changes amount of revenue sharing is 65% for the Company, 25% for SPJM and 10% for Pelindo.

28. ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING

28. MONETARY ASSETS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

	31 Desember/*December 31,*			
	2024		2023	
Aset				***Asset***
Kas dan setara kas	AS/US	13.933	AS/US	13.993	*Cash and cash equivalents*

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan merefleksikan nilai wajarnya. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, piutang lain-lain, utang usaha, uang titipan, beban akrual, utang dividen, dan liabilitas sewa. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang diasumsikan sama dengan nilai tunai yang akan diterima atau dibayarkan karena saat jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak-kontrak terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan kapan liabilitas keuangan jangka panjang tersebut akan direalisasi dan dilunasi.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying amounts of financial instruments reflect the estimated fair value. Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

Current financial assets and current financial liabilities

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, trade receivables, contract assets, other receivables, trade payables, deposits, accrued expenses, dividend payables, and lease liabilities. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

Long-term financial liabilities

The fair values of non-current financial liabilities are assumed to be the same as the cash amount that will be received or paid due to the fact that their maturities are not stated in the related contracts, therefore it is not possible to determine when the financial liabilities will be realized and settled.

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk: (lanjutan)

- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Perusahaan tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar".

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1 dan Level 2, dan tidak terdapat pengalihan dari Level 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan diatas.

Tabel berikut menunjukkan jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including: (continued)

- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs), either directly or indirectly.*

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Company does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Company does not present fair value hierarchy under PSAK 68 "Fair Value Measurements".

As of December 31, 2024 and 2023, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed other than above explained.

The following table sets out the carrying amounts and estimated fair values of the Company's financial instruments as of December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember/*December 31*, 2024		31 Desember/*December 31*, 2023		
	Jumlah tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai wajar/ *Fair Value*	Jumlah tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	473.084.134	473.084.134	408.816.377	408.816.377	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	192.456.393	192.456.393	42.118.970	42.118.970	*Trade receivables - net*
Aset kontrak - neto	205.351.557	205.351.557	358.350.823	358.350.823	*Contract assets - net*
Piutang lain-lain	-	-	5.640.100	5.640.100	*Other receivables*
Kas yang dibatasi penggunaannya	226.968	226.968	184.230	184.230	*Restricted cash*
Total	**871.119.052**	**871.119.052**	**815.110.500**	**815.110.500**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	29.375.989	29.375.989	22.559.170	22.559.170	*Trade payables*
Uang titipan	12.475.836	12.475.836	15.424.418	15.424.418	*Deposits*
Beban akrual	185.986.435	185.986.435	174.839.605	174.839.605	*Accrued expenses*
Utang dividen	20.051.731	20.051.731	20.051.731	20.051.731	*Dividend payables*
Liabilitas sewa	91.662.715	91.662.715	39.515.452	39.515.452	*Lease liabilities*
Total	**339.552.706**	**339.552.706**	**272.390.376**	**272.390.376**	***Total***

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset Perusahaan yang terekspos terhadap risiko suku bunga:

30. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES*

The main risks arising from the Company's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

Interest Rate Risks

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at floating interest rates are exposed to cash flows risk.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Company's assets exposed to interest rate risk:

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	Total	
31 Desember 2024						***December 31, 2024***
Kas dan setara kas	74.084.134	-	399.000.000	-	473.084.134	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	96.122	130.846	-	-	226.968	*Restricted cash*
31 Desember 2023						***December 31, 2023***
Kas dan setara kas	100.816.354	-	308.000.000	-	408.816.377	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	61.410	122.820	-	-	184.230	*Restricted cash*

Dampak perubahan tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The effect of changes in the annual interest rates of time deposits to profit before income tax is as follows:

Variabel	Kenaikan/ (Penurunan)/ *Increase/ (Decrease)*	(Penurunan)/Kenaikan Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ *(Decrease)/Increase in Profit Before Tax*	*Variable*
31 Desember 2024			*December 31, 2024*
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ *basis points*	(Rp1.509.583)/Rp1.509.583	*Floating interest rate*
31 Desember 2023			*December 31, 2023*
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ *basis points*	(Rp1.885.760)/Rp1.885.760	*Floating interest rate*

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas dalam mata uang $AS.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Company. Exposure of the Company against exchange rate fluctuations is mainly derived from cash and cash equivalents denominated in $US.

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 30. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	Kenaikan (penurunan) nilai tukar mata uang/ *Increases (decreases) on foreign exchange rates*	Dampak/ *Effect*	
Perubahan kurs mata uang asing 2024	(+)100bps	2.251	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2024*
	(-)100bps	(2.251)	
Perubahan kurs mata uang asing 2023	(+)100bps	2.147	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2023*
	(-)100bps	(2.147)	

Pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan simulasi yang rasional, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebesar 1%, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp2.251, terutama sebagai akibat dari kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas dalam Dolar AS.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perusahaan dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Foreign currency risk (continued)

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 30. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follows:

As of December 31, 2024, based on a sensible simulation, had the exchange rate of Rupiah against the US Dollar depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, income before tax for the period ended December 31, 2024 would have been lower/higher Rp2,251, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents denominated in US Dollar.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counter parties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Company and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak dan piutang lain-lain. Dalam hal kas dan setara kas, Perusahaan menempatkannya di bank yang memiliki modal kuat, bereputasi baik, memiliki pangsa pasar luas serta produk dan jasa keuangan yang lengkap sesuai kebutuhan Perusahaan. Sebagian besar piutang usaha adalah kepada perusahaan berelasi sehingga risiko kreditnya dapat dikelola dengan baik.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

The Company is exposed to credit risk primarily from cash and cash equivalents, trade receivables, contract assets and other receivables. In the case of cash and cash equivalent, the Company places them in banks that have strong capital, good reputation, have broad market share and complete financial products and services according to the Company's needs. Most of the trade receivables are related parties so that credit risk can be managed properly.

Credit risk exposure relating to assets in the statements of financial position is as follow:

	31 Desember/*December 31,*		
	2024	**2023**	
Kas dan setara kas	473.084.134	408.816.377	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	192.456.393	42.118.970	*Trade receivables - net*
Aset kontrak - neto	205.351.557	358.350.823	*Contract assets - net*
Piutang lain-lain	-	5.640.100	*Other receivables*
Kas yang dibatasi penggunaannya	226.968	184.230	*Restricted cash*
Total	**871.119.052**	**815.110.500**	***Total***

Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Perusahaan secara teratur mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasikan kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup pasar modal.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, yang mencakup beban bunga terkait:

Liquidity Risk

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiative, including equity market.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments, which include the related interest charges:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*					
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**2 - 3 tahun/ *2 - 3 years***	**> 3 tahun/ *> 3 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	29.375.989	-	-	-	29.375.989	*Trade payables*
Utang titipan	12.475.836	-	-	-	12.475.836	*Deposits*
Beban akrual	185.986.435	-	-	-	185.986.435	*Accrued expenses*
Utang dividen	20.051.731	-	-	-	20.051.731	*Dividend payables*
Liabilitas Sewa	84.927.058	6.735.657	-	-	91.662.715	*Lease Liabilities*
Total	**332.817.049**	**6.735.657**	**-**	**-**	**339.552.706**	***Total***

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*					
	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	22.559.170	-	-	-	22.559.170	*Trade payables*
Utang titipan	15.424.418	-	-	-	15.424.418	*Deposits*
Beban akrual	174.839.605	-	-	-	174.839.605	*Accrued expenses*
Utang dividen	20.051.731	-	-	-	20.051.731	*Dividend payables*
Liabilitas Sewa	32.485.372	7.030.080	-	-	39.515.452	*Lease Liabilities*
Total	**265.360.296**	**7.030.080**	**-**	**-**	**272.390.376**	***Total***

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan dan PT Cemindo Gemilang Tbk sepakat membuat dan menandatangani surat Perjanjian Nomor HK-566/31/3/1/MS-22 dan 061/CG-JAI/III/2023 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal serta penyediaan sarana bantu pemanduan melalui mekanisme *revenue sharing* dengan persentase untuk Perusahaan sebesar 100% untuk pemanduan dan 10% untuk penundaan.

Pada tanggal 1 April 2024, Perusahaan dan PT Cemindo Gemilang Tbk sepakat untuk memperpanjang jangka waktu kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal serta penyediaan sarana bantu pemanduan sampai dengan 31 Maret 2025.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Cooperation Agreement for Pilotage and Tug services at the Special Terminal of PT Cemindo Gemilang Tbk

On March 31, 2022, the Company and PT Cemindo Gemilang Tbk agreed and signed an Agreement Letter Number HK-566/31/3/1/MS-22 and 061/CG-JAI/III/2023 regarding Cooperation in Ship Pilotage and Tug Services and the provision of pilotage aids through a revenue sharing mechanism with a percentage for The Company is 100% for pilotage and 10% for tug.

On April 1, 2024, the Company and PT Cemindo Gemilang Tbk agreed to extend the term of Cooperation in Ship Pilotage and Tug Services and the provision of pilotage aids until March 31, 2025.

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian sewa kapal tunda untuk wilayah operasional PT Jawa Satu Power

Pada tanggal 5 Februari 2021, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani perjanjian No. HK-566/05/02/01/MS-21 tentang Sewa Kapal Tunda untuk Wilayah Operasional PT Jawa Satu Power. Total biaya sewa 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan sistem *Time Charter* adalah sebesar Rp3.561.360 setiap bulan belum termasuk PPN 10% dengan biaya sewa sejak dimulainya jangka waktu sewa.

Biaya sewa dengan sistem *On Call* sebesar Rp794.480 untuk setiap kegiatan, akan ditagihkan bersama dengan sewa 2 (dua) unit kapal tunda dengan sistem *Time Charter* periode bulan berikutnya. Perjanjian ini telah beberapa kali dilakukan perpanjangan, terakhir pada tanggal 1 Februari 2023 dengan perubahan tarif menjadi Rp3.294.258 untuk sistem *Time* Charter dan Rp734.894 untuk sistem *On Call* serta berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan dan PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera sebagai penyedia jasa Kapal Tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power menandatangani perjanjian atas perjanjian Sewa Kapal Tunda Untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power yang dituangkan dalam Perjanjian No. 2963/126/IX/Direksi-2023 dan PD.02/1/9/1/SPB/DUT/JAI-23. Dalam Perjanjian ini, disepakati perubahan atas total biaya sewa 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan sistem Time Charter menjadi Rp3.094.258 setiap bulan belum termasuk PPN dan juga atas biaya sewa dengan sistem On Call menjadi sebesar Rp685.000 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2028 untuk setiap kegiatan.

Pada tanggal 23 November 2023, Perusahaan dan PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera sebagai penyedia jasa Kapal Tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power menandatangani addendum perjanjian atas perjanjian Sewa Kapal Tunda Untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power yang dituangkan dalam addendum perjanjian No. 3198/126/X/Direksi-2023 dan PJ.01/31/10/1/TPB/DUT/JAI-23.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Tugboat rental agreement for PT Jawa Satu Power operational area

On February 5, 2021, the Company and PT Jawa Satu Power signed agreement No. HK-566/05/02/01/MS-21 regarding Tugboat Rental for PT Jawa Satu Power Operational Area. The total cost of renting 2 (two) units of Tugboats with Time Charter system is Rp3,561,360 per month excluding 10% VAT with rental fees from the beginning of lease term.

Rental fees with On Call system is Rp794,480 for each activity and will be billed together with the rental of 2 (two) units of tugboats with the Time Charter system. The agreement has been amended several times, last amendment on February 1, 2023 with a rate change to Rp3,294,258 for Time Charter system and Rp734,894 for On Call system, valid until June 30, 2023.

On September 1, 2023, the Company and PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera as a provider of Tugboat services for the operational area of Jawa Satu Power signed agreement to the Tugboat Rental agreement for the Jawa Satu Power Operational Area as outlined in Agreement No. 2963/126/IX/Direksi-2023 and PD.02/1/9/1/SPB/DUT/JAI-23. In this agreement, it was agreed to change the total cost of renting 2 (two) units of Tugboats with the Time Charter system to Rp3,094,258 every month excluding VAT and also the rental fee using the On Call system to Rp685,000 starting from July 1, 2023 until June 30, 2028 for each activity.

On November 23, 2023, the Company and PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera as a provider of Tugboat services for the operational area of Jawa Satu Power signed addendum agreement to the Tugboat Rental agreement for the Jawa Satu Power Operational Area as outlined in Agreement No. 3198/126/X/Direksi-2023 and PJ.01/31/10/1/TPB/DUT/JAI-23

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian sewa kapal tunda untuk wilayah operasional PT Jawa Satu Power (lanjutan)

Dalam addendum perjanjian ini, disepakati perubahan nama perseroan PT PLN Gas & Geothermal menjadi PT PLN Energi Gas. Selain itu, disepakati pula ketentuan besaran persentase dari total nilai sewa (Time Charter & On Call) sebagai berikut:
- 70% penagihan (sebelum PPN) kepada PT PLN Energi Gas
- 30% penagihan (sebelum PPN) kepada PT Adhi Guna Putera.

c. Perjanjian kerjasama pelayanan jasa kapal di terminal khusus PT Jawa Satu Power

Pada tanggal 15 April 2021, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani perjanjian No. HK-566/15/4/11/MS-21 tentang pelayanan jasa kapal di terminal khusus PT Jawa Satu Power. Berdasarkan perjanjian, disepakati pula ketentuan besaran persentase pembagian pendapatan yang diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:
- Jasa Pandu: 70% setelah dipotong PNBP pemanduan;
- Stand by Pandu: 90% dari tarif;
- Jasa Tunda: 5% setelah dipotong PNBP penundaan;
- Stand by Kapal Tunda: 5% dari tarif.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani addendum perjanjian, dimana disepakati perjanjian kerjasama ini diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Selain itu terdapat perubahan ketentuan besaran persentase pembagian pendapatan yang diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:
- Jasa Pandu: 70% setelah dipotong PNBP pemanduan;
- Stand by Pandu: 70% dari tarif;
- Jasa Tunda: 10% setelah dipotong PNBP penundaan;
- Stand by Kapal Tunda: 10% dari tarif.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Tugboat rental agreement for PT Jawa Satu Power operational area (continued)

In this addendum agreement, it was agreed the changes name of PT PLN Gas & Geothermal into PT PLN Energi Gas. Furthermore, the agreed-upon provision also specifies the percentage of the total lease value (Time Charter & On Call) as follows:
- *70% billing (before VAT) towards PT PLN Energi Gas*
- *30% billing (before VAT) towards PT Adhi Guna Putera.*

c. Ship service agreement at PT Jawa Satu Power's Terminal

On April 15, 2021, the Company and PT Jawa Satu Power signed an agreement No. HK-566/15/4/11/MS-21 regarding ship services at the PT Jawa Satu Power's Terminal. Based on the agreement, it is also agreed that the percentage of sharing revenue received by the Company is as follows:
- *Pilotage Service: 70% after net off PNBM;*
- *Stand by Pilot: 90% from tariff;*
- *Towage Service: 5% after net off PNBM;*
- *Stand by Tug Boat: 5% dari tariff.*

On December 24, 2024, the Company and PT Jawa Satu Power signed an addendum to the agreement, where it was agreed that the agreement was extended until December 31, 2025. In addition, there are changes in the provisions of the percentage of sharing revenue received by the Company as follows:
- *Pilotage Service: 70% after net off PNBP;*
- *Stand by Pilot: 70% from tariff;*
- *Towage Service: 10% after net off PNBP;*
- *Stand by Tug Boat: 10% dari tariff.*

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh, Aceh

Pada tanggal 18 November 2021, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh Provinsi Aceh yang tertuang dalam Perjanjian No. HK-566/18/11/1/MS-21. Nilai kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 80% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 20% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

Pada tanggal 1 Juli 2024, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh Provinsi Aceh No. PU.01.01/1/7/3/SPB/TPB/JAI-24. Addendum tersebut mengubah persentase nilai kerjasama menjadi Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 72% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 28% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

e. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Maluku Utara

Pada tanggal 17 November 2022, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Perjanjian No. HK-566/17/11/1/MS-22. Nilai kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 83% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 17% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. Cooperation Agreement for Provision of Guiding Assistance Facilities in the Form of Tugboats for Ship Towing Services in Meulaboh Waters, Aceh

On November 18, 2021, the Company and PT Langlang Laju Layang signed a Cooperation Agreement for the Provision of Guiding Aids in The Form of Tugboats for Towing Ships in Meulaboh Waters, Aceh Province as stipulated in Agreement No. HK-566/18/11/1/MS-21. The value of the cooperation agreed in this agreement is that the Company gets 80% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 20% of gross revenue from ship towing services.

The term of this agreement is for 5 (five) years from the signing of Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

On July 1, 2024, the Company and PT Langlang Laju Layang signed an Addendum to the Cooperation Agreement for the Provision of Guiding Aids in The Form of Tugboats for Towing Ships in Meulaboh Waters, Aceh Province, No. PU.01.01/1/7/3/SPB/TPB/JAI-24. The addendum modifies the revenue sharing percentage to the Company gets 72% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 28% of gross revenue from ship towing services.

e. Agreement on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tug Services in the Waters of Weda Harbor (Teluk Weda) North Maluku

On November 17, 2022, the Company and PT Langlang Laju Layang signed a Cooperation to Provide Pilotage Assistance in the Form of Tugboats for Tug Services in the Waters of Weda Port (Teluk Weda) of North Maluku Province as stated in Agreement No. HK-566/17/11/1/MS-22. The value of the cooperation agreed in this agreement is that the Company gets 83% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 17% of gross revenue from ship towing services.

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Maluku Utara

Pada tanggal 1 Juli 2024, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani addendum perjanjian. Addendum tersebut mengubah persentase nilai kerjasama menjadi Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 80% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 20% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Operasi ditandatangani.

e. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Bukit Asam Tbk

Pada tanggal 20 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian No. HK-566/20/10/3/MS-22 tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal milik PT Bukit Asam Tbk.

Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Perusahaan dan PT Bukit Asam Tbk menyepakati perpanjangan Kerjasama sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025.

f. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas Kepulauan Seribu

Pada Tanggal 27 Februari 2020, Perusahaan dan PT Nusantara Regas sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Kepulauan Seribu. Perjanjian ini menyepakati besaran tarif yang dikenakan terhadap kapal LNG pihak ketiga dan kapal LNG yang dikelola PT Nusantara Regas di Terminal Khusus.

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan dan PT Nusantara Regas sepakat untuk menandatangani adendum perubahan besaran tarif kapal LNG, pihak ketiga dan kapal LNG yang dikelola PT Nusantara Regas di Tersus Nusantara Regas dan mengubah hak kedua belah pihak.

Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. Agreement on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tug Services in the Waters of Weda Harbor (Teluk Weda) North Maluku

On July 1, 2024, the Company and PT Langlang Laju Layang signed an addendum that modifies the revenue sharing percentage to the Company gets 80% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 20% of gross revenue from ship towing services.

The agreement period is 5 (five) years from the signing of the Minutes of Commencement of Work (BAMK).

e. Cooperation Agreement on Provision of Guiding Aid Facilities in the Form of Tugboats and Crews with On Call Systems at Terminals for PT Bukit Asam Tbk's Own Interests

On October 20, 2022, the Company signed agreement No. HK-566/20/10/3/MS-22 for the Provision of Guidance Assistance in the Form of Tugboats and Crews with an On Call System at the PT Bukit Asam Tbk's own terminal.

On October 13, 2023, the Company and PT Bukit Asam Tbk agreed to extend the Cooperation until October 19, 2025.

f. Ship service cooperation agreement at the Special Terminal of PT Nusantara Regas in Kepulauan Seribu

On February 27, 2020, the Company and PT Nusantara Regas agreed to sign a Ship Service Cooperaition Agreement at PT Nusantara Regas Special Terminal in Kepualauan Seribu. This agreement agrees on the rate on third party LNG vessels and LNG vessels managed by PT Nusantara Regas at the PT Nusantara Regas Special Terminal.

On April 18, 2023, the Company and PT Nusantara Regas agreed to changes of the tariff for third party LNG vessels and LNG vessels managed by PT Nusantara Regas in Tersus Nusantara Regas.

The agreement has been extend until December 31, 2025.

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Pada Tanggal 12 Juni 2024, Perusahaan dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk menandatangani Perjanjian Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus. Berdasarkan perjanjian, besaran bagi hasil untuk Perusahaan sebagai berikut:
- Jasa pandu 100%
- Jasa tunda 7,5%

Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan 15 Juni 2025.

h. Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara

Pada tanggal 23 Desember 2024, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Perjanjian No.PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24 tentang Penyediaan Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara. Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 85% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. Cooperation Agreement for Pilotage and Tugboat Services at PT Trimegah Bangun Persada Tbk's Private Terminal

On June 12, 2024, the Company and PT Trimegah Bangun Persada Tbk agreed to sign an agreement for Pilotage and Tug Services at Private Terminal. Based on agreement, the revenue sharing portion for the Company, are as follows:
- Pilotage services 100%
- Tug services 7,5%

The agreement is valid until June 15, 2025.

h. Agreement on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tuf Services at Tarakan Port, North Kalimantan

On December 23, 2024, the Company and PT Langlang Laju Layang signed an Agreement No. PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24 on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tuf Services at Tarakan Port, North Kalimantan. The Company obtain 85% revenue sharing of gross revenue from ship towing services.

The agreement is valid for a period of 2 (two) years, effective from the date of signing.

32. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa pelayanan kapal, pengangkutan dan pengelolaan kapal.

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

32. SEGMENT INFORMATION

The Company operates and manages business in a single segment which provides vessel, freight and fleet management services.

Information concerning the Company geographical segment are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Pendapatan			***Revenue***
Jasa kapal - Pelabuhan umum			***Ship services - Public port***
Tanjung Priok	381.268.327	317.494.199	*Tanjung Priok*
Banten	58.947.257	56.569.485	*Banten*
Panjang	47.537.918	53.881.743	*Panjang*
Palembang	33.659.175	41.618.094	*Palembang*
Teluk Bayur	33.540.977	29.366.885	*Teluk Bayur*
Pontianak	16.416.580	10.859.143	*Pontianak*
Bengkulu	5.673.030	7.070.764	*Bengkulu*
Cirebon	3.600.754	4.667.719	*Cirebon*
Pangkal Balam	3.085.964	3.962.634	*Pangkal Balam*
Tanjung Pandan	62.863	-	*Tanjung Pandan*
Sub-total	583.792.845	525.490.666	*Sub-total*
Jasa kapal - Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)			***Ship services - Private port***
Banten	130.964.355	60.617.206	*Banten*
Palembang	58.400.975	95.296.035	*Palembang*
Teluk Bayur	13.870.791	12.537.062	*Teluk Bayur*
Panjang	10.584.675	7.807.483	*Panjang*
Tanjung Priok	8.986.457	-	*Tanjung Priok*
Pontianak	6.226.762	14.001.027	*Pontianak*
Pangkal Balam	921.871	878.025	*Pangkal Balam*
Cirebon	371.321	-	*Cirebon*
Bengkulu	285.944	386.732	*Bengkulu*
Jambi	61.228	-	*Jambi*
Tanjung Pandan	17.957	-	*Tanjung Pandan*
Sub-total	230.692.336	191.523.570	*Sub-total*
Jasa kapal - Terminal khusus			***Ship services - Special port***
Palembang	153.007.186	112.373.749	*Palembang*
Maluku Utara	130.478.006	72.541.192	*North Maluku*
Cirebon	63.157.294	79.965.515	*Cirebon*
Meulaboh	57.677.127	13.661.811	*Meulaboh*
Tanjung Priok	39.954.215	36.760.943	*Tanjung Priok*
Banten	37.012.941	21.024.997	*Banten*
Batam & Nipa	5.270.720	5.143.468	*Batam & Nipa*
Panjang	207.690	980.478	*Panjang*
Jambi	-	1.295.464	*Jambi*
Sub-total	486.765.179	343.747.617	*Sub-total*

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

32. *SEGMENT INFORMATION (continued)*

Information concerning the Company geographical segment are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Jasa pengelolaan kapal			***Fleet management services***
Tanjung Priok	-	9.800.000	*Tanjung Priok*
Pontianak	-	5.040.000	*Pontianak*
Panjang	-	4.830.000	*Panjang*
Palembang	-	4.830.000	*Palembang*
Teluk Bayur	-	2.660.000	*Teluk Bayur*
Cirebon	-	980.000	*Cirebon*
Bengkulu	-	840.000	*Bengkulu*
Jambi	-	840.000	*Jambi*
Pangkal Balam	-	840.000	*Pangkal Balam*
Tanjung Pandan	-	840.000	*Tanjung Pandan*
Sub-total	-	31.500.000	*Sub-total*
Jasa pengangkutan dan lainnya			***Freight and other services***
Cirebon	43.779.897	46.275.622	*Cirebon*
Sub-total	43.779.897	46.275.622	*Sub-total*
Total	**1.345.030.257**	**1.138.537.475**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Tanjung Priok	310.677.126	304.423.631	*Tanjung Priok*
Panjang	65.749.524	58.992.741	*Panjang*
Banten	69.575.325	59.849.588	*Banten*
Palembang	26.091.260	14.131.954	*Palembang*
Lain-lain	239.050.170	195.225.160	*Others*
Total	**711.143.405**	**632.623.074**	***Total***

Aset tidak lancar - lain-lain terutama merupakan aset tetap - neto, aset hak - guna - neto, aset pajak tangguhan - neto dan taksiran tagihan restitusi pajak.

Non-current assets - others represent fixed assets - net, right of use asset - net, deferred tax assets - net and estimated claims for tax refund.

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi mengenai segmen yang dilaporkan dengan rekonsiliasi antara ukuran segmen dengan jumlah yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information about reportable segments and reconciliation between segment measure and the amount recognized in the Financial Statement are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/*Year ended December 31, 2024*				
	Jasa Kapal/ *Vessel Service*	**Jasa pengangkutan dan lainnya/ *Freight and Other services***	**Jasa pengelolaan kapal/ *Fleet management services***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	1.301.250.360	43.779.897	-	1.345.030.257	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan segmen	(897.075.453)	(29.817.458)	-	(926.892.911)	*Segment cost of revenues*
Laba bruto				**418.137.346**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi				(203.273.321)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya				1.341.816	*Other operating income*
Beban operasi lainnya				(8.801.910)	*Other operating expenses*
Laba usaha				**207.403.931**	***Income from operation***
Pendapatan keuangan				17.932.644	*Finance income*
Beban keuangan				(11.148.283)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan				**214.188.292**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan					***Corporate income tax***
Kini				(53.345.429)	*Current*
Tangguhan				6.000.020	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**166.842.883**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**166.842.883**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan liabilitas					*Assets and liabilities*
Aset segmen	835.688.953			835.688.953	*Segment assets*
Aset yang tidak dapat dialokasikan				814.292.062	*Unallocated assets*
Total aset				1.649.981.015	***Total assets***
Liabilitas segmen	312.544.405			312.544.405	*Segment liabilities*
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				48.326.433	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**360.870.838**	***Total liabilities***
Informasi lainnya					***Other information***
Penyusutan segmen	145.722.208			145.722.208	*Segment depreciation*
Penyusutan segmen yang tidak dapat dialokasikan				9.843.985	*Unallocated segment depreciation*

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

32. *SEGMENT INFORMATION (continued)*

Information concerning the Company geographical segment are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/*Year ended December 31, 2023*				
	Jasa Kapal/ *Vessel Service*	**Jasa pengangkutan dan lainnya/ *Freight and Other services***	**Jasa pengelolaan kapal/ *Fleet management services***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen	1.060.761.853	46.275.622	31.500.000	1.138.537.475	*Segment operating revenues*
Beban pokok pendapatan segmen	(723.047.378)	(32.465.516)	(22.099.406)	(777.612.300)	*Segment cost of revenues*
Laba bruto				**360.925.175**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi				(186.618.278)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya				10.181.184	*Other operating income*
Beban operasi lainnya				(729.210)	*Other operating expenses*
Laba usaha				**183.758.871**	***Income from operation***
Pendapatan keuangan				14.958.550	*Finance income*
Beban keuangan				(2.773.465)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan				**195.943.956**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan					***Corporate income tax***
Kini				(38.604.820)	*Current*
Tangguhan				322.852	*Deferred*
Laba tahun berjalan				**157.661.988**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				-	*Other comprehensive income*
Total laba komprehensif tahun berjalan				**157.661.988**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan liabilitas					*Assets and liabilities*
Aset segmen	654.295.298			654.295.298	*Segment assets*
Aset yang tidak dapat dialokasikan				867.839.350	*Unallocated assets*
Total aset				**1.522.134.648**	***Total assets***
Liabilitas segmen	236.914.228			236.914.228	*Segment liabilities*
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				44.700.680	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas				**281.614.908**	***Total liabilities***
Informasi lainnya					***Other information***
Penyusutan segmen	67.014.610			67.014.611	*Segment depreciation*
Penyusutan segmen yang tidak dapat dialokasikan				10.691.765	*Unallocated segment depreciation*

33. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS / *33. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION*

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Significant activities which did not affect the Company's cash flows are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2024	**2023**	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	153.687.551	68.305.635	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	2.893.934	4.308.829	*Addition of fixed assets through trade payables*

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Liabilitas sewa	39.515.452	(120.788.859)	19.248.571	153.687.551	91.662.715	*Lease liabilities*

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Liabilitas sewa	7.028.581	(38.535.789)	2.717.025	68.305.635	39.515.452	*Lease liabilities*

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Referensi Silang SEOJK No. 16 SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference NO. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	✓
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f. Direksi: Board of Directors:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓

Keterangan Description	Halaman Page
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 2) for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. 2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	✓
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	✓
Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	✓
Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	✓
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	✓

Keterangan Description	Halaman Page
Bentuk Laporan Report Format	
Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	✓
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	✓
Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	✓
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam *Portable Document Format* (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	✓
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	16-18
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	19-21
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	49-61
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	41-47
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	64-136
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	138-199
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	224-455
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	456-459
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	460-554
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	62-63
Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	16-18
» pendapatan/penjualan; income/sales;	16-18

Keterangan Description	Halaman Page
» laba bruto; gross profit;	16-18
» laba (rugi); profit (loss);	16-18
» jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	16-18
» total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	16-18
» jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	16-18
» laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	16-18
» jumlah aset; total assets;	16-18
» jumlah liabilitas; total liabilities;	16-18
» jumlah ekuitas; total equity;	16-18
» rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	17
» rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	17
» rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	17
» rasio lancar; current ratio;	17
» rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	17
» rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	17
» informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	17
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	19
» saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	19
c. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	19
d. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	19
e. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	19

Keterangan Description	Halaman Page
f. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	19
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	
dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	20
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	✓
b. rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	
dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	20
dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	
Laporan Direksi Board of Directors' Report	
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	49-61
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	51-56
» strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	51-53
» peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	53
» proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	54
» perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	54-55
» kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	55-56

Keterangan Description	Halaman Page
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	57-58
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	58-60
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	42-43
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	44
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	44-45
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	64-136
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	66, 73
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	67-68
» alamat; address;	
» nomor telepon; telephone number;	
» alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	
» alamat situs web; website address;	
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	69-73
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	82-88
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	76-79
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	80-81

Keterangan Description	Halaman Page
g. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	92-93
h. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	90
i. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	101-105
» nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	
» foto terbaru; recent photograph;	
» usia; age;	
» kewarganegaraan; nationality;	
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
j. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	
k. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	
l. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
» hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	
» perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	101-102

Keterangan Description	Halaman Page
a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	94-99
» nama dan jabatan; name and position;	
» foto terbaru; recent photograph;	
» usia; age;	
» kewarganegaraan; nationality;	
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
b. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	
c. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	
d. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	
e. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
» hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	
» pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	98-99, 272-273
» perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	94-95
dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	95, 102

Keterangan Description	Halaman Page
jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	117-118
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	120-121
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	121
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	96-99, 103-105, 123-124
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	120-121
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	123-124
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	123-124
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	122
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	122
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	126
nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	127

Keterangan Description	Halaman Page
kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	129-130
informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	130
informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	131, 357-358
a. nama dan alamat; name and address;	131, 357-358
b. periode penugasan; assignment period;	
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	
d. biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	
nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	132
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	140-199
tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	149-160
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	150-155
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	156-158
c. profitabilitas; profitability;	156-158

Keterangan Description	Halaman Page
kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	161-170
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	162-167
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	167-169
c. ekuitas; equity;	170
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	170-174
e. arus kas; cash flows;	174-175
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	175-177
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	178-179
struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	179-180
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	181
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	181
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	182
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	194-195
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	182-183

Keterangan Description	Halaman Page
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	
b. laba (rugi); profit (loss);	
c. struktur modal (*capital structure*); atau capital structure; or	
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	183
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	
b. laba (rugi); profit (loss);	
c. struktur modal (*capital structure*); capital structure;	
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	147
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	185-186
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	185
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	186
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	185
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	185
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	186
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	

Keterangan Description	Halaman Page
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	186-187
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	186-187
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	191
pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	
peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	
untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	190
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	

Keterangan Description	Halaman Page
untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	190
dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	195-196
perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	196-197
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	224-455
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	245-261
» Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	247-259
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	247-259
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	247-259
b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	247, 257
Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	273-284
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; a. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	278-282
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	✓
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	274

Keterangan Description	Halaman Page
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	306-312
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	309, 312
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	283-284
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	283
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	283-284
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	284
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	284
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	284
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	262-271
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	263-264
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	262
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	301-309
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	309
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	268-269
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	292-299

Keterangan Description	Halaman Page
» prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	292
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	292. 294-295
» pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	294, 299
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	270-271
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	270-271
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	270-271
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	299-301
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	273, 262
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	300
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	300
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	300
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	300-301
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	N/A
a. nama; name;	
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	

Keterangan Description	Halaman Page
Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	318-328
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	320-322, 98
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	320
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	322
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	327
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	327
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	328
komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 7) the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	328-336
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	330, 96
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	

Keterangan Description	Halaman Page
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	329
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	331
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	335-336
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	331-333
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); a statement that it has a guideline or charter;	328
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	333-335
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	336
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	-
» alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	
» pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	337-346
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	339-340, 97
b. usia; age;	
c. riwayat pendidikan; educational history;	
d. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	339-340, 97
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	339-340, 97
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	339-340, 97
e. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	338
f. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	340
g. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	346

Keterangan Description	Halaman Page
h. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	340-343
i. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	328
j. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	333-335
k. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	346
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	347-350
a. nama; name;	348
b. domisili; domicile;	
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	349-350
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	350
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	351-356
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	351
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	351-352
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	352
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	352, 354
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	355
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	354
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	353-354
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	352

Keterangan Description	Halaman Page
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	355-356
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	361-363
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	361
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	362-363
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	363
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	364-371
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	364-365
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	367-368
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	369-370
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	370-371
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	372
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	374-378
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	374-375
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	378
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	376

Keterangan Description	Halaman Page
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	187-189
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	✓
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	125
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	✓
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	386-389
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	387
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	388
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	
uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	379-383
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	382-383

Keterangan Description	Halaman Page
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	381-382
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	
penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	391-395
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	✓
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	456-459
Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	✓
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	
h. lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	
tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	

Keterangan Description	Halaman Page
Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	
Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	
Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	460-554

Keterangan Description	Halaman Page
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	62-63

Annual Report
2024
Laporan Tahunan

Navigating Trade Growth Through Innovative Port Services

Menavigasi Pertumbuhan Perdagangan Melalui
Layanan Jasa Kepelabuhanan yang Inovatif

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No.9
Lt. 8 & 9, RT.6/RW.13, Rawabadak
Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 14230
Telp : +62 21 4306789
Email : corsec@ipcmarine.co.id

www.ipcmarine.co.id